

ENDLESS EXCELLENCE LIMITLESS GROWTH



2023

LAPORAN TAHUNAN
ANNUAL REPORT

ENDLESS EXCELLENCE **LIMITLESS GROWTH**

LAPORAN TAHUNAN | 2023 | *ANNUAL REPORT*

PT ASDP INDONESIA FERRY (PERSERO)

KEUNGGULAN DAN PERTUMBUHAN YANG TANPA BATAS

Pada tahun 2023, Perusahaan berfokus pada peningkatan kualitas dan keunggulan Perusahaan pada segala aspek. Perusahaan percaya bahwa seiring meningkatnya kualitas dan keunggulan Perusahaan, akan berdampak pada pertumbuhan kinerja.

Komitmen ini diwujudkan melalui inovasi dan dedikasi dalam memperkuat kualitas dan keunggulan Perusahaan di antaranya dari aspek operasional dan pelayanan sehingga dapat memberikan pengalaman terbaik bagi pengguna jasa baik pada lini bisnis pelabuhan, penyeberangan maupun aneka jasa dan kerja sama.

Pada tahun 2023, Perusahaan memiliki *game changer* dengan tema *People & Culture* yang mengedepankan pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) dan penguatan terhadap internalisasi budaya Perusahaan. Sebagai perusahaan yang bergerak di bidang jasa, Perusahaan menyadari bahwa kualitas SDM yang mumpuni menjadi salah satu *key success factor* untuk menciptakan kualitas layanan terbaik dan keunggulan kompetitif.

Perusahaan juga melakukan eksplorasi terhadap berbagai peluang baru sesuai dengan visi dan misi Perusahaan, terutama di bidang *waterfront tourism* sebagai salah satu *core business* baru serta memperluas jangkauan bisnis pelabuhan dan penyeberangan melalui pertumbuhan organik dan anorganik.

Perusahaan meyakini bahwa langkah strategis yang dilakukan di tahun 2023 dapat mendorong pertumbuhan bisnis yang tidak terbatas dan berkelanjutan, baik dari sisi bisnis maupun operasional, dan dapat menjadi pemimpin dalam industri pelabuhan, penyeberangan, dan *waterfront tourism*.

ENDLESS EXCELLENCE LIMITLESS GROWTH

In 2023, the Company focused on improving Company's quality and excellence in all aspects. The Company believes that increasing Company's quality and excellence would impact the performance growth.

The commitment was realized through innovation and dedication aimed at enhancing the Company's quality and excellence, including operations and services. All this was aimed at delivering the best customer experience across our port, ferry, miscellaneous services, and joint operations business lines.

In 2023, the Company introduced a game changer themed People & Culture, that prioritized Human Resources (HR) development and strengthened the immersion of Company culture. Operating in the service sector, the Company recognized that qualified human resources is one of the key success factors in creating the best service quality and competitive advantage.

The Company also explored various new opportunities in alignment with the Company's vision and mission, especially in the waterfront tourism, as one of the new core businesses while expanding the port and ferry business through organic and inorganic growth.

The Company believes that the strategic steps taken in 2023 have set the stage for unlimited and sustainable business growth in both business operations and strategic development, positioning us to become a leader in the port, ferry, and waterfront tourism industries.



SANGKALAN

DISCLAIMER

Dalam dokumen ini terdapat rencana, proyeksi, strategi dan tujuan Perusahaan tertentu, yang bukan merupakan pernyataan fakta historis dan perlu dipahami sebagai pernyataan mengenai masa depan. Pernyataan mengenai masa depan tergantung pada risiko dan ketidakpastian yang dapat menyebabkan keadaan dan hasil aktual Perusahaan di masa depan berbeda dari yang diharapkan atau diindikasikan. Tidak ada jaminan bahwa hasil yang diantisipasi oleh Perusahaan atau diindikasikan oleh pernyataan-pernyataan mengenai masa depan, akan tercapai.

This document contains Company's plans, projections, strategies, and objectives that are not statements of historical facts and should be understood as statements concerning the future. Statements concerning the future depend on the risks and uncertainties that may cause the Company's actual circumstances and results in the future to differ from expected or indicated. There is no guarantee that results anticipated by the Company or indicated by statements concerning the future will be achieved.

KESINAMBUNGAN TEMA

THEME CONTINUITY

2023
**ENDLESS EXCELLENCE
LIMITLESS GROWTH**



2021
**GOING WORLD-CLASS
BEYOND PORT AND FERRY**

2022
**MAINTAINING EXCELLENCE
FOR A WORLD-CLASS
PERFORMANCE**



DAFTAR ISI

TABLE OF CONTENTS

Sampul Cover	1	Kesinambungan Tema Theme Continuity	5
Penjelasan Tema Theme Description	2	Daftar Isi Table of Contents	6
Sangkalan Disclaimer	4		



01

RINGKASAN KINERJA 2023

PERFORMANCE HIGHLIGHTS 2023

Ringkasan Kinerja 2023 |
2023 Performance Highlights 14

Ikhtisar Keuangan |
Financial Overview 16

Ikhtisar Operasional |
Operational Overview 19

Peristiwa Penting Tahun 2023 |
Significant Events in 2023 20

02

LAPORAN MANAJEMEN

MANAGEMENT'S REPORT

Laporan Dewan Komisaris | The
Board of Commissioners' Report 27

Perubahan Komposisi
Dewan Komisaris | Changes in
the Composition of the Board
of Commissioners 37

Laporan Direksi | The Board Of
Directors' Report 41

Perubahan Komposisi
Direksi | Changes in Board of
Directors' Composition 55

Pernyataan Tanggung Jawab Atas
Laporan Tahunan 2023 | Statement
of Responsibility for the 2023
Annual Report 58

03

PROFIL PERUSAHAAN

COMPANY PROFILE

Identitas Perusahaan |
Company Identity 62

Riwayat Singkat Perusahaan |
Company History in Brief 64

Perubahan Nama Perusahaan |
Changes in Company's Name 66

Jejak Langkah Perusahaan |
Company Milestones 68

Logo Perusahaan | The
Company Logo 70

Visi, Misi, dan
Tata Nilai Perusahaan |
Vision, Mission and Core Values 72

Kegiatan dan Bidang Usaha |
Business Activities and Lines 75

Wilayah Operasional
Perusahaan | Company
Operational Area 77

Struktur Organisasi |
Organizational Structure 80

Profil Dewan Komisaris | Profiles
of The Board of Commissioners 82

Profil Direksi Profiles of The Board of Directors	94

Profil D-1 Profile of BoD-1	106

Demografi Karyawan dan Pengembangan Kompetensi Employee Demographics and Competency Development	112

Pengembangan Kompetensi Karyawan Employee Competency Development	117

Struktur dan Komposisi Pemegang Saham Structure and Composition of Shareholders	122

Struktur Grup Perusahaan Company Group Structure	124

Daftar Entitas Anak List of Subsidiaries	125

Kronologis Pencatatan Efek Lainnya Chronology of Listing of Other Securities	130

Kantor Akuntan Publik Public Accounting Firm	130

Lembaga dan/atau Profesi Penunjang Institutions and/or Supporting Professions	131

Penghargaan dan Sertifikasi Awards and Certifications	132

Keanggotaan Asosiasi Association Membership	133

Informasi Website Perusahaan Company Website Information	134

Akses Informasi Perusahaan, Kantor Regional dan Kantor Cabang Company's Information Access, Regional Offices, and Branch Offices	136

04

TINJAUAN PENDUKUNG BISNIS

BUSINESS SUPPORT REVIEW

Sumber Daya Manusia Human Resources	140

Teknologi Informasi Information Technology	150

05

ANALISA DAN PEMBAHASAN MANAJEMEN

MANAGEMENT DISCUSSION AND ANALYSIS

Tinjauan Ekonomi dan Industri Economic and Industry Overview	158

Aspek Pemasaran dan Pangsa Pasar Marketing Aspects and Market Share	164

Tinjauan Kinerja Operasi per Segmen Usaha Operational Performance Overview per Business Segment	166

Tinjauan Kinerja Keuangan Financial Performance Overview	174

Struktur Modal dan Kebijakan atas Struktur Modal Capital Structure and Policy on Capital Structure	201

Kontribusi Kepada Negara Contribution to the Country	203	Perubahan Peraturan Perundang-undangan yang Berpengaruh Signifikan Terhadap Perusahaan Regulatory Changes and the Significant Impact on the Company	231
Perbandingan Antara Target 2023, Realisasi 2023 dan Proyeksi 2024 Comparison between 2023 Target, 2023 Realization, and 2024 Projection	205	Perubahan Kebijakan Akuntansi dan Dampaknya terhadap Perusahaan Changes in Accounting Policies and The Impact on the Company	234
Tingkat Kesehatan Perusahaan dan Realisasi Pencapaian KPI Company Health Level and Realization of KPI Achievement	214	Informasi Kelangsungan Usaha Information on Business Continuity	234
Kebijakan Dividen Dividend Policy	216	Prospek Usaha Business Prospect	236
Ikatan Material untuk Investasi Barang Modal Material Commitments for Capital Investment	218		
Investasi Barang Modal Capital Investment	218		
Informasi Transaksi Material yang Mengandung Benturan Kepentingan Information on Material Transactions Containing a Conflict of Interest	219		
Informasi Material Mengenai Investasi, Ekspansi, Divestasi, Akuisisi, dan Restrukturisasi Material Information Regarding Investment, Expansion, Divestment, Acquisition, and Restructuring	229		
Informasi Keuangan yang Mengandung Kejadian Luar Biasa Financial Information Containing Extraordinary Events	230		
Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Actual Use of Proceeds from Public Offering	230		
Informasi dan Fakta Material Setelah Laporan Akuntan Material Information and Facts After the Accountant's Report	231		

06

TATA KELOLA
PERUSAHAAN

CORPORATE GOVERNANCE

Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik Implementation of Good Corporate Governance	242
Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) General Meeting of Shareholders (GMS)	250
Dewan Komisaris Board of Commissioners	257
Direksi Board of Directors	276
Hubungan Afiliasi Serta Hubungan Kerja Dewan Komisaris dan Direksi Affiliate Relationships and Working Relationships of the Boards of Commissioners and Directors	290

Nominasi dan Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi Nomination and Remuneration for the Boards of Commissioners and Directors	292	Pedoman Etika Perusahaan/ Kode Etik Company Ethics Guidelines/ Code of Conduct	400
Kebijakan Kepemilikan Saham oleh Dewan Komisaris dan Direksi Share Ownership Policy by the Boards of Commissioners and Directors	300	Kebijakan Anti Korupsi dan Gratifikasi Anti-Corruption and Gratification Policy	407
Kebijakan Keberagaman Komposisi Dewan Komisaris dan Direksi Policy on Diversity Composition of the Board of Commissioners and Directors	300	Sistem Pelaporan Dugaan Pelanggaran Whistleblowing System	411
Organ Pendukung Dewan Komisaris Supporting Organs of the Board of Commissioners	303	Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara Report of State Officials' Wealth	420
Organ Pendukung Direksi Supporting Organs of the Board of Directors	334	Informasi Pemberian Dana Untuk Kegiatan Sosial, dan Politik Information on Providing Funds for Social and Political Activities	423
Akuntan Publik Public Accountant	358	Pengadaan Barang dan Jasa Procurement of Goods and Services	424
Sistem Pengendalian Internal Internal Control System	361	Transparansi Praktik Kepatuhan Transparency of Compliance Practices	430
Manajemen Risiko Risk Management	368		
Perkara Hukum yang Berdampak Material yang Dihadapi Perusahaan, Entitas Anak, Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Legal Cases that Have a Material Impact to the Company, Subsidiaries, Members of the Board of Directors and Board of Commissioners	392		
Sanksi Administratif Administrative Penalty	395		
Akses Data dan Informasi Perusahaan Data Access and Company Information	395		

07

TANGGUNG
JAWAB SOSIAL
DAN LINGKUNGANSOCIAL & ENVIRONMENTAL
RESPONSIBILITY

Tata Kelola Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Governance of Social and Environmental Responsibility	436

Strategi Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Strategy in Social and Environmental Responsibility	445

Tanggung Jawab Sosial Aspek Hak Asasi Manusia Social Responsibility Aspects of Human Rights	451

Tanggung Jawab Sosial Aspek Ketenagakerjaan, Kesehatan, dan Keselamatan Kerja Social Responsibility Aspects of Employment, Occupational Health and Safety	458

Tanggung Jawab Sosial Aspek Sosial dan Kemasyarakatan Social Responsibility Aspects of Social and Community	467

Tanggung Jawab Sosial Aspek Produk dan/atau Jasa serta Pelanggan Social Responsibility Aspects of Products and/or Services and Customers	471

Tanggung Jawab Sosial Aspek Lingkungan Hidup Social Responsibility Environmental Aspects	474

Referensi SEOJK No.16/SEOJK.04/2021 Reference of SEOJK No.16/SEOJK.04/2021	480

08

LAPORAN
KEUANGAN

FINANCIAL REPORTS

Laporan Keuangan Financial Reports	497





01

RINGKASAN KINERJA 2023

2023 PERFORMANCE HIGHLIGHTS



KINERJA TAHUN 2023

PERFORMANCE IN 2023

RINGKASAN KINERJA 2023

2023 PERFORMANCE HIGHLIGHTS



NILAI ASET
ASSETS

Rp11,05
TRILIUN | TRILLION



TINGKAT KESEHATAN
PERUSAHAAN
COMPANY HEALTH

AA+



PENDAPATAN
REVENUE

Rp4,92
TRILIUN | TRILLION



KEY PERFORMANCE
INDICATOR
KEY PERFORMANCE
INDICATOR

105,88%



LABA BERSIH
INCOME FOR THE YEAR

Rp636,5
MILIAR | BILLION

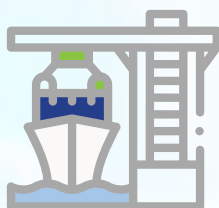


ASSESSMENT GCG
GCG ASSESSMENT

96,314%

(Klasifikasi Kualitas Penerapan GCG
Sangat Baik)
(Classification of GCG Implementation
Quality is Very Good)

PRODUKSI PELABUHAN
PORT OUTPUT



JASA SANDAR
DOCKING SERVICES

997.786.012
GRT-CALL

PAS PENUMPANG
PASSENGER PASS

5.166.438
ORANG | PERSONS

PAS KENDARAAN
VEHICLE PASS

13.140.673
UNIT | UNITS

PAS PARKIR
PARKING PASS

210.868
UNIT | UNITS

PEMELIHARAAN DERMAGA
DOCK MAINTENANCE

13.140.673
UNIT | UNITS



ANEKA JASA DAN
KERJA SAMA USAHA
MISCELLANEOUS SERVICES
AND JOINT OPERATIONS

96.108.127
LITER BBM |
LITRES OF FUEL

PRODUKSI PENYEBERANGAN
FERRIAGE OUTPUTPERJALANAN
TRIPS**323.668**PENUMPANG
PASSENGER**6.505.663**
ORANG | PERSONSKENDARAAN RODA 2
2-WHEELED VEHICLES**4.177.538**
UNIT | UNITSKENDARAAN RODA 4
4-WHEELED VEHICLES**4.483.918**
UNIT | UNITSBARANG
GOODS**997.211**
TON | TONS**JUMLAH KARYAWAN**
TOTAL EMPLOYEES**4.738**
ORANG | PERSONS**BIAYA
PENGEMBANGAN
KOMPETENSI**
COMPETENCY DEVELOPMENT
EXPENSE**Rp19**
MILIAR | BILLION**RATA-RATA JAM
PELATIHAN**
AVERAGE TRAINING HOURSRATA-RATA
AVERAGE**32 JAM/
KARYAWAN**

32 HOURS/EMPLOYEE

KARYAWAN DARAT
OFFICE EMPLOYEES**27 JAM/
KARYAWAN**

27 HOURS/EMPLOYEE

KARYAWAN LAUT
MARINE EMPLOYEES**5 JAM/
KARYAWAN**

5 HOURS/EMPLOYEE

**KEPUASAN KARYAWAN**
EMPLOYEE SATISFACTION**4,02/5,00**
4.02 /5.00**PENYALURAN
DANA TJSL**
DISTRIBUTION OF
CSR FUNDS**Rp8,58**
MILIAR | BILLION

IKHTISAR KEUANGAN

FINANCIAL OVERVIEW

Posisi Keuangan Konsolidasi Consolidated Financial Position

(Dalam Juta Rupiah)
(In Million Rupiah)

Uraian Description	2019	2020	2021	2022	2023
Aset Lancar Current Assets	1.930.778	1.791.033	2.180.452	1.696.767	1.949.764
Aset Tidak Lancar Non-Current Assets	5.669.119	6.080.296	6.040.684	8.314.480	9.105.937
Jumlah Aset Total Assets	7.599.897	7.871.329	8.221.136	10.011.247	11.055.701
Liabilitas Jangka Pendek Current Liabilities	922.468	905.850	672.049	919.747	1.213.186
Liabilitas Jangka Panjang Non-Current Liabilities	201.605	337.235	641.613	1.622.473	1.457.803
Jumlah Liabilitas Total Liabilities	1.124.073	1.243.085	1.313.662	2.542.220	2.670.989
Jumlah Ekuitas Total Equity	6.475.824	6.628.244	6.907.475	7.469.026	8.384.712
Jumlah Liabilitas dan Ekuitas Total Liabilities and Equity	7.599.897	7.871.329	8.221.136	10.011.247	11.055.701

Laba Rugi Konsolidasi Consolidated Profit & Loss

(Dalam Juta Rupiah)
(In Million Rupiah)

Uraian Description	2019	2020	2021	2022	2023
Pendapatan Revenue	3.125.252	3.042.520	3.487.204	4.322.161	4.924.834
Usaha Penyeberangan Ferry Segment	1.900.547	1.886.961	2.219.350	2.846.095	3.298.840
Usaha Pelabuhan Port Segment	776.848	691.276	783.866	951.615	1.047.162
Usaha Aneka Jasa dan Kerja Sama Miscellaneous Services and Joint Operations	447.857	464.283	483.989	524.452	578.832
Beban Pokok Pendapatan Cost of Revenue	(2.303.729)	(2.339.994)	(2.512.574)	(2.890.947)	(3.239.785)
Laba Bruto Gross Profit	821.522	702.526	974.630	1.431.214	1.685.048
Beban Umum dan Administrasi General and Administrative Expenses	(648.240)	(650.677)	(653.175)	(840.689)	(1.088.886)
Pendapatan (Beban) Lain-Lain Other Income (Expenses)	182.240	153.277	37.925	25.660	69.717

Uraian Description	2019	2020	2021	2022	2023
Laba Sebelum Pajak Profit Before Tax	355.522	205.127	359.381	616.186	665.880
Manfaat (Beban) Pajak Tax Benefits (Expenses)	(37.418)	(23.980)	(33.080)	(31.012)	(29.340)
Laba Tahun Berjalan Profit for the Year	318.104	181.147	326.301	585.174	636.540
Pendapatan Komprehensif Lain Other Comprehensive Income	(998)	(25.479)	(24.680)	(23.623)	(8.419)
Jumlah Laba Komprehensif Total Comprehensive Profit	317.105	155.668	301.621	561.552	628.121
Laba dalam Tahun yang Bersangkutan yang dapat Diatribusikan Kepada: Income for the Year Attributable to:					
Pemilik Entitas Induk Parent Entity	351.335	162.397	325.453	563.765	613.449
Kepentingan Non-Pengendali Non-Controlling Interests	33.231	18.750	848	21.409	23.091
Jumlah Pendapatan Komprehensif yang dapat Diatribusikan Kepada: Total Comprehensive Income Attributable to:					
Pemilik Entitas Induk Parent Entity	350.330	136.926	300.818	540.099	604.912
Kepentingan Non-Pengendali Non-Controlling Interests	33.224	18.752	802	21.452	23.209
Laba (Rugi) Bersih per Saham Dasar Net Income (Loss) per Share	78.918	44.941	58.304	113.117	123.046

Arus Kas Konsolidasi Consolidated Cash Flow

(Dalam Juta Rupiah)
(In Million Rupiah)

Uraian Description	2019	2020	2021	2022	2023
Arus Kas dari Aktivitas Operasi Cash Flow from Operating Activities	509.459	382.423	1.040.752	793.374	1.140.567
Arus Kas dari Aktivitas Investasi Cash Flows from Investing Activities	(747.315)	(489.831)	(529.208)	(1.692.870)	(788.888)
Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan Cash Flow from Financing Activities	144	29.887	18.011	382.196	(204.813)
Kenaikan (Penurunan) Bersih Kas dan Setara Kas Increase (Decrease) in Net Cash and Cash Equivalents	237.712	77.520	529.555	(517.299)	146.866
Kas dan Setara Kas Awal Tahun Cash and Cash Equivalents at Beginning of the Year	1.643.564	1.405.852	1.328.830	1.858.784	1.341.491
Kas dan Setara Kas Akhir Tahun Cash and Cash Equivalents at End of Year	1.405.852	1.328.830	1.858.784	1.341.491	1.488.345

Rasio Keuangan Penting Key Financial Ratios

Uraian Description	2019	2020	2021	2022	2023
Rasio Profitabilitas Profitability Ratio					
Tingkat Pengembalian Terhadap Aset (%) Return on Assets (%)	4,20	2,30	3,97	5,85	6,11
Tingkat Pengembalian Terhadap Modal (%) Return on Equity (%)	5,60	2,95	4,72	8,00	8,12
Tingkat Pengembalian Terhadap Investasi (%) Return on Investment (%)	9,14	7,34	10,01	11,43	10,98
Margin Laba Operasional (%) Operating Profit Margin (%)	7,00	1,61	10,05	12,89	11,35
Margin Laba Bersih (%) Net Profit Margin (%)	10,20	5,95	9,19	13,54	12,93
Rasio Likuiditas Liquidity Ratio					
Rasio Lancar (%) Current Ratio (%)	209,00	197,72	324,45	184,48	160,71
Rasio Kas (%) Cash Ratio (%)	152,00	146,69	276,58	145,85	122,68
Rasio Cepat (%) Quick Ratio (%)	205,00	151,48	281,42	149,32	125,70
Rasio Solvabilitas Solvency Ratio					
Rasio Utang Terhadap Modal (%) Debt to Equity Ratio (%)	17,40	5,09	0,09	0,21	0,19
Rasio Utang Terhadap Aset (%) Debt to Asset Ratio (%)	14,80	15,79	15,98	15,65	14,15
Rasio Cakupan Bunga (kali) Interest Coverage Ratio (times)	8,59	5,00	8,19	4,47	4,40
Rasio Aktivitas Activity Ratio					
Periode Penagihan (hari) Collection Period (days)	6,24	5,20	3,40	2,69	2,72
Perputaran Total Aset (%) Total Asset Turnover (%)	47	40,17	44,13	45,49	51,12
Perputaran Aset Lancar (%) Current Asset Turnover (%)	162	1,78	1,63	2,58	2,58
Perputaran Aset Tetap (%) Fixed Asset Turnover (%)	55	0,61	0,68	0,60	0,62
Perputaran Modal Kerja (%) Working Capital Turnover (%)	310	3,61	2,35	5,64	6,83

IKHTISAR OPERASIONAL

OPERATIONAL OVERVIEW

Produksi Pelabuhan Port Output

Uraian Description	2019	2020	2021	2022	2023
Jasa Sandar (GRT-Call) Docking Services (GRT-Call)	950.941.500	908.720.708	926.983.944	949.820.444	997.786.012
Pas Pelabuhan Penumpang (Orang) Passenger Pass (Person)	8.009.853	3.804.732	3.317.311	4.541.042	5.166.438
Pas Pelabuhan Kendaraan (Unit) Vehicle Pass (Unit)	13.347.910	9.745.688	10.124.657	12.343.696	13.140.673
Pas Pelabuhan Jasa Parkir (Unit) Parking Pass (Unit)	376.708	218.752	253.396	247.154	210.868
Jasa Pemeliharaan Dermaga (Unit) Dock Maintenance Services (Unit)	13.347.454	9.745.686	10.123.031	12.342.656	13.140.673

Produksi Penyeberangan Ferriage Output

Uraian Description	2019	2020	2021	2022	2023
Trip Trip	242.294	208.389	206.258	318.979	323.668
Penumpang (Orang) Passenger (Person)	7.255.852	3.950.273	4.429.612	7.622.313	6.505.663
Kendaraan Roda 2 dan 3 2-Wheeled and 3-Wheeled Vehicles	4.094.552	2.736.988	2.395.657	4.079.129	4.177.538
Kendaraan Roda ≥4 ≥4-Wheeled Vehicles	2.643.336	2.076.469	2.924.619	4.401.092	4.483.918
Jumlah Barang (Ton) Goods (Ton)	767.582	2.076.469	2.462.346	2.012.909	997.211

Usaha Aneka Jasa dan Kerja Sama Miscellaneous Services and Joint Operations

Uraian Description	2019	2020	2021	2022	2023
Produksi BBM (Kilo Liter) Fuel Production (Kilo Litre)	99.625	95.678	101.347	101.680	96.108

PERISTIWA PENTING TAHUN 2023

SIGNIFICANT EVENTS IN 2023

Januari January

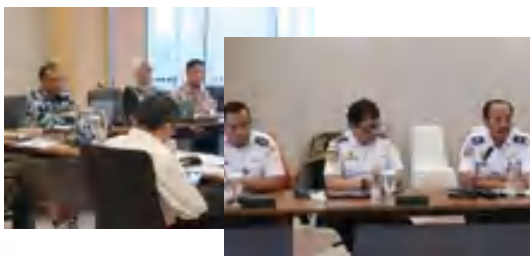


4 Januari 2023 | 4 January 2023

- Pelaksanaan layanan Angkutan Natal dan Tahun Baru 2022/2023 terselenggara dengan sukses dan lancar. | *The 2022/2023 Christmas and New Year Transportation services was implemented successfully and smoothly.*

8 Januari 2023 | 8 January 2023

- Apresiasi dan evaluasi kepada *stakeholders* atas pelaksanaan layanan Angkutan Natal dan Tahun Baru 2022/2023. | *Appreciation and evaluation to stakeholders for the implementation of the 2022/2023 Christmas and New Year Transportation services.*



Maret March



18 Maret 2023 | 18 March 2023

- Melaksanakan program CSR "Ocean Clean Up Day" yang merupakan program bersih-bersih laut dan pantai dari sampah plastik di 27 Kantor Cabang. | *Implemented the "Ocean Clean Up Day" CSR program, a program to clean seas and beaches from plastic waste, in 27 Branch Offices.*

18 Maret 2023 | 18 March 2023

- Peresmian Masjid BSI di area Siger Park, Bakauheni Harbour City oleh Menteri BUMN, Erick Thohir. | *The inauguration of the BSI Mosque at the Siger Park, Bakauheni Harbour City by Minister of SOEs, Erick Thohir.*



27 Maret 2023 | 27 March 2023

- Peresmian logo baru Perusahaan bertepatan dengan HUT ASDP ke-50 sebagai penguat dan *spirit* baru dalam transformasi perusahaan menuju perusahaan berkelas dunia. | *The inauguration of the Company's new logo coincides with ASDP's 50th anniversary to reinforce and instil new spirit in the company's transformation into a world-class company.*
- Peresmian gedung Kantor Pusat bertepatan dengan HUT ASDP ke-50. | *The inauguration of the Head Office building coincided with ASDP's 50th anniversary.*

April



11 April 2023 | 11 April 2023

- Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo meninjau pelaksanaan Angkutan Lebaran di Kantor Cabang Merak. | *The President of the Republic of Indonesia, Joko Widodo inspected the implementation of Eid al-Fitr Transportation at the Merak Branch Office.*

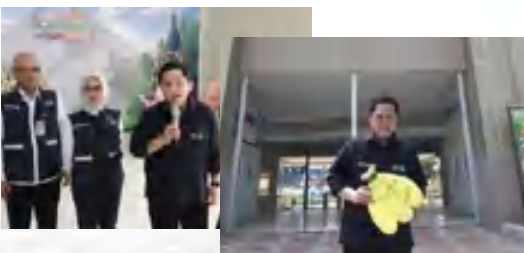


16 April 2023 | 16 April 2023

- Melaksanakan Program CSR Operasi Bibir Sumbing dengan memberikan bantuan biaya operasi gratis untuk 100 anak, berkolaborasi dengan organisasi nirlaba internasional, Smile Train. | *Organized the CSR Program of Cleft Lip Surgery by providing free surgical assistance for 100 children, in collaboration with the international non-profit organization, Smile Train.*

22 April 2023 | 22 April 2023

- Perusahaan melaksanakan *soft opening* Krakatau Park dan Siger Park di Kawasan Bakauheni Harbour City. | *The Company organized the soft opening of Krakatau Park and Siger Park in the Bakauheni Harbour City.*



Mei



13 Mei 2023 | 13 May 2023

- Hotel Meruorah Labuan Bajo menjadi *main venue* untuk KTT ASEAN 2023. | *Hotel Meruorah Labuan Bajo became the main venue for the 2023 ASEAN Summit.*

Juli

8 Juli 2023 | 8 July 2023

- Launching* program ASDP Berkebun sebagai upaya mendukung konsep *Green Building* dan mendorong budaya peduli lingkungan bagi karyawan. | *Launched the ASDP Gardening program as part of the endeavor to support the Green Building concept and encourage environmental care culture among employees.*



Agustus August

15 Agustus 2023 | 15 August 2023

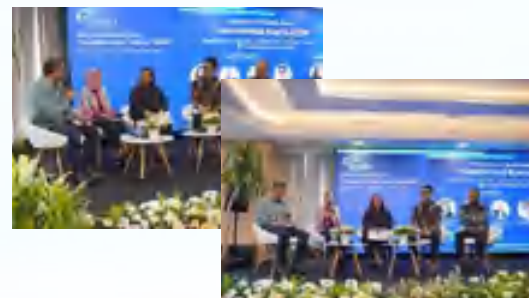
- Perusahaan mengoperasikan Pelabuhan Jangkar yang melayani lintasan Jangkar-Lembar untuk mendukung kelancaran distribusi logistik Jawa-Lombok. | The Company operated the Jangkar Port, which served the Jangkar-Lembar route, to support smooth Java-Lombok logistics distribution.

Oktober October



12 Oktober 2023 | 12 October 2023

- Launching Buku Transformasi ASDP "Elevating Civilization to The Next Level", yang merangkum perjalanan panjang transformasi Perusahaan. | Launched the ASDP Transformation Book titled "Elevating Civilization to The Next Level", which summarized the Company's long transformation journey.



September September

3 September 2023 | 3 September 2023

- Memperingati Hari Pelanggan Nasional yang dilaksanakan di Pelabuhan Eksekutif Merak, sebagai bentuk apresiasi kepada pengguna jasa. | Commemorated National Customer Day at the Merak Executive Harbour, as a way to appreciate the customers.





November November

21 November 2023 | 21 November 2023

- Perusahaan meraih Penghargaan Terbaik oleh Kementerian PANRB terkait “Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan kategori Badan Usaha Milik Negara”. | The Company was awarded as the Best of “Monitoring and Evaluation of Service Performance under the category of State-Owned Enterprises”, by the Ministry of Administrative and Bureaucratic Reform.

23 November 2023 | 23 November 2023

- Penobatan Ferizy Ambassador sebagai *role model* yang secara aktif melakukan sosialisasi dan edukasi mengenai Ferizy *digital operations mindset* kepada seluruh karyawan dan *stakeholders*. | The appointment of Ferizy Ambassadors as role models who actively socialized and provided education on Ferizy digital operations mindset to all employees and stakeholders.



Desember December

17 Desember 2023 | 17 December 2023

- Peluncuran Aplikasi Digitalisasi *Monitoring Armada*, yang berkolaborasi dengan Telkomsel untuk optimalisasi pola perawatan dan pemeliharaan armada. | Launched an application of digitalized fleet monitoring in collaboration with Telkomsel to optimize fleet care and maintenance patterns.



02 LAPORAN MANAJEMEN

MANAGEMENT REPORT





Dewan Komisaris memberikan apresiasi kepada seluruh jajaran Direksi dan Ferizyan atas usaha dan dedikasinya sepanjang tahun 2023.

Dengan usaha dan dedikasi yang telah dicurahkan, Perusahaan dapat mencapai kinerja yang solid dan sehat di tengah kondisi perekonomian maupun situasi geopolitik global yang penuh ketidakpastian.

The Board of Commissioners expresses appreciation to the Board of Directors and all Ferizyans for their efforts and dedication throughout 2023.

Their efforts and dedications allowed the Company to successfully achieve robust and healthy performance amidst the uncertain economic conditions and global geopolitical situation.

SAIFUL HAQ MANAN

Komisaris Utama
President Commissioner

LAPORAN DEWAN KOMISARIS

THE BOARD OF COMMISSIONERS' REPORT

Para Pemegang Saham dan Pemangku
Kepentingan yang Terhormat,

Segala puji dan syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga Perusahaan berhasil melalui tahun 2023 yang merupakan tahun penuh dinamika dengan kinerja yang membanggakan. Dalam kesempatan yang baik ini, perkenankan saya mewakili Dewan Komisaris untuk menyampaikan laporan pengawasan pengelolaan usaha PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) kepada pemegang saham dan segenap pemangku kepentingan untuk tahun buku 2023.

Laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris meliputi penilaian kami atas kinerja Direksi dalam pengelolaan Perusahaan, pengawasan terhadap perumusan dan pelaksanaan rencana strategis oleh Direksi serta pandangan umum atas prospek usaha yang disusun oleh Direksi. Di samping itu, Dewan Komisaris juga menyampaikan pandangannya terhadap kinerja keuangan dan operasional, penerapan tata kelola perusahaan, penerapan *whistleblowing system*, dan pandangan atas kinerja organ pendukung Dewan Komisaris.

TINJAUAN EKONOMI MAKRO

Ekonomi global di tahun 2023 diawali dengan pesimisme setelah munculnya ancaman perlambatan perekonomian global dalam laporan *Global Economic Prospects* yang dirilis oleh Bank Dunia. Pada perjalanan tahun 2023, meskipun pandemi telah berlalu dan ekonomi negara-negara mulai pulih, tensi geopolitik yang terjadi di beberapa belahan dunia kembali menciptakan ketidakpastian dan gejolak ekonomi. Kondisi ini mendorong negara-negara untuk memperketat kebijakan moneter yang tercermin melalui peningkatan suku bunga.

Respected Shareholders and Stakeholders,

All praises and gratitude to the Almighty God for His grace that allowed the Company to successfully navigate the dynamic 2023 with encouraging performance. On this opportunity, allow me to represent the Board of Commissioners in presenting a supervisory report on the management of PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) to all shareholders and stakeholders for the 2023 financial year.

The Board of Commissioners' supervisory report covers our appraisal of the Board of Directors' performance in managing the Company, the supervision on the formulation and implementation of strategic plans by the Board of Directors as well as overview on business prospects prepared by the Board of Directors. Additionally, the Board of Commissioners also expressed our views on financial and operational performance, corporate governance implementation, whistleblowing system implementation, and the performance of the supporting organs of the Board of Commissioners.

MACROECONOMIC REVIEW

The global economy in 2023 kicked off with pessimism after warnings of global economic slowdown in *Global Economic Prospects* report released by the World Bank. During the course of 2023, even though the pandemic had passed and economy started to recover, the geopolitical tension that are occurring in several parts of the world created uncertainty and economic turmoil. This condition led countries to tighten their monetary policies, which was reflected in increased interest rates.

Di tengah kondisi tersebut, pertumbuhan ekonomi dunia di tahun 2023 mencapai 3,0% secara *year-on-year*, melambat dibandingkan tahun 2022 yang mencapai 3,5%. Pelemahan ekonomi tahun 2023 didorong oleh terjadinya tekanan ekonomi negara maju maupun geopolitik, terutama di Eropa dan Timur Tengah. Tekanan ekonomi di antaranya disebabkan oleh tingkat suku bunga yang masih tinggi dan tingkat inflasi di beberapa negara yang masih di atas perkiraan. Sementara itu, tensi geopolitik semakin tinggi dengan pecahnya konflik di Timur Tengah dan konflik Rusia dengan Ukraina yang masih terjadi dan belum mengalami kemajuan pemulihan yang berarti.

Sementara itu inflasi global di bulan November 2023 tercatat sebesar 2,7%, lebih rendah dibandingkan inflasi November tahun 2022 sebesar 6,1%. Inflasi negara-negara maju tercatat menurun dari 5,7% di November 2022 menjadi 0,6% di November tahun 2023, sementara inflasi negara-negara berkembang juga turut menurun dari 7,8% di November tahun 2022 menjadi 3,3% di November tahun 2023.

Di tengah kondisi perekonomian global yang berada dalam ketidakpastian, ekonomi Indonesia berhasil tumbuh sebesar 5,05% didorong oleh pertumbuhan tertinggi pada Lapangan Usaha Transportasi dan Pergudangan sebesar 13,96%. Pertumbuhan ekonomi ditopang oleh kinerja ekspor, di samping oleh seluruh komponen PDB.

Sementara itu, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat inflasi tahunan pada tahun 2023 masih terkendali di angka 2,61%, yang merupakan realisasi inflasi terendah sejak tahun 2000. Pencapaian inflasi 2023 yang lebih rendah dibanding 2022 ini menggambarkan tekanan inflasi yang sudah makin mereda dibandingkan tahun sebelumnya. Catatan ini menunjukkan bahwa ekonomi Indonesia tetap tangguh di tengah ancaman resesi akibat suku bunga, ketegangan geopolitik global, dan berbagai ancaman lainnya.

Under such circumstances, world economic growth in 2023 slowed down to 3.0% year-on-year, compared to 2022 at 3.5%. Economic slowdown in 2023 was mainly influenced by economic pressure from developed countries, as well as geopolitics situation in Europe and the Middle East. Economic pressure was caused by high interest rates and higher than estimated inflation rates in several countries. At the same time, geopolitical tensions increased even further as the conflict in the Middle East broke out and Russia's conflict with Ukraine continued, showing no signs of significant recovery.

Meanwhile, the global inflation in November 2023 was recorded at 2.7%, lower than inflation in November 2022 of 6.1%. Inflation in developed countries decreased from 5.7% in November 2022 to 0.6% in November 2023, while inflation in developing countries also decreased from 7.8% in November 2022 to 3.3% in November 2023.

In the midst of uncertain global economic conditions, Indonesia's economy managed to grow by 5.05% driven by the highest growth in the Transportation and Storage industry at 13.96%. Economic growth was supported by export performance as well as by all components of GDP.

Meanwhile, the Indonesia Central Statistics Agency recorded annual inflation in 2023 was still under control at 2.61%, which was the lowest realized inflation since 2000. The achievement of 2023 inflation rate lower than in 2022 showed that inflationary pressures had eased compared to the previous year. These records showed that Indonesia's economy stays resilient amidst the threats of recession due to interest rates, global geopolitical tensions, and various other risks.

PENILAIAN ATAS KINERJA DIREKSI DAN DASAR PENILAIANNYA

Penilaian kinerja Direksi dilakukan berdasarkan pencapaian Tingkat Kesehatan Perusahaan dan pemenuhan *Key Performance Indicators (KPI)* yang telah ditetapkan oleh pemegang saham. Dalam penilaian tersebut, Dewan Komisaris juga mempertimbangkan perkembangan kondisi eksternal yang dihadapi oleh Perusahaan yang secara langsung ataupun tidak langsung dapat mempengaruhi kinerja Perusahaan sepanjang tahun buku.

Sepanjang tahun 2023, Direksi Perusahaan telah menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik dan meraih pencapaian yang membanggakan. Hal ini tercermin dengan pencapaian Tingkat Kesehatan Perusahaan, dan realisasi Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP), serta melalui pencapaian KPI Direksi dengan kategori Baik. Pada tahun 2023, Perusahaan berhasil memperkuat tingkat kesehatan Perusahaan dengan meraih *rating* AA+ dengan *outlook* “**Stabil**” dari Pefindo. *Rating* tersebut meningkat dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang berada pada *rating* AA.

KPI Korporat menjadi indikator penilaian kinerja bagi Direksi dalam melaksanakan tugas pengelolaan perusahaan. Penetapan KPI Korporat tahun 2023 mengacu pada Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia No. PER-2/MBU/03/2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara dan Kontrak Manajemen Tahunan yang memuat KPI Direksi secara kolektif. KPI Korporat dikelompokkan ke dalam 6 (enam) perspektif, yaitu Nilai Ekonomi dan Sosial Indonesia; Inovasi Model Bisnis; Kepemimpinan Teknologi; Peningkatan Investasi, dan Pengembangan Talenta. Keenam perspektif tersebut diturunkan menjadi 17 indikator yang masing-masing memiliki target, polaritas, dan bobot penilaian.

Pada tahun 2023, realisasi KPI Korporat secara keseluruhan mencapai 105,88% dengan realisasi 15 indikator mencapai target, sementara 2 indikator tidak mencapai target. Indikator yang belum mencapai target terdiri dari indikator

PERFORMANCE APPRAISAL OF THE BOARD OF DIRECTORS AND THE BASIS OF THE APPRAISAL

The performance appraisal of the Board of Directors was carried out based on the achievement of the Company's Health Level and fulfilment of the Key Performance Indicators (KPI) established by the shareholders. In the assessment, the Board of Commissioners also took into account the developments of external conditions faced by the Company, which could directly or indirectly affect the Company's performance throughout the financial year.

Throughout 2023, the Company's Board of Directors has performed their duties and responsibilities well resulting in pleasing accomplishments. This was reflected in the achievements of the Company's Health Level, realization of Work Plan and Budget (WPB), and achieved KPI of the Board of Directors' in the Excellent category. In 2023, the Company succeeded in strengthening the Company's health level by achieving an AA+ rating with a “**Stable**” outlook from Pefindo. This rating improved compared to the AA rating in the previous year.

Corporate KPI is a set of indicators used in appraising the Board of Directors in performing their management duties. Corporate KPIs in 2023 was set with reference to the Regulation of the Minister of State-Owned Enterprises of the Republic of Indonesia No. PER-2/MBU/03/2023 concerning Guidelines on Governance and Significant Corporate Activities of State-Owned Enterprises and Annual Management Contracts, which is comprised of the Board of Directors' KPI as a collegial team. Corporate KPIs are grouped into 6 (six) perspectives, namely Indonesian Economic and Social Values; Business Model Innovation; Technology Leadership; Increased Investment; and Talent Development. These six perspectives are consolidated to 17 indicators, each of which has a target, polarity, and weight.

In 2023, the overall accomplishment of Corporate KPI reached 105.88%. The results showed that 15 indicators met the targets and 2 indicators did not meet the targets. Unmet indicators were the EBITDA and the ratio of ROIC to WACC. On

EBITDA dan perbandingan ROIC dengan WACC. Sementara untuk 15 indikator lainnya telah mencapai target bahkan melampaui target yang ditetapkan dengan sebaran yang merata pada keenam perspektif KPI, terdiri dari indikator:

- *Interest Bearing Debt to Invested Capital;*
- *Interest Bearing Debt to EBITDA;*
- Penataan Pelabuhan (Zonasi);
- Pemenuhan Trip Subsidi;
- Kerja Sama Korporat;
- *Market Share;*
- Produksi Kendaraan;
- Digitalisasi Manajemen Pemeliharaan Kapal & Pelabuhan;
- *IT Maturity Level;*
- Investasi Rehabilitasi atau Revitalisasi Kapal dan Pelabuhan;
- Proyek Bakauheni Harbour City;
- Rasio Perempuan dalam Nominated Talent;
- Rasio Milenial (≤ 42 tahun) dalam *Nominated Talent*;
- Penyelesaian Roadmap Penyehatan Dana Pensiun Manfaat Pasti; dan
- Rasio Pemenuhan Kualifikasi Organ Pengelola Risiko.

Berdasarkan realisasi dan capaian KPI tersebut, Dewan Komisaris memandang bahwa Direksi telah menjalankan perannya secara optimal dengan berbagai program dan langkah strategis yang tepat dalam mencapai visi, misi, dan rencana jangka panjang Perusahaan sehingga hal tersebut perlu ditingkatkan dan dipertahankan. Sementara untuk indikator KPI yang belum tercapai, Dewan Komisaris meminta kepada Direksi untuk mengevaluasi strategi tahun 2023 sebagai bahan pengembangan strategi, kebijakan, dan program yang lebih tepat untuk mencapai seluruh target KPI yang ditetapkan.

Dewan Komisaris meyakini bahwa pencapaian tersebut tidak terlepas dari peran Direksi dalam merumuskan strategi terbaik bagi Perusahaan dan konsistensi dalam mengawasi implementasi strategi di seluruh *level* organisasi. Berbagai upaya tersebut menghasilkan pencapaian positif, baik dari sisi tingkat kesehatan Perusahaan, kinerja keuangan dan operasional maupun RKAP secara umum sehingga menghasilkan pencapaian KPI yang optimal.

the 15 indicators that did achieve the targets, several exceeded the targets set with balanced distribution across the six KPI perspectives, consisting of:

- Interest Bearing Debt to Invested Capital indicator;
- Interest Bearing Debt to EBITDA;
- Port Zonation;
- Fulfilment of Subsidized Trips;
- Corporate Cooperation;
- Market Share;
- Traffic Production;
- Digitalization of Ship & Port Maintenance Management;
- IT Maturity Level;
- Investment in Rehabilitation or Revitalization of Ships and Ports;
- Bakauheni Harbour City Project;
- Ratio of Women in Nominated Talent;
- Ratio of Millennial (≤ 42 years old) in Nominated Talent;
- Completion of the Roadmap for Restructuring Defined Benefit of Pension Funds, and
- Risk Management Organ Qualification Ratios.

Based on KPI realization and achievements, the Board of Commissioners believes that the Board of Directors has carried out their roles optimally by deploying various programs and strategic steps to achieve the Company's vision, mission, and long-term plans, such that performance shall be improved and maintained. Meanwhile, for unmet KPI indicators, the Board of Commissioners has requested the Board of Directors to evaluate the 2023 strategy as a point of reference for developing suitable future strategies, policies, and programs to achieve all the KPI targets set forth.

The Board of Commissioners believes that these achievements are closely related to the Board of Directors' role in formulating the best strategy for the Company and its consistency in overseeing the strategy implementation throughout all levels of the organization. All these efforts have resulted in positive achievements in the Company's health level, financial and operational performances and the overall WPB, thus resulting in optimum KPI achievement.

PENGAWASAN DEWAN KOMISARIS DALAM PERUMUSAN DAN IMPLEMENTASI STRATEGI PERUSAHAAN

Dewan Komisaris memiliki peranan krusial dalam melakukan fungsi pengawasan kinerja Direksi dan memberikan masukan untuk melindungi kepentingan para pemegang saham dan semua pemangku kepentingan. Dalam menjalankan fungsi tersebut, Dewan Komisaris melakukan pengawasan terhadap proses perumusan strategi maupun pada implementasinya. Pengawasan tersebut dimaksudkan untuk memastikan keselarasan strategi dengan arahan pemegang saham serta memastikan implementasi yang sesuai dengan prinsip tata kelola perusahaan yang baik.

Mekanisme pengawasan dilakukan melalui beberapa mekanisme seperti rapat gabungan antara Dewan Komisaris dengan Direksi, kunjungan kerja untuk meninjau pelaksanaan operasional di lapangan, maupun melalui pemberian nasihat dan arahan kepada Direksi.

Dewan Komisaris berhak memperoleh informasi dan penjelasan dari Direksi mengenai pencapaian kinerja Perusahaan dan berbagai kendala yang dihadapi. Dewan Komisaris dapat menyampaikan pandangan dan memberikan nasihat/saran kepada Direksi mengenai hal tersebut. Untuk tujuan tersebut, sepanjang tahun 2023, Dewan Komisaris telah melaksanakan 12 (dua belas) kali rapat internal Dewan Komisaris serta 12 (dua belas) kali rapat gabungan dengan Direksi.

FREKUENSI DAN TATA CARA PEMBERIAN NASIHAT KEPADA DIREKSI

Fungsi pengawasan dan pemberian nasihat kepada Direksi dilakukan secara berkala melalui rapat gabungan Dewan Komisaris dan Direksi. Pemberian nasihat kepada Direksi mencakup aspek rencana kerja, pengembangan Perusahaan, pelaksanaan kebijakan strategis Perusahaan, penerapan tata kelola perusahaan, maupun terkait pelaksanaan ketentuan Anggaran Dasar dan Keputusan RUPST dan/atau RUPS Luar Biasa, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.

SUPERVISION OF THE BOARD OF COMMISSIONERS IN FORMULATING AND IMPLEMENTING OF COMPANY STRATEGY

The Board of Commissioners holds crucial roles in performing the supervisory function on the Board of Directors' performance and providing input to protect the interests of to shareholders and stakeholders. In carrying out such function, the Board of Commissioners supervises the strategy formulation process and its implementation. Oversight is intended to ensure alignment between shareholder's strategic direction with its implementation in accordance with the principles of good corporate governance.

The oversight is carried out through several mechanisms such as joint meetings between the Board of Commissioners and the Board of Directors, working visits to review operational implementation on the ground, and by providing advice and direction to the Board of Directors.

The Board of Commissioners holds the right to obtain information and explanations from the Board of Directors on the progress of the Company's achievements and various challenges faced. The Board of Commissioners may express views and provide advice/inputs to the Board of Directors on the issues. For such purpose, throughout 2023, the Board of Commissioners held 12 (twelve) internal meetings and 12 (twelve) joint meetings with the Board of Directors.

FREQUENCY AND PROCEDURES FOR ADVISING THE BOARD OF DIRECTORS

The oversight and advisory functions of the Board of Directors are carried out periodically through joint meetings between the Board of Commissioners and the Board of Directors. Advising the Board of Directors includes aspects of work plans, Company's development, implementation of Company's strategic policies, implementation of corporate governance, and implementation of stipulations in the Articles of Association, Resolutions of the AGMS and/or EGMS, as well as applicable laws and regulations.

Pemberian nasihat kepada Direksi di tahun 2023 dilakukan melalui rapat gabungan dengan Direksi yang pada tahun 2023 dilakukan sebanyak 12 (dua belas) kali. Pemberian nasihat oleh Dewan Komisaris kepada Direksi selama tahun 2023 di antaranya terkait dengan pengelolaan dan tata kelola anak perusahaan, pengadaan armada, maupun aspek lainnya yang terkait dengan hal-hal yang bersifat strategis.

PANDANGAN ATAS PROSPEK USAHA YANG DISUSUN DIREKSI

Pertumbuhan ekonomi di tahun 2024 diproyeksikan oleh International Monetary Fund (IMF) tumbuh sebesar 3,1%. Proyeksi ini tidak mengalami perubahan dibandingkan pertumbuhan ekonomi tahun 2023 yang mencapai 3,1%. Kondisi tersebut tidak terlepas dari dorongan dan tekanan ekonomi di tahun 2024. Misalnya disinflasi dan pertumbuhan yang stabil dapat mengurangi kemungkinan terjadinya *hard landing* dan risiko pertumbuhan global yang lebih seimbang. Di sisi lain, tekanan ekonomi dari kemungkinan lonjakan harga komoditas akibat tensi geopolitik, serta permasalahan sektor properti terutama yang terjadi di Tiongkok dapat menjadi pemicu tertekannya pertumbuhan ekonomi secara global.

Dewan Komisaris juga melihat pemulihan ekonomi dari dampak pandemi Covid-19 telah usai dan selanjutnya perekonomian global maupun nasional berfokus pada penguatan ketahanan dan fondasi ekonomi untuk menghadapi ketidakpastian ekonomi di masa depan. Tantangan perekonomian di tahun 2024 terdiri dari inflasi dunia yang masih akan bertahan tinggi menjadi di level 5,8% dari yang biasanya di kisaran 2% ke bawah, pelemahan ekonomi China yang tumbuh di bawah 5%, volatilitas harga komoditas, *shock* akibat perubahan iklim dan tekanan sektor properti di Tiongkok yang dapat memicu ketidakstabilan ekonomi global.

Dalam APBN tahun 2024, pertumbuhan ekonomi Indonesia ditargetkan berada pada kisaran 4,7%-5,5%. Hal tersebut tentunya akan memberikan sentimen dan dampak positif terhadap industri

Advising the Board of Directors in 2023 were conducted through 12 (twelve) joint meetings with the Board of Directors. Advisory by the Board of Commissioners to the Board of Directors throughout 2023 covered matters of subsidiaries management and governance, fleet procurement, as well as other strategic subjects.

VIEWS ON BUSINESS PROSPECTS BY THE BOARD OF DIRECTORS

The International Monetary Fund (IMF) projected the global economy grow by 3.1% in 2024. This projection remained the same as the 2023 actual economic growth of 3.1%. The forecast is inseparable from the economic drive and pressures in 2024. For instance, disinflation and stable growth may reduce the possibility of a hard landing and the likelihood of a more balanced global growth. On the other hand, economic pressure due to the possibility of commodity price spike attributed to political tensions, as well as problems in the property sector (especially in China), may trigger pressure on global economic growth as a whole.

The Board of Commissioners recognized that the economic recovery from the impact of the Covid-19 pandemic had concluded, and the global and national economy should focus on strengthening economic resilience and laying groundwork to face future economic uncertainties. Economic challenges that will surface in 2024 will be global inflation that remains high at 5.8% compared the usual range of 2% or less, the weakening of China's economic growth below 5%, the volatility of commodity prices, shock due to climate change, and the pressure on China's property sector that may trigger global economic instability.

In the 2024 Indonesian Government Budget, Indonesia's economic growth is targeted in the range of 4.7% - 5.5%. This projection certainly provides positive sentiment and

transportasi penyeberangan dan pelabuhan. Seiring dengan proyeksi pertumbuhan ekonomi yang positif dan didukung oleh pertumbuhan kinerja Perusahaan tahun 2023 yang meningkat, industri transportasi penyeberangan diproyeksikan akan tumbuh positif didorong oleh mobilitas masyarakat dan pelaksanaan Pemilu 2024 yang mendorong pergerakan logistik antar pulau.

Memperhatikan proyeksi kondisi dan asumsi kondisi perekonomian global maupun nasional, Dewan Komisaris memandang bahwa prospek usaha yang disusun oleh Direksi telah relevan dengan kondisi terkini maupun proyeksi tahun 2024. Prospek usaha yang disampaikan melalui RKAP serta *rolling plan* Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP) telah selaras dengan visi dan misi Perusahaan serta arahan pemegang saham. Dewan Komisaris juga memandang bahwa Direksi perlu memfokuskan strateginya pada penguatan aspek operasional, layanan, dan keselamatan penumpang serta mengoptimalkan potensi integrasi bisnis *waterfront tourism* yang dijalankan oleh Perusahaan maupun oleh Anak Perusahaan.

PANDANGAN TERHADAP PENERAPAN TATA KELOLA PERUSAHAAN

Penerapan tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*, GCG) menjadi salah satu fokus pengawasan Dewan Komisaris. Untuk itu, Dewan Komisaris berupaya mendorong Direksi dan seluruh jajaran manajemen Perusahaan untuk dapat menunjukkan komitmennya dalam menjadikan GCG sebagai dasar dalam setiap pengambilan keputusan dan pelaksanaan kegiatan usaha Perusahaan.

Dewan Komisaris mencermati bahwa Perusahaan telah memiliki aturan-aturan baku sesuai dengan yang dipersyaratkan oleh regulator. Perusahaan juga terus berupaya untuk meningkatkan kualitas penerapan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang baik dengan melakukan penyesuaian dan pengkinian *soft structure* Tata Kelola Perusahaan. Untuk meningkatkan kualitas penerapan praktik GCG, kami mendukung

impact on the ferry transportation and port industry. In line with projections of positive economic growth and supported by the Company's performance growth in 2023, the ferry transportation industry is also projected to grow positively, driven by community mobility and the 2024 elections that will encourage inter-island logistics movements.

Considering the projected circumstances and assumptions of global and national economic conditions, the Board of Commissioners concludes that the business prospects prepared by the Board of Directors is reflective of current conditions and projections for 2024. Business prospects expressed through the WPB and the rolling Long-term Corporate Plan (RJPP) has been aligned with the Company's vision and mission as well as the shareholder's direction. The Board of Commissioners also recommends that the Board of Directors focus their strategy on strengthening aspects of operations, services, and passenger safety, as well as optimizing the potential for waterfront tourism business integration to be carried out by the Company and its subsidiaries.

VIEWS ON THE IMPLEMENTATION OF CORPORATE GOVERNANCE

Implementing good corporate governance (GCG) becomes one of the Board of Commissioners' supervisory focus. Therefore, the Board of Commissioners seeks to encourage the Board of Directors and all levels of Company management to demonstrate their commitments to making GCG the basis for every decision making and conduct in Company's business activities.

The Board of Commissioners observed that the Company has standard rules that adhere with requirements from regulators. The Company also continuously strives to improve the implementation quality of the of Good Corporate Governance principles by adjusting and improving the soft structure of Corporate Governance. To improve the quality of GCG implementation, we fully

penuh pelaksanaan asesmen berkala kualitas penerapan praktik GCG yang dilakukan oleh pihak independen agar diperoleh umpan balik bagi dilakukannya perbaikan.

Berdasarkan hasil penilaian GCG yang dilakukan pada tahun 2023, Perusahaan berhasil meraih skor penilaian sebesar 96,314 dan meraih predikat “Sangat Baik”. Pencapaian ini menjadi salah satu bukti bahwa penerapan tata kelola perusahaan telah berjalan baik dan terus mengalami perbaikan yang signifikan.

Dewan Komisaris mendukung penuh upaya Direksi untuk meningkatkan penerapan GCG secara berkelanjutan melalui penyempurnaan kebijakan dan perangkat GCG serta memastikan pengawasan terhadap penerapan GCG di seluruh lapisan organisasi. Dewan Komisaris tetap mengingatkan Direksi tidak berpuas diri dan terus berupaya meningkatkan kualitas penerapan GCG dengan melakukan *benchmarking* terhadap *best practices* dan standar penerapan GCG terkini. Beberapa hal di antaranya yaitu melalui penerapan Pedoman Umum Governansi Korporat Indonesia (PUGKI) serta melakukan kajian serta persiapan dalam penerapan *Governance, Risk and Compliance* (GRC).

PANDANGAN ATAS KINERJA WHISTLEBLOWING SYSTEM

Salah satu bentuk penerapan GCG di Perusahaan yaitu melalui penerapan pilar deteksi melalui strategi *anti-fraud*. Dalam menerapkan pilar ini, perlu adanya proses identifikasi terhadap potensi pelanggaran di Perusahaan melalui media pelaporan yang dikelola secara adil dan transparan melalui Pelaporan Dugaan Pelanggaran (*Whistleblowing System*, WBS).

Kebijakan Sistem Pelaporan Dugaan Pelanggaran (WBS) disahkan melalui Surat Keputusan Bersama antara Dewan Komisaris dan Direksi PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) dengan No. SK.152/HK.002/ASDP-2021. Dokumen ini merupakan hasil dari revisi Surat Keputusan Bersama sebelumnya, yaitu No. SK.806/HK.002/

support periodic assessments carried out by independent parties on the quality of GCG practices to obtain feedback for future improvements.

Based on the results of the GCG assessment carried out in 2023, the Company managed to achieve 96.314 and was awarded of “Very Good”. This achievement was a testament that the implementation of corporate governance had vastly improved and continued to undergo significant improvements.

The Board of Commissioners fully endorses the Board of Directors’ efforts to improve GCG implementation on an ongoing basis by improving GCG policies and soft structure whilst ensuring supervision of GCG implementation at all levels of the organization. The Board of Commissioners continues to remind the Board of Directors against complacency and to continuously strive to improve the quality of GCG implementation by benchmarking against best practices and the updated GCG implementation standards. Among the instruments are implementation of the Indonesian General Guidelines for Corporate Governance (*Pedoman Umum Governansi Korporat Indonesia*, PUGKI) as well as conducting studies and preparations in implementing Governance, Risk and Compliance (GRC).

VIEWS ON THE PERFORMANCE OF WHISTLEBLOWING SYSTEM

One way of implementing GCG in the Company is by implementing the pillar of detection through anti-fraud strategy. In implementing this pillar, it is necessary to have an identification process for potential violations in the Company through a fair and transparently managed reporting medium, the Whistleblowing System (WBS).

The Whistleblowing System (WBS) policy was ratified through a Joint Decree of the Board of Commissioners and the Board of Directors of PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) No. SK.152/HK.002/ASDP-2021. This document was amended from the earlier Joint Decree No. SK.806/HK.002/ASDP-2020,

ASDP-2020, yang membahas tentang Sistem Pelaporan Dugaan Pelanggaran PT ASDP Indonesia Ferry (Persero). Lingkup pelaporan ini mencakup segala indikasi pelanggaran yang dilakukan oleh anggota Perusahaan, yang diatur oleh Sistem Pelaporan Dugaan Pelanggaran Perusahaan.

Pada tahun 2023, Dewan Komisaris telah memberikan tanggapan dan masukan terhadap efektivitas WBS. Dewan Komisaris memandang bahwa WBS dapat menciptakan lingkungan kerja yang bersih, berakhlak, dan berintegritas serta menjadi bagian dari upaya memelihara budaya kepedulian di lingkungan kerja. Dan diperlukan partisipasi aktif dari seluruh jajaran insan Perusahaan dan pemangku kepentingan untuk melaporkan pelanggaran yang terjadi di lingkungan Perusahaan.

Dewan Komisaris senantiasa melakukan pemantauan dan pengawasan secara periodik untuk memastikan berjalannya sistem WBS dengan baik melalui Komite Audit yang melakukan pembahasan efektivitas dan tindak lanjut laporan WBS dalam rapat bersama Satuan Pengawasan Internal. Terhadap kondisi yang berjalan di tahun 2023, Dewan Komisaris berpendapat bahwa secara umum penerapan dan atas tindak lanjut WBS selama tahun 2023 di Perusahaan telah berjalan dengan baik.

PENILAIAN KINERJA KOMITE DEWAN KOMISARIS

Dalam melakukan fungsi pengawasan atas Perusahaan, Dewan Komisaris memiliki 3 (tiga) organ pendukung yaitu Komite Audit, Komite Pemantau Risiko, serta Komite Nominasi dan Remunerasi yang memiliki tugas dan tanggung jawab masing-masing dalam menjalankan fungsi dan perannya.

Komite Audit memiliki tugas dan tanggung jawab untuk melakukan penilaian terhadap sistem pengendalian internal dan pelaksanaan tugas audit internal maupun eksternal, serta mengawasi penerapan GCG di Perusahaan. Sepanjang tahun 2023, Komite Audit telah melaksanakan rapat internal komite sebanyak 12 (dua belas) kali yang melibatkan Satuan Pengawasan Internal dan auditor eksternal

which discussed the whistleblowing system of PT ASDP Indonesia Ferry (Persero). The scope of the reporting includes all indications of violations committed by members of the Company, which are regulated by the Company's Whistleblowing System.

In 2023, the Board of Commissioners provided responses and inputs on the effectiveness of the WBS. The Board of Commissioners believes that WBS can create a clean, virtuous, and principled workplace whilst taking part in efforts to maintain a nurturing culture in the work environment. This goal requires active participation from all levels of Company personnel and stakeholders to report violations that occur within the Company.

The Board of Commissioners has always carried out periodic monitoring and oversight to ensure that the WBS system is operating optimally. These are carried out through the Audit Committee to discuss the effectiveness and follow-up of WBS reports in meetings with the Internal Audit Unit. In 2023, the Board of Commissioners viewed the overall implementation and follow-up of the Whistleblowing System (WBS) within the Company as satisfactory.

PERFORMANCE APPRAISAL OF THE BOARD OF COMMISSIONERS' COMMITTEES

In carrying out the supervisory function over the Company, the Board of Commissioners is supported by 3 (three) organs, namely the Audit Committee, Risk Oversight Committee, as well as Nomination and Remuneration Committee, which have their respective duties and responsibilities to carry out their functions and roles.

The Audit Committee has the duty and responsibility to review the internal control system, carry out internal and external audit tasks, as well as oversee the GCG implementation in the Company. Throughout 2023, the Audit Committee held 12 (twelve) internal committee meetings involving the Internal Audit Unit and external auditors to discuss matters contained in the committee's

untuk membahas hal-hal yang tertuang pada program kerja komite.

Komite Pemantau Risiko memiliki tugas dan tanggung jawab dalam evaluasi dan penyampaian masukan terkait kebijakan serta strategi yang terkait dengan manajemen risiko perusahaan untuk memastikan penerapan yang efektif dari Manajemen Risiko Perusahaan (*Enterprise Risk Management*) serta penerapan prinsip-prinsip GCG. Sepanjang tahun 2023, Komite Pemantau Risiko telah melaksanakan rapat internal komite sebanyak 12 (dua belas) kali sesuai dengan program kerja komite.

Komite Nominasi dan Remunerasi memiliki tugas dan tanggung jawab dalam menilai dan memberi masukan terhadap kebijakan dan strategi Perusahaan dari terkait pengelolaan sumber daya manusia terkait nominasi dan remunerasi Perusahaan. Komite Nominasi dan Remunerasi juga bertugas membantu Dewan Komisaris terkait dengan penetapan kriteria pemilihan calon anggota Dewan Komisaris dan Direksi serta sistem remunerasinya, termasuk melakukan review terkait sistem pengelolaan talenta di Perusahaan. Sepanjang tahun 2023, Komite Nominasi dan Remunerasi telah melaksanakan rapat internal komite sebanyak 12 (dua belas) kali sesuai dengan program kerja komite.

Dewan Komisaris melakukan penilaian kinerja terhadap organ-organ pendukung di bawahnya sebagai bagian dari pelaksanaan prinsip-prinsip GCG. Hasil evaluasi tersebut selanjutnya digunakan sebagai bahan perbaikan untuk mendorong peningkatan kinerja komite-komite ke depannya. Evaluasi terhadap kinerja komite-komite dilakukan setiap satu tahun sekali dengan menggunakan metode yang telah ditetapkan oleh Dewan Komisaris.

Kami menilai bahwa seluruh komite tersebut telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik, yang tecermin dari pelaksanaan rencana kerja komite dan juga penugasan yang dilakukan telah dapat diselesaikan dengan baik.

work program.

The Risk Oversight Committee carries duties and responsibilities in evaluating and providing input regarding policies and strategies related to risk management to ensure the effective implementation of Enterprise Risk Management as well as the implementation of GCG principles. Throughout 2023, the Risk Oversight Committee held internal committee meetings 12 (twelve) times in accordance with the committee's work program.

The Nomination and Remuneration Committee has the duties and responsibilities of assessing and advising on Company's human resource management policies and strategies related to nomination and remuneration. The Nomination and Remuneration Committee is also tasked with assisting the Board of Commissioners in determining the criteria for candidate selection for members of the Boards of Commissioners and Board of Directors as well as the remuneration system, including conducting review on the Company's talent management system. Throughout 2023, the Nomination and Remuneration Committee held 12 (twelve) internal committee meetings in accordance with the committee's work program.

The Board of Commissioners conducted performance appraisal on their supporting organs as part of implementing GCG principles. The evaluation results will serve as a springboard for improvement to encourage improved performance in the future. Evaluation of the committees' performance is conducted annually using methods determined by the Board of Commissioners.

We view that every committee has successfully carried out their duties and responsibilities, as reflected in the implementation of the committee's work plan as well as the completed assignments.

PERUBAHAN KOMPOSISI DEWAN KOMISARIS

CHANGES IN THE COMPOSITION OF THE BOARD OF COMMISSIONERS

Pada tahun 2023, tidak terjadi perubahan dalam Komposisi Dewan Komisaris. Hingga 31 Desember 2023, komposisi Dewan Komisaris adalah sebagai berikut:

In 2023, there were no changes in the composition of the Board of Commissioners. As of 31 December 2023, the composition of the Board of Commissioners was as follows:

Nama Name	Jabatan Position	Dasar Pengangkatan Basis of Appointment
Saiful Haq Manan	Komisaris Utama (Independen) President Commissioner (Independent)	Keputusan Menteri BUMN No. SK-10/MBU/01/2023 tanggal 20 Januari 2023. Decree of the Minister of SOEs No. SK-10/MBU/01/2023 dated 20 January 2023.
Hendar Ristriawan	Komisaris Independen Independent Commissioner	Keputusan Menteri BUMN No. SK-97/MBU/05/2023 tanggal 12/05/2023 Decree of the Minister of SOEs No. SK-97/MBU/05/2023 dated 12 May 2023.
Iwan Hari Sugiarto	Komisaris Independen Independent Commissioner	Keputusan Menteri BUMN No. SK-321/MBU/10/2020 tanggal 9 Oktober 2020. Decree of the Minister of SOEs No. SK-321/MBU/10/2020 dated 9 October 2020.
Susi Meyrista Tarigan	Komisaris Commissioner	Keputusan Menteri BUMN No. SK-233/MBU/10/2019 tanggal 17 Oktober 2019. Decree of the Minister of SOEs No. SK-233/MBU/10/2019 dated 17 October 2019.
Edmil Nurjamil	Komisaris Commissioner	Keputusan Menteri BUMN No. SK-124/MBU/04/2020 tanggal 21 April 2020. Decree of the Minister of SOEs No. SK-124/ MBU/04/2020 dated 21 April 2020.
Budi Setiyadi	Komisaris Commissioner	Keputusan Menteri BUMN No. SK-208/ MBU/09/2022 tanggal 20 September 2022. Decree of the Minister of SOEs No. SK-208/ MBU/09/2022 dated 20 September 2022.

PENUTUP & APRESIASI CLOSING & APPRECIATION

Saya dan seluruh anggota Dewan Komisaris mengucapkan terima kasih kepada seluruh jajaran Direksi dan seluruh Ferizyan atas usaha dan dedikasinya sepanjang tahun 2023. Dengan usaha dan dedikasi yang telah dicurahkan, Perusahaan dapat mencapai kinerja yang solid dan sehat di tengah kondisi perekonomian maupun situasi geopolitik global yang penuh ketidakpastian.

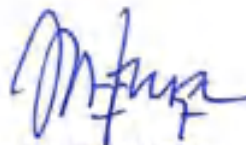
I and all members of the Board of Commissioners thank the Board of Directors and each Feryzian for their efforts and dedication throughout 2023. Their efforts and dedication allowed the Company to successfully achieve robust and healthy performance amidst uncertain economic conditions and global geopolitical situations.

JAKARTA, 06 JUNI 2024

JAKARTA, 06 JUNE 2024

Atas nama Direksi PT ASDP Indonesia Ferry (Persero),

On behalf of the Board of Directors of PT ASDP Indonesia Ferry (Persero),



Saiful Haq Manan

Komisaris Utama (Independen)
President Commissioner (Independent)

1. SAIFUL HAQ MANAN

Komisaris Utama | *President Commissioner*
Periode Jabatan : Januari 2023-Januari 2028
Term of Office : January 2023-January 2028

2. BUDI SETIYADI

Komisaris | *Commissioner*
Periode Jabatan : September 2022-
September 2027
Term of Office : September 2022-
September 2027

3. IWAN HARI SUGIARTO

Komisaris Independen | *Independent Commissioner*
Periode Jabatan : Oktober 2020-Oktober 2025
Term of Office : October 2020-October 2025

4. SUSI MEYRISTA TARIGAN

Komisaris | *Commissioner*
Periode Jabatan : Oktober 2019-Oktober 2024
Term of Office : October 2019-October 2024

5. HENDAR RISTRIAWAN

Komisaris Independen | *Independent Commissioner*
Periode Jabatan : Mei 2023-Mei 2028
Term of Office : May 2023-May 2028

6. EDMIL NURJAMIL

Komisaris | *Commissioner*
Periode Jabatan : April 2020-April 2025
Term of Office : April 2020-April 2025



6

5

4

1

2

3



Suatu kehormatan bagi kami sebagai Direksi Perusahaan untuk menyampaikan Laporan Tahunan PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) tahun buku 2023 yang memaparkan mengenai implementasi strategi Perusahaan, analisis pencapaian kinerja Perusahaan, prospek usaha Perusahaan, strategi pengembangan sumber daya manusia dan teknologi informasi serta penerapan tata kelola perusahaan sepanjang tahun 2023.

We, the Company's Board of Directors, are honored to present the Annual Report of PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) for the 2023 financial year. This report details the execution of the Company's strategy, performance analysis, business prospects ahead, and our strategies for the development of human resources and information technology. It also covers the implementation of corporate governance throughout the year.

IRA PUSPADEWI

Direktur Utama
President Director

LAPORAN DIREKSI

THE BOARD OF DIRECTORS' REPORT

Para Pemegang Saham dan Pemangku Kepentingan yang Terhormat,

Puji serta syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua sehingga Perusahaan dapat melalui tahun 2023 dengan berbagai pencapaian yang baik dan membanggakan. Sejalan dengan visi Perusahaan untuk menghubungkan masyarakat dan pasar melalui jasa penyeberangan-pelabuhan terintegrasi dan tujuan wisata *waterfront*, strategi *Strengthening & Optimizing Value* yang menjadi *focus* di tahun 2023 berhasil mendongkrak kinerja Perusahaan maupun peningkatan layanan kepada pelanggan.

Suatu kehormatan bagi kami sebagai Direksi Perusahaan untuk menyampaikan Laporan Tahunan PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) tahun buku 2023 yang memaparkan mengenai implementasi strategi Perusahaan, analisis pencapaian kinerja Perusahaan, prospek usaha Perusahaan, strategi pengembangan sumber daya manusia dan teknologi informasi serta penerapan tata kelola perusahaan sepanjang tahun 2023.

TINJAUAN EKONOMI MAKRO

Di tengah kondisi perekonomian yang mulai pulih, dunia mengalami dinamika geopolitik yang menciptakan ketegangan dan ketidakpastian dari sisi ekonomi. Sepanjang tahun 2023, pertumbuhan ekonomi global tercatat sebesar 3,1%, lebih rendah dibandingkan tahun 2022 yang mencapai 3,5%. Dalam laporan *World Economic Outlook* bulan Januari 2024, *International Monetary Fund* (IMF) memprediksi pertumbuhan ekonomi global di tahun 2024 mencapai sekitar 3,1% yang didorong oleh ekspektasi atas penurunan suku bunga, disinflasi yang lebih cepat dan kelonggaran kebijakan fiskal dan moneter di berbagai negara serta adanya kemungkinan lonjakan harga komoditas akibat konflik geopolitik Timur Tengah.

Respected Shareholders and Stakeholders,

Our praises and gratitude to the Almighty God, who has bestowed His blessings and grace on us, allowing the Company to pilot through 2023 with excellent and notable achievements. In line with the Company's vision to connect people and markets through integrated port-ferry services and waterfront tourist destinations, the 2023 strategy focused on 'Strengthening & Optimizing Value' succeeded in bolstering the Company's performance and improved services to customers.

It is an honor for the Company's Board of Directors to present the Annual Report of PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) for the 2023 financial year. This report details the execution of the Company's strategy, performance analysis, business prospects ahead, and our strategies for the development of human resources and information technology. It also covers the implementation of corporate governance throughout the year.

MACROECONOMIC REVIEW

In the midst of recovering economic conditions, the world experienced geopolitical dynamics that created tensions and uncertainties with regards to various aspects of the economy. Throughout 2023, global economic growth was recorded at 3,1%, weakening compared to 2022 at 3.5%. In the January 2024 edition of the *World Economic Outlook* report, the *International Monetary Fund* (IMF) predicted that 2024 global economic growth will reach around 3.1%, driven by expectations of lower interest rates, quicker disinflation and looser fiscal and monetary policies in various countries as well as the possibility of spike in commodity prices due to geopolitical conflicts in the Middle East.

Sementara itu ekonomi Indonesia berhasil tumbuh sebesar 5,05% ditopang oleh kinerja ekspor dan menguatnya daya beli masyarakat. Pertumbuhan ekonomi ini juga didukung oleh seluruh komponen PDB dan terjadi pada seluruh lapangan usaha. Sektor Lapangan Usaha Transportasi menjadi penopang utama dengan pertumbuhan tertinggi mencapai 13,96%.

Sepanjang tahun 2023, untuk menghadapi ketidakstabilan ekonomi dan situasi geopolitik, pemerintah dan Bank Indonesia (BI) merilis berbagai kebijakan untuk mendorong stabilitas perekonomian nasional. Melalui berbagai kebijakan tersebut, Pemerintah berhasil menekan laju inflasi tahun 2023 berada di angka 2,61% yang menjadi realisasi inflasi terendah sejak tahun 2000. Realisasi sebesar 2,61% masih berada dalam kisaran target inflasi yang ditetapkan Bank Indonesia sebesar 2%-4% secara tahunan.

Kebijakan yang diambil oleh pemerintah maupun Bank Indonesia berhasil mendukung stabilitas ekonomi dan menciptakan iklim usaha yang positif, terutama di sektor transportasi. Kondisi ini juga didukung oleh mobilitas masyarakat dan perputaran roda bisnis yang meningkat. Kondisi perekonomian nasional tersebut sangat berarti dan menjadi peluang besar bagi PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) dan anak perusahaan untuk mencapai kinerja terbaik.

PENCAPAIAN KINERJA PERUSAHAAN TAHUN 2023

Strategi dan Kebijakan Perusahaan

Penyusunan strategi dan kebijakan Perusahaan dilakukan dengan mempertimbangkan berbagai dinamika yang terjadi dari internal maupun dari eksternal. Mencermati dinamika yang terjadi terutama telah pulihnya perekonomian nasional di tahun 2023, Direksi menetapkan strategi *Strengthening & Optimizing Value* dengan tema strategi tersebut berfokus pada memperkuat fondasi bisnis yang telah dimiliki untuk mengoptimalkan nilai Perusahaan dari sisi kinerja operasional, keuangan, dan meningkatkan citra positif dengan tujuan meningkatkan kepuasan pelanggan melalui peningkatan pelayanan yang berkualitas.

Meanwhile, the Indonesian economy managed to grow by 5.05%, driven by export performance and strengthening of the overall purchasing power. This economic growth was also supported by all GDP components and sectors. The Transportation Business Sector was the primary support that reached the highest growth at 13.96%.

Throughout 2023, the government and Bank Indonesia (BI) issued various policies to stimulate national economic stability amidst the growing potential of economic instability and the geopolitical situation. Through these various policies, the government succeeded in suppressing the 2023 inflation rate to 2.61%, which was the lowest inflation realization since the year 2000. The realized inflation rate of 2.61% was still within the targeted inflation range set by Bank Indonesia of 2%-4% on an annual basis.

The policies taken by the government and Bank Indonesia have succeeded in supporting economic stability and created a positive business climate, especially in the transportation sector. This situation was further supported by passenger mobility and increased business activities. The national economic situation was highly consequential and was an excellent opportunity for PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) and its subsidiaries to achieve their best performance.

2023 COMPANY PERFORMANCE ACHIEVEMENTS

Company Strategy and Policy

The Company's strategies and policies are prepared by taking into account various internal and external dynamics. Following the recovery of the national economy in 2023, the Board of Directors has devised a strategy called "Strengthening & Optimizing Value." This strategy focuses on reinforcing the existing business foundations to enhance the Company's value in both operational and financial performance. Additionally, it aims to improve ASDP's positive image and increase customer satisfaction through enhanced quality of service.

Strategi ini dijalankan melalui berbagai inisiatif di antaranya Optimalisasi Nilai melalui Bisnis Utama; Penciptaan Nilai melalui Pengembangan Bisnis Logistik, *Tourism* dan Properti; Pembangunan Konektivitas Perintis; *Optimizing Finance Structure*; Optimalisasi Operasional Alat Produksi; Peningkatan Manajemen Keselamatan, Lingkungan dan Pelayanan; Digitalisasi Proses Operasi; Meningkatkan Keandalan Dukungan Fasilitas dan Infrastruktur; Transformasi Fungsi *Support* menjadi *Business Partner*; Transformasi Digital; Meningkatkan Efisiensi Proses Bisnis; serta Memperkuat *Risk Management & Good Corporate Governance*.

Strategi tersebut dijalankan melalui berbagai inisiatif strategis seperti implementasi *customer touch point* di 6 (enam) cabang, penyusunan desain *premium service*, pengembangan lintasan domestik dan pariwisata, penyempurnaan standar pelayanan minimum, implementasi standar pelayanan eksekutif, dan penambahan 1 armada di lintasan perintis. Di samping itu, Perusahaan juga melakukan transformasi digital pada berbagai proses bisnis Perusahaan di antaranya adalah perluasan *online ticketing system* di 8 pelabuhan, pengembangan *e-procurement*, digitalisasi pencatatan aset yang terintegrasi dengan Portal Aset BUMN, dan digitalisasi pada proses bisnis lainnya baik pada *core business process* maupun pada *enabler business process*.

Di samping itu, pada tahun 2023 Perusahaan memiliki *game changer* yaitu mengedepankan dan mengakselerasi pengembangan SDM melalui tema *People and Culture. Game changer* ini dilakukan sebagai respon Perusahaan dalam menghadapi perkembangan dan kompetisi bisnis yang semakin cepat sehingga diperlukan akselerasi pengembangan SDM tidak hanya dari aspek kompetensi karyawan melainkan dari aspek budaya terlebih dengan bisnis Perusahaan yang berada di sektor jasa. Dari aspek *people*, terdapat beberapa inisiatif strategis di antaranya adalah implementasi *Ferizyan Talent Development Program*, pelaksanaan kajian strategi dan desain *Ferizyan Learning Center* (FLC), pengembangan kompetensi perilaku, dan teknis serta pelaksanaan *assessment* kompetensi karyawan. Sementara dari aspek *culture* dilakukan melalui inisiatif seperti penyusunan dan pelaksanaan internalisasi budaya 5R, *culture campaign* untuk meningkatkan *culture awareness* dan *culture assessment*.

This strategy is implemented through various initiatives which entail Value Optimization through Core Business; Value Creation through Development of Logistics, Tourism and Property Businesses; Pioneering Connectivity Development; Optimization of Finance Structure; Operational Optimization of Production Equipment; Improved Management of Safety, Environmental and Service; Digitalization of Operational Processes; Increased Reliability of Facilities and Infrastructure Support; Transformation of the Support Function into Business Partner; Digital Transformation; Increased Business Process Efficiency and Strengthened Risk Management & Good Corporate Governance.

The strategies were implemented through various strategic initiatives such as implementation of customer touch points at 6 (six) branches, preparation of premium service designs, development of domestic and tourism routes, enhancement in minimum service standards, implementation of executive service standards, and addition of 1 fleet to pioneer routes. Furthermore, the Company also carried out digital transformation in various Company business processes, including the expansion of the online ticketing system at 8 ports, developed e-procurement, digitized asset records that are integrated with the SOEs Asset Portal, and digitization of other business processes in the core business process and business process enablers.

Moreover, the Company had a game changer in 2023, which was prioritizing and accelerating overall HR development (themed People and Culture). The game changer was the Company's response to face increasingly rapid business developments and competition, such that it was necessary to accelerate HR development from the employee competency aspect and from the cultural aspect in alignment with the Company's business in the service sector. From the people aspect, several strategic initiatives implemented covered the *Ferizyan Talent Development Program*, implementation of studies for the strategy and design of the *Ferizyan Learning Center* (FLC), development of behavioral and technical competencies, and implementation of employee competency assessments. Meanwhile, initiatives from the cultural aspect covered preparation and implementation of 5R culture internalization, along with culture campaigns to increase culture awareness and culture assessment.

Direksi memastikan bahwa strategi dan kebijakan yang telah disusun dapat tersampaikan dan dipahami oleh seluruh karyawan melalui komunikasi secara langsung kepada manajemen senior di Perusahaan untuk selanjutnya masing-masing manajemen senior dapat mengkomunikasikannya kepada karyawan. Di samping itu, Direksi memantau setiap inisiatif strategis yang dilaksanakan di antaranya melalui pelaporan rutin dari Divisi *Project Management Office* (PMO) untuk inisiatif strategis yang diawasi Divisi PMO dan rapat rutin dari setiap divisi untuk melaporkan realisasi pelaksanaan inisiatif strategis.

Peran Direksi dalam Perumusan Strategi dan Kebijakan

Direksi mendorong keterlibatan yang lebih dalam dari semua pihak yang berkepentingan dalam penyusunan strategi Perusahaan, terutama para karyawan. Pendekatan yang diadopsi dalam proses perumusan strategi adalah dari bawah ke atas (*bottom up*), bertujuan untuk menghimpun aspirasi dari karyawan yang secara langsung terlibat dalam aktivitas operasional serta untuk mendorong inovasi dalam memperkaya operasional harian di lapangan.

Direksi merumuskan strategi dan kebijakan tahun 2023 sesuai dengan amanat dari pemegang saham yang dituangkan dalam Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) tahun 2023 dan Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP) 2020-2024. Penyusunan RKAP dan RJPP dilakukan oleh Direksi dengan pengawasan dan arahan dari Dewan Komisaris untuk selanjutnya mendapatkan persetujuan dari pemegang saham.

Peran Direksi dalam Memastikan Penerapan Strategi dan Kebijakan

Direksi memastikan penerapan strategi dan kebijakan terlaksana dengan baik dari level fungsional hingga level operasional. Untuk itu, Direksi melakukan berbagai upaya efektif untuk memastikan seluruh strategi dan kebijakan tersampaikan dan dipahami oleh seluruh pemangku kepentingan internal. Upaya ini dilakukan dengan menjabarkan strategi dan kebijakan Perusahaan melalui sosialisasi yang dilakukan di awal tahun kepada seluruh karyawan.

The Board of Directors ensured that the strategies and policies were conveyed and understood by all employees through direct communication to senior management in the Company, followed by systematically cascading communication to employees. Additionally, the Board of Directors closely monitored every strategic initiative, including through routine reports from the Project Management Office (PMO) Division and regular updates from each division on the realization of the strategic initiatives implemented.

The Role of the Board of Directors in Formulating Strategy and Policy

The Board of Directors encouraged deeper involvement of all concerned parties in formulating the overall Company strategy, especially employees. The strategy formulation process adopted the bottom-up approach, aiming to gather aspirations from employees who are directly involved in operational activities and to encourage innovation in enriching daily operations in the field.

The Board of Directors formulated strategies and policies for 2023 in accordance with the shareholders' mandate as outlined in the Company's 2023 Work Plan and Budget (WPB) and the Company's Long-term Corporate Plan (RJPP) 2020-2024. The Board of Directors prepared the WPB and RJPP with supervision and direction from the Board of Commissioners, which was further passed along to gain approval from shareholders.

The Role of the Board of Directors in Ensuring Strategy and Policy Implementation

The Board of Directors ensured that strategies and policies were properly implemented across all levels, from functional to operational. To this end, the Board made numerous effective efforts to ensure that each strategy and policy was clearly conveyed and understood by all internal stakeholders. Detailed presentations of the Company's strategies and policies were provided to all employees at the start of the year.

Di samping itu, pada pelaksanaannya Direksi juga melakukan pengawasan dan evaluasi secara berkala berdasarkan indikator keberhasilan yang telah ditetapkan. *Monitoring* dan evaluasi dilakukan secara berkala baik bulanan, triwulan, semesteran, dan tahunan sesuai dengan tingkat dalam organisasi. Dalam merespon dinamika yang terjadi, Direksi juga dapat melakukan penyesuaian strategi dan kebijakan, apabila diperlukan, dan dilakukan melalui persetujuan dari Dewan Komisaris.

Dengan demikian, pendekatan ini bukan hanya tentang pencapaian jangka pendek, melainkan sebagai untuk memastikan relevansi dan kesesuaian strategi serta pencapaian target [perusahaan yang berkelanjutan.

Pencapaian Kinerja Tahun 2023 dan Perbandingan dengan Target Kinerja

Sepanjang tahun 2023, Perusahaan mencatatkan kinerja yang membanggakan baik dari kinerja keuangan maupun operasional. Perusahaan juga mencatatkan realisasi pencapaian KPI cukup baik dengan skor sebesar 105,88% serta pencapaian tingkat Kesehatan Perusahaan *rating* AA+ dengan *outlook* "Stabil" dari Pefindo.

Penilaian kinerja Direksi didasarkan pada KPI yang telah ditetapkan melalui KPI Korporat yang mengacu pada Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia No. PER-2/MBU/03/2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara dan Kontrak Manajemen Tahunan yang memuat KPI Direksi secara kolegal. Terdapat 6 (enam) perspektif KPI yang masing-masing diturunkan ke dalam indikator kinerja dengan total sebanyak 17 indikator dengan target, polaritas, dan bobot penilaian yang berbeda.

Realisasi pencapaian KPI pada tahun 2023 yaitu sebanyak 15 indikator telah mencapai dan melampaui target, sementara terdapat 2 indikator yang tidak mencapai target yaitu indikator EBITDA dan perbandingan ROIC dengan WACC. Terhadap 2 indikator yang belum mencapai target ini, Direksi berupaya untuk menyusun strategi dan kebijakan yang lebih tepat dan terarah untuk memaksimalkan pencapaian target KPI yang telah ditetapkan.

In its implementation, the Board of Directors also regularly monitor and perform evaluations based on predetermined success indicators. Periodic monitoring and evaluations are carried out monthly, quarterly, semi-annually and annually, according to the level in the organization. In responding to current dynamics, the Board of Directors may adjust strategies and policies when necessary, with approval from the Board of Commissioners.

As such, this approach is designed beyond meeting short-term achievements, but also to ensure strategy relevance and suitability as well as the continual sustainable achievement of Company targets.

Performance Achievements in 2023 and Comparison with Performance Targets

Throughout 2023, the Company recorded impressive performance in both financial and operational performance. The Company also recorded strong KPI achievements with a score of 105.88% and achieved an AA+ Corporate Health rating with a "Stable" outlook from Pefindo.

The Board of Directors performance was reviewed based on the KPI set in the in the Corporate KPI, which refers to the Regulation of the Minister of State-Owned Enterprises No. PER-2/MBU/03/2023 concerning Guidelines on Governance and Significant Corporate Activities of State-Owned Enterprises, and Annual Management Contracts that contains the collegial KPI of the Board of Directors. There were 6 (six) KPI perspectives, each of which was attributed to a total of 17 performance indicators with different targets, polarities, and weights.

In 2023, the Company achieved and exceeded the target for 15 Key Performance Indicators (KPIs). However, 2 indicators—the EBITDA indicator and the ratio of Return on Invested Capital (ROIC) to Weighted Average Cost of Capital (WACC)—did not meet their targets. For these two unrealized indicators, the Board of Directors has developed more precise and specific strategies and policies to better achieve the set KPI targets.

Pada tahun 2023, Perusahaan juga berhasil mengeksekusi berbagai program strategis dari aspek pengembangan bisnis maupun optimalisasi anak perusahaan. Pengembangan bisnis Perusahaan di tahun 2023 di antaranya meliputi kerja sama operasional pelabuhan penyeberangan Jangkar dan 11 pelabuhan di Danau Toba, optimalisasi pengembangan Bakauheni Harbour City, dan inisiatif pengembangan bisnis lainnya baik yang bersifat kajian maupun eksekusi. Perusahaan juga melakukan penyelesaian transaksi akuisisi saham, reevaluasi aset, dan restrukturisasi PT Jembatan Nusantara.

Sepanjang tahun 2023, segmen bisnis pelabuhan mencatatkan kinerja yang baik dengan produksi jasa sandar sebesar 997,78 juta mencapai 91% dari target RKAP, produksi pas pelabuhan penumpang sebesar 5,17 juta orang mencapai 87% dari target RKAP, produksi pas pelabuhan kendaraan sebesar 13,14 juta unit mencapai 85% dari target RKAP, produksi pas pelabuhan jasa parkir sebesar 210,8 ribu unit mencapai 75% dari target RKAP, dan jasa pemeliharaan dermaga sebesar 13,14 juta mencapai 85% dari target RKAP. Tidak tercapainya target RKAP secara umum disebabkan oleh penutupan sementara di beberapa dermaga akibat adanya perbaikan yang disebabkan adanya insiden dari kapal yang bersandar di dermaga milik Perusahaan.

Segmen bisnis penyeberangan mencatatkan jumlah trip sebesar 323,67 ribu mencapai 86% dari target RKAP, produksi penumpang sebesar 6,50 juta orang mencapai 78% dari target RKAP, produksi kendaraan roda 2 sebesar 4,18 juta unit mencapai 88% dari target RKAP, produksi kendaraan roda 4 atau lebih sebesar 4,48 juta unit mencapai 84% dari target RKAP, dan produksi barang sebesar 997,21 ribu ton mencapai 50% dari target RKAP. Tidak tercapainya target RKAP disebabkan oleh pengurangan lintasan subsidi, penutupan beberapa lintasan dan adanya *emergency docking* pada beberapa kapal.

Sementara dari segmen usaha aneka jasa, penjualan BBM di SPPB Khusus Cabang Merak dan Ketapang sebesar 96 juta liter, mencapai 92% dari target RKAP. Tidak tercapainya target RKAP disebabkan oleh tidak beroperasinya beberapa dermaga di Pelabuhan Merak dan Ketapang akibat adanya perbaikan yang disebabkan oleh insiden dari kapal yang bersandar di dermaga milik Perusahaan.

In 2023, the Company also successfully executed various strategic programs in business development and subsidiary optimization. The Company's business development in 2023 included operational cooperation with Jangkar Port and with 11 ports on Lake Toba, optimized development of Bakauheni Harbour City, and studies or executions of business development initiatives. The Company also completed transactions on stock acquisition, asset reevaluation, and restructuring of PT Jembatan Nusantara.

Throughout 2023, the port business segment recorded positive performance with docking service of 997.78 million GRT-Call at 91% of the WPB target, passenger pass achieved 5.17 million people or 87% of the WPB target, vehicle pass amounted to 13.14 million units or 85% of the WPB target, parking service for 210.8 thousand units or 75% of the WPB target, and dock maintenance services amounting to 13.14 million or 85% of the WPB target. The underachievement of the WPB target was primarily due to the temporary closure of several docks undergoing repairs following incidents involving ships docking at the Company's facilities.

The ferry business segment recorded trips at 323.67 thousand or 86% of the WPB target, passenger at 6.50 million people or 78% of the WPB target, 2-wheeled vehicles totalled 4.18 million units or 88% of the WPB target, 4-wheeled or more vehicles amounted to 4.48 million units or 84% of the WPB target, and goods at 997.21 thousand tons or 50% of the WPB target. Some of the targets set in WPB were not achieved due to the reduction in subsidized routes, the closure of several routes and the emergency docking of some ships.

Meanwhile, the miscellaneous services business segment recorded fuel sales at the Merak and Ketapang Branches amounting to 96 million liters or 92% of the WPB target. The unmet WPB target was traceable to several inoperative docks at Merak and Ketapang ports under reparations due to incidents from ships docking at ports belonging to the Company.

Dari kinerja keuangan, Perusahaan berhasil menca/tatkan pendapatan sebesar Rp4,9 triliun, meningkat 14% dibandingkan tahun 2022 dan mencapai 88% dari target RKAP. Beban pokok pendapatan sebesar Rp3,2 triliun, meningkat sebesar 13% dari tahun 2022 dan mencapai 95% dari target RKAP. Beban usaha tercatat sebesar Rp1,13 triliun, meningkat 30% dari tahun 2022 dan mencapai 93% dari target RKAP. Sementara itu, realisasi laba tahun berjalan sebesar Rp636,54 miliar, lebih tinggi 11,85% dari laba tahun berjalan tahun 2022 dan mencapai 92% dari target RKAP. Realisasi pendapatan yang berada di bawah RKAP disebabkan oleh adanya kendala operasional sehingga menyebabkan tidak tercapainya target produksi.

Direksi bersama-sama dengan seluruh karyawan Perusahaan terus berupaya mendorong pengembangan lintasan penyeberangan, pengembangan pelabuhan dan infrastruktur penunjangnya untuk mendukung upaya penguatan konektivitas antar pulau dengan pelayanan terbaik bagi penumpang, dan pengguna jasa. Direksi juga terus mendorong digitalisasi *ticketing system* melalui Ferizy yang saat ini telah tersedia di 16 pelabuhan dan akan terus didorong untuk tersedia di seluruh pelabuhan yang dikelola oleh Perusahaan.

Tantangan dan Mitigasi yang Dilakukan

Perusahaan menghadapi berbagai tantangan dalam menjalankan usahanya terutama terkait dengan tantangan terbesar dalam industri transportasi penyeberangan adalah pertumbuhan ekonomi domestik (antar pulau) serta regulasi penetapan tarif yang ketat dari Pemerintah Daerah maupun Pemerintah Pusat. Di samping itu, terdapat beberapa tantangan lain yang dihadapi Perusahaan sehingga berdampak pada jalannya operasional Perusahaan seperti faktor cuaca yang berdampak pada operasional kapal dan pelabuhan serta adanya beberapa pelabuhan dengan utilisasi rendah sebagai dampak dari faktor pasar yang kurang mendukung.

Namun berbagai tantangan tersebut menjadi pemacu bagi Perusahaan untuk menetapkan berbagai langkah strategis untuk tetap mampu meningkatkan kinerja dan memastikan kelancaran operasional Perusahaan secara

In terms of financial performance, the Company managed to record revenue of Rp4.9 trillion or 88% of the WPB target, a 14% increase compared to 2022. Cost of revenue was Rp3.2 trillion or 95% of the WPB target, a 13% increase from 2022. Operating expenses were recorded at Rp1.13 trillion or 93% of the WPB target, increasing by 30% from 2022. Meanwhile, the profit for the current year was Rp636,54 billion or 72% of the WPB target, 11.85% higher than the profit for year 2022. The realized revenue was below the target set in WPB because of operational constraints, which resulted in the underachieved production target.

The Board of Directors and the Company employees continuously strive to develop ferry routes, port, and supporting infrastructures to promote efforts in strengthening inter-island connectivity with the best service for passengers and customers. The Board of Directors also continues to endorse digital ticketing system through Ferizy, which is currently available at 16 ports and will be progressively available at all ports managed by the Company.

Challenges and Mitigation Implemented

The Company faced various challenges in running its business. The biggest challenge in the ferry transportation industry related to the growth of the domestic (inter-island) economy and strict tariff setting regulations from the Regional and Central Government. Moreover, there were other challenges faced by the Company that impacted the Company's operations, such as the weather that impacted the ferry and port operations as well as a number of ports with low utilization as a result of the limited market available.

However, these various challenges have become a driving force for the Company to continuously establish various strategic actions to improve performance and ensure smooth operations. The Company

konsisten menyusun rencana strategis termasuk mitigasi risiko sesuai dengan hasil pemetaan profil risiko baik di Kantor Pusat maupun Kantor Cabang.

Perusahaan juga terus melakukan koordinasi dan sinergi dengan berbagai pemangku kepentingan maupun dengan anak perusahaan untuk menciptakan iklim usaha yang kondusif serta mendukung usaha yang dilakukan Perusahaan. Di sisi internal, Perusahaan terus melakukan inovasi dari sisi bisnis maupun operasional untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi. Di samping itu Perusahaan juga melakukan penguatan aspek *safety* sebagai bagian yang sangat penting dalam memastikan keselamatan penumpang. Perusahaan juga memperkuat lini bisnis melalui penciptaan produk atau layanan baru maupun memperkuat kerja sama pengelolaan kapal dan pelabuhan dengan pihak ketiga.

PROSPEK USAHA TAHUN 2024

Tantangan perekonomian global di tahun 2024 masih terus dihadapi oleh sejumlah negara khususnya diakibatkan oleh berbagai faktor ekonomi dari negara maju dan konflik geopolitik yang masih berlangsung. Pertumbuhan ekonomi tahun 2024 diproyeksikan sama dengan tahun 2023 yaitu sebesar 3,1%. Hal tersebut menjadi tantangan tersendiri di mana tekanan inflasi dan risiko keuangan seperti risiko resesi ekonomi dan tekanan sektor properti di Tiongkok dapat menyebabkan dampak sistemik bagi perekonomian global.

Namun demikian, Bank Indonesia memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2024 berada di kisaran 4,7%- 5,5%. Hal ini sejalan dengan target pertumbuhan ekonomi yang ditetapkan oleh Pemerintah pada APBN 2024 yang mencapai 5,2%. Pertumbuhan ekonomi ini didorong oleh berlanjutnya pertumbuhan konsumsi dan dampak positif dari pelaksanaan Pemilu. Di samping itu, Pemerintah juga terus mendorong peningkatan investasi di berbagai sektor terutama dengan berlanjutnya Pembangunan Proyek Strategis Nasional (PSN) termasuk Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur.

Pada tahun 2024, sektor transportasi penyeberangan mendapatkan angin segar dari kebijakan dan rencana Pemerintah. Pemerataan

consistently prepared strategic plans including risk mitigation in accordance with risk profile mapping results at both the Head Office and Branch Offices.

The Company also maintained coordination and synergy with various stakeholders as well as subsidiaries to create a conducive business climate and support the Company's efforts. Internally, the Company continues to create innovation in business and operational aspects to improve effectiveness and efficiency. Aside from that, the Company took measures to strengthen safety aspects, which is a crucial aspect in ensuring passengers' safety. The Company also strengthened business lines through the creation of new products or services as well as intensified cooperation between ship and port management with third party entities.

BUSINESS PROSPECTS IN 2024

Global economic challenges in 2024 will continue for several countries, especially due to various economic factors from developed countries and ongoing geopolitical conflicts. Economic growth in 2024 is projected to stay the same as in 2023, at 3.1%. This is a challenge where inflationary pressures and financial risks, such as the risk of recession and mounting pressure on the property sector in China, could cause systemic impacts on the global economy.

However, Bank Indonesia estimates that Indonesia's economic growth in 2024 will be in the range of 4.7%- 5.5%. This is in line with the economic growth target set by the Government in the 2024 Indonesian Government State Budget at 5.2%. The economic growth will be driven by continued growth in consumption and the positive impact of the general election. Moreover, the Government continuously encourages increased investment in various sectors, especially with the continued development of National Strategic Projects (PSN) and the development of the new capital city (IKN) in East Kalimantan.

In 2024, the ferry transportation sector will gain positive outcomes from Government policies and plans. National economic equality is continuously

ekonomi nasional terus dipacu melalui penguatan konektivitas antar wilayah dengan arah kebijakan pemerataan pembangunan infrastruktur dalam APBN 2024 salah satunya adalah mempercepat pembangunan infrastruktur penggerak ekonomi (konektivitas dan transportasi, energi dan ketenagalistrikan, dan pangan). Anggaran pembangunan infrastruktur tercatat sebesar Rp423,4 triliun, meningkat sebesar 5,9% dibandingkan anggaran tahun 2023.

Pada tahun 2024, Pemerintah memiliki target pembangunan 36 pelabuhan penyeberangan baru terutama untuk meningkatkan konektivitas dan mobilitas masyarakat melalui jalur penyeberangan. Pembangunan pelabuhan ini tidak hanya untuk menunjang lintasan perintis di wilayah 3T, namun juga dilakukan untuk mendorong lintasan komersial. Pembangunan pelabuhan penyeberangan yang masif akan berdampak secara langsung bagi Perusahaan terutama bagi bisnis penyeberangan dengan potensi untuk membuka lintasan-lintasan baru baik lintasan perintis maupun lintasan komersial.

Untuk mengoptimalkan prospek usaha di tahun 2024, Direksi telah menetapkan strategi *sustainability* yang selaras dengan RJPP 2020-2024. Strategi ini berfokus pada upaya pertumbuhan kinerja yang berkelanjutan melalui serangkaian inisiatif yaitu *business expansion*, *operational excellence* dan *foundation*. Perusahaan juga memiliki *game changer* tahun 2024 yaitu meningkatkan sinergi induk dengan anak perusahaan, pengembangan *integrated maintenance management*, dan optimalisasi *waterfront tourism business* melalui proyek BHC. Melalui strategi dan inisiatif tersebut, Perusahaan memiliki optimisme untuk menghasilkan pertumbuhan bisnis yang semakin baik di masa depan.

Penerapan Tata Kelola Perusahaan

Jajaran Direksi bertekad untuk mencapai kinerja usaha yang optimal dengan mengutamakan penerapan prinsip tata kelola yang baik (*Good Corporate Governance*, GCG). Dengan menjalankan prinsip-prinsip tata kelola yang baik secara konsisten dalam setiap aspek kegiatan Perusahaan di berbagai tingkatan organisasi, Direksi yakin bahwa keberlanjutan usaha dapat terjaga dengan baik.

pushed forward through strengthened connectivity between regions, as directed by the policy of equal infrastructure development in the 2024 government budget, one of which is to accelerate the development of infrastructure as an economic engine (connectivity and transportation, energy and electricity, and food). Infrastructure development was budgeted at Rp423.4 trillion, an increase of 5.9% compared to the 2023 budget.

For 2024, the Government has set a target to construct 36 new ferry ports, primarily to enhance connectivity and mobility for people traveling via ferry routes. The construction of ports is aimed to support pioneer routes in the 3T regions (frontier, outermost, and least developed), but is also intended to encourage commercial routes. The massive construction of ferry ports will directly impact the Company, especially for the ferry business, with the potential to open new routes, both pioneer and commercial routes.

To optimize business prospects in 2024, the Board of Directors has established a sustainability strategy that is in line with 2020-2024 RJPP. This strategy focuses on efforts to achieve sustainable performance growth through a series of initiatives, covering business expansion, operational excellence and foundational. The Company also has a game changer in 2024, namely increasing synergy between parent company and subsidiaries, developing integrated maintenance management, and optimizing the waterfront tourism business through the BHC project. Through these strategies and initiatives, the Company is optimistic about generating better business growth in the future.

Implementation of Corporate Governance

The Board of Directors is determined to achieve optimal business performance by prioritizing the implementation of Good Corporate Governance (GCG) principles. By consistently implementing the GCG principles in every aspect of the Company's activities at all levels of the organization, the Board of Directors is confident that business will be able to operate sustainably.

Oleh karena itu, penerapan GCG menjadi sangat penting dalam menghadapi risiko bisnis dan berbagai tantangan usaha di masa mendatang. Konsistensi dalam menerapkan GCG diyakini dapat memperkuat posisi Perusahaan dalam menghadapi persaingan bisnis, meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam manajemen sumber daya, mengoptimalkan nilai jangka panjang, serta memperkuat kepercayaan dan citra Perusahaan. Hal ini memungkinkan Perusahaan untuk beroperasi secara berkelanjutan dan memberikan nilai tambah bagi seluruh pemangku kepentingan.

Dalam setiap pengambilan keputusan dan pembuatan kebijakan, Direksi selalu memperhatikan prinsip GCG, menjaga kehati-hatian, dan berusaha menghindari benturan kepentingan. Direksi juga secara transparan berkomunikasi kepada karyawan dan pemangku kepentingan mengenai arah bisnis Perusahaan guna mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan.

Tidak hanya itu, Direksi juga memperkuat fungsi manajemen risiko dan audit internal untuk memastikan terciptanya mekanisme pengawasan dan pengendalian internal yang efektif. Keyakinan Direksi bahwa menerapkan prinsip GCG secara konsisten akan menjamin keselarasan bisnis secara menyeluruh, mencapai kinerja Perusahaan yang optimal, serta menjaga kepercayaan dan kredibilitas Perusahaan. Tindakan konkret yang telah dilakukan Perusahaan dalam penerapan GCG pada tahun 2023 antara lain meliputi:

1. Melaksanakan asesmen GCG dan menyampaikan laporan hasilnya kepada Kementerian BUMN selaku pemegang saham.
2. Melakukan evaluasi dan pemutakhiran beberapa pedoman yang terkait dengan GCG dan Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP).
3. Menjalankan Sistem Pelaporan Dugaan Pelanggaran (*Whistleblowing System*) dan memantau hasilnya pada tahun 2023 oleh Tim Pengelola WBS.
4. Melaksanakan Pengendalian Gratifikasi Insan Perusahaan pada tahun 2023 oleh Unit Pengendali Gratifikasi (UPG).
5. Memperbarui Sistem Manajemen Terpadu pada Revisi Tahun 2023.
6. Menyusun *Electronic Sistem* Manajemen Terpadu (e-SMT).

Therefore, GCG implementation is increasingly important in managing business risks and various future business challenges. Consistency in implementing GCG is perceived to enhance the Company's position in facing business competition, increase effectiveness and efficiency in resource management, optimize long-term value, and strengthen Company trust and image. This allows the Company to operate sustainably and provides added value for all stakeholders.

In every decision and policy making, the Board of Directors always pays attention to GCG principles, maintains prudence, and avoids conflict of interests. The Board of Directors also transparently communicates with employees and stakeholders regarding the Company's business direction in order to achieve the established vision and mission.

Furthermore, the Board of Directors also strengthens the risk management and internal audit work units to ensure effective internal supervision and control mechanism. The Board of Directors believes that consistent application of GCG principles will ensure overall business harmony, achieve optimal Company performance, and maintain the Company's trust and credibility. The Company implemented GCG with the following concrete actions in 2023:

1. Conducted a GCG assessment and submit the resulting report to the Ministry of SOEs as the shareholder.
2. Evaluated and updated several guidelines related to GCG and Anti-Bribery Management System (*Sistem Manajemen Anti Penyuapan*, SMAP).
3. Implemented Whistleblowing System and monitored the 2023 results by the WBS Management Team.
4. Implemented Gratification Control for Company Personnels in 2023 by the Gratification Control Unit (*Unit Pengendali Gratifikasi*, UPG).
5. Updated the Integrated Management System to the 2023 Revision.
6. Developed Electronic Integrated Management System (e-SMT).

7. Melakukan *Audit Surveillance* terhadap ISO 37001:2016 Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP), ISO 9001:2015 Sistem Manajemen Mutu, dan ISO 45001:2018 Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3).

Dalam rangka memperoleh pemahaman yang lebih mendalam terkait penerapan GCG dan praktik-praktik terbaik sebagai pedoman, Perusahaan secara rutin melakukan evaluasi menggunakan standar alat uji yang telah ditetapkan sesuai dengan Keputusan Sekretaris Menteri BUMN No. SK-16/S.MBU/2012 tentang Indikator/Parameter Penilaian dan Evaluasi atas Penerapan GCG pada BUMN. Pada tahun 2023, Perusahaan telah melaksanakan evaluasi terhadap penerapan GCG selama tahun buku 2022 dengan skor 96,314 dan meraih predikat "Sangat Baik".

Perusahaan juga secara proaktif mengikuti dan menyesuaikan diri dengan regulasi yang relevan, termasuk Peraturan Menteri BUMN RI No. PER-2/MBU/03/2023 yang mengatur Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi yang Signifikan bagi BUMN. Dalam rangka meningkatkan implementasi GCG, Perusahaan terus berkomitmen untuk memperbaiki standar sesuai dengan praktik terbaik yang diakui secara internasional. Hal ini tercermin dalam keterlibatan Perusahaan dengan Pedoman Umum Governansi Korporat Indonesia (PUGKI) Tahun 2021 serta prinsip *Governance, Risk and Compliance* (GRC). Selain itu, Perusahaan juga mengacu pada Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka yang telah ditetapkan oleh lembaga berwenang, seperti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 21/POJK.04/2015 dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SEOJK) No. 32/SEOJK.04/2015. Tujuan Perusahaan adalah untuk memastikan bahwa tidak hanya mematuhi peraturan yang berlaku, tetapi juga memperkuat prinsip-prinsip tata kelola yang kuat dalam setiap aspek operasional Perusahaan.

Penerapan Manajemen Risiko

Pada tahun ini, Direksi telah melakukan pengembangan dan peningkatan pada kerangka kerja sistem pengelolaan risiko dan struktur pengendalian internal. Upaya tersebut dilakukan secara menyeluruh, terintegrasi, dan berkelanjutan guna mendeteksi potensi risiko lebih

7. Conducted Audit Surveillance on ISO 37001:2016 Anti-Bribery Management System, ISO 9001:2015 Quality Management System, and ISO 45001:2018 Occupational Health and Safety Management System.

In order to gain a deeper understanding on GCG implementation and best practice as guidelines, the Company routinely perform evaluations using defined standard test in accordance with the Decree of the Secretary of the Minister of SOEs No. SK-16/S.MBU/2012 on Indicators/Parameters for Assessment and Evaluation of GCG Implementation in SOEs. In 2023, the Company evaluated the GCG implemented during the 2022 financial year with resulting a score of 96.314 and achieved "Very Good".

The Company proactively complied with and adapted to relevant regulations, including the Regulation of the Minister of SOEs No. PER-2/MBU/03/2023, which regulated Governance and Significant Corporate Activities for SOEs. So as to improve GCG implementation, the Company continued its commitment to improve standards in accordance with internationally recognized best practices. This was reflected in the Company's involvement with the 2021 The Indonesian General Guidelines for Corporate Governance (PUGKI) as well as the Governance, Risk and Compliance (GRC) principles. Apart from that, the Company also referred to the Public Company Governance Guidelines established by authorized institutions, such as Regulations of Financial Services Authority (POJK) No. 21/POJK.04/2015 and Circular Letter of Financial Services Authority (SEOJK) No. 32/SEOJK.04/2015. The Company's goal was to ensure compliance with applicable regulations, and also to strengthen strong governance principles in every aspect of the Company's operations.

Implementation of Risk Management

Throughout the year, the Board of Directors has developed and improved the risk management system framework and internal control structure. These efforts were carried out in a comprehensive, integrated and sustainable manner to detect potential risks early

awal dan mengambil langkah-langkah strategis untuk meminimalkan dampaknya. Komitmen Perusahaan terhadap pengelolaan risiko didukung oleh Kebijakan Manajemen Risiko yang telah disahkan melalui Surat Keputusan Bersama Dewan Komisaris dan Direksi PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) SK.772/HK.002/ASDP-2023, tanggal 1 Oktober 2023. Kebijakan ini menjadi panduan dalam proses manajemen risiko Perusahaan.

Sasaran yang ditetapkan untuk tahun 2023 menjadi dasar bagi identifikasi risiko yang dilakukan oleh pemilik risiko di berbagai Unit Kerja seperti Kantor Pusat, Regional, dan Cabang. Hal ini bertujuan untuk mengenali peristiwa yang potensial dan dampaknya terhadap tujuan, strategi, sasaran, dan rencana kegiatan Perusahaan. Proses penyempurnaan Profil Risiko Utama dilakukan berdasarkan pada hasil pemantauan dan evaluasi yang bertujuan untuk meningkatkan manajemen risiko. Proses ini mencakup pemutakhiran daftar risiko utama dengan identifikasi, analisis, evaluasi, serta tindakan pengendalian yang sesuai dengan kebutuhan organisasi demi mencapai tujuan Perusahaan.

Pada Desember 2022, Perusahaan menetapkan 8 profil risiko utama yang secara rutin dilakukan pemantauan dan review untuk menghasilkan pemutakhiran sehingga sepanjang tahun 2023 terdapat 10 profil risiko yang dikelola untuk memastikan penanganan risiko telah berjalan sesuai dengan rencana dalam rangka mendukung implementasi strategi Perusahaan hingga akhir tahun 2023.

Penerapan Sistem Pengendalian Internal

Penerapan Sistem Pengendalian Internal dijalankan untuk memastikan pencapaian tujuan Perusahaan melalui pencapaian efektivitas dan efisiensi dalam kegiatan operasional. Selain itu, sistem ini juga bertujuan untuk menjamin keandalan pelaporan keuangan, mengamankan aset Perusahaan, mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta mengurangi dampak kerugian dan risiko penyimpangan kewenangan. Lebih jauh lagi, tujuan dari Sistem Pengendalian Intern adalah untuk meningkatkan efektivitas organisasi dan mengoptimalkan pengeluaran secara *cost-effective*.

and take strategic steps to minimize their impacts. The Company's commitment to risk management was supported by the Risk Management Policy, which was ratified through a Joint Decree of the Boards of Commissioners and Directors of SK.772/HK.002/ASDP-2023, dated 1 October 2023. This policy becomes guidance in the Company's risk management process.

The 2023 set targets served as a basis for risk identification carried out by risk owners in various Work Units such as Head Office, Regional, and Branch Offices. It aimed to recognize potential events and their impacts on the Company's goals, strategies, targets and activity plans. The Major Risk Profile improvement process was driven by assessment and evaluation results, which aimed to improve risk management. This process included updating the list of major risks with identifications, analysis, evaluation and control measures in accordance with the organization's needs to achieve Company goals.

In December 2022, the Company determined 8 main risk profiles which would be routinely monitored and reviewed for updates. Throughout 2023, 10 risk profiles were actively managed to ensure that risk management was executed according to plan. This was crucial in supporting the implementation of the Company's strategy through to the end of the year.

Implementation of an Internal Control System

The implementation of the Internal Control System ensures that the Company achieves goals through effectiveness and efficiency in operational activities. Apart from that, the system also aims to ensure the reliability of financial reporting, to safeguard Company assets, to comply with applicable laws and regulations, and to reduce the impact of losses and the risk of deviations in authority. Furthermore, the objective of the Internal Control System is to increase organizational effectiveness and optimize expenditures in a *cost-effective* manner.

Sistem pengendalian internal Perusahaan telah diatur sesuai dengan Kerangka Kerja Pengendalian Internal Terintegrasi yang telah dikembangkan oleh *The Committee of Sponsoring Organization of the Treadway Commission* (COSO). Kerangka kerja ini mempertimbangkan tujuan pengendalian internal yang meliputi aspek operasional, pelaporan, dan kepatuhan. Evaluasi terhadap Sistem Pengendalian Internal dilakukan melalui berbagai laporan, seperti Laporan Pengendalian Teknis, Laporan Pengendalian Prosedur, Laporan Pengendalian Unit Kerja, dan Laporan Sistem Pengendalian Internal.

Perusahaan secara berkala melakukan *review* dan evaluasi terhadap sistem pengendalian internal guna memastikan keberlanjutan dan peningkatan efektivitas pengawasan serta pengendalian internal. Berdasarkan Laporan Auditor Independen pada tahun buku 2023, terdapat temuan bahwa laporan keuangan Perusahaan disajikan secara wajar dalam semua aspek yang material dan telah sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku di Indonesia.

Penerapan Sistem Pelaporan Dugaan Pelanggaran

Kontrol internal dalam Perusahaan didukung oleh serangkaian kebijakan dan infrastruktur yang dirancang untuk melaporkan segala bentuk pelanggaran terhadap kode etik dan tindakan yang merugikan Perusahaan. Kebijakan Sistem Pelaporan Dugaan Pelanggaran (WBS) disahkan melalui Surat Keputusan Bersama antara Dewan Komisaris dan Direksi PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) dengan No. SK.152/HK.002/ASDP-2021. Dokumen ini merupakan hasil dari revisi Surat Keputusan Bersama sebelumnya, yaitu No. SK.806/HK.002/ASDP-2020, yang membahas tentang Sistem Pelaporan Dugaan Pelanggaran (WBS) PT ASDP Indonesia Ferry (Persero). Lingkup pelaporan ini mencakup segala indikasi pelanggaran yang dilakukan oleh anggota Perusahaan, yang diatur oleh Sistem Pelaporan Dugaan Pelanggaran perusahaan. Dalam peraturan ini, dijelaskan bahwa pihak yang melaporkan pelanggaran dapat berasal dari internal Perusahaan maupun pihak lain yang terkait, sedangkan yang dilaporkan merupakan anggota Perusahaan yang diduga melakukan pelanggaran.

The Company's internal control system has been regulated in accordance with the Integrated Internal Control Framework which was developed by The Committee of Sponsoring Organization of the Treadway Commission (COSO). This framework considers internal control objectives that covers operational, reporting and compliance aspects. Evaluation of the Internal Control System is carried out through various reports, such as Technical Control Reports, Procedure Control Reports, Work Unit Control Reports, and Internal Control System Reports.

The Company periodically reviews and evaluates the internal control system to ensure sustainability and increase the effectiveness of oversight and internal control. Based on the Independent Auditor's Report for the 2023 financial year, the findings stated that the Company's financial reports are fairly presented in all material aspects and were in accordance with the Financial Accounting Standards applicable in Indonesia.

Implementation of Whistleblowing System

The Company's internal controls are supported by a series of policies and infrastructure designed to report all forms of ethical code violations and damaging actions to the Company. The Whistleblowing System (WBS) policy was ratified through a Joint Decree of the Boards of Commissioners and Directors of PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) No. SK.152/HK.002/ASDP-2021. The document was amended from of the previous Joint Decree No. SK.806/HK.002/ASDP-2020, which explained the PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) WBS. The scope of the reporting includes all indications of violations committed by Company members, which were regulated by the Company's WBS. This regulation stipulates that the reporting party may be from within the Company or other related parties. Those reported are members of the Company suspected of committing violations.

Sepanjang perjalanan tahun 2023, tidak ada laporan dugaan pelanggaran yang masuk ke Sekretariat Sistem Pelaporan Dugaan Pelanggaran. Oleh karena itu, tidak ada laporan dugaan pelanggaran yang memerlukan proses administrasi, klasifikasi, atau klarifikasi di Sekretariat. Ini berarti tidak ada laporan yang diteruskan kepada Tim Pengelola Sistem Pelaporan Dugaan Pelanggaran dalam periode tersebut.

Komitmen Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan

Perusahaan menyadari bahwa dalam menjalankan usahanya tidak semata-mata berorientasi pada keuntungan semata, melainkan perlu adanya harmonisasi antara aspek *people*, *profit* dan *planet* untuk memastikan keberlanjutan usaha yang dijalankan Perusahaan. Untuk itu, Perusahaan secara konsisten menjalankan program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) sebagai upaya wujud kepedulian dan apresiasi Perusahaan terhadap masyarakat yang telah memberikan kepercayaan dan mendukung jalannya usaha Perusahaan.

Pelaksanaan program TJSL dilakukan untuk mendukung tercapainya *Sustainability Development Goals* (SDGs) dengan memperhatikan keseimbangan aspek *Environment, Social and Governance*. Penyusunan program TJSL mengacu pada ketentuan dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Peraturan Menteri BUMN No. PER-05/MBU/04/2021 tentang Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan BUMN yang terdiri dari pilar sosial, ekonomi, lingkungan, hukum, dan tata kelola. Fokus pelaksanaan program TJSL Perusahaan terdiri dari tiga program utama yaitu program pendidikan, program pengembangan UMKM, serta program lingkungan.

Sepanjang tahun 2023, Perusahaan telah merealisasikan program TJSL sebesar Rp1,6 miliar dengan realisasi program pilar sosial sebesar Rp700 juta dan realisasi program pilar lingkungan sebesar Rp943,6 miliar. Pelaksanaan program TJSL dilaksanakan di seluruh Kantor Cabang Perusahaan, hal ini sebagai upaya Perusahaan untuk memastikan pemerataan program TJSL di seluruh wilayah kerja Perusahaan.

Throughout 2023, there was no reports of alleged violation being submitted to the WBS Secretariat, which resulted in zero report of alleged violations that required any processes of administrative, classification or clarification by the Secretariat. As such, there was zero report forwarded to the WBS Management Team during the year.

Commitment to Social and Environmental Responsibility

The Company understands that managing a business cannot be solely oriented towards profit, instead there needs to be harmonization between aspects of people, profit, and planet to ensure the sustainability of the business run by the Company. Therefore, the Company consistently implements the Corporate Social Responsibility (CSR) program as efforts to demonstrate the Company's concern and appreciation for the community who have trusted and supported the Company's business operations.

The CSR program was implemented in relation to the achievement of the Sustainability Development Goals (SDGs) whilst paying attention to the balance of Environmental, Social and Governance aspects. The CSR program formulation refers to the provisions in Law No. 40/2007 concerning Limited Liability Companies and Regulation of the Minister of SOEs No. PER-05/MBU/04/2021 on the Social and Environmental Responsibility Program for SOEs which consists of pillars of social, economics, environment, law, and governance. The focus of Company's CSR program implementation consists of three main programs, namely educational programs, MSME development programs, and environmental programs.

Throughout 2023, the Company has contributed to the CSR program an amount totalling Rp1.6 billion. This budget was allocated to the social pillar program amounting to Rp700 million and to the environmental pillar program amounting to Rp943.6 billion. The implementation of the CSR program were carried out in all of the Company Branch Offices as part of the Company's effort to ensure equal distribution of the CSR program throughout the Company's work areas.

PERUBAHAN KOMPOSISI DIREKSI

CHANGES IN BOARD OF DIRECTORS COMPOSITION

Pada tahun 2023, tidak terjadi perubahan dalam Komposisi Direksi. Hingga 31 Desember 2023, komposisi Direksi adalah sebagai berikut:

In 2023, there were no changes in the composition of the Board of Directors. As of 31 December 2023, the composition of the Board of Directors was as follows:

Nama Name	Jabatan Position	.Dasar Pengangkatan Basis of Appointment
Ira Puspadewi	Direktur Utama President Director	Keputusan Menteri BUMN No. SK-286/MBU/12/2022 tanggal 8 Desember 2022. Decree of the Minister of SOEs No. SK-286/MBU/12/2022 dated 8 December 2022.
M. Yusuf Hadi	Direktur Komersial dan Pelayanan Commercial and Services Director	Keputusan Menteri BUMN No. SK-98/MBU/04/2022 tanggal 12 April 2022. Decree of the Minister of SOEs No. SK-98/MBU/04/2022 dated 12 April 2022.
Djunia Satriawan	Direktur Keuangan, Teknologi Informasi, dan Manajemen Risiko Finance, Information Technology, and Risk Management Director	Keputusan Menteri BUMN No. SK-283/MBU/08/2021 tanggal 25 Agustus 2021. Decree of the Minister of SOEs No. SK-283/MBU/08/2021 dated 25 Agustus 2021.
Kusnadi C. Wijaya	Direktur Teknik dan Fasilitas Engineering and Facilities Director	Keputusan Menteri BUMN No. SK-338/MBU/12/2019 tanggal 27 Desember 2019. Decree of the Minister of SOEs No. SK-338/MBU/12/2019 dated 27 Desember 2019.
Harry Muhammad Adhi Caksono	Direktur Perencanaan dan Pengembangan Planning and Development Director	Keputusan Menteri BUMN No. SK-215/MBU/06/2020 tanggal 24 Juni 2020. Decree of the Minister of SOEs No. SK-215/MBU/06/2020 dated 24 June 2020.
Wahyu Wibowo	Direktur SDM dan Layanan Korporasi HR and Corporate Services Director	Keputusan Menteri BUMN No. SK-338/MBU/12/2019 tanggal 27 Desember 2019. Decree of the Minister of SOEs No. SK-338/MBU/12/2019 dated 27 December 2019.

PENUTUP CLOSING

Kami, seluruh Direksi Perusahaan, menyampaikan terima kasih kepada Dewan Komisaris, pemegang saham, pelanggan, dan mitra kerja yang telah memberikan kepercayaan kepada Direksi dalam menjalankan fungsi pengelolaan Perusahaan sepanjang tahun 2023 sehingga Perusahaan dapat mencapai pertumbuhan kinerja yang signifikan dan membanggakan. Direksi juga mengucapkan terima kasih kepada regulator dan para pemangku kepentingan lain atas dukungan, maupun, kerja sama yang telah terjalin baik selama tahun 2023.

Selain itu, Direksi juga menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada segenap karyawan atas dedikasi penuh dan kerja kerasnya sehingga mampu membawa Perusahaan mencapai prestasi dan kinerja yang baik di tengah kondisi perekonomian yang penuh ketidakpastian.

Kami berkomitmen untuk memberikan upaya terbaik untuk mencapai kinerja Perusahaan yang berkelanjutan dan memberikan kontribusi bagi perekonomian Indonesia dengan memberikan komitmen penuh untuk menghubungkan wilayah-wilayah di Indonesia melalui transportasi penyeberangan dengan layanan terbaik bagi pelanggan.

We, the Board of Directors of the Company, express our profound gratitude to the Board of Commissioners, shareholders, customers, and partners for their trust in our management throughout 2023, enabling the Company to achieve significant and encouraging performance growth. We also extend our gratitude to the regulators and stakeholders for their continued support and cooperation throughout the 2023.

Moreover, the Board of Directors extends our highest appreciation to all employees for their unwavering dedication and hard work, which have been instrumental in steering the Company towards excellent achievements and performance amidst uncertain economic conditions.

We are committed to give our best efforts to achieve sustainable Company performance and contribute to the Indonesian economy by providing full commitment to connecting regions in Indonesia through ferry transportation with the best customer service.

JAKARTA, 06 JUNI 2024

JAKARTA, 06 JUNE 2024

Atas nama Direksi PT ASDP Indonesia Ferry (Persero),

On behalf of the Board of Directors of PT ASDP Indonesia Ferry (Persero),



Ira Puspadewi

Direktur Utama
President Director

1. IRA PUSPADEWI

Direktur Utama | *President Director*

Periode Jabatan : Desember 2022 - Desember 2027

Term of Office : December 2022-December 2027

2. KUSNADI C. WIJAYA

Direktur Teknik dan Fasilitas | *Engineering and Facilities Director*

Periode Jabatan : Desember 2019-Desember 2024

Term of Office : December 2019-December 2024

3. HARRY MUHAMMAD ADHI CAKSONO

Direktur Perencanaan dan Pengembangan | *Planning and Development Director*

Periode Jabatan : Juni 2020-Juni 2025

Term of Office : June 2020-June 2025

4. WAHYU WIBOWO

Direktur SDM dan Layanan Korporasi |

HR and Corporate Services Director

Periode Jabatan : Desember 2019-Desember 2024

Term of Office : December 2019-December 2024

5. MUHAMMAD YUSUF HADI

Direktur Komersial dan Pelayanan |

Commercial and Services Director

Periode Jabatan : April 2022-April 2027

Term of Office : April 2022-April 2027

6. DJUNIA SATRIAWAN

Direktur Keuangan, TI dan Manajemen Risiko |

Finance, IT & Risk Management Director

Periode Jabatan : Agustus 2021-Agustus 2026

Term of Office : August 2021-August 2026



6

5

1

2

3

4

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN TAHUNAN 2023

Kami yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa semua informasi dalam laporan tahunan PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) tahun 2023 telah dimuat secara lengkap dan bertanggung jawab penuh atas kebenaran isi laporan tahunan.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Jakarta, 06 Juni 2024

Jakarta, 06 June 2024

Dewan Komisaris
Board of Commissioners
PT ASDP Indonesia Ferry (Persero)



Saiful Haq Manan

Komisaris Utama (Independen)
President Commissioner
(Independent)



Hendar Ristriawan

Komisaris Independen
Independent Commissioner



Iwan Hari Sugianto

Komisaris Independen
Independent Commissioner



Susi Meyrista Tarigan

Komisaris
Commissioner



Edmil Nurjamil

Komisaris
Commissioner



Budi Setiyadi

Komisaris
Commissioner

STATEMENT OF RESPONSIBILITY FOR THE 2023 ANNUAL REPORT

We, the undersigned, declare that all information in the 2023 annual report of PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) has been presented in its entirety and we are fully responsible for the accuracy of the annual report contents.

This statement is made truthfully.

Jakarta, 06 Juni 2024
Jakarta, 06 June 2024

Direksi
Board of Directors
PT ASDP Indonesia Ferry (Persero)



Ira Puspawati
Direktur Utama
President Director



M. Yusuf Hadi
Direktur Komersial
dan Pelayanan
Commercial & Services Director



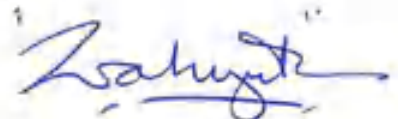
Djunia Satriawan
Direktur Keuangan, Teknologi
Informasi, dan Manajemen Risiko
Financial, Information Technology
& Risk Management Director



Kusnadi C. Wijaya
Direktur Teknik dan Fasilitas
Engineering and
Facilities Director



Harry Muhammad
Adhi Caksono
Direktur Perencanaan dan
Pengembangan
Planning and
Development Director



Wahyu Wibowo
Direktur SDM dan
Layanan Korporasi
HR and Corporate
Services Director



03 PROFIL PERUSAHAAN

COMPANY PROFILE



IDENTITAS PERUSAHAAN

COMPANY IDENTITY

01

Nama Perusahaan Company Name	PT ASDP Indonesia Ferry (Persero)	Tanggal Pendirian Date of Establishment	8 Desember 1993 8 December 1993
Nama Singkatan Acronym	ASDP	Status Perusahaan Company Status	Badan Usaha Milik Negara (BUMN) State-Owned Enterprise (SOE)

02

Bidang Usaha | *Line of Business*

- Jasa angkutan sungai, danau dan penyeberangan | *River, lake, and ferry transport services*
- Jasa angkutan laut | *Sea transportation services*
- Aktivitas penunjang angkutan | *Transportation support activities*

03

Dasar Hukum Pendirian | *Legal Basis for Establishment*

Akta No. 82 tentang Perseroan Terbatas Perusahaan Perseroan (Persero) PT Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Menteri Kehakiman Nomor C2.13294.HT.01.01-Th.93 tanggal 8 Desember 1993

Deed No. 82 concerning Limited Liability Companies (Persero) PT Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan as stipulated in the Decree of the Minister of Justice No. C2.13294.HT.01.01-Th.93 dated 8 December 1993.



Kepemilikan Saham

Shareholder

100% Badan Usaha Milik Negara (BUMN)

100% State-Owned Enterprises (SOEs)



Modal Dasar

Authorized Capital

Rp10.000.000.000.000
(Sepuluh Triliun Rupiah)

Rp10,000,000,000,000
(Ten Trillion Rupiah)



Modal Disetor Penuh dan Ditempatkan

Paid Up and Issued Capital

Rp5.173.195.000.000
(Lima Triliun Seratus Tujuh Puluh Tiga Miliar Seratus Sembilan Puluh Lima Juta Rupiah)

Rp5.173.195.000.000
(Five Trillion One Hundred Seventy Three Billion One Hundred Ninety Five Million Rupiah)



Jumlah Karyawan

Number of Employees

4.738 Orang
4.738 Employees



Alamat Kantor Pusat

Head Office Address

PT ASDP Indonesia Ferry Building
Jalan Jend. Achmad Yani Kav. 52A, Cempaka Putih Timur, Jakarta Pusat, 10510, Indonesia
Call Center : (021) 191
SMS Center : 08111-021191

PT ASDP Indonesia Ferry Building
Jalan Jend. Achmad Yani Kav. 52A, Cempaka Putih Timur, Central Jakarta, 10510, Indonesia
Call Center : (021) 191
SMS Center : 08111-021191



Email dan Website

Email and Website

cs@indonesiaferry.co.id

www.asdp.id



Instagram: @asdp_id

Twitter: @asdp_id

Facebook Fan Page: ASDP Indonesia Ferry

Youtube: ASDP

RIWAYAT SINGKAT PERUSAHAAN

COMPANY HISTORY IN BRIEF

PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) memulai sejarahnya pada tanggal 27 Maret 1973 yang berawal Proyek Angkutan Sungai, Danau, dan Ferry (PASDF) di bawah naungan Direktorat Lalu Lintas Angkutan Sungai, Danau, dan Ferry (DLLASDF), Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, Departemen Perhubungan.

PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) began its history on 27 March 1973, initiated with the Proyek Angkutan Sungai, Danau, dan Ferry (PASDF – River, Lake, and Ferry Transport Project) under the supervision of the Directorate of River, Lake, and Ferry Transportation Traffic (DLLASDF), Directorate General of Land Transportation, Department of Transportation.

Pada tahun 1986, proyek ASDP Ferry bertransformasi menjadi Perusahaan Umum (Perum) dengan nama Perum Angkutan, Sungai, Danau, dan Penyeberangan (Perum ASDP). Kemudian pada tahun 1993, ASDP mengalami perubahan status dari Perusahaan Umum (Perum) menjadi Perseroan yang diikuti dengan perubahan nama menjadi PT ASDP (Persero). Perubahan status dan nama Perusahaan tercatat dalam Akta Nomor 82 tentang Perseroan Terbatas Perusahaan Perseroan (Persero) PT Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan tanggal 29 Juni 1993 dibuat di hadapan Imas Fatimah, S.H., notaris di Jakarta sebagaimana telah disahkan dengan Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor C2.13294.HT.01.01-1993 tanggal 8 Desember 1993.

Perubahan status Perusahaan menjadi tonggak sejarah sekaligus menegaskan posisi ASDP untuk dapat bersaing dengan BUMN lainnya dan perusahaan swasta sejenis yang bergerak di industri penyeberangan. Perubahan status menjadi BUMN ini juga menuntut Perusahaan untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitasnya sebagai penyedia penyeberangan perintis.

In 1986, the ASDP Ferry project was transformed into a Public Utility Company (*Perusahaan Umum*, Perum) under the name of Perum Angkutan, Sungai, Danau, dan Penyeberangan (Perum ASDP). Then in 1993, ASDP underwent a status change from Public Utility Company to Limited Liability Company, which was followed by a name change to PT ASDP (Persero). The status and name change of the Company were recorded in Deed No. 82 on Limited Liability Company (Persero) PT Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan dated 29 June 1993 made before Imas Fatimah, S.H., a notary in Jakarta as ratified by Decree of the Minister of Justice of the Republic of Indonesia No. C2.13294.HT.01.01-1993 dated 8 December 1993.

The change in Company status was a historical milestone and confirmed ASDP's commitment to staying competitive with other SOEs and similar private companies in the ferry industry. The status change to become an SOE also necessitated the Company to increase its capacity and capability as a pioneering ferry provider.

Seiring dengan perkembangan Perusahaan dan merespon dinamika pasar, pada tanggal 5 Agustus 2008 Perusahaan kembali melakukan perubahan nama menjadi PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) yang dilakukan melalui penandatanganan Pakta Integritas di hadapan Deputy Bidang Usaha Logistik dan Pariwisata Kementerian Negara BUMN serta Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Perubahan tersebut tercatat pada Akta Nomor 9 tentang Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan tanggal 24 November 2004 dibuat di hadapan Yualita Widyadhari, S.H., notaris di Jakarta sebagaimana telah disetujui dengan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor C-29540 HT.01.04.TH.2004 tanggal 7 Desember 2004.

In line with the Company's growth and response to market dynamics, on 5 August 2008 the Company again changed its name to PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) which was carried out by signing an Integrity Pact in the presence of the Deputy for Logistics and Tourism Business of the Ministry of State-Owned Enterprises and the Deputy Chair of the Corruption Eradication Commission (KPK). These changes were documented in Deed No. 9 on Statement of Decision of Shareholders of PT Angkutan Sungai, Danau, and Penyeberangan dated 24 November 2004 made before Yualita Widyadhari, S.H., a notary in Jakarta as approved by Decree of the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia No. C-29540 HT.01.04.TH.2004 dated 7 December 2004.



PERUBAHAN NAMA PERUSAHAAN

CHANGES IN COMPANY'S NAME



**3****1986**

PASDP bermetamorfosis menjadi Perusahaan Umum Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan (Perum PASDP).

PASDP morphed into the Perusahaan Umum Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan (Perum PASDP).

**4****1993**

Perum ASDP bertransformasi menjadi PT ASDP (Persero).
Perum ASDP transformed into PT ASDP (Persero).

**5****2008**

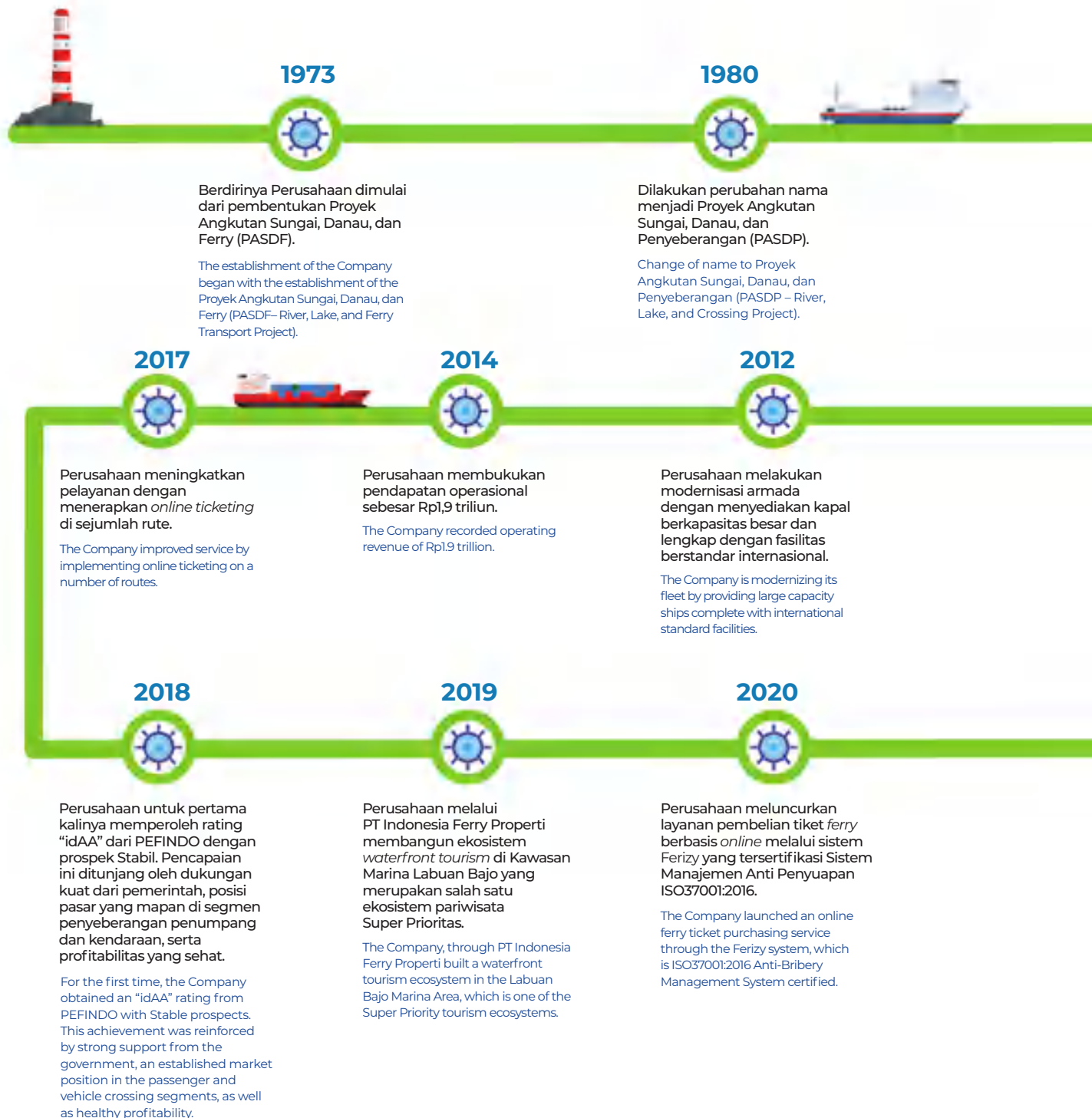
PT ASDP (Persero) berubah nama menjadi PT ASDP Indonesia Ferry (Persero).

PT ASDP (Persero) changed its name to PT ASDP Indonesia Ferry (Persero).



JEJAK LANGKAH PERUSAHAAN

COMPANY MILESTONES



1986

Perubahan status PASDP menjadi perusahaan dengan status Perusahaan Umum (Perum).

Change of PASDP status into a company of Perusahaan Umum (Perum) status.

1992

Perusahaan Umum (Perum) ASDP bertransformasi menjadi PT ASDP (Persero).

Perusahaan Umum (Perum) ASDP was transformed into PT ASDP (Persero).

2008

Perusahaan melakukan transformasi bisnis dan melakukan redefinisi visi dan misi, moto perusahaan serta modernisasi operasional menuju standar internasional.

The Company transformed the business and redefined its vision, mission, and company motto as well as modernized operations towards international standards.

2004

Perusahaan melakukan perubahan identitas perusahaan dari PT ASDP (Persero) menjadi PT ASDP Indonesia Ferry (Persero).

The Company changed its corporate identity from PT ASDP (Persero) to PT ASDP Indonesia Ferry (Persero).

2021

- Perusahaan menggalang pengembangan Kawasan Bakauheni Harbour City (BHC) di Kawasan Menara Siger, Bakauheni, Lampung.
- Wakil Menteri BUMN Kartiko Wirjoatmodjo dan Gubernur Lampung Arinal Djunaidi melaksanakan *groundbreaking* Masjid BSI, Area UMKM, Renovasi Menara Siger, *Creative Hub*, *Housing Development*, dan *Entrepreneurship Center* di Kawasan Bakauheni Harbour City (BHC).
- The Company initiated the development of the Bakauheni Harbour City (BHC) Area in the Siger Tower area, Bakauheni, Lampung.
- Deputy SOEs Minister Kartiko Wirjoatmodjo and Lampung Governor Arinal Djunaidi carried out the *groundbreaking* of the BSI Mosque, MSME Area, Siger Tower Renovation, *Creative Hub*, *Housing Development* and *Entrepreneurship Center* in the Bakauheni Harbour City (BHC) area.

2022

- Perusahaan melakukan akuisisi perusahaan penyedia jasa penyeberangan yaitu PT Jembatan Nusantara.
- Perusahaan melakukan perluasan digitalisasi metode pembayaran *cashless* pada 17 pelabuhan.
- Presiden Joko Widodo melakukan peresmian Pelabuhan Penyeberangan dan 2 Kapal Ferry untuk mendukung KSPN Danau Toba.
- The Company acquired a company providing crossing services, namely PT Jembatan Nusantara.
- The Company expanded the digitalization of cashless payment methods at 17 ports.
- President Joko Widodo inaugurated the Ferry Port and 2 Ferry Boats to support the National Tourism Strategic Area (*Kawasan Strategis Pariwisata Nasional*, KSPN) of Lake Toba.

2023

- Peluncuran logo baru yang bertepatan dengan usia emas Perusahaan menjadi semangat baru dalam transformasi perusahaan menuju perusahaan berkelas dunia.
- *Soft opening Krakatau Park* dan *Siger Park* sebagai langkah awal beroperasinya Bakauheni Harbour City (BHC).
- The launch of the new logo, which coincides with the Company's golden anniversary brings a new spirit in the company's transformation into a world-class company.
- *Soft opening of Krakatau Park* and *Siger Park* marked the first step in the operation of Bakauheni Harbour City (BHC).

LOGO PERUSAHAAN

THE COMPANY LOGO

PERUBAHAN LOGO TAHUN 2023

Sejalan dengan pertumbuhan bisnis Perusahaan, pada tahun 2023 PT ASDP Indonesia Ferry resmi merilis logo baru yang bertepatan dengan momentum Hari Ulang Tahun ke-50 Perusahaan pada 27 Maret 2023. Peluncuran logo baru yang bertepatan dengan usia emas Perusahaan diharapkan dapat menjadi penguat dan semangat baru dalam mendukung transformasi Perusahaan menuju perusahaan berkelas dunia. Dengan semangat pembaharuan yang ramah terhadap lingkungan, perusahaan berharap akan terus tumbuh secara berkelanjutan untuk memajukan Indonesia.

LOGO CHANGES IN 2023

In line with the Company's business growth, PT ASDP Indonesia Ferry in 2023 officially launched a new logo, coincided with the momentum of the Company's 50th Anniversary on 27 March 2023. The new logo launch on the Company's golden anniversary was expected to bring about a new spirit in supporting the company's transformation into a world-class Company. With renewed spirit to be environmentally friendly, the company hopes to continue to grow sustainably to advance Indonesia.



FILOSOFI LOGO PERUSAHAAN THE PHILOSOPHY BEHIND COMPANY LOGO



LOGOGRAM

Posisi logogram berada di bagian atas merepresentasikan bahwa ASDP Indonesia Ferry senantiasa untuk *looking up to limitless possibilities* (visioner, peka, dan sadar akan berbagai potensi di masa depan) untuk mengalirkan kemakmuran bagi masyarakat. Secara keseluruhan logo menggambarkan ASDP Indonesia Ferry sebagai garda utama keterhubungan perairan Nusantara yang akan terus berkembang dan senantiasa memberi dampak positif yang berkelanjutan.

LOGOGRAM

The logogram is positioned on the upper side, which represents that ASDP Indonesia Ferry is always looking up to limitless possibilities (visionary, sensitive, and aware of various potentials in the future) to channel prosperity to society. Overall, the logo depicts ASDP Indonesia Ferry as the vanguard of the archipelago's water connectivity that will continue to grow and always deliver sustainable positive impacts.

ARTI WARNA

Hijau Tosca

Warna hijau tosca, yang dihasilkan dari perpaduan hijau dan biru melambangkan empati dan ketulusan layanan yang diberikan Perusahaan.

Biru

Warna biru terinspirasi dari warna perairan yang berkaitan erat dengan ASDP, serta melambangkan reliabilitas dan harmoni.

MEANING OF COLORS

Turquoise

The turquoise green, which is a combination of green and blue, symbolizes empathy and sincerity in the services provided by the Company.

Blue

The blue is inspired by the color of the waters, closely related to ASDP, and symbolizes reliability and harmony.

VISI, MISI DAN TATA NILAI PERUSAHAAN

VISION, MISSION AND CORE VALUES

VISI VISION

“Terdepan dalam menghubungkan masyarakat dan pasar melalui jasa penyeberangan-pelabuhan terintegrasi dan tujuan wisata *waterfront*.

Leading in connecting the community and the market through integrated port-ferry transportation services and waterfront tourism destination.

MISI MISSION

01

Menciptakan dan mengoptimalkan nilai Perusahaan dengan menghubungkan masyarakat dan pasar.

Creating and optimizing the Corporate value by connecting the community with the market.

02

Menekankan keunggulan operasional melalui:

- Budaya pelayanan yang profesional dan berkualitas;
- Fasilitas pelabuhan terintegrasi, armada dan infrastruktur yang handal;
- Penerapan teknologi berbasis nilai.

Emphasizing operational advantages through:

- *Professional and quality service culture;*
- *Integrated port facilities, reliable fleet and infrastructure;*
- *Value-based technology application.*

03

Aktif mendukung dan berperan dalam pengembangan ekonomi melalui layanan logistik dan tujuan wisata pilihan.

Actively supporting and playing a role in economic development through logistic services and selected tourism destinations.

04

Secara konsisten mengedepankan keselamatan dan layanan penuh keramahan, tulus, dan berkualitas.

Prioritizing safety and full-services hospitality, sincerity, and quality, consistently.

05

Penerapan standar lingkungan berkelanjutan.

Implementation of sustainable environmental standards.

TATA NILAI PERUSAHAAN

Tata nilai Perusahaan telah mengalami beberapa kali perubahan seiring dengan perubahan visi dan misi Perusahaan serta sebagai respon untuk beradaptasi dengan perkembangan pasar.

Pada tahun 2020, Kementerian BUMN merilis Surat Edaran Kementerian BUMN No. SE-7/MBU/07/2020 tentang AKHLAK sebagai Nilai-Nilai Utama Sumber Daya Manusia BUMN. Sebagai respon dari Surat Edaran tersebut, kemudian Perusahaan mengadopsi nilai-nilai AKHLAK sebagai tata nilai Perusahaan.

COMPANY CORE VALUES

The Company values have undergone several changes along with changes in the Company's vision and mission as well as an adaptive response to changes in the market.

In 2020, the Ministry of SOEs released the Ministry of SOEs Circular No. SE-7/MBU/07/2020 on AKHLAK as the Core Values of Human Resources of SOEs. Responding the Circular Letter, the Company adopted AKHLAK core values as Company's values.

AKHLAK

A

AMANAH

TRUSTWORTHY

Memegang teguh kepercayaan yang diberikan.

Upholding the trust given.

K

KOMPETEN

COMPETENT

Terus belajar dan mengembangkan kapabilitas.

Continually learning and developing capabilities.

H

HARMONIS

HARMONIOUS

Saling peduli dan menghargai perbedaan.

Caring for each other and respecting differences.

L

LOYAL

LOYAL

Berdedikasi dan mengutamakan kepentingan Bangsa dan Negara.

Dedicated and prioritizing the interests of the Nation and State.

A

ADAPTIF

ADAPTIVE

Terus berinovasi dan antusias dalam mengerjakan ataupun menghadapi perubahan.

Continually innovating and enthusiastic in moving forward or facing change.

K

KOLABORATIF

COLLABORATIVE

Membangun kerja sama yang sinergis.

Building synergistic collaborations.

KEGIATAN DAN BIDANG USAHA

BUSINESS ACTIVITIES AND LINES

Kegiatan Usaha Menurut Anggaran Dasar

Mengacu pada Anggaran Dasar Perusahaan pasal 3, bidang usaha Perusahaan adalah pengusahaan pelabuhan laut, pelabuhan sungai, dan danau, jasa angkutan laut, jasa angkutan sungai dan danau, jasa angkutan penyeberangan serta, optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang dimiliki Perusahaan untuk menghasilkan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan berdaya saing kuat untuk mendapatkan keuntungan guna meningkatkan nilai Perusahaan dengan menerapkan prinsip-prinsip Perseroan Terbatas.

Berdasarkan bidang usaha yang tercantum dalam Anggaran Dasar Perusahaan, Perusahaan menjalankan 3 (tiga) segmen usaha yaitu usaha angkutan dan penyeberangan, usaha pelabuhan, serta usaha aneka jasa dan kerja sama.

Kegiatan Usaha Yang Dijalankan Pada Tahun Buku

Berdasarkan bidang usaha yang tercantum dalam Anggaran Dasar Perusahaan, Perusahaan menjalankan 3 (tiga) segmen usaha yaitu usaha angkutan dan penyeberangan, usaha pelabuhan, serta usaha aneka jasa dan kerja sama.

Business Activities According to the Articles of Association

Referring to Article 3 of the Company's Articles of Association, the Company's business lines are the management of sea, river and lake ports, sea transport services, river and lake transport services, ferry transport services as well as optimization of the utilization of the Company's resources to produce high quality and strongly competitive goods and/or services to gain profits in order to increase Company value by applying the principles of Limited Liability Companies.

Based on the business lines listed in the Company's Articles of Association, the Company operates 3 (three) business segments, namely transport and ferry business, port business, as well as miscellaneous services and joint operations.

Business Activities Carried Out in the Financial Year

Based on the business lines listed in the Company's Articles of Association, the Company operates 3 (three) business segments, namely transport and ferry business, port business, as well as miscellaneous services and joint operations.

SEGMENT USAHA PERUSAHAAN COMPANY'S BUSINESS SEGMENTS



Usaha Angkutan dan Penyeberangan.

Transport and Ferry Business.



Usaha Pelabuhan.

Port Business.



Usaha Aneka Jasa dan Kerja Sama Usaha.

Miscellaneous Services and Joint Operations.

PRODUK DAN JASA LAYANAN

Segmen Usaha Angkutan dan Penyeberangan

Kegiatan usaha Perusahaan di segmen usaha Angkutan dan Penyeberangan berpedoman pada 2 (dua) segmen lintasan, yakni komersial dan perintis. Terdapat 172 kapal yang melayani penyeberangan di 299 lintasan, terdiri dari 92 lintasan komersial, 203 lintasan perintis, dan 4 lintasan kapal ternak.

Segmen Usaha Pelabuhan

Kegiatan Perusahaan di segmen usaha pelabuhan dilakukan di 34 pelabuhan dengan 87 dermaga yang tersebar di 27 cabang di seluruh Indonesia. Jasa yang diberikan oleh Perusahaan di segmen usaha ini meliputi pelayanan jasa terminal, dermaga, dan fasilitas penunjang lainnya seperti, penyediaan dan/atau pelayanan pengisian bahan bakar dan air bersih; penyediaan dan/atau pelayanan fasilitas naik turun penumpang dan kendaraan; dan sebagainya.

Segmen Usaha Aneka Jasa dan Kerja Sama

Selain kegiatan usaha utama, Perusahaan melakukan kegiatan usaha dalam rangka optimalisasi pemanfaatan sumber daya dan asset yang dimiliki. Pada segmen ini, Perusahaan memiliki produk dan jasa seperti pengusahaan dan penyewaan properti, pergudangan, perkantoran, fasilitas pariwisata, periklanan, serta penyediaan listrik, Bahan Bakar Minyak (BBM), dan air tawar.

PRODUCTS AND SERVICES

Transport and Ferry Business Segment

The Company's activities in the Transportation and Ferry business segment are led by 2 (two) main sectors, commercial and pioneering routes. This segment operated by ferry services on 299 crossing services, consisting of 92 commercial routes, 203 pioneer routes, and 4 livestock ship routes accommodated by 172 vessels.

Port Business Segment

The Company's activities in the port business segment are carried out in 34 ports with 87 docks spread across 27 branches throughout Indonesia. Services provided by the Company in this business segment include terminal, dock and other facility services; provision and/or resupply of fuel and clean water services; provision and/or services of passenger and vehicle boarding and disembarking facilities; provision and/or services of tugboats, and other services.

Miscellaneous Services and Joint Operations

Apart from its main business activities, the Company also engages in business activities to optimize its resources and assets utilization. In this segment, the Company offers products and services such as property management and rental, warehousing, offices, tourism facilities, advertising, as well as provision of electricity, fuel, and fresh water.

WILAYAH OPERASIONAL PERUSAHAAN

COMPANY OPERATIONAL AREA

Wilayah operasional Perusahaan mencakup hampir seluruh wilayah di Indonesia yang terbagi atas 1 Kantor Pusat, 4 Kantor Regional, dan 27 Kantor Cabang.

The Company's operational areas cover almost every region in Indonesia, comprising of 1 Head Office, 4 Regional Offices, and 27 Branch Offices.

Tabel Wilayah Kantor Cabang Tahun 2023 | *Table of Branch Office Areas in 2023*

No.	Kantor Cabang <i>Branch Offices</i>	Rute <i>Route</i>	Kapal <i>Ship</i>	Pelabuhan <i>Port</i>
1.	Ambon	25	11	4
2.	Bajo'e	2	2	2
3.	Bakauheni	0	2	1
4.	Balikpapan	10	7	2
5.	Banda Aceh	3	3	0
6.	Bangka	3	6	1
7.	Batam	22	15	2
8.	Batulicin	3	6	2
9.	Bau Bau	15	13	0
10.	Biak	19	6	0
11.	Bitung	10	6	1
12.	Kayangan	1	2	2
13.	Ketapang	1	2	2
14.	Kupang	51	11	3
15.	Lembar	2	3	2
16.	Luwuk	12	6	1
17.	Merak	1	6	1
18.	Merauke	20	9	0
19.	Padang	7	3	0
20.	Pontianak	10	11	0
21.	Sape	5	3	2
22.	Selayar	13	7	0
23.	Danau Toba	6	6	2
24.	Singkil	5	3	0
25.	Sorong	21	5	0
26.	Surabaya	9	6	1
27.	Ternate	23	12	3
Jumlah <i>Total</i>		299	172	34

WILAYAH OPERASIONAL PERUSAHAAN

COMPANY OPERATIONAL AREA





STRUKTUR ORGANISASI

ORGANIZATIONAL STRUCTURE

Struktur organisasi Perusahaan dirancang untuk mencapai visi dan misi, rencana jangka panjang Perusahaan serta mempertimbangkan dinamika dan kebutuhan perusahaan. Struktur organisasi Perusahaan yang berlaku hingga 31 Desember 2023 mengacu pada Keputusan Kementerian BUMN Nomor SK-170/MBU/05/2021 pada tanggal 21 Mei dan Risalah Rapat BOD tanggal 8 Juni 2021, serta disetujui oleh Dewan Komisaris sesuai Surat Komisaris Utama Nomor 31/KOM/VI/2021 pada tanggal 22 Juni 2021 yang resmi berlaku efektif tanggal 30 Juli 2021.

The Company's organizational structure was designed to achieve the Company's vision & mission and long-term plans whilst recognizing the company's dynamics and needs. The Company's organizational structure in effect until 31 December 2023 refers to the Decree of the Ministry of SOEs No. SK-170/MBU/05/2021 on 21 May and the Minutes of the BoD Meeting on 8 June 2021, and approved by the Board of Commissioners in accordance with the Letter of the President Commissioner No. 31/KOM/VI/2021 on 22 June 2021, then became officially effective on 30 July 2021.



Nama <i>Name</i>	Saiful Haq Manan
Jabatan <i>Position</i>	Komisaris Utama <i>President Commissioner</i>
Tempat & Tanggal Lahir <i>Place & Date of Birth</i>	Bandung, 1 Desember 1957 <i>Bandung, 1 December 1957</i>
Usia <i>Age</i>	66 Tahun <i>66 Years Old</i>
Domisili <i>Domicile</i>	Jakarta
Kewarganegaraan <i>Nationality</i>	Indonesia
Dasar Hukum Pengangkatan <i>Legal Basis of Appointment</i>	SK-10/MBU/01/2023
Periode Jabatan <i>Term of Office</i>	Januari 2023 - Januari 2028 <i>January 2023 -January 2028</i>
Riwayat Pendidikan <i>Educational Background</i>	Pendidikan Umum <i>General Education</i> • <i>Master of Business Administration</i> di University of Denver (1984-1986) <i>Master of Business Administration at University of Denver (1984-1986)</i> • <i>Bachelor of Science Business Administration</i> di University of Denver (1981-1984) <i>Bachelor of Science in Business Administration at University of Denver (1981-1984)</i> • <i>Bachelor of Arts</i> di Schiller University (1980-1981) <i>Bachelor of Arts at Schiller University (1980-1981)</i> • <i>Certificate of Insurance</i> di College of Insurance (1978-1980) <i>Certificate of Insurance at College of Insurance (1978-1980)</i> • <i>Certificate of O and A levels</i> di Concord Collage (1974-1978) <i>Certificate of O and A levels at Concord College (1974-1978)</i>
Sertifikasi <i>Certification</i>	Sertifikat <i>Insurance Brokerage Training</i> dengan J H Minet and Co., broker Lloyd <i>Insurance Brokerage Training Certificate with J H Minet and Co., a Lloyd's broker</i>
Pengalaman Kerja <i>Career Experience</i>	PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) • Komisaris Utama (2020-sekarang) <i>President Commissioner (2020-present)</i> • Komisaris Independen (2018-2020) <i>Independent Commissioner (2018-2020)</i> PT Perusahaan Pengelola Aset (PPA) • Direktur Utama (2014–2017) <i>President Director (2014-2017)</i> • Direktur <i>Business Advisory</i> (2009–2014) <i>Director, Business Advisory (2009-2014)</i> Prime Services International <i>Founder & Senior Partner, Business Advisory (2007-2009)</i> Pricewaterhouse Coopers <i>Member, Management Executive Team; Deputy Director & Senior Partner in Charge for Financial Services Industry – Tax Division (2005-2007)</i> Ernst & Young <i>Member, Management Executive Team; Deputy Director & Senior Partner in Charge for Financial Services Industry – Tax Division (2002-2005)</i>
Jabatan Lainnya <i>Other Position</i>	Tidak memiliki jabatan rangkap di perusahaan atau lembaga lain maupun entitas anak perusahaan. <i>Does not hold concurrent positions in other companies, institutions, or subsidiary entities.</i>
Hubungan Afiliasi <i>Affiliation</i>	Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, maupun dengan Direksi dan Pemegang Saham Pengendali. <i>Does not have any affiliation with other Board of Commissioners, Board of Directors, or Controlling Shareholders.</i>
Kepemilikan Saham ASDP <i>ASDP Share Ownership</i>	Tidak memiliki kepemilikan saham PT ASDP Indonesia Ferry (Persero). <i>Does not have share ownership in PT ASDP Indonesia Ferry (Persero).</i>

PROFIL DEWAN KOMISARIS

PROFILES OF THE BOARD OF COMMISSIONERS

SAIFUL HAQ MANAN

Komisaris Utama
President Commissioner



Nama <i>Name</i>	Hendar Ristriawan
Jabatan <i>Position</i>	Komisaris Independen Independent Commissioner
Tempat & Tanggal Lahir <i>Place & Date of Birth</i>	Cilacap, 21 Maret 1958 Cilacap, 21 March 1958
Usia <i>Age</i>	65 Tahun 65 Years Old
Domisili <i>Domicile</i>	Depok
Kewarganegaraan <i>Nationality</i>	Indonesia
Dasar Hukum Pengangkatan <i>Legal Basis of Appointment</i>	SK-97/MBU/05/2023
Periode Jabatan <i>Term of Office</i>	Mei 2023 - Mei 2028 May 2023 - May 2028
Riwayat Pendidikan <i>Educational Background</i>	- Doktoral Ilmu Hukum di Universitas Padjajaran (2017) Doctoral Degree in Law at Padjadjaran University (2017) - Magister Ilmu Hukum di Universitas Krisnadwipayana (2009) Master of Law at Krisnadwipayana University (2009) - Sarjana Ilmu Hukum di Universitas Indonesia (1979-1984) Bachelor of Law at the University of Indonesia (1979-1984)
Sertifikasi <i>Certification</i>	Sertifikasi Pemeriksa Keuangan Negara, Badan Pemeriksa Keuangan RI (2019) State Financial Audit Certification, The Audit Board of the Republic of Indonesia (2019)
Pengalaman Kerja <i>Career Experience</i>	PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) - Dewan Komisaris (2018-sekarang) Board of Commissioners (2018-2023) - Komite Audit (2018-sekarang) Audit Committee (2018-present) Poltek STIA LAN Jakarta National Institute of Public Administration, Jakarta - Dosen Tidak Tetap Program Magister (2021) Non-Permanent Lecturer, Master Program (2021) Universitas Padjadjaran Padjadjaran University - Dosen Tidak Tetap S1 Fakultas Hukum (2020-sekarang) Non-Permanent Lecturer, Faculty of Law, Undergraduate Program (2020-present) - Dosen Tidak Tetap S2 FH (2020-sekarang) Non-Permanent Lecturer, Faculty of Law, Master Program (2020-present) STIA LAN Jakarta National Institute of Public Administration, Jakarta - Fungsional Dosen (Lektor) (April 2019-Desember 2019) Functional Lecturer (April 2019-December 2019) Universitas Nasional The National University - Dosen, Fakultas Hukum – “Mata Kuliah Hukum Perbendaharaan Negara dan Ilmu Negara” (2017-2018) Lecturer, Faculty of Law – “State Treasury Law and State Science Course” (2017-2018) - Dosen, Program Magister Ilmu Hukum – “Mata Kuliah Politik Hukum” (2017-2018) Lecturer, Master of Law Program – “Political Law Course” (2017-2018) BPK RI The Audit Board of the Republic of Indonesia - Sekretaris Jenderal (2010-2018) Secretary General (2010-2018) - Kepala Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara (2007-2010) Head of Directorate of Law Management and Development of State Financial Audit (2007-2010) - Inspektur Utama Pengawasan Internal dan Khusus (2006- 2007) Chief Inspector of Internal and Special Audit (2006-2007) - Kepala Perwakilan BPK RI di Banjarmasin (2002-2006) Head of Audit Board Representative Office in Banjarmasin (2002-2006) - Kepala Sub-Auditorat (1998-2002) Head of Sub-Auditorate (1998-2002) - Kasubbag Hukum dan Perundang-undangan (1992-1998) Head of Subdivision of Law and Regulations (1992-1998)
Jabatan Lainnya <i>Other Position</i>	Dosen Tidak Tetap, S1 dan S2, FH Universitas Padjadjaran (2020-sekarang). Non-Permanent Lecturer, Undergraduate and Postgraduate, Faculty of Law, Padjadjaran University (2020-present).
Hubungan Afiliasi <i>Affiliation</i>	Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, maupun dengan Direksi dan Pemegang Saham Pengendali. Does not have any affiliation with other Board of Commissioners, Board of Directors, or Controlling Shareholders.
Kepemilikan Saham ASDP <i>ASDP Share Ownership</i>	Tidak memiliki kepemilikan saham PT ASDP Indonesia Ferry (Persero). Does not have share ownership in PT ASDP Indonesia Ferry (Persero).

HENDAR RISTRIAWAN

KOMISARIS INDEPENDEN
INDEPENDENT COMMISSIONER





EDMIL NURJAMIL

Komisaris
Commissioner

Nama Name	Edmil Nurjamil
Jabatan Position	Komisaris Commissioner
Tempat & Tanggal Lahir Place & Date of Birth	Bandung, 13 Oktober 1967 Bandung, 13 October 1967
Usia Age	56 Tahun 56 Years Old
Domisili Domicile	Jakarta
Kewarganegaraan Nationality	Indonesia
Dasar Hukum Pengangkatan Legal Basis of Appointment	SK-124/MBU/04/2020
Periode Jabatan Term of Office	April 2020 - April 2025 April 2020 - April 2025
Riwayat Pendidikan Educational Background	Umum General - Doktoral Ilmu Ekonomi di Universitas Trisakti (2022) Doctor of Economics, Trisakti University (2022) - Magister Manajemen di STIE-ISM Tangerang (2015) Master of Management, STIE-ISM Tangerang (2015) - Sarjana Manajemen di STIE PBM (2012) Bachelor of Management, STIE PBM College (2012)
Sertifikasi Certification	-
Pengalaman Kerja Career Experience	PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) - Komisaris (2020-sekarang) Commissioner (2020-present) Badan Intelijen Negara (BIN) State Intelligence Agency - Kepala Biro Kepegawaian - Biro SDM pada Sekretariat Utama (Apr 2019) Head of Personnel Bureau - HR Bureau at the Main Secretariat (Apr 2019) - Direktur Kontra Separatisme - Direktorat Kontra Separatisme dan Konflik pada Deputi Bidang Kontra Intelijen (Jul 2018) Director of Counter Separatism - Directorate of Counter Separatism and Conflict at the Deputy for Counter Intelligence (Jul 2018) - Kabinda Sumatera Selatan Daerah Sumatera Selatan (Feb 2017) Head of State Intelligence Agency of South Sumatera - State Intelligence Agency of South Sumatera (Feb 2017) - Agen Madya Daerah DKI Jakarta (Okt 2014) Associate Agent - State Intelligence Agency of DKI Jakarta (Oct 2014) - Agen Madya Daerah DKI Jakarta (Sept 2014) Associate Agent - State Intelligence Agency of DKI Jakarta (Sept 2014) Tentara Nasional Indonesia (TNI) National Armed Forces - Asintel Danpaspampres - Paspampres (Sept 2011) Intelligence Assistant to Commander of the Presidential Security Forces - Presidential Security Forces (Sept 2011) - Waasops - Paspampres (Aug 2010) Deputy Assistant for Operations - Presidential Security Forces (Aug 2010) - Wadan Grup B - Paspampres (Sept 2009) Deputy Commander of Group B - Presidential Security Forces (Sept 2009) - Dandenpampri Grup B - Paspampres (Mar 2009) Personal Security Detachment Commander for Group B - Presidential Security Forces (Mar 2009) - Dandenlatih Grup C - Paspampres (Des 2007) Training Detachment Commander for Group C - Presidential Security Forces (Dec 2007)
Jabatan Lainnya Other Position	Tidak memiliki jabatan rangkap di perusahaan atau lembaga lain maupun entitas anak perusahaan. Does not hold concurrent positions in other companies, institutions, or subsidiary entities.
Hubungan Afiliasi Affiliation	Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, maupun dengan Direksi dan Pemegang Saham Pengendali. Does not have any affiliation with other Board of Commissioners, Board of Directors, or Controlling Shareholders.
Kepemilikan Saham ASDP ASDP Share Ownership	Tidak memiliki kepemilikan saham PT ASDP Indonesia Ferry (Persero). Does not have share ownership in PT ASDP Indonesia Ferry (Persero).



IWAN HARI SUGIARTO

Komisaris Independen
Independent Commissioner

Nama Name	Iwan Hari Sugiarto
Jabatan Position	Komisaris Independen Independent Commissioner
Tempat & Tanggal Lahir Place & Date of Birth	Pekalongan, 20 September 1960 Pekalongan, 20 September 1960
Usia Age	63 Tahun 63 Years Old
Domisili Domicile	Jakarta
Kewarganegaraan Nationality	Indonesia
Dasar Hukum Pengangkatan Legal Basis of Appointment	SK-321/MBU/10/2020
Periode Jabatan Term of Office	Oktober 2020-Oktober 2025 October 2020-October 2025
Riwayat Pendidikan Educational Background	• SESPATI 1 (2009) School of Staff and Higher Leadership 1 (2009) • SESPIMPOL (1999) Staff and Leadership Training Institute of Indonesian Police (1999) • PTIK (1992) Indonesian Police College (1992) • AKABRI Kepolisian (1985) Indonesian Armed Forces Police Academy (1985)
Sertifikasi Certification	-
Pengalaman Kerja Career Experience	PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) Komisaris (2020-sekarang) Commissioner (2020-present) Dewan Ketahanan Nasional • Deputi Staf Ahli Bidang Politik Hukum, Setjen (2018) Deputy Staff for Political Law, General Secretariate of National Defence Board (2018) • Pembantu Deputi Bidang Politik Nasional Setjen Wantannas (2015) Deputy Assistant for National Politics, General Secretariate of National Defence Board (2015) Kepolisian Republik Indonesia • Wakapolda Maluku Utara (2013) Deputy Chief of Regional Police of North Maluku (2013) • Karo Ops Polda Sumut (2010) Bureau Chief of Operations, Regional Police of North Sumatra (2010) • Penyidik Utama TK II DIT IV/Narkoba dan OC, Bareskrim Polri (2009) Lead Investigator, Secondary Level Directorate IV/Narcotics and OC, Criminal Investigation Division, Indonesian National Police (2009) • Pamen Polda Bengkulu (dalam rangka DIK SESPATI I (2009) Mid-Rank Officer, Regional Police of Bengkulu (in Training at School of Staff and Higher Leadership I (2009) • Dir Reskrim Polda Bengkulu (2008) Director of Criminal Investigation Unit, Regional Police of Bengkulu (2008) • Penyidik Utama Dit III/KOR dan WCC Bareskrim Polri (2006) Lead Investigator of Directorate III/Coordination and WCC Criminal Investigation Division, Indonesian National Police (2006) • Kasubbag Prodsus Bag Produk Roanalisis Bareskrim Polri (2005) Head of Special Products Sub-Department, Department of Analysis Bureau Products, Criminal Investigation Division, Indonesian National Police (2005) • Wadir Reskrim Polda Sumut (2003) Deputy Director of Criminal Investigation Unit, Regional Police of North Sumatra (2003) • Kabag Pamsan Dit Intelpam Polda Sumsel (2000) Head of Cryptographic Security Department, Security Intelligence Directorate, Regional Police of South Sumatra (2000)
Jabatan Lainnya Other Position	Tidak memiliki jabatan rangkap di perusahaan atau lembaga lain maupun entitas anak perusahaan. Does not hold concurrent positions in other companies, institutions, or subsidiary entities.
Hubungan Afiliasi Affiliation	Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, maupun dengan Direksi dan Pemegang Saham Pengendali. Does not have any affiliation with other Board of Commissioners, Board of Directors, or Controlling Shareholders.
Kepemilikan Saham ASDP ASDP Share Ownership	Tidak memiliki kepemilikan saham PT ASDP Indonesia Ferry (Persero). Does not have share ownership in PT ASDP Indonesia Ferry (Persero).

Nama <i>Name</i>	Susi Meyrista Tarigan
Jabatan <i>Position</i>	Komisaris Commissioner
Tempat & Tanggal Lahir <i>Place & Date of Birth</i>	Medan, 14 Mei 1976 Medan, 14 May 1976
Usia <i>Age</i>	47 Tahun 47 Years Old
Domisili <i>Domicile</i>	Jakarta
Kewarganegaraan <i>Nationality</i>	Indonesia
Dasar Hukum Pengangkatan <i>Legal Basis of Appointment</i>	SK-233/MBU/10/2019
Periode Jabatan <i>Term of Office</i>	Oktober 2019-Oktober 2024 October 2019-October 2024
Riwayat Pendidikan <i>Educational Background</i>	- Magister Akuntansi, Universitas Indonesia (2008) Master of Accounting, University of Indonesia (2008) - Sarjana Akuntansi, Universitas Indonesia (2001) Bachelor of Accounting, University of Indonesia (2001) - Diploma 3 Akuntansi di STAN (1997) Diploma 3 in Accounting, STAN (1997)
Sertifikasi <i>Certification</i>	-
Pengalaman Kerja <i>Career Experience</i>	PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) Komisaris (2019-sekarang) Commissioner (2019-present) PT Surveyor Indonesia (Persero) - Kepala Bidang Anggota Komisaris (2015-2019) Commissioner (2015-2019) - Kepala Bagian Administrasi dan Keuangan (2015) Head of Administration and Finance Division (2015) - Kepala Bidang Sistem Informasi (2014-2015) Head of Information System Division (2014-2015) PT Pelabuhan Indonesia - Sekretaris Dewan Komisaris I (2014-2017) Secretary to the Board of Commissioners (2014-2017) - Kasubid Perencanaan dan Pengembangan (2010-2014) Head of Sub-Division of Planning and Development (2010-2014) Perum Jasa Tirta II - Staf Dewan Komisaris (2007-2010) Staff for the Board of Commissioners (2007-2010) - Kepala Sub Bidang Perencanaan dan Kinerja Usaha Perdagangan, Distribusi dan Jasa Sertifikasi I (2006-2008) Head of Sub-Division of Planning and Performance of Trade, Distribution, and Certification Services I (2006-2008)
Jabatan Lainnya <i>Other Position</i>	Tidak memiliki jabatan rangkap di perusahaan atau lembaga lain maupun entitas anak perusahaan. Does not hold concurrent positions in other companies, institutions, or subsidiary entities.
Hubungan Afiliasi <i>Affiliation</i>	Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, maupun dengan Direksi dan Pemegang Saham Pengendali. Does not have any affiliation with other Board of Commissioners, Board of Directors, or Controlling Shareholders.
Kepemilikan Saham ASDP <i>ASDP Share Ownership</i>	Tidak memiliki kepemilikan saham PT ASDP Indonesia Ferry (Persero). Does not have share ownership in PT ASDP Indonesia Ferry (Persero).

SUSI MEYRISTA TARIGAN

Komisaris
Commissioner





BUDI SETIYADI

Komisaris
Commissioner

Nama Name	Budi Setiyadi
Jabatan Position	Komisaris Commissioner
Tempat & Tanggal Lahir Place & Date of Birth	Banyumas, 6 Mei 1962 Banyumas, 6 May 1962
Usia Age	61 Tahun 61 Years Old
Domisili Domicile	Jakarta
Kewarganegaraan Nationality	Indonesia
Dasar Hukum Pengangkatan Legal Basis of Appointment	SK-208/MBU/09/2022
Periode Jabatan Term of Office	September 2022-September 2027 September 2022-September 2027
Riwayat Pendidikan Educational Background	Umum General - Magister di Universitas 17 Agustus 1945, Surabaya Master Degree at the 17 Agustus 1945 University, Surabaya - Sarjana di Universitas Swadaya Gunung Djati, Cirebon Bachelor Degree at Swadaya Gunung Jati University, Cirebon Pendidikan Militer Military Education - LEMHANNAS RI (2012) National Resilience Institute of the Republic of Indonesia (2012) - SESPATI (2008) School of Staff and Higher Leadership (2008) - SESPIM (2000) Staff and Leadership Training Institute of Indonesian Police (2000) - PTIK (1993) Police Academy (1993) - AKPOL (1985) National Police Academy (1985)
Sertifikasi Certification	-
Pengalaman Kerja Career Experience	PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) Komisaris (Sept 2022-sekarang) Commissioner (Sept 2022-present) Kementerian Perhubungan Ministry of Transportation - Staf Utama Menteri Perhubungan Bidang Transportasi Darat dan Konektivitas (Jun 2022) Principal Staff to the Minister of Transportation for Land Transportation and Connectivity (June 2022) - Direktur Jenderal Perhubungan Darat, Kementerian Perhubungan (Okt 2017) Director General of Land Transportation, Ministry of Transportation (Oct 2017) Lembaga Pertahanan Nasional RI Indonesian National Defense Institute Pati SSDM Polri (penugasan LEMHANNAS RI sebagai Karoum Settama (Apr 2015) Senior-Rank HR Officer (assigned by National Resilience Institute as Head of General Bureau of the Main Secretariat) (Apr 2015) - Pamen SSDM Polri (penugasan PD LEMHANNAS RI sebagai Karoum Settama (Mei 2013) Mid-Rank HR Officer (assigned by National Resilience Institute as Head of General Bureau of the Main Secretariat) (May 2013) - Analisis Kebijakan Madya Bidang Regiden Korlantas Polri (K) (dalam rangka Dik LEMHANNAS PPRA Ke 47 20) (Jan 2012) Associate Policy Analyst for the Registration and Identification Division of Indonesian Police Traffic Corps (K) (for National Resilience Institute Regular Education Program Class 47 20) (Jan 2012) Kepolisian Republik Indonesia Indonesian National Police - Kabagrenim Korlantas Polri (Nov 2010) Head of Planning and Administration of Indonesian Police Traffic Corps (Nov 2010) - Dirlantas Polda Sulawesi Selatan (Okt 2009) Directorate of Traffic of Regional Police of South Sulawesi (Oct 2009) - Widyaiswara Muda Sespim Polri (Juni 2008) Junior Trainer of Police Staff and Leadership School (June 2008) - Dirlantas Polda Riau (Maret 2007) Directorate of Traffic of Regional Police of Riau (March 2007)
Jabatan Lainnya Other Position	Tidak memiliki jabatan rangkap di perusahaan atau lembaga lain maupun entitas anak perusahaan. Does not hold concurrent positions in other companies, institutions, or subsidiary entities.
Hubungan Afiliasi Affiliation	Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, maupun dengan Direksi dan Pemegang Saham Pengendali. Does not have any affiliation with other Board of Commissioners, Board of Directors, or Controlling Shareholders.
Kepemilikan Saham ASDP ASDP Share Ownership	Tidak memiliki kepemilikan saham PT ASDP Indonesia Ferry (Persero). Does not have share ownership in PT ASDP Indonesia Ferry (Persero).



PROFIL DIREKSI

PROFILE OF THE BOARD OF DIRECTORS

IRA PUSPADEWI

Direktur Utama
President Director

Nama <i>Name</i>	Ira Puspawati
Jabatan <i>Position</i>	Direktur Utama <i>President Director</i>
Tempat & Tanggal Lahir <i>Place & Date of Birth</i>	Malang, 12 Desember 1967 <i>Malang, 12 December 1967</i>
Usia <i>Age</i>	56 Tahun <i>56 Years Old</i>
Domisili <i>Domicile</i>	Jakarta
Kewarganegaraan <i>Nationality</i>	Indonesia
Dasar Hukum Pengangkatan <i>Legal Basis of Appointment</i>	SK-286/MBU/12/2022
Periode Jabatan <i>Term of Office</i>	Desember 2022-Desember 2027 <i>December 2022-December 2027</i>
Riwayat Pendidikan <i>Educational Background</i>	- Doktoral Manajemen Strategik di Universitas Indonesia <i>Doctorate in Strategic Management, University of Indonesia</i> - Magister Manajemen Pembangunan di Asian Institute of Management <i>Master of Development Management, Asian Institute of Management</i> - Sarjana Sosial Ekonomi Peternakan dari Universitas Brawijaya <i>Bachelor of Social Economics in Animal Husbandry, Brawijaya University</i>
Sertifikasi <i>Certification</i>	-
Pengalaman Kerja <i>Career Experience</i>	PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) Direktur Utama (2022-sekarang) <i>President Director (2022-present)</i> PT Pos Indonesia (Persero) Direktur Ritel, Jaringan dan SDM (2016-2017) <i>Director of Retail, Network and HR of PT Pos Indonesia (Persero) (2016-2017)</i> PT Sarinah (Persero) Direktur Utama (2014-2016) <i>President Director 2014-2016)</i> Gap Inc. Direktur Global Initiative Wilayah Asia (2006-2014) <i>Director of Global Initiative Asia Region (2006-2014)</i>
Jabatan Lainnya <i>Other Position</i>	Komisaris Utama PT Indonesia Ferry Properti <i>President Commissioner of PT Indonesia Ferry Properti</i>
Hubungan Afiliasi <i>Affiliation</i>	Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, maupun dengan Direksi dan Pemegang Saham Pengendali. <i>Does not have any affiliation with other Board of Commissioners, Board of Directors, or Controlling Shareholders.</i>
Kepemilikan Saham ASDP <i>ASDP Share Ownership</i>	Tidak memiliki kepemilikan saham PT ASDP Indonesia Ferry (Persero). <i>Does not have share ownership in PT ASDP Indonesia Ferry (Persero).</i>



MUHAMMAD YUSUF HADI

Direktur Komersial
dan Pelayanan

*Commercial and
Services Director*

Nama <i>Name</i>	Muhammad Yusuf Hadi
Jabatan <i>Position</i>	Direktur Komersial dan Pelayanan Commercial and Services Director
Tempat & Tanggal Lahir <i>Place & Date of Birth</i>	Kupang, 6 Oktober 1968 Kupang, 6 October 1968
Usia <i>Age</i>	55 Tahun 55 Years Old
Domisili <i>Domicile</i>	Jakarta
Kewarganegaraan <i>Nationality</i>	Indonesia
Dasar Hukum Pengangkatan <i>Legal Basis of Appointment</i>	SK-98/MBU/04/2022
Periode Jabatan <i>Term of Office</i>	April 2022-April 2027 April 2022-April 2027
Riwayat Pendidikan <i>Educational Background</i>	Sarjana Ilmu Manajemen di Universitas Muhammadiyah Kupang, Nusa Tenggara Timur Bachelor of Management Science, Muhammadiyah Kupang University, East Nusa Tenggara
Sertifikasi <i>Certification</i>	
Pengalaman Kerja <i>Career Experience</i>	PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) • Direktur Komersial & Pelayanan (Apr 2017-sekarang) Commercial & Services Director (Apr 2017- present) • <i>General Manager</i> Cabang Ketapang (2015-2017) General Manager at Ketapang Branch (2015-2017) • <i>General Manager</i> Cabang Kayangan (2014-2015) General Manager at Kayangan Branch (2014-2015) • <i>General Manager</i> Cabang Ternate (2012-2014) General Manager at Ternate Branch (2012-2014) • <i>Senior Manager, General Manager Kantor Cabang Bengkulu, Port Business Technical Advisor to Directors</i> (2008–2012) Senior Manager, General Manager of Bengkulu Branch Office, Port Business Technical Advisor to Directors (2008–2012) • <i>Manajer Operasional, Kepala Asisten Senior Manager</i> (2003-2008) Operations Manager, Chief Assistant to Senior Manager (2003-2008) • <i>Bagian Keuangan, Operasional</i> (1992-2003) Finance Department, Operations (1992-2003)
Jabatan Lainnya <i>Other Position</i>	Komisaris Utama PT Jembatan Nusantara President Commissioner of PT Jembatan Nusantara
Hubungan Afiliasi <i>Affiliation</i>	Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, maupun dengan Direksi dan Pemegang Saham Pengendali. Does not have any affiliation with other Board of Commissioners, Board of Directors, or Controlling Shareholders.
Kepemilikan Saham ASDP <i>ASDP Share Ownership</i>	Tidak memiliki kepemilikan saham PT ASDP Indonesia Ferry (Persero). Does not have share ownership in PT ASDP Indonesia Ferry (Persero).



DJUNIA SATRIAWAN

Direktur Keuangan, TI,
dan Manajemen Risiko

Finance, IT & Risk Management Director

Nama <i>Name</i>	Djunia Satriawan
Jabatan <i>Position</i>	Direktur Keuangan, TI, dan Manajemen Risiko Finance, IT & Risk Management Director
Tempat & Tanggal Lahir <i>Place & Date of Birth</i>	Bandung, 27 Juni 1963 Bandung, 27 June 1963
Usia <i>Age</i>	59 Tahun 59 Years Old
Domisili <i>Domicile</i>	Bekasi
Kewarganegaraan <i>Nationality</i>	Indonesia
Dasar Hukum Pengangkatan <i>Legal Basis of Appointment</i>	SK-283/MBU/08/2021
Periode Jabatan <i>Term of Office</i>	Agustus 2021-Agustus 2026 August 2021-August 2026
Riwayat Pendidikan <i>Educational Background</i>	Sarjana Ekonomi di Universitas Padjadjaran Bachelor of Economics, Padjadjaran University
Sertifikasi <i>Certification</i>	
Pengalaman Kerja <i>Career Experience</i>	PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) - Direktur Keuangan & TI (2021-sekarang) Finance & IT Director (2021-present) Bank Rakyat Indonesia (BRI) - Kepala Divisi Kepatuhan (2016) Head of Compliance Division (2016) - Kepala Divisi Pengadaan Barang dan Jasa Kantor Pusat (2015-2016) Head of Procurement of Goods and Services Division (2015-2016) - Kepala Audit TI (2010-2013) Head of IT Audit (2010-2013)
Jabatan Lainnya <i>Other Position</i>	Dewan Pengawas Dana Pensiun PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) Pension Fund Supervisory Board PT ASDP Indonesia Ferry (Persero)
Hubungan Afiliasi <i>Affiliation</i>	Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, maupun dengan Direksi dan Pemegang Saham Pengendali. Does not have any affiliation with other Board of Commissioners, Board of Directors, or Controlling Shareholders.
Kepemilikan Saham ASDP <i>ASDP Share Ownership</i>	Tidak memiliki kepemilikan saham PT ASDP Indonesia Ferry (Persero). Does not have share ownership in PT ASDP Indonesia Ferry (Persero).

Nama <i>Name</i>	Kusnadi C. Wijaya
Jabatan <i>Position</i>	Direktur Teknik dan Fasilitas Engineering and Facilities Director
Tempat & Tanggal Lahir <i>Place & Date of Birth</i>	Jakarta, 23 Agustus 1978 Jakarta, 23 August 1978
Usia <i>Age</i>	45 Tahun 45 Years Old
Domisili <i>Domicile</i>	Bekasi
Kewarganegaraan <i>Nationality</i>	Indonesia
Dasar Hukum Pengangkatan <i>Legal Basis of Appointment</i>	SK-338/MBU/12/2019
Periode Jabatan <i>Term of Office</i>	Desember 2019-Desember 2024 December 2019-December 2024
Riwayat Pendidikan <i>Educational Background</i>	- Magister Akuntansi Sektor Publik di Universitas Padjadjaran Master of Accounting in Public Sector, Padjajaran University - Sarjana Akuntansi di Universitas Padjajaran Bachelor of Accounting, Padjadjaran University
Sertifikasi <i>Certification</i>	-
Pengalaman Kerja <i>Career Experience</i>	PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) - Direktur Teknik & Fasilitas (2019-sekarang) Engineering & Facilities (2019-present) - Kepala Satuan Pengawas Internal (Oktober 2019-Desember 2019) Head of Internal Audit Unit (October 2019-December 2019) - Vice President Divisi Management Aset dan Asuransi PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) (2018-2019) Vice President of Asset Management and Insurance Division, PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) (2018-2019) - Vice President Divisi SDM (2017-2018) Vice President of HR Division (2017-2018) - Plt. Corporate Secretary (2017) Acting Corporate Secretary (2017) - General Manager Cabang Tual (2014-2017) General Manager of Tual Branch (2014-2017)
Jabatan Lainnya <i>Other Position</i>	Komisaris PT Jembatan Nusantara Commissioner of PT Jembatan Nusantara
Hubungan Afiliasi <i>Affiliation</i>	Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, maupun dengan Direksi dan Pemegang Saham Pengendali. Does not have any affiliation with other Board of Commissioners, Board of Directors, or Controlling Shareholders.
Kepemilikan Saham ASDP <i>ASDP Share Ownership</i>	Tidak memiliki kepemilikan saham PT ASDP Indonesia Ferry (Persero). Does not have share ownership in PT ASDP Indonesia Ferry (Persero).

KUSNADI C. WIJAYA

Direktur Teknik
dan Fasilitas
*Engineering and
Facilities Director*



Nama <i>Name</i>	Harry Muhammad Adhi Caksono
Jabatan <i>Position</i>	Direktur Perencanaan dan Pengembangan <i>Planning and Development Director</i>
Tempat & Tanggal Lahir <i>Place & Date of Birth</i>	Jakarta, 18 Juli 1979 <i>Jakarta, 18 July 1979</i>
Usia <i>Age</i>	44 Tahun <i>44 Years Old</i>
Domisili <i>Domicile</i>	Jakarta
Kewarganegaraan <i>Nationality</i>	Indonesia
Dasar Hukum Pengangkatan <i>Legal Basis of Appointment</i>	SK-215/MBU/06/2020
Periode Jabatan <i>Term of Office</i>	Juni 2020-Juni 2025 <i>June 2020-June 2025</i>
Riwayat Pendidikan <i>Educational Background</i>	- Master of Business Administrasi di Institut Teknologi Bandung <i>Master of Business Administration, Bandung Institute of Technology</i> - Sarjana Teknik Gas Petrokimia di Universitas Indonesia <i>Bachelor of Petrochemical Engineering, University of Indonesia</i>
Sertifikasi <i>Certification</i>	
Pengalaman Kerja <i>Career Experience</i>	PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) - Direktur Perencanaan & Pengembangan (2020-sekarang) <i>Planning and Development Director, PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) (2020-present)</i> - Vice President Divisi Perencanaan Strategis Perusahaan dan Transformasi PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) (2017-2019) <i>Vice President of Corporate Strategic Planning and Transformation Division, PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) (2017-2019)</i> - Advisor Direktur Utama (2016-2017) <i>Advisor to the President Director (2016-2017)</i> Indonesia Ferry Properti Plt. Direktur Utama Indonesia Ferry Properti (2019-2020) <i>Acting President Director, Indonesia Ferry Properti (2019-2020)</i> PT Angkasa Pura II (Persero) - Advisor Direksi (2015-2016) <i>Advisor to the Board of Directors (2015-2016)</i> - Deputy Head of Aetropolis Development (2014-2015) PT Cikarang Inland Port General Manager Business Development (2013-2014)
Jabatan Lainnya <i>Other Position</i>	Direktur Pembina PT Indonesia Ferry Properti <i>Governing Director of PT Indonesia Ferry Properti</i>
Hubungan Afiliasi <i>Affiliation</i>	Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, maupun dengan Direksi dan Pemegang Saham Pengendali. <i>Does not have any affiliation with other Board of Commissioners, Board of Directors, or Controlling Shareholders.</i>
Kepemilikan Saham ASDP <i>ASDP Share Ownership</i>	Tidak memiliki kepemilikan saham PT ASDP Indonesia Ferry (Persero). <i>Does not have share ownership in PT ASDP Indonesia Ferry (Persero).</i>

HARRY MUHAMMAD ADHI CAKSONO

Direktur Perencanaan
dan Pengembangan
*Planning and
Development Director*





WAHYU WIBOWO

Direktur SDM dan
Layanan Korporasi
*HR and Corporate
Services Director*

Nama <i>Name</i>	Wahyu Wibowo
Jabatan <i>Position</i>	Direktur SDM dan Layanan Korporasi HR and Corporate Services Director
Tempat & Tanggal Lahir <i>Place & Date of Birth</i>	Pemalang, 11 Februari 1971 Pemalang, 11 February 1971
Usia <i>Age</i>	52 Tahun 52 Years Old
Domisili <i>Domicile</i>	Jakarta
Kewarganegaraan <i>Nationality</i>	Indonesia
Dasar Hukum Pengangkatan <i>Legal Basis of Appointment</i>	SK-338/MBU/12/2019
Periode Jabatan <i>Term of Office</i>	Desember 2019-Desember 2024 December 2019-December 2024
Riwayat Pendidikan <i>Educational Background</i>	- Magister Manajemen Keuangan di Universitas Bhayangkara Masters in Financial Management, Bhayangkara University - Sarjana Teknik Mesin di Institut Teknologi Nasional Malang Bachelor of Mechanical Engineering, National Institute of Technology Malang
Sertifikasi <i>Certification</i>	
Pengalaman Kerja <i>Career Experience</i>	PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) Direktur SDM & Layanan Korporasi (2019-sekarang) HR & Corporate Services Director (2019-present) PT Pegadaian Komisaris (29 Mei 2019-27 Desember 2019) Commissioner (29 May 2019-27 December 2019) Kementerian BUMN Ministry of SOEs Kepala Biro Umum dan Humas (2016 - 2019) Head of General and Public Relations Bureau (2016 - 2019)
Jabatan Lainnya <i>Other Position</i>	Tidak memiliki jabatan rangkap di perusahaan atau lembaga lain maupun entitas anak perusahaan. Does not hold concurrent positions in other companies, institutions, or subsidiary entities.
Hubungan Afiliasi <i>Affiliation</i>	Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, maupun dengan Direksi dan Pemegang Saham Pengendali. Does not have any affiliation with other Board of Commissioners, Board of Directors, or Controlling Shareholders.
Kepemilikan Saham ASDP <i>ASDP Share Ownership</i>	Tidak memiliki kepemilikan saham PT ASDP Indonesia Ferry (Persero). Does not have share ownership in PT ASDP Indonesia Ferry (Persero).

PROFIL D-1

PROFILE OF BoD-1

**SHELVY ARIFIN**

Sekretaris Perusahaan
Corporate Secretary

**T. DAMAYANTI**

Kepala Satuan
Pengawasan Internal
Head of Internal
Audit Unit

**FEVI RAHMAWATI
AGUSTINA**

Vice President Sistem
Manajemen Perusahaan
Vice President of Corporate
Management Systems

**MUHAMMAD
ILHAM FAUZI**

Koordinator *Project*
Management Office
Coordinator of Project
Management Office

**LUTFI PRATAMA
ADI SUBARKAH**

Vice President Operasional
Vice President
of Operations

**HARI GUNANTO**

Vice President Komersial
Vice President of Commercial

**MEDIA SYAHRANTO**

Vice President
Business Support
Vice President of
Business Support

**WINDY SUSTIA
ANDALE**

Vice President
Pelayanan Pelanggan
Vice President of
Customer Services

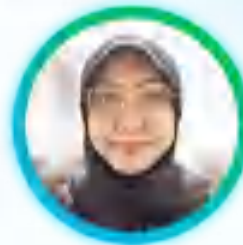
**ZULPIDON**

Vice President Keperintisan
Vice President
of Pioneering



HENDRA SETIAWAN

Vice President Teknologi Informasi
Vice President of Information Technology



NUKE DEWI NOVIANTI

Vice President Manajemen Risiko
Vice President of Risk Management



MUHAMMAR QASHIDI

Vice President Keuangan dan Perbendaharaan
Vice President of Finance and Treasury



EVI DWI JAYANTI

Vice President Akuntansi
Vice President of Accounting



ALWI YUSUF

Vice President Perencanaan Korporasi
Vice President of Corporate Planning



RIZKI DWIANDA

Vice President Pengembangan Bisnis
Vice President of Business Development



EKAWATI BASIR

Vice President Inovasi Strategis
Vice President of Strategic Innovations



HENDRA PRASETIO

Vice President Optimalisasi dan Manajemen Armada
Vice President of Fleet Optimization and Management



YANI ANDRIYANTO

Vice President Optimalisasi dan Manajemen Pelabuhan
Vice President of Port Optimization and Management



SYAMSUL BACHRI

Vice President Keselamatan, Kesehatan & Lingkungan
Vice President of Safety, Health & Environment

**WIJAYA SANTOSA**

Vice President
Pengadaan Armada
Vice President of Fleet
Procurement

**YANNES KURNIAWAN**

Vice President Quality Control
Vice President of Quality Control

**YASIRWAN**

Vice President
Perencanaan Organisasi
dan Sistem SDM
Vice President of
Organizational Planning
and HR Systems

**ERLISETYA WAHYUDI**

Vice President
Pengelolaan SDM
Vice President of HR
Management

**MOHAMAD RIVAI**

Vice President
Properti dan Umum
Vice President of Property
and General Affairs

**AMAN PRANATA**

*Vice President Supply
Chain Management*
Vice President of Supply
Chain Management

**ANOM SEDAYU
PANATAGAMA**

Vice President Hukum
Vice President of Legal

**ALDO YOHANES MUMUH**

Vice President
Perencanaan dan
Pengendalian Keuangan
Vice President of Financial
Planning and Control

**SOLIKIN**

Senior General Manager
Regional I

**FAHMI ALWENI**

Senior General Manager
Regional II



JUSTAN GAFARU

*Senior General Manager
Regional III*



HANALUSI SURIPATTY

*Senior General Manager
Regional IV*



PARTOGI TAMBA

General Manager Ambon



MUSHAR USMAN

General Manager Bajo'e



RUDI SUNARKO

General Manager Bakauheni



CHRISTOPER

General Manager Balikpapan



RUDY B. HANAFIAH

*General Manager
Banda Aceh*



SOEGIHARTONO

General Manager Bangka



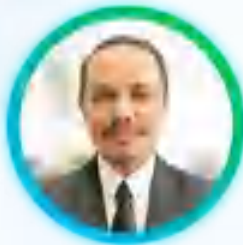
NANA SUTISNA

General Manager Batam



YEFRI HENDRI

General Manager Batulicin



JAMALUDDIN
*General Manager
Bau-Bau*



**R. M. ARDHANI
FRIANDY**
General Manager Biak



ARIEF EKO KURNIANJAH
General Manager Bitung



AGUS DJOKO TRIYANTO
General Manager Kayangan



SYAMSUDIN
*General Manager
Ketapang*



SUGENG PURWONO
General Manager Kupang



ARDHI EKAPATY
General Manager Lembar



CUK PRAYITNO
General Manager Luwuk



SUHARTO
General Manager Merak



MARIO SARDADI
General Manager Merauke



RUDY MAHMUDI

General Manager Padang



SIGIT PURWANTO

General Manager Pontianak



RENO YULIANTO

General Manager Sape



HANDOYO PRIYANTO

General Manager Selayar



HERU WAHYONO

General Manager Danau Toba



HUSIN ALATAS

General Manager Singkil



HERMIN WELKIS

General Manager Sorong



EVA MARDIANI

General Manager Surabaya



ARDIAN

General Manager Ternate

DEMOGRAFI KARYAWAN DAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI

EMPLOYEE DEMOGRAPHICS AND COMPETENCY DEVELOPMENT

DEMOGRAFI KARYAWAN

Hingga 31 Desember 2023, jumlah karyawan di Perusahaan sebanyak 4.738 orang yang terdiri dari 1.671 orang karyawan darat dan 3.067 orang karyawan laut. Jumlah karyawan tahun 2023 meningkat sebesar 2,4% dibandingkan jumlah karyawan di tahun 2022 yaitu sebesar 4.626 orang yang terdiri dari 1.629 orang karyawan darat dan 2.997 orang karyawan laut.

Berdasarkan Jenis Karyawan

Pada tahun 2023, jumlah karyawan laut mencapai 64,7% dari total karyawan secara keseluruhan.

EMPLOYEE DEMOGRAPHICS

As of 31 December 2023, the number of employees in the Company was 4,738 persons, comprised of 1,671 ashore employees and 3,067 marine employees. The number of employees in 2023 increased by 2.4% compared to the 2022 employees at 4,626 people comprised of 1,629 ashore employees and 2,997 marine employees.

Based on Types of Employee

In 2023, marine employees made up 64.7% of the total employees.

Demografi Karyawan Berdasarkan Jenis Karyawan Tahun 2022-2023
Employee Demographics Based on Types of Employee in 2022-2023

Jenis Karyawan <i>Types of Employee</i>	2022			2023		
	Laki-Laki Male	Perempuan Female	Jumlah Total	Laki-Laki Male	Perempuan Female	Jumlah Total
Darat Ashore	1.309	320	1.629	1.326	345	1.671
Laut Marine	2.993	4	2.997	3.063	4	3.067
Jumlah Total	4.302	324	4.626	4.389	349	4.738

Berdasarkan Status Ketenagakerjaan

Pada tahun 2023, komposisi karyawan didominasi oleh karyawan organik mencapai 73,2% dari total karyawan secara keseluruhan.

Based on Employment Status

In 2023, the composition of employees was comprised majority of organic employees which reached 73.2% of the total employees.

Demografi Karyawan Berdasarkan Status Ketenagakerjaan Tahun 2022-2023
Employee Demographics Based on Employment Status in 2022-2023

Status	2022			2023		
	Laki-Laki Male	Perempuan Female	Jumlah Total	Laki-laki Male	Perempuan Female	Jumlah Total
Organik Organic	3.383	232	3.615	3.234	236	3.470
Non-Organik Non-Organic	919	92	1.011	1.155	113	1.268
Jumlah Total	4.302	324	4.626	4.389	349	4.738

Berdasarkan Level Jabatan

Pada tahun 2023, komposisi karyawan darat didominasi oleh level D-5 mencapai 67,9% dari total karyawan secara darat. Sementara untuk karyawan laut didominasi oleh level ABK mencapai 57,8% dari total karyawan laut.

Based on Position Level

In 2023, the composition of ashore employees was dominated by employees in BOD-5, which made up 67.9% of the total ashore employees. Meanwhile, marine employees were dominated by the ship crew level who formed 57.8% of the total marine employees.

Demografi Karyawan Berdasarkan Level Jabatan Tahun 2022-2023
Employee Demographics Based on Position Level in 2022-2023

Level Jabatan Position Level	2022			2023		
	Laki-Laki Male	Perempuan Female	Jumlah Total	Laki-Laki Male	Perempuan Female	Jumlah Total
Karyawan Darat Ashore Employees						
D-1 BoD-1	57	9	66	59	9	68
D-2 BoD-2	178	42	220	172	44	216
D-3 BoD-3	34	13	47	32	12	44
D-4 BoD-4	188	16	204	190	18	208
D-5 BoD-5	852	240	1.092	874	262	1.135
Jumlah Total	1.309	320	1.629	1.326	345	1.671

Level Jabatan <i>Position Level</i>	2022			2023		
	Laki-Laki Male	Perempuan Female	Jumlah Total	Laki-Laki Male	Perempuan Female	Jumlah Total
Karyawan Laut Marine Employees						
Nakhoda Captain	165	0	165	165	0	165
Perwira Officer	1.082	3	1.085	1.127	3	1.130
ABK Crew	1.746	1	1.747	1.771	1	1.772
Jumlah Total	2.993	4	2.997	3.063	4	3.067

Berdasarkan Usia

Pada tahun 2023, komposisi karyawan Perusahaan didominasi oleh karyawan dengan usia produktif terutama pada rentang 25-30 tahun mencapai 25% dari total karyawan secara keseluruhan.

By Age

In 2023, the Company's employee composition will be dominated by employees of productive age, especially in the 25-30 years old, reaching 25% of the total employees as a whole.

Demografi Karyawan Berdasarkan Usia Tahun 2022-2023 Employee Demographics Based on Age in 2022-2023

Usia <i>Age</i>	2022			2023		
	Laki-Laki Male	Perempuan Female	Jumlah Total	Laki-Laki Male	Perempuan Female	Jumlah Total
<25	372	33	405	441	38	479
26-30	1.026	130	1.156	1.053	148	1.201
31-35	670	34	704	707	34	741
36-40	568	32	600	544	33	577
41-45	556	17	573	542	19	561
46-50	505	38	543	501	30	531
51-55	572	39	611	587	46	633
>55	33	1	34	14	1	15
Jumlah Total	4.302	324	4.626	4.389	349	4.738

Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Pada tahun 2023, komposisi karyawan darat di Perusahaan didominasi oleh karyawan dengan tingkat Pendidikan Sarjana sebesar 46% dari total keseluruhan karyawan darat. Sementara karyawan laut didominasi oleh karyawan dengan tingkat Pendidikan ANT.D/Technical Expert Level D sebesar 31% dari total keseluruhan karyawan laut.

Based on Education Level

In 2023, the composition of ashore employees in Company was dominated by employees with an educational level of Undergraduate which amounted to 46% of the total ashore employees. Meanwhile, marine employees was dominated by those with educational level of ANT.D/Technical Expert Level D amounting to 31% of the total marine employees.

Demografi Karyawan Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2022-2023 Employee Demographics Based on Education Level in 2022-2023

Tingkat Pendidikan Education Level	2022			2023		
	Laki-Laki Male	Perempuan Female	Jumlah Total	Laki-Laki Male	Perempuan Female	Jumlah Total
Karyawan Darat Ashore Employees						
S3 Doctorates	0	0	0	0	0	0
S2 Postgraduates	46	4	50	48	8	56
S1 Undergraduates	414	199	613	515	227	742
Diploma	119	43	162	116	39	701
SMA/SMK High School	713	74	787	632	69	701
SMP/SD Junior High/Primary	17	0	17	15	0	15
Jumlah Karyawan Darat Total Ashore Employees	1.309	320	1.629	1.326	345	1.671
Karyawan Laut Marine Employees						
ANT.1 Nautical Expert Level.I	12	0	12	11	0	11
ANT.2 Nautical Expert Level.II	32	0	32	36	0	36
ANT.3 Nautical Expert Level.III	201	2	203	214	3	218
ANT.4 Nautical Expert Level.IV	284	1	285	273	0	273
ANT.5 Nautical Expert Level.V	278	0	278	263	0	263
ANT.D Nautical Expert Level.D	924	1	925	962	1	963
ATT.1 Technical Expert Level.I	6	0	6	6	0	6
ATT.2 Technical Expert Level.II	30	0	30	32	0	32

Tingkat Pendidikan <i>Education Level</i>	2022			2023		
	Laki-Laki Male	Perempuan Female	Jumlah Total	Laki-Laki Male	Perempuan Female	Jumlah Total
ATT.3 Technical Expert Level.III	202	0	202	222	0	222
ATT.4 Technical Expert Level.IV	271	0	271	272	0	272
ATT.5 Technical Expert Level.V	207	0	207	205	0	205
ATT.D Technical Expert Level.D	546	0	546	567	0	567
Jumlah Karyawan Laut <i>Total Marine Employees</i>	2.993	4	2.997	3.063	4	3.067
Jumlah <i>Total</i>	4.302	324	4.626	4.389	349	4.738

Berdasarkan Wilayah Kerja

Pada tahun 2023, sebagian besar karyawan Perusahaan berada di wilayah kerja kantor cabang yaitu mencapai 4.176 orang atau 88% dari total keseluruhan karyawan.

Based on Working Area

In 2023, the majority of the Company's employees worked in the branch offices, totaled at 4,176 people or 88% of the total employees.

Demografi Karyawan Berdasarkan Wilayah Kerja Tahun 2022-2023 Employee Demographics Based on Working Area in 2022-2023

Wilayah Kerja <i>Working Area</i>	2022			2023		
	Laki-Laki Male	Perempuan Female	Jumlah Total	Laki-Laki Male	Perempuan Female	Jumlah Total
Kantor Pusat Head Office	289	169	458	325	186	511
Kantor Regional (I-IV) Regional Offices (I-IV)	23	3	26	47	4	51
Kantor Cabang Branch Office	3.990	152	4.142	4.016	160	4.176
Jumlah Karyawan <i>Total Employees</i>	4.302	324	4.626	4.388	349	4.738

PENGEMBANGAN KOMPETENSI KARYAWAN

EMPLOYEE COMPETENCY DEVELOPMENT

Kesempatan yang Sama Kepada Seluruh Karyawan

Perusahaan memahami bahwa karyawan merupakan aset-aset berharga bagi Perusahaan yang memiliki peranan penting dalam menjalankan strategi Perusahaan. Untuk itu program pengembangan kompetensi karyawan disusun selaras untuk mendukung implementasi Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP) 2020-2024.

Dalam mengimplementasikan program pengembangan kompetensi karyawan, Perusahaan mengedepankan kesetaraan dan kesempatan yang sama bagi seluruh karyawan sebagai wujud implementasi prinsip kesetaraan dan non diskriminasi di tempat kerja sebagaimana diatur dalam kebijakan dan prosedur internal tentang pengelolaan SDM yang mengacu pada Undang-Undang No. 13 Tahun 2003. Pengembangan kompetensi karyawan dilakukan sesuai dengan kebutuhan kerja karyawan mengacu pada proses *Training Need Analysis* (TNA) yang terstruktur. Di samping itu, karyawan juga memperoleh kesempatan untuk mengembangkan kariernya berdasarkan penilaian kinerja dan kompetensi yang dibutuhkan. Praktik tersebut mencerminkan bahwa Perusahaan tidak memandang ras, kepercayaan, agama, jenis kelamin, dan sebagainya.

Sepanjang tahun 2023, program pengembangan kompetensi karyawan telah terealisasi sebagai berikut:

Equal Opportunities for All Employees

The Company understands that employees are valuable assets for the Company and have important roles in executing the Company's strategy. Thus, employee competency development programs are prepared in accord to support the implementation of the Company's Long-Term Plan 2020-2024.

In implementing employee competency development programs, the Company prioritizes equality and equal opportunities for all employees as a form of implementation of the principles of workplace equality and non-discrimination as regulated in internal policies and procedures on HR management, which follows Law No. 13 of 2003. Employee competency development is carried out in accordance with employee work requirement, which adheres to the structured *Training Need Analysis* (TNA) process. Apart from that, employees also have opportunities to develop their careers based on performance reviews and required competencies. This practice shows that the Company takes no account of race, belief, religion, gender, and so on.

Throughout 2023, the employee competency development programs that have been completed are as follows:

Pengembangan Kompetensi Karyawan Berdasarkan Level Jabatan Tahun 2023

Employee Competency Development Based on Position Level in 2023

Deskripsi <i>Description</i>	Jumlah Pelatihan <i>Number of Training</i>	Peserta <i>Participants</i>		
		Laki-Laki <i>Male</i>	Perempuan <i>Female</i>	Jumlah <i>Total</i>
Direksi Board of Directors (BoD)	2	5	1	6
D-1 BoD-1	32	125	31	156
D-2 BoD-2	57	192	85	277
D-3 BoD-3	26	26	19	45
D-4 BoD-4	25	54	13	67
D-5 BoD-5	89	403	280	683
Laut Marine	21	854	0	854
Jumlah <i>Total</i>	252	1.659	429	2.088

Program pengembangan kompetensi karyawan juga dilakukan melalui program sertifikasi, baik untuk karyawan darat maupun karyawan laut, berupa pemenuhan sertifikasi baru maupun perpanjangan sertifikasi yang sangat penting terutama bagi karyawan laut. Sepanjang tahun 2023, realisasi sertifikasi karyawan adalah sebagai berikut:

Employee competency development programs were also achieved through certification programs for both ashore and marine employees, by obtaining new certifications and extending important certifications, especially for marine employees. Throughout 2023, the employee certifications completed was as follows:

Realisasi Sertifikasi Karyawan Tahun 2022-2023 Realization of Employee Certification in 2022-2023

Jenis Sertifikasi <i>Types of Certification</i>	2022		2023	
	Target	Realisasi (Orang) Realization (Persons)	Target	Realisasi (Orang) Realization (Persons)
Karyawan Darat Ashore Employees				
Sertifikasi Baru New Certification	-	-	316	316
Sertifikasi Perpanjangan Extended Certification	-	-	5	5
Karyawan Laut Marine Employees				
Sertifikasi Baru New Certification	150	34	175	49
Sertifikasi Perpanjangan Extended Certification	3.948	2.048	2.070	6.76
Jumlah <i>Total</i>	4.098	2.082	2.566	1.046

Biaya Pengembangan Kompetensi Karyawan

Setiap tahun, Perusahaan merencanakan pelatihan karyawan termasuk kebutuhan anggaran pengembangan kompetensi karyawan selama 1 tahun. Pada tahun 2023, realisasi anggaran untuk pengembangan kompetensi karyawan mencapai Rp19,06 miliar atau mencapai 91,81% dari rencana anggaran yang direncanakan sebesar Rp20,7 miliar. Realisasi anggaran tahun 2023 mengalami peningkatan dibandingkan dengan realisasi anggaran tahun 2022 seiring dengan peningkatan kualitas perencanaan pelatihan dan pengembangan yang terukur.

Employee Competency Development Costs

The company organizes employee trainings on a yearly basis, including required annual budget for employee competency development. In 2023, the actual budget for employee competency development amounted to Rp19.06 billion, or 91.81% of the planned budget of Rp20.7 billion. The 2023 budget realization increased compared to the 2022 budget realization mainly attributed to quantifiable quality improvement in training and development plans.

Realisasi Sertifikasi Karyawan Tahun 2022-2023

Realization of Employee Certification in 2022-2023

Uraian Description	Target 2023 2023 Target	Realisasi 2023 2023 Realization	Capaian (%) Achievement (%)	Proyeksi 2024 2024 Projection
Realisasi dan proyeksi program pengembangan karyawan Realization and projection of employee development programs	Rp20.763.064.379	Rp19.063.298.628	91,81%	Rp33.192.235.000

Rencana Pengembangan Kompetensi Karyawan Tahun 2024

Dalam mendukung pencapaian target Perusahaan dalam jangka panjang, Perusahaan telah menyusun rencana pengembangan kompetensi karyawan untuk tahun 2024 yang dituangkan dalam RKAP 2024.

Pada tahun 2024, pengembangan kompetensi karyawan akan difokuskan pada pengembangan kompetensi teknis untuk memperkuat kompetensi utama bagi setiap karyawan sesuai dengan fungsi kerjanya dan pengembangan kompetensi utama serta sertifikasi bagi karyawan laut. Pengembangan kompetensi karyawan di tahun 2024 direncanakan sebesar Rp33,19 miliar yang telah ditetapkan pada RKAP 2024.

Employee Competency Development Plan for 2024

To support the efforts to accomplish Company's long-term targets, the Company has prepared an employee competency development plan for 2024, which was outlined in the 2024 WPB.

In 2024, employee competency development would be focused on development of technical competencies to strengthen the fundamental competencies for each employee according to their work function, and develop key competencies and certification for marine employees. The employee competency development in 2024 were budgeted at Rp33.19 billion, which has been decided in 2024 WPB.



STRUKTUR DAN KOMPOSISI PEMEGANG SAHAM

STRUCTURE AND COMPOSITION OF SHAREHOLDERS



KOMPOSISI PEMEGANG SAHAM

Sebagai perusahaan dengan status BUMN tertutup, hingga 31 Desember 2023, 100% saham ASDP dimiliki dan dikendalikan oleh Pemerintah Republik Indonesia.

COMPOSITION OF SHAREHOLDERS

As a company with closed State-Owned Enterprise status, as of 31 December 2023, 100% of ASDP shares are owned and controlled by the Government of the Republic of Indonesia.

KEPEMILIKAN SAHAM DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

Hingga 31 Desember 2023, Dewan Komisaris dan Direksi tidak memiliki saham di ASDP, sebagaimana komposisi kepemilikan saham yang dijelaskan pada skema di atas.

SHARE OWNERSHIP OF THE BOARDS OF COMMISSIONERS AND DIRECTORS

As of 31 December 2023, the Boards of Commissioners and Directors did not own shares in ASDP, as explained in the share ownership composition above.

PEMEGANG SAHAM DENGAN KEPEMILIKAN 5% ATAU LEBIH DARI 5%

Hingga 31 Desember 2023, 100% saham ASDP dimiliki dan dikendalikan oleh Pemerintah Republik Indonesia. Dengan demikian, persentase kepemilikan saham 5% atau lebih dari 5% adalah Pemerintah Republik Indonesia.

SHAREHOLDERS WITH OWNERSHIP OF 5% OR EXCEEDING 5%

As of 31 December 2023, 100% of ASDP shares are owned and controlled by the Government of the Republic of Indonesia. Thus, the share ownership percentage of 5% or exceeding 5% is the Government of the Republic of Indonesia.

INFORMASI PEMEGANG SAHAM UTAMA DAN PENGENDALI

Kepemilikan 100% saham ASDP dimiliki oleh Pemerintah Republik Indonesia. Dengan demikian, pemegang saham utama dan pengendali adalah Pemerintah Republik Indonesia.

INFORMATION ON MAJOR AND CONTROLLING SHAREHOLDERS

100% ownership of ASDP shares were owned by the Government of the Republic of Indonesia. Thus, the main and controlling shareholder was the Government of the Republic of Indonesia.

INFORMASI PEMEGANG SAHAM PUBLIK

Hingga 31 Desember 2023, Perusahaan belum mencatatkan sahamnya di Bursa Efek Indonesia sehingga tidak terdapat kepemilikan saham yang dimiliki oleh publik.

PUBLIC SHAREHOLDER INFORMATION

As of 31 December 2023, the Company had not listed its shares on the Indonesia Stock Exchange, thus there was no share ownership by the public.

STRUKTUR GRUP PERUSAHAAN

COMPANY GROUP STRUCTURE

Sebagai upaya untuk mencapai visi Perusahaan dan menghadapi dinamika bisnis, Perusahaan melakukan pengembangan bisnis dengan membentuk anak perusahaan. Saat ini Perusahaan memiliki 2 (dua) anak perusahaan yaitu PT Indonesia Ferry Properti yang bergerak di bidang konstruksi dan pengelolaan properti dan PT Jembatan Nusantara yang bergerak di bidang usaha angkutan penyeberangan dan pelayaran. Dengan demikian, struktur grup digambarkan sebagai berikut:

In efforts to achieve the Company's vision and face business dynamics, the Company developed business by establishing subsidiaries. Currently the Company owns 2 (two) subsidiaries, namely PT Indonesia Ferry Properti, which engages in construction and property management, and PT Jembatan Nusantara, which engages in ferry and shipping transportation. Thus, the group structure is illustrated as follows:



DAFTAR ENTITAS ANAK

LIST OF SUBSIDIARIES

Hingga 31 Desember 2023, Perusahaan memiliki 2 (dua) entitas anak yaitu sebagai berikut:

As of 31 December 2023, the Company has 2 (two) subsidiaries, which were:

Nama Name	Bidang Usaha Industry	Tahun Berdiri Year Established	Kepemilikan Saham oleh ASDP Share Ownership by ASDP
PT Indonesia Ferry Properti	Penyediaan jasa, perdagangan, konstruksi, dan pengelolaan properti. Provision of services, trade, construction, and property management.	2017	51%
PT Jembatan Nusantara	Pelayaran Ferry business	1975	99,9%

PT INDONESIA FERRY PROPERTI

Tanggal Pendirian Date Established	5 September 2017 5 September 2017
Bidang Usaha Business	Penyediaan jasa, perdagangan, konstruksi, dan pengelolaan properti Provision of services, trade, construction, and property management
Kepemilikan Saham Shareholding	- PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) 51% - PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk 49%
Status Status	Beroperasi In Operation
Alamat Address	Jl. Jend. A. Yani Kav. No. 52A, Cempaka Putih Timur, Jakarta Pusat, 10510. Jl. Jend. A. Yani Kav. No. 52A, Cempaka Putih Timur, Central Jakarta, 10510



PT Indonesia Ferry Properti (IFPRO) adalah perusahaan patungan dari dua BUMN yakni PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) dan PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk, yang bergerak di bidang penyediaan jasa, perdagangan, konstruksi, dan pengelolaan properti.

IFPRO didirikan dengan tujuan untuk mendukung kegiatan bisnis dari kedua entitas induk BUMN tersebut dalam membangun dan mengelola pelabuhan komersial, pelabuhan marina, hotel, dan area komersial yang dikelola secara langsung maupun kerja sama.

Pendirian IFPRO didasarkan pada hasil Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT Indonesia Ferry Properti yang diselenggarakan pada tanggal 29 Mei 2017. Pendiiriannya disahkan melalui Akta Pendirian No. 21 tanggal 5 September 2017 yang dibuat di hadapan Notaris Jose Dima Satria, S.H., M.Kn.

Struktur permodalan IFPRO terdiri atas dua entitas induk BUMN, berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perubahan Anggaran Dasar PT Indonesia Ferry Properti No. 10 tanggal 6 Februari 2018 yang dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta.

Susunan permodalan PT Indonesia Ferry Properti adalah PT ASDP Indonesia Ferry (Persero), dengan jumlah kepemilikan saham sebesar 157.887 (seratus lima puluh tujuh ribu delapan ratus delapan puluh tujuh) saham dengan nilai nominal sebesar Rp157.887.000.000,00 (seratus lima puluh tujuh miliar delapan ratus delapan puluh tujuh juta Rupiah); dan PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk, dengan kepemilikan saham sebesar 151.696 (seratus lima puluh satu ribu enam ratus sembilan puluh enam) saham dengan nilai nominal sebesar Rp151.696.000.000,00 (seratus lima puluh satu miliar enam ratus sembilan puluh enam juta Rupiah) sehingga seluruhnya berjumlah 309.583 (tiga ratus sembilan ribu lima ratus delapan puluh tiga) saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp309.583.000.000,00 (tiga ratus sembilan miliar lima ratus delapan puluh tiga juta Rupiah); atau setara 77,4% dari Modal Dasar PT Indonesia Ferry Properti.

PT Indonesia Ferry Properti (IFPRO) is a joint venture of two SOEs, PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) and PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk, which operate in provision of services, trading, construction, and property management.

IFPRO was established with the objective to support the business activities of both SOEs as parent entities in building and managing commercial ports, marinas, hotels and commercial areas, managed directly or through collaborations.

IFPRO was established based on the results of the General Meeting of Shareholders (GMS) of PT Indonesia Ferry Properti that was held on 29 May 2017. The establishment was ratified by the Deed of Establishment No. 21 dated 5 September 2017 made before Notary Jose Dima Satria, S.H., M.Kn.

IFPRO's capital structure consisted of two holding SOEs entities, based on the Deed of Shareholder Decision Statement on Amendments to the Articles of Association of PT Indonesia Ferry Properti No. 10 dated 6 February 2018, which was made in the presence of Notary Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., in Jakarta.

The capital structure of PT Indonesia Ferry Properti is PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) with total share ownership of 157,887 (one hundred fifty seven thousand eight hundred eighty seven) shares with a nominal value of Rp157,887,000,000.00 (one hundred fifty seven billion eight hundred and eighty seven million Rupiah); and PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk with share ownership of 151,696 (one hundred fifty one thousand six hundred ninety six) shares with a nominal value of Rp151,696,000,000.00 (one hundred fifty-one billion six hundred ninety six million Rupiah), such that the total was 309,583 (three hundred nine thousand five hundred eighty three) shares with a total nominal value of Rp309,583,000,000.00 (three hundred nine billion five hundred eighty three million Rupiah); or equivalent to 77.4% of the Authorized Capital of PT Indonesia Ferry Properti.

Komposisi Dewan Komisaris dan Direksi

Berikut merupakan komposisi Dewan Komisaris dan Direksi dari PT Indonesia Ferry Properti per 31 Desember 2023:

Composition of the Board of Commissioners and Board of Directors

The following was the composition of the Board of Commissioners and Directors of PT Indonesia Ferry Properti, as of 31 December 2023:

Jabatan Position	Nama Name
Dewan Komisaris Board of Commissioners	
Komisaris Independen Independent Commissioner	Tumpal Simare Mare
Komisaris Commissioner	Ni Made Sasanti
Komisaris Commissioner	Harry Mochamad Adhi Caksono
Direksi Board of Directors	
Direktur Utama President Director	Ferry Yulianus Snyders
Direktur Director	Fajar Saiful Bahri

Ringkasan Informasi Kinerja Keuangan
Financial Performance Highlights

(Dalam Juta Rupiah)
(in million Rupiah)

Deskripsi Description	2022	2023
Total Aset Total Assets	1.167.904	1.132.495
Liabilitas Liabilities	859.622	776.850
Ekuitas Equity	308.282	355.645
Pendapatan Usaha Operating Revenues	266.565	302.126
Laba Bersih Net Profit	43.780	47.362

PT JEMBATAN NUSANTARA

Tanggal Pendirian <i>Date Established</i>	22 September 1975 22 September 1975
Bidang Usaha <i>Business</i>	Pelayaran <i>Ferry business</i>
Status <i>Status</i>	Beroperasi <i>In Operation</i>
Alamat <i>Address</i>	Gedung Pelni Heritage Lt. 2, Jl. Pahlawan No. 112-114, Surabaya, 60175, Jawa Timur, Indonesia Pelni Heritage Building, 2nd Fl. Jl. Pahlawan No. 112-114, Surabaya, 60175, East Java, Indonesia

PT Jembatan Nusantara merupakan perusahaan yang diakuisisi oleh PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) pada tahun 2022 sesuai dengan Akta Notaris Jose Dima Satria S.H., M.Kn. Nomor 140 tanggal 22 Februari 2022 dan telah disetujui oleh Menteri BUMN Republik Indonesia berdasarkan surat No. S-87/MBU/02/2022 tanggal 22 Februari 2022. Dengan demikian, kepemilikan saham PT Jembatan Nusantara, sepenuhnya dimiliki oleh ASDP Indonesia Ferry (Persero).

PT Jembatan Nusantara is a company that was acquired by PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) in 2022 in accordance with the Notarial Deed of Jose Dima Satria S.H., M.Kn. No. 140 dated 22 February 2022 and has been approved by the Minister of SOEs based on letter No. S-87/MBU/02/2022 dated 22 February 2022. Thus, the share ownership of PT Jembatan Nusantara is owned entirely by ASDP Indonesia Ferry (Persero).

PT Jembatan Nusantara berawal dari perusahaan bernama PT Jembatan Madura yang didirikan pada tanggal 22 September 1975 berdasarkan Akta Notaris Nomor 48 tanggal 22 September 1975, yang dibuat di hadapan Notaris Stefanus Sindhunatha, S.H., Notaris di Surabaya dengan nama PT Jembatan Madura. Akta pendirian tersebut telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. Y.A. 512916 tanggal 13 Januari 1978 dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia tanggal 22 November 1985 No. 1429 dan Tambahan No. 94 tanggal 22 November 1985.

PT Jembatan Nusantara started from a company called PT Jembatan Madura, which was founded on 22 September 1975, based on Notarial Deed No. 48 dated 22 September 1975 that was made before Notary Stefanus Sindhunatha, S.H., Notary in Surabaya, under the name of PT Jembatan Madura. The deed of establishment received approval from the Minister of Justice and Human Rights of the Republic of Indonesia based on Decree No. Y.A. 512916 dated 13 January 1978 and was published in the State Gazette of the Republic of Indonesia dated 22 November 1985 No. 1429 and Supplement No. 94 dated 22 November 1985.

Pada tahun 2012 PT Jembatan Madura mengalami perubahan nama menjadi PT Jembatan Nusantara berdasarkan Akta No. 44 tanggal 31 Mei 2012 dari Agus Madjid, Notaris di Jakarta, dan telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan surat No. AHU-49206.AH.01.02. Tahun 2012 tanggal 18 September 2012.

In 2012 PT Jembatan Madura changed its name to PT Jembatan Nusantara based on Deed No. 44 dated 31 May 2012 from Agus Madjid, a Notary in Jakarta, and was approved by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia based on letter No. AHU-49206.AH.01.02. Tahun 2012 dated 18 September 2012.

PT Jembatan Nusantara memiliki ruang lingkup kegiatan usaha sesuai dengan anggaran dasar yaitu usaha dalam bidang pelayaran. Pada tahun 2023, PT Jembatan Nusantara memiliki 53 unit kapal yang dioperasikan di beberapa rute di Indonesia. Sebanyak 50 (lima puluh) kapal melayani lintasan jarak dekat (*short distance ferry*) dan 3 (tiga) kapal melayani lintasan jarak jauh (*long distance ferry*), yang dikendalikan oleh 23 (dua puluh tiga) kantor cabang.

The scope of PT Jembatan Nusantara's business activities in accordance with its articles of association was shipping sector business. In 2023, PT Jembatan Nusantara owned 53 unit vessels operated on several routes in Indonesia. A total of 50 (fifty) ships serve short distance ferries and 3 (three) ships serve long distance ferries, under the control of 23 (twenty three) branch offices.

Komposisi Dewan Komisaris dan Direksi

Composition of the Boards of Commissioners and Directors

Berikut merupakan komposisi Dewan Komisaris dan Direksi dari PT Jembatan Nusantara per 31 Desember 2023:

The following was the composition of the Boards of Commissioners and Directors of PT Jembatan Nusantara as of 31 December 2023:

Jabatan <i>Position</i>	Nama <i>Name</i>
Dewan Komisaris Board of Commissioners	
Komisaris Utama President Commissioner	M. Yusuf Hadi
Komisaris Commissioner	Kusnadi C. Wijaya
Direksi Board of Directors	
Direktur Utama President Director	Andi Mashuri
Direktur Keuangan, SDM dan Manajemen Risiko Finance, HR and Risk Management Director	Handi Sumarna
Direktur Komersial dan Teknik Commercial and Technical Director	Hendriawan Nur Kuncoro

Ringkasan Informasi Kinerja Keuangan Financial Performance Highlights

Deskripsi <i>Description</i>	(Dalam Juta Rupiah) (in million Rupiah)	
	2022	2023
Total Aset Total Assets	1.723.855	1.696.660
Liabilitas Liabilities	614.775	577.688
Ekuitas Equity	1.109.080	1.118.972
Pendapatan Usaha Operating Revenues	534.254	680.493
Laba Bersih Net Profit	(126.218)	9.891

KRONOLOGIS PENCATATAN EFEK LAINNYA

CHRONOLOGY OF LISTING OF OTHER SECURITIES

Sampai dengan akhir tahun 2023, Perusahaan belum pernah mencatatkan efek lainnya di Bursa Efek, sehingga tidak ada informasi terkait kronologis pencatatan, jenis tindakan korporasi, perubahan jumlah efek, nama bursa maupun peringkat efek yang harus diungkapkan.

As of end of 2023, the Company has never listed any other securities on the Stock Exchange, so there was no information regarding the chronology of the listing, type of corporate action, changes in the number of securities, exchange name or securities rating that must be disclosed.

KANTOR AKUNTAN PUBLIK

PUBLIC ACCOUNTING FIRM

Nama Akuntan Publik
Name of Public Accountant

Eishennoraz

Nama Kantor Akuntan Publik
Name of Public Accounting Firm

KAP RSM Indonesia Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar dan Rekan

Alamat
Addres

Plaza ASIA, Level 10 , Jl. Jend. Sudirman Kav. 59, Jakarta, 12190

Jasa yang Diberikan
Services Provided

Audit Laporan Keuangan
Financial Report Audit

Periode Penugasan
Appointment Period

13 Oktober 2023 s.d 28 Februari 2024
13 October 2023 to 28 February 2024

LEMBAGA DAN/ATAU PROFESI PENUNJANG

INSTITUTIONS AND/OR SUPPORTING PROFESSIONS

Lembaga <i>Institution</i>	Jenis Jasa <i>Type of Service</i>	Alamat <i>Address</i>
KAP Office of Public Accountant RSM Indonesia Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan	Audit Laporan Keuangan <i>Financial Audit Report</i>	Plaza Asia, Level 10, Jl. Jend. Sudirman Kav. 59, Jakarta, 12190. Telepon: (021) 51401340 Web: www.rsm.global/indonesia/id/
Notaris <i>Notary</i> Jose Dima Satria, S.H., M.Kn	Notaris <i>Notary</i>	Jl. Madrasah, Komplek Taman Gandaria Kav. 11A, Jakarta, 12420. Telepon: (021) 29125500.
Konsultan Hukum <i>Legal Consultant</i> Dewi Djalal & Partners	Retainer Corporate Lawyer <i>Retainer Corporate Lawyer</i>	Pakuwon Tower, 22nd Floor Jl. Casablanca Raya Kav. 88 Jakarta, 12870 Telepon: (021) 22903355 Web: www.ddplaw.co.id
Konsultan Hukum <i>Legal Consultant</i> Tumbuan & Partners	Advokat & Konsultan Hukum <i>Advocate & Legal Consultant</i>	Jl. Gandaria Tengah III No 8, Kebayoran Baru, Jakarta 12130. Telepon: +62 21 722 7736 Web: www.tumbuanpartners.com
Konsultan Hukum <i>Legal Consultant</i> Stefanus & Rekan	Advokat & Konsultan Hukum <i>Advocate & Legal Consultant</i>	Arjuna Niaga, Jl. Arjuna Utara No. 1-E, Jakarta Barat, 11510. Telepon: (021) 56981263
Konsultan Hukum <i>Legal Consultant</i> Assegaf Hamzah & Partners	Advokat & Konsultan Hukum <i>Advocate & Legal Consultant</i>	Capital Place, Lt. 36 & 37, Jl. Gatot Subroto Kav. 17, Kuningan Barat, Jakarta, 12710. Telepon: (021) 25557800 Web: www.ahp.id
Konsultan Hukum <i>Legal Consultant</i> Hiswara Bunjamin & Tandjung	Advokat & Konsultan Hukum <i>Advocate & Legal Consultant</i>	18 th floor, Tower I, Sudirman 7.8 Jl. Jendral Sudirman Kav. 7-8, Jakarta. 10220 Telepon: (021) 39738000 Web: www.hbtlaw.com

PENGHARGAAN DAN SERTIFIKASI

AWARDS AND CERTIFICATIONS

Penghargaan merupakan sebuah bentuk pengakuan dari pihak eksternal terhadap eksistensi dan peran Perusahaan. Sepanjang tahun 2023, Perusahaan berhasil mendapatkan beberapa penghargaan sebagai berikut:

Awards are a form of recognition from external parties of the existence and role of the Company. Throughout 2023, the Company succeeded in receiving several awards as follows:

Daftar Penghargaan Tahun 2023

2023 Awards List

No	Nama Penghargaan Award Name	Tanggal Date	Lembaga Pemberi Penghargaan Awarding Body
1	Media Relations Award 2023, Serikat Perusahaan Pers, Silver Winner, "Press Tour: Kawasan Bakauheni Harbour City". Media Relations Award 2023, SPS, Silver Winner, "Press Tour: Bakauheni Harbour City".	11 Agustus 2023 11 August 2023	Serikat Perusahaan Pers SPS
2	Media Relations Award 2023, Serikat Perusahaan Pers, Bronze Winner, "ASDP Target Layani 4,98 Juta Pemudik di 8 Lintasan penyeberangan Terantau Nasional". Media Relations Award 2023, SPS, Bronze Winner, "ASDP Targets Serving 4.98 Million Homecomers on 8 Nationally Monitored Crossings".	11 August 2023 11 August 2023	Serikat Perusahaan Pers SPS
3	Digital 5.0 KIP Awards 2023, Penghargaan Keterbukaan Informasi Publik, The Most Interact BUMN by Engagement. Digital 5.0 KIP Awards 2023, Public Information Openness Award, The Most Interact SOEs by Engagement.	27 Oktober 2023 27 October 2023	BUMN Track BUMN Track
4	Jambore PR Indonesia #9 th 2023, Kategori Pemimpin Terpopuler di Media Sosial. Indonesian PR Jamboree #9 th 2023, Most Popular Leaders on Social Media Category.	27 Oktober 2023 27 October 2023	PR Indonesia PR Indonesia
5	The 5th Anugerah Humas Indonesia 2023, Gold Winner, Kategori Media Internal Instagram. The 5th Indonesian Public Relations Award 2023, Gold Winner, Instagram Internal Media Category.	1 November 2023 1 November 2023	PR Indonesia PR Indonesia
6	Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan kategori Badan Usaha Milik Negara Monitoring and Evaluation of Service Performance in the category of State-Owned Enterprises	21 November 2023 21 November 2023	KEMENPANRB RI Ministry of Administrative and Bureaucratic Reform
7	Nusantara CSR Awards 2023 kategori Pendidikan yang Berkualitas "Program Belajar Asik Bersama ASDP". Nusantara CSR Awards 2023 Quality Education category "Fun Learning Program with ASDP"	5 Juli 2023 5 July 2023	La Tofi School of Social Responsibility La Tofi School of Social Responsibility
8	Bronze Winner Indonesia DEI & ESG Awards 2023 kategori ESG sub kategori Lingkungan (Environmental). Bronze Winner Indonesia DEI & ESG Awards 2023, category ESG, sub-category Environmental	5 Agustus 2023 5 August 2023	Humas Indonesia Humas Indonesia
9	Peringkat II BUMN Tipe C dengan Nilai Belanja Terbesar Business Matching Rank II in BUMN Type C on The Largest Expenditure Value Business Matching	19 November 2023 19 November 2023	KEMENKOMARVES Coordinating Ministry for Maritime & Investment Affairs

KEANGGOTAAN ASOSIASI

ASSOCIATION MEMBERSHIP

Perusahaan memahami pentingnya peran organisasi maupun asosiasi untuk ikut serta secara aktif berkontribusi dalam pengembangan industri perhubungan laut, termasuk untuk memahami dampak dan peluang bagi perusahaan. Hingga 31 Desember 2023, Perusahaan bergabung dengan asosiasi/perhimpunan berikut:

The Company understands the importance of organizations and associations, and participate actively in contributing to the development of the maritime transportation industry, including understanding the impacts and opportunities for the company. As of 31 December 2023, the Company joined the following associations/forums:

No.	Nama Asosiasi Name of Association	Skala Scale	Peran Keanggotaan Membership Role
1.	Interferry	Nasional National	Anggota Member
2.	Indonesian National Ferry Owner Association (INFA)	Nasional National	Anggota Member
3.	GAPASDAP	Nasional National	Anggota Member
4.	Forum Human Capital Indonesia (FHCI)	Nasional National	Anggota Member
5.	Corporate Secretary Association	Nasional National	Anggota Member
6.	Capital Market Society	Nasional National	Anggota Member
7.	Forum Teknologi Informasi BUMN	Nasional National	Anggota Member
8.	IAMI	Nasional National	Anggota Member
9.	Forum Digital Indonesia (FORDIGI)	Nasional National	Anggota Member
10.	Forum Humas BUMN	Nasional National	Anggota Member
11.	Forum TJSL BUMN	Nasional National	Anggota Member

INFORMASI WEBSITE

PERUSAHAAN

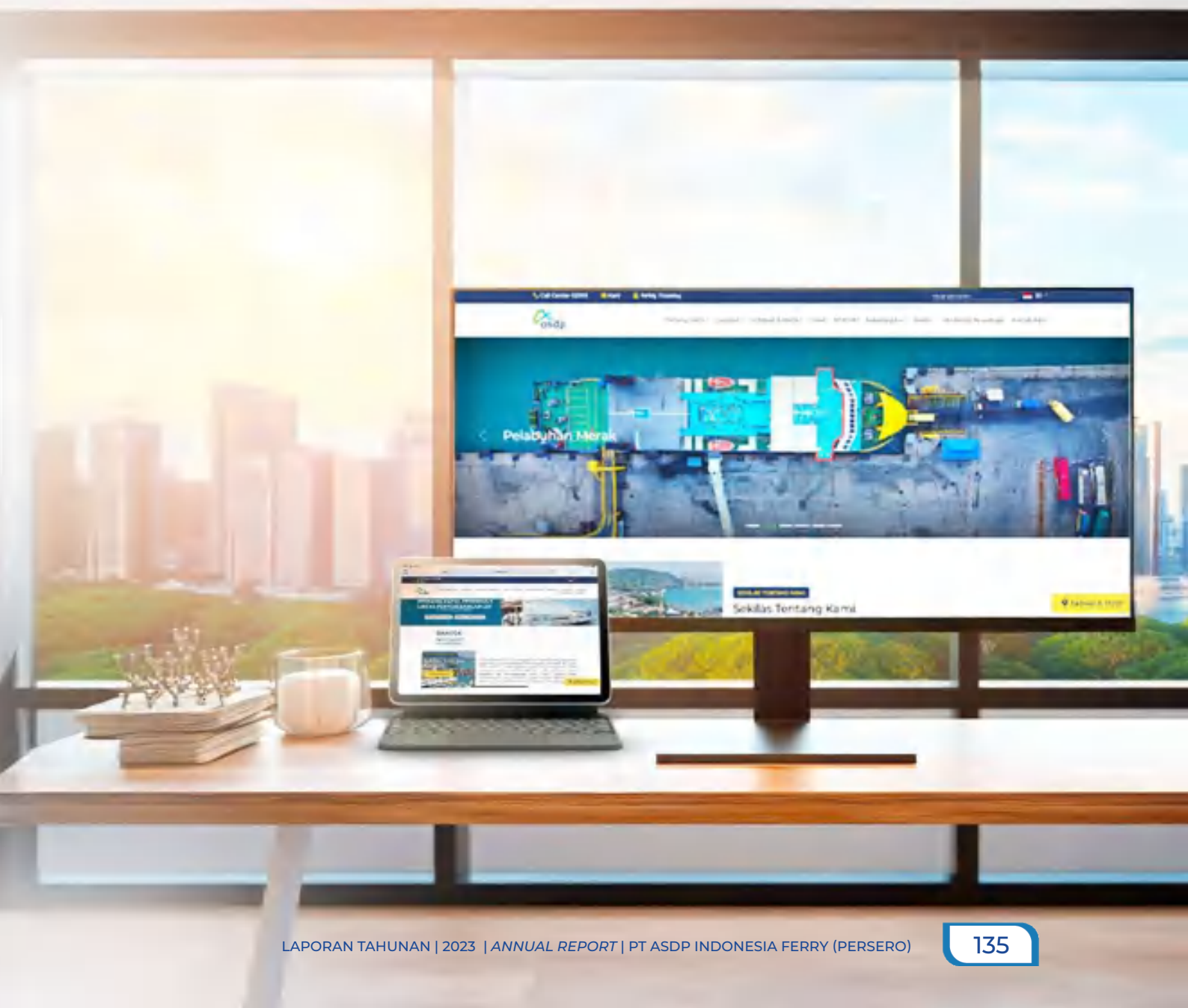
COMPANY WEBSITE INFORMATION

Perusahaan senantiasa berkomitmen untuk memberikan kemudahan terhadap akses informasi bagi pemegang saham dan pemangku kepentingan melalui situs *website* resmi Perusahaan yaitu www.asdp.id. Perusahaan memperbarui situs *website* resmi Perusahaan secara berkala untuk menjamin ketersediaan informasi yang transparan, akurat dan relevan. Informasi pada situs resmi Perusahaan meliputi:

The Company is always committed to provide easy access to information for shareholders and stakeholders through the Company's official website, namely www.asdp.id. The Company updates the Company's official website regularly to ensure the availability of transparent, accurate and relevant information. Information on the Company's official website includes:

Halaman Situs Website <i>Website Page</i>	Detail Informasi <i>Detailed Information</i>
Tentang Kami <i>About Us</i>	Memuat informasi mengenai profil perusahaan meliputi Sekilas ASDP, Tonggak Sejarah, Visi Misi, Makna Logo, Struktur Perusahaan, Anak Usaha, Laporan Tahunan, Profil Komisaris, dan Profil Direksi. <i>Contains information on the company profile, which covers About ASDP, Milestones, Vision, Mission, Logo Meaning, Company Structure, Subsidiary, Annual Report, Commissioners, and Directors.</i>
Layanan Service	Memuat informasi mengenai layanan perusahaan meliputi Peta Lintasan, Profil Kapal, Lokasi Pelabuhan, Informasi Produk Perusahaan, dan Standar Pelayanan. <i>Contains information about company services including Maps (Routes), Ship, Harbour, Our Product, and Port Services Standard.</i>
Publikasi & Media <i>Publication & Media</i>	Memuat informasi mengenai publikasi umum perusahaan meliputi Siaran Pers, Berita Perusahaan, Penghargaan, dan Publikasi Perusahaan. <i>Contains information on general company publications including Press Conference, News, Award, and Publication.</i>
Galeri <i>Gallery</i>	Memuat informasi mengenai publikasi kegiatan perusahaan dalam format foto dan video. <i>Contains information on publication of company activities in photo and video format.</i>
PPID KIP	Memuat informasi mengenai pelayanan informasi publik termasuk Profil Pengelola PPID, Tata Cara dan Mekanisme Pengajuan Informasi, dan Daftar Informasi Publik yang dapat diunduh oleh pemangku kepentingan. <i>Contains information on services of public information including PPID Manager Profiles, Procedures and Mechanisms for Submitting Information, and a List of Public Information, which can be downloaded by stakeholders.</i>
Keberlanjutan <i>Sustainability</i>	Memuat informasi mengenai strategi dan program keberlanjutan perusahaan. <i>Contains information on the company's sustainability strategies and programs.</i>
Investor <i>Investor</i>	Memuat informasi mengenai kontak hubungan investor dan penyajian laporan tahunan. <i>Contains information on investor relations contacts and annual reports publication.</i>

Halaman Situs Website Website Page	Detail Informasi Detailed Information
Tata Kelola Perusahaan Good Corporate Governance	Memuat informasi mengenai praktik Tata Kelola Perusahaan yang dijalankan oleh Perusahaan meliputi Sistem Pelaporan Pelanggaran, Sertifikasi, Pedoman Tata Kelola Perusahaan, Imbauan Larangan Penerimaan Gratifikasi, Pedoman Etika, Pedoman Sistem Manajemen Anti Penyuapan, Pedoman Benturan Kepentingan, Pedoman Pemberian & Penerimaan Hadiah dan Pencegahan Penyuapan, Pakta Integritas Bersama Direksi dan Dewan Komisaris. Contains information regarding Corporate Governance practices conducted by the Company, including the Whistleblowing System, Certification/ISO, Corporate Governance Guidelines, Advice on the Prohibition of Accepting Gratuities, Ethics Guidelines, Anti-Bribery Management System Guidelines, Conflict of Interest Guidelines, Guidelines for Giving & Receiving Gifts and Prevention of Bribery, Joint Integrity Pact of the Board of Directors and Board of Commissioners.
Kontak Kami Contact Us	Memuat informasi mengenai kontak dan saluran komunikasi perusahaan yang dapat dihubungi oleh pemangku kepentingan. Contains information regarding company contacts and communication channels that stakeholders can contact.



AKSES INFORMASI PERUSAHAAN, KANTOR REGIONAL, DAN KANTOR CABANG

COMPANY'S INFORMATION ACCESS, REGIONAL OFFICES, AND BRANCH OFFICES

KANTOR PUSAT HEAD OFFICE

PT ASDP Indonesia Ferry Building
Jalan Jendral Achmad Yani Kav.52A,
Cempaka Putih Timur, Jakarta Timur,
DKI Jakarta 10510 - Indonesia

KANTOR REGIONAL REGIONAL OFFICES

REGIONAL 1

Ruko King Business Center (KBC)
Blok B1 No. 7, Kal. Belian, Kec. Batam Kota,
Batam, Kepulauan Riau 29464

REGIONAL 2

Jl. Raya Pelabuhan Merak, Merak,
Banten 42438
Telp. (+62-254) 571032

REGIONAL 3

Jl. Jend. Gatot Subroto Ketapang, Desa
Ketapang, Kecamatan Kalipuro, Kabupaten
Banyuwangi, Jawa Timur 68451
Telp. (+62-333) 424308

REGIONAL 4

Jl. Jend. Sudirman Tantui Atas, Ambon 97111
Telp. (+62-911) 341557

KANTOR CABANG BRANCH OFFICES

BANDA ACEH

Jl. Rama Setia, Desa Deah Geulumpang, Banda
Aceh, Aceh 23116
Telp. (+62-651) 49966

SINGKIL

Komp. Pelabuhan Penyeberangan Singkil,
Pulau Sarok, Aceh Singkil, Aceh 24785
Telp. (+62-658) 21381

DANAU TOBA

Jl. Parapat, Tiga Raja, Kec. Girsang Sipangan
Bolon, Kabupaten Simalungun,
Sumatera Utara 21174

PADANG

Jl. Perintis Kemerdekaan No. 4, Padang,
Sumatera Barat 25171
Telp. (+62-751) 27153

BATAM

Jl. Pattimura, Pelabuhan Penyeberangan
Telaga Punggur, Batam, Kepulauan Riau 29467
Telp. (+62-778) 479171

BANGKA

Pelabuhan Penyeberangan Tanjung Kelian,
Muntok, Bangka Barat, Bangka, Belitung 33351
Telp. (+62-716) 22278

BAKAUHENI

Jl. Pelabuhan Penyeberangan Bakauheni,
Lampung 35592
Telp. (+62-727) 331032

MERAK

Jl. Yos Sudarso No. 20, Merak, Banten 42438
Telp. (+62-254) 571031-2

PERWAKILAN JEPARA | JEPARA REPRESENTATIVE

Jl. Kol. Sugiono No. 290, Jepara,
Jawa Tengah 59411
Telp. (+62-291) 591048

SURABAYA

Jl. Kalimas Baru No. 194-A, Surabaya,
Jawa Timur 60165
Telp. (+62-31) 3297165

KETAPANG

Jl. Jend. Gatot Subroto Ketapang,
Banyuwangi 68451
Telp. (+62-333) 424308

LEMBAR

Pelabuhan Penyeberangan Lembar,
Mataram 83364
Telp. (+62-370) 681313

SAPE

Jl. Yos Sudarso, Pelabuhan Penyeberangan
Sape, Kec. Sape, Kab. Bima, Nusa Tenggara
Barat 84182
Telp. (+62-374) 71075

BAU BAU

Jl. Pahlawan No 4, Kelurahan Kadolo Katapi,
Baubau, Sulawesi Tenggara, 93715
Telp. (+62-402) 2825205

KUPANG

Pelabuhan Penyeberangan Bolok, Kupang,
Nusa Tenggara Timur 85351
Telp. (+62-380) 890420

PONTIANAK

Jl. Kom. Yos Sudarso No. 47, Pontianak,
Kalimantan Barat 78244
Telp. (+62-561) 773200

BATULICIN

Jl. Pelabuhan Ferry No. 1, Tanah Bumbu,
Kalimantan Selatan 72171
Telp. (+62-518) 70408

BALIKPAPAN

Jl. Syarifuddin Yoes, Ruko Balikpapan Point
Blok C1, Kalimantan Timur 76115
Telp. (+62-542) 8512805

TERNATE

Jl. Komp. Pelabuhan Ferry Bastiong, Ternate
Selatan, Maluku Utara 97713
Telp. (+62-921) 3127773

AMBON

Jl. Jend. Sudirman Tantui Atas, Ambon 97128
Telp. (+62-911) 341557

BAJOE

Komp. Pelabuhan Penyeberangan 24, Bajo'e
Bone, Sulawesi Selatan 92716
Telp. (+62-481) 22171

SELAYAR

Jl. Poros Bontobahari, Kelurahan Sapolohe,
Kec. Bontobahari, Kab. Bulukumba, Sulawesi
Selatan 92571
Telp. (+62-413) 2589680

SORONG

Jl. Basuki Rahmat, Remu Utara, Distrik Sorong
Timur, Kota Sorong, Papua Bar. 98416
Telp. (+62-951) 321121

PERWAKILAN TUAL | TUAL REPRESENTATIVE

Jl. Panglima Mandala Tual, Maluku 97611
Telp. (+62-916) 21708

BIAK

Jl. Imanuel/Suci No. 21, Biak, Papua 98111
Telp. (+62-981) 22577

MERAUKE

Jl. Prajurit No. 174, Maro, Distrik Merauke,
Papua Selatan 99613
Telp. (+62-971) 321088

KAYANGAN

Jl. Kayangan Port, Labuhan Lombok, Kec.
Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur, Nusa
Tenggara Barat 83654
Telp. (+62-376) 21773 (TBC)

LUWUK

Jl. Tan Malaka No. 15, Luwuk,
Sulawesi Tengah 94971
Telp. (+62-461) 22375

BITUNG

Jl. Moh. Hatta, Pelabuhan Penyeberangan
Pateten, Bitung, Sulawesi Utara 95512
Telp. (+62-438) 30847

04

TINJAUAN PENDUKUNG BISNIS

BUSINESS SUPPORT REVIEW





SUMBER DAYA MANUSIA

HUMAN RESOURCES

Perusahaan meyakini bahwa Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan aset yang sangat penting dan berharga bagi Perusahaan untuk mencapai visi dan rencana jangka panjang perusahaan. SDM menjadi ujung tombak dari Perusahaan dalam menjalankan usaha sehingga Perusahaan memastikan kecukupan jumlah dan kualitas SDM secara berkesinambungan. Untuk itu, pengelolaan SDM menjadi salah satu prioritas utama untuk menciptakan SDM yang berkualitas, profesional, berintegritas, dan memiliki loyalitas tinggi kepada Perusahaan.

The Company believes that Human Resources (HR) is an important and valuable asset for the Company to achieve its vision and long-term plans. HR is the Company's spearhead, that run and operate the business, thus the Company continually ensures continual sufficiency in terms of quantity and quality. For this reason, HR management is highly prioritised to shape employees who are qualified, professional, have integrity, and have strong loyalty to the Company.

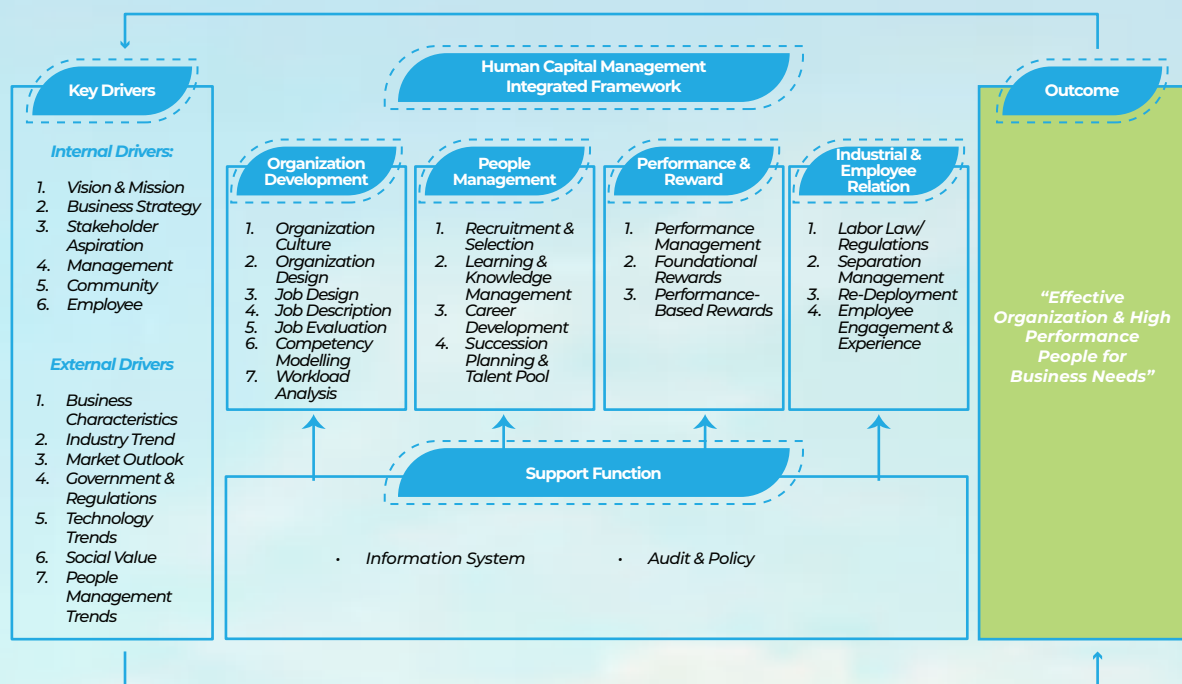
KERANGKA KERJA PENGELOLAAN SUMBER DAYA MANUSIA

Sejalan dengan visi pengelolaan SDM di Perusahaan untuk mencapai "*Effective Organization & High-Performance People for Business Needs*", Perusahaan telah mengembangkan kerangka kerja pengelolaan SDM terintegrasi yang selaras dengan strategi Perusahaan. Pada tahun 2023, Perusahaan melakukan pengembangan *Human Capital Management Integrated Framework* termasuk *Human Capital Blueprint* yang menjadi dasar dalam pengelolaan organisasi dan SDM termasuk pengembangannya dalam 5 (lima) tahun mendatang.

HUMAN RESOURCE MANAGEMENT FRAMEWORK

In line with the vision of the HR management to achieve "*Effective Organization & High-Performance People for Business Needs*", the Company has developed an integrated HR management framework that is in harmony with the Company's strategy. In 2023, the Company developed a Human Capital Management Integrated Framework including a Human Capital Blueprint, which laid the basis for organizational and HR management and its development in the next 5 (five) years.





Human Capital Management Integrated Framework dibangun untuk memastikan pengelolaan SDM yang komprehensif dan terintegrasi, sejalan dengan dinamika dari aspek internal maupun eksternal yang dijalankan melalui 5 pilar pengelolaan SDM yaitu:

1. *Organization Development,*
2. *People Management,*
3. *Performance & Reward,*
4. *Industrial & Employee Relation,*
5. *Support Function.*

Pada tahun 2023, strategi pengelolaan SDM mengusung tema *people & culture* dengan fokus utama pada peningkatan kualitas SDM dan penguatan budaya. Strategi ini diangkat dengan mempertimbangkan dinamika organisasi, dinamika perkembangan bisnis yang cepat, dan persaingan yang semakin ketat sehingga Perusahaan memandang perlunya SDM yang mampu beradaptasi dalam menghadapi dinamika tersebut melalui SDM yang kompeten dan profesional. Di sisi lain, penguatan budaya ditujukan untuk meningkatkan kinerja SDM dan memberikan pelayanan terbaik kepada penumpang.

Strategi tersebut dituangkan ke dalam beberapa inisiatif diantaranya inisiatif terkait aspek *people* dilakukan melalui perubahan struktur

The Human Capital Management Integrated Framework was developed to ensure comprehensive and integrated HR management, in agreement with the dynamics of internal and external aspects carried out through 5 pillars of HR management, namely:

1. Organization Development,
2. People Management,
3. Performance & Reward,
4. Industrial & Employee Relations,
5. Support Functions.

In 2023, the HR management strategy was themed "people & culture", which focused primarily on improving the quality of human resources and strengthening the culture. This strategy was adopted after taking into account the dynamics of the organization, the dynamics of rapid business development, and increasingly fierce competition, and arriving to the conclusion that Company requires competent, professional human resources who can be versatile to withstand these dynamics. On the other hand, culture reinforcement is aimed to improve HR performance and to provide the best service to passengers.

This strategy is outlined in several initiatives, one of which was related to the people aspect that resulted in changes to the organizational

organisasi, pengembangan model kompetensi, pemetaan, dan pengukuran kompetensi karyawan, penyusunan kebijakan manajemen talenta, penyusunan manajemen karier dan pengembangan *Blueprint Human Capital*. Sementara dari aspek *culture*, melaksanakan program *awareness & internal culture survey*, penilaian perilaku budaya AKHLAK dengan metode NPS, mendorong internalisasi *safety culture*, dan adopsi *agile culture*.

structure, development of competency models, mapping and quantitate employee competencies, formulation of talent management policies, formulation of career management, and development of Human Capital Blueprint. Meanwhile, from the cultural aspect, there were awareness programs & internal culture surveys, assessment of AKHLAK behavior using the NPS methodology, acceleration of safety culture internalization, and adoption of agile culture.

KEBIJAKAN PENGELOLAAN SDM

Pengelolaan SDM yang terintegrasi diwujudkan melalui penyusunan dan pembaharuan kebijakan secara terus-menerus yang dituangkan melalui Keputusan Direksi (KD), Surat Keputusan (SK) dan kebijakan turunannya. Hal ini dilakukan sebagai respon Perusahaan dalam memenuhi kepatuhan terhadap regulasi dan respon atas dinamika yang terjadi dari internal maupun eksternal. Pada tahun 2023, Perusahaan telah menyusun dan memperbarui 4 kebijakan pengelolaan SDM yang terdiri dari:

1. Keputusan Direksi PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) No. KD.95/PA.002/ASDP-2023 tentang Pendidikan Lanjutan Karyawan di Lingkungan PT ASDP Indonesia Ferry (Persero);
2. Keputusan Direksi PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) No. KD.220/PA.004/ASDP-2023 tentang Manajemen Talenta di Lingkungan PT ASDP Indonesia Ferry (Persero);
3. Keputusan Direksi PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) No. KD.229/PA-207/ASDP-2023 tentang Cuti dan Izin Meninggalkan Pekerjaan Karyawan di Lingkungan PT ASDP Indonesia Ferry (Persero);
4. Keputusan Direksi PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) No. KD.361/HK.002/ASDP-2023 tentang Perubahan Keputusan Direksi PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) No. KD.140/HK.002/ASDP-2022 tentang Waktu Kerja, Waktu Istirahat, Waktu Kerja Lembur dan Perhitungan Upah Kerja Lembur di Lingkungan PT ASDP Indonesia Ferry (Persero).

HR MANAGEMENT POLICY

Integrated HR management was manifested through continuous policies formulation and improvement as stated in Board of Directors Decrees (KD), Decision Letters (SK) and other derivative policies. These was undertaken as Company's approach to comply with regulations and respond to internal and external dynamics. In 2023, the Company drafted and revised 4 HR management policies consisting of:

1. Decree of the Board of Directors of PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) No. KD.220/PA.004/ASDP-2023 concerning Talent Management in PT ASDP Indonesia Ferry (Persero);
2. Decree of the Board of Directors of PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) No. KD.220/PA.004/ASDP-2023 concerning Talent Management in PT ASDP Indonesia Ferry (Persero);
3. Decree of the Board of Directors of PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) No. KD.229/PA-207/ASDP-2023 concerning Leave and Permission to Leave Work for Employees in PT ASDP Indonesia Ferry (Persero);
4. Decree of the Board of Directors of PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) No. KD.361/HK.002/ASDP-2023 concerning Changes to the Decision of the Board of Directors of PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) No. KD.140/HK.002/ASDP-2022 concerning Working Time, Rest Time, Overtime, and Calculation of Overtime Wages in PT ASDP Indonesia Ferry (Persero).

SISTEM PENGEMBANGAN ORGANISASI

Perusahaan secara berkelanjutan melakukan peninjauan dan pengembangan organisasi untuk memastikan keselarasan organisasi dengan strategi Perusahaan serta mendorong efektivitas organisasi dalam menunjang operasional Perusahaan. Peninjauan organisasi dilakukan setiap tahun sehingga Perusahaan dapat menghadapi tantangan dan peluang secara optimal.

Pada tahun 2023, Perusahaan telah melakukan 1 (satu) kali perubahan struktur organisasi. Perubahan tersebut dituangkan melalui Keputusan Direksi PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) No. KD.346/HK.001/ASDP-2023 tentang Perubahan Keempat Keputusan Direksi No. KD.75/HK.001/ASDP-2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pusat dan Regional PT ASDP Indonesia Ferry (Persero), yang disahkan pada tanggal 9 Oktober 2023.

Di samping itu, Perusahaan juga telah menetapkan *roadmap* pengembangan organisasi dan SDM yang dituangkan dalam *HC Blueprint* periode 2023-2027, yang terdiri dari 3 tema inisiatif berikut:



SISTEM REKRUTMEN

Proses rekrutmen karyawan di Perusahaan dilakukan secara transparan, adil, dan tanpa diskriminasi untuk memberikan kesempatan yang sama bagi seluruh kandidat untuk rekrutmen karyawan darat maupun karyawan laut. Perusahaan memiliki kebijakan rekrutmen yang disahkan melalui Keputusan Direksi PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) No. KD.37/PA.001/ASDP-2015 tentang Pedoman Pengadaan Karyawan di Lingkungan PT ASDP Indonesia Ferry (Persero).

ORGANIZATIONAL DEVELOPMENT SYSTEM

The Company continuously reviews and develops the organization to ensure its alignment with the established strategies and to drive organizational effectiveness in support of the Company's operations. Review on organization is performed annually to prepare the Company's readiness to face challenges and opportunities optimally.

In 2023, the Company made 1 (one) change in relation to organizational structure. These changes were stated in the Decree of the Board of Directors of PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) No. KD.346/HK.001/ASDP-2023 concerning the Fourth Amendment to the Decree of the Board of Directors No. KD.75/HK.001/ASDP-2021 on the Organization and Work Procedures of the Head Office and Regional Offices of PT ASDP Indonesia Ferry (Persero), which was ratified on 9 October 2023.

In addition, the Company also established an organizational and HR development roadmap as outlined in the HC Blueprint for the 2023-2027 period, which consisted of the following 3 initiative themes:

RECRUITMENT SYSTEM

The employee recruitment process at the Company is processed transparently, fairly, and without discrimination to give all candidates equal opportunities in being recruited for ashore and marine employees. The Company's recruitment policy was the ratified Decree of the Board of Directors of PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) No. KD.37/PA.001/ASDP-2015 concerning Guidelines for Employees Recruitment in PT ASDP Indonesia Ferry (Persero).

Perusahaan memiliki 2 (dua) metode rekrutmen utama, yaitu rekrutmen internal dan eksternal. Rekrutmen internal ditujukan untuk karyawan yang sudah bekerja di Perusahaan untuk mengisi jabatan-jabatan yang tersedia, melalui proses mutasi, promosi, atau lelang jabatan. Sementara rekrutmen eksternal ditujukan bagi kandidat dari luar Perusahaan untuk mengisi jabatan yang tersedia.

Seluruh kandidat akan melalui serangkaian tahapan proses seleksi yang dilakukan oleh pihak ketiga atau konsultan SDM yang memiliki kualifikasi proses rekrutmen karyawan. Kemudian kandidat yang lolos akan diberikan penempatan calon karyawan sesuai dengan kebutuhan perusahaan, diikuti dengan proses familiarisasi perusahaan atau *onboarding*. Sepanjang tahun 2023, Perusahaan telah melakukan rekrutmen karyawan dengan total karyawan baru yang direkrut sebanyak 126 orang.

SISTEM PEMBELAJARAN

Sebagai bagian dari komitmen Perusahaan dalam meningkatkan kualitas dan kompetensi karyawan, Perusahaan membangun sistem pembelajaran terintegrasi yang dilakukan melalui pelatihan, pengembangan maupun sertifikasi, baik untuk karyawan darat maupun laut. Perusahaan memberikan kesempatan yang sama bagi seluruh karyawan untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan mereka sesuai dengan kebutuhan Perusahaan dan perkembangan industri sehingga dapat berkontribusi terhadap pencapaian tujuan Perusahaan.

Sistem pembelajaran di Perusahaan mengacu pada Keputusan Direksi PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) No. KD.36/PA.002/ASDP-2015 tentang Program Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) Karyawan di Lingkungan PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) dan Keputusan Direksi PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) No. KD.95/PA.002/ASDP-2023 tentang Pendidikan Lanjutan Karyawan di Lingkungan PT ASDP Indonesia Ferry (Persero).

Di samping itu, sebagai bentuk program pengembangan karyawan, Perusahaan juga memberikan program beasiswa yang mengacu pada KD.95/PA.002/ASDP-2023 tentang

The Company's 2 (two) main recruitment methods are internal recruitment and external recruitment. Internal recruitment is oriented towards the Company's employees to take up the available positions, either through transfer, promotion, or position auction processes. Meanwhile, external recruitment targets candidates from outside the Company to fill available positions.

All candidates will undergo a series of selection process conducted by third party or HR consultants who are qualified in the recruitment process. Then, successful candidates will be placed as prospective employee and posted according to the company's needs, followed by a company familiarization or *onboarding* process. Throughout 2023, the Company conducted recruitment for a total of 126 new employees.

LEARNING SYSTEM

As part of the Company's commitment to improve employee quality and competency, the Company developed an integrated learning system through training, development and certification for ashore and marine employees. The Company provides equal opportunities for every employees to improve their skills and knowledge to correspond with the Company's needs and industry developments so that they may contribute to achieving the Company's goals.

The learning system in the Company refers to the Decree of Board of Directors of PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) No. KD.36/PA.002/ASDP-2015 concerning Employee Education and Training Programs in PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) and Decree of Board of Directors of PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) No. KD.95/PA.002/ASDP-2023 concerning Employee Continuing Education in PT ASDP Indonesia Ferry (Persero).

In addition, as employee development program, the Company awards scholarship program, which refers to KD.95/PA.002/

Pendidikan Lanjutan Karyawan di Lingkungan PT ASDP Indonesia Ferry (Persero). Karyawan dapat mengikuti program beasiswa tersebut baik melalui jalur beasiswa perusahaan maupun beasiswa eksternal. Untuk program beasiswa dari perusahaan yang telah berjalan yaitu beasiswa S1 yang dilakukan melalui kerja sama dengan Universitas Terbuka dan beasiswa S2 melalui kerja sama dengan SBM ITB Jakarta. Sementara itu untuk untuk karyawan laut, perusahaan mengadakan program *upgrading* yang bekerja sama dengan Balai Besar Pendidikan Penyegaran dan Peningkatan Ilmu Pelayaran Jakarta (BP3IP).

Realisasi program pembelajaran di Perusahaan telah disampaikan melalui bagian Profil Perusahaan pada sub bagian Pengembangan Kompetensi Karyawan dalam Laporan Tahunan ini.

ASDP-2023 concerning Employee Continuing Education in PT ASDP Indonesia Ferry (Persero). Employees may take part in the scholarship program through company scholarships or external scholarships. The Company's currently ongoing scholarship programs are undergraduate scholarships in collaboration with the Universitas Terbuka and postgraduate scholarships in collaboration with SBM ITB Jakarta. Meanwhile, for marine employees, the Company organized upgrading program in collaboration with BP3IP (Jakarta Maritime Science Education Center).

The realized training program in the Company is described in this Annual Report, on Company Profile chapter, Employee Competency Development section.

SISTEM PENGELOLAAN KARIER

Komitmen Perusahaan dalam pengembangan karier karyawan dilakukan melalui Keputusan Direksi PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) No. KD.253/PA.004/ASDP-2022 tentang Manajemen Karier di Lingkungan PT ASDP Indonesia Ferry (Persero), yang mulai berlaku pada tanggal 15 Desember 2022. Kebijakan ini mencakup pengelolaan karier secara komprehensif meliputi penempatan karyawan dan manajemen karier bagi karyawan darat dan laut. Pengelolaan karier karyawan berdasarkan pada 2 (dua) jalur, yaitu jalur struktural dan jalur fungsional, yang dipertimbangkan berdasarkan *job family* jabatan, pola karier, kompetensi, dan kinerja karyawan.

Selain itu, Perusahaan mengatur pengembangan talenta bagi karyawannya yang diatur melalui Keputusan Direksi No. KD.220/PA.004/ASDP-2023 tentang Manajemen Talenta di lingkungan PT ASDP Indonesia Ferry (Persero). Program pengembangan talenta dilakukan untuk mempersiapkan dan membentuk calon pemimpin masa depan di Perusahaan melalui program pengembangan terintegrasi dimulai dari level *basic* hingga *executive*. Program pengembangan talenta dilakukan melalui Ferizyan *Talent Development Program* (FTDP) dan dilakukan secara berjenjang sesuai jenjang jabatan sebagaimana disajikan dalam tabel berikut:

CAREER MANAGEMENT SYSTEM

The Company's commitment to employee career development is set in the Decree of the Board of Directors of PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) No. KD.253/PA.004/ASDP-2022 concerning Career Management in PT ASDP Indonesia Ferry (Persero), which came into effect on 15 December 2022. The policy covers comprehensive career management including employee placement and career management for ashore and marine employees. Employee career management has 2 (two) paths, the structural path and the functional path, which are examined based on position in job family, career patterns, competence, and employee performance.

In addition, the Company regulates talent development for its employees through the Decree of the Board of Directors No. KD.220/PA.004/ASDP-2023 concerning Talent Management in PT ASDP Indonesia Ferry (Persero). The talent development program prepares and shapes future leaders within the Company using an integrated development program that starts from basic to executive level. The talent development program is termed Ferizyan Talent Development Program (FTDP) and is carried out in phases according to position level, as presented in the following table:

Band Level	Talent Development Program
D-1 BoD-1	Executive Leadership Development Program (ELDP)
D-2 BoD-2	Managerial Leadership Development Program (MLDP)
D-3 BoD-3	Junior Managerial Leadership Development Program - I (JLDP - I)
D-4 BoD-4	Junior Managerial Leadership Development Program - II (JLDP - II)
D-5 BoD-5	Basic Leadership Development Program (BLDP)

Fokus pengembangan talenta melalui FTDP yaitu pada aspek pengembangan kompetensi kepemimpinan (*leadership*), kompetensi penjenjangan, kualifikasi profesional, dan pembentukan karakter.

The FTDP focuses on developing competencies in aspects of leadership, job grading, professional qualifications, and character building.

SISTEM MANAJEMEN KINERJA

Perusahaan secara berkala melakukan penilaian kinerja karyawan secara transparan dan objektif sebagai bentuk evaluasi dan pengukuran kinerja karyawan. Melalui proses penilaian kinerja ini, Perusahaan dapat memahami dan menganalisa kinerja karyawan yang dapat digunakan sebagai pertimbangan dalam melakukan kebutuhan pengembangan kompetensi karyawan serta penilaian prestasi karyawan. Proses penilaian kinerja di Perusahaan berpedoman pada Keputusan Direksi PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) No. KD.350/PA.003/ASDP-2019 tentang Sistem Ukur *Performance* Individu Organisasi PT ASDP Indonesia Ferry (Persero).

Proses penilaian dimulai dengan menetapkan sasaran kinerja, yang direncanakan setiap tahun dan paling lambat pada bulan Desember tahun sebelumnya. Kemudian dilakukan *monitoring* kinerja individu secara berkala setiap bulan yang dilakukan oleh masing-masing atasan di setiap unit kerja. Sementara itu, evaluasi kinerja dijalankan setiap semester dengan perhitungan hasil penilaian pada semester I dan semester II akan diakumulasikan di akhir tahun.

Selain penilaian kinerja, Perusahaan juga melakukan penilaian kompetensi perilaku yang dilakukan setiap semester. Penilaian ini mencakup aspek keterampilan intrapersonal,

PERFORMANCE MANAGEMENT SYSTEM

The Company periodically conducts employee performance review in a transparent and objective manner for evaluation and measurement. The appraisal process allows the Company to understand and analyze employee performance to be considered as a factor in employee's required competency development and performance appraisal. The performance appraisal process at the Company refers to the Decree of the Board of Directors of PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) No. KD.350/PA.003/ASDP-2019 concerning the Individual Performance Measuring System of PT ASDP Indonesia Ferry (Persero).

The appraisal process begins by defining annually planned performance targets that are set no later than December of the previous year. Then, individual performance is monitored monthly by respective superior in respective work unit. Meanwhile, performance evaluations are conducted every semester, and appraisal results from both terms will be accumulated at the end of the year.

Aside from performance appraisal, the Company also conducts behavioral competency appraisal every semester. This appraisal covers aspects of intrapersonal,

interpersonal, keterampilan bisnis/manajemen, dan kepemimpinan. Dalam menilai prestasi karyawan, kriteria penilaian kinerja mendominasi dengan porsi 80%, sementara penilaian kompetensi perilaku memberikan kontribusi sebanyak 20%. Berdasarkan hasil penilaian kinerja karyawan, ditetapkan predikat sesuai dengan total nilai sebagai berikut:

Total Nilai Total Score	Predikat Category
>105	Outstanding
>100-105	Above Target
>95-100	On Target
≥90-95	Below Target
<90	Poor

Di samping penilaian kinerja, Perusahaan menyediakan *coaching* dan *counseling* guna meningkatkan kinerja setiap individu melalui pendekatan yang lebih personal. *Coaching* digunakan untuk memberikan bimbingan dan dorongan kepada karyawan dalam mencapai tujuan mereka, sementara *counseling* difokuskan pada membantu karyawan mengatasi masalah pribadi atau profesional yang dapat mempengaruhi kinerja mereka. Dengan memperhatikan kebutuhan dan potensi masing-masing individu, *coaching* dan *counseling* diharapkan dapat memberikan kontribusi positif dalam mencapai tujuan bisnis Perusahaan serta meningkatkan kepuasan dan kesejahteraan karyawan secara keseluruhan.

SISTEM REMUNERASI

Sistem remunerasi di Perusahaan didasarkan pada beberapa Keputusan Direksi yang terkait dengan remunerasi karyawan. Secara umum, sistem remunerasi Perusahaan mencakup 3 (tiga) jenis yaitu gaji, fasilitas, dan *benefit* yang diberikan sesuai dengan jenjang dan kelas jabatan yang berlaku di Perusahaan. Perusahaan memberikan sistem remunerasi yang adil dan kompetitif, sebagai bentuk penghargaan kepada karyawan sesuai dengan tanggung jawab, prestasi dan sesuai dengan standar pasar kerja.

interpersonal skills, business/management skills, and leadership. In evaluating employee achievements, performance appraisal takes 80% of the weight, while behavioral competency contributes 20%. The results of the employee performance appraisal are grouped in categories, as seen in the following table:

Apart from performance appraisal the Company provides coaching and counseling to improve individual performance using a more personal approach. Coaching provides guidance and encouragement to employees in achieving their goals, while counseling focuses on helping employees overcome personal or professional issues that may affect their performances. By attending to individual's needs and potentials, coaching and counseling are expected to contribute positively in achieving the Company's business goals and increase overall employee satisfaction and well-being.

REMUNERATION SYSTEM

The remuneration system in the Company is based on several Directors' Decisions. In general, the Company's remuneration system is comprised of 3 factors: which are salary, facilities, and benefits that are provided according to the position rank and grade in the Company. The Company provides a fair and competitive remuneration system, as a form of appreciation to employees for carrying out their responsibilities and achievements, whilst adhering to the market standards.

Untuk memastikan kesesuaian dengan kondisi ekonomi terkini, Perusahaan melakukan evaluasi dan pembaharuan nilai remunerasi menyesuaikan dengan *Cost of Living Adjustment* (COLA) sehingga remunerasi yang diberikan dapat memenuhi kesejahteraan karyawan sesuai perkembangan ekonomi nasional. Di samping itu, Perusahaan melakukan *salary survey* setiap tahunnya untuk memastikan remunerasi yang diberikan tetap kompetitif dan sesuai dengan standar di pasar kerja nasional.

HUBUNGAN INDUSTRIAL

Berdasarkan amanat yang tertuang pada Pasal 28 E Ayat 3 Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan Pasal 1 dan 102 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Tenaga Kerja, Perusahaan memberikan hak kepada karyawan untuk berserikat, berkumpul dan menyampaikan pendapatnya kepada Perusahaan. Hal tersebut diwujudkan melalui pembentukan Serikat Pekerja ASDP Indonesia sebagai wadah bagi karyawan untuk berserikat dan mengungkapkan aspirasi mereka yang secara resmi telah terdaftar dan tercatat di Kantor Kementerian Ketenagakerjaan RI.

Untuk menciptakan hubungan industrial yang harmonis, berkeadilan, dan baik, salah satu upaya yang dilakukan oleh Perusahaan adalah melalui pembuatan Perjanjian Kerja Bersama (PKB). PKB merupakan perjanjian tertulis yang disepakati melalui perundingan antara Perusahaan dengan Serikat Pekerja ASDP Indonesia. Perjanjian tersebut memuat berbagai ketentuan terkait syarat-syarat kerja, hak, dan kewajiban dari kedua belah pihak seperti waktu kerja, hak cuti, disiplin karyawan, dan lain sebagainya.

Untuk memastikan ketentuan dalam PKB yang relevan dan adil bagi kedua belah pihak, Perusahaan secara berkala melakukan evaluasi dan pembaharuan PKB sesuai dengan periode PKB yang telah disepakati. Pada tahun 2023, Perusahaan melakukan pembaharuan PKB sehingga PKB yang berlaku PKB di tahun 2023 adalah Perjanjian Kerja Bersama PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) tahun periode 2023-2025.

Keeping pace with current economic conditions, the Company evaluates and updates remunerations according to the Cost of Living Adjustment (COLA) so the remuneration provided is sufficient to fulfill employee welfare in line with national economic developments. In addition, the Company conducts an annual salary survey to ensure that the remuneration provided remains competitive and in line with standards in the national job market.

INDUSTRIAL RELATIONS

Based on the mandated Article 28 E Paragraph 3 of the 1945 Constitution and Articles 1 and 102 of Law No. 13/2003 concerning Manpower, the Company gives employees the right to associate, assemble and convey their opinions to the Company. This was achieved with the formation of ASDP Indonesia Workers Union, which functions as a forum for employees to organize and express their aspirations, that is the officially registered and recorded at the Indonesian Ministry of Manpower Office.

To create harmonious, fair and robust industrial relations, one of the efforts the Company took was the Collective Work Agreement (*Perjanjian Kerja Bersama*, PKB). The PKB is a written agreement agreed upon through negotiations between the Company and the ASDP Indonesia Workers Union. It contains various provisions related to both parties' work conditions, rights, and obligations, such as working time, leave rights, employee discipline and others.

To ensure relevancy and fairness of the PKB provisions for both parties, the Company evaluates and updates it upon renewal after the agreed period. In 2023, the Company renewed the agreement, such that the agreement in effect in 2023 was the PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) Collective Work Agreement for the 2023-2025 period.

HUMAN CAPITAL MANAGEMENT SYSTEM

Perusahaan terus berupaya meningkatkan kualitas pengelolaan SDM salah satunya melalui adopsi teknologi melalui implementasi *Human Capital Management System* (HCMS). Implementasi HCMS ditujukan untuk menyederhanakan operasional pengelolaan SDM sehingga dapat meningkatkan efektivitas pengelolaan SDM, mendorong efisiensi, dan meningkatkan pengalaman karyawan secara menyeluruh.

Pada tahun 2023, Perusahaan telah mengambil langkah strategis melalui implementasi HCMS yang dilakukan dengan menjalin kemitraan strategis dengan Darwinbox. Langkah strategis ini dilakukan untuk memberikan Perusahaan akses kepada teknologi terkini dalam pengelolaan SDM yang dapat menjangkau seluruh karyawan di seluruh wilayah kerja baik untuk karyawan darat maupun karyawan laut.

Melalui HCMS, Perusahaan dapat melakukan digitalisasi proses yang dapat berguna untuk mengoptimalkan proses bisnis serta memberikan akses *self services* bagi karyawan dalam melakukan berbagai aktivitas yang terkait dengan kebutuhan karyawan pada aspek pengelolaan SDM. Terdapat berbagai modul yang diadopsi dalam HCMS yakni manajemen kinerja, *payroll*, *talent acquisition*, *expense management*, pengaturan waktu kerja, dan kehadiran serta modul-modul lainnya yang diimplementasikan secara bertahap.

HUMAN CAPITAL MANAGEMENT SYSTEM

The Company continues to improve the quality of HR management, among which is through the technology adoption upon Human Capital Management System (HCMS) implementation. The objective of HCMS is simplifying operations of HR management to increase the effectiveness, and encourage efficiency of HR management, thus improving the overall employee experience.

In 2023, the Company took strategic steps in implementing HCMS by forming a strategic partnership with Darwinbox. This strategic step provided the Company with access to the latest technology in HR management, encompassing all employees across all work areas, including ashore and marine personnel.

Through HCMS, the Company digitalized useful processes in optimizing business processes and providing self-services access to employees in completing various activities related to employee requirement in the HR management aspect. There were various modules adopted in HCMS that were implemented in stages, which included performance management, payroll, talent acquisition, expense management, working time, attendance, and other modules.

TEKNOLOGI INFORMASI

INFORMATION TECHNOLOGY

Peran teknologi informasi di era saat ini tidak hanya sebatas sebagai *business enabler*, melainkan telah menjadi *business transformer* karena peranannya yang sangat penting dalam mendorong optimalisasi kegiatan bisnis yang efektif dan efisien. Oleh karenanya, fungsi pengelola Teknologi Informasi di Perusahaan bertransformasi menjadi *business transformer* yang mampu menghadirkan inovasi dan solusi untuk meningkatkan nilai tambah kepada segenap pemangku kepentingan.

The role of information technology at present is not only limited to be a *business enabler*, but has become a *business transformer* due to its very important role in promoting the optimization of effective and efficient business activities. Hence, the function of Information Technology manager in the Company is transformed into a *business transformer* capable of providing innovation and solutions to amplify added value to all stakeholders.

ROADMAP DIGITALISASI BISNIS

BUSINESS DIGITALIZATION ROADMAP

Memperkuat fondasi organisasi perusahaan, melaksanakan IPO dan meningkatkan budaya digital pada organisasi perusahaan sehingga membuat perusahaan lebih siap dalam melanjutkan bisnisnya.



Strengthened the foundation of the organization, implemented IPO and improved the digital culture in the organization so that the company is better prepared to continue its business.

2021

Memperkuat operasional dan layanan bisnis yang didukung oleh penguatan sistem dan teknologi yang digunakan.

Strengthened business operations and services supported by strengthened systems and technology used.



2022



Meningkatkan keberlanjutan bisnis Perusahaan melalui peningkatan jasa penyewaan rental unit untuk meningkatkan *customer experience* kepada *existing* dan *potential customer* dalam mendukung keberlanjutan bisnis ASDP.

Improved the Company's business sustainability by expanding rental services to improve customer experience for existing and potential customers in supporting ASDP's business sustainability.

2024



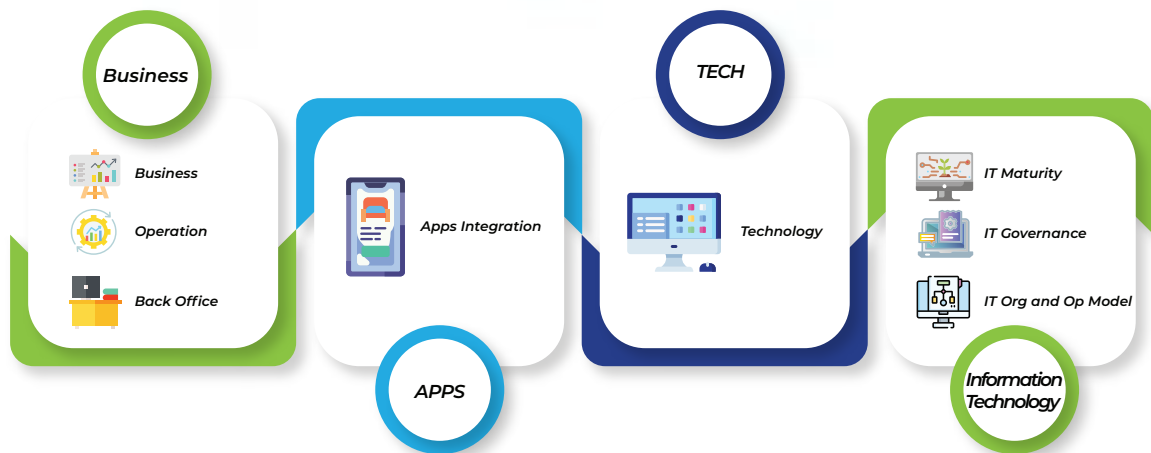
Meningkatkan dampak finansial bagi perusahaan sesuai arahan RJPP "Business Expansion", melalui peningkatan *channel* pembelian jasa penyeberangan dengan *online travel agent* maupun *core ticketing system*.

Improved financial impact for the company as directed in the Long Term Company Plan "Business Expansion", by increasing purchasing channels for ferry services with online travel agents and core ticketing systems.

2023

Perusahaan memiliki *roadmap* jangka panjang sebagai arahan dalam pengembangan digitalisasi bisnis dan operasional yang dituangkan melalui *Business Digitalization Roadmap* (BDR) 2021-2024. Dokumen BDR menjadi arahan bagi Perusahaan dalam melakukan digitalisasi pada bisnis dan operasional yang selaras dengan Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP) 2020-2024 sehingga inisiatif yang dituangkan dalam BDR mampu mendukung pencapaian tujuan RJPP.

Dalam dokumen BDR, terdapat 28 inisiatif yang akan dilakukan oleh masing-masing *business process owner* (BPO) dengan *support* dari Divisi Teknologi Informasi. Inisiatif dalam BDR terbagi dalam 4 area yaitu *Business*, *Apps*, *Tech*, dan *Information Technology* yang pada masing-masing area tersebut diturunkan kembali secara spesifik dengan *outcome* yang terukur sebagai target yang harus dicapai baik oleh BPO maupun Divisi Teknologi Informasi.



Melalui dokumen BDR tersebut, diharapkan masing-masing BPO memiliki kontribusi yang secara langsung, maupun tidak langsung, memberikan dampak positif bagi bisnis dan operasional Perusahaan. Selain itu, BDR menjadi sebuah bentuk komitmen Perusahaan dalam meningkatkan layanan dan memberikan kemudahan bagi pelanggan sehingga dalam mengakses dan menggunakan jasa yang diberikan oleh Perusahaan.

The Company has a long-term roadmap that directs business and operational digitalization development as outlined in the Business Digitalization Roadmap (BDR) 2021-2024. The BDR document serves as direction for the Company in digitalizing its business and operations in line with the Company's Long Term Plan 2020-2024 as the initiatives outlined in the BDR supports the achievement of the RJPP objectives.

The BDR document contains 28 initiatives that will be carried out by each business process owner (BPO) with support from the Information Technology Division. Initiatives in the BDR are divided into 4 areas, Business, Apps, Tech, and Information Technology. Each areas is detailed into targets specifically with measurable outcomes that must be achieved by both the BPO and the Information Technology Division.

As put forth by the BDR document, it is expected that every BPO will contribute directly or indirectly with positive impacts on the Company's business and operations. In addition, BDR is the manifestation of the Company's commitment to improve services and ease customers to access and use the services provided by the Company.

TEKNOLOGI INFORMASI

Semakin besarnya peran Teknologi Informasi (TI) dalam menopang tujuan bisnis Perusahaan, maka pembangunan Teknologi Informasi Perusahaan harus mengikuti metoda kerja atau proses bisnis yang baik dan benar sesuai dengan *best practices* dan *framework* yang berlaku. Melalui hal tersebut, diharapkan investasi TI dapat memberikan hasil yang optimal bagi pencapaian tujuan Perusahaan.

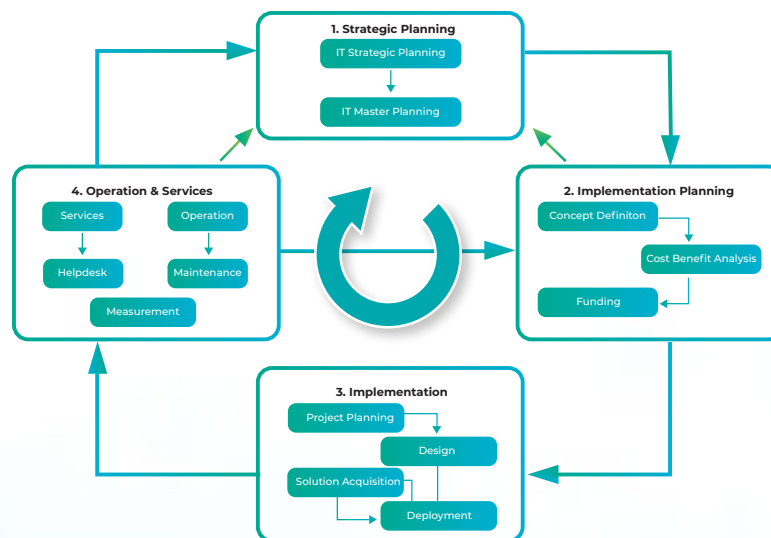
Secara garis besar, proses bisnis teknologi informasi di Perusahaan terbagi ke dalam 4 (empat) proses yaitu *strategic planning*, *implementation planning*, *implementation*, dan *operation & services*, sebagai berikut:

INFORMATION TECHNOLOGY

The increasing role of Information Technology (IT) in supporting the Company's business objectives means that the IT development must follow certain proper work methods and business processes in accordance with applicable best practices and frameworks. That way, the investment in IT can be expected to yield optimal results for achieving the Company's goals.

In general, information technology business process in the Company is divided into 4 (four) processes, namely strategic planning, implementation planning, implementation, and operations & services, as follows:

Tata Kelola Teknologi Informasi ASDP ASDP Information Technology Governance



Strategic Planning

Tahapan *strategic planning* meliputi 2 (dua) proses yaitu:

- *IT Strategic Planning*, mencakup proses *review*, evaluasi dan penyusunan kebijakan strategis yang berkaitan dengan penerapan dan pengembangan Teknologi Informasi (TI) di Perusahaan;
- *IT Master Planning*, mencakup proses *review*, evaluasi, dan penyusunan cetak biru yang menerjemahkan kerangka kerja dan rencana jangka panjang TI dalam pengembangan sistem informasi guna mendukung visi misi perusahaan.

Strategic Planning

The strategic planning phase has 2 (two) processes, namely:

- IT Strategic Planning covers the process of reviewing, evaluating and preparing strategic policies related to the implementation and development of Information Technology (IT) in the Company;
- IT Master Planning includes the process of reviewing, evaluating and preparing blueprints that describe IT frameworks and long-term plans to develop information systems in supporting the company's vision and mission.

Implementation Planning

Tahapan *implementation planning* meliputi 3 (tiga) proses yaitu:

- *Concept Definition*, merupakan proses pendefinisian kebutuhan dan konsep solusi TI yang akan dikembangkan berdasarkan kebutuhan dan proses bisnis dari *user*;
- *Cost Benefit Analysis*, merupakan proses analisis untuk membandingkan antara biaya dan keuntungan yang didapat dari proyek TI berdasarkan beberapa opsi dan skenario;
- *Funding*, merupakan proses penyusunan rencana anggaran berdasarkan opsi dan skenario pengembangan TI yang akan dilakukan.

Implementation

Tahapan *implementation* meliputi 4 (empat) proses yaitu:

- *Project Planning*, merupakan proses perencanaan proyek pengembangan sistem TI secara detail;
- *Design*, merupakan proses perancangan desain sistem TI untuk digunakan sebagai acuan pengembangan;
- *Solution Acquisition*, merupakan proses pengembangan dan pengujian sistem TI dengan metode yang ditentukan;
- *Deployment*, merupakan proses *delivery* sistem TI kepada *user* untuk selanjutnya dapat dioperasikan.

Operation & Services

Tahapan *operation & services* meliputi 5 (lima) proses yaitu:

- *Operation*, merupakan proses pengoperasian sistem TI termasuk pengawasan untuk memastikan operasional sistem TI berjalan secara optimal;
- *Maintenance*, merupakan proses pemeliharaan sistem IT dari berbagai aspek untuk memastikan *reliability* dan *lifetime* sistem yang optimal;
- *Service*, merupakan proses pelayanan kepada user terkait kebutuhan-kebutuhan sistem termasuk *change request* pada sistem yang telah tersedia;
- *Helpdesk*, merupakan proses pelayanan kepada *user* terkait resolusi permasalahan yang terjadi pada sistem IT secara cepat;

Implementation Planning

The implementation planning phase includes 3 (three) processes, which are:

- *Concept Definition*, the process of defining requisite and concepts for IT solutions that will be developed based on user's requirement and business processes;
- *Cost Benefit Analysis*, analytical process to compare the costs and benefits obtained from options and scenarios of IT projects;
- *Funding*, the budget plan preparation process based on IT development options and scenarios that would be carried out.

Implementation

The implementation phase has 4 (four) processes, namely:

- *Project Planning*, a detailed IT system development project planning process;
- *Design*, the process of designing IT system to be used as a development reference;
- *Solution Acquisition*, the process of developing and testing IT systems using specified methods;
- *Deployment*, the process of delivering IT system to users to be operated.

Operations & Services

The operation & services phase includes 5 (five) processes, namely:

- *Operation*, the process of operating IT system, including supervision to ensure that IT system operations run optimally;
- *Maintenance*, which is IT system maintenance process on various aspects to ensure optimal system reliability and lifetime;
- *Service*, provided to users related to system requirements including change requests on existing systems;
- *Helpdesk*, covers service to users concerning quick resolutions to problems that occur in the IT system;

- *Measurement*, merupakan proses pengukuran terkait tingkat keamanan, kapasitas dan kualitas sistem IT termasuk kepuasan user terhadap pelayanan IT.

- *Measurement*, the evaluation process related to the level of security, capacity and quality of the IT system, including user satisfaction with IT services.

TATA KELOLA TI

Perusahaan terus melakukan peningkatan tata kelola TI melalui berbagai inisiatif yang selaras dengan kerangka kerja TI berbasis COBIT 2019. Oleh karena itu, Perusahaan melakukan pengukuran *IT maturity level* secara berkala melalui *IT maturity level assessment* oleh pihak independen dengan harapan dapat memberikan gambaran yang objektif mengenai tingkat implementasi tata kelola TI di Perusahaan. Upaya ini menjadi evaluasi bagi Perusahaan sehingga tata kelola TI di Perusahaan dapat terus disempurnakan sesuai dengan *best practices*.

Perusahaan melakukan pengukuran *level IT Maturity* secara berkala dimulai sejak tahun 2021 dengan hasil pengukuran sebesar 1,19 dan kemudian meningkat menjadi 2,52 di tahun 2022. Pada tahun 2023, Perusahaan kembali melakukan pengukuran *level IT Maturity* dengan hasil pengukuran meningkat menjadi 3,33. Peningkatan *level IT maturity* tersebut diperoleh melalui usaha dan pembenahan tata kelola TI secara terus menerus.

PENGELOLAAN KEAMANAN TI

Seiring perkembangan teknologi informasi yang kian pesat, risiko ancaman terhadap keamanan teknologi informasi/*cybersecurity* kian meningkat. Ancaman yang dihadapi Perusahaan berupa virus/*malware*, *hacking*, *spyware*, dan kejahatan siber lainnya harus dihadapi dengan pengelolaan keamanan TI yang mumpuni di seluruh lapisan sistem TI yang dimiliki Perusahaan.

Dalam pengelolaan keamanan TI, Perusahaan memiliki serangkaian kebijakan dan prosedur melalui kerangka kerja keamanan TI yang didasarkan pada *framework* NIST dan ISO 27000. Keseluruhan prosedur, mekanisme dan pengembangan keamanan TI di Perusahaan juga telah dituangkan dalam *IT Master Plan* yang menjadi acuan Perusahaan dalam pengelolaan TI termasuk keamanan TI.

IT GOVERNANCE

The Company continues to improve IT governance through various initiatives that are in line with the 2019 COBIT-based IT framework. Therefore, the Company carried out periodic IT maturity level assessments by independent parties to gain an objective review on the implementation level of IT governance in the Company. This effort resulted in an evaluation for the Company so the Company's IT governance may continue to be improved in line with best practices.

The Company started to regularly measure the IT Maturity level in 2021 with a resulting score of 1.19, and improved score of 2.52 in 2022. In 2023, the Company's IT Maturity further improved to 3.33. Increasing score of IT maturity was achieved through continuous efforts and improvements in IT governance.

IT SECURITY MANAGEMENT

Information technology is developing rapidly, and along with it, the risk of threats to information technology or cyber security. The threats faced by the Company in the form of viruses/*malware*, *hacking*, *spyware* and other cyber crimes must be managed with competent IT security management at all layers of the Company's IT system.

In managing IT security, the Company laid a series of policies and procedures through IT security framework, which is based on the NIST and ISO 27000 framework. Every IT security procedures, mechanisms, and development in the Company have also been outlined in the IT Master Plan, which is the Company's reference in IT management, including IT security.

Dalam praktiknya, sepanjang tahun 2023 Perusahaan telah melakukan berbagai langkah dan program pengelolaan keamanan TI meliputi:

- Penyusunan *blueprint IT security*;
- Melakukan pengujian keamanan TI meliputi *vulnerability scanner* dan *penetration test*;
- Mengimplementasikan sistem perlindungan keamanan siber seperti *antivirus*, *firewall*, *antispam* dan *gateway mail server*;
- Membangun budaya *cyber security* untuk seluruh insan Perusahaan.

In practice, throughout 2023 the Company has carried out various IT security management steps and programs, which covered the following:

- Prepared of the IT security blueprint;
- Conducted IT security testing including vulnerability scanners, and penetration tests;
- Implemented cyber security protection systems such as antivirus, firewall; antispam, and mail server gateway,
- Built a cyber security culture for all Company employees.

MODUL DAN PENGEMBANGAN TEKNOLOGI INFORMASI

Sepanjang tahun 2023, Perusahaan melakukan sejumlah pengelolaan operasional TI termasuk *maintenance* rutin untuk memastikan kapabilitas dan kapasitas sistem TI yang mumpuni untuk mendorong optimalisasi aktivitas Perusahaan. Di samping itu, Perusahaan juga melakukan pengembangan aplikasi dan infrastruktur TI. Pengembangan sistem TI pada tahun 2023 difokuskan pada implementasi aplikasi Sistem Manajemen Audit Internal (SMAIL) dan pengembangan aplikasi FIDIAS untuk modul PR/PO guna mendukung implementasi *finance shared service* dan digitalisasi proses bisnis.

INFORMATION TECHNOLOGY MODULES AND DEVELOPMENT

Throughout 2023, the Company carried out a number of IT operational management activities including routine maintenance to ensure adequate IT system capability and capacity to encourage optimization of the Company's activities. In addition, the Company also developed applications and IT infrastructure. IT system development in 2023 was focused on implementation of Internal Audit Management System (SMAIL) application and development of the FIDIAS application for the PR/PO module, in order to support the implementation of finance shared services and digitalization of business processes.

PENGELOLAAN SUMBER DAYA TEKNOLOGI INFORMASI PERUSAHAAN

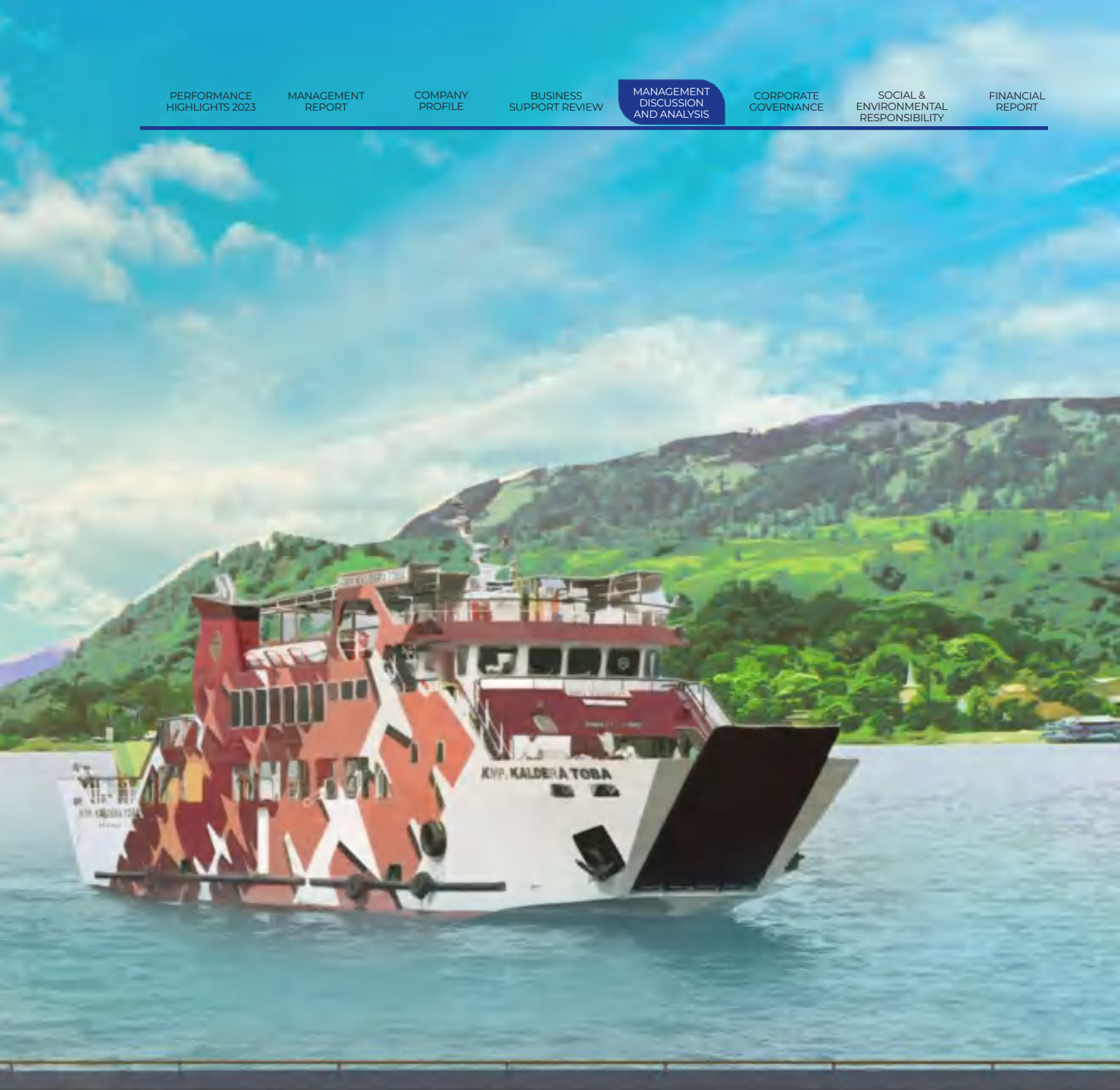
Fungsi pengelola Teknologi Informasi telah bertransformasi menjadi *IT Business Transformer* dengan peran yang lebih strategis untuk mendorong inovasi dan optimalisasi serta peningkatan nilai tambah bagi Perusahaan. Untuk itu, Perusahaan harus memiliki SDM pengelola TI yang memiliki kompetensi dan kualitas mumpuni yang dilakukan melalui pengembangan kompetensi SDM, meliputi:

RESOURCES MANAGEMENT OF COMPANY'S INFORMATION TECHNOLOGY

The function of Information Technology manager has transformed into an IT Business Transformer with a more strategic role to encourage innovation and optimization as well as to increase Company's added value. Thus, the Company was required to employ people with adequate competence and quality to operate IT management, which was achieved through HR competency development, including:

Jenis Pelatihan dan Pengembangan <i>Type of Training and Development</i>	Topik <i>Topic</i>	Jumlah Peserta <i>Number of Participants</i>
Sertifikasi <i>Certification</i>	COBIT	3 orang 3 people
Sertifikasi <i>Certification</i>	ISO 27000	5 orang 5 people





05

ANALISIS DAN PEMBAHASAN MANAJEMEN *MANAGEMENT DISCUSSION AND ANALYSIS*

TINJAUAN EKONOMI DAN INDUSTRI

ECONOMIC AND INDUSTRY OVERVIEW

TINJAUAN PEREKONOMIAN DUNIA

Aktivitas perekonomian global di tahun 2023 mengalami perlambatan dengan realisasi pertumbuhan ekonomi di luar estimasi awal tahun. Kondisi ini terjadi akibat adanya berbagai tekanan yang membuat ruang gerak pertumbuhan ekonomi menjadi terbatas. Tekanan yang terjadi utamanya berasal dari dinamika ekonomi yang terjadi di negara-negara maju seperti Amerika Serikat, Tiongkok, dan negara-negara maju Eropa. Di samping itu, tensi geopolitik juga semakin meningkat baik dari konflik Ukraina dan Rusia maupun konflik di Timur Tengah.

Dari sisi tekanan ekonomi, Amerika Serikat masih dihadapkan pada inflasi yang berada di atas target, suku bunga tinggi, peningkatan tekanan fiskal, dan tergerusnya *excess saving* yang membayangi pelemahan ekonomi negeri Paman Sam tersebut. Sementara itu, Republik Rakyat Tiongkok masih bergulat dengan pelemahan ekonomi pasca Covid-19 dan Eropa yang kondisi ekonominya melemah dengan defisit fiskal yang meningkat diiringi oleh *core inflation* yang masih tinggi.

Berdasarkan laporan International Monetary Fund (IMF), pertumbuhan ekonomi global sepanjang tahun 2023 tercatat sebesar 3,1%, lebih rendah dibandingkan proyeksi IMF pada awal tahun yang diperkirakan sebelumnya. Pertumbuhan ekonomi yang cukup kuat ini didorong oleh beberapa faktor seperti kenaikan belanja pemerintah dan belanja swasta serta realisasi inflasi di beberapa negara yang melandai lebih cepat dibandingkan perkiraan.

GLOBAL ECONOMIC OVERVIEW

Global economic activity in 2023 slowed and realized economic growth differed from projections at the beginning of the year. It occurred due to various pressures that constricted economic growth. The pressure is mainly attributed from the economic dynamics in developed countries such as the United States, China, and several developed European countries. Apart from that, geopolitical tensions also increased, from both the Ukrainian and Russian conflicts as well as Middle East conflicts.

The United States economy is still under pressure, with high inflation, high interest rates, increased fiscal pressure, and decreased *excess savings* that overshadow the weakening economy of America. Meanwhile, the People's Republic of China still grappled with economic downturn post-Covid-19 and Europe's economic situation was weakened as increased fiscal deficit coincided with high core inflation.

Based on the International Monetary Fund (IMF) report, global economic growth throughout 2023 was recorded at 3.1%, lower than the IMF's projection at the beginning of the year. The economic growth was driven by several factors such as increased government and private spendings as well as realized inflation in several countries that leveled off faster than expected.

Tren Pertumbuhan Ekonomi Dunia 2021-2023 (dalam %) *World Economic Growth Trends 2021-2023 (in %)*



Sumber | Source: World Economic Outlook, IMF
* Estimasi | Estimated

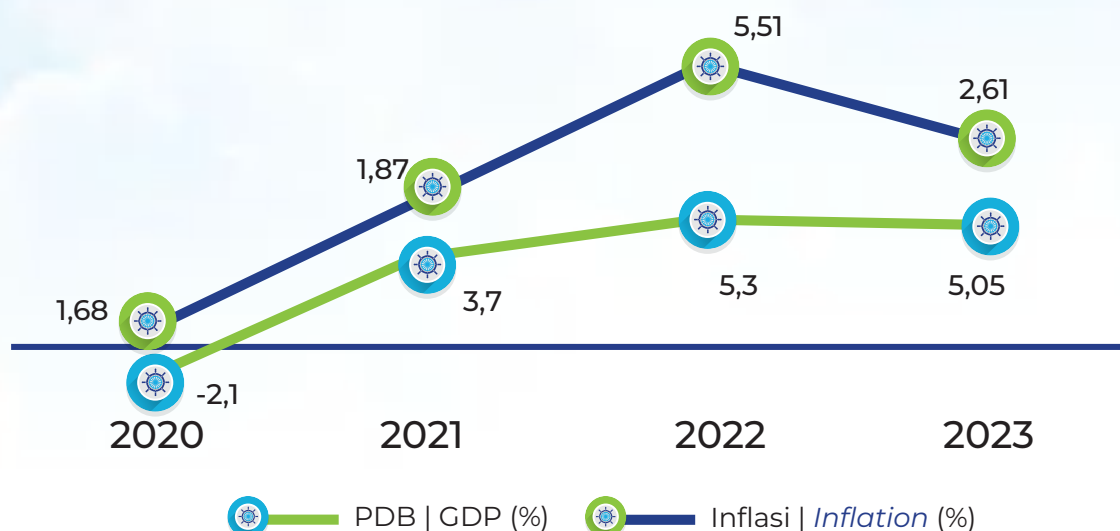
TINJAUAN PEREKONOMIAN NASIONAL

Di tengah dinamika dan tekanan perekonomian global, Indonesia berhasil mencatatkan Produk Domestik Bruto (PDB) sebesar Rp20.892,4 triliun dengan PDB per kapita mencapai Rp74.964.701 atau sebesar US\$4.919,7. Sepanjang tahun 2023, pertumbuhan ekonomi Indonesia mengalami pertumbuhan sebesar 5,05%, lebih rendah dibandingkan pencapaian tahun 2022 yang mencapai 5,31%. Pertumbuhan ekonomi di tahun 2023 yang menurun dari tahun 2022 salah satunya diakibatkan oleh tingkat suku bunga BI yang cukup tinggi, sebagai respon atas tingkat inflasi dan suku bunga tinggi dari berbagai negara di dunia, penurunan harga komoditas utama, dan dampak dari berbagai tekanan ekonomi maupun geopolitik global yang terjadi di berbagai belahan dunia.

NATIONAL ECONOMIC OVERVIEW

In the midst of global economic dynamics and pressure, Indonesia recorded a Gross Domestic Product (GDP) of Rp20,892.4 trillion with GDP per capita of Rp74,964,701 or US\$4,919.7. Throughout 2023, Indonesia's economic growth was recorded at 5.05%, slightly lower than the 2022 achievement at 5.31%. Economic growth in 2023, which had decreased from 2022. This decrease was partly attributed to the higher BI interest rate, in response to inflation and high interest rates from various countries in the world, the decline in main commodity prices, and the impact of various global economic and geopolitical pressures that were occurring globally.

Tren Pertumbuhan Ekonomi dan Inflasi Indonesia *Trends in Indonesian Economic Growth and Inflation*



Berdasarkan data yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik (BPS), pertumbuhan ekonomi dari sisi produksi terjadi di seluruh lapangan usaha. Pertumbuhan tertinggi terjadi pada lapangan usaha Transportasi dan Pergudangan yang mencapai 13,96% disusul oleh Pertambangan dan Penggalian sebesar 6,12%. Sementara dari sisi pengeluaran, pertumbuhan tertinggi dicapai oleh Pengeluaran Konsumsi Lembaga Nonprofit Rumah Tangga (PK-LNPRT) sebesar 9,83% dan Konsumsi Rumah Tangga sebesar 4,82%.

Sementara itu berdasarkan data dari BPS, pada Desember tahun 2023 terjadi kenaikan Indeks Harga Konsumen (IHK) dari 116,08 di bulan November menjadi 116,56 di bulan Desember. Inflasi tahunan pada tahun 2023 terkendali di angka 2,61% yang merupakan realisasi inflasi terendah sejak tahun 2000. Pencapaian inflasi 2023 yang lebih rendah dibanding 2022 ini menggambarkan kebijakan fiskal yang berhasil meredam dampak inflasi global terhadap perekonomian Indonesia.

Based on data released by the Indonesian Central Statistics Agency (BPS), economic growth from production came about in all business areas. The highest growth was contributed by the Transportation and Storage sector at 13.96%, followed by Mining and Quarrying at 6.12%. Meanwhile, by expenditure, the highest growth was achieved by the Non Profit Institution Consumption Spending serving Household Expenditures at 9.83% and Household Final Consumption Spendings at 4.82%.

Meanwhile, based on data from the Statistics Indonesia, in December 2023, the Consumer Price Index (CPI) increased from 116.08 in November to 116.56 in December. Annual inflation in 2023 was controlled at 2.61%, which was the lowest realized inflation since 2000. The achievement of inflation in 2023, which was lower than in 2022, illustrated that fiscal policy had succeeded in reducing the impact of global inflation on the Indonesian economy.

INDUSTRI PELABUHAN DAN PENYEBERANGAN INDONESIA

Indonesia memiliki kondisi geografis yang khas dengan terdiri dari serangkaian kepulauan mencapai lebih dari 17.000 pulau. Kondisi geografis tersebut menciptakan tantangan tersendiri dalam hal konektivitas antar satu pulau dengan pulau lainnya. Dengan kondisi tersebut, Indonesia membutuhkan sistem transportasi yang handal terutama transportasi laut jarak pendek maupun jarak jauh yang menjadi moda transportasi utama untuk mendukung pergerakan penduduk dan distribusi barang antar pulau.

Di samping itu, peranan strategis dari pelabuhan dalam mendukung aktivitas ekonomi merupakan suatu hal yang tak terbantahkan. Dalam konteks distribusi barang dan pergerakan penduduk, peran pelabuhan menjadi tidak hanya penting, melainkan juga vital. Hal ini terutama terlihat dalam kemampuan pelabuhan-pelabuhan di Indonesia dalam menjadi titik sentral dalam menghubungkan daerah-daerah terpencil, terluar, dan terdepan yang tersebar di berbagai penjuru negeri. Keberadaan pelabuhan sebagai pusat konektivitas tidak hanya memberikan aksesibilitas yang lebih baik untuk mobilitas barang dan orang, tetapi juga menjadi fondasi yang mendukung pertumbuhan ekonomi, terutama dalam hal memperlancar arus distribusi barang dan jasa di seluruh wilayah Indonesia.

Seiring dengan perekonomian nasional yang semakin kondusif, laju pergerakan penduduk dan distribusi barang kian mengalami peningkatan. Hal tersebut dapat dicerminkan dari pertumbuhan jumlah penumpang pada berbagai moda transportasi seperti darat, udara, dan khususnya transportasi laut. Berdasarkan data yang dirilis Badan Pusat Statistik, jumlah penumpang pada tahun 2023 di 5 pelabuhan utama mencapai 1,83 juta keberangkatan, meningkat 21,72% dibandingkan tahun 2022, dan 1,87 juta kedatangan, meningkat 25,32% dibandingkan tahun 2023.

INDONESIAN PORT AND FERRY INDUSTRY

Indonesia's unique geographical character, consisting of an archipelago of more than 17,000 islands, presents distinct challenges in connecting one island to another. Given these conditions, there is a critical need for a reliable transportation system. Specifically, both short and long-distance sea transportation are essential as they serve as the primary modes of transport supporting the movement of people and the distribution of goods between islands.

Apart from that, ports have undeniably strategic role in supporting economic activities. In the context of goods distribution and people's movement, the role of ports becomes even more than important, essentially making it vital. This is especially illustrated by the way in which ports in Indonesia have become central points in connecting remote, outermost, and border areas across the country. The existence of ports as connectivity centers serves to provide better accessibility for the mobility of goods and people, and to function as a foundation that supports economic growth, especially in providing uninterrupted distribution flow of goods and services throughout all of Indonesia's territories.

As the national economy grows better, the frequency of people's movement and goods distribution will continue to increase. This is reflected in the growing number of passengers in various transportation modes, be it land, air, and especially sea transportation. Based on data released by the Statistics Indonesia, the number of passengers in 2023 at the 5 main ports was 1.83 million departures, an increase of 21.72% compared to 2022, and 1.87 million arrivals, an increase of 25.32% compared to 2023.

Total Penumpang Pelayaran Dalam Negeri di Pelabuhan Laut Utama Tahun 2023 *Total Domestic Ferry Passengers at Main Ports in 2023*

Pelabuhan Utama Main Ports	2022			2023			Pertumbuhan Growth		
	Keberangkatan Departure	Kedatangan Arrival	Total	Keberangkatan Departure	Kedatangan Arrival	Total	Keberangkatan Departure	Kedatangan Arrival	Total
Belawan	92.775	86.029	178.804	129.043	117.329	246.372	39,09%	36,38%	37,79%
Tanjung Priok	184.558	180.044	364.602	216.953	216.478	433.431	17,55%	20,24%	18,88%
Tanjung Perak	605.222	585.882	1.191.104	731.767	732.548	1.464.315	20,91%	25,03%	22,94%
Balikpapan	262.476	299.095	561.571	294.582	349.656	644.238	12,23%	16,90%	14,72%
Makassar	361.272	340.590	701.862	461.183	453.375	914.558	27,66%	33,11%	30,30%
Total	1.506.303	1.491.640	2.997.943	1.833.528	1.869.386	3.702.914	21,72%	25,32%	23,52%

Di samping itu, dukungan dari berbagai pihak termasuk Pemerintah dan asosiasi menjadi sangat penting dalam perkembangan bisnis pelabuhan dan penyeberangan. Sepanjang tahun 2023, dukungan nyata dari Pemerintah melalui Kementerian Perhubungan di antaranya melalui pembangunan infrastruktur penyeberangan di beberapa destinasi wisata prioritas yang bertujuan untuk mendukung visi Pemerintah dalam mendorong pertumbuhan pariwisata Indonesia. Selain itu, Pemerintah turut memperkuat sinergi dengan pelaku usaha penyeberangan dan pelabuhan melalui asosiasi dengan mendukung peningkatan tarif penyeberangan sebagai respon atas kenaikan harga minyak dunia dan sebagai upaya untuk meningkatkan pelayanan kepada penumpang.

PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) sebagai BUMN di bisnis pelabuhan dan penyeberangan terbesar di Indonesia memiliki peranan penting untuk mendukung konektivitas antar pulau di Indonesia. Melihat bahwa potensi di sektor bisnis pelabuhan dan penyeberangan yang sangat besar dan didukung penuh oleh berbagai pihak, Perusahaan meyakini bahwa sektor bisnis pelabuhan dan penyeberangan akan terus tumbuh di masa depan seiring pertumbuhan ekonomi daerah dan nasional yang juga diproyeksikan akan meningkat.

In addition, support from various parties including the Government and associations has become very important in the development of the port and ferry business. Throughout 2023, concrete support from the government through the Ministry of Transportation, such as the construction of ferrying infrastructure in several priority tourist destinations, in order to support the Government's vision of promoting the growth of Indonesian tourism. In addition, the Government also strengthened synergies with associations related to ferry and port businesses by agreeing with ferry fares increase in response to rising global oil prices and in efforts to improve services to passengers.

PT ASDP Indonesia Ferry (Persero), a state-owned enterprise, operates the largest port and ferry business in Indonesia and plays a crucial role in supporting inter-island connectivity. Anticipating significant potential in the port and ferry business sector, and with robust support from various stakeholders, the Company is confident that this sector will continue to grow in the future. This growth is expected to occur in tandem with regional and national economic expansion, which is also projected to rise.

PERAN ASDP DALAM INDUSTRI PENYEBERANGAN NASIONAL

Sebagai pelaku utama di sektor bisnis pelabuhan dan penyeberangan, Perusahaan melaksanakan peran sentralnya untuk membangun konektivitas antar pulau di Indonesia melalui peran aktif dalam memperluas jaringan lintasan, meningkatkan kualitas layanan kepada penumpang, dan melakukan inovasi pada berbagai aspek. Hingga Desember 2023, Perusahaan telah beroperasi di 299 lintasan yang terdiri dari 92 lintasan komersial, 4 lintasan kapal ternak, dan 203 lintasan perintis dengan didukung oleh 172 kapal dan 27 kantor cabang di seluruh wilayah Indonesia. Melalui sumber daya yang dimiliki, sepanjang tahun 2023, Perusahaan telah melayani lebih dari 5,6 juta penumpang, 2,6 juta kendaraan roda dua, 3,1 juta kendaraan roda empat, dan telah mengangkut 998 ribu ton barang di seluruh area kerja Perusahaan.

Perusahaan juga berupaya memberikan pelayanan terbaik dan memberikan kemudahan kepada penumpang salah satunya melalui digitalisasi sistem pembelian tiket melalui aplikasi Ferizy yang telah diluncurkan sejak tahun 2020. Hingga saat ini, Perusahaan terus mengembangkan fitur-fitur Ferizy dan memperluas cakupan penggunaannya sehingga saat ini telah digunakan oleh lebih dari 1,97 juta pengguna.

ASDP'S ROLE IN THE NATIONAL FERRY INDUSTRY

As the main player in the port and ferry business sector, the Company carries out its central role in building inter-island connectivity in Indonesia by taking an active role in expanding the routes, improving the service quality to passengers, and carrying out innovations in various aspects. As of December 2023, the Company has operated on 299 routes that consisted of 92 commercial routes, 4 livestock ship routes, and 203 pioneer routes supported by 172 vessels and 27 branch offices across Indonesia. With these resources, in 2023, the Company had served more than 5.6 million passengers, 2.6 million two-wheeled vehicles, 3.1 million four-wheeled vehicles, and had transported 998 thousand tons of commodity throughout the Company's working areas.

The Company also strives to provide the best service and convenience to passengers, one of which was by digitalizing the ticket purchasing system through the Ferizy application, which was launched in 2020. To date, the Company continues to develop Ferizy's features and expands its scope of usage, such that it has been used by more than 1.97 million users.



ASPEK PEMASARAN DAN PANGSA PASAR

MARKETING ASPECTS AND MARKET SHARE

PANGSA PASAR

Penerapan strategi dan program pemasaran diharapkan akan menjadi pilar utama dalam mendukung peningkatan kinerja operasional, dengan peningkatan jumlah pelanggan baru serta mempertahankan loyalitas pelanggan yang sudah ada. Melalui implementasi strategi pemasaran yang cermat dan terencana, Perusahaan meyakini bahwa dapat memperluas pangsa pasar mereka. Sebagai gambaran, dalam kurun waktu tiga tahun terakhir, pangsa pasar perusahaan terus mengalami pertumbuhan yang signifikan. Pada tahun 2023, pangsa pasar Perusahaan berhasil mencapai angka 33,55%, meningkat jika dibandingkan pangsa pasar tahun 2022 yang mencapai 32,50%.

Peningkatan pangsa pasar ini dapat dicapai dengan serangkaian inisiatif yang dijalankan seperti pengembangan rute potensial, relokasi kapal di rute-rute yang kurang optimal serta peningkatan pelayanan kepada penumpang. Perusahaan memiliki optimisme mengenai pangsa pasar Perusahaan yang akan terus mengalami pertumbuhan sejalan dengan implementasi program dan inisiatif strategis yang telah diadopsi. Perusahaan memproyeksikan di tahun 2024 pangsa pasar akan meningkat hingga mencapai 34,82%.

STRATEGI PEMASARAN

Perusahaan menetapkan rencana pemasaran yang secara rutin terus dievaluasi dan disempurnakan mengikuti dinamika pasar yang terjadi, sehingga mampu mendorong peningkatan pangsa pasar secara optimal. Pada tahun 2023, Perusahaan melaksanakan inisiatif dan strategi pemasaran yang meliputi:

1. Melaksanakan komunikasi pemasaran dan memberikan promosi menarik bagi penumpang melalui berbagai saluran termasuk media konvensional,

MARKET SHARE

The implementation of marketing strategies and programs is expected to be vital in supporting increased operational performance, by growing the number of new customers and maintaining the loyalty of existing ones. Through the implementation of carefully planned marketing strategies, the Company is confident in expanding the market share. To illustrate this, in the last three years, the Company's market share has continued to experience significant growth. In 2023, the Company's market share managed to reach 33.55%, an increase compared to the 2022 market share at 32.50%.

The increase in market share was achieved by carrying out a series of strategic initiatives such as developing potential routes, relocating ships on less optimal routes and improving services to passengers. The Company is optimistic the market share will continue to grow in line with the implementation of adopted strategic programs and initiatives. The Company has projected that the market share would increase to 34.82% in 2024.

MARKETING STRATEGY

The Company established a marketing plan with regular evaluation and improvement by following existing market dynamics, promising an optimal increase in market share. In 2023, the Company implemented marketing initiatives and strategies which include:

1. Carried out marketing communications and issued attractive deals for passengers through various channels including conventional media, social, and digital

- media sosial, dan digital serta aktivitas komunikasi pemasaran secara langsung.
2. Mengakselerasi penjualan tiket secara *online* melalui Ferizy dan membangun kerja sama dengan *merchant* maupun *Online Travel Agent* (OTA) untuk penjualan tiket *online*.
 3. Melakukan perluasan pasar melalui pembukaan lintasan-lintasan baru, relokasi rute, dan relokasi kapal dari lintasan yang kurang optimal ke lintasan potensial.
 4. Melakukan penyesuaian tarif dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan modernisasi fasilitas di pelabuhan, termasuk dermaga, area parkir, dan fasilitas penjualan tiket serta akomodasi penumpang.
 5. Meningkatkan layanan kepada pengguna jasa untuk menjaga hubungan baik dan memecahkan permasalahan pengguna jasa melalui *contact center* yang sigap selama 24 jam dan menempatkan *customer service* di pelabuhan yang secara langsung dapat berkomunikasi dengan pelanggan.
 6. Pengelolaan media sosial untuk mengomunikasikan produk dan layanannya serta meningkatkan interaksi dengan pengguna jasa melalui manajemen konten dan tanggapan terhadap saran dan keluhan pelanggan.

media as well as direct marketing communications activities.

2. Accelerated online ticket sales through Ferizy and established collaborations with merchants, and Online Travel Agents (OTA) for online ticket sales.
3. Expanded the market through new routes, routes relocation, and vessels relocation from less than optimal routes to potential routes.
4. Adjusted fares with the objective to improve service quality and modernize port facilities, which covers docks, parking areas, ticket sales facilities, and passenger accommodation.
5. Improved services for consumer in order to maintain customer relations and problem solving by setting up a 24-hour contact center and providing customer service at the port for direct communication with customers.
6. Managed social media to communicate products and services and increased interaction with consumers through content management as well as responding to customer inputs and complaints.

TINJAUAN KINERJA OPERASI PER SEGMENT USAHA

OPERATIONAL PERFORMANCE OVERVIEW PER BUSINESS SEGMENT

Perusahaan menjalankan kegiatan operasi yang terdiri dari 3 (tiga) segmen usaha sebagai berikut:

Penyeberangan

Jasa transportasi penyeberangan *short-distance ferry* dan *long-distance ferry*.

Pelabuhan

Jasa pelabuhan mencakup layanan kepelabuhanan untuk kapal *ferry*.

Usaha Aneka Jasa

Jasa penunjang dan kerja sama usaha terkait pelabuhan dan penyeberangan.

The Company carried out operational activities that consists of 3 (three) business segments, as follows:

Ferry Transportation

Short-distance ferry and long-distance ferry transportation services.

Port

Port services including port services for ferries.

Miscellaneous Services

Supporting services and joint operations related to ports and ferrying.

SEGMENT PENYEBERANGAN

Hingga akhir tahun 2023, segmen bisnis penyeberangan didukung oleh 172 unit kapal yang terdiri dari 75 kapal komersial, 79 kapal perintis, 2 kapal kendala teknis yakni KMP Portlink VII dan KMP Jatra I, 1 kapal diusulkan *scrap* yaitu KMP Sri Gemilang, 4 kapal KSO yaitu KMP BRR kerja sama dengan Pemda Provinsi Aceh dan KMP Aceh Hebat 1-3, 1 kapal ternak KMP Cemara Nusantara 5, dan 10 kapal/bus air. Di samping itu, secara grup Perusahaan juga memiliki 53 kapal milik anak perusahaan yaitu Jembatan Nusantara. Jumlah kapal tersebut tidak mengalami perubahan dibandingkan dengan tahun lalu. Berdasarkan rencana pada RKAP tahun 2023 jumlah kapal ditargetkan mencapai 228 kapal sehingga capaian jumlah kapal berdasarkan RKAP mencapai 99%.

Segmen bisnis penyeberangan melayani 2 tipe lintasan yaitu lintasan komersial dan lintasan perintis. Pada tahun 2023, Perusahaan beroperasi di 299 lintasan yang terdiri dari 96 lintasan komersial, 4 lintasan kapal ternak dan 203 lintasan perintis. Jumlah lintasan pada tahun 2023 menurun

FERRY SEGMENTS

As of end of 2023, the ferry business segment was supported by 172 vessels consisted of 75 commercial vessels, 79 pioneer vessels, 2 vessels with technical issues, namely KMP Portlink VII and KMP Jatra I, 1 vessel proposed for scrap namely KMP Sri Gemilang, 4 KSO vessels namely KMP BRR in collaboration with the Aceh Provincial Government and KMP Aceh Hebat 1-3, 1 ship for livestock namely KMP Cemara Nusantara 5, and 10 ships/water buses. In addition, the Company as a group owns 53 vessels that belongs to its subsidiary, Jembatan Nusantara. The quantity of ships was consistent with the previous year. Based on the 2023 Work Plan & Budget, the ship quantity was targeted at 228 ships, hence the achieved quantity of ships according to the Work Plan & Budget was 99%.

The ferry business segment served 2 types of routes, namely commercial routes and pioneer routes. In 2023, the Company operated on 299 routes consisted of 96 commercial routes, 4 livestock routes and 203 pioneer routes. The number of routes in 2023 decreased

dibandingkan jumlah lintasan tahun 2022 yang mencapai 311 lintasan seiring dengan upaya Perusahaan untuk mengurangi lintasan-lintasan yang kurang optimal dan memperkuat lintasan-lintasan yang potensial sehingga dapat meningkatkan kinerja segmen bisnis penyeberangan.

Sepanjang tahun 2023, beberapa indikator produksi mencatatkan kinerja yang bervariasi. Jumlah trip kapal meningkat sebesar 2%, jumlah penumpang mengalami penurunan sebesar -15%, jumlah kendaraan roda 2 dan 3 meningkat sebesar 2% dan kendaraan roda 4 atau lebih meningkat sebesar 2%. Sementara dari sisi produksi angkutan barang mengalami penurunan yang tidak signifikan yaitu menurun sebesar 1%. Beberapa faktor yang berpengaruh terhadap produksi tahun 2023 antara lain berakhirnya beberapa kontrak lintasan perintis, adanya *emergency docking* di 3 kapal serta adanya pembatasan jam operasional, serta peralihan keberangkatan untuk kendaraan roda 2 pada periode Angkutan Lebaran di lintasan Merak-Bakauheni.

compared to 2022 at 311 routes, in line with the Company's efforts to reduce less optimal routes and strengthened potential routes to improve the performance of the ferry business segment.

Throughout 2023, several output indicators recorded varied performance. The sum total of ship trips increased by 2%, passengers decreased by -15%, two and three-wheeled vehicles increased by 2%, and four or more wheeled vehicles increased by 2%. Meanwhile, commodity transportation experienced slight decline by 1%. Several factors that influenced 2023 output included the contract completions of several pioneer routes, emergency docking on 3 ships and restrictions on operational hours as well as departure shifts for two-wheeled vehicles during the Angkutan Lebaran (Eid al-Fitr Transport) on the Merak-Bakauheni route.

Tabel Kinerja Segmen Bisnis Penyeberangan Gabungan (Komersial dan Perintis) Tahun 2022-2023
Table for Performance of Combined Transportation Business Segment (Commercial and Pioneer) in 2022-2023

Uraian Description	Unit	2022	2023	Pertumbuhan Growth	
				Nominal Nominal	Persentase Percentage
Jumlah Trip Total Trips		318.797	323.668	4.871	2%
Penumpang Passenger	Orang Person	7.622.313	6.505.663	(1.116.650)	(15%)
Kendaraan Roda 2 dan 3 2-Wheeled - and 3-Wheeled Vehicles	Unit Unit	4.079.129	4.177.538	98.409	2%
Kendaraan Roda >4 >4-Wheeled Vehicles	Unit Unit	4.401.092	4.483.918	82.826	2%
Barang Goods	Ton	2.012.909	997.211	(1.015.698)	(50,46%)

Lintasan Komersial

Sepanjang tahun 2023, kinerja lintasan komersial secara umum mengalami peningkatan dari sisi muatan kendaraan, namun muatan penumpang dan barang mengalami penurunan. Jumlah trip penyeberangan komersial mengalami kenaikan sebesar 3% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya dari 218.941 trip menjadi 225.572 trip. Peningkatan kinerja juga diikuti oleh produksi kendaraan roda 2 dan 3 serta kendaraan roda 4 atau lebih, masing-masing naik sebesar 5% dan 4% menjadi 3.738.754, dan 4.279.953 unit. Sedangkan produksi penumpang dan barang mengalami penurunan masing-masing sebesar 14% dan 41%, dengan produksi penumpang menjadi 5.245.341 orang dan muatan barang sebesar 946.970 ton. Penurunan kinerja di lintasan komersial terutama dipengaruhi oleh faktor *emergency docking* pada 3 kapal, adanya pembangunan jembatan di lintasan Tanjung Harapan-Teluk Kalong di Cabang Pontianak dan jumlah kapal pesaing yang bertambah di beberapa lintasan sehingga menyebabkan terbaginya *market share* sesuai dengan pengaturan jadwal yang dilakukan oleh otoritas.

Commercial Line

Throughout 2023, the performance of commercial routes generally increased in vehicle loads, but declined in passenger and goods loads. Commercial ferry trips increased by 3% compared to the same period in the previous year, from 218,941 trips to 225,572 trips. The improved performance was followed by transportation of two and three-wheeled vehicles as well as four-wheeled or more vehicles, which rose by 5%, and 4% respectively to 3,738,754 units and 4,279,953 units. Meanwhile, passenger and goods cargo decreased by 14% and 41% respectively, with passenger totaled at 5,245,341 people and goods cargo at 946,970 tons. The decline in commercial routes performance was mainly influenced by the emergency docking of 3 ships, the bridge construction on the Tanjung Harapan-Teluk Kalong route in the Pontianak Branch and the increased competition on several routes, resulted in a divided market share in accordance with the schedule arrangements carried out by the authorities.

Tabel Kinerja Segmen Bisnis Penyeberangan Lintasan Komersial Tahun 2022-2023

Table for Performance of Commercial Ferry Line Business Segment in 2022-2023

Uraian Description	Unit	2022	2023	Pertumbuhan Growth	
				Nominal Nominal	Persentase Percentage
Jumlah Trip Total Trips	Trip	218.941	225.572	6.631	3%
Penumpang Passenger	Orang Person	6.079.355	5.245.341	(834.014)	(14%)
Kendaraan Roda 2 dan 3 2-Wheeled and 3-Wheeled Vehicles	Unit	3.575.971	3.738.754	162.783	5%
Kendaraan Roda >4 >4-Wheeled Vehicles	Unit	4.131.532	4.279.953	148.421	4%
Barang Goods	Ton	1.597.164	946.970	(650.194)	(41%)

Lintasan Perintis

Sepanjang tahun 2023, kinerja lintasan perintis secara umum mengalami penurunan kinerja dibandingkan kinerja tahun 2022 yang disebabkan oleh berakhirnya kontrak subsidi di 12 lintasan perintis. Jumlah trip lebih rendah 2% dibandingkan tahun 2022 menjadi 98.096 trip, jumlah penumpang menurun sebesar -18% menjadi 1.260.322, jumlah muatan kendaraan roda 2 dan 3 mencapai menurun -13% menjadi 438.784 unit, kendaraan roda 4 atau lebih menurun -13% menjadi 203.965, dan muatan barang menurun sebesar -88% menjadi 50.241 ton.

Pioneer Line

Throughout 2023, the performance of pioneer line generally experienced a decline compared to 2022 performance due to the expired subsidy contracts on 12 pioneer routes. The number of trips was 98,096 trips, which was 2% lower compared to 2022, the total passengers decreased by -18% to 1,260,322, the amount of two and three-wheeled vehicle loads decreased -13% to 438,784 units, four-wheeled or more vehicles decreased -13% to 203,96, and goods cargo decreased by -88% to 50,241 tons.

Tabel Kinerja Segmen Bisnis Penyeberangan Lintasan Perintis Tahun 2022-2023
Table for Performance of Pioneer Ferry Line Business Segment in 2022-2023

Uraian Description	Unit	2022	2023	Pertumbuhan Growth	
				Nominal Nominal	Persentase Percentage
Jumlah Trip Total Trips		99.856	98.096	(1.760)	-2%
Penumpang Passenger	Orang Person	1.542.958	1.260.322	(282.636)	-18%
Kendaraan Roda 2 dan 3 2-Wheeled and 3-Wheeled Vehicles	Unit	503.158	438.784	(64.374)	-13%
Kendaraan Roda >4 >4-Wheeled Vehicles	Unit	269.560	203.965	(65.595)	-24%
Barang Goods	Ton	415.745	50.241	(365.504)	-88%

SEGMENT PELABUHAN

Sepanjang tahun 2023, Perusahaan terus mendorong upaya penguatan kinerja segmen bisnis pelabuhan melalui pengembangan infrastruktur pelabuhan. Hal tersebut dilakukan sebagai upaya Perusahaan untuk mendukung peningkatan konektivitas penyeberangan serta sebagai upaya untuk meningkatkan kinerja Perusahaan di segmen bisnis pelabuhan.

Pada tahun 2023, Perusahaan mengelola 37 pelabuhan melalui 27 kantor cabang di seluruh Indonesia dengan 87 dermaga yang terdiri dari 61 dermaga *moveable bridge*, 23 dermaga *plengsengan*, dan 3 dermaga *ponton*. Jumlah infrastruktur pelabuhan tersebut meningkat jika dibandingkan dengan tahun 2022 yang terdiri dari 36 pelabuhan dan 86 dermaga.

PORT SEGMENT

Throughout 2023, the Company continued to support efforts to strengthen the performance of the port business segment by developing port infrastructures. The Company carried it out in the efforts to increase connectivity through ferry transportation as well as to improve the Company's performance in the port business segment.

In 2023, the Company managed 37 ports through 27 branch offices throughout Indonesia, with 87 piers consisting of 61 moveable bridge docks, 23 levee docks, and 3 floating docks. The number of port infrastructure has increased compared to 2022 at 36 ports and 86 piers.

Tabel Jumlah Infrastruktur Pelabuhan Tahun 2022-2023

Table of Port Infrastructure Quantity in 2022-2023

Uraian Description	2022	2023	Pertumbuhan Growth	
			Nominal Nominal	Persentase Percentage
Pelabuhan Harbour	36	37	1	3%
Dermaga <i>Moveable Bridge</i> Moveable Bridge Dock	59	61	2	3%
Dermaga Plongsengan Levee Dock	23	23	0	0%
Dermaga Ponton Floating Dock	4	3	(1)	(25%)

Kinerja segmen bisnis pelabuhan tidak hanya diukur melalui peningkatan jumlah infrastruktur pelabuhan, melainkan dapat diukur melalui berbagai parameter yang menunjukkan produktivitas dari segmen bisnis pelabuhan. Sepanjang tahun 2023, kinerja segmen bisnis pelabuhan mengalami pertumbuhan ditunjukkan dengan produksi jasa sandar sebesar 997.786.012 GRT-Call yang meningkat sebesar 5% dibandingkan tahun 2022, produksi pas pelabuhan meningkat secara impresif sebesar 14% menjadi 5.166.438 orang, pas pelabuhan kendaraan tumbuh sebesar 6% menjadi 13.140.673, pas pelabuhan jasa parkir mengalami penurunan sebesar 15% menjadi 210.868 dan jasa pemeliharaan meningkat sebesar 6% menjadi 13.140.673.

Di samping peningkatan kinerja yang cukup impresif, terdapat beberapa faktor yang menjadi tantangan dan hambatan bagi Perusahaan seperti adanya pelabuhan yang mengalami kerusakan maupun dalam proses rehabilitasi akibat cuaca dan tubrukan dari kapal serta dampak cuaca perairan pada pelabuhan yang tidak dapat dihindari dapat menyebabkan potensi *loss opportunity* bagi segmen bisnis pelabuhan.

The performance of the port business segment is measured by increased number of port infrastructure, and through various parameters that indicate the segment's productivity. Throughout 2023, the performance of the port business segment experienced growth as indicated by the increased docking services that amounting to 997,786,012 GRT-Call, a 5% increase compared to 2022, passenger pass increased significantly by 14% to 5,166,438 people, vehicle pass grew by 6% to 13,140,673, port parking services decreased by 15% to 210,868 and maintenance services increased by 6% to 13,140,673.

Despite the impressive increase in performance, there were several factors that became challenges and obstacles for the Company, such as the damaged ports or ports under rehabilitation process due to weather and ship collisions as well as the unavoidable impact of marine weather on ports that brought potential loss opportunities for port business segment.

Tabel Kinerja Segmen Bisnis Pelabuhan Tahun 2022-2023
Table for Performance of Port Business Segment in 2022-2023

Uraian Description	Unit	2022	2023	Pertumbuhan Growth	
				Nominal Nominal	Persentase Percentage
Jasa Sandar Docking Services	GRT-Call	949.820.444	997.786.012	47.965.568	5%
Pas Pelabuhan Penumpang Passenger Pass	Orang Person	4.541.042	5.166.438	625.396	14%
Pas Pelabuhan Kendaraan Vehicle Pass	Unit	12.343.696	13.140.673	796.977	6%
Pas Pelabuhan Jasa Parkir Port Parking Services Pass	Unit	247.154	210.868	(36.286)	(15%)
Jasa Pemeliharaan Dermaga Dock Maintenance Services	Unit	12.342.656	13.140.673	798.017	6%

SEGMENT USAHA ANEKA JASA

Segmen bisnis usaha aneka jasa menjalankan beberapa kegiatan usaha di antaranya penjualan BBM, pengelolaan terminal eksekutif, penyewaan tenant komersial dan penyewaan space iklan komersial. Sepanjang tahun 2023, kinerja segmen usaha aneka jasa didominasi oleh penjualan BBM yang merupakan sumber pendapatan utama di segmen bisnis ini.

Penjualan Bahan Bakar Minyak (BBM)

Penjualan BBM dilakukan di 2 cabang utama melalui SPPBK cabang Merak dan SPPBK cabang Ketapang dengan penjualan dilakukan kepada internal maupun eksternal. Sepanjang tahun 2023, produksi penjualan BBM lebih rendah 5% dibandingkan tahun 2022 menjadi sebesar 96.108.127 liter dengan penurunan terjadi di segmen konsumen internal maupun eksternal.

MISCELLANEOUS SERVICES BUSINESS SEGMENT

The miscellaneous services business segment manages several business activities including fuel sales, management of executive terminal, rental of commercial tenant and space rental for commercial advertising. Throughout 2023, the performance of the miscellaneous services business segment was dominated by fuel sales, the main source of income in this business segment.

Fuel Sales

Fuel sales were carried out at 2 main branches, the Merak branch of Fuel Filling Station (SPBBK) and the Ketapang branch of Fuel Filling Station, to internal and external clients. Throughout 2023, fuel sales production was 96,108,127 liters, 5% lower compared to 2022, with decline occurred in internal and external consumer segments.

Produksi Penjualan Bahan Bakar Minyak (BBM) Tahun 2022-2023 (Liter) *Fuel Sales Production in 2022-2023 (Litre)*

Segmen Konsumen <i>Consumer Segment</i>	2022	2023	Pertumbuhan <i>Growth</i>	
			Nominal <i>Nominal</i>	Persentase <i>Percentage</i>
Internal (ASDP)	23.409.300	21.874.576	(1.534.724)	(7%)
Eksternal (Swasta) <i>External (Private)</i>	78.271.101	74.233.551	(4.037.550)	(5%)
Total	101.680.401	96.108.127	(5.572.274)	(5%)

Pengelolaan Terminal Eksekutif

Pada tahun 2023, produksi jasa penyeberangan terminal eksekutif di Pelabuhan Merak dan Bakauheni secara umum mengalami pertumbuhan yang signifikan yaitu mencapai 28,24%. Produksi didorong oleh meningkatnya jumlah pejalan kaki sebesar 64,88% menjadi 442.236 orang. Sementara dari sisi kendaraan mengalami peningkatan yang cukup variatif pada masing-masing golongan, kecuali kendaraan Golongan I yang menurun sebesar 12,62%.

Executive Terminal Management

In 2023, the output from executive ferry terminal services at Merak and Bakauheni Ports generally experienced significant growth by 28.24% increase. The increased output was mainly driven by increased pedestrian by 64.88% to 442,236 people. Meanwhile, for vehicles, there were varied increases in each vehicle group, except for Class I vehicles, which decreased by 12.62%.

Produksi Jasa Penyeberangan Terminal Eksekutif Gabungan Merak dan Bakauheni *Ferry Transportation Services Output of Merak and Bakauheni Joint Executive Terminals*

Uraian <i>Description</i>	2022	2023	Pertumbuhan <i>Growth</i>	
			Nominal <i>Nominal</i>	Persentase <i>Percentage</i>
Pejalan Kaki <i>Pedestrian</i>	268.225	442.236	174.011	64,88%
Kend. Gol I <i>Vehicles Class I</i>	301	263	-38	-12,62%
Kend. Gol II <i>Vehicles Class II</i>	73.306	94.851	21.545	29,39%
Kend Gol III <i>Vehicles Class III</i>	1.252	1.603	351	28,04%
Kend. Gol IVA <i>Vehicles Class IVA</i>	704.157	814.098	109.941	15,61%
Kend. Gol VA <i>Vehicles Class VA</i>	8.021	8.586	565	7,04%
Kend. Gol VIA <i>Vehicles Class VIA</i>	60.929	69.812	8.883	14,58%
Total	1.116.191	1.431.449	315.258	28,24%

Penyewaan *Tenant* Komersial

Sepanjang tahun 2023, penyewaan ruang/*tenant* komersial mengalami pertumbuhan dibandingkan dengan tahun 2022 seiring dengan kenaikan jumlah penumpang pejalan kaki maupun kendaraan. Hal tersebut dicerminkan dari peningkatan tingkat okupansi terutama di Anjungan Agung Mall yang meningkat dari 26,07% menjadi 27,27%, Plaza Marina Labuan Bajo meningkat dari 67,89% menjadi 77,27%. Sementara tingkat okupansi di Sosoro Mall mencapai 27,27% lebih rendah dibanding tahun 2022 yang mencapai 27,33%.

Commercial Tenant Leasing

Throughout 2023, commercial space/*tenant* rentals experienced growth compared to 2022 in line with the increased pedestrian and vehicle passengers. This was reflected in the increased occupancy levels, especially at Anjungan Agung Mall that increased from 26.07% to 27.27%, Plaza Marina Labuan Bajo increased from 67.89% to 77.27%. Meanwhile, the occupancy rate at Sosoro Mall was 27.27%, slightly than in 2022 at 27.33%.

Produksi Sewa Ruangan *Space Rental Production*

Uraian Description	2022	2023	Pertumbuhan Growth	
			Nominal Nominal	Persentase Percentage
Sosoro Mall				
NLA	9.206	9.219	13	0,14%
Luas Area Tersewa Rented Area	2.516	2.514	(2)	(0,08%)
Tingkat Okupansi Occupancy Rate	27,33%	27,27%	(0,06%)	(0,22%)
Anjungan Agung Mall				
NLA	6.997	7.009	12	0,17%
Luas Area Tersewa Rented Area	1.824	1.906	82	4,50%
Tingkat Okupansi Occupancy Rate	26,07%	27,19%	1,12%	4,30%
Plaza Marina Labuan Bajo				
NLA	2.293	2.263	(30)	(1,31%)
Luas Area Tersewa Rented Area	1.557	1.749	192	12,33%
Tingkat Okupansi Occupancy Rate	67,89%	77,27%	9,38%	13,82%

TINJAUAN KINERJA KEUANGAN

FINANCIAL PERFORMANCE OVERVIEW

Tinjauan kinerja keuangan dilakukan terhadap Laporan Keuangan Audited Tahun Buku 2023 yang berakhir pada 31 Desember 2023. Laporan Keuangan telah melalui proses audit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan dengan Akuntan Publik Eishennoraz yang diterbitkan pada 28 Februari 2024 dengan opini "Wajar dalam Semua Hal yang Material". Laporan keuangan beserta catatannya disajikan secara lengkap pada bagian terpisah dalam Laporan Tahunan ini.

The financial performance overview was carried out on the Audited Financial Report for the 2023 Financial Year, which ended on 31 December 2023. The Financial Report was audited by the Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan Public Accounting Firm with Public Accountants Eishennoraz published on 28 February 2024 with the opinion "Fair in All Material Aspects". The financial reports and its notes are presented in full in a separate section in this Annual Report.

LAPORAN POSISI KEUANGAN

Hingga 31 Desember 2023, posisi keuangan Perusahaan mengalami pertumbuhan meliputi aset yang meningkat sebesar 10,43% menjadi Rp11,06 triliun, liabilitas meningkat sebesar 5,07% menjadi Rp2,67 triliun dan ekuitas meningkat sebesar 12,26% menjadi Rp8,38 triliun.

FINANCIAL POSITION REPORT

As of 31 December 2023, the Company's financial position experienced growth including increased assets by 10.43% to Rp11.06 trillion, increased liabilities by 5.07% to Rp2.67 trillion, and increased equity by 12.26% to Rp8.38 trillion.

Tabel Posisi Keuangan Tahun 2022-2023 (Rp Juta)
Table of Financial Position for 2022-2023 (Rp Million)

Uraian Description	2022	2023	Pertumbuhan Growth	
			Nominal Nominal	Persentase Percentage
Jumlah Aset Total Assets	10.011.247	11.055.701	1.044.455	10,43%
Jumlah Liabilitas Total Liabilities	2.542.220	2.670.989	128.769	5,07%
Jumlah Ekuitas Total Equity	7.469.026	8.384.712	915.686	12,26%

Aset

Jumlah aset Perusahaan mencapai Rp11,06 triliun, meningkat sebesar 10,43% dibandingkan jumlah aset tahun 2022. Peningkatan jumlah aset terutama dipengaruhi oleh meningkatnya aset lancar sebesar 14,91% dari posisi tahun 2022.

Asset

The Company's total assets was Rp11.06 trillion, an increase of 10.43% compared to 2022 total assets. The increase in total assets was mainly attributed by current assets increase of 14.91% from the 2022.

Tabel Posisi Keuangan Tahun 2022-2023 (Rp Juta)
Table of Financial Position for 2022-2023 (Rp Million)

Uraian Description	2022	2023	Pertumbuhan Growth	
			Nominal Nominal	Persentase Percentage
Aset Lancar Current Assets	1.696.767	1.949.764	252.998	14,91%
Aset Tidak Lancar Non-Current Assets	8.314.480	9.105.937	791.457	9,52%
Jumlah Aset <i>Total Assets</i>	10.011.246	11.055.701	1.044.455	10,43%

Aset Lancar

Jumlah aset lancar Perusahaan mencapai Rp1,95 triliun, meningkat sebesar 14,91% dibandingkan dengan posisi tahun 2022. Peningkatan aset lancar terutama dipengaruhi oleh meningkatnya pendapatan yang masih harus diterima dan uang muka dan biaya dibayar di muka.

Current Assets

The Company's total current assets was Rp1.95 trillion, an increase of 14.91% compared to the 2022. The increase in current assets was mainly influenced by the increase in accrued income and advances as well as prepaid expenses.

Tabel Aset Lancar Tahun 2022-2023 (Rp Juta)
Table of Current Assets 2022-2023 (Rp Million)

Uraian Description	2022	2023	Pertumbuhan Growth	
			Nominal Nominal	Persentase Percentage
Kas dan Setara Kas Cash and Cash Equivalents	1.341.491	1.488.345	146.854	10,95%
Piutang Usaha Trade Receivables	31.837	36.675	4.838	15,20%
Aset Keuangan Lancar Lainnya Other Current Assets	54.531	55.307	775	1,42%
Pendapatan Yang Masih Harus Diterima Accrued Income	75.623	204.763	129.140	170,77%
Persediaan Inventories	80.951	94.709	13.758	17,00%
Pajak Dibayar Muka Prepaid Taxes	64.698	6.833	(57.865)	(89,44%)
Uang Muka dan Biaya dibayar di Muka Advances and Prepaid Expenses	47.636	63.132	15.496	32,53%
Jumlah Aset Lancar <i>Total Current Assets</i>	1.696.767	1.949.764	252.996	14,91%

Kas dan Setara Kas

Jumlah kas dan setara kas Perusahaan mencapai Rp1,49 triliun, meningkat sebesar 10,95% dibandingkan dengan posisi tahun 2022. Peningkatan kas dan setara kas dipengaruhi oleh meningkatnya kas dan kas pada bank yang masing-masing meningkat sebesar 14,96% dan 33,15%.

Cash and Cash Equivalents

The Company's total cash and cash equivalents was Rp1.49 trillion, a 10.95% increase compared to 2022. The growing cash and cash equivalents was attributed by the increase in cash and available funds in banks, which increased by 14.96% and 33.15% respectively.

Tabel Kas dan Setara Kas Tahun 2022-2023 (Rp Juta)
Table of Cash and Cash Equivalents 2022-2023 (Rp Million)

Uraian Description	2022	2023	Pertumbuhan Growth	
			Nominal Nominal	Persentase Percentage
Kas Cash	6.857	7.883	1.026	14,96%
Kas Pada Bank Cash in Bank	511.329	680.839	169.510	33,15%
Deposit Berjangka Time Deposit	823.305	799.622	(23.683)	(2,88%)
Jumlah Kas dan Setara Kas <i>Total Cash and Cash Equivalents</i>	1.341.491	1.488.345	146.854	10,95%

Piutang Usaha

Jumlah piutang usaha Perusahaan mencapai Rp36,68 miliar, meningkat sebesar 15,20% dibandingkan dengan posisi tahun 2022. Peningkatan piutang usaha dipengaruhi oleh meningkatnya piutang usaha dengan pihak ketiga.

Trade Receivables

The Company's trade receivables totaled Rp36.68 billion, up 15.20% compared to 2022. The increased trade receivables came from trade receivables with third parties.

Tabel Piutang Usaha Tahun 2022-2023 (Rp Juta)
Table of Trade Receivables 2022-2023 (Rp Million)

Uraian Description	2022	2023	Pertumbuhan Growth	
			Nominal Nominal	Persentase Percentage
Pihak Berelasi Related Parties	3.318	1.347	(1.971)	(59,40%)
Pihak Ketiga Third Parties	28.519	35.328	6.809	23,88%
Jumlah Piutang Usaha <i>Total Trade Receivables</i>	31.837	36.675	4.838	15,20%

Aset Keuangan Lancar Lainnya

Jumlah aset keuangan lancar lainnya mencapai Rp55,31 miliar, meningkat sebesar 1,42% dibandingkan dengan posisi tahun 2022. Peningkatan aset keuangan lancar lainnya dipengaruhi oleh meningkatnya pos lain-lain sebesar 65,45%.

Other Current Assets

Other current assets totaled at Rp55.31 billion, an increase of 1.42% compared to 2022. The increase in other current assets resulted from increase in others item of 65.45%

Tabel Aset Keuangan Lancar Lainnya Tahun 2022-2023 (Rp Juta)
Table of Other Current Assets 2022-2023 (Rp Million)

Uraian Description	2022	2023	Pertumbuhan Growth	
			Nominal Nominal	Persentase Percentage
Bank Garansi Bank Guarantee	24.912	20.691	(4.221)	(16,94%)
Dana yang Dibatasi Penggunaannya Restricted Fund	20.649	20.649	0	0%
Kas Kapal Loket Ticketing Ferry Cash	1.482	1.577	95	6,41%
Lain-lain Others	7.488	12.389	4.901	65,45%
Jumlah Aset Keuangan Lancar Lainnya Total Other Current Assets	54.531	55.306	775	1,42%

Pendapatan yang Masih Harus Diterima

Jumlah pendapatan yang masih harus diterima mencapai Rp204,76 miliar, meningkat sebesar 170,77% dibandingkan dengan posisi tahun 2022. Peningkatan pendapatan yang masih harus diterima dipengaruhi oleh meningkatnya pendapatan yang masih harus diterima dari pihak berelasi yang meningkat sebesar 400,51%.

Accrued Income

Accrued income amounted to Rp204.76 billion, an increase of 170.77% compared to 2022. The increase was attributed to the increase in accrued income from related parties, which went up by 400.51%.

Tabel Pendapatan yang Masih Harus Diterima Tahun 2022-2023 (Rp Juta)
Table of Accrued Income for 2022-2023 (Rp Million)

Uraian Description	2022	2023	Pertumbuhan Growth	
			Nominal Nominal	Persentase Percentage
Pihak Berelasi Related Parties	44.796	224.209	179.413	400,51%
Cadangan Kerugian Penurunan Nilai Impairment Loss Reserve	-	(24.082)	(24.082)	100%
Pihak Ketiga Third Parties	30.827	4.637	(26.190)	(84,96%)
Jumlah Pendapatan Yang Masih Harus Diterima Total Accrued Income	75.623	204.764	129.141	170,77%

Persediaan

Jumlah persediaan Perusahaan mencapai Rp94,71 miliar, meningkat sebesar 17,00% dibandingkan dengan posisi tahun 2022. Peningkatan persediaan terutama dipengaruhi oleh meningkatnya persediaan suku cabang & perlengkapan kapal dan bahan bakar yang masing-masing meningkat sebesar 17,56% dan 39,42%.

Inventories

The Company's total inventory amounted to Rp94.71 billion, up 17.00% compared to 2022. The increase mainly resulted from the increase in inventory of ship spareparts & equipment and fuel, which respectively up by 17.56% and 39.42%.

Tabel Persediaan Tahun 2022-2023 (Rp Juta)
Table of Inventory 2022-2023 (Rp Million)

Uraian Description	2022	2023	Pertumbuhan Growth	
			Nominal Nominal	Persentase Percentage
Suku Cadang dan Perlengkapan Kapal Vessel Spareparts and Equipment	75.945	89.283	13.338	17,56%
Bahan Bakar Fuel	2.263	3.155	892	39,42%
Perlengkapan dan Perabotan Hotel Hotel Equipment and Furniture	2.743	2.271	(472)	(17,21%)
Jumlah Persediaan Total Inventory	80.951	94.709	13.758	17,00%

Uang Muka dan Biaya Dibayar di Muka

Pembayaran awal dalam konteks keuangan Perusahaan dapat merujuk pada dana yang diberikan oleh Perusahaan untuk pembangunan kapal atau konstruksi infrastruktur maupun uang muka untuk kegiatan operasional. Sementara biaya dibayar di muka merujuk pada biaya yang menjadi kewajiban perusahaan untuk dibayarkan dalam periode tertentu, namun sudah dibayar terlebih dahulu dan manfaat atas barang atau jasa-jasa atas biaya tersebut tidak langsung diterima saat pembayaran dilakukan.

Advances and Prepaid Expenses

Advances in the Company's financial context refers to funds disbursed by the Company for ship building or infrastructure construction as well as advances for operational activities. Meanwhile, prepaid cost refers to expenses that the company is obliged to pay within a certain period, but was paid in advance, for which the benefits of the goods or services paid for are not immediately received when payment is made.

Pada tahun 2023, jumlah uang muka dan biaya dibayar di muka meningkat sebesar 32,53% menjadi Rp63,13 miliar yang terdiri dari Rp40,20 miliar uang muka dan Rp22,93 miliar biaya dibayar di muka. Peningkatan ini terutama dipengaruhi oleh meningkatnya uang muka operasional terkait pembayaran tenaga kerja *outsourcing* dan biaya dibayar di muka terkait transaksi sewa.

In 2023, the advances and prepaid expenses increased by 32.53% to Rp63.13 billion, consisted of Rp40.20 billion of advances and Rp22.93 billion of prepaid expenses. This increase was mainly driven by the increase in operational advances related to payment for outsourced labor and prepaid costs related to rental transactions.

Aset Tidak Lancar

Aset tidak lancar Perusahaan mencapai Rp9,11 triliun, meningkat sebesar 9,52% dibandingkan posisi tahun 2022. Peningkatan aset tidak lancar dipengaruhi oleh meningkatnya aset tetap Perusahaan sebesar 10,73% menjadi Rp8,06 triliun.

Non-Current Assets

The Company's non-current assets was Rp9.11 trillion, up 9.52% compared to the 2022. The increase in non-current assets was due to increase in the Company's fixed assets by 10.73% to Rp8,06 trillion.

Tabel Aset Tidak Lancar Tahun 2022-2023 (Rp Juta)
Table of Non-Current Assets 2022-2023 (Rp Million)

Uraian Description	2022	2023	Pertumbuhan Growth	
			Nominal Nominal	Persentase Percentage
Aset Keuangan Tidak Lancar Lainnya Other Non-Current Assets	277.280	275.527	(1.753)	(0,63%)
Uang Muka dan Biaya Dibayar di Muka Jangka Panjang Long Term Advances and Prepaid Expenses	488	456	(32)	(6,56%)
Properti Investasi Investment Property	665.537	703.320	37.783	5,68%
Aset Tetap Fixed Assets	7.277.013	8.057.902	780.889	10,73%
Aset Hak Guna Lease Rights Assets	76.258	48.382	(27.876)	(36,55%)
Aset Tak Berwujud Intangible Assets	17.392	20.350	2.958	17,01%
Aset Pajak Tangguhan Deferred Tax Assets	512	-	(512)	(100%)
Jumlah Aset Tidak Lancar Total Non-Current Assets	8.314.480	9.105.937	791.457	9,52%

Aset Keuangan Tidak Lancar Lainnya

Aset keuangan tidak lancar lainnya mencapai Rp275,53 miliar, lebih rendah sebesar 0,63% dibandingkan posisi tahun 2022. Penurunan aset keuangan tidak lancar lainnya dipengaruhi oleh menurunnya piutang pegawai sebesar 39,45% menjadi Rp2,29 miliar.

Other Non-Current Assets

Other non-current assets totaled at Rp275.53 billion, which was 0.63% lower compared to 2022. The decrease in other non-current assets was driven by reduced employee receivables by 39.45% to Rp2.29 billion.

Biaya Dibayar di Muka dan Uang Muka Jatuh Tempo Lebih dari Satu Tahun

Biaya dibayar di muka dan uang muka yang jatuh tempo lebih dari satu tahun mencapai Rp456 juta, menurun sebesar 6,56% dibandingkan posisi di tahun 2022. Penurunan pos keuangan ini tidak memiliki dampak yang material dan signifikan terhadap kondisi dan kinerja keuangan Perusahaan.

Properti Investasi

Properti investasi Perusahaan mencapai Rp703,32 miliar, lebih tinggi 5,68% dibandingkan posisi tahun 2022. Penurunan nilai properti investasi ini sesuai dengan laporan penilaian kembali oleh Kantor Jasa Penilai Publik yang dilakukan oleh KJPP Muttaqin Bambang Purwanto Rozak Uswatun dan Rekan.

Aset Tetap

Aset tetap Perusahaan mencapai Rp8,06 triliun, meningkat sebesar 10,73% dibandingkan posisi tahun 2022. Peningkatan aset tetap terutama dipengaruhi oleh meningkatnya nilai aset dalam penyelesaian dan armada kapal seiring dengan pembangunan infrastruktur pelabuhan maupun pengembangan armada kapal yang dilakukan Perusahaan untuk memperkuat posisi Perusahaan di bisnis pelabuhan dan penyeberangan.

Aset Hak Guna

Nilai aset hak guna Perusahaan mencapai Rp48,38 miliar, menurun sebesar 36,55% dibandingkan posisi tahun 2022. Penurunan nilai aset hak guna terutama dipengaruhi oleh depresiasi pada peralatan komputer yang cukup signifikan.

Aset Tak Berwujud

Nilai aset tak berwujud hingga 31 Desember 2023 mencapai Rp20,35 miliar, meningkat sebesar 17,01% dibandingkan posisi tahun 2022. Aset tak berwujud berupa lisensi *software* yang pada tahun 2023 terjadi penambahan sebesar Rp8,2 miliar.

Prepaid Expenses and Advances Maturing in More than One Year

Prepaid expenses and advances maturing more than one year totaled at Rp456 million, down 6.56% compared to the 2022. The decrease in this item did not have material and significant impact on the Company's financial condition and performance.

Property Investment

The Company's investment on properties amounting to Rp703.32 billion, 5.68% higher than 2022. The decrease in the value of investment properties was in accordance with the reappraisal report by the Public Appraisal Services Office carried out by KJPP Muttaqin Bambang Purwanto Rozak Uswatun dan Rekan.

Fixed Assets

The Company's fixed assets was Rp8.06 trillion, increased 10.73% compared to 2022. The increase in fixed assets was primarily driven by the increased value in assets in progress and ship fleets in parallel to the construction of port infrastructure and ship fleet development carried out by the Company to strengthen the Company's position in the port and ferry business.

Right-of-Use Assets

The value of the Company's right-of-use assets reached Rp48.38 billion, down 36.55% compared to 2022. The decrease in the value was mainly attributed to the significant depreciation of computer equipment.

Intangible Assets

The value of intangible assets as of 31 December 2023 was Rp20.35 billion, a 17.01% increase compared to the 2022. Intangible assets were in the form of software licenses, which increased by Rp8.2 billion in 2023.

Liabilitas

Hingga 31 Desember 2023, liabilitas Perusahaan meningkat sebesar 5,07% dibandingkan dengan posisi liabilitas pada tahun 2022 menjadi Rp2,67 triliun. Kenaikan liabilitas terutama didorong oleh kenaikan liabilitas jangka pendek dari Rp919,74 miliar di tahun 2022 menjadi Rp1,21 triliun di tahun 2023 atau meningkat sebesar 31,90%.

Liabilities

As of 31 December 2023, the Company's liabilities increased by 5.07% to Rp2.67 trillion, compared to the liability in 2022. The increase in liabilities was mainly driven by increased current liabilities from Rp919.74 billion in 2022 to Rp1.21 trillion in 2023, which was up by 31.90%.

Tabel Liabilitas Tahun 2022-2023 (Rp Juta)
Table of Liabilities for 2022-2023 (Rp Million)

Uraian Description	2022	2023	Pertumbuhan Growth	
			Nominal Nominal	Percentage Percentage
Liabilitas Jangka Pendek Current Liabilities	919.747	1.213.186	293.439	31,90%
Liabilitas Jangka Panjang Non-Current Liabilities	1.622.473	1.457.803	(164.670)	(10,15%)
Jumlah Liabilitas Total Liabilities	2.542.220	2.670.989	128.769	5,07%

Liabilitas Jangka Pendek

Liabilitas jangka pendek Perusahaan mencapai Rp1,21 triliun, meningkat sebesar 31,90% dibandingkan posisi tahun 2022. Kenaikan liabilitas jangka pendek terutama didorong oleh kenaikan utang usaha 34,03% dan beban akrual sebesar 36,32% serta utang bank jangka panjang yang jatuh tempo dalam satu tahun yang meningkat sebesar 236,48%.

Current Liabilities

The Company's current liabilities reached Rp1.21 trillion, an increase of 31.90% compared to 2022. The increase in current liabilities was mainly driven by an increase in trade payables of 34.03% and accrued expenses of 36.32% as well as an increase in non-current bank payables matured within one year amounting to 236.48%.

Tabel Liabilitas Jangka Pendek Tahun 2022-2023 (Rp Juta)

Table of Current Liabilities for 2022-2023 (Rp Million)

Uraian Description	2022	2023	Pertumbuhan Growth	
			Nominal Nominal	Percentase Percentage
Utang Bank Modal Kerja Bank Capital Payables	20.000	-	(20.000)	(100%)
Utang Usaha Trade Payables	305.124	408.944	103.820	34,03%
Utang Pajak Taxes Payables	33.688	37.506	3.818	11,33%
Utang Asuransi Insurance Debt	23.750	26.602	2.852	12,01%
Beban Akrual Accrued Expense	202.315	275.788	73.473	36,32%
Liabilitas Jangka Pendek Lain Other Current Liabilities	194.561	137.545	(57.016)	(29,30%)
Bagian Liabilitas Jangka Panjang Yang Jatuh Tempo Dalam Satu Tahun Proportion of Non-Current Liabilities Matured Within One Year				
Utang Bank Jangka Panjang Long Term Bank Loans	78.097	262.779	184.682	236,48%
Pinjaman Sindikasi Syndicated Loan	24.411	28.200	3.789	15,52%
Liabilitas Sewa Lease Liability	37.800	35.821	(1.979)	(5,24%)
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek Total Current Liabilities	919.746	1.213.186	293.439	31,90%

Utang Usaha

Utang usaha hingga 31 Desember 2023 mencapai Rp408,94 miliar, meningkat sebesar 34,03% dibandingkan posisi tahun 2022. Kenaikan utang usaha didorong oleh peningkatan utang usaha kepada pihak ketiga yang meningkat sebesar 78,59% terutama berupa utang usaha terkait pengadaan barang dan jasa, serta utang kepada perusahaan pelayaran terkait penjualan tiket terpadu.

Trade Payables

Trade payables as of 31 December 2023 was Rp408.94 billion, increased 34.03% compared to 2022. The increase in trade payables was driven by increased trade payables to third parties by 78.59%, especially in trade payables related to the procurement of goods and services, as well as debts to shipping companies related to integrated ticket sales.

Tabel Utang Usaha Tahun 2022-2023 (Rp Juta)
Table of Trade Payables 2022-2023 (Rp Million)

Uraian Description	2022	2023	Pertumbuhan Growth	
			Nominal Nominal	Persentase Percentage
Pihak Berelasi Related Parties	107.315	55.673	(51.642)	(48,12%)
Pihak Ketiga Third Parties	197.809	353.271	155.462	78,59%
Jumlah Utang Usaha Total Trade Payables	305.124	408.944	103.820	34.03%

Beban Akruai dan Provisi

Beban akrual dan provisi Perusahaan Rp275,79 miliar, meningkat sebesar 36,32% dibandingkan posisi tahun 2022. Kenaikan beban akrual dan provisi didorong oleh peningkatan beban akrual umum yang mencapai 47,58%.

Accrued Expenses and Provision

The Company's accrued expenses and provision were Rp275.79 billion, an increase of 36.32% compared to 2022. The increase in accrued expenses and provisions was attributed to increased general accrual expenses of 47.58%.

Tabel Beban Akruai dan Provisi Tahun 2022-2023 (Rp Juta)
Table of Accrued Expenses and Provision for 2022-2023 (Rp Million)

Uraian Description	2022	2023	Pertumbuhan Growth	
			Nominal Nominal	Persentase Percentage
Umum General	155.737	229.829	74.092	47,58%
Kepelabuhanan Port	1.534	480	(1.054)	(68,71%)
Administrasi Kantor Office Administration	23.560	23.364	(196)	(0,83%)
Lain-lain Others	832	1.462	631	75,93%
Subtotal Subtotal	181.663	255.136	73.473	40,44%
Provisi Provision	20.652	20.652	-	0%
Jumlah Beban Akruai dan Provisi Total Accrued Expenses and Provision	202.315	275.788	73.473	36,32%

Liabilitas Jangka Panjang

Liabilitas jangka panjang Perusahaan hingga Desember 2023 mencapai Rp1,46 triliun, menurun sebesar 10,15% dibandingkan tahun 2022. Pada tahun 2023, utang bank jangka panjang menurun sebesar 38,72% menjadi Rp570,61 miliar serta pinjaman sindikasi atas pembiayaan proyek PT Indonesia Ferry Properti telah dilunasi.

Non-Current Liabilities

The Company's long-term liabilities until December 2023 reached Rp1.46 trillion, down 10.15% compared to 2022. In 2023, long-term bank debt decreased by 38.72% to Rp570.61 billion and the syndicated loan for financing PT Indonesia Ferry Properti project had been repaid.

Tabel Liabilitas Jangka Panjang Tahun 2022-2023 (Rp Juta)
Table of Non-Current Liabilities 2022-2023 (Rp Million)

Uraian Description	2022	2023	Pertumbuhan Growth	
			Nominal Nominal	Persentase Percentage
Utang Bank Jangka Panjang Long Term Bank Loans	931.193	570.613	(360.580)	(38,72%)
Pinjaman Sindikasi Syndicated Loan	438.180	654.504	216.324	49,37%
Liabilitas Sewa Lease Liability	37.353	12.106	(25.247)	(67,59%)
Liabilitas Keuangan Jangka Panjang Lainnya Other Non-Current Liabilities	4.666	7.793	3.127	67,02%
Liabilitas Imbalan Pasca Kerja Retirement Benefit Liabilities	142.106	144.321	2.215	1,56%
Liabilitas Pajak Tangguhan Deferred Tax Liabilities	68.975	68.466	(509)	(0,74%)
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang Total Non-Current Liabilities	1.622.473	1.457.803	(164.670)	(10,15%)

Ekuitas

Ekuitas Perusahaan hingga 31 Desember 2023 mencapai Rp8,38 triliun, meningkat sebesar 12,26% dibandingkan posisi tahun 2022. Peningkatan ekuitas Perusahaan didorong oleh catatan laba bersih pada tahun berjalan, meskipun terdapat pembayaran dividen kepada pemegang saham.

Equity

The Company's equity as of 31 December 2023 was Rp8.38 trillion, a 12.26% increase compared to 2022. The increase in the Company's equity was due to the net income for the year, even though there were dividend payments to shareholders.

Tabel Ekuitas Tahun 2022-2023 (Rp Juta)
Table of Equity in 2022-2023 (Rp Million)

Uraian Description	2022	2023	Pertumbuhan Growth	
			Nominal Nominal	Percentage Percentage
Modal Ditempatkan Dan Disetor Penuh Issued and Paid-up Capital	5.173.195	5.173.195	0	0%
Tambahan Modal Disetor Additional Paid-up Capital	8.455	397.010	388.565	4.601,12%
Saldo Laba Telah Ditentukan Penggunaannya Appropriated Retained Earnings	1.368.262	1.831.027	462.765	33,82%
Saldo Laba Belum Ditentukan Penggunaannya Appropriated Retained Earnings	768.066	809.213	41.147	5,36%
Ekuitas Yang Dapat Diatribusikan Kepada Pemilik Entitas Induk Equity Attributable to Owners of the Parent Entity	7.317.968	8.210.445	892.477	12,20%
Ekuitas Yang Dapat Diatribusikan Kepada Kepentingan Non Pengendali Equity Attributable To Non-controlling Interests	151.058	174.267	23.209	15,36%
Jumlah Ekuitas Total Equity	7.469.026	8.384.712	915.686	12.26%



LAPORAN LABA RUGI

Sepanjang tahun 2023, Perusahaan berhasil mencatatkan kinerja yang memuaskan dengan capaian pendapatan usaha yang meningkat sebesar 13,94% dibandingkan dengan tahun 2022. Keberhasilan Perusahaan mencatatkan pertumbuhan positif ini didukung oleh berbagai strategi optimalisasi kinerja di seluruh segmen bisnis.

Pendapatan Usaha

Sepanjang tahun 2023, Perusahaan mencatatkan kenaikan pendapatan usaha dari tahun 2022 sebesar 13,94% menjadi Rp4,92 triliun. Peningkatan pendapatan ini terjadi di seluruh segmen bisnis dengan segmen penyeberangan dan lintas perintis mencatatkan pertumbuhan tertinggi sebesar 15,91% yang diikuti oleh segmen pelabuhan sebesar 10,04% dan segmen aneka jasa dan kerja sama sebesar 10,37%.

PROFIT/LOSS STATEMENT

Throughout 2023, the Company managed to record satisfactory performance with business revenue improving by 13.94% compared to 2022. The Company's success in booking positive growth was supported by various performance optimization strategies in all business segments.

Revenue

Throughout 2023, the Company recorded a 13.94% increase in operating income from 2022 to Rp4.92 trillion. The increase in revenue occurred in all business segments with the ferriage and pioneer line segments recorded the highest growth of 15.91%, followed by the port segment at 10.04% and the miscellaneous services and joint operations segment at 10.37%.

Tabel Pendapatan Usaha Tahun 2022-2023 (Rp Juta)

Table of Operating Revenue for 2022-2023 (Rp Million)

Uraian Description	2022	2023	Pertumbuhan Growth	
			Nominal Nominal	Persentase Percentage
Penyeberangan dan Lintas Perintis Ferriage and Pioneer Line Segment	2.846.095	3.298.840	452.745	15,91%
Pelabuhan Port	951.615	1.047.162	95.548	10,04%
Aneka Jasa dan Kerja Sama Miscellaneous Services and Joint Operations	524.452	578.832	54.380	10,37%
Jumlah Pendapatan Usaha <i>Total Operating Revenue</i>	4.322.162	4.924.834	602.673	13,94%

Beban Pokok Pendapatan

Beban pokok pendapatan Perusahaan mengalami kenaikan sebesar 12,07% dibandingkan tahun 2022 menjadi Rp3,24 triliun. Peningkatan beban pokok pendapatan ini terjadi di seluruh segmen bisnis yang secara umum didorong oleh peningkatan beban pokok usaha pelabuhan sebesar 17,58%, beban pokok usaha aneka jasa dan kerja sama sebesar 14,29% dan beban pokok usaha penyeberangan dan lintas perintis sebesar 10,50%.

Cost of Revenue

The Company's cost of revenue increased by 12.07% compared to 2022 at Rp3.24 trillion. The increase in the cost of revenue occurred in all business segments, which was generally driven by increased cost in port business by 17.58%, increased cost for miscellaneous services and joint cooperation by 14.29% and increased cost for ferriage and pioneer crossings by 10.50%.

Tabel Beban Pokok Pendapatan Tahun 2022-2023 (Rp Juta)
Table of Cost of Revenue for 2022-2023 (Rp Million)

Uraian Description	2022	2023	Pertumbuhan Growth	
			Nominal Nominal	Persentase Percentage
Beban Pokok Usaha Penyeberangan dan Lintas Perintis Cost of Revenues of Ferry and Pioneer Line Segment	1.985.941	2.194.501	208.560	10,50%
Beban Pokok Usaha Pelabuhan Cost of Revenues of Port Segment	332.173	390.576	58.403	17,58%
Beban Pokok Usaha Aneka Jasa dan Kerja Sama Cost of Revenues of Miscellaneous and Joint Operations Services	572.833	654.708	81.875	14,29%
Jumlah Beban Pokok Pendapatan <i>Total Cost of Revenue</i>	2.890.947	3.239.785	348.838	12,07%

Laba Bruto

Pada tahun 2023, Perusahaan berhasil mencatatkan laba bruto sebesar Rp1,69 triliun, meningkat sebesar 17,75% dibandingkan dengan capaian tahun 2022. Pertumbuhan laba bruto didorong oleh pertumbuhan pendapatan yang signifikan sebesar 13,94%, walaupun beban pokok pendapatan turut mengalami peningkatan sebesar 12,07%. Melalui capaian ini, menunjukkan bahwa strategi pertumbuhan kinerja dan pengendalian biaya yang dilakukan berjalan secara efektif dengan tetap memastikan aspek keselamatan dan pelayanan kepada penumpang secara optimal sesuai dengan regulasi yang berlaku.

Gross Profit

In 2023, the Company managed to book gross profit of Rp1.69 trillion, an increase of 17.75% compared to 2022 achievement. The growth in gross profit was driven by significant revenue growth of 13.94% although the cost of revenue also increased by 12.07%. This achievement showed that the performance growth and cost control strategies implemented had ran effectively while ensuring aspects of optimal safety and service to passengers in accordance with applicable regulations.

Beban Usaha

Beban usaha pada tahun 2023 tercatat sebesar Rp1,13 triliun, meningkat sebesar 28,83% dibandingkan dengan tahun 2022. Kenaikan beban usaha ini terutama didorong oleh kenaikan gaji dan tunjangan kerja sebesar 19,78%, beban jasa profesional sebesar 81,39%, dan beban pajak sebesar 58,33%

Operating Expenses

Operating expenses in 2023 was recorded at Rp1.13 trillion, an increase of 28.83% compared to 2022. The increase in operating expenses was mainly resulted from increase in employee salary and benefits expenses of 19.78%, materials expenses 81.39%, and tax expenses amounting to 58.33%.

Tabel Beban Usaha Tahun 2022-2023 (Rp Juta)
Table of Operating Expenses for 2022-2023 (Rp Million)

Uraian Description	2022	2023	Pertumbuhan Growth	
			Nominal Nominal	Persentase Percentage
Gaji dan Tunjangan Salary and Allowances	420.425	503.594	83.169	19,78%
Jasa Profesional Professional Service	50.262	91.169	40.907	81,39%
Pajak Tax	48.416	76.659	28.243	58,33%
Perjalanan Dinas Office Travels	50.393	69.768	19.375	38,45%
Pemeliharaan Maintenance	58.157	65.509	7.352	12,64%
Penurunan Nilai Piutang Impairment of Trade Receivables	9.848	49.384	39.536	401,46%
Penyusutan Depreciation	41.432	46.489	5.057	12,21%
Telekomunikasi dan Perlengkapan Kantor Telecommunications and Office Supplies	36.906	45.053	8.147	22,08%
Representasi, Jamuan dan Sumbangan Representations, Banquets and Donations	27.760	33.377	5.617	20,23%
Penyusutan Aset Hak-Guna Depreciation of Right-of-Use Assets	28.698	28.978	280	0,98%
Pendidikan dan Pelatihan Education and Training	13.715	18.321	4.606	33,58%
BBM, Listrik dan Air Fuel, Electricity and Water	13.575	15.704	2.129	15,68%
Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Partnerships and Community Development Program	7.274	7.760	486	6,68%
Amortisasi Amortization	4.927	5.254	327	6,64%
Lain-Lain Others	28.901	31.867	2.966	10,26%
Beban Pajak Final Final Tax Expense	33.559	37.374	3.815	11,37%
Jumlah Beban Usaha Total Operating Expenses	874.248	1.126.260	252.012	28,83%

Pendapatan dan Beban Lainnya

Pendapatan dan beban lainnya pada tahun 2023 sebesar Rp107,09 miliar, meningkat sebesar 80,84% dibandingkan tahun 2022. Pendapatan dan beban lainnya terdiri dari pendapatan non usaha, pendapatan keuangan, beban non usaha, dan beban keuangan. Penurunan pendapatan dan beban lainnya didorong oleh peningkatan pendapatan non usaha sebesar 18,58% dan peningkatan beban keuangan sebesar 5,55%.

Other Income and Expenses

Other income and expenses in 2023 was recorded at Rp107.09 billion, an increase of 80.84% compared to 2022. Other income and expenses consisted of non-business income, financial income, non-business expenses, and financial expenses. The decrease in other income and expenses was driven by an increase in non-business income of 18.58% and an increase in financial expenses of 5.55%.

Tabel Pendapatan dan Beban Lainnya Tahun 2022-2023 (Rp Juta)
Table of Other Income and Expenses for 2022-2023 (Rp Million)

Uraian Description	2022	2023	Pertumbuhan Growth	
			Nominal Nominal	Percentage Percentage
Pendapatan Lainnya Other Income	182.389	216.269	33.880	18,58%
Beban Lainnya Other Expenses	(32.356)	(20.829)	11.527	(35,63%)
Pendapatan Keuangan Financial Income	41.389	51.191	9.802	23,68%
Beban Keuangan Financial Expenses	(132.202)	(139.540)	(7.338)	5,55%
Jumlah Pendapatan dan Beban Lainnya Total of Other Income and Expenses	59.220	107.091	47.871	80,84%

Beban Pajak

Beban pajak Perusahaan di tahun 2023 mencapai Rp29,34 miliar, lebih rendah 5,39% dibandingkan beban pajak tahun 2022. Penurunan beban pajak tersebut dikarenakan adanya koreksi atas beban pajak tangguhan pada entitas anak.

Tax Expense

The Company's tax expense in 2023 was Rp29.34 billion, 5.39% lower than the tax expense in 2022. The decrease in tax expense was attributed to corrections to deferred tax expenses on subsidiaries.

Laba Tahun Berjalan

Laba tahun berjalan pada tahun 2023 mencapai Rp636,54 miliar, meningkat sebesar 8,78% dibandingkan laba tahun berjalan tahun 2022. Penurunan laba tahun berjalan didorong oleh kenaikan pada beban usaha dan beban pokok pendapatan sebagai upaya Perusahaan dalam meningkatkan keselamatan dan layanan penumpang.

Profit for the Year

Profit for the year in 2023 reached Rp636.54 billion, an increase of 8.78% than profit for the year in 2022. The decrease was caused by increased operating expenses and cost of revenue resulted from the Company's endeavors to improve safety and passenger services.

Penghasilan (Kerugian) Komprehensif Lain

Pada tahun 2023, Perusahaan mencatatkan kerugian komprehensif lain sebesar Rp8,42 miliar, lebih rendah 64,36% dibandingkan kerugian komprehensif tahun 2022. Penurunan kerugian komprehensif lain tersebut didorong oleh menurunnya nilai pengukuran kembali liabilitas imbalan pasti.

Laba Per Saham

Laba per lembar saham pada tahun 2023 mencapai Rp123.046 per lembar, lebih tinggi sebesar 8,78% dibandingkan laba per lembar saham tahun 2022. Penurunan laba per saham didorong oleh laba tahun berjalan yang lebih tinggi.

LAPORAN ARUS KAS

Laporan arus kas Perusahaan meliputi arus kas dari aktivitas operasi, arus kas dari aktivitas investasi, dan arus kas dari aktivitas pendanaan. Pada tahun 2023, terjadi kenaikan bersih kas dan setara kas sebesar Rp146,89 miliar, lebih tinggi 128,39% dibandingkan penurunan bersih kas dan setara kas pada tahun 2022. Kenaikan bersih kas dan setara kas tersebut membuat kas dan setara kas akhir tahun meningkat sebesar 10,95% dibandingkan tahun 2022 menjadi Rp1,49 triliun.

Other Comprehensive Income (Loss)

In 2023, the Company recorded other comprehensive loss of Rp8.42 billion, 64.36% lower than other comprehensive loss in 2022. The decrease in other comprehensive loss was caused by the decrease in the reappraisal value of the defined benefit liability.

Earnings Per Share

Earnings per share in 2023 was Rp123.046 per share, higher by 8.78% compared to earnings per share in 2022. The decrease in earnings per share resulted from higher profit for the current year.

CASH FLOW STATEMENT

The Company's cash flow statement includes cash flow from operating activities, cash flow from investing activities, and cash flow from financing activities. In 2023, there was a net increase in cash and cash equivalents amounting to Rp146.89 billion, which was 128.39% higher than the net decrease in cash and cash equivalents in 2022. The net increase in cash and cash equivalents resulted in cash and cash equivalents at the end of the year totaled at Rp1.49 trillion, which was 10.95% higher compared to 2022.

Tabel Arus Kas Tahun 2022-2023 (Rp Juta)
Table of Cash Flow in 2022-2023 (Rp Million)

Uraian Description	2022	2023	Pertumbuhan Growth	
			Nominal Nominal	Persentase Percentage
Arus Kas dari Aktivitas Operasi Cash Flow from Operating Activities	793.374	1.140.567	347.193	43,76%
Arus Kas dari Aktivitas Investasi Cash Flow from Investing Activities	(1.692.870)	(788.888)	903.982	(53,40%)
Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan Cash Flow from Financing Activities	382.196	(204.813)	(587.009)	(153,59%)
Kenaikan (Penurunan) Bersih Kas dan Setara Kas Increase (Decrease) in Net Cash and Cash Equivalents	(517.299)	146.866	664.165	128,39%
Pengaruh Selisih Kurs Atas Kas dan Setara Kas Foreign Exchange Differences on Cash and Cash Equivalents	6	(12)	(18)	(300,00%)
Kas dan Setara Kas Awal Tahun Cash and Cash Equivalents at the Beginning of the Year	1.858.784	1.341.491	(517.293)	(27,83%)
Kas dan Setara Kas Akhir Tahun Cash and Cash Equivalents at the End of the Year	1.341.491	1.488.345	146.854	10,95%

Arus Kas Aktivitas Operasi

Jumlah kas bersih yang diperoleh dari aktivitas operasi pada tahun 2023 mencapai Rp1,14 triliun, meningkat sebesar 43,76% dibandingkan perolehan kas bersih dari aktivitas operasi tahun 2022. Peningkatan jumlah kas bersih dari aktivitas operasi terutama didorong oleh meningkatnya penerimaan dari pelanggan sebesar 13,81% dan pembayaran kas kepada pemasok yang lebih rendah 3,56% dibandingkan tahun sebelumnya. Hal tersebut menjadi indikasi bahwa pengelolaan arus kas serta *account receivable* dan *account payable* dilakukan secara efektif sehingga Perusahaan mampu menjaga arus kas dari aktivitas operasi secara optimal.

Cash Flow From Operating Activities

The amount of net cash generated from operating activities in 2023 was Rp1.14 trillion, an increase of 43.76% compared to the net cash generated from operating activities in 2022. The increase was mainly on account of increase in receipts from customers by 13.81% and lower cash payments to suppliers by 3.56% compared to the previous year. This was an indication that cash flow management, accounts receivable and accounts payable was carried out effectively such that the Company successfully maintained cash flow from operating activities optimally.

Tabel Arus Kas dari Aktivitas Operasi Tahun 2022-2023 (Rp Juta)

Table of Cash Flow from Operating Activities in 2022-2023 (Rp Million)

Uraian Description	2022	2023	Pertumbuhan Growth	
			Nominal Nominal	Persentase Percentage
Penerimaan dari Pelanggan Receipts from Customers	4.322.807	4.919.996	597.189	13,81%
Pembayaran Kas kepada Pemasok Payments to Suppliers	(2.069.281)	(1.995.716)	73.565	(3,56%)
Pembayaran kepada Karyawan Payments to Employees	(983.683)	(1.116.107)	(132.424)	13,46%
Pembayaran Beban Usaha Payment of Operating Expenses	(350.134)	(509.825)	(159.671)	45,60%
Penerimaan Lain-Lain Other Receipts	49.246	78.002	28.756	58,39%
Pembayaran Bunga Pinjaman Payments of Loan's Interest	(107.155)	(120.138)	(12.983)	12,12%
Penerimaan Bunga Interest Receipts	41.389	51.191	9.802	23,68%
Pembayaran Pajak Tax Payments	(109.814)	(168.167)	(58.353)	53,14%
Restitusi Pajak Tax Restitution	-	1.331	-	-
Jumlah Kas Bersih Diperoleh Dari Aktivitas Operasi Net Cash Generated From Operating Activities	793.374	1.140.567	347.193	43,76%

Arus Kas Bersih Aktivitas Investasi

Jumlah kas bersih yang digunakan untuk aktivitas investasi pada tahun 2023 mencapai Rp788,89 miliar menurun sebesar 53,40% dibandingkan penggunaan kas bersih untuk aktivitas investasi tahun 2022. Jumlah penggunaan kas bersih untuk aktivitas investasi tahun 2023 digunakan untuk memperoleh aset tetap yaitu sebesar Rp777,97 miliar.

Net Cash Flow From Investing Activities

The amount of net cash used in investment activities in 2023 was Rp788.89 billion, a decrease of 53.40% compared to 2022. The net cash used in investment activities in 2023 was used to acquire fixed assets at Rp777.97 billion.

Tabel Arus Kas dari Aktivitas Investasi Tahun 2022-2023 (Rp Juta)

Table of Cash Flow from Investment Activities 2022-2023 (Rp Million)

Uraian Description	2022	2023	Pertumbuhan Growth	
			Nominal Nominal	Persentase Percentage
Penerimaan Jaminan Usaha Receipt of Business Guarantee	20.004	19.965	(39)	(0,19%)
Pembayaran Jaminan Usaha Payments of Business Guarantee	(41.223)	(24.185)	17.038	(41,33%)
Perolehan Aset Tak Berwujud Acquisition of Intangible Assets	(6.258)	(8.212)	(1.954)	31,22%
Perolehan Aset Tetap Acquisition of Fixed Assets	(819.456)	(777.972)	41.484	(5,06%)
Hasil Penjualan Aset Tetap Proceeds from Sales of Fixed Assets	-	1.518	-	-
Pembayaran Uang Muka Pembangunan Advances for Construction	(8.065)	-	8.065	(100%)
Pembayaran Akuisisi Entitas Anak Payment for Acquisition of Subsidiaries	(837.872)	-	837.872	(100%)
Jumlah Kas Bersih Digunakan untuk Aktivitas Investasi Net Cash Used In Investing Activities	(1.692.870)	(788.888)	903.982	(53,40%)

Arus Kas Aktivitas Pendanaan

Jumlah kas bersih yang digunakan untuk aktivitas pendanaan pada tahun 2023 mencapai Rp204,82 miliar, lebih tinggi sebesar 153,59% dibandingkan penggunaan kas untuk aktivitas pendanaan tahun 2022. Pada tahun 2023, Perusahaan menerima pinjaman sindikasi sebesar Rp705 miliar. Di samping itu, Perusahaan juga melakukan pembayaran pinjaman sindikasi sebesar Rp462,59 miliar dan pembayaran pinjaman bank sebesar Rp195,90 miliar.

Cash Flow From Funding Activities

The amount of net cash used in financing activities in 2023 was Rp204.82 billion, 153.59% higher than the use of cash for financing activities in 2022. In 2023, the Company received a syndicated loan of Rp705 billion. In addition, the Company also made payments for syndicated loan amounting to Rp462.59 billion and payments for bank loan amounting to Rp195.90 billion.

Tabel Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan Tahun 2022-2023 (Rp Juta)
Table of Cash Flow from Funding Activities in 2022-2023 (Rp Million)

Uraian Description	2022	2023	Pertumbuhan Growth	
			Nominal Nominal	Persentase Percentage
Pencairan Pinjaman Sindikasi Disbursement for Syndicated Loan	-	705.000	-	-
Pembayaran Pinjaman Sindikasi Payment for Syndicated Loan	(20.741)	(462.591)	(441.850)	2130,32%
Pembayaran Dividen Payment for Dividends	-	(101.000)	-	-
Pembayaran Pinjaman Bank Payments for Bank Loans	(120.132)	(195.899)	(75.767)	63,07%
Penerimaan Pinjaman Bank Receipts from Bank Loans	600.000	-	(600.000)	(100%)
Penerimaan Pinjaman Pihak Berelasi Receipts for Related Parties Loan	2.720	25.325	22.605	831,07%
Pembayaran Pinjaman Pihak Berelasi Payments for Related Parties Loan	-	(140.422)	-	-
Pembayaran Utang Pembiayaan Payment for Financing Debt	(26.005)	-	26.005	(100%)
Pembayaran Liabilitas Sewa Payments for Leases	(53.645)	(35.225)	18.420	(34,34%)
Jumlah Kas Bersih Diperoleh dari (Digunakan untuk) Aktivitas Pendanaan Net Cash Generated from (Used In) Financing Activities	382.196	(204.812)	(587.008)	(153,59%)

KEMAMPUAN MEMBAYAR UTANG DAN TINGKAT KOLEKTIBILITAS PIUTANG

SOLVENCY AND COLLECTIBILITY

Kemampuan Membayar Utang

Perusahaan secara rutin melakukan pengendalian kemampuan membayar utang jangka pendek maupun jangka panjang, salah satunya melalui pemantauan terhadap rasio-rasio keuangan penting seperti rasio solvabilitas dan rasio likuiditas. Pada tahun 2023, Perusahaan dapat menjaga kemampuan membayar utangnya dengan baik, tercermin dari rasio-rasio keuangan yang dijelaskan sebagai berikut:

Rasio Solvabilitas

Perusahaan melakukan pemantauan terhadap rasio solvabilitas untuk mengawasi kemampuan Perusahaan dalam membayar kewajiban jangka panjang maupun seluruh kewajibannya. Rasio solvabilitas terdiri dari *Debt to Asset Ratio* (Rasio Utang terhadap Aset), *Debt to Equity Ratio* (Rasio Utang terhadap Modal) dan *Interest Coverage Ratio* (Rasio Cakupan Bunga).

Solvency

The Company routinely monitors their short-term and long-term capability in paying debts, by monitoring important financial ratios such as the solvency ratio and liquidity ratio. In 2023, the Company was able to maintain its solvency, as reflected in the financial ratios explained below:

Solvency Ratio

The Company monitors their solvency ratio towards long-term obligations as well as all existing obligations. The solvency ratio consists of Debt to Asset Ratio, Debt to Equity Ratio and Interest Coverage Ratio.

Tabel Rasio Solvabilitas Tahun 2022-2023 (%)
Table of Solvency Ratio 2022-2023 (%)

Uraian Description	2022	2023	Δ Perubahan Δ Change
Utang Terhadap Modal Debt to Equity	21,00	19,00	(14%)
Utang Terhadap Aset Debt to Asset	15,65	14,15	(12%)
Rasio Cakupan Bunga (Kali) Interest Coverage Ratio (Times)	4,47	4,4	(2%)

1. Rasio Utang Terhadap Aset

Rasio ini digunakan untuk mengukur bagian aset yang digunakan dalam menjamin kewajiban atau utang Perusahaan. Pada tahun 2023, Perusahaan mampu menjaga rasio utang terhadap aset sebesar 14,15%, lebih rendah dibandingkan tahun 2022 sebesar 15,65%. Penurunan tersebut didorong oleh pembayaran utang bank dan pinjaman sindikasi.

1. Debt to Asset Ratio

The ratio measures the portion of assets used to guarantee a Company's liabilities or debts. In 2023, the Company was able to maintain the debt to asset ratio at 14.15%, lower than 15.65% in 2022. This decline stems from payments for bank debt and syndicated loans.

2. Rasio Utang Terhadap Modal

Rasio ini digunakan untuk mengukur bagian modal dalam menjamin kewajiban atau utang Perusahaan. Pada tahun 2023, Perusahaan mampu menjaga rasio utang terhadap modal sebesar 19%, lebih rendah dibandingkan tahun 2022 sebesar 21%. Penurunan tersebut didorong oleh kenaikan laba bersih serta pembayaran utang bank dan pinjaman sindikasi.

3. Rasio Cakupan Bunga

Rasio ini digunakan untuk mengukur kemampuan Perusahaan dalam membayar bunga atas kewajiban atau utang Perusahaan. Pada tahun 2023, rasio cakupan bunga sebesar 4,40 kali lebih rendah dibandingkan tahun 2022 sebesar 4,47 kali.

2. Debt to Equity Ratio

The ratio measures the portion of equity used to guarantee a Company's liabilities or debts. In 2023, the Company maintained a debt to equity ratio of 19%, lower than 21% in 2022. The decline resulted from increased net income and payments on bank debt and syndicated loans.

3. Interest Coverage Ratio

The ratio measures a Company's ability to pay interest of its liabilities or debts. In 2023, the interest coverage ratio was 4.40 times, lower than 4.47 times in 2022.

Rasio Likuiditas

Perusahaan melakukan pemantauan terhadap rasio likuiditas untuk memastikan Perusahaan memiliki likuiditas yang cukup untuk memenuhi kewajiban jangka pendek. Pada tahun 2023, Perusahaan mampu menjaga rasio likuiditas pada level yang optimal. Rasio kunci pada rasio likuiditas di antaranya adalah *Cash Ratio* (Rasio Kas), *Quick Ratio* (Rasio Cepat) dan *Current Ratio* (Rasio Lancar). Meningkatnya nilai dari setiap rasio tersebut mencerminkan tingkat likuiditas yang lebih tinggi dalam struktur keuangan perusahaan, menandakan bahwa entitas tersebut memiliki kemampuan yang lebih besar untuk memenuhi berbagai kewajiban keuangan yang mungkin muncul.

Liquidity Ratio

The Company monitors liquidity ratios to ensure sufficient liquidity to meet short-term liabilities. In 2023, the Company maintained its liquidity ratio at an optimal level. The crucial ratios in the liquidity ratio include the *Cash Ratio*, *Quick Ratio* and *Current Ratio*. Higher value of these ratios reflects a higher liquidity in a company's financial structure, indicating that the entity has a greater ability to meet various financial liabilities that may arise.

Tabel Rasio Likuiditas Tahun 2022-2023 (%)
Table of Liquidity Ratio in 2022-2023 (%)

Uraian Description	2022	2023	Δ Perubahan Δ Change
Rasio Kas Cash Ratio	145,85	122,68	(15,89%)
Rasio Cepat Quick Ratio	149,32	125,70	(15,82%)
Rasio Lancar Current Ratio	184,48	160,71	(12,88%)

1. Rasio Kas

Rasio ini digunakan untuk mengukur kemampuan Perusahaan dalam memenuhi kewajiban yang harus segera dipenuhi dengan kas. Pada tahun 2023, rasio kas Perusahaan sebesar 122,68% menurun jika dibandingkan dengan tahun 2022 sebesar 145,85%. Penurunan ini terutama disebabkan oleh meningkatnya utang usaha kepada pihak ketiga.

2. Rasio Cepat

Rasio ini digunakan untuk mengukur kemampuan Perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendek melalui aset lancar di luar persediaan. Pada tahun 2023, rasio cepat Perusahaan sebesar 125,70%, menurun dibandingkan dengan tahun 2022 149,32%. Penurunan ini terutama disebabkan oleh meningkatnya utang usaha kepada pihak ketiga.

3. Rasio Lancar

Rasio ini digunakan untuk mengukur kemampuan Perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendek melalui aset lancar. Pada tahun 2023, rasio lancar Perusahaan sebesar 160,71%, menurun dibandingkan tahun 2022 sebesar 184,48%. Penurunan ini didorong oleh kenaikan liabilitas jangka pendek yang lebih besar dibandingkan kenaikan aset lancar.

1. Cash Ratio

The ratio measures a Company's ability to fulfill the short-term financial obligations with cash. In 2023, the Company's cash ratio was 122.68%, slightly lower compared to 2022 of 145.85%. The decrease was mainly caused by increased trade payables to third parties.

2. Quick Ratio

The ratio measures a Company's ability to meet current liabilities by using the current assets aside of inventory. In 2023, the Company's quick ratio was 125.70%, a decrease compared to 149.32% in 2022. The decrease was caused by increased trade payables to third parties.

3. Current Ratio

The ratio measures a Company's ability to meet short-term financial obligations by using current assets. In 2023, the Company's current ratio was 160.71%, an increase compared to 2022 at 184.48%. The decrease was caused by greater increase of current liabilities than the increase in current assets

KOLEKTIBILITAS PIUTANG

Kolektibilitas piutang mengukur tingkat kemampuan Perusahaan dalam mengumpulkan piutang yang pengukurannya menggunakan rasio tingkat kolektibilitas piutang (periode penagihan). Periode penagihan yang semakin kecil menunjukkan semakin baiknya kemampuan Perusahaan dalam menagih piutang. Pada tahun 2023, periode penagihan Perusahaan yaitu 2,72 hari, lebih lama dibandingkan tahun 2022 sebesar 2,69 hari. Hal ini terutama dipengaruhi oleh peningkatan rata-rata piutang meskipun diiringi dengan peningkatan pendapatan usaha.

COLLECTIBILITY

Collectibility measures a Company's ability to collect receivables, which uses collection period for its ratio. A lower value in collection period indicates a Company's enhanced ability to collect receivables. In 2023, the Company's collection period was 2.72 days, slower than in 2022 of 2.69 days. This was the result of higher receivables although this was in line with the increase in revenue.

RASIO KEUANGAN LAINNYA

Selain melakukan pengawasan terhadap kemampuan Perusahaan dalam memenuhi kewajibannya, Perusahaan juga melakukan

OTHER FINANCIAL RATIOS

In addition to monitoring the Company's ability to fulfill its financial obligations, the Company also monitors and evaluates other important

pengawasan dan evaluasi terhadap rasio-rasio lain yang penting bagi Perusahaan di antaranya rasio profitabilitas dan rasio aktivitas. Proses pengawasan ini menjadi suatu langkah kritis dalam upaya perusahaan untuk memahami dan meningkatkan kinerja finansial serta untuk memastikan keberlanjutan dan pertumbuhan yang berkelanjutan.

Rasio Profitabilitas

Perusahaan melakukan pengawasan terhadap rasio profitabilitas yang mencerminkan kemampuan Perusahaan dalam melakukan efisiensi dan menghasilkan keuntungan atau laba. Perusahaan melakukan pemantauan terhadap rasio-rasio kunci di antaranya *Return on Asset* (Tingkat Pengembalian Aset), *Return on Equity* (Tingkat Pengembalian Modal), *Return on Investment* (Tingkat Pengembalian Investasi), *Operating Profit Margin* (Margin Laba Operasi), dan *Net Profit Margin* (Margin Laba Bersih). Pada tahun 2023, Perusahaan dapat mencatatkan tingkat profitabilitas yang cukup memuaskan meskipun terjadi dinamika di internal dan eksternal yang berdampak pada kinerja Perusahaan.

ratios, including profitability ratios and activity ratios. Monitoring process becomes critical in a company's efforts to understand and improve financial performance so as to ensure sustainability and sustainable growth.

Profitability Ratio

The Company monitors profitability ratios which reflect the Company's ability to stay efficient and to generate profits. The Company monitors key ratios including Return on Assets, Return on Equity, Return on Investment, Operating Profit Margin, and Net Profit Margin. In 2023, the Company recorded a satisfactory profitability ratio despite internal and external dynamics that impacted the Company's performance.

Tabel Rasio Profitabilitas Tahun 2022-2023 (%)
Table of Profitability Ratio in 2022-2023 (%)

Uraian Description	2022	2023	Δ Perubahan Δ Change
Tingkat Pengembalian Aset Return on Assets	5,85	6,11	(1,54%)
Tingkat Pengembalian Modal Return on Equity	8,00	8,12	1,50%
Tingkat Pengembalian Investasi Return on Investment	11,43	10,98	(3,94%)
Margin Laba Operasi Operating Profit Margin	12,89	11,35	(11,95%)
Margin Laba Bersih Net Profit Margin	13,54	12,93	(4,51%)

1. Tingkat Pengembalian Aset

Rasio ini menunjukkan kemampuan Perusahaan dalam memperoleh keuntungan dengan jumlah aset yang dimiliki Perusahaan. Tingkat pengembalian aset Perusahaan pada tahun 2023 sebesar 6,11%, lebih tinggi dibandingkan dengan tahun 2022

1. Return on Assets

The ratio shows a Company's profitability in relation to the total assets owned by the Company. The Company's return on assets in 2023 was 6.11%, higher than in 2022 of 5.85%. This was contributed by

yang mencapai 5,85%. Hal ini terutama disebabkan oleh peningkatan laba tahun berjalan yang lebih tinggi dibandingkan dengan peningkatan aset Perusahaan.

2. Tingkat Pengembalian Modal

Rasio ini menunjukkan kemampuan Perusahaan dalam memperoleh keuntungan dengan jumlah modal yang dimiliki Perusahaan. Tingkat pengembalian modal Perusahaan pada tahun 2023 sebesar 8,12%, lebih tinggi dibandingkan dengan tahun 2022 yang mencapai 8,00%. Hal ini terutama disebabkan oleh peningkatan nilai modal yang lebih tinggi dibandingkan dengan peningkatan laba tahun berjalan.

3. Tingkat Pengembalian Investasi

Rasio ini menunjukkan kemampuan Perusahaan dalam memperoleh keuntungan dengan jumlah aset yang tersedia. Tingkat pengembalian investasi Perusahaan pada tahun 2023 sebesar 10,98%, lebih rendah dibandingkan dengan tahun 2022 yang mencapai 11,43%. Hal ini terutama disebabkan oleh peningkatan aset yang lebih tinggi dibandingkan dengan peningkatan laba tahun berjalan.

4. Margin Laba Operasi

Rasio ini menunjukkan kemampuan Perusahaan untuk menghasilkan laba operasi dari pendapatan usaha. Margin laba operasi Perusahaan pada tahun 2023 sebesar 11,35% lebih rendah dibandingkan margin laba operasi tahun 2022 sebesar 12,89%. Hal ini disebabkan oleh peningkatan beban pokok pendapatan dan beban usaha sebagai dampak dari upaya Perusahaan untuk meningkatkan keselamatan dan layanan penumpang.

5. Margin Laba Bersih

Rasio ini menunjukkan kemampuan Perusahaan untuk menghasilkan laba bersih dari pendapatan usaha. Margin laba bersih Perusahaan pada tahun 2023 sebesar 12,93%, lebih rendah dibandingkan margin laba bersih tahun 2022 sebesar 13,54%. Hal ini disebabkan oleh peningkatan beban pokok pendapatan dan beban usaha sebagai dampak dari upaya Perusahaan untuk meningkatkan keselamatan dan layanan penumpang.

higher increase in profit for the year compared to the increase in the Company's assets value.

2. Return on Equity

The ratio shows a Company's ability to gain profit with the equity the Company owns. The Company's return on equity in 2023 was 8.12%, higher than in 2022 at 8.00%. This was due to the higher increased value in equity compared to the increased in profit for the year.

3. Return on Investment

The ratio shows a Company's profitability in relation to the assets available in the Company. The Company's return on investment in 2023 was 10.98%, lower than in 2022 at 11.43%. This was caused by the higher increase in assets compared to the increase in profit for the current year.

4. Operating Profit Margin

The ratio shows a Company's ability to generate profit from revenue. The Company's operating profit margin in 2023 was 11.35% lower than the operating profit margin in 2022 of 12.89%. This was caused by increased cost of revenue and operating expenses as a result of the Company's efforts to improve passenger safety and service.

5. Net Profit Margin

The ratio shows a Company's ability to generate net profit from the revenue. The Company's net profit margin in 2023 was 12.93%, which was lower than the net profit margin in 2022 of 13.54%. This was caused by an increase in cost of revenue and operating expenses as the result of the Company's efforts to improve passenger safety and service.

Rasio Aktivitas

Rasio aktivitas mencerminkan tingkat efisiensi yang dicapai oleh Perusahaan dalam mengoptimalkan pemanfaatan aset yang dimiliki. Perusahaan melakukan pengukuran dan evaluasi pada beberapa rasio kunci seperti *Total Asset Turnover* (Perputaran Total Aset) dan *Working Capital Turnover* (Perputaran Modal Kerja). Berdasarkan pengukuran dan evaluasi rasio aktivitas, pada tahun 2023 Perusahaan dapat mengoptimalkan pemanfaatan aset yang dimiliki dalam melakukan aktivitas usahanya.

Activity Ratio

The activity ratio reflects the level of efficiency achieved by a Company in optimizing its assets utilization. The Company measures and evaluates several key ratios such as *Total Asset Turnover* and *Working Capital Turnover*. Based on the measurement and evaluation of activity ratios, in 2023 the Company was successful in optimizing its assets utilization upon conducting its business activities.

Tabel Rasio Aktivitas Tahun 2022-2023 (%)

Table of Activity Ratio 2022-2023 (%)

Uraian Description	2022	2023	Δ Perubahan Δ Change
Perputaran Total Aset <i>Total Asset Turnover</i>	45,49	51,12	12,38%
Perputaran Modal Kerja <i>Working Capital Turnover</i>	5,64	6,83	21,10%

1. Perputaran Total Aset

Rasio ini menunjukkan kemampuan aset Perusahaan dalam menghasilkan pendapatan usaha, semakin tinggi perputaran total aset menunjukkan kemampuan aset yang tinggi dalam menghasilkan pendapatan. Perputaran total aset Perusahaan pada tahun 2023 sebesar 51,12%, lebih tinggi dibandingkan dengan tahun 2022 yang mencapai 45,49%. Hal ini didorong oleh peningkatan pendapatan usaha lebih signifikan dibandingkan dengan peningkatan aset.

1. Total Asset Turnover

The ratio measures a Company's ability to use its assets to generate revenue. Higher total asset turnover indicates better ability in managing its assets to gain revenue. The Company's total asset turnover in 2023 was 51.12%, higher than in 2022 at 45.49%. This was contributed by significant increase in revenue compared to the increase in assets.

2. Perputaran Modal Kerja

Rasio ini menunjukkan kemampuan dan efektivitas modal kerja dalam menghasilkan pendapatan usaha, semakin tinggi perputaran modal kerja menunjukkan kemampuan modal yang tinggi dalam menghasilkan pendapatan. Perputaran modal kerja Perusahaan pada tahun 2023 sebesar 6,83%, lebih tinggi dibandingkan dengan tahun 2022 yang mencapai 5,64%. Hal ini didorong oleh peningkatan modal kerja yang lebih signifikan dibandingkan dengan peningkatan penjualan.

2. Working Capital Turnover

The ratio indicates the ability and effectiveness to manage working capital in generating revenue. The higher value in the working capital turnover indicates better ability to earn income. The Company's working capital turnover in 2023 was 6.83%, higher than in 2022 at 5.64%. This was due to significant increase in working capital compared to the increase in sales.

STRUKTUR MODAL DAN KEBIJAKAN ATAS STRUKTUR MODAL

CAPITAL STRUCTURE AND POLICY ON CAPITAL STRUCTURE

STRUKTUR MODAL

Perusahaan berupaya untuk memastikan struktur modal yang ideal dan optimal sehingga dapat memastikan keuangan Perusahaan yang sehat dan memaksimalkan keuntungan Perusahaan serta imbal hasil bagi pemegang saham. Komposisi struktur modal Perusahaan dalam 2 tahun terakhir didominasi oleh ekuitas sesuai dengan rincian yang terlampir pada tabel berikut:

Tabel Struktur Modal Perusahaan Tahun 2022-2023
Table of Company Capital Structure in 2022-2023

Uraian Description	2022		2023		Pertumbuhan Growth	
	Nominal (Rp Juta) Nominal (Rp Million)	Komposisi (%) Composition (%)	Nominal (Rp Juta) Nominal (Rp Million)	Komposisi (%) Composition (%)	Nominal (Rp Juta) Nominal (Rp Million)	Persentase (%) Percentage (%)
Liabilitas Liabilities	2.542.220	25,39%	2.670.989	24,16%	128.769	5,07%
Liabilitas Jangka Pendek Current Liabilities	919.747	9,19%	1.213.186	10,97%	293.439	31,90%
Liabilitas Jangka Panjang Non-Current Liabilities	1.622.473	16,21%	1.457.803	13,19%	(164.670)	(10,15%)
Ekuitas Equity	7.469.026	74,61%	8.384.712	75,84%	915.686	12,26%
Aset Asset	10.011.246	100,00%	11.055.701	100,00%	1.044.455	10,43%

KEBIJAKAN PENGELOLAAN STRUKTUR MODAL

Pengelolaan struktur modal dilakukan untuk menjamin keberlangsungan bisnis Perusahaan dan memastikan pemenuhan batasan risiko kecukupan modal Perusahaan. Selain itu, dengan struktur modal yang optimal, Perusahaan juga

CAPITAL STRUCTURE

The Company strives to ensure an ideal and optimal capital structure in order to ensure healthy financial and maximize Company profits and returns for shareholders. The composition of the Company's capital structure in the last 2 years was dominated by equity according to the details shown in the following table:

CAPITAL STRUCTURE MANAGEMENT POLICY

Management of capital structure ensures the continuity of the Company's business and ensure risk compliance on limitation of capital adequacy. In addition, an optimal capital structure would lead the Company to

dapat meminimalkan risiko keuangan serta memastikan keuangan Perusahaan yang sehat.

Manajemen secara berkala melakukan tinjauan terhadap struktur modal Perusahaan dengan mempertimbangkan biaya permodalan dan risiko-risiko yang terkait. Perusahaan berusaha untuk meminimalkan biaya modal sehingga dapat memaksimalkan nilai Perusahaan. Oleh karena itu dalam menentukan sumber pendanaan, Perusahaan selalu memperhitungkan risiko keuangan yang mungkin timbul di masa depan. Pada tahun 2023, Perusahaan telah mengambil kebijakan permodalan dengan melakukan penambahan pada utang jangka pendek sebesar 20,26% dan utang jangka panjang hanya meningkat sebesar 0,09%.

PENYERTAAN MODAL NEGARA

Penyertaan modal negara dilakukan oleh negara sebagai pemegang saham untuk meningkatkan *leverage* Perusahaan sebagai BUMN yang berperan sebagai *agent of value creator* dan *agent of development* untuk memberikan kontribusi keuntungan kepada negara dan turut andil dalam membangun bangsa. Pada tahun 2023, tidak terdapat Penyertaan Modal Negara (PMN) kepada Perusahaan.

TINGKAT LIKUIDITAS PERUSAHAAN

Perusahaan senantiasa berupaya untuk menjaga stabilitas tingkat likuiditas guna menjamin kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendek yang dilakukan melalui pengawasan dan evaluasi rasio likuiditas. Rasio likuiditas terdiri dari *Cash Ratio* (Rasio Kas), *Quick Ratio* (Rasio Cepat) dan *Current Ratio* (Rasio Lancar).

Pada tahun 2023, *Cash Ratio* Perusahaan sebesar 134,44%, sementara *Quick Ratio* sebesar 137,79%, dan *Current Ratio* sebesar 185,33%. Rasio tersebut mencerminkan bahwa Perusahaan memiliki kemampuan yang optimal untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya sehingga memberikan kepercayaan dari para pemangku kepentingan mengenai ketahanan keuangan Perusahaan yang solid.

minimize financial risks and ensure healthy Company finances.

Management periodically reviews the Company's capital structure by taking into account the costs of capital and associated risks. The Company seeks to minimize capital costs in order to maximize value of the Company. Therefore, in deciding sources of funding, the Company always take into account the financial risks that may arise in the future. In 2023, the Company adopted a policy on capital by increasing current liabilities by 20.26% and long-term liabilities by 0.09%.

STATE EQUITY PARTICIPATION

State equity participation was carried out by the state in its capacity as the shareholder to increase the Company's leverage as an SOE with the role as agent of value creator and agent of development to take part in contributing profit and in building the nation. In 2023, there was no State Equity Participation for the Company.

COMPANY LIQUIDITY LEVEL

The Company always strives to maintain stable liquidity to ensure the company's solvency, which is monitored and evaluated from liquidity ratios. The liquidity ratio consists of the Cash Ratio, Quick Ratio and Current Ratio.

In 2023, the Company's Cash Ratio was 134.44%, the Quick Ratio was 137.79%, and the Current Ratio was 185.33%. These ratios reflected the Company optimum capability to fulfill its short-term financial obligations, thereby established confidence in stakeholders regarding the Company's solid financial resilience.

KONTRIBUSI KEPADA NEGARA

CONTRIBUTION TO THE COUNTRY

Perusahaan senantiasa melaksanakan komitmennya dalam memenuhi kewajiban kenegaraan dan peran serta sebagai wajib pajak untuk melaksanakan kewajiban perpajakan sebagai salah satu wujud turut serta dalam membangun negara.

Pada tahun 2023, Perusahaan melaksanakan kewajiban pelaporan dan pembayaran pajak secara tepat waktu dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Total setoran pajak yang dilakukan mencapai Rp163,61 miliar, meningkat sebesar 55,47% dibandingkan total setoran pajak tahun 2022 yang mencapai Rp105,23 miliar.

Peningkatan setoran pajak dapat dipahami sebagai hasil langsung dari pertumbuhan pendapatan Perusahaan pada tahun 2023. Adanya peningkatan pendapatan tersebut secara positif mempengaruhi kemampuan Perusahaan untuk memberikan kontribusi yang lebih besar kepada negara dalam bentuk pembayaran pajak. Dengan demikian, tindakan ini tidak hanya mencerminkan kepatuhan perusahaan terhadap aturan perpajakan yang berlaku, tetapi juga menunjukkan peran aktif perusahaan dalam mendukung pembangunan ekonomi dan sosial negara.

The Company always fulfills its commitment to state obligations and its role as a taxpayer in fulfilling tax obligations, as a form of participation in developing the nation.

In 2023, the Company carried out its obligations to report and pay taxes on time and in accordance with applicable regulations. The total tax payments made was Rp163.61 billion, an increase of 55.47% compared to the total tax payments in 2022 of Rp105.23 billion.

The increase in tax payments can be illustrated as a direct result of Company's revenue growth in 2023. The revenue increase had positively affected the Company's ability to make a greater tax payment contribution to the state. Thus, this action not only shows the company's compliance with applicable tax regulations, but also demonstrates the company's active role in supporting the country's economic and social development.

Tabel Setoran Pajak Tahun 2022-2023 (Rp Juta)
Table of Tax Payments in 2022-2023 (Rp Million)

Uraian Description	2022	2023	Pertumbuhan Growth	
			Nominal Nominal	Persentase Percentage
PPH Pasal 21 Income Tax 21	39.088	75.369	36.281	92,82%
Pajak Kini Current Tax	25.720	27.117	1.397	5,43%
PBB Land and Building Tax	4.675	4.543	(132)	(2,82%)
Pajak Kendaraan Bermotor Vehicle Tax	859	865	6	0,70%
Pajak Final Final Tax	33.559	54.806	21.247	63,31%
Pajak Daerah/Retribusi Local Taxes/Repayments	1332	908	(424)	(31,83%)
Total	105.233	163.608	58.375	55,47%

PERBANDINGAN ANTARA TARGET 2023, REALISASI 2023 DAN PROYEKSI 2024

COMPARISON BETWEEN 2023 TARGET, 2023 REALIZATION, AND 2024 PROJECTION

PERBANDINGAN ANTARA TARGET, REALISASI, DAN PROYEKSI KINERJA OPERASIONAL

Perusahaan secara berkala melakukan proses evaluasi kinerja operasional sebagai upaya untuk menetapkan arahan dan inisiatif strategis Perusahaan dalam mencapai target dan mengoptimalkan pertumbuhan kinerja di masa depan. Evaluasi kinerja operasional dapat tercermin melalui berbagai parameter produksi baik untuk segmen pelabuhan, penyeberangan maupun usaha aneka jasa.

Pencapaian terhadap target tahun 2023 menjadi landasan bagi proyeksi kinerja operasional perusahaan pada tahun 2024. Dengan menguraikan secara komprehensif hasil pencapaian tersebut, dapat diidentifikasi potensi-potensi perbaikan dan pengembangan dalam rangka mencapai tujuan perusahaan secara berkelanjutan.

Target, Realisasi, dan Proyeksi Segmen Penyeberangan

Kinerja segmen penyeberangan selama tahun 2023 mengalami peningkatan dibandingkan capaian kinerja tahun 2022, meskipun secara pencapaian target belum seluruhnya dapat memenuhi target yang telah ditetapkan dalam RKAP. Uraian lengkap mengenai perbandingan antara target, realisasi, dan proyeksi segmen penyeberangan disajikan dalam tabel berikut:

COMPARISON BETWEEN OPERATIONAL PERFORMANCE TARGET, REALIZATION, AND PROJECTION

The Company periodically evaluates operational performance to determine the Company's strategic direction and initiatives in achieving targets and optimizing future performance growth. Evaluation of operational performance is shown through various production parameters for port, ferry and miscellaneous service business segments.

Achieving the 2023 target served as foundation for projecting the company's 2024 operational performance. Through comprehensive examination of the achieved results, potential improvements and developments can be identified to achieve the company's goals in a sustainable manner.

Target, Realization, and Projection of Ferry Transportation Segment

The performance of the ferry transportation segment during 2023 increased compared to 2022 performance, although the achievement did not meet all targets set in the WPB. The complete description of the comparison between target, realization, and projection of ferry transportation segments is presented in the following table:

Tabel Perbandingan Target, Realisasi, dan Proyeksi Kinerja Segmen Penyeberangan
Comparison Table of Target, Realization, and Projection of Ferry Transportation Segment Performance

Keterangan Description	Unit	Target RKAP 2023 2023 WPB Target	Realisasi 2023 2023 Realization	Pencapaian (%) Achievement (%)	Proyeksi Tahun 2024 2024 Projection	Target Pertumbuhan (%) Growth Target (%)
Trip		378,222	323,668	85,58%	351,077	8,47%
Penumpang Passenger	Orang Person	8.334.077	6.505.663	78,06%	7.441.179	14,38%
Kendaraan Roda 2 dan 3 2-Wheeled and 3-Wheeled Vehicles	Unit Unit	4.737.016	4.177.538	88,19%	4.637.910	11,02%
Kendaraan Roda >4 >4-Wheeled Vehicles	Unit Unit	5.350.459	4.483.918	83,80%	5.029.515	12,17%
Barang Goods	Ton Tons	1.983.899	997.211	50,27%	1.464.251	46,83%

Realisasi jumlah trip penyeberangan pada tahun 2023 sebesar 323.668 trip, dengan capaian terhadap target pada RKAP mencapai 85,58%. Jumlah penumpang mencapai 6,51 juta orang, mencapai 78,06% dari target pada RKAP. Jumlah kendaraan roda 2 dan 3 sebanyak 4,18 juta unit, mencapai 88,19% dari target pada RKAP. Jumlah kendaraan roda 4 atau lebih sebanyak 4,48 juta unit, mencapai 83,80% dari target pada RKAP. Sementara itu muatan barang tercatat sebesar 997,21 ribu ton, mencapai 50,27% dari target pada RKAP.

Tidak tercapainya target pada beberapa parameter produksi disebabkan oleh beberapa faktor internal dan eksternal di antaranya adalah adanya *emergency docking* pada 3 unit kapal, pembatasan jam operasional untuk muatan kendaraan roda 2 dan 3, peralihan arus penyeberangan melalui pelabuhan lain saat momen mudik Lebaran dan faktor kompetisi yang semakin tinggi menyebabkan terbaginya pangsa pasar sesuai dengan jadwal yang ditetapkan oleh otoritas terkait.

Pada tahun 2024, Perusahaan menargetkan pertumbuhan jumlah trip sebesar 8,47%, peningkatan penumpang sebesar 14,38%, kendaraan roda 2 dan 3 tumbuh 11,02%, kendaraan roda 4 atau lebih tumbuh 12,17% dan muatan barang tumbuh 46,83%. Hal ini seiring dengan proyeksi pasar segmen penyeberangan yang diproyeksikan tumbuh positif dan strategi Perusahaan dalam meningkatkan aspek keselamatan dan layanan untuk penumpang.

Realized ferry trips in 2023 was 323,668 trips, achieving 85.58% of the target set in WPB. The number of passengers reached 6.51 million people, which met 78.06% of WPB target. The number of two and three-wheeled vehicles was 4.18 million units, 88.19% of the target in the WPB. The four-wheeled or more vehicles totaled 4.48 million units, which was 83.80% of WPB target. Meanwhile, the cargo was recorded at 997.21 thousand tons, or 50.27% of the target set in the WPB.

Several targeted production parameters fell short of target due to internal and external factors, which include emergency docking on 3 units of ship, restrictions on operational hours for two and three-wheeled vehicle, reroute in ferry line through other ports during the Eid holiday, and fiercer competition. These factors contributed to split market share following the schedule set by the relevant authorities.

In 2024, the Company targets a growth of 8.47% in the number of trips, an increase of 14.38% in passengers, 11.02% growth in two and three-wheeled vehicles, 12.17% growth in four-wheeled or more vehicles, and 46.83% growth in cargo. This is in line with the market projection in ferry transportation segment that forecast positive growth and with the Company's strategy to improve passengers' safety and customer service.

Target, Realisasi, dan Proyeksi Segmen Pelabuhan

Kinerja segmen pelabuhan selama tahun 2023 mengalami peningkatan dibandingkan capaian kinerja tahun 2022, meskipun secara pencapaian target belum seluruhnya dapat memenuhi target yang telah ditetapkan dalam RKAP. Uraian lengkap mengenai perbandingan antara target, realisasi, dan proyeksi segmen pelabuhan disajikan dalam tabel berikut:

Target, Realization, and Projection of Port Segment

The performance of the port segment during 2023 increased compared to the performance achieved in 2022, although not all of the targets met the targets set in the WPB. The complete description of the comparison between targets, realization, and projection for port segment is presented in the following table:

Tabel Perbandingan Target, Realisasi, dan Proyeksi Kinerja Segmen Pelabuhan
Comparison Table of Port Segment Performance Targets, Realizations, and Projections

Keterangan Description	Unit	Target RKAP 2023 2023 WPB Target	Realisasi 2023 2023 Realization	Pencapaian (%) Achievement (%)	Proyeksi Tahun 2024 2024 Projection	Target Pertumbuhan (%) Growth Target (%)
Jasa Sandar Docking Services	GRT- Call	1.095.908.890	997.786.012	91,05%	1.189.133.869	19,18%
Pas Pelabuhan Penumpang Passenger Pass	Orang Person	5.938.180	5.166.438	87,00%	5.574.203	7,89%
Pas Pelabuhan Kendaraan Vehicle Pass	Unit Unit	15.476.662	13.140.673	84,91%	14.705.667	11,91%
Pas Pelabuhan Jasa Parkir Port Parking Services Pass	Unit Unit	282.844	210.868	74,55%	240.863	14,22%
Jasa Pemeliharaan Dermaga Dock Maintenance Services	Unit Unit	15.476.662	13.140.673	84,91%	14.705.667	11,91%

Realisasi jasa sandar pada tahun 2023 sebesar 997,78 juta GRT-Call, dengan capaian terhadap target RKAP mencapai 91,05%. Pas pelabuhan penumpang mencapai 5,17 juta orang, mencapai 87% dari target pada RKAP. Pas pelabuhan kendaraan sebesar 13,24 juta unit, mencapai 84,91% dari target pada RKAP. Pas pelabuhan jasa parkir sebesar 210,86 ribu, mencapai 74,55% dari target pada RKAP. Sementara jasa pemeliharaan dermaga sebesar 13,14 juta unit, mencapai 84,91% dari target pada RKAP.

Realization of docking services in 2023 was 997.78 million GRT-Call, which achieved 91.05% of WPB target. Passenger pass reached 5.17 million people, 87% of the WPB target. Vehicle pass amounting to 13.24 million units, met 84.91% of the target set in WPB. Parking service pass totaled 210.86 thousand, or 74.55% of the target set in WPB. Meanwhile, dock maintenance services was 13.14 million units, which was 84.91% of the target in the WPB.

Tidak tercapainya target pada beberapa parameter produksi disebabkan oleh faktor penutupan dermaga di beberapa pelabuhan yang sedang dilakukan perbaikan terutama disebabkan oleh adanya benturan maupun tubrukan dari kapal-kapal yang bersandar di dermaga pelabuhan. Kondisi tersebut menyebabkan hilangnya hari kerja pada dermaga yang terdampak.

Pada tahun 2024, Perusahaan menargetkan pertumbuhan jasa sandar sebesar 19,18%, peningkatan pas pelabuhan penumpang sebesar 7,89%, pas pelabuhan kendaraan tumbuh 11,91%, pas pelabuhan jasa parkir tumbuh 14,22% dan jasa pemeliharaan tumbuh 11,91%. Hal ini seiring dengan proyeksi pasar segmen pelabuhan yang diproyeksikan tumbuh positif dan strategi Perusahaan dalam meningkatkan aspek keselamatan dan layanan untuk penumpang dan pengguna jasa.

PERBANDINGAN ANTARA TARGET, REALISASI, DAN PROYEKSI KINERJA KEUANGAN

Perusahaan melakukan evaluasi atas pencapaian kinerja keuangan yang dilakukan secara berkala untuk memastikan pencapaian target yang telah ditetapkan. Evaluasi kinerja keuangan terutama dilakukan pada posisi keuangan dan laba rugi Perusahaan.

Target, Realisasi dan Proyeksi Posisi Keuangan

Evaluasi atas realisasi posisi keuangan dilakukan dengan melakukan evaluasi pada seluruh pos neraca Perusahaan. Pada tahun 2023, posisi keuangan Perusahaan tercatat mengalami peningkatan pada beberapa pos keuangan, meskipun tidak seluruhnya mencapai target yang telah ditetapkan.

The underachieved targets on several production parameters were due to by dock closure at several ports for reparation works, specifically due to impacts or collisions from ships docked at the port. The condition caused lost work days at the affected docks.

In 2024, the Company targets 19.18% growth in docking services, 7.89% increase in passenger pass, 11.91% growth in vehicle pass, 14.22% growth in parking service, and 11.91% growth in maintenance services. This is in line with the projection in port segment market which is forecasted to grow positively and with the Company's strategy to improve safety and service aspects for passengers and customers.

COMPARISON BETWEEN FINANCIAL PERFORMANCE TARGETS, REALIZATION, AND PROJECTIONS

The Company evaluated its financial performance achievements periodically to ensure the achievement of the established targets. Evaluation of financial performance is mainly on the Company's financial position as well as profit and loss.

Target, Realization, and Projection of Financial Position

Evaluation of the realized financial position is carried out on all of the Company's balance sheet items. In 2023, the Company's financial position was recorded to have improved in several financial posts, although not all of them achieved the established targets.

Tabel Target, Realisasi, dan Proyeksi Posisi Keuangan (Rp Juta)

Table of Targets, Realization, and Projections of Financial Position (Rp Million)

Uraian Description	Target RKAP 2023 2023 WPB Target	Realisasi 2023 2023 Realization	Capaian (%) Achievement (%)	Proyeksi 2024 2024 Projection
Aset Lancar Current Assets	1.969.837	1.949.764	98,98%	2.249.012
Aset Tidak Lancar Non-Current Assets	9.965.236	9.105.937	91,38%	9.957.408
Total Aset Total Assets	11.935.073	11.055.701	92,63%	12.206.420
Liabilitas Jangka Pendek Current Liabilities	927.113	1.213.186	130,86%	860.135
Liabilitas Jangka Panjang Non-Current Liabilities	2.861.803	1.457.803	50,94%	2.476.349
Total Liabilitas Total Liabilities	3.788.916	2.670.989	70,49%	3.336.484
Ekuitas Equity	8.146.157	8.384.712	102,93%	8.869.936
Jumlah Liabilitas dan Ekuitas Total Liabilities and Equity	11.935.073	11.055.701	92,63%	12.206.420

Realisasi posisi total aset pada tahun 2023 sebesar Rp11,05 triliun, mencapai 92,63% dari target pada RKAP. Realisasi tersebut terutama dipengaruhi oleh kenaikan aset lancar dan tidak lancar. Total liabilitas tercatat sebesar Rp2,67 triliun, mencapai 70,49% dari target pada RKAP. Realisasi ini terutama disebabkan oleh adanya pencairan kredit sindikasi LPEI NIA – BCA JMLAB senilai Rp705 miliar, peningkatan utang usaha pihak berelasi dan dana pensiun yang diikuti oleh penurunan utang asuransi, utang bank, pinjaman sindikasi, dan liabilitas sewa. Sementara itu, ekuitas Perusahaan tercatat sebesar Rp8,38 triliun, mencapai 102,93% dari target pada RKAP. Realisasi ini terutama disebabkan oleh capaian laba tahun berjalan yang dihasilkan oleh Perusahaan sepanjang tahun 2023.

Selanjutnya pada tahun 2024, Perusahaan memproyeksikan terjadi pertumbuhan pada total aset sebesar 10,41%, liabilitas meningkat sebesar 24,92% dan ekuitas diproyeksikan tumbuh sebesar 5,79%. Proyeksi ini didasarkan pada sejumlah inisiatif strategis yang akan dilakukan oleh Perusahaan sebagai upaya dalam mengoptimalkan pertumbuhan kinerja Perusahaan.

The realized total asset in 2023 was Rp11.05 trillion, which met 92.63% of the target set in the WPB. This realization was primarily impacted by the increase in current and non-current assets. Total liabilities was recorded at Rp2.67 trillion, which reflected 70.49% of WPB target. The realization was mainly due to disbursement of syndicated credit LPEI NIA - BCA JMLAB amounting to Rp705 billion, increased in trade payables from related parties and pension funds, followed by decreased insurance liabilities, bank liabilities, syndicated loans and rental liabilities. Meanwhile, the Company's equity was recorded at Rp8.38 trillion, or 102.93% of WPB target. This realization was mainly due to the current year's profit achieved by the Company throughout 2023.

Furthermore, in 2024, the Company projects growth in total assets of 10.41%, liabilities increase by 24.92% and equity is projected to grow by 5.79%. This projection is based on several strategic initiatives that the Company would implement in efforts to optimize the Company's performance growth.

Target, Realisasi, dan Proyeksi Laba Rugi

Evaluasi atas realisasi laba rugi dilakukan dengan melakukan evaluasi pada seluruh pos laporan laba rugi. Pada tahun 2023, Perusahaan berhasil mencatatkan pertumbuhan kinerja walaupun belum seluruhnya mencapai target pada RKAP.

Target, Realization, and Projection of Profit and Loss

Evaluation of the realized profit and loss is carried out by evaluating all profit and loss items. In 2023, the Company succeeded in recording performance growth even though the targets had not fully achieved according to the WPB.

Tabel Target, Realisasi, dan Proyeksi Laba Rugi (Rp Juta)*Table of Target, Realization, and Projected Profit and Loss (Rp Million)*

Uraian Description	Target RKAP 2023 2023 WPB Target	Realisasi 2023 2023 Realization	Capaian (%) Achievement (%)	Proyeksi 2024 2024 Projection	Pertumbuhan Growth
Pendapatan Revenue	5.565.275	4.924.834	88,49%	5.779.026	17,34%
Beban Pokok Penjualan Cost of Revenue	(3.451.408)	(3.239.785)	93,87%	(3.531.018)	8,99%
Laba Kotor Gross Profit	2.113.866	1.685.048	79,71%	2.248.008	33,41%
Beban Usaha Operating Expenses	(1.222.051)	(930.819)	76,17%	(1.410.636)	51,55%
Laba Usaha Operating Profit	891.815	754.229	84,57%	837.372	11,02%
Pendapatan/Beban Lainnya Other Income/Expenses	(166.926)	(88.349)	52,93%	(68.831)	(22,09%)
Pajak Tax	(31.382)	(29.340)	93,49%	(35.631)	21,44%
Laba Tahun Berjalan Profit for the Year	693.507	636.540	91,79%	732.910	15,14%

Realisasi pendapatan pada tahun 2023 mencapai Rp4,92 triliun, mencapai 88,49% dari target pada RKAP. Realisasi pendapatan ini dipengaruhi faktor internal dan eksternal meliputi adanya emergency docking dan perbaikan infrastruktur dermaga akibat adanya benturan kapal. Pada tahun 2024, pendapatan diproyeksikan dapat tumbuh sebesar 17,34%. Realisasi beban pokok pendapatan mencapai Rp3,24 triliun, mencapai 93,87% dari target pada RKAP. Realisasi laba kotor mencapai Rp1,69 triliun, mencapai 79,71% dari target pada RKAP. Realisasi ini terutama dipengaruhi oleh adanya kenaikan beban pokok pendapatan. Pada tahun 2024, beban pokok pendapatan diproyeksikan meningkat sebesar 8,99%.

Realized revenue in 2023 was Rp4.92 trillion, or 88.49% of the target set in the WPB. The realized revenue was influenced by internal and external factors including emergency docking and dock infrastructure reparations due to ship collisions. In 2024, revenue is projected to grow by 17.34%. Realized cost of revenue was Rp3.24 trillion, or 93.87% of the WPB target. Realized gross profit reached Rp1.69 trillion, or 79.71% of WPB target. The realization was mainly driven by an increase in the cost of revenue. In 2024, cost of revenue is projected to increase by 8.99%.

Realisasi beban usaha sebesar Rp930,82 miliar, mencapai 76,17% dari target pada RKAP. Sementara itu realisasi laba usaha sebesar Rp754,23 miliar,

Realized operating expenses amounting to Rp930.82 billion, or 76.17% of the target set in the WPB. Meanwhile, realized operating

mencapai 84,57% dari target pada RKAP. Beban usaha pada tahun 2024 diproyeksikan meningkat sebesar 51,55%, sementara laba usaha diproyeksikan dapat tumbuh sebesar 11,02%.

Realisasi beban lainnya sebesar Rp88,35 miliar, mencapai 52,93% dari target pada RKAP. Realisasi pajak sebesar Rp29,34 miliar, mencapai 93,49% dari target pada RKAP. Sementara realisasi laba tahun berjalan sebesar Rp636,54 miliar, mencapai 91,79% dari target pada RKAP. Realisasi ini disebabkan oleh beberapa faktor terutama adanya kenaikan pada beban pokok pendapatan dan beban usaha. Pada tahun 2024, laba tahun berjalan diproyeksikan dapat tumbuh sebesar 15,14% seiring dengan dilakukannya strategi optimalisasi pendapatan dan pengendalian biaya.

PERBANDINGAN ANTARA TARGET, REALISASI, DAN PROYEKSI STRUKTUR MODAL

profit was totaled at Rp754.23 billion, or 84.57% of the target in the WPB. Operating expense in 2024 is projected to increase by 51.55%, while operating profit is projected to grow by 11.02%

Realization of other expenses was Rp88.35 billion, or 52.93% of the WPB target. Tax realization totaled at Rp29,34 billion, or 93.49% of the target in the WPB. Meanwhile, realized profit for the year was Rp636.54 billion, or 91.79% of the WPB target. The achievement was affected by several factors, particularly an increase in the cost of revenue and operating expenses. In 2024, profit for the year is projected to grow by 15.14% in line with the implementation of revenue optimization and cost control strategies.

COMPARISON BETWEEN CAPITAL STRUCTURE TARGET, REALIZATION, AND PROJECTION

Uraian Description	Target RKAP 2023 2023 WPB Target		Realisasi 2023 2023 Realization		Pencapaian (%) Achievement (%)	Proyeksi Tahun 2024 2024 Projection	
	Nominal (Rp Juta) Nominal (Rp Million)	Komposisi (%) Composition (%)	Nominal (Rp Juta) Nominal (Rp Million)	Komposisi (%) Composition (%)		Nominal (Rp Juta) Nominal (Rp Million)	Persentase (%) Percentage (%)
Liabilitas Liabilities	3.788.916	31.75%	2.670.989	24,16%	70,49%	3.336.484	27,33%
Ekuitas Equity	8.146.157	68.25%	8.384.712	75,84%	102,93%	8.869.936	72,67%
Aset Asset	11.935.073	100%	11.055.701	100,00%	92,63%	12.206.420	100,00%

Pada tahun 2023, aset Perusahaan yang dibiayai oleh liabilitas mencapai 24,16%, lebih rendah dibandingkan dengan target pada RKAP yang mencapai 31,75%. Sementara itu, aset yang dibiayai oleh ekuitas mencapai 75,84%, lebih tinggi dibandingkan target pada RKAP yang mencapai 68,25%. Untuk tahun 2024, Perusahaan memproyeksikan perbandingan antara liabilitas dan ekuitas terhadap aset masing-masing sebesar 27,33% dan 72,67%.

In 2023, the amount of Company's assets financed by liabilities was 24.16%, lower than the target set in WPB at 31.75%. Meanwhile, assets financed by equity amounted to 75.84%, higher than the target in WPB at 68.25%. For 2024, the Company projected a ratio of liabilities and equity to assets of 27.33% and 72.67% respectively.

PERBANDINGAN ANTARA TARGET, REALISASI, DAN PROYEKSI PENGEMBANGAN SDM

Keberhasilan dalam pengembangan SDM dapat tercermin melalui pencapaian nyata dalam mencapai sasaran finansial yang telah ditentukan dalam konteks pendidikan dan pelatihan yang telah ditetapkan oleh Perusahaan. Evaluasi terhadap pencapaian realisasi anggaran pelatihan dan pengembangan tahun 2023, bersamaan dengan proyeksi biaya pelatihan tahun 2024, diuraikan secara rinci sebagai berikut:

COMPARISON BETWEEN HR DEVELOPMENT TARGET, REALIZATION, AND PROJECTION

Accomplishments in human resource development can be concluded by looking into the success rate in meeting financial targets, from which the context of education and training were set forth by the Company. Evaluation of the realized 2023 training and development budget, along with 2024 projected training costs, is described in detail as follows:

(Dalam Juta Rupiah)
(In Million Rupiah)

Keterangan Description	Target RKAP 2023 WPB Target	Realisasi 2023 2023 Realization	Pencapaian (%) Achievement (%)	Proyeksi 2024 2024 Projection	Target Pertumbuhan (%) Growth Target (%)
Total Anggaran Total Budget	20.763	19.063	91,81%	33.192	74,12%

Realisasi anggaran pelatihan dan pengembangan SDM pada tahun 2023 sebesar Rp19,06 miliar, mencapai 91,81% dari target pada RKAP. Sementara itu Perusahaan memproyeksikan kenaikan anggaran pelatihan, dan pengembangan SDM untuk tahun 2024 mencapai 74,12% menjadi Rp33,19 miliar seiring dengan komitmen Perusahaan untuk meningkatkan dan mengembangkan kapabilitas SDM untuk dapat berperan dalam mengoptimalkan kinerja Perusahaan serta memberikan pelayanan terbaik kepada penumpang dan pengguna jasa.

The realization of the HR training and development budget in 2023 was Rp19.06 billion, or 91.81% of the WPB target. Meanwhile, the Company projected budget increase for 2024 HR training and development to reach 74.12%, or Rp33.19 billion, parallel with the Company's commitment to improve and develop people's capabilities to optimize the Company's performance while providing the best service to passengers and customers.

PERBANDINGAN ANTARA TARGET, REALISASI, DAN PROYEKSI ASPEK PEMASARAN

Perusahaan melakukan evaluasi atas efektivitas dari strategi pemasaran yang telah dilakukan sepanjang tahun 2023. Hal ini dilakukan sebagai upaya untuk memastikan kesesuaian strategi dengan target yang ditetapkan oleh Perusahaan, serta menjadi landasan untuk menetapkan strategi pemasaran di tahun selanjutnya.

COMPARISON BETWEEN TARGET, REALIZATION, AND PROJECTION ON MARKETING ASPECTS

The Company evaluated the effectiveness of the marketing strategy carried out throughout 2023. It was performed in efforts to ensure the strategy suitability with the targets set by the Company, as well as in building a groundwork to determine future marketing strategy for the coming years. Evaluation of the marketing aspect can

Evaluasi terhadap aspek pemasaran dapat diukur melalui pertumbuhan pangsa pasar Perusahaan dalam bisnis pelabuhan dan penyeberangan yang menjadi indikator keberhasilan Perusahaan dalam mengembangkan pangsa pasarnya.

be measured through the growth of the Company's market share in the port and ferry businesses, which are the Company's success indicators in developing its market share.

Uraian Description	Target RKAP 2023 2023 WPB Target	Realisasi 2023 2023 Realization	Pencapaian (%) Achievement (%)	Proyeksi 2024 2024 Projection
Pangsa Pasar (%) Market Share (%)	31,40%	33,55%	106,85%	34,82%

Pada tahun 2023, realisasi pangsa pasar Perusahaan mencapai 33,55%, mencapai 106,85% dari target pada RKAP yang ditetapkan sebesar 31,40%. Pada tahun 2024, Perusahaan memiliki optimisme untuk dapat meningkatkan pangsa pasar hingga mencapai 34,82%.

In 2023, the Company's realized market share was 33.55%, or 106.85% of the target set in the WPB at 31.40%. In 2024, the Company is optimistic to increase its market share to 34.82%.

PROYEKSI KEBIJAKAN DIVIDEN

Perusahaan menetapkan kebijakan dividen sesuai dengan hasil RUPS dan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga Perusahaan tidak dapat menetapkan proyeksi atas pembagian dividen di tahun selanjutnya.

PROJECTION ON DIVIDEND POLICY

The Company determines its dividend policy according to the GMS decisions and also applicable laws and regulations. Such is that the Company made no projection for dividend distribution in the subsequent year.

TINGKAT KESEHATAN PERUSAHAAN DAN REALISASI PENCAPAIAN KPI

COMPANY HEALTH LEVEL AND REALIZATION OF KPI ACHIEVEMENT

TINGKAT KESEHATAN PERUSAHAAN

Perusahaan memastikan tingkat kesehatan perusahaan selalu terjaga dan terus mengalami perbaikan seiring dengan perkembangan Perusahaan. Tingkat kesehatan Perusahaan juga menjadi salah satu indikator dalam penilaian kinerja Direksi yang ditetapkan dalam kontrak manajemen maupun RKAP. Adapun upaya yang dilakukan oleh Perusahaan dalam memastikan Tingkat Kesehatan Perusahaan yaitu melalui penerapan strategi keuangan dengan prinsip kehati-hatian, penguatan aspek operasional dan administrasi Perusahaan serta pemantauan dan evaluasi kesehatan Perusahaan secara internal maupun eksternal secara berkala.

Pada tahun 2023, tingkat kesehatan perusahaan berada pada level "AA+" termasuk ke dalam kategori "Sehat". Tingkat Kesehatan Perusahaan ini meningkat dibandingkan tahun 2022 yang berada pada level "AA".

COMPANY HEALTH LEVEL

The Company ensures that the company health level is always maintained and improved as the Company grows. Company health level is one of the indicators in Board of Directors performance appraisal, as stipulated in the management contract and the WPB. The Company maintains the company health through prudent implementation of financial strategies, strengthened operations and administrations as well as regular monitoring and evaluation of company health, internally and externally.

In 2023, the Company's Health Level was rated "AA+", classified within the "Healthy" category. This represents an improvement from 2022, where it was rated "AA".

PENCAPAIAN KEY PERFORMANCE INDICATOR

Perusahaan memiliki ukuran dalam mengevaluasi pencapaian kinerja setiap tahunnya melalui *Key Performance Indicator* (KPI). Indikator dan target yang disusun sebagai KPI didasarkan pada aspirasi pemegang saham yaitu Kementerian BUMN yang selanjutnya ditetapkan melalui kontrak manajemen RKAP. Pada tahun 2023, KPI korporat terdiri atas 5 (lima) perspektif yang pada masing-masing perspektif tersebut diturunkan menjadi indikator dengan pengukuran melalui bobot dan target yang hendak dicapai. Realisasi atas pencapaian KPI pada tahun 2023 disajikan secara rinci pada tabel berikut:

ACHIEVEMENT OF KEY PERFORMANCE INDICATORS

The Company has a set of measurements in evaluating annual performance achievements through Key Performance Indicators (KPI). The indicators and targets from which KPIs were set were based on the Ministry of SOEs' aspirations as the shareholder, which then determined in the WPB of management contract. In 2023, KPI of the corporate consisted of 5 (five) perspectives, each of which was summarised into an indicator with achievables measured in scores and targets. The realized KPI achievements in 2023 is presented in detail in the following table:

Tabel Pencapaian Key Performance Indicator Korporat Tahun 2023
Table of Corporate Key Performance Indicator Achievements in 2023

No	Indikator Indicator	Satuan Unit	Target Tahunan Annual Target	Polaritas Polarity	Bobot Weight	Realisasi Tahunan Annual Realization	Pencapaian Tahunan Annual Achievement	%MAX (110%)	Tahunan Annual
KPI KORPORAT CORPORATE KPI									
NILAI EKONOMI DAN SOSIAL UNTUK INDONESIA ECONOMIC AND SOCIAL VALUE FOR INDONESIA					45				45,64
FINANSIAL FINANCIAL									
1.	EBITDA	Rupiah (Triliun) Rupiah (Trillion)	1,45	Maximize	8	1,08	74,48%	74,48%	5,96
2.	Perbandingan ROIC Terhadap WACC ROIC to WACC Ratio	Persentase Percentage	1,16%	Maximize	8	1,22%	105,17%	105,17%	8,41
3a.	Interest Bearing Debt to Invested Capital	Persentase Percentage	27,61%	Minimize	8	15,72%	143,06%	110,00%	8,80
3b.	Interest Bearing Debt to EBITDA	Kali Times	1,93	Minimize	7	1,45	124,87%	110,00%	7,70
OPERASIONAL OPERATIONAL									
4.	Penataan Pelabuhan (Zonasi) Port Arrangement (Zoning)	Pelabuhan Port	8	Maximize	7	9	112,50%	110,00%	7,70
SOSIAL SOCIAL									
5.	Pemenuhan Trip Subsidi Accomplishment of Subsidized Trips	Trip	97.656	Maximize	7	98.642	101,01%	101,01%	7,07
INOVASI MODEL BISNIS BUSINESS MODEL INNOVATION					15				16,41
6	Kerja Sama Korporat Corporate Partnership	Rupiah (Miliar) Rupiah (Billion)	450	Maximize	5	587	130,44%	110,00%	5,50
7.	Market Share	%	31%	Maximize	5	33,55%	108,23%	108,23%	5,41
8.	Produksi Kendaraan Vehicle Production	Unit	7.209.890	Maximize	5	8.661.230	120,13%	110,00%	5,50
KEPEMIMPINAN DAN TEKNOLOGI LEADERSHIP AND TECHNOLOGY					10				11,00
9.	Digitalisasi Manajemen Pemeliharaan Kapal dan Pelabuhan Digitalization of Ship and Port Maintenance Management	Persentase Percentage	100%	Maximize	5	112%	112,00%	110,00%	5,50
10.	IT Maturity Level IT Maturity Level	Level Level	3	Maximize	5	3,3	110,00%	110,00%	5,50
PENINGKATAN INVESTASI INCREASED INVESTMENT					10				11,00
11	Investasi Rehabilitasi atau Revitalisasi Kapal dan Pelabuhan Investment in Vessel and Port Rehabilitation or Revitalization	Kapal Vessel Dermaga Dock	2 4	Maximize	5	7	116,67%	110,00%	5,50
12	Proyek Bakauheni Bakauheni Harbour City Project	Persentase Percentage	100%	Maximize	5	110%	110,00%	110,00%	5,50

No	Indikator Indicator	Satuan Unit	Target Tahunan Annual Target	Polaritas Polarity	Bobot Weight	Realisasi Tahunan Annual Realization	Pencapaian Tahunan Annual Achievement	%MAX (110%)	Tahunan Annual
PENGEMBANGAN TALENTA TALENT DEVELOPMENT					20				21,83
13a	Rasio Perempuan dalam <i>Nominated Talent</i> Ratio of Female in Nominated Talent	Persentase Percentage	16%	Maximize	4	29,00%	181,25%	110,00%	4,40
13b	Rasio Milenial (≤ 42 Tahun) dalam <i>Nominated Talent</i> Ratio of Millennial (≤42 Years Old) in Nominated Talent	Persentase Percentage	27%	Maximize	4	28,57%	105,81%	105,81%	4,23
14	Penyelesaian Roadmap Penyehatan Dana Pensiun Manfaat Pasti Completion of the Roadmap for Restructuring Retirement Funds Fixed Benefit	Persentase Percentage	100%	Maximize	6	110,00%	110,00%	110,00%	6,60
15	Rasio Pemenuhan Kualifikasi Organ Pengelola Risiko (Rasio Kualifikasi) Qualification Ratio of Risk Management	Persentase Percentage	40%	Maximize	6	100,00%	250,00%	110,00%	6,60
TOTAL SKOR TOTAL SCORE					100				105,88

KEBIJAKAN DIVIDEN

DIVIDEND POLICY

KEBIJAKAN PEMBAGIAN DIVIDEN

Perusahaan melakukan pembagian dividen sebagai hasil dari perolehan laba, sesuai dengan peraturan yang berlaku antara lain mengacu pada Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Pasal 26 Anggaran Dasar Perusahaan yang mengatur tentang Penggunaan Laba. Pengaturan dan penetapan terhadap pembagian dividen dilakukan berdasarkan keputusan melalui RUPS. Pada prinsipnya, pembagian dividen hanya dilakukan apabila perusahaan mencatatkan laba yang positif.

POLICY ON DIVIDEND DISTRIBUTION

The Company distributes dividends originating from profit according to applicable regulations, one of which is Law No. 40/2007 concerning Limited Liability Companies and Company's Articles of Association Article 26 that regulates the Use of Profits. Arrangements and decision on dividend distribution are carried out according to the GMS decisions. In principle, dividend distribution only materializes when the company records positive profit.

RINCIAN PEMBAGIAN DIVIDEN

Pembagian dividen untuk tahun 2023 dilakukan sesuai dengan keputusan dalam RUPS yang disesuaikan dengan jumlah laba yang diperoleh untuk menjaga struktur permodalan yang optimal. Rincian pembagian dividen selama 5 tahun terakhir tersaji dalam tabel berikut:

DETAILS OF DIVIDEND DISTRIBUTION

Dividend distribution for 2023 was carried out in accordance with the GMS decisions, which would allocate profit to uphold an optimal capital structure. Details of dividend distribution for the last 5 years are presented in the following table:

Tabel Pembagian Dividen Tahun 2019-2023
Table of Dividend Distribution for 2019-2023

Keterangan Description	Tahun Buku Financial Year				
	2019	2020	2021	2022	2023
Laba bersih yang diatribusikan kepada entitas induk (Rp Juta) Net income attributed to the parent entity (Rp Million)	351.335	162.397	325.453	563.765	613.449
Persentase Dividen (%) Dividend Percentage (%)	-	-	-	17,92%	
Dividen yang Dibagikan (Rp Juta) Appropriated Dividends (Rp Million)	-	-	-	101.000	
Dividen per Lembar (Rp Juta) Dividend per Share (Rp Million)	-	-	-	101.000	
Pay Out Ratio Pay Out Ratio	-	-	-	17,92%	
Tanggal Pengumuman Dividen Date of Dividend Announcement	-	-	-	26 Juni 2023	
Tanggal Pembayaran Dividen Date of Dividend Payout	-	-	-	20 Juli 2023	

IKATAN MATERIAL UNTUK INVESTASI BARANG MODAL

MATERIAL COMMITMENTS FOR CAPITAL INVESTMENT

Sepanjang tahun 2023, Perusahaan tidak memiliki ikatan material untuk investasi barang modal baik dengan pihak ketiga maupun pihak berelasi.

Throughout 2023, the Company did not have material commitments for capital investment with either third parties or related parties.

INVESTASI BARANG MODAL

CAPITAL INVESTMENT

Perusahaan melakukan investasi sebagai salah satu langkah untuk melakukan pengembangan usaha, mendukung kinerja operasional, dan meningkatkan kualitas pelayanan kepada pengguna jasa. Investasi barang modal dilakukan dalam bentuk aset tetap berupa tanah, bangunan kantor atau rumah dinas, bangunan pelabuhan, armada kapal, kendaraan, peralatan kantor, dan aset tetap dalam konstruksi.

The Company utilized investment as a method to expand the business, support operational performance, and enhance service quality for customers. These capital investments are realized in the form of fixed assets such as land, office buildings or official residences, port facilities, fleets of ships, vehicles, office equipment, and assets under construction.

Pada tahun 2023, realisasi investasi barang modal mencapai Rp1,39 triliun, menurun sebesar 19,57% dibandingkan realisasi investasi barang modal tahun 2022 sebesar Rp1,74 triliun. Realisasi investasi barang modal secara rinci tersaji dalam tabel di bawah ini:

In 2023, realized capital investment was Rp1.39 trillion a decrease of 19.57% compared to 2022 of Rp1.74 trillion. The detailed of realized capital investment is presented in the table below:

Tabel Realisasi Investasi Barang Modal Tahun 2022-2023 (Rp Juta)
Table of Realized Fixed Assets Investment for 2022-2023 (Rp Million)

Uraian Description	2022	2023	Pertumbuhan Growth	
			Nominal Nominal	Persentase Percentage
Investasi Induk Perusahaan Holding Company Investment				
Fasilitas, Akomodasi, Peralatan, dan Permesinan Alat Produksi Facilities, Accommodation, Equipment and Production Machinery	597.570	1.077.206	479.636	80,26%
Tanah, Bangunan, dan Peralatan Kerja Perkantoran Lands, Buildings, and Office Equipments	248.491	227.109	(21.382)	(8,60%)
Instalasi, Jaringan, dan Teknologi Installation, Network, and Technology	22.998	66.667	43.669	189,88%
Total Investasi Induk Perusahaan Total Holding Company Investment	869.059	1.370.982	501.923	57,75%
Investasi Anak Perusahaan Subsidiary Investment				
Investasi Anak Perusahaan Subsidiary Investment	869.059	26.981	(842.078)	(96,90%)
Total Investasi Konsolidasi Total Consolidated Investment	1.738.118	1.397.963	(340.155)	(19,57%)

INFORMASI TRANSAKSI MATERIAL YANG MENGANDUNG BENTURAN KEPENTINGAN

INFORMATION ON MATERIAL TRANSACTIONS CONTAINING A CONFLICT OF INTEREST

TRANSAKSI MATERIAL YANG MENGANDUNG BENTURAN KEPENTINGAN

Sepanjang tahun 2023, tidak terdapat transaksi yang melibatkan konflik kepentingan yang terdeteksi, sehingga tidak terdapat informasi yang dapat diidentifikasi terkait hal tersebut. Seluruh aktivitas transaksional pada periode tersebut telah dilakukan dengan ketat sesuai dengan standar etika dan kebijakan internal yang berlaku. Dengan kepatuhan yang ketat terhadap prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik, tidak ada kejadian atau insiden yang menunjukkan adanya konflik kepentingan yang berdampak negatif.

MATERIAL TRANSACTIONS CONTAINING CONFLICTS OF INTEREST

Throughout 2023, the Company did not detect any transactions involving conflicts of interest, as such there was no identifiable information on this matter. All transactional activities during the period had been carried out in strict accordance with applicable ethical standards and internal policies. With strict adherence to the principles of good corporate governance, there were no event or incident that indicates any conflict of interest that impacts negatively.

TRANSAKSI MATERIAL DENGAN PIHAK AFILIASI/BERELASI

Pihak-Pihak Berelasi

Pihak berelasi merujuk kepada individu atau entitas yang memiliki keterkaitan dengan entitas pelapor. Dalam konteks ini, entitas pelapor merujuk pada organisasi atau badan hukum yang sedang mengajukan laporan. Pihak berelasi yaitu sebagai berikut:

1. Seseorang atau anggota keluarganya dianggap memiliki keterkaitan dengan entitas pelapor jika:
 - Memiliki kendali atau kendali bersama atas entitas pelapor,
 - Mempunyai pengaruh yang signifikan atas entitas pelapor atau entitas yang melaporkan, atau
 - Menjabat sebagai personel manajemen kunci di entitas pelapor atau entitas yang mengendalikan entitas pelapor.
2. Suatu entitas dianggap berhubungan dengan entitas pelapor jika memenuhi salah satu kondisi berikut:
 - Entitas dan entitas pelapor menjadi bagian dari kelompok usaha yang sama (termasuk entitas induk, entitas anak, dan seterusnya),
 - Suatu entitas menjadi entitas asosiasi atau ventura bersama dari entitas lain (atau menjadi anggota kelompok usaha bersama dengan entitas lain tersebut),
 - Kedua entitas terlibat sebagai ventura bersama dari pihak ketiga yang sama,
 - Suatu entitas menjadi ventura bersama dari entitas ketiga, dan entitas lain menjadi entitas asosiasi dari entitas ketiga tersebut,
 - Entitas tersebut menjadi program imbalan pasca kerja untuk imbalan kerja dari entitas pelapor atau entitas terkait dengan entitas pelapor. Jika entitas pelapor menjadi penyelenggara program tersebut, maka entitas sponsor juga dianggap berhubungan dengan entitas pelapor,
 - Entitas yang dikendalikan atau dikendalikan bersama oleh individu yang disebutkan dalam poin (1),

MATERIAL TRANSACTIONS WITH AFFILIATED/RELATED PARTIES

Related Parties

Related parties refer to individuals or entities that are related to the reporting entity. In this context, reporting entity refers to the organization or legal entity that is submitting this report. Related parties are as follows:

1. A person or their family member is considered to be related to the reporting entity if:
 - Has control or joint control over the reporting entity,
 - Has significant influence over the reporting or reported entity, or
 - Serves as key management personnel at the reporting entity or the entity that controls the reporting entity.
2. An entity is considered related to the reporting entity if it meets one of the following conditions:
 - The entity and the reporting entity are part of the same business group (including parent entity, subsidiary entity, and so on),
 - An entity becomes an associated entity or joint venture of another entity (or becomes a member of a joint corporation with the other entity),
 - Both entities are involved as joint ventures of the same third party,
 - An entity becomes a joint venture of the third entity, and another entity becomes an associate entity of that third entity,
 - The entity has pension program for employee benefits of the reporting entity or of an entity related to the reporting entity. If the reporting entity is the program organizer, then the sponsoring entity is considered to be related to the reporting entity,
 - Entities controlled or jointly controlled by the individual mentioned in point (1),

- Individu yang disebutkan dalam poin (1) memiliki pengaruh signifikan atas entitas atau personel manajemen kunci di entitas (atau entitas yang mengendalikan entitas tersebut), atau
- Entitas atau anggota kelompok di mana entitas menjadi bagian dari kelompok tersebut, memberikan jasa personel manajemen kunci kepada entitas pelapor atau entitas yang mengendalikan entitas pelapor.

- The individual mentioned in point (1) has significant influence over the entity or key management personnel at the entity (or entities that control the entity), or
- The entity or the group member of which the entity is part of the group, provides key management personnel services to the reporting entity or entities that control the reporting entity.

Entitas yang terkait dengan Pemerintah merujuk pada entitas yang secara aktif dikendalikan, dikendalikan bersama, atau dipengaruhi oleh otoritas pemerintah. Pengertian Pemerintah dalam konteks ini mencakup lembaga-lembaga pemerintah di tingkat lokal, nasional, dan internasional. Entitas yang memiliki hubungan dengan Pemerintah dapat bervariasi, termasuk entitas yang secara signifikan dikendalikan oleh Kementerian Keuangan, yang bertindak sebagai pemegang saham utama, atau entitas yang tunduk pada pengawasan langsung dari Pemerintah Republik Indonesia melalui Kementerian BUMN sebagai kuasa pemegang saham.

Government-related entity refers to entity that is actively controlled, jointly controlled, or influenced by government authorities. The definition of Government in this context includes government institutions at the local, national and international levels. Entity that has a relationship with the Government may vary, including entity that is significantly controlled by the Ministry of Finance, which acts as the main shareholder, or entity that is subject to direct supervision from the Government of the Republic of Indonesia through the Ministry of SOEs as shareholder proxy.

Segala transaksi dan saldo yang memiliki dampak yang signifikan dan dilakukan dengan pihak-pihak terkait, baik melibatkan ketentuan dan persyaratan yang serupa dengan pihak ketiga atau tidak, dijelaskan secara rinci dalam catatan yang relevan pada laporan keuangan konsolidasian. Adanya hubungan ini menjadi fokus utama untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam pelaporan keuangan, sehingga memungkinkan pemangku kepentingan untuk memahami dan menilai potensi pengaruh entitas yang berelasi dengan Pemerintah terhadap kinerja dan posisi keuangan keseluruhan.

Every transaction and balance that significantly impacts and is carried out with related parties, whether or not involving similar terms and conditions to the third parties, will be explained in detailed relevant notes in the consolidated financial statements. The relationship becomes the main point in ensuring transparency and accountability in financial reporting, thereby enabling stakeholders to understand and assess the potential influence of the entity related to the Government on overall financial performance and position.

Sifat Hubungan Pihak Berelasi

Dalam pelaksanaan operasional, grup terlibat dalam transaksi dengan entitas yang memiliki hubungan keterkaitan. Kebijakan perusahaan menegaskan bahwa penetapan harga pada transaksi dengan pihak berelasi seharusnya sejajar dengan transaksi yang dilakukan dengan pihak ketiga. Berikut merupakan gambaran lebih detail terkait hubungan berelasi perusahaan:

1. Keterkaitan Sebagai Pemegang Saham Pemerintah Republik Indonesia. Perusahaan memiliki aset berupa kapal dan dermaga pelabuhan yang diperoleh dari Pemerintah, khususnya Direktorat Jenderal Perhubungan Darat. Aset tersebut termasuk dalam kategori yang telah diatur oleh Peraturan Pemerintah (PP) terkait Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia (PMN) dan Aset Yang Belum Ditentukan Statusnya (BPYBDS). Sesuai dengan ketentuan PP RI No. 52 Tahun 2021, Pemerintah melakukan penambahan modal melalui bantuan pemerintah dengan status yang belum ditetapkan sebesar Rp598.579.637.032, yang kemudian dijadikan modal saham melalui Akta No. 9 tanggal 1 September 2021.
2. Hubungan Kepemilikan dan Kepengurusan. Seluruh transaksi dengan BUMN dan entitas lainnya yang memiliki keterkaitan kepemilikan dan/atau kepengurusan diperlakukan sebagai transaksi dengan pihak berelasi.
3. Keterkaitan Manajemen Kunci Perusahaan. Manajemen kunci Perusahaan mencakup unsur Dewan Komisaris dan Direksi.

Nama Pihak yang Bertransaksi

Berikut merupakan nama pihak berelasi yang memiliki transaksi dengan Perusahaan termasuk mencakup hubungan dan transaksi yang dilakukan:

Nature of Relations with Related Party

In carrying out its operations, the group is involved in transactions with related entities. Company policy emphasizes that pricing for transactions with related parties should be in line with transactions with third parties. The following is a detailed description of the company's relations with related parties:

1. Relations as a Shareholder The Government of the Republic of Indonesia. The Company owns assets of ships and ports that were obtained from the Government, specifically the Directorate General of Land Transportation. These assets are classified under the categories regulated by Government Regulations regarding State Capital Participation and Undefined Status Government Assistance. In accordance with the provisions of Government Regulations No. 52/2021, the Government increased capital through government assistance with undefined status amounting to Rp598,579,637,032, which was then transferred into share capital ratified in Deed No. 9 dated 1 September 2021.
2. Relations of Ownership and Management. All transactions with SOEs and other entities that have related ownership and/or management are included as transactions with related parties.
3. Relations of Company's Key Management. The Company's key management includes elements of the Board of Commissioners and the Board of Directors.

Name of Transaction Party

The following lists names of related parties having transactions with the Company, including descriptions of the relations and transactions made:

No	Pihak-Pihak Berelasi <i>Related Parties</i>	Hubungan <i>Relation</i>	Jenis Akun atau Transaksi <i>Nature of Account or Transaction</i>
1	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	Entitas Sepengendali <i>Entity Under Common Control</i>	Kas dan Setara Kas, Piutang Usaha, Utang Bank, Pinjaman Sindikasi <i>Cash and Cash Equivalents, Trade Receivables, Bank Loans, Syndicated Loans</i>
2	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	Entitas Sepengendali <i>Entity Under Common Control</i>	Kas dan Setara Kas <i>Cash and Cash Equivalents</i>
3	PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	Entitas Sepengendali <i>Entity Under Common Control</i>	Kas dan Setara Kas <i>Cash and Cash Equivalents</i>
4	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	Entitas Sepengendali <i>Entity Under Common Control</i>	Kas dan Setara Kas, Utang Usaha <i>Cash and Cash Equivalents, Trade Payables</i>
5	PT Bank Raya Indonesia Tbk	Entitas Sepengendali <i>Entity Under Common Control</i>	Kas dan Setara Kas <i>Cash and Cash Equivalents</i>
6	PT Bank Syariah Indonesia Tbk	Entitas Sepengendali <i>Entity Under Common Control</i>	Kas dan Setara Kas <i>Cash and Cash Equivalents</i>
7	KSO IFPRO - ISS	Kerja Sama Operasi <i>Joint Operations</i>	Piutang Usaha, Pendapatan Yang Masih Harus Diterima, Utang Usaha <i>Trade Receivables, Accrued Income, Trade Payables</i>
8	PT Jasa Raharja (Persero) Tbk	Entitas Sepengendali <i>Entity Under Common Control</i>	Piutang Usaha, Pendapatan Yang Masih Harus Diterima, Utang Asuransi <i>Trade Receivables, Accrued Income, Insurance Payables</i>
9	Kementrian Perhubungan	Entitas Sepengendali <i>Entity Under Common Control</i>	Piutang Usaha, Pendapatan Yang Masih Harus Diterima, Liabilitas Jangka Pendek Lainnya <i>Trade Receivables, Accrued Income, Other Current Liabilities</i>
10	PT Asuransi Jasa Indonesia (Persero)	Entitas Sepengendali <i>Entity Under Common Control</i>	Pendapatan Yang Masih Harus Diterima <i>Accrued Income</i>
11	PT Jasa Raharja Putera	Entitas Sepengendali <i>Entity Under Common Control</i>	Pendapatan Yang Masih Harus Diterima, Utang Asuransi <i>Accrued Income, Insurance Payables</i>
12	PT Jembatan Nusantara	Entitas Sepengendali <i>Entity Under Common Control</i>	Pendapatan Yang Masih Harus Diterima <i>Accrued Income</i>
13	Perum DAMRI	Entitas Sepengendali <i>Entity Under Common Control</i>	Pendapatan Yang Masih Harus Diterima <i>Accrued Income</i>
14	PT Pos Indonesia (Persero)	Entitas Sepengendali <i>Entity Under Common Control</i>	Pendapatan Yang Masih Harus Diterima, Utang Usaha <i>Accrued Income, Trade Payables</i>
15	PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk	Entitas Sepengendali <i>Entity Under Common Control</i>	Uang Muka, Utang Usaha, Liabilitas Jangka Pendek Lainnya <i>Advances, Trade Payables, Other Current Liabilities</i>
16	PT Industri Kapal Indonesia (Persero)	Entitas Sepengendali <i>Entity Under Common Control</i>	Uang Muka, Utang Usaha, Pembelian <i>Advances, Trade Payables, Purchases</i>
17	PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero)	Entitas Sepengendali <i>Entity Under Common Control</i>	Pinjaman Sindikasi <i>Syndicated Loans</i>

No	Pihak-Pihak Berelasi <i>Related Parties</i>	Hubungan <i>Relation</i>	Jenis Akun atau Transaksi <i>Nature of Account or Transaction</i>
18	PT PANN Pembiayaan Maritim (Persero)	Entitas Sepengendali <i>Entity Under Common Control</i>	Utang Pembiayaan <i>Financing Payables</i>
19	PT Pelabuhan Indonesia III (Persero)	Entitas Sepengendali <i>Entity Under Common Control</i>	Utang Lain-Lain <i>Other Payables</i>
20	PT Amarta Karya (Persero)	Entitas Sepengendali <i>Entity Under Common Control</i>	Utang Usaha <i>Trade Payables</i>
21	PT Dok dan Perkapalan Kodja Bahari (Persero)	Entitas Sepengendali <i>Entity Under Common Control</i>	Utang Usaha, Pembelian <i>Trade Payables, Purchases</i>
22	PT Pelayaran Nasional Indonesia (Pelni)	Entitas Sepengendali <i>Entity Under Common Control</i>	Utang Usaha <i>Trade Payables</i>
23	PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero)	Entitas Sepengendali <i>Entity Under Common Control</i>	Utang Usaha <i>Trade Payables</i>
24	PT Asuransi Jiwa Inhealth Indonesia	Entitas Sepengendali <i>Entity Under Common Control</i>	Utang Usaha <i>Trade Payables</i>
25	PT Surveyor Indonesia	Entitas Sepengendali <i>Entity Under Common Control</i>	Utang Usaha <i>Trade Payables</i>
26	PT Sucofindo (Persero)	Entitas Sepengendali <i>Entity Under Common Control</i>	Utang Usaha <i>Trade Payables</i>
27	PT Pertamina (Persero)	Entitas Sepengendali <i>Entity Under Common Control</i>	Utang Usaha, Pembelian <i>Trade Payables, Purchases</i>
28	PT Yoda Karya (Persero)	Entitas Sepengendali <i>Entity Under Common Control</i>	Utang Usaha <i>Trade Payables</i>
29	PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero)	Entitas Sepengendali <i>Entity Under Common Control</i>	Utang Usaha <i>Trade Payables</i>
30	Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (Eximbank)	Entitas Sepengendali <i>Entity Under Common Control</i>	Pinjaman Sindikasi <i>Syndicated Loans</i>
31	Direktorat Jenderal Perhubungan Darat	Entitas Sepengendali <i>Entity Under Common Control</i>	Utang Usaha <i>Trade Payables</i>
32	Dewan Komisaris dan Dewan Direksi	Personel Manajemen Kunci <i>Key Management Personnel</i>	Kompensasi dan Remunerasi <i>Compensation and Remuneration</i>

Tujuan Transaksi Pihak Berelasi

Perusahaan melakukan transaksi dengan pihak berelasi dengan tujuan untuk saling mendukung kelancaran bisnis kedua belah pihak secara profesional dan menguntungkan. Berikut disajikan mengenai nilai transaksi dengan pihak berelasi pada tahun 2022-2023:

Purpose of Related Party Transaction

The Company transacts with related parties with the objective to mutually support both parties' smooth businesses operations in a professional and profitable manner. The following lists the transaction value with related parties in 2022-2023:

(Dalam Juta Rupiah)
(In Million Rupiah)

Jenis Type	Pihak Berelasi Related Parties	2022		2023	
		Nilai Value	% dari Total Aset % of Total Asset	Nilai Value	% dari Total Aset % of Total Asset
Kas dan Bank Cash and Bank	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	191.257	1,91	199.105	1,80%
	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	51.511	0,51	111.922	1,01%
	PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	100.323	1	158.955	1,44%
	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	6.022	0,06	8.347	0,08%
	PT Bank Syariah Indonesia Tbk	14.332	0,14	7.216	0,07%
	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	66	0	608	0,01%
	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	12	0	10	0,00%
Deposito Deposit	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	248.305	2,48	164.622	1,49%
	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	150.000	1,5	200.000	1,81%
	PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	225.000	2,25	125.000	1,13%
	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	150.000	1,5	100.000	0,90%
	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	50.000	0,5	-	0,00%
	PT. Bank Syariah Indonesia	-	-	210.000	1,90%
Piutang Usaha Trade Receivable	KSO IFPRO-ISS	2.578	0,03	-	0,00%
	PT Jasa Raharja (Persero) Tbk	633	0,01	773	0,01%
	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	143	0	341	0,00%
	Lain-lain Others	256	0	539	0,00%
	Cadangan Kerugian Penurunan Nilai Impairment Loss Reserve	(292)	0	(306)	0,00%
Pendapatan yang Masih Harus Diterima Accrued Income	PT Bank Rakyat Indonesia Tbk	21.478	0,21	71.660	0,65%
	Kementerian Perhubungan Ministry of Transportation	20.977	0,21	148.792	1,35%
	PT Asuransi Jasa Indonesia (Persero)	1.830	0,02	2.956	0,03%
	PT Jasa Raharja (Persero) Tbk	87	0	189	0,00%
	PT Bank Mandiri Tbk	170	0	203	0,00%
	Perum DAMRI	174	0	120	0,00%
	Lain-lain Others	80	0	289	0,00%
	Cadangan Kerugian Penurunan Nilai Impairment Loss Reserve	-	-	(24.082)	(0,22%)
Uang Muka Advances	PT Industri Kapal Indonesia (Persero)	8.065	0,32	8.065	0,07%

Jenis Type	Pihak Berelasi Related Parties	2022		2023	
		Nilai Value	% dari Total Aset % of Total Asset	Nilai Value	% dari Total Aset % of Total Asset
Utang Usaha Trade Payable	PT Pembangunan Perumahan	80.057	3,15	26.165	0,24%
	PT Jasa Raharja Putra	555	0,02	684	0,01%
	PT Biro Klasifikasi Indonesia	2.394	0,09	1.927	0,02%
	PT Industri Kapal Indonesia	2.360	0,09	874	0,01%
	PT Dok & Perkapalan Kodja Bahari	4.760	0,19	3.856	0,03%
	PT Surveyor Indonesia	953	0,04	22	0,00%
	PT Pos Indonesia	370	0,01	741	0,01%
	PT Sucofindo	273	0,01	432	0,00%
	PT Pertamina	238	0,01	-	0,00%
	PT Yoda Karya	172	0,01	-	0,00%
	PT Pelabuhan Indonesia	573	0,02	-	0,00%
	PT Asuransi Jiwa Inhealth Indonesia	1.994	0,08	-	0,00%
	PT Pelayaran Indonesia	2.754	0,11	82	0,00%
	PT Amarta Karya	8.782	0,35	-	0,00%
	PT Asuransi Jasa Indonesia (Persero)	-	-	16.163	0,15%
	Lain-lain Others	1.080	0,04	4.728	0,04%
Utang Asuransi Insurance Payables	PT Jasa Raharja Putra	18.935	0,74	5.380	0,05%
	PT Jasa Raharja	4.815	0,19	21.222	0,19%
Liabilitas Jangka Pendek Lainnya Other Current Liabilities	PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk	109.000	2,52	-	0,00%
	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	15.900	0,37	10.000	0,09%
	PT Pelabuhan Indonesia (Persero)	252	0,01	576	0,01%
	Lain-lain Others	660	0,02	138	0,00%
Pinjaman Sindikasi Syndicated Loans	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	146.013	5,74	-	0,00%
	PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero)	107.741	4,24	-	0,00%
	PT Bank Raya Indonesia Tbk	77.591	3,05	-	0,00%
	Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (Eximbank)	-	-	100.000	0,90%
Liabilitas Jangka Panjang Lainnya Other Non- Current Liabilities	PT Pelabuhan Indonesia III (Persero)	1.543	0,06	1.543	0,01%
	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	242	0,01	242	0,00%
	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	46	0	46	0,00%
	Lain-lain Others	-	-	31	0,00%

Kewajaran Transaksi Pihak Berelasi

Semua transaksi yang telah terjalin dengan pihak berelasi telah dilakukan sesuai dengan kebijakan dan persyaratan yang telah disetujui oleh kedua belah pihak. Oleh karena itu, Perusahaan menganggap bahwa semua transaksi tersebut masih berada dalam batas wajar sejalan dengan Prinsip Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 7 tentang Pengungkapan Pihak-Pihak Berelasi. Fenomena ini mengindikasikan bahwa Perusahaan telah menjalankan transaksi dengan pihak berelasi secara proporsional dan sesuai dengan norma-norma yang berlaku.

Konsep nilai wajar, sebagaimana diuraikan dalam PSAK No. 7, merujuk pada harga yang dapat diterima untuk menjual suatu aset atau harga yang akan dibayar untuk mentransfer suatu liabilitas dalam konteks transaksi reguler antara pelaku pasar pada tanggal pengukuran. Penilaian nilai wajar dari aset dan liabilitas keuangan dilakukan dengan mempertimbangkan tujuan pengakuan, pengukuran, atau pengungkapan. Dalam proses ini, nilai wajar dikelompokkan ke dalam level yang berbeda dalam suatu hierarki nilai wajar, tergantung pada sejauh mana input pengukuran dapat diobservasi dan sejauh mana signifikansi input tersebut terhadap keseluruhan pengukuran nilai wajar. Nilai wajar yang dijadikan sebagai acuan adalah:

1. Nilai pasar yang dicatat tanpa penyesuaian untuk aset atau liabilitas yang serupa yang dapat diakses dalam pasar aktif pada tanggal pengukuran (Level 1);
2. Faktor-faktor selain nilai pasar yang termasuk dalam Level 1, yang dapat diidentifikasi untuk aset atau liabilitas melalui observasi langsung atau tidak langsung (Level 2);
3. Informasi yang tidak dapat diamati secara langsung untuk menetapkan nilai aset atau liabilitas (Level 3).

Dalam proses penilaian nilai wajar aset atau liabilitas, Perusahaan berkomitmen untuk seoptimal mungkin mengadopsi data pasar yang dapat diamati. Apabila nilai wajar suatu aset atau liabilitas tidak dapat diamati secara langsung, Perusahaan menerapkan metode penilaian yang sesuai dengan konteksnya, dengan tujuan untuk mengoptimalkan pemanfaatan input yang dapat diamati yang relevan, sambil meminimalkan

Fairness of Transactions with Related Party

All transactions that was established with related parties have been carried out in accordance with the policies and requirements agreed by both parties. Therefore, the Company considers that all transactions were within reasonable limits in line with Financial Accounting Standard Principles (PSAK) No. 7 concerning Disclosures of Related Parties. The phenomenon indicates that the Company has transacted with related parties in proportion and in accordance with applicable norms.

The concept of fair value, as described in PSAK No. 7, refers to the price that would be received to sell an asset or paid to transfer a liability in an orderly transaction between market participants at the measurement date. The fair value of assets and financial liabilities is appraised by considering the objectives of attribution, measurement or disclosure. In this process, fair values are grouped into different levels of hierarchy, depending on the extent of observable inputs and the extent of the input's significance to the overall fair value measurement. The fair value used as a reference is:

1. Unadjusted quoted price for identical assets or liabilities in active markets at the measurement date (Level 1);
2. Inputs other than quoted price included in Level 1, that are observable for the asset or liability either directly or indirectly (Level 2);
3. Unobservable inputs to determine the value of assets or liabilities (Level 3).

In the process of fair value appraisal of assets or liabilities, the Company is committed to adopt observable market data. When the fair value of an asset or liability is not directly observable, the Company applies valuation methods appropriate to the context, to optimize relevant observable inputs while minimize reliance on unobservable inputs. The Company also recognizes shiftings

ketergantungan pada input yang tidak dapat diamati. Perusahaan juga memberikan pengakuan terhadap perpindahan antar level hierarki nilai wajar, dan pengakuan tersebut dilakukan pada akhir periode pelaporan di mana perpindahan tersebut terjadi. Pendekatan ini mencerminkan prinsip-prinsip profesionalisme dalam menilai nilai wajar, dengan menekankan transparansi, relevansi, dan optimalisasi penggunaan informasi yang dapat diamati.

Keterlibatan Organ Perusahaan dalam Proses Review Transaksi Pihak Berelasi

Proses peninjauan terhadap transaksi yang melibatkan pihak berelasi diimplementasikan melalui suatu mekanisme audit yang dapat dilaksanakan baik oleh auditor internal maupun auditor eksternal. Tindakan ini dilakukan sebagai langkah proaktif untuk memverifikasi tingkat kepatutan dan kesesuaian transaksi tersebut dengan standar akuntansi yang berlaku umum di Indonesia. Langkah serius dalam mencapai tingkat kewajaran ini melibatkan pemeriksaan mendalam yang dilakukan oleh auditor. Dalam konteks ini, laporan transaksi afiliasi di atas telah menjalani proses audit yang cermat dan teliti, dipastikan oleh pihak auditor yang memiliki keahlian dan kredibilitas dalam memastikan keakuratan dan keandalan informasi keuangan yang terkandung dalam transaksi tersebut.

between fair value hierarchy levels, and such recognition is made at the end of the reporting period when the shift occurs. This approach reflects professionalism in assessing fair value, emphasizing transparency, relevance, and optimal use of observable inputs.

Involvement of Company Organs in Reviewing Transactions with Related Party

The review for transactions involving related parties is implemented through an audit mechanism that may be carried out by internal auditors and external auditors. The action was a proactive step to verify the level of propriety and conformity of these transactions with accepted accounting standards in Indonesia. This is a crucial measure in achieving fairness standard involving in-depth examination carried out by the auditor. In this context, the affiliate transaction reports have undergone a careful and thorough audit process, confirmed by credible and expert auditors who ensures the accuracy and reliability of the financial information contained in these transactions.

INFORMASI MATERIAL MENGENAI INVESTASI, EKSPANSI, DIVESTASI, AKUISISI, DAN RESTRUKTURISASI

MATERIAL INFORMATION REGARDING INVESTMENT, EXPANSION, DIVESTMENT, ACQUISITION, AND RESTRUCTURING

Informasi Investasi

Investment Information

Kategori Category	Target RKAP 2023 2023 WPB Target	Realisasi 2023 2023 Realization	Capaian (%) Achievement (%)	Proyeksi 2024 2024 Projection
Investasi Induk Perusahaan Holding Company Investment				
Rencana Pembelian Saham Anak Perusahaan PT Indonesia Ferry Properti Plan of Subsidiary Shares Purchase of PT Indonesia Ferry Properti	-	-	0%	270.500
Fasilitas, Akomodasi, Peralatan, dan Permesinan Alat Produksi Facilities, Accommodation, Equipment and Production Machinery	102.476	227.109	222%	434.074
Tanah, Bangunan, dan Peralatan Kerja Perkantoran Lands, Buildings, and Office Equipments	102.476	70.261	68,56%	81.571
Instalasi, Jaringan, dan Teknologi Installation, Network, and Technology	89.386	66.667	74,58%	51.418
Total Investasi Induk Perusahaan Total Holding Company Investment	2.506.288	1.214.134	48,44%	1.523.680
Investasi Anak Perusahaan Subsidiary Investment				
Investasi Anak Perusahaan Subsidiary Investment	231.259	26.981	11,67%	196.403
Total Investasi Konsolidasi Total Consolidated Investment	2.737.547	1.241.115	45,34%	1.720.083

INFORMASI EKSPANSI

Pada tahun 2023, Perusahaan tidak melakukan aktivitas terkait dengan ekspansi atau perluasan usaha. Oleh karena itu, data atau informasi terkait hal tersebut tidak tersedia.

INFORMATION ON EXPANSION

In 2023, the Company did not carry out activities related to business expansion. Therefore, there is no available data or information related to this matter.

INFORMASI DIVESTASI

Pada tahun 2023, Perusahaan tidak memiliki/ melakukan kegiatan korporasi terkait dengan divestasi, sehingga tidak terdapat data, dan informasi yang terkait dengan aktivitas tersebut.

INFORMATION ON DIVESTMENT

In 2023, the Company did not have/carry out corporate activities related to divestment. Therefore, there is no available data or information related to this matter.

INFORMASI AKUISISI

Pada tahun 2023, Perusahaan tidak memiliki/melakukan kegiatan korporasi terkait dengan akuisisi, sehingga tidak terdapat data dan informasi yang terkait dengan aktivitas tersebut.

INFORMATION ON ACQUISITION

In 2023, the Company did not have/carry out corporate activities related to acquisitions. Therefore, there is no available data or information related to this matter.

**INFORMASI RESTRUKTURISASI
UTANG ATAU MODAL**

Pada tahun 2023, Perusahaan tidak memiliki/melakukan kegiatan korporasi terkait dengan restrukturisasi utang atau modal, sehingga tidak terdapat data, dan informasi yang terkait dengan aktivitas tersebut.

**DEBT OR CAPITAL
RESTRUCTURING INFORMATION**

In 2023, the Company did not carry out corporate activities related to debt or capital restructuring. Therefore, there is no available data or information related to this matter.

INFORMASI KEUANGAN YANG MENGANDUNG KEJADIAN LUAR BIASA

FINANCIAL INFORMATION CONTAINING EXTRAORDINARY EVENTS

Sepanjang tahun 2023, tidak terdapat informasi keuangan yang mengandung kejadian luar biasa dan jarang terjadi yang berdampak pada Perusahaan.

Throughout 2023, there was no financial information involving extraordinary and unusual event that impacted the Company.

REALISASI PENGGUNAAN DANA HASIL PENAWARAN UMUM

ACTUAL USE OF PROCEEDS FROM PUBLIC OFFERING

Hingga tahun 2023, Perusahaan belum melakukan penawaran umum saham untuk menjadi Perusahaan Terbuka di Bursa Efek Indonesia. Oleh karena itu, tidak terdapat data dan informasi yang terkait dengan perolehan dana termasuk realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum.

Until 2023, the Company has not made any public offering of shares to become a Public Company on the Indonesian Stock Exchange. Therefore, there is no data and information related to neither the acquired funds, nor the actual use of funds from the public offering.

INFORMASI DAN FAKTA MATERIAL SETELAH LAPORAN AKUNTAN

MATERIAL INFORMATION AND FACTS AFTER THE ACCOUNTANT'S REPORT

Pada tahun 2023, tidak terdapat informasi dan fakta material atau kejadian penting setelah tanggal penerbitan laporan akuntan. Oleh karena itu, tidak terdapat data dan informasi yang dapat diungkapkan mengenai kejadian hal tersebut.

In 2023, there is no information and material facts or important events after the publication date of the accountant's report. Therefore, there is no data and information that can be disclosed regarding this incident.

PERUBAHAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERPENGARUH SIGNIFIKAN TERHADAP PERUSAHAAN

REGULATORY CHANGES AND THE SIGNIFICANT IMPACT ON THE COMPANY

Perubahan Peraturan Perundang-Undangan

Sepanjang tahun 2023, terdapat beberapa perubahan peraturan perundang-undangan yang memiliki dampak terhadap Perusahaan. Untuk merespon perubahan tersebut, Perusahaan melakukan tindak lanjut terhadap peraturan dan kebijakan Perusahaan yang terkait. Secara rinci, perubahan peraturan perundang-undangan dan tindak lanjutnya disajikan dalam tabel berikut:

Changes in Regulations

Throughout 2023, there was several changes to law and regulations that impacted the Company. To respond to these changes, the Company followed up on related regulations and Company policies. In detail, changes to the law and regulations and their follow-up actions are presented in the following table:

No	Nama Peraturan <i>Name of Regulation</i>	Keterangan Perubahan <i>Description of Amendments</i>	Tindak Lanjut oleh Perusahaan <i>Follow-up by the Company</i>
1	Peraturan Menteri BUMN No. PER-1/MBU/03/2023 tentang Penugasan Khusus Dan Program Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan BUMN Regulation of Minister of SOEs No. PER-1/MBU/03/2023 concerning Special Assignments and Social and Environmental Responsibility Programs for SOEs	Dalam upaya penguatan program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan BUMN dilakukan beberapa perubahan substansial yang terkait dengan proses perencanaan, pelaksanaan, dan batasan nilai dalam program pendanaan UMK. In efforts to strengthen the Corporate Social Responsibility program in the SOEs, several substantial changes were made related to the planning process, implementation, and nominal limits in the MSE funding program.	Ditindaklanjuti melalui Keputusan Direksi No. KD.306/KU.207/ASDP-2023 tanggal 1 Agustus 2023 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL). Followed up with Directors' Decree No. KD.306/KU.207/ASDP-2023 dated 1 August 2023 concerning Corporate Social Responsibility.
2	Peraturan Menteri BUMN No. PER-3/MBU/03/2023 tentang Organ dan SDM BUMN Regulation of Minister of SOEs No. PER-3/MBU/03/2023 concerning Organs and Human Resources of SOEs	Dalam upaya untuk memastikan keberlanjutan mengenai program suksesi dan manajemen talenta di BUMN, dilakukan penguatan pada mekanisme penetapan Direksi/Calon Direksi BUMN, mekanisme <i>talent pool</i> dan <i>succession planning</i> beserta persyaratan untuk penetapan Direksi/Calon Direksi BUMN. In efforts to ensure the continuity of the succession program and talent management in SOEs, a strengthened mechanism is placed for the talent pool, succession planning, and defined requirements for appointing SOEs Directors/Prospective Directors.	Ditindaklanjuti melalui Keputusan Direksi No. KD.220/PA.004/ASDP-2023 tanggal 12 Mei 2023 tentang Manajemen Talenta. Followed up with Directors' Decree No. KD.220/PA.004/ASDP-2023 dated 12 May 2023 concerning Talent Management.
3	Peraturan Menteri BUMN No. PER-3/MBU/03/2023 tentang Organ dan SDM BUMN Regulation of Minister of SOEs No. PER-3/MBU/03/2023 concerning Organs and Human Resources of SOEs	Perubahan pada pasal mengenai pemberian fasilitas bagi Direksi BUMN terutama pada pemberian fasilitas bantuan hukum. Changes to the article regarding the provision of facilities for SOEs Directors, especially on the provision of legal aid facilities.	Ditindaklanjuti melalui Keputusan Direksi No. KD.307/HK.002/ASDP-2023 tanggal 1 Agustus 2023 tentang Fasilitas Bantuan Hukum Bagi Karyawan PT ASDP Indonesia Ferry. Followed up with Directors' Decree No. KD.307/HK.002/ASDP-2023 dated 1 August 2023 concerning Legal Assistance Facilities for Employees of PT ASDP Indonesia Ferry.
4	Peraturan Menteri BUMN No. PER-2/MBU/03/2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan BUMN Regulation of Minister of SOEs No. PER-2/MBU/03/2023 concerning Guidelines on Governance and Significant Corporate Activities of SOEs	Dalam upaya penguatan mengenai Tata Kelola Perusahaan yang Baik, dilakukan perubahan pada pasal terkait dengan manajemen risiko terutama terkait penerapan <i>three lines model</i> di BUMN serta manajemen risiko terintegrasi. In efforts to strengthen Good Corporate Governance, changes have been made to articles related to risk management, especially on the implementation of the three lines model in SOEs and integrated risk management.	Ditindaklanjuti melalui SKB Dewan Komisaris dan Direksi PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) No. SK.772/HK.002/ASDP-2023 tanggal 01 Oktober 2023 tentang Pedoman Manajemen Risiko. Followed up with Joint Decree of the Boards of Commissioners and Directors of PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) No. SK.772/HK.002/ASDP-2023 dated 01 October 2023 concerning Risk Management Guidelines.
5	Peraturan Menteri BUMN No. PER-2/MBU/03/2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan BUMN Regulation of Minister of SOEs No. PER-2/MBU/03/2023 concerning Guidelines on Governance and Significant Corporate Activities of SOEs	Dalam upaya memperkuat fungsi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi untuk mendorong transparansi dan kualitas penyajian informasi, dilakukan pembaharuan pada Kebijakan terkait Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi. The Policy on Information and Documentation Management Officers was updated to strengthen their roles in promoting transparency and quality of information presented.	Ditindaklanjuti melalui Keputusan Direksi No. KD.274/HK.002/ASDP-2023 tanggal 10 Juli 2023 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi. Followed up with Directors' Decree No. KD.274/HK.002/ASDP-2023 dated 10 July 2023 on Officer of Information and Documentation Management.

No	Nama Peraturan Name of Regulation	Keterangan Perubahan Description of Amendments	Tindak Lanjut oleh Perusahaan Follow-up by the Company
6	Peraturan Menteri BUMN No. PER-2/MBU/03/2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan BUMN Regulation of Minister of SOEs No. PER-2/MBU/03/2023 concerning Guidelines on Governance and Significant Corporate Activities of SOEs	Dalam upaya meningkatkan kredibilitas dan efektivitas proses pengadaan barang dan jasa, dilakukan pembaharuan pada kebijakan tentang pengadaan barang, dan jasa terutama terkait batas kewenangan nilai dan pengenaan sanksi administratif. The policy on the procurement of goods and services was revised in efforts to increase the credibility and effectiveness of the procurement process, especially in relation to authorized nominal limits and the imposition of administrative sanctions.	Ditindaklanjuti melalui Keputusan Direksi No. KD.345/UM.201/ASDP-2023 tentang Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa di Lingkungan PT ASDP Indonesia Ferry (Persero). Followed up with Directors' Decree No. KD.345/UM.201/ASDP-2023 concerning Policy on Procurement of Goods and Services in PT ASDP Indonesia Ferry (Persero).
7	Peraturan Menteri BUMN No. PER-2/MBU/03/2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan BUMN Regulation of Minister of SOEs No. PER-2/MBU/03/2023 concerning Guidelines on Governance and Significant Corporate Activities of SOEs	Dalam upaya penguatan terkait dengan sistem pengawasan internal, dilakukan penguatan terutama pada pasal yang terkait dengan peran, kewenangan, dan tanggung jawab Dewan Komisaris/Dewan Pengawas dalam Piagam Komite Audit. In efforts to strengthen the internal monitoring system, changes were made to articles related to the role, authority, and responsibilities of the Board of Commissioners/Supervisory Board in the Audit Committee Charter.	Ditindaklanjuti melalui SKB Dewan Komisaris dan Direksi PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) No. SK.488/HK.002/ASDP-2023 tanggal 26 Juni 2023 tentang Piagam Satuan Pengawasan Intern PT ASDP Indonesia Ferry (Persero). Followed up with Joint Decree of the Boards of Commissioners and Directors of PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) No. SK.488/HK.002/ASDP-2023 dated 26 June 2023 concerning the Internal Audit Charter of PT ASDP Indonesia Ferry (Persero).

DAMPAK PERUBAHAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Perubahan peraturan perundang-undangan yang berlaku kemudian direspon oleh Perusahaan melalui analisis dan evaluasi terhadap peraturan dan kebijakan Perusahaan yang terdampak. Perusahaan kemudian mengevaluasi relevansi peraturan dan kebijakan perusahaan dengan perubahan peraturan perundang-undangan tersebut yang selanjutnya ditindaklanjuti melalui perubahan peraturan dan kebijakan Perusahaan.

Sebagai contoh perubahan peraturan terkait pengelolaan Manajemen Risiko seperti yang tertuang dalam Peraturan Menteri BUMN No. PER-2/MBU/03/2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan BUMN, direspon oleh Perusahaan melalui SKB Dewan Komisaris dan Direksi PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) No. SK.772/HK.002/ASDP-2023 tanggal 01 Oktober 2023 tentang Pedoman Manajemen Risiko.

IMPACT OF REGULATORY CHANGES

The Company responded to amendments in applicable regulation by analyzing and evaluating the affected Company's rules and policies. Evaluation to the relevancy of Company's rules and policies against the amended regulations were followed up with changes in the Company's rules and policies.

For example, changes to regulations related to risk management, as stated in Regulation of the Minister of SOEs No. PER-2/MBU/03/2023 concerning Guidelines on Governance and Significant Corporate Activities of SOEs, were responded by the Company through Joint Decree of the Board of Commissioners and Directors of PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) No. SK.772/HK.002/ASDP-2023 dated 01 October 2023 concerning Risk Management Guidelines.

PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI DAN DAMPAKNYA TERHADAP PERUSAHAAN

CHANGES IN ACCOUNTING POLICIES AND IMPACT ON THE COMPANY

Sepanjang tahun 2023, tidak terdapat perubahan terkait kebijakan akuntansi dan tidak terdapat dampak yang dialami oleh Perusahaan. Perusahaan senantiasa akan melakukan pelaporan apabila terdapat perubahan kebijakan akuntansi dan dampaknya terhadap Perusahaan baik secara pencatatan maupun dampak terhadap kinerja dan posisi keuangan yang tercantum dalam Laporan Keuangan Perusahaan.

Throughout 2023, there was no changes related to accounting policies, thus, none affected the Company. The Company always report when there are changes in accounting policies and its impact on the Company, both in bookkeeping and in its impact on the performance and financial position stated in the Company's Financial Statements.

INFORMASI KELANGSUNGAN USAHA

INFORMATION ON BUSINESS CONTINUITY

KELANGSUNGAN USAHA

Kelangsungan usaha Perusahaan dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti faktor internal dan faktor eksternal. Perusahaan senantiasa melakukan pengelolaan dan mitigasi terhadap risiko yang dapat berdampak terhadap kelangsungan usaha. Perusahaan juga melakukan penilaian kelangsungan usaha baik dilakukan oleh pihak internal maupun eksternal pada seluruh aspek. Dari aspek keuangan, Perusahaan melakukan penilaian kelangsungan usaha dapat dibuktikan melalui opini auditor independen Kantor Akuntan Publik (KAP) Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan atas Laporan Keuangan Tahun Buku 2023 yaitu "Wajar Tanpa Pengecualian" sebagaimana dalam laporan audit No.00169/2.1030/AU.1/06/1155-4/1/II/2024.

BUSINESS CONTINUITY

The Company's business continuity is influenced by various internal and external factors. Thus, risks that may impact business continuity are always managed and mitigated. The Company also perform assessments of business continuity by internal and external parties in all aspects. From the financial aspect, the assessment is presented through the opinion of the independent auditor, Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan Accounting Firm, on the Financial Report for the 2023 Financial Year, which was "Present Fairly in All Material Respects" as in audit report No.00169/2.1030/AU.1/06/1155-4/1/II/2024.

ASUMSI KELANGSUNGAN USAHA

Kelangsungan usaha Perusahaan untuk tahun 2024 didasarkan melalui pertimbangan atas faktor internal dan eksternal yang memiliki signifikansi

ASSUMPTION ON BUSINESS CONTINUITY

The Company's business continuity for 2024 is based on consideration of internal and external factors that have significance to the Company's business

terhadap kelangsungan usaha Perusahaan. Untuk menghadapi tahun 2024, Perusahaan memiliki 3 strategi utama yang akan dilaksanakan yaitu:

1. Penguatan Sinergi dengan Anak Perusahaan

Perusahaan berupaya untuk memperkuat sinergi dengan anak perusahaan untuk memberikan dampak yang signifikan dan kerja sama yang menguntungkan bagi induk maupun anak perusahaan. Penguatan sinergi di tahun 2024 terutama akan difokuskan dengan Jembatan Nusantara yang memiliki *core business* serupa yaitu di bidang penyeberangan. Sinergi dalam hal ini akan dilakukan melalui sinergi dan kerja sama operasional penyeberangan maupun pemeliharaan dan perbaikan kapal. Melalui sinergi ini Perusahaan memproyeksikan dapat menghasilkan peningkatan pendapatan usaha secara grup dan mendorong efisiensi bagi induk maupun anak perusahaan.

2. Pengembangan *Integrated Maintenance Management*

Strategi pengembangan *Integrated Maintenance Management* dilakukan untuk memperkuat keandalan kapal, keselamatan dan pelayanan kepada penumpang serta memastikan operasional yang berjalan secara berkelanjutan tanpa adanya hambatan teknis kapal. Strategi ini akan dilakukan melalui digitalisasi pada aspek pemeliharaan kapal, sentralisasi pemeliharaan melalui *workshop*, serta integrasi pemeliharaan dan *docking* untuk kapal milik induk dan anak perusahaan. Di samping itu, strategi ini juga bertujuan untuk mendorong efisiensi terhadap biaya pemeliharaan dan perbaikan kapal di induk dan anak perusahaan.

3. Pengembangan dan Penguatan *Waterfront Tourism Development*

Setelah memantapkan visinya pada tahun 2020 untuk menyediakan *waterfront tourism* bagi masyarakat, tahun 2024 Perusahaan akan memfokuskan strateginya pada penguatan *waterfront tourism* yang saat ini telah dikembangkan melalui Bakauheni Harbour City (BHC) dan Marina Labuan Bajo. Pada tahun 2024, BHC direncanakan akan melakukan *launching* untuk kawasan yang telah siap dikomersialkan dan diproyeksikan akan memberikan dampak terhadap kelangsungan usaha Perusahaan.

continuity. In facing 2024, the Company has 3 main strategies to implement, namely:

1. Strengthening Synergies with Subsidiaries

The Company strives to strengthen synergies with subsidiaries towards mutual cooperation and significant impact for both parent and subsidiary companies. Strengthening synergies in 2024 will focus on Jembatan Nusantara, which has a similar core business in ferry transportation. Synergy will be through cooperation in ferry operations, ship maintenance and repairs. Synergy will also lead the Company's projection on group's growing revenue generation and encourage efficiency for the holding and subsidiary companies.

2. Development of Integrated Maintenance Management

The Integrated Maintenance Management strategy is aimed to strengthen ships reliability, safety and service to passengers whilst ensuring sustainable operations without vessel technical obstacles. This strategy will be carried out through digitalization of ship maintenance aspects, centralized maintenance workshops, and integration of maintenance and docking for vessels owned by the parent company and subsidiaries. This strategy also pushes efficiency in ship maintenance and vessel repair costs for both companies.

3. Development and Strengthening of Waterfront Tourism

After setting its vision in 2020 to provide community with waterfront tourism, in 2024 the Company will focus its strategy on strengthening Bakauheni Harbour City (BHC) and Labuan Bajo Marina, which are currently being developed. In 2024, BHC has planned to launch commercial area that is projected to bring impact to the Company's business continuity.

PROSPEK USAHA

BUSINESS PROSPECT

PROSPEK PEREKONOMIAN GLOBAL

Dalam laporan *World Economic Outlook* yang dirilis oleh IMF pada 30 Januari 2024, perekonomian global tahun 2024 diprediksi akan tumbuh sebesar 3,1%, lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan ekonomi global tahun 2023 sebesar 3,0%. Hal ini seiring dengan ketahanan ekonomi yang lebih besar dari perkiraan terutama di Amerika Serikat dan beberapa negara *emerging market* dan negara berkembang, serta adanya dukungan kondisi fiskal Tiongkok yang cukup kuat.

Proyeksitersebutmemberikanharapandanprospek yang baik bagi Perusahaan terutama karena iklim perekonomian dan bisnis yang kondusif. Hal tersebut tentunya akan memberikan dampak bagi pergerakan perekonomian nasional, di mana Perusahaan memiliki peranan penting dalam pergerakan perekonomian nasional dan daerah.

PROSPEK PEREKONOMIAN NASIONAL

Berdasarkan proyeksi perekonomian global yang lebih baik dari tahun 2023, IMF memprediksi bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia di tahun 2024 dan 2025 akan bertahan di kisaran 5,0%. Sementara itu, Bank Indonesia memprediksi pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2024 dapat berada di kisaran 4,7%-5,5%. Proyeksi tersebut didorong oleh berbagai faktor seperti penyelenggaraan Pemilu 2024, permintaan domestik dan pertumbuhan konsumsi yang positif, peningkatan investasi dengan berlanjutnya PSN dan pembangunan IKN, hingga situasi ekonomi global yang lebih kondusif.

Perusahaan meyakini bahwa dengan membaiknya berbagai situasi ekonomi dan geopolitik global maupun politik nasional, dapat memberikan dampak positif bagi pertumbuhan ekonomi di tahun 2024. Hal tersebut tentunya akan mendorong pergerakan ekonomi daerah, termasuk pergerakan orang dan barang salah satunya melalui jalur penyeberangan.

GLOBAL ECONOMIC PROSPECTS

In the *World Economic Outlook* report released by the IMF on 30 January 2024, the global economy in 2024 was predicted to grow by 3.1%, higher than 2023 global economic growth of 3.0%. This is in line with greater economic resilience, especially in the United States and several emerging market and developing countries, as well as support from China's fairly strong fiscal conditions.

These projections provide agreeable expectations and prospects for the Company, attributed to the conducive economic and business climate. As it will bring impact to the national economy, the Company has important roles in driving the national and regional economic progress.

NATIONAL ECONOMIC PROSPECTS

As global economic projections gets better than 2023, the IMF predicts that Indonesia's economic growth in 2024 and 2025 will remain at around 5.0%. Meanwhile, Bank Indonesia predicts that Indonesia's economic growth in 2024 could be in the range of 4.7%-5.5%. This projection is driven by various factors such as the 2024 elections, positive domestic demand and consumption growth, increased investment with the continuation of national strategic projects, development of new capital, and a more conducive global economic situation.

The Company believes that improving various global economic and geopolitical situations as well as national politics can bring positive impact on economic growth in 2024. This will encourage regional economic activities, including the movement of people and goods via ferry transportation.

PROSPEK INDUSTRI PELABUHAN DAN PENYEBERANGAN NASIONAL

Prospek industri pelabuhan dan penyeberangan nasional dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu politik, ekonomi, sosial, teknologi, lingkungan, dan hukum.

Aspek Politik

1. Pelaksanaan Pemilihan Umum 2024 berpotensi meningkatkan pergerakan logistik barang di berbagai pulau.
2. Peningkatan anggaran Kementerian Perhubungan untuk pelayanan keperintisan laut.
3. Kementerian Perhubungan mengencakan program tol laut untuk membangun konektivitas wilayah 3T.

Aspek Ekonomi

1. Pertumbuhan ekonomi global tahun 2024 yang diproyeksikan sebesar 5,1% tumbuh lebih tinggi dibandingkan tahun 2023 sebesar 5,0% dan pertumbuhan ekonomi Indonesia diproyeksikan dapat mencapai 5,5%.
2. Era suku bunga tinggi diproyeksikan akan berakhir dan akan berdampak pada tingkat konsumsi masyarakat, pergerakan logistik, dan pembangunan yang meningkat.

Aspek Sosial

Dari sisi aspek sosial, masyarakat mulai mempertimbangkan untuk melakukan perjalanan luar pulau yang dekat menggunakan kapal penyeberangan dengan membawa mobil pribadi. Hal ini menyusul dampak kenaikan harga tiket pesawat yang cukup tinggi.

Aspek Teknologi

Seiring perkembangan teknologi yang semakin pesat, mendorong Perusahaan untuk memanfaatkan teknologi pada setiap aspek proses bisnis baik untuk aktivitas administratif, analitik maupun operasional. Perkembangan teknologi digital seperti *artificial intelligence*, *big data analytics* maupun otomasi proses menjadi peluang bagi Perusahaan untuk mendorong efektivitas maupun efisiensi pada pelaksanaan operasional.

PROSPECTS FOR THE NATIONAL PORT AND FERRY INDUSTRY

The prospects for the national port and ferry industry are influenced by political, economic, social, technological, environmental, and legal factors.

Political Aspects

1. The 2024 General Election will potentially increase the logistics of goods on various islands.
2. Increase in the Ministry of Transportation's budget for maritime pioneering services.
3. The Ministry of Transportation is intensifying the sea toll program to build connectivity in 3T (frontier, outermost and least developed) regions.

Economic Aspects

1. Global economic growth in 2024 is projected at 5.1%, higher than in 2023 of 5.0%, and Indonesia's economic growth is projected to reach 5.5%.
2. The era of high interest rates is projected to end and will impact on people's consumption levels, logistics movements, and increased development.

Social Aspects

From a social aspect, people are beginning to consider traveling further than their nearby islands via ferryboats whilst bringing their private cars. This is the consequence of rising airline fares.

Technological Aspects

As technology develops increasingly rapidly, the Company is motivated to utilize technology in every aspect of business processes, whether administrative, analytical and operational activities. The development of digital technology such as artificial intelligence, big data analytics and process automation brings opportunities towards effectiveness and efficiency in operational implementation.

Aspek Lingkungan

Pemerintah saat ini tengah mendorong *green economy* di antaranya dengan dimulainya *carbon trading* yang menjadi salah satu sarana untuk mendorong tanggung jawab Perusahaan dalam melaksanakan ekonomi hijau yang ramah lingkungan. Di samping itu, penggunaan energi hijau berkelanjutan juga terus didorong oleh Pemerintah di antaranya melalui penggunaan panel surya, mobil listrik maupun energi hijau lainnya.

Aspek Hukum

1. Perusahaan turut berkontribusi dalam penyediaan angkutan penyeberangan perintis sesuai Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 104 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Angkutan Penyeberangan beserta perubahan-perubahannya dan penyediaan angkutan barang di laut sesuai Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 4 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik Untuk Angkutan Barang di Laut beserta perubahan-perubahannya.
2. Perubahan tarif, perhitungan, dan prosedur pembiayaan subsidi angkutan penyeberangan perintis berdasarkan Keputusan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor KM 61 Tahun 2023 tentang Tarif Penyelenggaraan Angkutan Penyeberangan Kelas Ekonomi Lintas Antarprovinsi dan Lintas Antarnegara jo. Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor 6890 Tahun 2023 tentang Perhitungan, dan Prosedur Pembiayaan Subsidi Angkutan Penyeberangan Perintis.

PROSPEK USAHA ASDP

Dalam menentukan prospek usaha untuk tahun 2024, Perusahaan mempertimbangkan berbagai faktor yang secara signifikan berpengaruh terhadap kelangsungan usaha Perusahaan baik dari faktor internal maupun eksternal. Perusahaan juga turut mendukung dan terlibat secara langsung dalam mewujudkan program Pemerintah untuk menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia.

Dari faktor internal, Perusahaan terus menerus mendorong perbaikan berkelanjutan pada setiap

Environmental Aspects

The government is currently pushing for green economy, including by starting carbon trading, which is a way to encourage Corporations in taking up implementation of environmentally friendly green economy. In addition, the government continues to encourage sustainable green energy, for instance by promoting the utilization of solar panels, electric cars and other green energy applications.

Legal Aspects

1. The Company contributes to provide pioneering ferry transportation as set out in the Regulation of Minister of Transportation No. PM 104/2017 concerning the Implementation of Ferry Transportation and its amendments, as well as to provide goods transporting at sea as set out in the Regulation of Minister of Transportation No. PM 4/2018 on the Implementation of Public Service Obligations for Transport of Goods at Sea and its amendments.
2. Tariff change, calculation, and subsidy financing procedure for pioneer ferry transportation based on the Decree of the Minister of Transportation No. KM 61/2023 concerning Tariffs for Economy Class Ferry Transportation for Interprovince and Interstate Crossings jo. Decree of the Director General of Land Transportation No. 6890/2023 concerning Calculations, and Procedures for Financing Subsidies for Pioneer Ferry Transport.

ASDP BUSINESS PROSPECTS

In defining business prospects for 2024, the Company considers various internal and external factors that significantly influence the Company's business continuity. The Company also supports and is directly involved in materializing the Government's program to bring Indonesia as the world's maritime axis.

Internally, the Company continuously encourages continuous improvement in every operational

aspek operasional maupun organisasi serta mendorong upaya peningkatan kompetensi karyawan dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Strategi dan rencana Perusahaan tahun 2024 yang telah tertuang dalam RJPP maupun RKAP secara spesifik berfokus pada 3 hal yaitu membangun sinergi induk-anak, pengembangan *integrated maintenance management* dan penguatan *waterfront tourism* sebagai *core business* baru bagi Perusahaan.

Dari faktor eksternal, Perusahaan memandang bahwa iklim perekonomian dan usaha di tahun 2024 akan semakin kondusif walaupun merupakan tahun politik. Proyeksi ekonomi global yang tumbuh lebih tinggi dibanding tahun 2023 menjadi sentimen positif bagi perekonomian nasional. Hal ini sejalan dengan proyeksi ekonomi Indonesia yang diproyeksikan dapat tumbuh mencapai hingga 5,5%. Sektor transportasi dan pergudangan di tahun 2023 menjadi salah satu sektor lapangan usaha yang tumbuh paling tinggi mencapai 14,7%. Perusahaan meyakini bahwa pertumbuhan sektor transportasi dan pergudangan, yang merupakan *core business* dari Perusahaan dapat tumbuh lebih tinggi di tahun 2024 karena menjadi tulang punggung dari pergerakan orang dan barang sebagai pemacu pertumbuhan ekonomi nasional maupun regional.

Berdasarkan berbagai latar belakang tersebut dan ditunjang oleh SDM yang berkualitas, Perusahaan meyakini bahwa prospek usaha di tahun 2024 akan tumbuh lebih baik dibandingkan tahun 2023 baik untuk segmen pelabuhan, penyeberangan, usaha aneka jasa, maupun *waterfront tourism* sebagai *core business* baru bagi Perusahaan.

and organizational aspect and encourages efforts to increase employee competency in performing their duties and responsibilities. The Company's strategy and plans for 2024, which have been stated in the Long-Term Corporate Plan and WPB, specifically focus on 3 issues, namely build synergy between holding company and subsidiaries, develop integrated maintenance management and strengthen waterfront tourism as a new core business for the Company.

The Company regards external factors of 2024 economic and business climate, which is deemed more conducive despite being a political year. The global economy growth is projected higher than in 2023 and brings a positive sentiment for the national economy. This is in line with Indonesia's economic projections of up to 5.5% growth. In 2023, the transportation and storage sector was one of the industries with the highest growth at 14.7%. The Company believes that the growth of the transportation and storage sector, which is the Company's core business, can grow even higher in 2024 because it is the backbone for the movement of people and goods, which in turn drive the national and regional economic growth.

Given these various supporting dynamics and supported by quality human resources, the Company believes that business prospects in 2024 would grow better than in 2023 for the port, ferry, miscellaneous services business segments as well as for waterfront tourism segments as the Company's new core business.

06 TATA KELOLA PERUSAHAAN

CORPORATE GOVERNANCE





PENERAPAN TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK

IMPLEMENTATION OF GOOD CORPORATE GOVERNANCE

Perusahaan menyadari signifikansi dan nilai dari implementasi praktik bisnis yang etis dan sehat sebagai landasan dalam menjalankan kegiatan usaha. Berdasarkan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*, GCG), Perusahaan mengakui perlunya keterlibatan aktif dalam implementasi GCG di seluruh spektrum bisnis dan lapisan organisasi. Dalam upaya menjaga keberlanjutan, Perusahaan memandang peran GCG sebagai elemen krusial untuk membangun fondasi yang solid bagi operasional bisnis Perusahaan, sekaligus menciptakan lingkungan kerja yang profesional dan bertanggung jawab secara sosial dan ekonomi.

KOMITMEN PENERAPAN TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK

Penerapan GCG merupakan fondasi utama yang krusial untuk memastikan bahwa Perusahaan tidak hanya mencapai tujuan pengembangan strategisnya, tapi juga mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan, dengan tetap mematuhi prinsip penerapan praktik bisnis yang etis serta persyaratan hukum dan regulasi yang berlaku.

Perusahaan telah menegaskan komitmennya dalam menerapkan prinsip-prinsip GCG tidak hanya sebagai tanggung jawab hukum, namun juga sebagai bagian integral dari budaya operasional. Penerapan prinsip-prinsip GCG ditanamkan sebagai elemen kultur yang menjadi fondasi dalam setiap aspek bisnis dan organisasi melalui upaya yang sungguh-sungguh untuk menjalankan prinsip-prinsip GCG dalam setiap aktivitas operasional.

Perusahaan meyakini bahwa dengan menerapkan prinsip-prinsip GCG secara konsisten, Perusahaan memiliki potensi

The Company realizes the significant value of ethical business practices implementation as a foundation to conduct business. Based on the principles of Good Corporate Governance (GCG), the Company recognizes the necessity of active participation in GCG implementation across all business spectrums and organization levels. In the efforts to maintain sustainability, the Company sees that GCG holds a crucial role in building a solid foundation for Company's operations, whilst creating a professional work environment that is socially and economically accountable.

COMMITMENT TO IMPLEMENT GOOD CORPORATE GOVERNANCE

GCG implementation is the crucial and essential foundation to ensure the Company achieves not only its strategic development goals, but also the established vision and mission, while staying compliant with the ethical business principles and applicable law and regulations.

The Company has reiterated its commitment to implement GCG principles beyond legal responsibility, but as an integral part of its operational culture. The implementation of GCG principles will be embedded as a culture that founded every business and organizational aspects, achieved through earnest efforts to apply GCG principles in every operational activity.

The Company believes that consistent implementation of the GCG principles will increase the Company's potential to improve

untuk terus meningkatkan kualitas layanan dan kinerja bisnis secara berkelanjutan yang memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi nasional secara keseluruhan. Komitmen ini ditanamkan di seluruh karyawan untuk memastikan prinsip-prinsip GCG menjadi komitmen menyeluruh dalam menjalankan aktivitas kerja.

Landasan Penerapan Tata Kelola Perusahaan

Praktik Tata Kelola Perusahaan yang Baik yang dilakukan Perusahaan didasarkan pada berbagai peraturan perundang-undangan dan regulasi yang berlaku, antara lain:

1. Undang-Undang (UU) No. 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara juncto UU No. 6 Tahun 2023 Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
2. UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas juncto UU No. 6 Tahun 2023 Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
3. Keputusan Sekretaris Kementerian BUMN No. SK-16/S.MBU/2012 tanggal 6 Juni 2012 tentang Indikator/Parameter Penilaian dan Evaluasi Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik pada BUMN;
4. Surat Keputusan Bersama (SKB) Dewan Komisaris dan Direksi No. SK.807/HK.102/ASDP-2020 tanggal 22 Juni 2020 tentang Pedoman Tata Kelola Perusahaan yang Baik (GCG Code) PT ASDP Indonesia Ferry (Persero);
5. Peraturan Menteri BUMN No. PER-2/MBU/03/2023 Tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan BUMN.

Prinsip Tata Kelola Perusahaan

Perusahaan berupaya memastikan penerapan tata kelola perusahaan pada setiap aspek bisnis dan organisasi sesuai dengan prinsip GCG. Untuk itu, Perusahaan

service quality and business performance in a sustainable manner, which will positively impact the overall national economic growth. This commitment is instilled in every employee to ensure that GCG principles become an all-inclusive commitment in working

Basis for Corporate Governance Implementation

Good Corporate Governance practice carried out by the Company is based on several applicable laws and regulations, covering:

1. Law No. 19/2003 concerning State-Owned Enterprises in conjunction with Law No. 6/2023 Stipulation of Government Regulations in Lieu of Law No. 2/2022 concerning Job Creation To Become Law;
2. Law No. 40/2007 concerning Limited Liability Companies in conjunction with Law No. 6/2023 Stipulation of Government Regulations in Lieu of Law No. 2/2022 concerning Job Creation To Become Law;
3. Decree of the Secretary of the Ministry of SOEs No. SK-16/S.MBU/2012 dated 6 June 2012 on Indicators/Parameters for Assessment and Evaluation on the Implementation of Good Corporate Governance by SOEs;
4. Joint Decree of the Boards of Commissioners and Directors No. SK.807/HK.102/ASDP-2020 dated 22 June 2020 on Guidelines for Good Corporate Governance (GCG Code) for PT ASDP Indonesia Ferry (Persero);
5. Regulation of the Minister of SOEs No. PER-2/MBU/03/2023 on Guidelines for Governance and Significant Corporate Activities of SOEs.

Principles of Corporate Governance

The Company strives to ensure the implementation of corporate governance in every aspect of the business and organization is in accordance with GCG principles. Therefore,

melandasi prinsip penerapan GCG berdasarkan Peraturan Menteri BUMN No. PER-2/MBU/03/2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan BUMN yang terdiri dari 5 (lima) prinsip GCG yaitu:

Transparansi (*transparency*), yaitu keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan, dan keterbukaan dalam mengungkapkan informasi material dan relevan mengenai Perusahaan;

Akuntabilitas (*accountability*), yaitu kejelasan fungsi pelaksanaan dan pertanggungjawaban Organ sehingga pengelolaan Perusahaan terlaksana secara efektif;

Responsibilitas (*responsibility*), yaitu kesesuaian di dalam pengelolaan Perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat;

Independensi (*independency*), yaitu keadaan di mana Perusahaan dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh/tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat;

Kewajaran (*fairness*), yaitu keadilan dan kesetaraan di dalam memenuhi hak-hak pemangku kepentingan (*stakeholders*) yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan.

the Company based its implementation to the Regulation of the Minister of SOEs No. PER-2/MBU/03/2023 on Guidelines for Governance and Significant Corporate Activities of SOEs, which consists of 5 (five) GCG principles, which are:

Transparency, openness in executing the decision-making process and willingness in disclosing relevant information materials about the Company;

Accountability, clarity of roles, implementation and responsibility of the Organs so that Company management is carried out effectively;

Responsibility, conformity in managing Company according to applicable regulations and healthy corporate principles;

Independency, a situation where the Company is managed professionally without conflicts of interest and influence/pressure from any party that is not aligned with regulations and healthy corporate principles;

Fairness, justice and equality in fulfilling the rights of stakeholders that arise from agreements and regulations.

STRUKTUR ORGAN DAN KEBIJAKAN TATA KELOLA PERUSAHAAN

Perusahaan memastikan penerapan GCG berjalan secara efektif dan dilakukan secara menyeluruh di seluruh organisasi. Untuk itu, Perusahaan menetapkan struktur organ dan perangkat kebijakan yang disusun secara sistematis sebagai landasan dan perangkat dalam mendukung penerapan prinsip-prinsip GCG dalam setiap aktivitas Perusahaan.

Struktur Organ Tata Kelola Perusahaan

Penerapan GCG didukung oleh struktur organ dengan pembagian tugas, tanggung jawab, dan kewenangan yang jelas dan

ORGAN STRUCTURE AND CORPORATE GOVERNANCE POLICIES

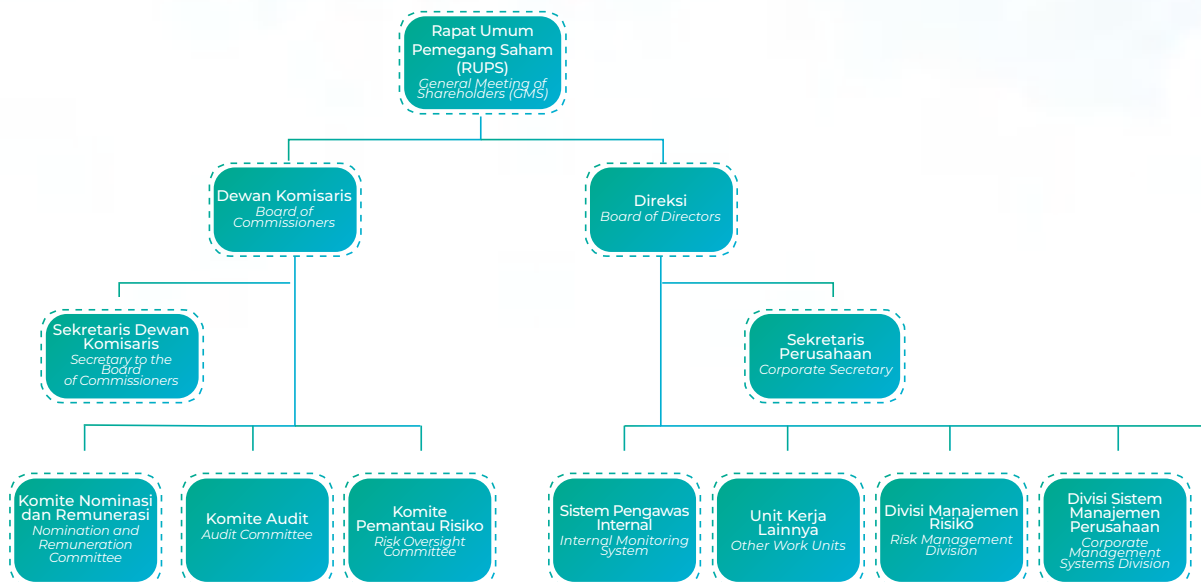
The Company ensures that GCG implementation is effective and comprehensive throughout the organization. Hence, the Company has established a structure of corporate organs and a set of systematically prepared policies as a basis and instruments to support the implementation of GCG principles in every Company's activity.

Organ Structure of Corporate Governance

GCG implementation is supported with structured organs with a clear and effective distribution of duties, responsibilities, and

efektif yang mengacu pada ketentuan dan regulasi yang berlaku. Struktur organ Perusahaan terdiri dari Organ Utama dan Organ Pendukung. Organ Utama Perusahaan terdiri dari Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Dewan Komisaris, dan Direksi. Sementara Organ Pendukung merupakan organ yang mendukung kelancaran tugas Dewan Komisaris dan Direksi yang masing-masing berada di bawah Dewan Komisaris dan Direksi.

authorities that refer to applicable provisions and regulations. The Company's organ structure consists of Main Organs and Supporting Organs. The Company's Main Organs consist of the General Meeting of Shareholders (GMS), Board of Commissioners (BOC), and Board of Directors (BOD). Meanwhile, Supporting Organs, which supports of the duties of the Boards, are placed respectively under the Board of Commissioners and Board of Directors.



Kebijakan Tata Kelola Perusahaan

Dalam upaya menerapkan GCG, struktur organ Perusahaan dilengkapi dengan perangkat kebijakan yang menjadi panduan dalam penerapan GCG. Perangkat kebijakan terdiri dari aspek yang mengatur mengenai hubungan dan tata kerja seluruh organ tata kelola perusahaan yang mengacu pada berbagai peraturan, regulasi, dan ketentuan Anggaran Dasar Perusahaan. Perangkat kebijakan tersebut meliputi Pedoman Good Corporate Governance (GCG Code), Code of Conduct, Board Manual, Pedoman Pengendalian Gratifikasi, Pedoman Sistem Pengaduan Pelanggaran (Whistleblowing System), Piagam Komite Audit, Internal Audit Charter, serta kebijakan dan prosedur lain.

Corporate Governance Policy

In the efforts to implement GCG, the Company's organs are equipped with a set of policies that serve as guides in implementing GCG. The policies cover aspects that manage relationships and operating procedures of all Company's governance organs in accordance to various rules, regulations, and provisions of the Company's Articles of Association. These policies include Good Corporate Governance Guidelines (GCG Code), Code of Conduct, Board Manual, Gratification Control Guidelines, Whistleblowing System Guidelines, Audit Committee Charter, Internal Audit Charter, and other policies and procedures.

PERKEMBANGAN PENERAPAN TATA KELOLA PERUSAHAAN

Penyempurnaan Pedoman Tata Kelola Perusahaan

Sebagai landasan pelaksanaan GCG, seluruh perangkat GCG termasuk kebijakan dan pedoman GCG selalu ditinjau dan dievaluasi untuk memastikan relevansi dengan peraturan dan regulasi yang berlaku. Pada tahun 2023, tidak terdapat perubahan pada perangkat tata kelola perusahaan karena pada tahun 2022 telah dilakukan penyempurnaan *Code of Conduct* dan Kebijakan Sistem Manajemen Terpadu di Perusahaan.

Sosialisasi Penerapan Tata Kelola Perusahaan

Perusahaan terus mendorong pemahaman dan kepedulian terhadap penerapan tata kelola perusahaan di seluruh karyawan maupun pihak eksternal seperti mitra kerja maupun *vendor* melalui berbagai program sosialisasi secara langsung maupun tidak langsung. Pada tahun 2023, Perusahaan telah melakukan kegiatan sosialisasi penerapan tata kelola perusahaan di antaranya:

1. Sosialisasi melalui penerbitan Surat Edaran Direksi No. SE.1202/UM.003/ASDP-2023 tanggal 13 April tentang Imbauan Pencegahan dan Pengendalian Gratifikasi;
2. Sosialisasi melalui penerbitan Surat Edaran Direksi No. SE.01226/UM.003/ASDP-2023 tanggal 27 Desember 2023 tentang Imbauan Pencegahan dan Pengendalian Gratifikasi;
3. Rapat Sosialisasi Survei Pemahaman GCG dan SMAP (Sistem Manajemen Anti Penyuapan) pada 14 Maret 2023 kepada PIC Unit Kerja Kantor Pusat, Regional, dan Cabang;
4. Sosialisasi melalui video Sosialisasi Pengendalian Gratifikasi, SMAP, dan Prinsip 4 No's (*No Gift, No Bribery, No Kickback, No Luxurious Hospitality*) pada bulan Desember 2023 yang juga bertepatan dalam peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia (Hakordia) 2023;

DEVELOPMENTS IN THE IMPLEMENTATION OF CORPORATE GOVERNANCE

Improvement of Corporate Governance Guidelines

Employed as the basis for GCG implementation, every GCG instrument, including GCG policies and guidelines, are constantly reviewed and evaluated to ensure their relevance to applicable rules and regulations. Throughout 2023, there were no changes to any corporate governance policy, because improvement to the Code of Conduct and the Company's Integrated Management System Policy were completed in 2022.

Promoting the Implementation of Corporate Governance

The Company continues to encourage better understanding and awareness of corporate governance implementation among all employees and external parties, such as work partners and vendors, through various direct and indirect outreach programs. Throughout 2023, the Company promoted the implementation of corporate governance through several ways, which includes:

1. Publicized Directors' Circular Letter No. SE.1202/UM.003/ASDP-2023 dated 13 April on Appeal for the Prevention and Control of Gratification;
2. Publicized Directors' Circular Letter No. SE.01226/UM.003/ASDP-2023 dated 27 December 2023 on Appeal for the Prevention and Control of Gratification;
3. Held Dissemination Meeting on the GCG and SMAP (Sistem Manajemen Anti Penyuapan – Anti-Bribery Management System) Comprehension Survey on 14 March 2023 to the PIC of the Head Office, Regional, and Branch Office Work Units;
4. Broadcasted video of Promotion of Gratification Control, SMAP and the 4 No's Principle (*No Gift, No Bribery, No Kickback, No Luxurious Hospitality*) in December 2023, which also coincided with the commemoration of World Anti-Corruption Day (Hakordia) 2023;

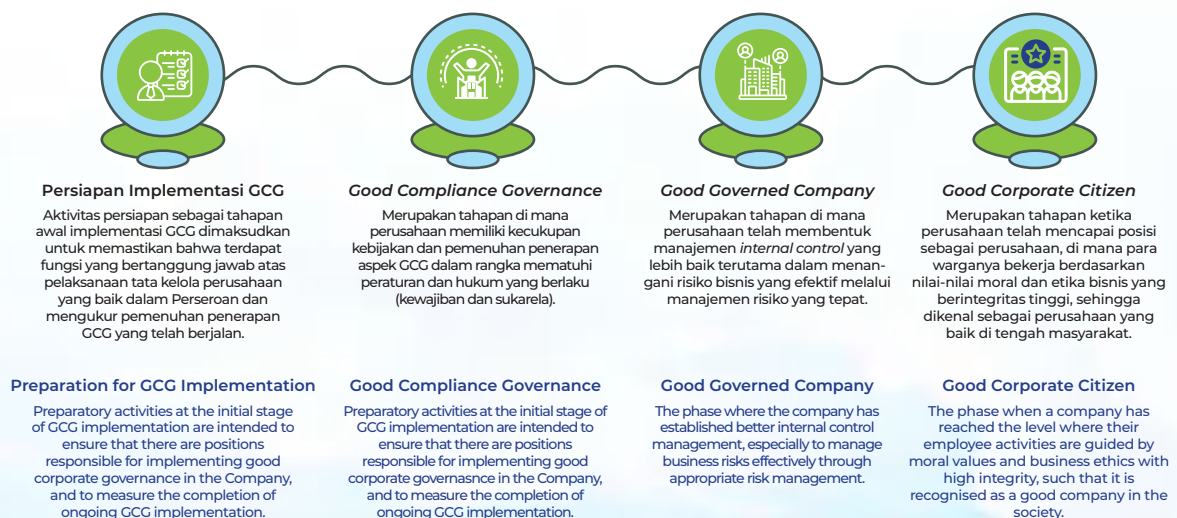
5. Sosialisasi melalui poster Sosialisasi Pengendalian Gratifikasi, SMAP, dan Prinsip 4 No's (*No Gift, No Bribery, No Kickback, No Luxurious Hospitality*) pada *desktop/laptop* karyawan pada bulan Desember 2023 yang juga bertepatan dalam peringatan Hakordia 2023;
6. Penyiapan aplikasi Simagov (Sistem Manajemen *Good Corporate Governance*) yang dapat diakses oleh karyawan pada alamat <https://simagov.indonesiaferry.id> pada komputer karyawan yang terhubung dengan jaringan Perusahaan untuk persiapan dan pelaksanaan asesmen GCG, tindak lanjut rekomendasi dan juga sebagai media sosialisasi GCG, Pengendalian Gratifikasi dan SMAP.
5. Installed digital posters of Promotion of Gratification Control, SMAP and the 4 No's Principle (*No Gift, No Bribery, No Kickback, No Luxurious Hospitality*) on employees' desktops/laptops in December 2023, coinciding with the commemoration of Hakordia 2023;
6. Prepared Simagov (Good Corporate Governance Management System) application at <https://simagov.indonesiaferry.id> that is accessible by employees on office computers that are connected to the Company's network. This was completed in preparation and implementation of GCG assessments, subsequent follow-up recommendations, and also as a promotion medium for GCG, Gratification Control and SMAP.

Roadmap Tata Kelola Perusahaan

Perusahaan memiliki strategi implementasi GCG dalam jangka panjang yang dituangkan dalam bentuk *roadmap* GCG yang disusun selaras dengan rencana strategis Perusahaan untuk memastikan pencapaian strategis Perusahaan dapat tercapai secara optimal. *Roadmap* GCG menjadi landasan dan panduan dalam penerapan maupun pengembangan tata kelola perusahaan sehingga dapat mendorong kualitas penerapan GCG secara konsisten dan berkesinambungan menuju pencapaian status *Good Corporate Citizen*. Secara umum, *roadmap* GCG Perusahaan adalah sebagai berikut:

Corporate Governance Roadmap

The Company's strategy for long term GCG implementation is outlined in the GCG roadmap which was developed in alignment with the Company's strategic plan to ensure optimal strategic achievements. The GCG Roadmap is the foundation and guide in implementing and developing corporate governance so that it may encourage consistency and continuity of excellent GCG implementation towards achieving *Good Corporate Citizen* status. In general, the Company's GCG roadmap is described as follows:



Penilaian dan Evaluasi Implementasi Tata Kelola Perusahaan

Perusahaan berupaya untuk meningkatkan kualitas penerapan tata kelola perusahaan yang baik sebagai salah satu upaya untuk mencapai *roadmap* GCG. Untuk itu, Perusahaan melakukan penilaian dan evaluasi penerapan prinsip-prinsip GCG secara berkala yang dilakukan oleh pihak internal (*self-assessment*) maupun oleh pihak eksternal yang independen.

Pada tahun 2023, Perusahaan melakukan *assessment* penerapan prinsip-prinsip GCG oleh pihak independen terhadap tahun buku 2022 mengacu pada Keputusan Sekretaris Kementerian BUMN No. SK-16-S.MBU-2012 yang terdiri dari 6 aspek penilaian sebagai berikut:

1. Komitmen terhadap Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik secara berkelanjutan;
2. Pemegang Saham dan RUPS;
3. Dewan Komisaris;
4. Direksi;
5. Pengungkapan dan Keterbukaan Informasi;
6. Faktor lainnya.

Berdasarkan hasil *assessment* tersebut, Perusahaan memperoleh skor sebesar 96,314% dengan kualifikasi Sangat Baik. Skor tersebut mengalami peningkatan sebesar 0,966% dibandingkan hasil *assessment* pada tahun buku sebelumnya. Peningkatan skor *assessment* ini menunjukkan cerminan atas komitmen Perusahaan dalam menerapkan prinsip-prinsip GCG di seluruh organisasi.

Assessment and Evaluation of Corporate Governance Implementation

The Company strives to improve the quality of GCG implementation in its endeavours to actualize the GCG roadmap. Subsequently, the Company periodically assesses and evaluates the implementation of GCG principles, carried out by internal parties (*self-assessment*) and by independent external parties.

In 2023, the Company employed an independent party to assess GCG principles implementation for the 2022 financial year, referring to the Decree of the Secretary of the Ministry of SOEs No. SK-16-S.MBU-2012, which consists of 6 assessment aspects as follows:

1. Commitment to implementing Good Corporate Governance continuously;
2. Shareholders and GMS;
3. Board of Commissioners;
4. Board of Directors;
5. Information Disclosure and Transparency;
6. Other factors.

The results of the assessment showed that the Company obtained a score of 96.314%, which falls in the classification of Very Good. This score has increased by 0.966% compared to the assessment results in the previous financial year. The increased score reflected the Company's commitment to implement GCG principles throughout the organization.

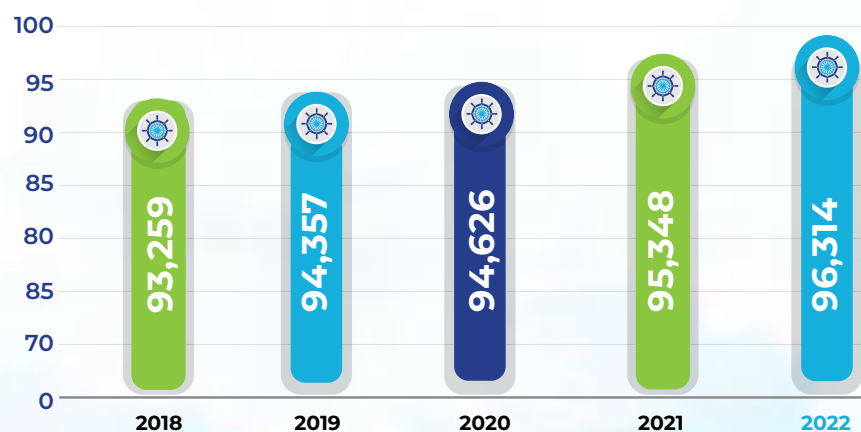
Tabel Hasil Penilaian Tata Kelola Perusahaan Tahun 2023
Table of 2023 Corporate Governance Assessment Results

No	Aspek/Parameter Aspect/Parameter	Bobot Weight	Skor Score	% Capaian % Achievement	Penjelasan Explanation
1.	Komitmen terhadap penerapan GCG yang berkelanjutan Commitment to continuous implementation of GCG	7,00	7,000	100,000%	Sangat Baik Very Good
2.	Pemegang saham dan RUPS Shareholders and GMS	9,00	8,769	97,436%	Sangat Baik Very Good
3.	Dewan Komisaris Board of Commissioners	35,00	33,660	96,171%	Sangat Baik Very Good
4.	Direksi Board of Directors	35,00	34,097	97,419%	Sangat Baik Very Good
5.	Pengungkapan dan keterbukaan informasi Information Disclosure and openness of	9,00	8,413	93,474%	Sangat Baik Very Good
6.	Faktor lainnya Other factors	5,00	4,375	87,500%	Sangat Baik Very Good
Skor Keseluruhan Total Score		100,00	96,314	96,314%	Sangat Baik Very Good
Klasifikasi Kualitas Penerapan GCG Quality Classification of the GCG Implementation					Sangat Baik Very Good

Komitmen penerapan GCG yang dilakukan Perusahaan juga tercermin dari skor penilaian GCG selama 5 tahun terakhir yang terus mengalami peningkatan.

The Company's commitment to implementing GCG was also reflected in steadily increasing assessment scores over the last 5 years.

Hasil Penilaian Tata Kelola Perusahaan Tahun 2018-2022
Corporate Governance Assessment Results 2018-2022



RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM (RUPS)

GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS (GMS)

Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) merupakan organ tertinggi dalam struktur tata kelola perusahaan yang menjadi wadah bagi pemegang saham untuk melaksanakan hak dan kewajibannya serta wadah dalam pengambilan keputusan strategis di luar kewenangan Dewan Komisaris dan Direksi mengacu pada undang-undang dan/atau Anggaran Dasar Perusahaan.

RUPS memiliki wewenang tersendiri yang tidak diberikan kepada Direksi maupun Dewan Komisaris. Adapun wewenang RUPS mencakup namun tidak terbatas pada meminta pertanggungjawaban Dewan Komisaris dan Direksi terkait pengelolaan Perusahaan; mengubah Anggaran Dasar; mengangkat dan memberhentikan Direktur serta Anggota Dewan Komisaris; serta memutuskan pembagian tugas dan wewenang kepengurusan di antara Direktur.

Penyelenggaraan RUPS Perusahaan dilakukan dengan mengacu pada peraturan dan regulasi sebagai berikut:

1. UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas juncto UU No. 6 Tahun 2023 Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang,
2. Anggaran Dasar Perusahaan.

The General Meeting of Shareholders (GMS) is the highest organ in the Company's governance structure that functions as a forum for shareholders to exercise their rights and obligations as well as a forum for making strategic decisions outside the authority of the Boards of Commissioners and Directors in regard of applicable law and/or the Company's Articles of Association.

The GMS has its own authority that is granted neither to the Board of Directors nor Board of Commissioners. The GMS authority includes but is not limited to holding the Board of Commissioners and Board of Directors accountable concerning the Company management; to amend the Articles of Association; to appoint and dismiss Directors and Commissioners; and to decide on the distribution of duties and management authority among the Directors.

The Company's GMS is held with reference to the following rules and regulations:

1. Law No. 40/2007 concerning Limited Liability Company in conjunction with Law No. 6/2023 on Stipulation of Government Regulation in Lieu of Law No. 2/2022 concerning Job Creation becomes Law,
2. Company's Articles of Association.

PENYELENGGARAAN RUPS TAHUNAN SELAMA TAHUN 2023

Pada tahun 2023, Perusahaan menyelenggarakan RUPS Tahunan sebanyak 2 kali yang terdiri dari RUPS Luar Biasa tentang Pengajuan Rencana Kerja Anggaran Perusahaan (RKAP) dan Rencana Kerja & Anggaran Program Tanggung Jawab Sosial & Lingkungan (RKA TJSL) Tahun 2023 serta RUPS Tahunan tentang Laporan Keuangan (Audited) Konsolidasian PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) Tahun 2022.

RUPS Luar Biasa Pengajuan RKAP Tahun 2023

Tanggal & Waktu RUPS
GMS Date & Time

Senin, 30 Januari 2023 Pukul 09:44 WIB
Monday, 30 January 2023 at 09:44 Western Indonesia Time

Lokasi
Place

Ruangan Banda B, Hotel Borobudur, Jakarta Pusat, DKI Jakarta
Room Banda B, Borobudur Hotel, Central Jakarta, DKI Jakarta

Pimpinan RUPSLB
Chairman of the AGMS

Desty Arlaini

Kuorum
Quorum

Dihadiri dan diwakili oleh 5.173.195 (lima juta seratus tujuh puluh tiga ribu seratus sembilan puluh lima) lembar saham yang merupakan seluruh saham dalam Perusahaan dengan hak suara sah.
Attended and represented by 5,173,195 (five million one hundred seventy three thousand one hundred ninety five) shares which constitute all shares with voting rights in the Company.

PROCEDURES OF 2023 ANNUAL GMS

In 2023, the Company held 2 Annual GMS, which consisted of the Extraordinary GMS on Submission of the Company Work Plan & Budget (WPB) and the 2023 Work Plan & Budget for Corporate Social Responsibility Program (WPB CSR); and the Annual GMS on Consolidated 2023 Financial Reports (Audited) of PT ASDP Indonesia Ferry (Persero).

Extraordinary GMS for 2023 WPB Proposal

Agenda RUPS Luar Biasa Pengajuan RKAP Tahun 2023

Agenda for Extraordinary GMS for 2023 WPB Proposal

Agenda <i>Agenda</i>	Keputusan <i>Decisions</i>	Tindak Lanjut <i>Follow Up Action</i>
Agenda Pertama Pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) termasuk di dalamnya penetapan klasifikasi risiko PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) pada kuadran Sistemik B serta Rencana Kerja dan Anggaran Dewan Komisaris Tahun 2023. First Agenda Ratification of the Company Work Plan and Budget (WPB), including defining the risk classification of PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) in the Systemic B quadrant and the 2023 WPB for the Board of Commissioners.	RKAP Tahun 2023 disetujui dan disahkan dalam RUPSLB. The 2023 WPB was approved and ratified at the EGMS.	Telah direalisasikan <i>Accomplished</i>
Agenda Kedua Pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (RKA TJSL) Tahun 2023. Second Agenda Ratification of the Work Plan and Budget for the Social and Environmental Responsibility Program (WPB CSR) for 2023.	RKA TJSL Tahun 2023 disetujui dan disahkan dalam RUPSLB. The 2023 WPB CSR was approved and ratified at the EGMS.	Telah direalisasikan <i>Accomplished</i>
Agenda Ketiga Penetapan Kontrak Manajemen Tahunan yang memuat Target <i>Key Performance Indicators</i> (KPI) Direksi secara Kolegial Tahun 2023. Third Agenda Defining the 2023 Annual Management Contract, which contained the Board of Directors' Collegial Key Performance Indicators (KPI).	KPI Direksi secara Kolegial Tahun 2023 disetujui dan disahkan dalam RUPSLB. The 2023 KPI for the Board of Directors was approved and ratified at the EGMS.	Telah direalisasikan <i>Accomplished</i>
Agenda Keempat Penetapan Kontrak Manajemen Tahunan <i>Key Performance Indicators</i> Dewan Komisaris Tahun 2023. Fourth Agenda Defining the 2023 Annual Management Contract for Board of Commissioners KPI.	KPI Dewan Komisaris Tahun 2023 disetujui dan disahkan dalam RUPSLB. The 2023 Collegial KPI for the Board of Commissioners was approved and ratified at the EGMS.	Telah direalisasikan <i>Accomplished</i>
Agenda Kelima Penetapan Indikator Aspek Operasional untuk Pengukuran Tingkat Kesehatan Tahun 2023. Fifth Agenda Defining the Indicators of Operational Aspect for 2023 Health Level Measurement.	Indikator Aspek Operasional untuk Pengukuran Tingkat Kesehatan Tahun 2023 disetujui dan disahkan dalam RUPSLB. Operational Aspect Indicators for 2023 Health Level Measurement were approved and ratified at the EGMS.	Telah direalisasikan <i>Accomplished</i>
Agenda Keenam Persetujuan pelimpahan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk memberikan persetujuan apabila terdapat tindakan-tindakan yang mengakibatkan perubahan alokasi anggaran investasi dengan nilai maksimum 10% dari nilai masing-masing program investasi sepanjang tidak merubah total nilai investasi. Sixth Agenda Approved delegation of authority to the Board of Commissioners to give their approval on actions that resulted in changes to the investment budget allocation, with a maximum 10% of the value of each investment program, provided that the total investment value does not change.	Pelimpahan kewenangan kepada Dewan Komisaris disetujui dalam RUPSLB. The delegation of authority to the Board of Commissioners was approved at the EGMS.	Telah direalisasikan <i>Accomplished</i>

Kehadiran RUPS Luar Biasa Pengajuan RKAP Tahun 2023

Attendance of Extraordinary GMS for 2023 WPB Proposal

No	Nama Name	Jabatan Position	Kehadiran Presence
1	Ira Puspawati	Direktur Utama President Director	Hadir Present
2	M. Yusuf Hadi	Direktur Komersial dan Pelayanan Commercial and Services Director	Hadir Present
3	Djunia Satriawan	Direktur Keuangan, Teknologi Informasi dan Manajemen Risiko Finance, Information Technology and Risk Management Director	Hadir Present
4	Kusnadi C. Wijaya	Direktur Teknik dan Fasilitas Engineering and Facilities Director	Hadir Present
5	Harry Muhammad Adhi Caksono	Direktur Perencanaan dan Pengembangan Planning and Development Director	Hadir Present
6	Wahyu Wibowo	Direktur SDM dan Layanan Korporasi HR and Corporate Services Director	Hadir Present
7	Saiful Haq Manan	Komisaris Utama (Independen) President Commissioner (Independent)	Hadir Present
8	Hendar Ristriawan	Komisaris Independen Independent Commissioner	Hadir Present
9	Iwan Hari Sugiarto	Komisaris Independen Independent Commissioner	Hadir Present
10	Budi Setiyadi	Komisaris Commissioner	Hadir Present

RUPS Tahunan tentang Laporan Keuangan Audited Tahun 2022

Annual GMS for 2022 Audited Financial Report

Tanggal & Waktu RUPS GMS Date & Time	Senin, 26 Juni 2023 Pukul 09:10 WIB Monday, 26 June 2023 at 09:10 Western Indonesia Time
Lokasi Place	Auditorium Lantai III, Jalan Jenderal Achmad Yani Kavling 52-A, Cempaka Putih, Jakarta Pusat, 10510 Auditorium 3rd Floor, Jalan Jenderal Achmad Yani Kavling 52-A, Cempaka Putih, Central Jakarta, 10510
Pimpinan RUPST Chairman of the AGMS	Desty Arlaini
Kuorum Quorum	Dihadiri dan diwakili oleh 5.173.195 (lima juta seratus tujuh puluh tiga ribu seratus sembilan puluh lima) lembar saham yang merupakan seluruh saham dalam Perusahaan dengan hak suara sah. Attended and represented by 5,173,195 (five million one hundred seventy three thousand one hundred ninety five) shares which constitute all shares with voting rights in the Company

Agenda RUPS Tahunan tentang Laporan Keuangan Audited Tahun 2022

Agenda for Annual GMS for 2022 Audited Financial Reports

Agenda Agenda	Keputusan Decisions	Tindak Lanjut Follow Up Action
Agenda Pertama Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan untuk Tahun Buku 2022, serta Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan Tahun 2022. First Agenda Approval of the Company's Annual Report including the Supervisory Report of the Board of Commissioners and the Implementation Report of Social and Environmental Responsibility for the 2022 Financial Year, as well as Ratification of the 2022 Consolidated Financial Report.	Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan untuk Tahun Buku 2022, serta mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan Tahun 2022 yang berakhir pada tanggal 31-12-2022 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar dan Rekan sesuai laporannya No. 00561/2.1030/AU.1/06/1155-3/1/IV/2023 dengan opini: "wajar, dalam semua hal yang material." Approved the Company's Annual Report including the Supervisory Report of the Board of Commissioners and the Implementation Report of Social and Environmental Responsibility for the 2022 Financial Year, as well as ratified the 2022 Consolidated Financial Report ending 31-12-2022, which had been audited by the Public Accounting Firm (KAP) Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar dan Rekan according to report No. 00561/2.1030/AU.1/06/1155-3/1/IV/2023 with an opinion of: "present fairly, in all material respects."	Telah direalisasikan Accomplished
Agenda Kedua Pengesahan Laporan Keuangan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil (PUMK) Tahun Buku 2022. Second Agenda Ratification of the Financial Report of Micro and Small Enterprise Funding Program (PUMK) for the 2022 Financial Year.	Mengesahkan Laporan Keuangan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil (PUMK) Tahun Buku 2022 yang menjadi bagian dari Laporan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan yang telah diaudit oleh KAP Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar dan Rekan sesuai laporannya No. 00591/2.1030/AU.2/12/1155-3/0/III/2023 dengan opini "wajar, dalam semua hal yang material". Ratified the Financial Report for the Micro and Small Enterprise (PUMK) Funding Program for the 2022 Financial Year, which was part of the Social and Environmental Responsibility Report that was audited by KAP Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar dan Rekan according to report No. 00591/2.1030/AU.2/12/1155-3/0/III/2023 with an opinion of "present fairly, in all material respects".	Telah direalisasikan Accomplished
Agenda Ketiga Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2022. Third Agenda Determine the Use of the Company's Net Income for the 2022 Financial Year.	Menetapkan penggunaan Laba Bersih Atribusi Pemilik Entitas Induk Perseroan Tahun Buku 2022 sebesar Rp563.765.073.338,00 (lima ratus enam puluh tiga miliar tujuh ratus enam puluh lima juta tujuh puluh tiga ribu tiga ratus tiga puluh delapan Rupiah). Determined the use of Net Income Attribution to Owners of the Company's Parent Entity for the 2022 Financial Year that was amounting to Rp563,765,073,338.00 (five hundred sixty three billion seven hundred sixty five million seventy three thousand three hundred and thirty eight Rupiah).	Telah direalisasikan Accomplished

Agenda <i>Agenda</i>	Keputusan <i>Decisions</i>	Tindak Lanjut <i>Follow Up Action</i>
Agenda Keempat Penetapan Remunerasi (gaji/honorarium, fasilitas dan tunjangan) Tahun 2023 dan Tantiem Tahun Buku 2022 bagi Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan. Fourth Agenda Determine the 2023 Remuneration (salary/honorarium, facilities and allowances) and 2022 Tantiem for the Company's Boards of Directors and Commissioners.	Besaran Tantiem Tahun Buku 2022, gaji untuk Direksi dan honorarium untuk Dewan Komisaris berikut Fasilitas dan Tunjangan Lainnya untuk Tahun 2023, akan ditetapkan secara tersendiri. The portion of the performance bonus for the 2022 Financial Year, the salary for the Directors and the honorarium for the Board of Commissioners as well as other Facilities and Allowances for 2023, shall be determined separately.	Telah direalisasikan Accomplished
Agenda Kelima Penetapan Akuntan Publik (AP) dan/atau Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Kecil (PUMK) serta Non PUMK untuk Tahun Buku 2022. Fifth Agenda Designate Public Accountant and/or Public Accounting Firm to audit the Financial Report of the Micro and Small Enterprise Funding Program (PUMK) and Non-PUMK for the 2022 Financial Year.	a. Menetapkan KAP Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar dan Rekan untuk melakukan audit umum atas Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan Tahun Buku 2023 dan Laporan Keuangan Program PUMK Perseroan serta Non PUMK untuk Tahun Buku 2023. Appointed KAP Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar dan Rekan to conduct a general audit of the Company's Consolidated Financial Report for the 2023 Financial Year and the Financial Report for the PUMK and Non-PUMK Programs for the 2023 Financial Year. b. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk KAP untuk melakukan audit atas Laporan Keuangan Perseroan periode lainnya pada Tahun Buku 2023 untuk tujuan dan kepentingan Perseroan. Granted authority to the Board of Commissioners to appoint a KAP to audit the Company's Financial Reports of other periods in the 2023 Financial Year, in the objectives and interests of the Company. c. Memberikan pelimpahan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan besaran imbalan jasa audit, penambahan ruang lingkup pekerjaan yang diperlukan dan persyaratan lainnya yang wajar bagi KAP tersebut, serta menetapkan KAP pengganti dalam hal KAP Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar dan Rekan, karena sebab apapun tidak dapat menyelesaikan audit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan serta Laporan Keuangan Program PUMK dan laporan lainnya untuk Tahun Buku 2023, termasuk menetapkan imbalan jasa audit dan persyaratan lainnya bagi KAP pengganti tersebut. Granted delegation of authority to the Board of Commissioners to determine the compensation for audit services, to increase the scope of work required, and other reasonable requirements from the KAP, as well as determine a replacement firm in the event that KAP Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar and Rekan, for any reason, cannot complete the audit of the Consolidated Financial Report, Financial Report for the PUMK Program and other reports for the 2023 Financial Year, including determining audit fee and other requirements for the replacement firm.	Telah direalisasikan Accomplished

**Kehadiran RUPS Tahunan tentang Laporan
Keuangan Audited Tahun 2022****Attendance of Annual GMS for 2022
Audited Financial Reports**

No	Nama Name	Jabatan Position	Kehadiran Presence
1	Ira Puspadewi	Direktur Utama President Director	Hadir Present
2	M. Yusuf Hadi	Direktur Komersial dan Pelayanan Commercial and Services Director	Hadir Present
3	Djunia Satriawan	Direktur Keuangan, Teknologi Informasi dan Manajemen Risiko Finance, Information Technology and Risk Management Director	Hadir Present
4	Kusnadi C. Wijaya	Direktur Teknik dan Fasilitas Engineering and Facilities Director	Hadir Present
5	Saiful Haq Manan	Komisaris Utama (Independen) President Commissioner (Independent)	Hadir Present
6	Hendar Ristriawan	Komisaris Independen Independent Commissioner	Hadir Present
7	Iwan Hari Sugiarto	Komisaris Independen Independent Commissioner	Hadir Present
8	Susi Meyrista Tarigan	Komisaris Commissioner	Hadir Present

DEWAN KOMISARIS

BOARD OF COMMISSIONERS

Dewan Komisaris sebagai organ Perusahaan memiliki tugas dan tanggung jawab secara kolektif untuk mengawasi dan memberikan nasihat kepada Direksi yang mencakup langkah-langkah pencegahan, perbaikan, dan jika perlu dilakukan pemberhentian sementara, serta memastikan penerapan GCG pada seluruh tingkatan dan level organisasi.

Setiap anggota Dewan Komisaris dituntut untuk memiliki integritas tinggi, pengetahuan, kemampuan, dan komitmen untuk menyediakan waktu dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Hal ini bertujuan untuk memastikan pengambilan keputusan yang efektif, cepat, tepat dan independen tanpa ada benturan kepentingan baik secara pribadi, hubungan antar Dewan Komisaris maupun dengan Direksi.

Dalam menjalankan fungsi, tugas dan tanggung jawabnya, Dewan Komisaris didukung oleh organ pendukung sesuai dengan peraturan UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

As a Company's organ, the Board of Commissioners has a collective duty and responsibility to supervise and advise the Board of Directors on measures of preventative, corrective, and, if necessary, temporary dismissal, as well as ensuring GCG implementation at all levels of the organization.

Each Commissioner must have high integrity, knowledge, ability and commitment to make time to carry out their duties and responsibilities. This aims to ensure effective, quick, precise, and independent decision making absent of any conflict of interest, either personally or in relations between the Boards of Commissioners and Directors.

In carrying out their roles, duties and responsibilities, the Board of Commissioners is assisted by supporting organs in accordance with Law No. 40/2007 concerning Limited Liability Companies.

KOMPOSISI DEWAN KOMISARIS

Anggota Dewan Komisaris diangkat dan diberhentikan melalui proses yang terbuka dalam RUPS. Proses pemilihan anggota Dewan Komisaris dalam RUPS harus memenuhi syarat sebagai individu yang layak dan memiliki integritas serta kompetensi yang diperlukan untuk menjalankan tugas dan tanggung jawab dalam melakukan pengawasan. Komposisi Dewan Komisaris Perusahaan per tanggal 31 Desember 2023 terdiri dari 6 (enam) orang.

COMPOSITION OF THE BOARD OF COMMISSIONERS

Members of the Board of Commissioners are appointed and dismissed in GMS through a transparent process. In selecting a member of the Board of Commissioners during the GMS, the person must meet the criteria as an esteemed individual who has the integrity and competence required to carry out their supervisory duties and responsibilities. As of 31 December 2023, the composition of the Company's Board of Commissioners consisted of 6 (six) persons.

Komposisi Dewan Komisaris per 31 Desember 2023

Composition of the Board of Commissioners as of 31 December 2023

Nama Name	Jabatan Position	Dasar Pengangkatan Basis of Appointment	Masa Jabatan Term of Office
Saiful Haq Manan	Komisaris Utama (Independen) President Commissioner (Independent)	Keputusan Menteri BUMN No.SK-10/MBU/01/2023 tanggal 20 Januari 2023 Decree of the Minister of SOEs No. SK-10/MBU/01/2023 dated 20 January 2023.	Januari 2023 - Januari 2028 January 2023 - January 2028
Hendar Ristriawan	Komisaris Independen Independent Commissioner	Keputusan Menteri BUMN No. SK-97/MBU/05/2023 tanggal 12 Mei 2023. Decree of the Minister of SOEs No. SK-97/MBU/05/2023 dated 12 May 2023.	Mei 2023 - Mei 2028 May 2023 - May 2028
Iwan Hari Sugiarto	Komisaris Independen Independent Commissioner	Keputusan Menteri BUMN No. SK-321/MBU/10/2020 tanggal 9 Oktober 2020. Decree of the Minister of SOEs No. SK-321/MBU/10/2020 dated 9 October 2020.	Oktober 2020- Oktober 2025 October 2020 October 2025
Susi Meyrista Tarigan	Komisaris Commissioner	Keputusan Menteri BUMN No. SK-233/MBU/10/2019 tanggal 17 Oktober 2019. Decree of the Minister of SOEs No. SK-233/MBU/10/2019 dated 17 October 2019.	Oktober 2019- Oktober 2024 October 2019- October 2024
Edmil Nurjamil	Komisaris Commissioner	Keputusan Menteri BUMN No. SK-124/MBU/04/2020 tanggal 21 April 2020. Decree of the Minister of SOEs No. SK-124/MBU/04/2020 dated 21 April 2020.	April 2020-April 2025 April 2020-April 2025
Budi Setiyadi	Komisaris Commissioner	Keputusan Menteri BUMN No. SK-208/MBU/09/2022 tanggal 20 September 2022. Decree of the Minister of SOEs No. SK-208/MBU/09/2022 dated 20 September 2022.	September 2022 -September 2027 September 2022 -September 2027

PEDOMAN KERJA, TUGAS, DAN
TANGGUNG JAWAB DEWAN
KOMISARIS

Pedoman Kerja Dewan Komisaris

Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, Dewan Komisaris memiliki Pedoman Kerja Komisaris (*Board Manual*) yang ditetapkan oleh Dewan Komisaris dalam Keputusan Bersama Direksi dan Dewan Komisaris No. SK.801/HK.002/ASDP-2020 tanggal 22 Juni 2020.

Merujuk pada Anggaran Dasar dan *Board Manual* yang mengatur prosedur yang relevan terkait pelaksanaan tugas Dewan Komisaris sesuai dengan peraturan dan hukum yang berlaku, pedoman ini mencakup beberapa aspek, seperti:

1. Pengertian Dewan Komisaris,
2. Persyaratan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Dewan Komisaris,
3. Komposisi Dewan Komisaris,

THE BOARD OF COMMISSIONERS'
WORK GUIDELINES, DUTIES, AND
RESPONSIBILITIES

Board Manual

In carrying out their duties and responsibilities, the BOC has a Board Manual stipulated by the BOC in Joint Decree of the BOD and BOC No. SK.801/HK.002/ASDP-2020 dated 22 June 2020.

Referring to the Articles of Association and Board Manual, which regulate relevant procedures related to the execution of duties by the Board of Commissioners in accordance with applicable regulations and laws, this guideline covers several aspects, such as:

1. Definition of the Board of Commissioners,
2. Requirements, Appointment, and Discharge of the Board of Commissioners,
3. Composition of the Board of Commissioners,
4. Term of Office of the Board of Commissioners,

4. Masa Jabatan Dewan Komisaris,
5. Pengaturan Rangkap Jabatan,
6. Program Pengenalan dan Pelatihan Dewan Komisaris,
7. Tugas Dewan Komisaris,
8. Wewenang Dewan Komisaris,
9. Tanggung Jawab Dewan Komisaris,
10. Pembagian Tugas, Wewenang dan Tanggung Jawab di antara Anggota Dewan Komisaris,
11. Rencana Kerja dan Anggaran Dewan Komisaris,
12. Rapat Dewan Komisaris,
13. Pengambilan Keputusan di Luar Rapat Dewan Komisaris,
14. Kebijakan Pengawasan Perusahaan,
15. Etika Jabatan,
16. Pelaporan dan Pertanggungjawaban Dewan Komisaris,
17. Pengukuran dan Penilaian Kinerja Dewan Komisaris,
18. Remunerasi Dewan Komisaris.
5. Provision on Concurrent Positions,
6. Onboarding and Training Program for Board of Commissioners,
7. Duties of the Board of Commissioners,
8. Authorities of the Board of Commissioners,
9. Responsibilities of the Board of Commissioners,
10. Distribution of Duties, Authority and Responsibilities among Members of the Board of Commissioners,
11. Work Plan and Budget of the Board of Commissioners,
12. Board of Commissioners Meeting,
13. Decision Making Outside of the Board of Commissioners Meetings,
14. Company Supervision Policy,
15. Ethics of Position,
16. Reporting and Accountability of the Board of Commissioners,
17. Performance Measure and Appraisal of the Board of Commissioners,
18. Remuneration of the Board of Commissioners.

Organ pendukung Dewan Komisaris Perusahaan secara berkala melakukan kaji ulang atas *Board Manual* dan melakukan pemutakhiran apabila dipandang perlu. *Board Manual* telah ditetapkan berdasarkan SKB Dewan Komisaris dan Direksi No. SK.801/HK.002/ASDP-2020 tentang Pedoman Dewan Komisaris dan Direksi (Board Manual) PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) pada tanggal 22 Juni 2020 yang merupakan pemutakhiran dari edisi sebelumnya berdasarkan SKB Dewan Komisaris dan Direksi No. SK.732/HK.102/ASDP-2018 tentang Pedoman Tata Kerja Dewan Komisaris dan Direksi (*Board Manual*) PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) pada tanggal 24 Mei 2018.

Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris

Dewan Komisaris memiliki tanggung jawab penuh dalam melakukan pengawasan Perusahaan guna memajukan kepentingan Perusahaan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Berdasarkan UU RI No. 40 Tahun 2007 mengenai Perseroan Terbatas, pentingnya peran Dewan Komisaris dalam manajemen Perusahaan sangat ditegaskan. Dewan Komisaris tidak hanya memiliki peran simbolis, namun juga bertanggung jawab secara pribadi atas pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, dengan risiko yang mungkin timbul jika terbukti adanya kelalaian dalam pelaksanaannya.

The supporting organs of the Company's BOC regularly review the Board Manual and update it when deemed necessary. The Board Manual was stipulated based on the Joint Decree of the Boards of Commissioners and Directors No. SK.801/HK.002/ASDP-2020 on Board Manual of PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) on 22 June 2020, which was the updated version from Joint Decree of the Boards of Commissioners and Directors No. SK.732/HK.102/ASDP-2018 on Board Manual of PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) on 24 May 2018.

Duties and Responsibilities of the Board of Commissioners

The Board of Commissioners has full responsibility to conduct its supervisory function on the Company with the aim to improve the Company's interests according to its stated objectives. The Law No. 40/2007 on Limited Liability Companies emphasized the importance of the Board of Commissioners' role in Company management. The Board of Commissioners not only carries a symbolic role, but is also personally responsible for carrying out their duties and responsibilities, bearing risks if any negligence upon conduct is proven.

Pelaksanaan Tugas Dewan Komisaris

Sepanjang tahun 2023, Dewan Komisaris telah melaksanakan fungsi, tugas dan tanggung jawabnya yang tertuang dalam surat keputusan, rekomendasi maupun persetujuan atas beberapa hal yang memerlukan persetujuan maupun nasihat Dewan Komisaris, di antaranya:

1. Pengembangan Bakauheni Harbour City (BHC);
2. Implementasi Sistem Penilaian Kerja sampai level individu;
3. Pengembangan desain dan implementasi *talent management system*;
4. *Corporate Rating*;
5. Implementasi *Game Changer* tahun 2023.

JENIS PERSETUJUAN YANG PERLU MENDAPATKAN PERSETUJUAN DEWAN KOMISARIS

Sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Anggaran Dasar Perusahaan, batasan wewenang atau keputusan yang memerlukan persetujuan dari Dewan Komisaris adalah sebagai berikut:

1. Persetujuan atas transaksi atau tindakan dalam lingkup kewenangan Dewan Komisaris.
2. Pengajuan calon auditor eksternal.
3. Kebijakan seleksi dan pengusulan calon direksi kepada pemegang saham.

RUANG LINGKUP PEMBAGIAN TUGAS PENGAWASAN Masing-Masing Dewan Komisaris

Dalam Keputusan Dewan Komisaris No. 04/KOM/XI/2022 tanggal 27 September 2022 mengenai Pembagian Tugas Dewan Komisaris Perusahaan PT ASDP Indonesia Ferry (Persero), ditetapkan sebagai berikut:

Implementation of the Duties of the Board of Commissioners

Throughout 2023, the Board of Commissioners carried out their functions, duties and responsibilities as stated in decision letters, recommendations, and decision on several issues requiring approval or advice from the Board of Commissioners, among those are:

1. Development of Bakauheni Harbour City (BHC);
2. Implementation of the Work Appraisal System to the individual level;
3. Development and implementation of talent management system;
4. Corporate Rating;
5. Implementation of Game Changer in 2023.

DECISIONS REQUIRING APPROVAL FROM THE BOARD OF COMMISSIONERS

In accordance with the provisions contained in the Company's Articles of Association, the limits of authority or decisions requiring approval from the Board of Commissioners are as follows:

1. Approval of transactions or actions within the authority of the Board of Commissioners.
2. Propose prospective external auditors candidates.
3. Policy of selection and nomination for director candidates to shareholders.

SCOPE OF DISTRIBUTION OF SUPERVISORY DUTIES FOR EACH MEMBER OF THE BOARD OF COMMISSIONERS

In the Decision of the Board of Commissioners' No. 04/KOM/XI/2022 dated 27 September 2022 concerning the Distribution of Duties of the Board of Commissioners of PT ASDP Indonesia Ferry (Persero), it was stipulated as follows:

Nama Name	Tugas Task
Saiful Haq Manan	- Melakukan koordinasi dan memberikan pengarahan kepada seluruh Komisaris; - Mengoordinasikan pengawasan yang dilakukan oleh para Komisaris sesuai dengan bidangnya masing-masing; - Bertanggung jawab menyelenggarakan dan memimpin rapat sewaktu-waktu diperlukan; - Menjabat sebagai Ketua Komite Nominasi dan Remunerasi; - Memberikan tugas lain kepada setiap Komisaris; dan - Memimpin RUPS Tahunan maupun RUPS Luar Biasa. - Coordinate and provide direction to all Commissioners; - Coordinate supervision carried out by the Commissioners in accordance with their respective fields; - Responsible for organizing and leading meetings whenever necessary; - Serve as Chairperson of the Nomination and Remuneration Committee; - Assign other duties to each Commissioner; and - Lead the Annual GMS and Extraordinary GMS.
Hendar Ristriawan	- Menjabat sebagai Ketua Komite Audit; - Membidangi pengawasan dalam segala aspek yang berkaitan dengan akuntansi dan keuangan, termasuk investasi dan aset serta strategi pengembangan bisnis, serta perencanaan strategis dan transformasi bidang organisasi/kelembagaan. - Serve as Chairperson of the Audit Committee; - Supervise in aspects related to accounting and finance, including investments and assets, strategic business development, as well as strategic planning and organizational/institutional transformation.
Iwan Hari Sugiarto	- Menjabat sebagai Wakil Ketua Komite Pemantau Risiko; - Membidangi pengawasan dalam segala aspek yang berkaitan dengan bidang komersial dan pelayanan, penerapan GCG serta manajemen risiko. - Serve as Deputy Chairperson of the Risk Oversight Committee; - Supervise in aspects related to the commercial and service sector, GCG implementation and risk management.
Susi Meyrista Tarigan	- Menjabat sebagai Ketua Komite Pemantau Risiko; - Membidangi pengawasan dalam segala aspek yang berkaitan dengan penerapan GCG, manajemen risiko serta pengembangan proses bisnis dan mutu. - Serve as Chairperson of the Risk Oversight Committee; - Supervise in aspects related to the GCG implementation, risk management as well as business process and quality development.
Edmil Nurjamil	- Menjabat sebagai Wakil Ketua Komite Audit; - Membidangi pengawasan dalam segala aspek yang berkaitan dengan akuntansi dan keuangan, termasuk investasi dan aset, serta strategis pengembangan bisnis, serta perencanaan strategis dan transformasi bidang organisasi/kelembagaan. - Serve as Deputy Chair of the Audit Committee; - Supervise in aspects related to accounting and finance, including investments and assets, strategic business development, as well as strategic planning and organizational/institutional transformation.
Budi Setiyadi	- Menjabat sebagai Sekretaris Komite Nominasi dan Remunerasi; - Membidangi pengawasan dalam segala aspek yang berkaitan dengan pengelolaan/pembinaan dan pengembangan SDM Perusahaan, operasional, teknik dan fasilitas serta pengembangan IT Perusahaan. - Serve as Secretary of the Nomination and Remuneration Committee; - Supervise in aspects related to the management/coaching and development of Company's HR, operations, engineering and facilities as well as IT development.

KOMISARIS INDEPENDEN

Komisaris Independen adalah anggota Dewan Komisaris yang tidak memiliki ikatan keuangan, kepemilikan saham, keterlibatan dalam pengelolaan, atau hubungan keluarga dengan anggota lainnya di Dewan Komisaris, Direksi, pemegang saham pengendali, atau Perusahaan yang bisa mempengaruhi kemandiriannya dalam mengambil keputusan.

Komisaris Independen dimaksudkan untuk menjamin mekanisme pengawasan berjalan efektif dan memberikan keseimbangan antara kepentingan pemegang saham mayoritas dengan pemegang saham minoritas. Pada tahun 2023, Perusahaan memiliki 3 (tiga) orang Komisaris Independen yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Menteri BUMN No.SK-10/MBU/01/2023, SK-97/MBU/05/2023, dan SK-321/MBU/10/2020.

Kriteria Komisaris Independen

Penetapan Komisaris Independen merujuk UU No. 40 Tahun 2007 mengenai Perseroan Terbatas, dan Peraturan Menteri BUMN No. PER-2/MBU/03/2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara. Adapun kriteria penentuan Komisaris Independen adalah sebagai berikut:

1. Tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, anggota Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali atau hubungan dengan BUMN yang bersangkutan, yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen;
2. Tidak menjabat sebagai Direksi di perusahaan yang terafiliasi dengan Perusahaan;
3. Bebas dari kepentingan dan aktivitas bisnis atau hubungan lain yang dapat menghalangi atau mengganggu kemampuan Dewan Komisaris untuk bertindak atau berpikir secara bebas di lingkup Perusahaan;

INDEPENDENT COMMISSIONER

Independent Commissioners are members of the Board of Commissioners who have no financial ties, share ownership, involvement in management, or family relationships with other members of the Board of Commissioners, Directors, controlling shareholders, or the Company that could influence their independence in making decisions.

Independent Commissioners must ensure effective monitoring mechanism and maintain balance between the interests of majority shareholders and minority shareholders. In 2023, the Company had 3 (three) Independent Commissioners who were appointed based on Decrees of Minister of SOEs No. SK-10/MBU/01/2023, SK-97/MBU/05/2023, and SK-321/MBU/10/2020.

Independent Commissioner Criteria

The appointment of an Independent Commissioner refers to Law No. 40/2007 concerning Limited Liability Companies, and Regulation of Minister of SOEs No. PER-2/MBU/03/2023 concerning Guidelines for Governance and Significant Corporate Activities of State-Owned Enterprises. The criteria for appointing Independent Commissioners are as follows:

1. Has no financial, management, share ownership and/or familial relationships with other members of the Board of Commissioners, members of the Board of Directors and/or Controlling Shareholders or relationships with the relevant SOEs that could hinder one's capacity to act independently;
2. Is not serving as a Director in a company affiliated with the Company;
3. Free from business interests and activities or other relationships that may hinder or interfere with the Board of Commissioners' ability to act or think independently for the Company;

4. Tidak bekerja pada pemerintah termasuk departemen, lembaga dan kemiliteran dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir; 5. Tidak bekerja di Perusahaan atau afiliasinya dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir; 6. Tidak mempunyai keterkaitan finansial, baik langsung maupun tidak langsung, dengan Perusahaan atau perusahaan yang menyediakan jasa dan produk kepada Perusahaan dan afiliasinya.	4. Is not serving for the government including in departments, institutions and the military in the last 3 (three) year; 5. Is not working for the Company or its affiliates in the last 3 (three) years; 6. Has no financial relation, either directly or indirectly, with the Company or companies that provide services and products to the Company and its affiliates.

Pernyataan Independensi dan Benturan Kepentingan

Komisaris Independen telah memenuhi kriteria independensi dan telah dinyatakan melalui surat pernyataan independensi yang diperbarui setiap tahun. Pemenuhan kriteria dan pernyataan independensi Komisaris Independen atas nama Sdr. Saiful Haq Manan.

Statement of Independence and Conflict of Interest

Independent Commissioner has met the criteria of independency and had issued annually updated statement of independence. The fulfilled criteria and statement of independence from the Independent Commissioner was declared by Mr. Saiful Haq Manan.

INDEPENDENSI DEWAN KOMISARIS

Anggota Dewan Komisaris mengikrarkan independensinya dalam melaksanakan tanggung jawabnya, bertujuan untuk melindungi kepentingan Perusahaan dari intervensi atau dominasi pihak lain yang dapat menyebabkan konflik kepentingan. Setiap tahun, pernyataan ini dikeluarkan sebagai komitmen anggota Dewan Komisaris ASDP untuk bertindak secara independen dan bebas dari benturan kepentingan dalam menjalankan fungsi dan tugas mereka, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Anggaran Dasar dan UU yang berlaku.

INDEPENDENCY OF THE BOARD OF COMMISSIONERS

Members of the Board of Commissioners pledge their independence in carrying out their responsibilities, aiming to protect the Company's interests from any intervention or domination by other parties that may cause conflicts of interest. Every year, this statement is issued by members of the ASDP Board of Commissioners as a commitment to act independently and free from conflicts of interest in carrying out their roles and duties, according to provisions stipulated in the Articles of Association and applicable laws.

Dewan Komisaris telah menandatangani pernyataan untuk bersikap independen dan bebas benturan kepentingan dalam menjalankan fungsi dan perannya, sebagai berikut:

1. Saya tidak memiliki benturan kepentingan dan/atau terlibat dalam transaksi yang memiliki benturan kepentingan dengan PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) dan/atau anak perusahaan yang terkonsolidasi.

The Board of Commissioners signed a statement to act independently and free of conflict of interest in carrying out their functions and roles, through the following points:

1. I have no conflict of interest and/or am not involved in transactions that have conflict of interests with PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) and/or its consolidated subsidiaries.

2. Saya tidak memegang jabatan rangkap sebagai:
 - Anggota Direksi pada BUMN, Badan Usaha Milik Daerah, dan Badan Usaha Milik Swasta.
 - Anggota Dewan Komisaris pada BUMN.
 - Anggota pengurus partai politik dan/atau anggota legislatif dan/atau calon kepala daerah/wakil kepala daerah.
 - Jabatan lain yang dapat menimbulkan benturan kepentingan.
 3. Saya tidak memiliki hubungan sedarah sampai dengan derajat kedua, baik menurut garis lurus maupun garis ke samping atau hubungan semenda dengan anggota Direksi maupun dengan anggota Dewan Komisaris PT ASDP Indonesia Ferry (Persero).
2. I do not hold concurrent positions as:
 - Director at SOEs, Regional Owned Enterprises, and Private Owned Enterprises.
 - Member of the Board of Commissioners at SOEs.
 - Executive member of a political party and/or legislative members and/or candidate for regional head/ deputy head.
 - Other positions that may create a conflict of interest.
 3. I do not have a familial relationship up to the second degree, either vertically or horizontally, or a relationship by marriage with any Director or member of the Board of Commissioners of PT ASDP Indonesia Ferry (Persero).



KEPEMILIKAN SAHAM ANGGOTA DEWAN KOMISARIS

ASDP adalah perusahaan yang kepemilikan sahamnya sepenuhnya dimiliki oleh Pemerintah Negara Republik Indonesia, dengan 100% saham dimiliki secara penuh. Karena kepemilikan saham yang ada dalam Perusahaan ini secara keseluruhan dimiliki oleh negara, Dewan Komisaris tidak memiliki kepemilikan saham di Perusahaan.

BENTURAN KEPENTINGAN DEWAN KOMISARIS

Selama tahun 2023, seluruh anggota Dewan Komisaris melaksanakan komitmennya untuk tidak memiliki benturan kepentingan maupun potensi benturan kepentingan dengan Perusahaan. Kebijakan terkait dengan benturan kepentingan Dewan Komisaris telah diatur melalui *Board Manual* yang dijalankan oleh seluruh anggota Dewan Komisaris dengan komitmen yang tinggi.

Pada tahun 2023, terdapat Dewan Komisaris yang memiliki rangkap jabatan di institusi lain di luar perusahaan. Namun Perusahaan memastikan bahwa rangkap jabatan tersebut tidak bertentangan dengan perundang-undangan yang berlaku maupun pengaturan rangkap jabatan yang telah tercantum dalam Anggaran Dasar telah tercantum dalam Anggaran Dasar dan *Board Manual*.

RAPAT DEWAN KOMISARIS

Dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap Direksi, terdapat mekanisme formal yang dilakukan yaitu melalui rapat rutin maupun non-rutin. Sebagaimana tercatat dalam aturan *Board Manual*, rapat ini bertujuan untuk melakukan pemantauan serta mengidentifikasi masalah yang berpotensi mempengaruhi kinerja Perusahaan, sehingga memungkinkan upaya antisipasi dilakukan dengan lebih efektif. Kehadiran Direksi pada pertemuan ini merupakan prasyarat yang diperlukan, karena menjadi salah satu mekanisme formal yang berlaku dalam pengawasan Direksi.

SHARE OWNERSHIP OF MEMBERS OF THE BOARD OF COMMISSIONERS

ASDP is a company, whose share is 100% fully owned by the Government of the Republic of Indonesia. Because the share ownership in the Company is wholly owned by the state, the Board of Commissioners do not have any share ownership in the Company.

CONFLICT OF INTEREST OF THE BOARD OF COMMISSIONERS

Throughout 2023, every member of the Board of Commissioners had carried out their commitment to stay clear from any conflicts of interest or any potential of conflicting interest with the Company. Policies related to the issue is regulated in the Board Manual, which the all members held with strong commitment.

In 2023, there were members of the Board of Commissioners who held concurrent positions in other institutions outside the Company. However, the Company had ensured that these concurrent positions did not conflict with applicable law as well as the provisions of concurrent positions as stated in the Articles of Association and Board Manual.

BOARD OF COMMISSIONERS MEETING

In carrying out the supervisory function on the Board of Directors, there is a formal mechanism in place to be carried out, through routine and non-routine meetings. As stated in the Board Manual, the meetings aim to oversee and identify potential issues that may affect the Company's performance, thereby allowing more effective anticipatory efforts to be carried out. The Board of Directors' attendance at the meeting is a necessary prerequisite, because it is one of the official mechanisms that applies in supervising the Board of Directors.

Rapat rutin Dewan Komisaris paling sedikit dilakukan sebanyak 1 (satu) kali setiap bulan. Namun di luar rapat rutin tersebut, dimungkinkan untuk dilaksanakan rapat non-rutin atas permintaan 1 (satu) atau beberapa anggota Dewan Komisaris, permintaan Direksi dan/atau atas permintaan dari pemegang saham.

Rencana pertemuan Dewan Komisaris dibuat dan disetujui sebelum dimulainya tahun buku dan dimasukkan ke dalam Rencana Kerja Anggaran Dewan Komisaris. Agenda untuk pertemuan pengawasan dan konsultasi umumnya mencakup laporan kinerja, diskusi tentang hal-hal strategis yang berkaitan dengan usulan dari Direksi, serta tindak lanjut dari pertemuan sebelumnya. Selama tahun 2023, Dewan Komisaris mengadakan 13 kali Rapat Internal dan 12 kali Rapat Gabungan bersama Direksi. Kehadiran dalam pertemuan gabungan antara Dewan Komisaris dan Direksi adalah sebagai berikut:

The Board of Commissioners holds regular meetings at least once every month. However, outside of these regular meetings, it is possible to request non-routine meeting at the behest of 1 (one) or several members of the Boards of Commissioners, Board of Directors and/or at the request of shareholders.

The Board of Commissioners meeting plan is scheduled and approved prior to the start of the financial year and is included in the Board of Commissioners Budget Work Plan. The agenda for supervisory and consultation meetings generally includes performance reports, discussions on strategic matters related to proposals from the BOD, as well as follow-up actions from previous meetings. During 2023, the Board of Commissioners held 13 internal meetings and 12 joint meetings with the Board of Directors. Attendance record in joint meetings between the Board of Commissioners and Board of Directors is as follows:

Frekuensi Rapat Internal Dewan Komisaris

Frequency of Internal Meetings of the Board of Commissioners

No	Tanggal Date	Peserta Participant
1	30 Januari 2023 30 January 2023	Saiful Haq Manan; Hendar Ristriawan; Susi Meyrista Tarigan; Edmil Nurjamil; Iwan Hari Sugiarto; Budi Setiyadi
2	27 Februari 2023 27 February 2023	Saiful Haq Manan; Hendar Ristriawan; Susi Meyrista Tarigan; Edmil Nurjamil; Iwan Hari Sugiarto; Budi Setiyadi
3	7 Maret 2023 7 March 2023	Saiful Haq Manan; Hendar Ristriawan; Susi Meyrista Tarigan; Edmil Nurjamil; Iwan Hari Sugiarto; Budi Setiyadi
4	4 Mei 2023 4 May 2023	Saiful Haq Manan; Hendar Ristriawan; Susi Meyrista Tarigan; Edmil Nurjamil; Iwan Hari Sugiarto; Budi Setiyadi
5	30 Mei 2023 30 May 2023	Saiful Haq Manan; Hendar Ristriawan; Susi Meyrista Tarigan; Edmil Nurjamil; Iwan Hari Sugiarto; Budi Setiyadi
6	21 Juni 2023 21 June 2023	Saiful Haq Manan; Hendar Ristriawan; Susi Meyrista Tarigan; Edmil Nurjamil; Iwan Hari Sugiarto; Budi Setiyadi
7	24 Juli 2023 24 July 2023	Saiful Haq Manan; Hendar Ristriawan; Susi Meyrista Tarigan; Edmil Nurjamil; Iwan Hari Sugiarto; Budi Setiyadi
8	25 Juli 2023 25 July 2023	Saiful Haq Manan; Hendar Ristriawan; Susi Meyrista Tarigan; Edmil Nurjamil; Iwan Hari Sugiarto; Budi Setiyadi
9	29 Agustus 2023 29 August 2023	Saiful Haq Manan; Hendar Ristriawan; Susi Meyrista Tarigan; Edmil Nurjamil; Iwan Hari Sugiarto; Budi Setiyadi
10	19 September 2023 19 September 2023	Saiful Haq Manan; Hendar Ristriawan; Susi Meyrista Tarigan; Edmil Nurjamil; Iwan Hari Sugiarto; Budi Setiyadi
11	19 Oktober 2023 19 October 2023	Saiful Haq Manan; Hendar Ristriawan; Susi Meyrista Tarigan; Edmil Nurjamil; Iwan Hari Sugiarto; Budi Setiyadi
12	28 November 2023 28 November 2023	Saiful Haq Manan; Hendar Ristriawan; Susi Meyrista Tarigan; Edmil Nurjamil; Iwan Hari Sugiarto; Budi Setiyadi
13	20 Desember 2023 20 December 2023	Saiful Haq Manan; Hendar Ristriawan; Susi Meyrista Tarigan; Edmil Nurjamil; Iwan Hari Sugiarto; Budi Setiyadi

Frekuensi Rapat Gabungan Dewan Komisaris dan Direksi

Frequency of Joint Meetings of the Board of Commissioners and Board of Directors

No.	Tanggal Date	Peserta Participant
1	26 Januari 2023 26 January 2023	Saiful Haq Manan; Hendar Ristriawan; Susi Meyrista Tarigan; Edmil Nurjamil; Iwan Hari Sugiarto; Budi Setiyadi
2	28 Februari 2023 28 February 2023	Saiful Haq Manan; Hendar Ristriawan; Susi Meyrista Tarigan; Edmil Nurjamil; Iwan Hari Sugiarto; Budi Setiyadi
3	17 Maret 2023 17 March 2023	Saiful Haq Manan; Hendar Ristriawan; Susi Meyrista Tarigan; Edmil Nurjamil; Iwan Hari Sugiarto; Budi Setiyadi
4	4 Mei 2023 4 May 2023	Saiful Haq Manan; Hendar Ristriawan; Susi Meyrista Tarigan; Edmil Nurjamil; Iwan Hari Sugiarto; Budi Setiyadi
5	30 Mei 2023 30 May 2023	Saiful Haq Manan; Hendar Ristriawan; Susi Meyrista Tarigan; Edmil Nurjamil; Iwan Hari Sugiarto; Budi Setiyadi
6	21 Juni 2023 21 June 2023	Saiful Haq Manan; Hendar Ristriawan; Susi Meyrista Tarigan; Edmil Nurjamil; Iwan Hari Sugiarto; Budi Setiyadi
7	25 Juli 2023 25 July 2023	Saiful Haq Manan; Hendar Ristriawan; Susi Meyrista Tarigan; Edmil Nurjamil; Iwan Hari Sugiarto; Budi Setiyadi
8	29 Agustus 2023 29 August 2023	Saiful Haq Manan; Hendar Ristriawan; Susi Meyrista Tarigan; Edmil Nurjamil; Iwan Hari Sugiarto; Budi Setiyadi
9	19 September 2023 19 September 2023	Saiful Haq Manan; Hendar Ristriawan; Susi Meyrista Tarigan; Edmil Nurjamil; Iwan Hari Sugiarto; Budi Setiyadi
10	19 Oktober 2023 19 October 2023	Saiful Haq Manan; Hendar Ristriawan; Susi Meyrista Tarigan; Edmil Nurjamil; Iwan Hari Sugiarto; Budi Setiyadi
11	28 November 2023 28 November 2023	Saiful Haq Manan; Hendar Ristriawan; Susi Meyrista Tarigan; Edmil Nurjamil; Iwan Hari Sugiarto; Budi Setiyadi
12	27 Desember 2023 27 December 2023	Saiful Haq Manan; Hendar Ristriawan; Edmil Nurjamil; Iwan Hari Sugiarto; Budi Setiyadi

Tingkat Kehadiran Dewan Komisaris dalam Rapat Internal Dewan Komisaris

Board of Commissioners' Attendance Rate at Board of Commissioners' Internal Meetings

Nama Name	Frekuensi Rapat Meeting Frequency	Jumlah Kehadiran Total Attendance	Tingkat Kehadiran Attendance Rate
Saiful Haq Manan	13	13	100%
Hendar Ristriawan	13	13	100%
Iwan Hari Sugiarto	13	13	100%
Susi Meyrista Tarigan	13	13	100%
Edmil Nurjamil	13	13	100%
Budi Setiyadi	13	13	100%

Tingkat Kehadiran Dewan Komisaris dalam Rapat Gabungan Board of Commissioners' Attendance Rate at Joint Meetings

Nama Name	Frekuensi Rapat Meeting Frequency	Jumlah Kehadiran Total Attendance	Tingkat Kehadiran Attendance Rate
Saiful Haq Manan	12	12	100%
Hendar Ristriawan	12	12	100%
Iwan Hari Sugiarto	12	12	100%
Susi Meyrista Tarigan	12	11	92%
Edmil Nurjamil	12	12	100%
Budi Setiyadi	12	12	100%

PENGAWASAN, KEPUTUSAN, ARAHAN, DAN REKOMENDASI DEWAN KOMISARIS TAHUN 2023

Dewan Komisaris tidak hanya melakukan pengawasan terhadap aktivitas Perusahaan dan Direksi, melainkan juga memiliki kewenangan untuk memberikan keputusan, arahan, dan rekomendasi sesuai dengan batasan kewenangan yang telah diatur dalam *Board Manual*. Pada tahun 2023, terdapat beberapa hal yang menjadi atensi pengawasan, keputusan, arahan, dan rekomendasi Dewan Komisaris terutama terkait dengan hal-hal sebagai berikut:

1. Pengembangan Bakauheni Harbour City (BHC);
2. Implementasi Sistem Penilaian Kerja sampai level individu;
3. Pengembangan desain dan implementasi *talent management system*;
4. *Corporate Rating*;
5. Implementasi *Game Changer* tahun 2023.

SUPERVISION, DECISIONS, DIRECTIONS, AND RECOMMENDATIONS OF THE BOARD OF COMMISSIONERS IN 2023

The Board of Commissioners not only oversaw the activities of the Company and the Board of Directors, but was also authorized to decide, direct, and gave recommendations within their authority limits as set out in the *Board Manual*. In 2023, there were several issues required supervision, decision, direction, and recommendation from the Board of Commissioners, especially related to:

1. Development of Bakauheni Harbour City (BHC);
2. Implementation of the Work Appraisal System to the individual level;
3. Development and implementation of *talent management system*;
4. *Corporate Rating*;
5. Implementation of *Game Changer* in 2023.

PROGRAM PENGENALAN BAGI KOMISARIS BARU

Perusahaan menetapkan kebijakan dan mengimplementasikan program orientasi khusus untuk anggota Dewan Komisaris yang baru bergabung di Perusahaan. Program ini bertujuan memastikan pemahaman semua anggota Dewan Komisaris mengenai aktivitas bisnis dan strategi Perusahaan maupun mengenai peran dan tanggung jawab Dewan Komisaris dalam mendukung kemajuan Perusahaan. Sekretaris Dewan Komisaris bertanggung jawab atas penyelenggaraan program pengenalan bagi anggota Dewan Komisaris yang baru, yang dapat dilakukan melalui presentasi, pertemuan, kunjungan perusahaan, analisis dokumen, atau program lain yang dianggap relevan sesuai dengan program pengenalan bagi anggota Dewan Komisaris baru.

Sepanjang tahun 2023, tidak terdapat perubahan komposisi Dewan Komisaris sehingga tidak dilakukan program pengenalan bagi komisaris baru.

ONBOARDING PROGRAM FOR NEW COMMISSIONER

The Company establishes policies and implements a special onboarding program for newly appointed members of the Board of Commissioners joining the Company. The program aims to ensure familiarity for every member of the Board of Commissioners about the Company's business activities and strategies as well as the roles and responsibilities of the Board of Commissioners in supporting the Company's progress. The Secretary to the Board of Commissioners is responsible for organizing the onboarding program for new member, which can be fulfilled through presentation, meeting, company visit, document analysis, or other programs deemed relevant to the onboarding program.

Throughout 2023, there was no changes to the composition of the Board of Commissioners, as such there was no onboarding program for commissioner.



PROGRAM PENDIDIKAN DAN PENGEMBANGAN DEWAN KOMISARIS

Perusahaan memiliki kebijakan pengembangan kompetensi Dewan Komisaris yang mengacu pada *Board Manual*. Program pengembangan kompetensi Dewan Komisaris dilaksanakan guna mengembangkan kompetensi yang relevan dengan fungsi dan peran pengawasan yang dimiliki oleh Dewan Komisaris. Pada tahun 2023, pelatihan Dewan Komisaris diikuti oleh seluruh anggota Dewan Komisaris dengan rincian program pelatihan sebagai berikut:

TRAINING AND DEVELOPMENT PROGRAM FOR THE BOARD OF COMMISSIONERS

The Company has a policy on competency development for the Board of Commissioners, which refers to the Board Manual. The program is implemented to develop relevant competencies to the Board of Commissioners' supervisory roles. In 2023, all members of the Board of Commissioners participated in training program, with following details:

Nama Anggota Dewan Komisaris Name of Commissioner	Nama Pelatihan Name of Training	Lokasi & Waktu Pelaksanaan Location & Date	Lembaga Penyelenggara Organizing Institution
Saiful Haq Manan	• In-house Training & Certification QRGP (Qualified Risk Governance Professional) QRGP (Qualified Risk Governance Professional) In-house Training & Certification	• Online, 27 - 28 Juli 2023 Online, 27 - 28 July 2023	• Lembaga Sertifikasi Profesi Mitra Kalyana Sejahtera (LSP MKS) Mitra Kalyana Sejahtera Profession Certification Institute
	• BSE GRC Masterclass - Risk Management Effectiveness Evaluation BSE GRC Masterclass - Risk Management Effectiveness Evaluation	• Online, 07 September 2023 Online, 07 September 2023	• BUMN Leadership & Management Institute SOEs Leadership & Management Institute
	• BSE GRC Masterclass - Sosialisasi Pemeringkatan BUMN & Anak Perusahaan BUMN BSE GRC Masterclass - Socialization of SOEs & SOEs Subsidiary Ratings	• Online, 14 September 2023 Online, 14 September 2023	• BUMN Leadership & Management Institute SOEs Leadership & Management Institute
Hendar Ristriawan	• In-house Training & Certification QRGP (Qualified Risk Governance Professional) QRGP (Qualified Risk Governance Professional) In-house Training & Certification	• Online, 27 - 28 Juli 2023 Online, 27 - 28 July 2023	• Lembaga Sertifikasi Profesi Mitra Kalyana Sejahtera (LSP MKS) Mitra Kalyana Sejahtera Profession Certification Institute
	• BLMI GRC Masterclass - Pre IPO dan Post IPO BSE GRC Masterclass - Pre IPO and Post IPO	• Online, 10 Agustus 2023 Online, 10 August 2023	• BUMN Leadership & Management Institute SOEs Leadership & Management Institute
	• BLMI GRC Masterclass - Pemeringkatan dan Penerbitan Efek Bersifat Utang & Sukuk (EBUS) BLMI GRC Masterclass - Rating and Issuance of Debt and Sukuk Securities	• Online, 10 Agustus 2023 Online, 10 August 2023	• BUMN Leadership & Management Institute SOEs Leadership & Management Institute
Iwan Hari Sugiarto	• Special Directorship Program (SDP) Special Directorship Program	• Yogyakarta, 26 - 27 Juli 2023 Yogyakarta, 26 - 27 July 2023	• Indonesian Institute for Directorship (IICD) Indonesian Institute for Directorship (IICD)
	• In-house Training & Certification QRGP (Qualified Risk Governance Professional) QRGP (Qualified Risk Governance Professional) In-house Training & Certification	• Online, 06 - 07 September 2023 Online, 06 - 07 September 2023	• Lembaga Sertifikasi Profesi Mitra Kalyana Sejahtera (LSP MKS) Mitra Kalyana Sejahtera Profession Certification Institute
	• BSE GRC Masterclass - Sosialisasi Pemeringkatan BUMN & Anak Perusahaan BUMN BSE GRC Masterclass - Socialization of SOEs & SOEs Subsidiary Ratings	• Online, 14 September 2023 Online, 14 September 2023	• BUMN Leadership & Management Institute SOEs Leadership & Management Institute
	• ESG for Boards - Governance of ESG ESG for Boards - Governance of ESG	• Online, 27 September 2023 Online, 27 September 2023	• BUMN Leadership & Management Institute SOEs Leadership & Management Institute

Nama Anggota Dewan Komisaris Name of Commissioner	Nama Pelatihan Name of Training	Lokasi & Waktu Pelaksanaan Location & Date	Lembaga Penyelenggara Organizing Institution
Susi Meyrista Tarigan	- In-house Training & Certification QRGP (Qualified Risk Governance Professional) In-house Training & Certification - ESG for Boards - Governance of ESG	- Online, 06 - 07 September 2023 - Online, 06 - 07 September 2023 - Online, 27 September 2023 - Online, 27 September 2023	- Lembaga Sertifikasi Profesi Mitra Kalyana Sejahtera (LSP MKS) Mitra Kalyana Sejahtera Profession Certification Institute - BUMN Leadership & Management Institute SOEs Leadership & Management Institute
Edmil Nurjamil	- BSE GRC Masterclass - Sosialisasi Pemingkatan BUMN & Anak Perusahaan BUMN - BSE GRC Masterclass - Socialization of SOEs & SOEs Subsidiary Ratings - ESG for Boards - Governance of ESG	- Online, 14 September 2023 - Online, 14 September 2023 - Online, 27 September 2023 - Online, 27 September 2023	- BUMN Leadership & Management Institute SOEs Leadership & Management Institute - BUMN Leadership & Management Institute SOEs Leadership & Management Institute
Budi Setiyadi	- Pembicara (Narasumber) Purnabakti Batch 1 Tahun 2023 PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) Speaker, Retirement Batch 1 2023, PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) - Special Directorship Program (SDP) - In-house Training & Certification QRGP (Qualified Risk Governance Professional) In-house Training & Certification - ESG for Boards - Governance of ESG	- Ballroom Hotel Aston Imperium Purwokerto, 23 Mei 2023 - Aston Imperium Purwokerto Hotel Ballroom, 23 May 2023 - Yogyakarta, 26 - 27 Juli 2023 - Yogyakarta, 26 - 27 July 2023 - Online, 06 - 07 September 2023 - Online, 06 - 07 September 2023 - Online, 27 September 2023 - Online, 27 September 2023	- PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) - Indonesian Institute for Directorship (IICD) Indonesian Institute for Directorship (IICD) - Lembaga Sertifikasi Profesi Mitra Kalyana Sejahtera (LSP MKS) Mitra Kalyana Sejahtera Profession Certification Institute - BUMN Leadership & Management Institute SOEs Leadership & Management Institute

PENILAIAN KINERJA DEWAN KOMISARIS

Sesuai ketentuan yang tercantum dalam *Board Manual*, penilaian kinerja Dewan Komisaris dilakukan oleh pemegang saham mengacu pada kriteria dan parameter pencapaian Indikator Pencapaian Kinerja (*Key Performance Indicator*, KPI) Dewan Komisaris yang telah ditetapkan RUPS berdasarkan usulan Dewan Komisaris. Hasil penilaian kinerja anggota Dewan Komisaris menjadi acuan dan bahan pertimbangan untuk memberikan masukan dalam meningkatkan efektivitas kinerja Dewan Komisaris.

PERFORMANCE APPRAISAL OF THE BOARD OF COMMISSIONERS

In accordance with the provisions stated in the *Board Manual*, the performance of the Board of Commissioners is appraised by shareholders, based on criteria and parameter for achieving Key Performance Indicators (KPI) as decided in the GMS following the proposal from the Board of Commissioners. The resulting performance appraisal would serve as a reference and consideration to provide input for improving the effectiveness of the their performance.

Realisasi *Key Performance Indicators* Dewan Komisaris Tahun 2023

Realization of Key Performance Indicators of the Board of Commissioners in 2023

No.	Indikator Indicator	Uraian Description	Keluaran Output	Kuantitas Quantity	Bobot Weight	Realisasi Realization	Skor Score
A. Aspek Perencanaan Aspect of Planning					10		10
	Menyusun Rencana Kerja dan Anggaran serta KPI Dewan Komisaris tahun 2024 Prepare 2024 Work Plan & Budget and KPI for the BOC.	Program Kerja Tahunan meliputi Kegiatan dan Anggaran tahun 2024 Annual Work Program including Activities and Budget for 2024	Dokumen Document	1 Kali 1 Time	10	1 Kali 1 Time	10
B. Aspek Pengawasan dan Nasihat Aspect of Supervisory and Advisory					75		75
1.	Memberikan tanggapan/rekomendasi kepada Pemegang Saham yaitu: Provide feedback/recommendations to Shareholders, namely:						
a.	Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Company Work Plan & Budget (WPB)	Tahunan Yearly	Surat Letter	1 Kali 1 Time	5	1 Kali 1 Time	5
b.	Kinerja Triwulan Quarterly Performance	Triwulan Quarterly	Surat Letter	4 Kali 4 Time	10	4 Kali 4 Time	10
c.	Kinerja Tahunan Annual Performance	Tahunan Yearly	Surat Letter	1 Kali 1 Time	5	1 Kali 1 Time	5
d.	Pengusulan auditor eksternal/KAP kepada Pemegang Saham Proposed external auditors/public accounting firm to Shareholders	Tahunan Yearly	Surat Letter	1 Kali 1 Time	5	1 Kali 1 Time	5
2.	Rapat Dewan Komisaris (memberi saran/nasihat kepada Direksi). BOC Meeting (advising the BOD).						
a.	Jumlah Rapat Number of Meetings	Bulanan Monthly	Kali Times	12 Kali 12 Time	5	12 Kali 12 Time	5
b.	Kehadiran Rapat Meeting Attendance	Bulanan Monthly	%	100%	10	100%	10
c.	Risalah Records	Bulanan Monthly	Risalah Notice	12 Risalah 12 Records	5	12 Risalah 12 Records	5

No.	Indikator Indicator	Uraian Description	Keluaran Output	Kuantitas Quantity	Bobot Weight	Realisasi Realization	Skor Score
3.	Rapat Dewan Komisaris dengan Komite. BOC Meeting with Committees.	Tahunan Yearly	Risalah Records	12 Risalah 12 Records	10	12 Risalah 12 Records	10
4.	Monitoring/pengawasan Dewan Komisaris ke divisi bisnis & kantor cabang. BOC monitoring/supervising the business divisions and branch offices.	Tahunan Yearly	Laporan Monitoring/ Surat Monitoring Report/ Letter	12 Laporan 12 Reports	10	12 Laporan 12 Reports	10
5.	Pemberian persetujuan tertulis Dewan Komisaris atas perbuatan-perbuatan Direksi sesuai dengan Anggaran Dasar PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) dalam waktu 14 hari kalender sejak surat usulan atau dokumen secara lengkap diterima oleh Dewan Komisaris. Provide written approval from the BOC for the actions of the BOD in accordance with the Articles of Association of PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) within 14 calendar days after the complete proposal or documents are received by the BOC.	Penyampaian persetujuan atas Surat Permohonan Direksi tepat waktu Timely approval of the Board of Directors' Application Letter	%	100%	5	100%	5
6.	Pemberian tanggapan tertulis Dewan Komisaris atas perbuatan-perbuatan Direksi sesuai dengan Anggaran Dasar PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) dalam waktu 14 hari kalender sejak surat usulan atau dokumen secara lengkap diterima oleh Dewan Komisaris. Provide written responses from the BOC on BOD actions in accordance with the Articles of Association of PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) within 14 calendar days after the complete proposal letter or document is received by the BOC.	Penyampaian tanggapan sejak Surat Permohonan Direksi tepat waktu Timely submission of responses to the Board of Directors' Application Letter	%	100%	5	100%	5
C. Aspek Pelaporan Aspect of Reporting					10		10
1.	Menyampaikan laporan tahunan tentang tugas pengawasan dan realisasi pelaksanaan KPI Dewan Komisaris. Submit an annual report on the supervisory duties and its realization of the implementation of the BOC's KPI.	Laporan tugas pengawasan tahun buku 2023 Supervisory report for the 2023 financial year	Surat Letter	1 Surat 1 Letter	10	1 Surat 1 Letter	10
D. Aspek Dinamis/Lain Dynamic/Other Aspects					5		5
1.	Peningkatan kompetensi melalui kegiatan seminar dan workshop Increase competency through seminar and workshop activities.	Tahunan Yearly	Surat/ Laporan/ Letter/ Report	2 Laporan 2 Report	5	2 Laporan 2 Report	5
JUMLAH Total				100			120

PENILAIAN KINERJA DIREKSI

Penilaian kinerja Direksi dilakukan secara berkala oleh Dewan Komisaris untuk selanjutnya dilaporkan kepada pemegang saham sebagai bahan evaluasi kinerja Direksi. Sesuai *Board Manual*, kriteria penilaian Direksi meliputi pencapaian KPI Direksi dan tingkat kesehatan perusahaan. Penilaian pencapaian KPI Direksi dilakukan berdasarkan kontrak manajemen yang disahkan oleh pemegang saham. Penilaian Kinerja Direksi secara kolektif dapat dilihat pada bagian Realisasi Capaian Key Performance Indicators Direksi Tahun 2023 dalam laporan ini.

PERFORMANCE APPRAISAL OF THE BOARD OF DIRECTORS

Assessment of the Board of Directors' performance is carried out regularly by the Board of Commissioners and reported to the shareholders as the base for performance evaluation. According to the Board Manual, the criteria for Board of Directors' appraisal includes KPI achievement and the company's health level. The Board of Directors' achieved KPI is reviewed based on the management contract ratified by the shareholders. The appraisal of Directors' collective performance is detailed in the Realization of the Board of Directors' Key Performance Indicators Achievements in 2023 in this report.

PENILAIAN KINERJA KOMITE DI BAWAH DEWAN KOMISARIS

Dewan Komisaris secara aktif melaksanakan evaluasi kinerja terhadap elemen-elemen pendukung dalam hierarki organisasinya sebagai bagian integral dari usaha menerapkan prinsip-prinsip GCG secara holistik. Hasil evaluasi ini menjadi landasan untuk mengidentifikasi bidang-bidang yang memerlukan perbaikan guna meningkatkan kinerja serta efektivitas komite-komite di masa yang akan datang.

PERFORMANCE APPRAISAL OF THE BOARD OF COMMISSIONERS

The Board of Commissioners actively evaluated performance of supporting elements in the organizational hierarchy as an integral part of holistic GCG implementation efforts. The evaluation would be used to identify areas that require improvement, to increase committees' future performance and effectiveness.

Proses evaluasi ini dilakukan secara tahunan dengan menggunakan kerangka metode yang telah ditetapkan dan disetujui oleh Dewan Komisaris.

This evaluation is carried out annually using a determined framework approved by the Board of Commissioners.

Seiring dengan perkembangan tahun 2023, Dewan Komisaris telah mendirikan tiga komite pendukung yang menjadi pilar penting dalam operasionalnya. Ketiga komite tersebut adalah Komite Audit, Komite Pemantau Risiko, dan Komite Nominasi dan Remunerasi. Setiap komite ini merupakan badan atau lembaga bawahan Dewan Komisaris yang memiliki peran krusial. Evaluasi kinerja yang dilakukan terhadap tiap komite didasarkan pada kriteria pencapaian target yang telah spesifik dalam rencana kerja tahunan yang mereka susun.

As 2023 progressed, the Board of Commissioners established three supporting committees that became important pillars in its operations. The three committees are the Audit Committee, Risk Oversight Committee, and Nomination and Remuneration Committee. These committees are supporting bodies to the Board of Commissioners, each having crucial roles. The performance evaluation criteria on each committee is based on achievement of specific targets stated in the annual work plan.

Tidak hanya itu, evaluasi juga mengungkap bahwa keseluruhan anggota komite telah menunaikan tugas dan tanggung jawab mereka dengan seksama. Kualitas ini tercermin dari implementasi rencana kerja komite secara efisien dan penyelesaian tugas dengan kesungguhan penuh. Informasi yang lebih terperinci mengenai evaluasi kinerja komite ini dapat diakses melalui bagian terpisah dalam laporan Dewan Komisaris. Laporan ini secara khusus merujuk pada hasil evaluasi yang terkait dengan Komite Audit serta Komite Pemantau Risiko.

Moreover, the evaluation showed that every committee member had carried out their duties and responsibilities. This quality was reflected in the efficient implementation of the committee's work plans and the seriousness in completing tasks. Detailed information regarding the committees' performance evaluation can be accessed through a separate section in the Board of Commissioners' report. The report specifically refers to the Audit Committee and Risk Oversight Committee evaluation results.



DIREKSI

BOARD OF DIRECTORS

Direksi sebagai entitas Perusahaan memiliki tanggung jawab kolektif dalam pengelolaan Perusahaan. Setiap anggota Direksi memiliki kewenangan dan tugas yang jelas sesuai dengan prinsip-prinsip GCG dan selalu mempertimbangkan kepentingan Perusahaan serta mematuhi regulasi yang berlaku. Direksi bertanggung jawab atas tindakan manajerialnya, dan kewajiban pertanggungjawaban ini disampaikan dalam RUPS sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

The Board of Directors as a Company entity has collective responsibility in managing the Company. Each member of the Board of Directors has clear authority and duties as outlined by GCG principles, always upholding the Company's interests and complies with applicable regulations. The Board of Directors is responsible for their managerial actions, and their responsibility is presented at the GMS, as outlined by applicable legal provisions.

KOMPOSISI DIREKSI

Pemilihan dan pengunduran anggota Direksi ditetapkan dalam RUPS berdasarkan alasan yang jelas, menyediakan kesempatan bagi individu yang terlibat untuk memberikan pembelaan. Setiap anggota Direksi telah melewati uji kelayakan dan kepatutan (*fit and proper test*) yang dilakukan oleh pemegang saham untuk menegaskan integritas dan kemampuan yang dibutuhkan oleh Perusahaan dalam mengelola operasionalnya. Selama tahun 2023, Direksi terdiri dari 6 anggota dan tidak ada perubahan dalam komposisinya sepanjang tahun tersebut.

COMPOSITION OF THE BOARD OF DIRECTORS

The appointment and discharge of members of the Board of Directors is decided during the GMS with clear reasonings, allowing the involved individual an opportunity to present defense. Each member of the Board of Directors has passed a fit and proper test presented by shareholders to confirm their integrity and capabilities, as is required to manage Company's operations. During 2023, the Board of Directors consisted of 6 members and there were no changes in the composition throughout the year.



Tabel Komposisi Direksi Tahun 2023

Table of the Boards of Directors' Composition in 2023

Nama Name	Jabatan Position	Dasar Pengangkatan Basis of Appointment	Masa Jabatan Term of Office
Ira Puspawati	Direktur Utama President Director	Keputusan Menteri BUMN No. SK-286/MBU/12/2022 tanggal 8 Desember 2022 Decree of Minister of SOEs No. SK-286/MBU/12/2022 dated 8 December 2022	Desember 2022 - Desember 2027 December 2022 - December 2027
M. Yusuf Hadi	Direktur Komersial dan Pelayanan Commercial and Services Director	Keputusan Menteri BUMN No. SK-98/MBU/04/2022 tanggal 12 April 2022 Decree of Minister of SOEs No. SK-98/MBU/4/2022 dated 12 April 2022	April 2022 - April 2027 April 2022 - April 2027
Djunia Satriawan	Direktur Keuangan, Teknologi Informasi dan Manajemen Risiko Finance, Information Technology and Risk Management Director	Keputusan Menteri BUMN No. SK-283/MBU/08/2021 tanggal 25 Agustus 2021 Decree of Minister of SOEs No. SK-283/MBU/08/2021 dated 25 Agustus 2021	Agustus 2021 - Agustus 2026 August 2021 - August 2026
Kusnadi C. Wijaya	Direktur Teknik dan Fasilitas Engineering and Facilities Director	Keputusan Menteri BUMN No. SK-338/MBU/12/2019 tanggal 27 Desember 2019 Decree of Minister of SOEs No. SK-338/MBU/12/2019 dated 27 December 2019	Desember 2019 - Desember 2024 December 2019 - December 2024
Harry Muhammad Adhi Caksono	Direktur Perencanaan dan Pengembangan Planning and Development Director	Keputusan Menteri BUMN No. SK-215/MBU/06/2020 tanggal 24 Juni 2020 Decree of Minister of SOEs No. SK-215/MBU/06/2020 dated 24 June 2020	Juni 2020 - Juni 2025 June 2020 - June 2025
Wahyu Wibowo	Direktur SDM dan Layanan Korporasi HR and Corporate Services Director	Keputusan Menteri BUMN No. SK-338/MBU/12/2019 tanggal 27 Desember 2019 Decree of Minister of SOEs No. SK-338/MBU/12/2019 dated 27 December 2019	Desember 2019 - Desember 2024 December 2019 - December 2024

PEDOMAN KERJA, TUGAS, DAN TANGGUNG JAWAB DIREKSI

Pedoman Kerja Direksi

Dalam pelaksanaan tanggung jawabnya, Direksi merujuk pada Anggaran Dasar dan *Board Manual* yang memuat prosedur terkait pelaksanaan pekerjaan Direksi, disusun berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Pedoman ini mencakup berbagai aspek, seperti:

1. Prinsip Dasar;
2. Persyaratan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Direksi;
3. Komposisi Direksi;
4. Masa Jabatan Direksi;
5. Pengaturan Rangkap Jabatan;
6. Program Pengenalan dan Pelatihan;
7. Tugas Direksi;
8. Wewenang Direksi;
9. Kewajiban Direksi;
10. Tanggung Jawab Direksi;

WORK GUIDELINE, DUTIES, AND RESPONSIBILITIES OF THE BOARD OF DIRECTORS

Work Guideline of the Board of Directors

In carrying out their responsibilities, the Board of Directors refers to the Articles of Association and the Board Manual, which contain the Board of Directors' working procedures, prepared based on applicable legal provisions. The guideline covers various aspects, such as:

1. Basic Principles;
2. Requirements, Appointment and Discharge of the Board of Directors;
3. Composition of the Board of Directors;
4. Terms of Office of the Board of Directors;
5. Provision of Concurrent Positions;
6. Onboarding and Training Program;
7. Duties of the Board of Directors;
8. Authority of the Board of Directors;
9. Obligations of the Board of Directors;
10. Responsibilities of the Board of Directors;

11. Pembagian Tugas, Wewenang dan Tanggung Jawab Direksi;
12. Rencana Kerja Direksi;
13. Rapat Direksi;
14. Pengambilan Keputusan di Luar Rapat Direksi;
15. Kebijakan Pengelolaan Perusahaan;
16. Etika Jabatan;
17. Pelaporan dan Pertanggungjawaban Direksi;
18. Pengukuran dan Penilaian Kinerja Direksi;
19. Remunerasi Direksi;
20. Penggunaan Waktu dan Perjalanan Dinas Direksi;
21. Organ Pendukung Direksi.

11. Distribution of Duties, Authority and Responsibilities of the Board of Directors;
12. Work Plan of the Board of Directors;
13. The Board of Directors' Meeting;
14. Decision Making Outside of the Board of Directors' Meeting;
15. Company Management Policy;
16. Ethics of Position;
17. Reporting and Accountability of the Board of Directors;
18. Measurement and Appraisal of the Board of Directors Performance;
19. Remuneration for the Board of Directors;
20. Time Use and Business Travel;
21. Supporting Organs of the Board of Directors.

Perusahaan secara berkala melakukan kaji ulang atas *Board Manual* dan melakukan pemutakhiran apabila dipandang perlu. *Board Manual* telah ditetapkan kembali berdasarkan SKB Dewan Komisaris dan Direksi No. SK.801/HK.002/ASDP-2020 tentang Pedoman Dewan Komisaris dan Direksi (Board Manual) PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) pada tanggal 22 Juni 2020 yang merupakan pemutakhiran dari edisi sebelumnya berdasarkan SKB Dewan Komisaris dan Direksi No. SK.732/HK.102/ASDP-2018 tentang Pedoman Tata Kerja Dewan Komisaris dan Direksi (*Board Manual*) PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) pada tanggal 24 Mei 2018.

The Company regularly reviews the Board Manual and makes improvements whenever necessary. The Board Manual has been re-stipulated based on Joint Decree of the Board of Commissioners and Board of Directors No. SK.801/HK.002/ASDP-2020 concerning The Board Manual of PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) on 22 June 2020. This manual is an improved version of the Joint Decree of the Boards of Commissioners and Board of Directors No. SK.732/HK.102/ASDP-2018 concerning The Board Manual of PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) on 24 May 2018.

Tugas dan Tanggung Jawab Direksi

Sebagai pilar inti dalam menjalankan praktik tata kelola yang efektif, Direksi bertanggung jawab untuk mematuhi peraturan yang berlaku dan Anggaran Dasar Perusahaan. Tugas pokok mereka mencakup kepemimpinan strategis, pengelolaan operasional sesuai visi serta misi Perusahaan. Direksi juga memiliki tanggung jawab penting dalam meningkatkan efisiensi dan efektivitas usaha Perusahaan, serta merawat serta mengelola aset Perusahaan dengan cermat.

Duties and Responsibilities of the Board of Directors

As the core pillar in executing effective governance practices, the Board of Directors is responsible for complying with applicable regulations and the Company's Articles of Association. Their principal duties include strategic leadership, operational management in accordance with the Company's vision and mission. The Board of Directors also has important responsibilities in improving the Company's business efficiency and effectiveness, as well as prudently maintaining and managing the Company's assets.

Pelaksanaan Tugas Direksi

Perusahaan meneruskan pendekatan manajemen yang telah diterapkan pada tahun sebelumnya, yang berfokus pada pencapaian *Strategic Framework* dalam RJPP 2020-2024. Pada

Implementation of the Board of Directors' Duties

The Company continued the management approach that was implemented in the previous year, which focused on achieving the Strategic Framework in the 2020-2024 Long-Term Plan. In

tahun 2023, PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) menetapkan target-target yang bertujuan untuk secara signifikan meningkatkan nilai Perusahaan melalui inisiatif strategis guna mencapai tujuan strategis. Ini melibatkan eksekusi rencana bisnis yang telah disiapkan, peningkatan layanan dan fasilitas, serta peningkatan kinerja operasional. Perusahaan memperkuat posisinya di dalam ekosistem bisnis jasa kepelabuhanan, termasuk sektor logistik dan pariwisata, dengan kebijakan manajemen yang dirancang untuk memberikan panduan dan memfasilitasi implementasi strategi. Secara keseluruhan, fokus kebijakan Perusahaan pada tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1. Ekspansi bisnis melalui pengadaan kapal untuk lintasan Merak-Bakauheni dan Lembar-Padangbai;
2. Penambahan, revitalisasi dan peningkatan kapasitas dermaga;
3. Pembangunan distrik 1 Bakauheni Harbour City (BHC);
4. Pengembangan kerja sama untuk bisnis Usaha Aneka Jasa;
5. Implementasi sistem manajemen pemeliharaan kapal dan pelabuhan;
6. Implementasi sistem manajemen pelayanan untuk penyeberangan dan pelabuhan;
7. Penataan pelabuhan meliputi zonasi dan sterilisasi;
8. Pembaharuan sertifikat kapal (Doc dan SMC) dan pelabuhan (SMK3);
9. Digitalisasi melalui *E-Manifest System* dan ASDP SAFE;
10. Pembenahan sistem Ferizy menjadi *single platform*;
11. Penyempurnaan sistem di pelabuhan;
12. Perluasan *payment channel* dan *sales channel*;
13. Implementasi sistem penilaian kinerja individu dan HRIS;
14. *Review* struktur organisasi;
15. Pengembangan sistem remunerasi berbasis kinerja, infrastruktur manajemen karier, *talent management system* dan *learning center*;
16. Implementasi *centralized settlement and reconciliation process*;
17. Pengembangan aplikasi portal *management report*;
18. *Corporate Rating*;
19. Kenaikan tarif pelabuhan dan tarif angkutan di 12 lintasan;

2023, PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) set targets to significantly enhance the Company's value through strategic initiatives aimed at achieving its strategic goals. This involved executing well-prepared business plans, improving services and facilities, and boosting operational performance. The Company fortified its standing in the port services business ecosystem, which includes the logistics and tourism sectors, with management policies specifically designed to guide and facilitate the implementation of these strategies. The main policy focuses for the Company in 2023 were as follows:

1. Business expansion through the procurement of ships for Merak-Bakauheni and Lembar-Padangbai routes;
2. Increased, revitalization and increased dock capacity;
3. Development of district 1 Bakauheni Harbour City (BHC);
4. Development of joint cooperations for miscellaneous services;
5. Implementation of ship and port maintenance management system;
6. Implementation of ferry and ports service management system;
7. Port management of zoning and sterilization;
8. Certificate renewal for ship (Doc and SMC) and port (SMK3);
9. Digitalization through the E-Manifest System and ASDP SAFE;
10. Improvement of Ferizy system towards single platform;
11. Improvement of port systems;
12. Expansion of payment channels and sales channels;
13. Implementation of individual performance appraisal and HRIS;
14. Review of organizational structure;
15. Development of a performance-based remuneration system, career management infrastructure, talent management system and learning center;
16. Implementation of centralized settlement and reconciliation process;
17. Development of report management portal;
18. Corporate Rating;
19. Tariff increase for port and ferry on 12 routes;

20. Peningkatan kapasitas *data center*;
21. Penetapan IT *Master Plan* dan membangun tata kelola TI;
22. Pembangunan infrastruktur teknologi, sistem informasi terintegrasi dan aplikasi Sistem Manajemen Aset (Aplikasi Simetri);
23. Membangun budaya digital.

20. Increased data center capacity;
21. Defined the IT Master Plan and established IT governance;
22. Development of technological infrastructure, integrated information systems and Asset Management System applications (Simetri App);
23. Build a digital culture.

RUANG LINGKUP PEMBAGIAN TUGAS PENGAWASAN MASIING- MASIING DIREKSI

Dalam rangka meningkatkan efektivitas pengelolaan Perusahaan, Direksi memiliki wewenang kolektif dalam pengambilan keputusan dan tanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi pengelolaan, sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Pedoman Kerja Direksi. Dalam kerangka ini, Direksi memiliki kewenangan untuk menugaskan masing-masing Direktur dalam bidang-bidang tertentu sesuai dengan pembagian tugas yang telah ditetapkan. Setiap anggota Direksi bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas dan wewenangnya, namun demikian, keseluruhan pelaksanaan tugas ini tetap menjadi tanggung jawab bersama. Adapun pembagian tugas di antara direktur adalah sebagai berikut:

DISTRIBUTION SCOPE OF SUPERVISORY DUTIES FOR EACH DIRECTOR

In order to increase the effectiveness in managing the Company, the Board of Directors holds collective authority in decision making and responsibility for the implementation of management duties, according to provisions in the Board Manual. Within this framework, the Board of Directors has the authority to assign each Director to a particular domain in accordance with the assigned distribution of duties. Each Director is responsible for the implementation of their duties and authority, however, the overall implementation of the duties remains a shared responsibility. The distribution of duties amongst directors was as follows:

Nama Name	Tugas Pengelolaan Management Duties
Direktur Utama President Director	Memimpin Perusahaan dengan 5 (lima) orang Direktur. Direktur Utama juga memimpin Direktorat Utama yang mempunyai tugas dan tanggung jawab dengan garis besar sebagai berikut: 1. Menetapkan visi, misi, rencana jangka panjang, dan jangka menengah Perusahaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku; 2. Menetapkan arah, kebijakan, strategi, dan rencana strategis Perusahaan; 3. Membangun dan menjalin hubungan strategis beserta melaksanakan komunikasi dengan seluruh pemangku kepentingan Perusahaan (termasuk regulator, pemerintah daerah, masyarakat, beserta pemegang saham); 4. Mengarahkan dan mengoordinasikan seluruh Direksi dalam memimpin direktoratnya masing-masing untuk memastikan tercapainya rencana strategis Perusahaan; 5. Menetapkan keputusan terkait kegiatan investasi Perusahaan yang menggunakan permodalan negara untuk meningkatkan pendapatan dan profitabilitas Perusahaan dan memberikan nilai tambah kepada pemegang saham; 6. Memastikan pelaksanaan tata kelola, sistem manajemen Perusahaan, <i>quality assurance</i> manajemen proyek serta kepatuhan Perusahaan. Leads the Company with 5 (five) Directors. The President Director also leads the Main Directorate which has duties and responsibilities outlined as follows: 1. Sets the Company's vision, mission, long-term and medium-term plans in accordance with applicable provisions; 2. Sets the Company's direction, policies, strategies and strategic plans; 3. Build and maintain strategic relationships as well as communicate with all Company stakeholders (including regulators, local governments, communities and shareholders); 4. Directs and coordinates with other Directors in leading their respective directorates to ensure the achievement of the Company's strategic plans; 5. Makes decisions for the Company's investment activities using state's capital to increase Company's income and profit as well as give added value to shareholders; 6. Ensures the implementation of governance, company management systems, project management quality assurance, and Company compliance.
Direktur Perencanaan & Pengembangan Planning and Development Director	Memimpin Direktorat Perencanaan & Pengembangan yang mempunyai tugas dan tanggung jawab dengan garis besar sebagai berikut: 1. Mengarahkan dan mengawasi pelaksanaan kegiatan perencanaan korporasi, pengembangan strategi bisnis, dan inovasi strategis sesuai dengan rencana strategis jangka panjang Perusahaan maupun anak perusahaan; 2. Menetapkan strategi pengembangan usaha untuk pencapaian pertumbuhan Perusahaan melalui kajian atas program Perusahaan yang telah disusun; 3. Mengevaluasi implementasi strategi dan melakukan penyesuaian terhadap pelaksanaan program Perusahaan; 4. Mengarahkan dan mengawasi pelaksanaan riset dan pengembangan yang dapat dijadikan sebagai suatu ide dalam pengembangan usaha Perusahaan; 5. Menetapkan keputusan terkait rencana strategis pengembangan bisnis Perusahaan sesuai dengan arahan strategis Perusahaan, hasil kajian laporan survei/database serta studi kelayakan dan RJPP; 6. Menyelesaikan tantangan dan kendala strategis yang dihadapi dalam perencanaan dan pengembangan bisnis Perusahaan. Lead the Planning & Development Directorate with duties and responsibilities outlined as follows: 1. Directs and supervises the execution of corporate planning activities, business strategy development and strategic innovation according to Company's long-term strategic plans and the subsidiaries; 2. Sets a business development strategy to achieve growth by reviewing the Company's formulated programs; 3. Evaluates strategy implementation and aligns with the program execution; 4. Directs and supervises research and development to gain ideas in expanding the Company's business; 5. Makes decisions for the Company's strategic business development plan in line with the Company's strategic direction, review report of survey/database as well as feasibility studies and the Company's Long-Term Plan; 6. Resolves strategic challenges and issues in planning and expanding the Company's business.

Nama Name	Tugas Pengelolaan Management Duties
Direktur Teknik & Fasilitas Engineering and Facilities Director	Memimpin Direktorat Teknik & Fasilitas yang mempunyai tugas dan tanggung jawab dengan garis besar sebagai berikut: 1. Mengarahkan dan mengawasi pelaksanaan kegiatan perencanaan, pengembangan dan pembangunan infrastruktur dan fasilitas Perusahaan sesuai dengan rencana strategis jangka panjang Perusahaan; 2. Mengarahkan dan mengawasi strategi pelaksanaan operasional armada dan pelabuhan, termasuk aspek manajemen teknik armada dan pelabuhan, manajemen keselamatan dan kesehatan lingkungan (K2L), dan pengadaan armada; 3. Melakukan pengawasan aset-aset produksi termasuk dalam permintaan, perawatan, perpindahan, penghapusan, asuransi dan dokumentasi serta sertifikasi aset; 4. Melakukan pengawasan terhadap seluruh kegiatan manajemen armada dan pelabuhan sesuai dengan pemenuhan standar yang ditetapkan; 5. Menetapkan keputusan terkait rencana strategis jangka menengah sesuai dengan RJPP; dan 6. Menyelesaikan tantangan dan kendala strategis yang dihadapi dalam teknik dan fasilitas Perusahaan. Leads the Engineering & Facilities Directorate, with outlined duties and responsibilities as follows: 1. Directs and supervises the planning, developing and construction of the Company's infrastructure and facilities in accordance with the Company's long-term strategic plan; 2. Directs and supervises fleets and ports operational execution strategies, including aspects of fleets and ports technical management, environmental health and safety management, and fleet procurement; 3. Supervises production assets including requisition, maintenance, transport, write-off, insurance and asset documentation and certification; 4. Supervises all fleets and ports management activities to meet the standards set; 5. Makes decisions for medium-term strategic plans according to the Company's Long-Term Plan; and 6. Resolves strategic challenges and issues related to the engineering and facilities.
Direktur Komersial & Pelayanan Commercial and Services Director	Memimpin Direktorat Komersial & Pelayanan yang mempunyai tugas dan tanggung jawab dengan garis besar sebagai berikut: 1. Menetapkan strategi dan kebijakan komersial, operasional, pelayanan, dukungan usaha, dan keperintisan di kantor regional dan kantor cabang sesuai dengan perencanaan pengembangan yang telah ditetapkan; 2. Melakukan pengawasan dan evaluasi kinerja kegiatan komersial, operasional, pelayanan, dukungan usaha, dan keperintisan di kantor regional dan kantor cabang; 3. Menyelesaikan tantangan dan kendala strategis yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan komersial, operasional, pelayanan, dukungan usaha, dan keperintisan di kantor regional dan kantor cabang. Leads the Commercial & Services Directorate, with outlined duties and responsibilities as follows: 1. Sets strategies and policies related to commercial, operational, service, business support and pioneering in regional and branch offices consistent with established development plans; 2. Supervises and evaluates the performance of commercial, operational, service, business support and pioneering activities in regional and branch offices; 3. Resolves strategic challenges and issues in implementing commercial, operational, service, business support and pioneering activities in regional and branch offices.

Nama Name	Tugas Pengelolaan Management Duties
Direktur Sumber Daya Manusia & Layanan Korporasi Human Resource and Corporate Services Director	Memimpin Direktorat Sumber Daya Manusia & Layanan Korporasi yang mempunyai tugas dan tanggung jawab dengan garis besar sebagai berikut: 1. Menetapkan strategi dan kebijakan pelaksanaan proses pengelolaan sumber daya manusia dan umum, dan mengawasi implementasi strategi untuk memastikan tingkat daya saing organisasi; 2. Mengarahkan dan mengawasi pelaksanaan pengadaan barang dan jasa serta logistik agar dilaksanakan sesuai ketentuan Perusahaan yang berlaku, efisien, efektif, adil, dan wajar; 3. Menyelesaikan tantangan dan kendala strategis yang dihadapi dalam pelaksanaan proses pengelolaan sumber daya manusia dan umum; 4. Memberikan arahan terkait dengan penanganan permasalahan hukum dan peraturan perundang-undangan. Leads the Human Resources & Corporate Services Directorate with outlined duties and responsibilities as follows: 1. Sets implementation strategies and policies for managing human and general resource, and oversee the implementation strategy to ensure organizational competitiveness; 2. Directs and supervises the procurement of goods, services and logistics to be implemented consistent with applicable Company regulations in efficient, effective, fair and acceptable way; 3. Resolves strategic challenges and issues faced in the managing human and general resource; 4. Gives direction related to legal issues and regulations.
Direktur Keuangan, Teknologi Informasi & Manajemen Risiko Finance, Information Technology and Risk Management Director	Memimpin Direktorat Keuangan, Teknologi Informasi, dan Manajemen Risiko mempunyai tugas dan tanggung jawab dengan garis besar sebagai berikut: 1. Menetapkan strategi dan kebijakan serta mengkoordinasi dan mengevaluasi penyusunan RKAP sesuai RJPP, menyediakan informasi keuangan dan KPI, pengendalian risiko keuangan, pengoptimalisasian keuangan, pemenuhan kewajiban terhadap pihak eksternal serta internal, penyelesaian laporan keuangan, proses pencatatan aset, pengelolaan teknologi informasi; 2. Menetapkan keputusan terkait RKAP dan informasi sesuai dengan RJPP; 3. Menyelesaikan tantangan dan kendala strategis yang dihadapi dalam pelaksanaan proses pengelolaan keuangan dan informasi Perusahaan. Leads the Finance, Information Technology and Risk Management Directorate with outlined duties and responsibilities as follows: 1. Sets strategies and policies as well as coordinate with and evaluate the WPB to align with the Company's Long Term Plan, provide financial information and KPIs, control financial risks, optimize finances, fulfill obligations to external and internal parties, complete financial reports, asset recording process, information technology management; 2. Makes decisions related to the Company's WPB and information adhering to Company's Long-Term Plan; 3. Resolves strategic challenges and issues in managing Company's financial and information.

PERNYATAAN INDEPENDENSI DAN BENTURAN KEPENTINGAN

Para anggota Direksi secara berulang menyatakan independensi mereka dalam menjalankan tanggung jawabnya, dengan fokus pada kepentingan Perusahaan dan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku. Pernyataan ini disahkan secara tahunan dan setiap anggota Direksi ASDP telah menandatangani, menegaskan komitmennya untuk bertindak secara independen dan bebas dari konflik kepentingan dalam menjalankan tugas dan fungsi mereka, sebagai berikut:

1. Saya tidak memiliki benturan kepentingan dan/atau terlibat dalam transaksi yang memiliki benturan kepentingan dengan PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) dan/atau anak perusahaan yang terkonsolidasi.
2. Saya tidak memegang jabatan rangkap sebagai:
 - Anggota Direksi pada BUMN, Badan Usaha Milik Daerah dan Badan Usaha Milik Swasta,
 - Anggota Dewan Komisaris pada BUMN,
 - Anggota Pengurus Partai Politik dan/atau anggota legislatif dan/atau calon kepala daerah/wakil kepala daerah,
 - Jabatan lain yang dapat menimbulkan benturan kepentingan,
3. Saya tidak memiliki hubungan sedarah sampai dengan derajat kedua, baik menurut garis lurus maupun garis ke samping atau hubungan semenda dengan anggota Direksi lainnya maupun dengan anggota Dewan Komisaris PT ASDP Indonesia Ferry (Persero).

KEBIJAKAN MENGENAI SUKSESI DIREKSI

Perusahaan melalui Komite Nominasi dan Remunerasi mempersiapkan regenerasi dan menjaga kesinambungan kepemimpinan Perusahaan di masa yang akan datang. Kebijakan suksesi Direksi Perusahaan mengacu pada Peraturan Menteri BUMN No. PER-11/MBU/07/2021 tentang Persyaratan, Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Direksi BUMN sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri BUMN No. PER-7/MBU/09/2022. Proses penunjukan

STATEMENT OF INDEPENDENCY AND CONFLICT OF INTEREST

The members of the Board of Directors have reiterated their commitment to independence in fulfilling their responsibilities, focusing specifically on the Company's interests and compliance with applicable regulations. This commitment is formally ratified annually, and every member of the ASDP Board of Directors has signed this declaration, affirming their dedication to act independently and remain free from any conflicts of interest in performing their duties and roles, as outlined below:

1. I have no conflict of interest and/or am not involved in transactions that have conflict of interests with PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) and/or its consolidated subsidiaries.
2. I do not hold concurrent positions as:
 - Director at SOEs, Regional Owned Enterprises and Private Owned Enterprises,
 - Member of the Board of Commissioners at SOEs,
 - Executive member of a political party and/or legislative members and/or candidate for regional head/ deputy head,
 - Other positions that may create a conflict of interest.
3. I do not have a familial relationship up to the second degree, either vertically or horizontally, or a relationship by marriage with any Director or member of the Board of Commissioners of PT ASDP Indonesia Ferry (Persero).

POLICY REGARDING SUCCESSION OF DIRECTORS

The Company, through the Nomination and Remuneration Committee, prepares for regeneration and maintains the continuity of the Company's leadership in the future. The Directors' succession policy refers to the Regulation of Minister of SOEs No. PER-11/MBU/07/2021 concerning Requirements, Procedures for Appointing and Dismiss Member of the Board of Directors of SOEs, as amended from Regulation of Minister of

calon anggota direksi dilakukan melalui tahapan penjangkaran, evaluasi rekam jejak, dan penetapan berdasarkan persyaratan formal, materiil, dan kriteria lain yang telah ditetapkan. Sumber calon anggota Direksi BUMN dapat berasal dari berbagai entitas di antaranya Talenta Kementerian BUMN, Talenta BUMN seperti direksi BUMN, pejabat satu tingkat di bawah direksi BUMN, direksi anak perusahaan BUMN dan/atau perusahaan patungan BUMN, direksi atau pejabat satu tingkat di bawah direksi pada anak perusahaan yang diperlakukan sama dengan BUMN serta talenta eksternal yang relevan.

Proses pemilihan dan penetapan anggota direksi juga dilakukan melalui uji kelayakan dan kepatutan (*fit & proper test*), setelah calon anggota direksi memenuhi persyaratan formal dan persyaratan lainnya. Pada pelaksanaannya, proses suksesi Direksi juga melibatkan pemegang saham dalam hal ini melalui Kementerian BUMN terkait proses penjangkaran, penilaian, penetapan maupun pengawasan terhadap masa jabatan anggota direksi.

KEPEMILIKAN SAHAM DIREKSI

PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) adalah entitas yang sepenuhnya dimiliki oleh Negara Republik Indonesia, yang berarti tidak ada kepemilikan saham yang dimiliki oleh anggota Dewan Komisaris maupun Direksi Perusahaan.

RAPAT DIREKSI

Rapat Direksi adalah rapat yang dilaksanakan oleh Direksi Perusahaan dengan pembahasan yang berkenaan dengan tugas dan fungsi pengelolaan Perusahaan sebagaimana diatur dalam *Board Manual*. Pelaksanaan rapat Direksi dilakukan secara berkala sekurang-kurangnya sekali dalam setiap bulan atau setiap waktu bilamana dipandang perlu atas permintaan seorang atau lebih anggota Direksi, atau atas permintaan tertulis dari Dewan. Dalam rapat tersebut, Direksi dapat mengundang Dewan Komisaris apabila terdapat agenda pembahasan yang memerlukan persetujuan atau nasihat dari Dewan Komisaris.

SOEs No.PER-7/MBU/09/2022. Prospective members of the Board of Directors is appointed after going through stages of screening, track records evaluation, and selected based on formal and material requirements and other predetermined criteria. A candidate for director at an SOEs may be sourced from various entities, among those are talent from Ministry of SOEs, director from other SOEs, SOEs official who is one level below directors, director at SOEs subsidiaries and/or joint ventures, director or official who is one level below directors at subsidiaries equivalent of SOEs as well as relevant external talents.

After the prospective candidate for director position have fulfilled formal and other requirements, the selection process also includes a fit & proper test. In its implementation, the Board of Directors succession also involves shareholders, which is Ministry of SOEs, concerning the selection, assessment, appointment and supervision of Directors' term of office.

BOARD OF DIRECTORS' SHARE OWNERSHIP

PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) is an entity wholly owned by the Republic of Indonesia, such that no members of the Company's Board of Commissioners or Directors own share ownership.

BOARD OF DIRECTORS' MEETING

The Board of Directors' Meeting is attended by the Company's Board of Directors and carries discussions concerning the duties and roles of Company management, as regulated in the Board Manual. The BOD meeting is held minimum of once monthly or at any time deemed necessary at the request of one or more Directors, or at the written request of the Board. At the meeting, the Board of Directors may invite the Board of Commissioners if there will be discussion points that requires approval or advice from the Board of Commissioners.

Untuk memastikan pelaksanaan rapat Direksi yang efektif, Direksi menentukan rencana rapat untuk satu tahun buku yang dilakukan sebelum dimulainya tahun buku. Rencana ini memperinci jumlah rapat yang akan diadakan serta waktu pelaksanaannya sesuai peraturan yang berlaku. Sepanjang tahun 2023, Direksi telah melaksanakan Rapat Internal Direksi sebanyak 47 (empat puluh tujuh) kali serta Rapat Gabungan Direksi dan Komisaris sebanyak 12 (dua belas) kali. Tingkat kehadiran Direksi dalam Rapat Direksi pada tahun 2023 disajikan dalam table berikut:

To ensure effective meetings, the Board of Directors scheduled meeting plans for one financial year, before the start of the financial year. The aforementioned schedule details the number of meetings and the time they will be held in accordance with applicable regulations. Throughout 2023, the Board of Directors has held Internal Meetings 47 (forty-seven) times as well as Joint Meetings of Boards of Directors and Commissioners 12 (twelve) times. The directors attendance rate at Directors' Internal Meetings in 2023 is presented in the following table:

Tingkat Kehadiran Direksi dalam Rapat Internal Direksi

Directors' Attendance Rate in the Board of Directors' Internal Meetings

Nama Name	Frekuensi Rapat Meeting Frequency	Jumlah Kehadiran Total Attendance	Tingkat Kehadiran Attendance Rate
Ira Puspawati	47	47	100%
Muhammad Yusuf Hadi	47	47	100%
Djunia Satriawan	47	47	100%
Kusnadi C. Wijaya	47	47	100%
Harry Muhammad Adhi Caksono	47	47	100%
Wahyu Wibowo	47	47	100%

Tingkat Kehadiran Direksi dalam Rapat Gabungan

Directors' Attendance Rate in the Joint Meetings

Nama Name	Frekuensi Rapat Meeting Frequency	Jumlah Kehadiran Total Attendance	Tingkat Kehadiran Attendance Rate
Ira Puspawati	12	12	100%
Muhammad Yusuf Hadi	12	12	100%
Djunia Satriawan	12	12	100%
Kusnadi C. Wijaya	12	12	100%
Harry Muhammad Adhi Caksono	12	12	100%
Wahyu Wibowo	12	12	100%

PROGRAM PENGENALAN DIREKSI

Seiring dengan pergantian Direksi yang terjadi, Perusahaan perlu memastikan pemahaman terhadap peran, tugas dan tanggung jawab Direksi serta aktivitas, kondisi dan strategi Perusahaan guna menjalankan peran

ONBOARDING PROGRAM FOR BOARD OF DIRECTORS

Anticipating the succession of Directors, the Company ensures there will be understanding of the roles, duties and responsibilities of the Directors as well as the Company's activities, conditions and strategies in order to manage

pengelolaan Perusahaan secara optimal. Untuk itu, Perusahaan memiliki program pengenalan Direksi yang terstruktur dan komprehensif yang ditujukan bagi Direksi baru.

Pelaksanaan program pengenalan Direksi dikoordinasikan oleh Sekretaris Perusahaan dengan melibatkan berbagai fungsi termasuk Manajemen Risiko, Satuan Pengawasan Internal, Perencanaan Korporasi dan Pengelolaan Sumber Daya Manusia dalam penyusunan rancangan, metode dan materi pengenalan termasuk dalam pelaksanaan program pengenalan Direksi itu sendiri.

Pada tahun 2023, tidak terdapat penggantian Direksi sehingga Perusahaan tidak melaksanakan program pengenalan bagi Direksi baru.

PROGRAM PENDIDIKAN DAN PENGEMBANGAN DIREKSI

Perusahaan memiliki kebijakan pengembangan kompetensi Direksi yang mengacu pada Board Manual. Program pengembangan kompetensi Direksi dilaksanakan guna mengembangkan kompetensi yang relevan dengan fungsi dan peran pengelolaan Perusahaan yang dimiliki oleh Direksi. Pada tahun 2023, pelatihan Direksi diikuti oleh 3 Direktur yaitu Direktur Komersial dan Pelayanan, Direktur Teknik dan Fasilitas, Direktur SDM dan Layanan Korporasi yang terdiri dari pelatihan *Qualified Risk Governance Professional*, CHRO dan *Governance, Risk, Compliance Integrated Information for Supervisory Board*.

PENILAIAN KINERJA DIREKSI

Penilaian kinerja Direksi dilakukan melalui beberapa metode yaitu penilaian kinerja secara mandiri, penilaian dan evaluasi oleh Dewan Komisaris dan pemegang saham. Penilaian kinerja secara mandiri dilakukan terhadap kinerja kolegal maupun individu. Sementara penilaian kinerja yang dilakukan oleh Dewan Komisaris dan pemegang saham dilakukan berdasarkan realisasi KPI Direksi dan tingkat kesehatan Perusahaan yang telah disahkan dalam kontrak manajemen. Direksi wajib menyampaikan Laporan Triwulanan mengenai perkembangan pencapaian KPI kepada pemegang saham.

the Company optimally. Hence, the Company has a structured and comprehensive Directors' onboarding program for newly joined directors.

The Directors' onboarding program is coordinated by the Corporate Secretary, by involving various units including Risk Management, Internal Audit, Corporate Planning and Human Resources Management in drafting the onboarding designing, method and materials, including onboarding program implementation

In 2023, there was no change in Director position so the Company did not implement an onboarding program for new Directors.

DIRECTORS' TRAINING AND DEVELOPMENT PROGRAM

The Company's competency development policy for the Board of Directors referred to the Board Manual. The competency development program for the Directors was implemented to develop relevant competencies to their functions and role in Company management. In 2023, the trainings of *Qualified Risk Governance Professional*, CHRO and *Governance, Risk, Compliance Integrated Information for Supervisory Board* were attended by 3 Directors, namely the Engineering & Facilities Director, Commercial & Services Director, and HR & Corporate Services Director.

PERFORMANCE APPRAISAL OF THE BOARD OF DIRECTORS

The performance appraisal of the Board of Directors is carried out through several methods, namely independent performance appraisal, assessment and evaluation by the Board of Commissioners and shareholders. Independent performance appraisals are carried out on collegial and individual performance. Meanwhile, the Board of Commissioners and shareholders appraised performance based on the achievement of the Board of Directors' KPI and the Company's health level, as was approved in the management contract. The Board of Directors must present quarterly reports on the progress of KPI achievements to shareholders.

Realisasi Capaian *Key Performance Indicators* Direksi Tahun 2023Realization of the Board of Directors' *Key Performance Indicators* Achievements in 2023

No	Indikator Indicator	Satuan Unit	Target Tahunan Annual Target	Polaritas Polarity	Bobot Weight	Realisasi Tahunan Annual Realization	Pencapaian Tahunan Annual Achievement	%MAX (110%)	Tahunan Annual
KPI KORPORAT CORPORATE KPI									
NILAI EKONOMI DAN SOSIAL UNTUK INDONESIA ECONOMIC AND SOCIAL VALUE FOR INDONESIA						45	45,64		
FINANSIAL FINANCIAL									
1.	EBITDA	Rupiah (Triliun) Rupiah (Trillion)	1,45	Maximize	8	1,08	74,48%	74,48%	5,96
2.	Perbandingan ROIC Terhadap WACC ROIC to WACC Ratio	Persentase Percentage	1,16%	Maximize	8	1,22%	105,17%	105,17%	8,41
3a.	Interest Bearing Debt to Invested Capital	Persentase Percentage	27,61%	Minimize	8	15,72%	143,06%	110,00%	8,80
3b.	Interest Bearing Debt to EBITDA	Kali Times	1,93	Minimize	7	1,45	124,87%	110,00%	7,70
OPERASIONAL OPERATIONAL									
4.	Penataan Pelabuhan (Zonasi) Port Arrangement (Zoning)	Pelabuhan Port	8	Maximize	7	9	112,50%	110,00%	7,70
SOSIAL SOCIAL									
5.	Pemenuhan Trip Subsidi Accomplishment of Subsidized Trips	Trip	97.656	Maximize	7	98.642	101,01%	101,01%	7,07
INOVASI MODEL BISNIS BUSINESS MODEL INNOVATION						15	16,41		
6	Kerja Sama Korporat Corporate Partnership	Rupiah (Miliar) Rupiah (Billion)	450	Maximize	5	587	130,44%	110,00%	5,50
7.	Market Share	%	31%	Maximize	5	33,55%	108,23%	108,23%	5,41
8.	Produksi Kendaraan Vehicle Production	Unit	7.209.890	Maximize	5	8.661.230	120,13%	110,00%	5,50
KEPEMIMPINAN DAN TEKNOLOGI LEADERSHIP AND TECHNOLOGY						10	11,00		
9.	Digitalisasi Manajemen Pemeliharaan Kapal dan Pelabuhan Digitalization of Ship and Port Maintenance Management	Persentase Percentage	100%	Maximize	5	112%	112,00%	110,00%	5,50
10.	IT Maturity Level IT Maturity Level	Level Level	3	Maximize	5	3,3	110,00%	110,00%	5,50
PENINGKATAN INVESTASI INCREASED INVESTMENT						10	11,00		
11	Investasi Rehabilitasi atau Revitalisasi Kapal dan Pelabuhan Investment in Vessel and Port Rehabilitation or Revitalization	Kapal Vessel Dermaga Dock	2 4	Maximize	5	7	116,67%	110,00%	5,50
12.	Proyek Bakauheni Harbour City Bakauheni Harbour City Project	Persentase Percentage	100%	Maximize	5	110%	110,00%	110,00%	5,50

No	Indikator Indicator	Satuan Unit	Target Tahunan Annual Target	Polaritas Polarity	Bobot Weight	Realisasi Tahunan Annual Realization	Pencapaian Tahunan Annual Achievement	%MAX (110%)	Tahunan Annual
PENGEMBANGAN TALENTA TALENT DEVELOPMENT					20				21,83
13a	Rasio Perempuan dalam Nominated Talent Ratio of Female in Nominated Talent	Persentase Percentage	16%	Maximize	4	28,57%	178,56%	110,00%	4,40
13b	Rasio Milenial (≤ 42 Tahun) dalam Nominated Talent Ratio of Millennial (≤42 Years Old) in Nominated Talent	Persentase Percentage	27%	Maximize	4	28,57%	105,81%	105,81%	4,23
14	Penyelesaian Roadmap Penyehatan Dana Pensiun Manfaat Pasti Completion of the Roadmap for Restructuring Retirement Funds Fixed Benefit	Persentase Percentage	100%	Maximize	6	110,00%	110,00%	110,00%	6,60
15	Rasio Pemenuhan Kualifikasi Organ Pengelola Risiko (Rasio Kualifikasi) Qualification Ratio of Risk Management	Persentase Percentage	40%	Maximize	6	100,00%	250,00%	110,00%	6,60
TOTAL SKOR TOTAL SCORE					100				105,88

PENILAIAN KINERJA KOMITE DI BAWAH DIREKSI

Hingga akhir tahun 2023, belum terbentuk sebuah Komite di bawah naungan Direksi Perusahaan, sehingga evaluasi atas kinerja komite di bawah Direksi tidak tersedia.

Dalam mendukung perannya dalam pengelolaan Perusahaan, Direksi telah didukung oleh organ Sekretaris Perusahaan. Terkait pengendalian internal, Direksi didukung organ Satuan Pengawasan Internal dan Divisi Manajemen Risiko.

Pelaksanaan tugas organ pendukung tersebut dituangkan ke dalam KPI yang disepakati sebagai kriteria dan ukuran pencapaian target pelaksanaan tugas penilaian kinerja Satuan Pengawasan Internal dan Satuan Manajemen Risiko & Kepatuhan. Evaluasi organ pendukung Direksi dilakukan oleh Direktur Utama, merujuk pada parameter terkait, seperti Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas yang dilakukan sebanyak 2 (dua) kali dalam setahun.

PERFORMANCE APPRAISAL OF COMMITTEES UNDER THE BOARD OF DIRECTORS

As of end of 2023, there was no committee under the Board of Directors, thus there was no performance evaluation of committees under the BOD.

In managing the Company, the Board of Directors is supported by the Corporate Secretary. The Internal Audit Unit and the Risk Management Division supported the Board of Directors regarding internal control.

The duties of the supporting organs are outlined in the KPIs that are agreed as criteria and measures for targets completion for the Internal Audit and the Risk & Compliance Management Unit performance appraisals. Evaluations of the supporting organs of the Board of Directors are carried out biannually by the President Director, using relevant parameters, such as Completions and Duties Implementation.

HUBUNGAN AFILIASI SERTA HUBUNGAN KERJA DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

AFFILIATE RELATIONSHIPS AND WORKING RELATIONSHIPS OF THE BOARDS OF COMMISSIONERS AND DIRECTORS

HUBUNGAN AFILIASI ANTARA DEWAN KOMISARIS, DIREKSI, DAN PEMEGANG SAHAM PENGENDALI

AFFILIATE RELATIONSHIP BETWEEN THE BOARD OF COMMISSIONERS, BOARD OF DIRECTORS, AND CONTROLLING SHAREHOLDERS

Sepanjang tahun 2023, seluruh anggota Dewan Komisaris yang menjabat tidak memiliki afiliasi baik secara hubungan keluarga maupun keuangan dengan anggota Dewan Komisaris, Direksi maupun Pemegang Saham Perusahaan.

Throughout 2023, all serving members of the Board of Commissioners have no familial or financial affiliation with members of the Board of Commissioners, Board of Directors or Company Shareholders.

Nama Name	Hubungan Keluarga Dengan Familial Relationship With			Hubungan Keuangan Dengan Financial Relationship With		
	Dewan Komisaris BOC	Direksi BOD	Pemegang Saham Shareholder	Dewan Komisaris BOC	Direksi BOD	Pemegang Saham Shareholder
Saiful Haq Manan	Tidak No	Tidak No	Tidak No	Tidak No	Tidak No	Tidak No
Hendar Ristriawan	Tidak No	Tidak No	Tidak No	Tidak No	Tidak No	Tidak No
Iwan Hari Sugiarto	Tidak No	Tidak No	Tidak No	Tidak No	Tidak No	Tidak No
Susi Meyrista Tarigan	Tidak No	Tidak No	Tidak No	Tidak No	Tidak No	Tidak No
Edmil Nurjamil	Tidak No	Tidak No	Tidak No	Tidak No	Tidak No	Tidak No
Budi Setiyadi	Tidak No	Tidak No	Tidak No	Tidak No	Tidak No	Tidak No

HUBUNGAN KERJA DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

Dewan Komisaris dan Direksi bertanggung jawab dalam menjalankan peran masing-masing serta membangun kolaborasi yang efektif untuk mendukung kemajuan Perusahaan. Hubungan kerja antara keduanya merupakan wujud implementasi praktik GCG yang dalam hal ini keduanya berfungsi sebagai bagian integral dalam pengawasan dan manajemen Perusahaan. Dalam proses pengambilan keputusan strategis, Direksi mempertimbangkan masukan, nasihat, dan rekomendasi yang diberikan oleh Dewan Komisaris. Rincian terkait hubungan kerja ini dijelaskan secara komprehensif dalam bagian Hubungan Kerja Dewan Komisaris dan Direksi dalam *Board Manual*, yang mencakup berbagai aspek yang relevan.

1. Perbuatan Direksi yang Harus Mendapat Persetujuan Tertulis Dewan Komisaris;
2. Perbuatan Direksi yang Harus Mendapat Tanggapan Tertulis Dari Dewan Komisaris dan Persetujuan RUPS;
3. Pertemuan Formal Dewan Komisaris dan Direksi;
4. Pertemuan Informal;
5. Komunikasi Formal;
6. Komunikasi Informal.

Pertemuan formal mencakup Rapat Dewan Komisaris dan Direksi yang diadakan sesuai forum formal dari kedua organ tersebut, diatur melalui undangan yang dikeluarkan oleh salah satu organ Perusahaan, baik Dewan Komisaris maupun Direksi. Pelaksanaan rapat harus mematuhi pedoman yang tercantum dalam *Board Manual*. Sementara itu, pertemuan informal melibatkan anggota Dewan Komisaris dan Direksi di luar forum formal, memungkinkan partisipasi dari anggota organ lain atau kehadiran lengkap dari kedua organ Perusahaan untuk diskusi informal tentang isu-isu tertentu. Komunikasi formal merujuk pada pertukaran informasi yang memenuhi ketentuan formal dalam Anggaran Dasar atau *best practices*, seperti laporan dan analisis data. Di sisi lain, komunikasi informal terjadi di antara anggota Dewan Komisaris dan Direksi atau antar anggota organ, di luar ketentuan resmi yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

WORK RELATIONSHIP BETWEEN THE BOARDS OF COMMISSIONERS AND DIRECTORS

The Boards of Commissioners and Directors are responsible for carrying out their respective roles and building effective collaboration for the Company's progress. The working relationship between the two is concrete application of GCG practices, as both function as integral parts in the supervision and management of the Company. In making strategic decisions, the Board of Directors considers input, advice and recommendations from the Board of Commissioners. The working relationship is detailed comprehensively under the section of Working Relationship of the Boards of Commissioners and Directors in the Board Manual, which covers various relevant aspects.

1. Actions of the Board of Directors That Must Obtain Written Approval from the Board of Commissioners;
2. Actions of the Board of Directors That Must be Responded in Writing by the Board of Commissioners and Approved by the GMS;
3. Formal Meeting of the Boards of Commissioners and Directors;
4. Informal Meeting;
5. Formal Communication;
6. Informal Communication.

Formal meetings are meetings of the Board of Commissioners and Board of Directors which are held officially by the organs, arranged through invitations issued by either the Boards of Commissioners or Directors. Meetings conducted must comply with the guidelines stated in the Board Manual. Meanwhile, informal meetings involve members of the Boards of Commissioners and Board of Directors outside the official forum to allow participation from members of other organs, or the full attendance of both members of the Boards to discuss informally on certain issues. Formal communication refers to information exchange that meets formal requirements in the Articles of Association or best practices, such as reports and data analysis. On the other hand, informal communication occurs between members of the Boards of Commissioners and Directors or between members of organs, outside the official provisions in the Articles of Association or applicable regulations.

NOMINASI DAN REMUNERASI DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

NOMINATION AND REMUNERATION FOR THE BOARDS OF COMMISSIONERS AND DIRECTORS

NOMINASI DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

Nominasi Dewan Komisaris dan Direksi merupakan salah satu tugas dari Komite Nominasi dan Remunerasi untuk menjaga kesinambungan estafet kepemimpinan Perusahaan. Pelaksanaan Nominasi Dewan Komisaris dan Direksi mengacu pada Peraturan Menteri BUMN No.PER-3/MBU/03/2023 tentang Organ dan Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara.

Sesuai mekanisme yang tercantum pada Peraturan Menteri BUMN, penunjukan dan penetapan Dewan Komisaris dan Direksi dilakukan melalui proses penjurian, evaluasi rekam jejak dan penetapan yang transparan. Pemilihan dan penetapan Anggota Dewan Komisaris dan Direksi dilakukan melalui uji kelayakan dan kepatutan (*fit & proper test*), setelah calon Anggota Direksi memenuhi persyaratan formal dan persyaratan lainnya.

REMUNERASI DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

Dewan Komisaris dan Direksi memiliki hak untuk menerima kompensasi yang sesuai sebagai dengan pelaksanaan fungsi, tugas dan tanggung jawabnya dalam melakukan pengelolaan Perusahaan. Kompensasi ini mencakup berbagai bentuk manfaat finansial, seperti gaji atau honorarium, tunjangan bonus dan fasilitas lainnya yang ditetapkan oleh RUPS sesuai dengan kebijakan Perusahaan.

Kebijakan remunerasi untuk Dewan Komisaris dan Direksi merujuk pada Peraturan Menteri BUMN No PER-3/MBU/03/2023 tentang Organ dan Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara.

NOMINATION OF THE BOARDS OF COMMISSIONERS AND DIRECTORS

Nomination of the Boards of Commissioners and Directors is one of the duties of the Nomination and Remuneration Committee to maintain the continuity of the Company's leadership. The implementation refers to the Regulation of Minister of SOEs No. PER-3/MBU/03/2023 concerning Organs and Human Resources of State-Owned Enterprises.

According to mechanism stated in the Minister Regulation, the Boards of Commissioners and Directors is appointed following transparent processes of screening, track records evaluation and decision. The selection and appointment of members of the Boards of Commissioners and Directors is screened through a fit & proper test, after prospective candidates fulfilled their formal and other requirements.

REMUNERATION FOR THE BOARDS OF COMMISSIONERS AND DIRECTORS

The Boards of Commissioners and Directors are rightfully compensated appropriately for carrying out their roles, duties and responsibilities in managing the Company. The compensation includes various forms of financial benefits, such as salary or honorarium, allowances, bonuses and other facilities, as stipulated in GMS in accordance with Company policy.

The remuneration policy for the Boards of Commissioners and Directors refers to the Regulation of Minister of SOEs No. PER-3/MBU/03/2023 concerning Organs and Human Resources of State-Owned Enterprises.

PROSEDUR PENETAPAN REMUNERASI DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi diusulkan berdasarkan basis formula dan faktor perhitungan remunerasi yang ditetapkan oleh pemegang saham melalui RUPS yang sebelumnya telah melalui tahapan penelaahan oleh Dewan Komisaris dibantu oleh Komite Nominasi dan Remunerasi. Penetapan remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi dilakukan melalui langkah-langkah berikut:

- 1. Usulan Remunerasi oleh Direksi**
Direksi mengajukan usulan remunerasi kepada Dewan Komisaris untuk ditelaah sebelum diajukan melalui RUPS.
- 2. Pembahasan dengan Komite Dewan Komisaris**
Komite Dewan Komisaris melakukan penelaahan atas kompensasi yang diberikan di pasar untuk pekerjaan yang bersangkutan pada Perusahaan lainnya dengan bidang usaha dan status yang sama, serta memperhitungkan kinerja usaha Perusahaan dan kontribusi masing-masing individu. Kemudian dilakukan pembahasan oleh Komite Dewan Komisaris untuk menyiapkan rekomendasi.
- 3. Pembahasan dan Persetujuan oleh Dewan Komisaris**
Dewan Komisaris melakukan pembahasan lanjutan dan persetujuan atas usulan remunerasi yang diajukan.
- 4. Penyampaian Usulan**
Dewan Komisaris melakukan pembahasan lanjutan dan persetujuan atas usulan remunerasi yang diajukan.
- 5. Persetujuan dan Penetapan Remunerasi**
Pemegang saham memberikan persetujuan dan menetapkan remunerasi melalui RUPS.

PROCEDURE FOR DETERMINING REMUNERATION FOR THE BOARDS OF COMMISSIONERS AND DIRECTORS

Remuneration for the Boards of Commissioners and Directors is proposed based on the formula and calculation determined by shareholders through the GMS. The proposal had been reviewed by the Board of Commissioners assisted by the Nomination and Remuneration Committee. The decision of remuneration for the Boards of Commissioners and Directors goes through the following steps:

- 1. Remuneration Proposal by the Board of Directors**
The Board of Directors submits remuneration proposals to the Board of Commissioners for review before being submitted to the GMS.
- 2. Discussion with the Committees of the Board of Commissioners**
The BOC Committee reviews the market for compensation for work in other companies in the same industry and calibre, and takes into account the Company's business performance and the contribution of each individual. Then, a discussion is held by the BOC Committee to make recommendations.
- 3. Discussion and Approval by the Board of Commissioners**
The Board of Commissioners conducts further discussions and approves the proposed remuneration.
- 4. Submission of Proposals**
The Board of Commissioners conducts further discussions and approves the proposal.
- 5. Approval and Decision for Remuneration**
Shareholders approve and determine remuneration through the GMS.

INDICATORS FOR DECIDING ON

INDIKATOR USULAN PENETAPAN REMUNERASI DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

Usulan penetapan remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi merujuk pada komposisi dan indikator yang diatur dalam Peraturan Menteri BUMN No. PER-3/MBU/03/2023 tentang Organ dan Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara. Usulan penetapan remunerasi dilakukan berdasarkan indikator dan faktor-faktor sebagai berikut:

1. Faktor skala usaha,
2. Faktor kompleksitas usaha,
3. Tingkat inflasi,
4. Kondisi dan kemampuan keuangan Perusahaan,
5. Faktor-faktor lain yang relevan, serta tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

STRUKTUR REMUNERASI DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

Penetapan struktur remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi mengacu pada Peraturan Menteri BUMN Peraturan Menteri BUMN No. PER-3/MBU/03/2023 tentang Organ dan Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara. Struktur remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi Perusahaan adalah sebagai berikut:

PROPOSED REMUNERATION FOR THE BOARDS OF COMMISSIONERS AND DIRECTORS

Determining the remuneration proposal for the Boards of Commissioners and Directors refers to the structure and indicators in the Regulation of Minister of SOEs No. PER-3/MBU/03/2023 concerning Organs and Human Resources of State-Owned Enterprises. Indicators and factors considered to determine the remuneration proposal are:

1. Business scale,
2. Business complexity,
3. Inflation rate,
4. Company's financial condition and capabilities,
5. Other relevant factors, and alignment with regulations.

REMUNERATION STRUCTURE FOR THE BOARDS OF COMMISSIONERS AND DIRECTORS

Deciding on the remuneration structure for the Boards of Commissioners and Directors refers to the Regulation of Minister of SOEs No. PER-3/MBU/03/2023 concerning Organs and Human Resources of State-Owned Enterprises. The remuneration structure of the Company's Boards of Commissioners and Directors are as follows:

Jabatan Position	Komponen Remunerasi Remuneration Components	Penetapan Komponen Remunerasi Decision on Remuneration Components
Dewan Komisaris Board of Commissioners	Honorarium Honorarium	- Honorarium Komisaris Utama ditetapkan sebesar 45% (empat puluh lima persen) dari Gaji Direktur Utama. Honorarium for the President Commissioner is set at 45% (forty five percent) of the President Director's Salary. - Honorarium Komisaris ditetapkan sebesar 90% (sembilan puluh persen) dari Honorarium Komisaris Utama. Honorarium for the Commissioner is set at 90% (ninety percent) of the President Commissioner's Honorarium.
	Tunjangan Hari Raya Religious Holiday Allowance	Tunjangan Hari Raya untuk Anggota Dewan Komisaris diberikan sebesar 1 (satu) kali Honorarium masing-masing Anggota Dewan Komisaris. The Religious Holiday Allowance for members of the Board of Commissioners is awarded at 1 (one) time of their respective Honorarium.
	Tunjangan Transportasi Transportation Allowance	Tunjangan transportasi diberikan sebesar 20% (dua puluh persen) dari Honorarium masing-masing anggota Dewan Komisaris. Transportation allowance is allotted at 20% (twenty percent) of the Honorarium of each member of the Board of Commissioners.
	Asuransi Purna Jabatan Retirement Insurance	Asuransi purna jabatan diberikan dengan ketentuan sebagai berikut: - Asuransi purna jabatan diberikan selama menjabat (mulai diangkat sampai berhenti). - Premi yang ditanggung oleh Perusahaan paling banyak 25% (dua puluh lima persen) dari Gaji dalam satu tahun. - Pemilihan program untuk asuransi purna jabatan ditetapkan oleh masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris BUMN. - Pemberian premi, iuran atau istilah lain yang relevan untuk asuransi purna jabatan, sudah termasuk di dalamnya premi untuk asuransi kecelakaan dan kematian. Retirement insurance is awarded under the following conditions: - Retirement insurance is provided during the tenure (from appointment to discharge). - The premium borne by the Company is maximum of 25% (twenty five percent) of annual Salary. - The insurance plan selected is decided by each member of the Board of Directors and Board of Commissioners of the SOEs. - The premium, contribution, or other relevant terms for retirement insurance covers accident and life insurance.
	Fasilitas Kesehatan Healthcare Benefit	Perusahaan wajib memberikan fasilitas kesehatan dalam bentuk asuransi kesehatan atau penggantian biaya pengobatan. Fasilitas kesehatan diberikan kepada anggota Dewan Komisaris beserta seorang istri/suami dan maksimal 3 (tiga) orang anak yang belum mencapai usia 25 tahun dengan ketentuan apabila anak yang belum berusia 25 tahun tersebut pernah menikah atau pernah bekerja maka yang bersangkutan tidak berhak mendapatkan fasilitas kesehatan. Fasilitas kesehatan diberikan berupa: - Rawat jalan dan obat; - Rawat inap dan obat; dan - Medical check up. The Company is required to provide healthcare benefit either through health insurance or reimbursement for medical expenses. Healthcare benefits are available to members of the Board of Commissioners, with respective one spouse and maximum of 3 (three) children under 25 years old who are eligible only if they have never married or never worked. Healthcare benefits include: - Outpatient care and medication; - Hospitalization and medication; and - Medical check-up.
	Fasilitas Bantuan Hukum Legal Aid	Fasilitas bantuan hukum diberikan dalam bentuk pembiayaan jasa kantor pengacara/konsultan hukum yang meliputi proses pemeriksaan sebagai saksi, tersangka, dan terdakwa di lembaga peradilan. Legal assistance is provided in the form of financial coverage for lawyer/ legal consultant services, including for witness examination, as a suspect as well as a defendant in a judicial institution.

Jabatan Position	Komponen Remunerasi Remuneration Components	Penetapan Komponen Remunerasi Decision on Remuneration Components
	Tantiem/Insentif Kinerja Tantiem/Performance Incentives	- Komisaris Utama ditetapkan sebesar 45% (empat puluh lima persen) dari Direktur Utama. - Wakil Komisaris Utama ditetapkan sebesar 42,5% (empat puluh dua koma lima persen) dari Direktur Utama. - Anggota Dewan Komisaris ditetapkan sebesar 90% (sembilan puluh persen) dari Komisaris Utama. - The President Commissioner is awarded 45% (forty five percent) of the President Director. - The Deputy President Commissioner is awarded 42.5% (forty two point five percent) of the President Director. - Members of the Board of Commissioners are awarded 90% (ninety percent) of the President Commissioner.
Direksi Board of Directors	Gaji Salary	- Gaji Direktur Utama ditetapkan dengan menggunakan pedoman internal yang ditetapkan oleh Pemegang Saham. - Anggota Direksi lainnya ditetapkan sebesar 85% (delapan puluh lima persen) dari Gaji Direktur Utama. - The President Director's salary is determined using internal guidelines set by the Shareholders. - Other members of the Board of Directors are set at 85% (eighty five percent) of the President Director's salary.
	Tunjangan Hari Raya Religious Holiday Allowance	Tunjangan Hari Raya untuk Direksi diberikan sebesar 1 (satu) kali gaji masing-masing Direksi. The Religious Holiday Allowance for Directors are awarded 1 (one) time of their respective salary.
	Tunjangan Perumahan Housing Allowance	Tunjangan perumahan termasuk biaya utilitas diberikan secara bulanan sebesar 40% (empat puluh persen) dari Gaji, dengan ketentuan paling banyak sebesar: - Rp27.500.000 (dua puluh tujuh juta lima ratus ribu Rupiah) untuk wilayah Ibu Kota Negara. - Rp25.000.000 (dua puluh lima juta Rupiah) untuk wilayah Ibu Kota Provinsi. - Rp22.500.000 (dua puluh dua juta lima ratus ribu Rupiah) untuk wilayah Kabupaten dan Kota. - Tunjangan Perumahan diberikan apabila BUMN tidak menyediakan fasilitas rumah jabatan Direksi. Housing Allowance and utility costs is given on a monthly basis at 40% (forty percent) of the Salary, with upper limit of: - Rp27,500,000 (twenty seven million five hundred thousand Rupiah) in the national capital. - Rp25,000,000 (twenty five million Rupiah) in provincial capital. - Rp22,500,000 (twenty two million five hundred thousand Rupiah) in regency and city. - Housing allowance is provided under the condition that the SOE does not provide housing facilities for Director.

Jabatan Position	Komponen Remunerasi Remuneration Components	Penetapan Komponen Remunerasi Decision on Remuneration Components
	Asuransi Purna Jabatan Retirement Insurance	Asuransi purna jabatan diberikan dengan ketentuan sebagai berikut: 1. Asuransi purna jabatan diberikan selama menjabat (mulai diangkat sampai berhenti). 2. Premi yang ditanggung oleh Perusahaan paling banyak 25% (dua puluh lima persen) dari Gaji dalam satu tahun. 3. Pemilihan program untuk asuransi purna jabatan ditetapkan oleh masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris BUMN. 4. Pemberian premi, iuran atau istilah lain yang relevan untuk asuransi purna jabatan, sudah termasuk di dalamnya premi untuk asuransi kecelakaan dan kematian. Retirement insurance is awarded under the following conditions: 1. Retirement insurance is provided during the tenure (from appointment to discharge). 2. The premium borne by the Company is maximum of 25% (twenty five percent) of annual Salary. 3. The insurance plan selected is decided by each member of the Board of Directors and Board of Commissioners of the SOEs. 4. The premium, contribution, or other relevant terms for retirement insurance covers accident and life insurance.
	Fasilitas Kendaraan Vehicle Benefit	Anggota Direksi hanya berhak atas 1 (satu) fasilitas kendaraan dari Perusahaan. Fasilitas kendaraan termasuk di dalamnya biaya pemeliharaan dan operasional diberikan dengan memperhatikan kondisi keuangan Perusahaan. Spesifikasi dan standar kendaraan ditetapkan oleh RUPS/Menteri. Members of the Board of Directors are entitled to 1 (one) vehicle from the Company. Vehicle facilities includes maintenance and operational costs, taking into account the Company's financial condition. Specification and standard of the vehicle is determined by the GMS/Minister.
	Fasilitas Kesehatan Healthcare Benefit	Perusahaan wajib memberikan fasilitas kesehatan dalam bentuk asuransi kesehatan atau penggantian biaya pengobatan. Fasilitas kesehatan diberikan kepada anggota Direksi beserta seorang istri/suami dan maksimal 3 (tiga) orang anak yang belum mencapai usia 25 tahun dengan ketentuan apabila anak yang belum berusia 25 tahun tersebut pernah menikah atau pernah bekerja maka yang bersangkutan tidak berhak mendapatkan fasilitas kesehatan. Fasilitas kesehatan diberikan berupa: 1. Rawat jalan dan obat; 2. Rawat inap dan obat; dan 3. Medical check up. The Company is required to provide healthcare benefit either through health insurance or reimbursement for medical expenses. Healthcare benefits are available to Directors, with respective one spouse and maximum of 3 (three) children under 25 years old who are eligible only if they have never married or never worked. Healthcare benefits include: 1. Outpatient care and medication; 2. Hospitalization and medication; and 3. Medical check-up.
	Fasilitas Bantuan Hukum Legal Aid	Fasilitas bantuan hukum diberikan dalam bentuk pembiayaan jasa kantor pengacara/konsultan hukum yang meliputi proses pemeriksaan sebagai saksi, terdakwa, dan terdakwa di lembaga peradilan. Legal assistance is provided in the form of financial coverage for lawyer/legal consultant services, including for witness examination, as a suspect as well as a defendant in a judicial institution.
	Tantiem/Insentif Kinerja Tantiem/Performance Incentives	1. Wakil Direktur Utama 95% (sembilan puluh lima persen) dari Direktur Utama. 2. Direktur yang membidangi Sumber Daya Manusia 90% (sembilan puluh persen) dari Direktur Utama. 3. Anggota Direksi lainnya 85% (delapan puluh lima persen) dari Direktur Utama. 1. The Deputy President Director is awarded 95% (ninety five percent) of the President Director. 2. The Human Resources Director is awarded 90% (ninety percent) of the President Director. 3. Other Director is awarded 85% (eighty five percent) of the President Director.

BESARAN REMUNERASI DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

Remunerasi bagi Dewan Komisaris dan Direksi Perusahaan tahun 2023 telah diatur dan ditetapkan melalui Surat Keputusan Pemegang Saham No. SR-48/Wk.2MBU.E/08/2022 tentang Penetapan Penghasilan Direksi dan Dewan Komisaris PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) tahun 2023. Remunerasi yang diterima oleh masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris adalah sebagai berikut:

AMOUNT OF REMUNERATION FOR THE BOARDS OF COMMISSIONERS AND DIRECTORS

Remuneration for the Company's Boards of Commissioners and Directors in 2023 has been regulated and determined through Shareholder Decree No. SR-48/Wk.2MBU.E/08/2022 concerning Stipulation of Remuneration for the Board of Directors and Board of Commissioners of PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) in 2023. The remuneration received by each member of the Boards are as follows:

Tabel Rincian Remunerasi Anggota Dewan Komisaris

Table of Remuneration Details for Members of the Board of Commissioners

Nama Komisaris Name of Commissioner	Jabatan Position	Gaji Salary	Tunjangan Benefit			Fasilitas Facility			
			Tunjangan Hari Raya Religious Holiday Allowance	Tunjangan Perumahan Housing Allowance	Asuransi Purna Jabatan Retirement Insurance	Kendaraan Vehicle	Kesehatan Healthcare	Bantuan Hukum Legal Aid	Tantiem/ Insentif Kerja Tantiem/ Performance Incentives
Saiful Haq Manan	Komisaris Utama President Commissioner	√	√	√	√	√	√	√	√
Hendar Ristriawan	Komisaris Independen Independent Commissioner	√	√	√	√	√	√	√	√
Iwan Hari Sugianto	Komisaris Independen Independent Commissioner	√	√	√	√	√	√	√	√
Susi Meyrista Tarigan	Komisaris Commissioner	√	√	√	√	√	√	√	√
Edmil Nurjamil	Komisaris Commissioner	√	√	√	√	√	√	√	√
Budi Setiyadi	Komisaris Commissioner	√	√	√	√	√	√	√	√

Tabel Rincian Remunerasi Anggota Direksi

Table of Remuneration Details for Members of the Board of Directors

Nama Komisaris Name of Commissioner	Jabatan Position	Gaji Salary	Tunjangan Hari Raya Religious Holiday Allowance	Tunjangan Benefit		Asuransi Purna Jabatan Retirement Insurance	Fasilitas Facilities		
				Tunjangan Perumahan Housing Allowance			Kesehatan Healthcare	Bantuan Hukum Legal Aid	Tantiem/ Insentif Kerja Tantiem/ Performance Incentives
Ira Puspawati	Direktur Utama President Director	√	√	√		√	√	√	√
M. Yusuf Hadi	Direktur Komersial dan Pelayanan Commercial and Services Director	√	√	√		√	√	√	√
Djunia Satriawan	Direktur Keuangan, Teknologi Informasi dan Manajemen Risiko Finance, IT & Risk Management Director	√	√	√		√	√	√	√
Kusnadi C. Wijaya	Direktur Teknik dan Fasilitas Engineering and Facilities Director	√	√	√		√	√	√	√
Harry Muhammad Adhi Caksono	Direktur Perencanaan dan Pengembangan Planning and Development Director	√	√	√		√	√	√	√
Wahyu Wibowo	Direktur SDM dan Layanan Korporasi HR and Corporate Services Director	√	√	√		√	√	√	√

BONUS NON KINERJA DAN OPSI SAHAM

Sepanjang tahun 2023, Perusahaan tidak menyediakan bonus tanpa korelasi langsung terhadap kontribusi kinerjanya di lingkungan Perusahaan. Di sisi lain, Perusahaan juga tidak mengimplementasikan skema opsi saham bagi Dewan Komisaris maupun Direksi.

Insentif Jangka Panjang

Sepanjang tahun 2023, Perusahaan tidak menyediakan insentif jangka panjang bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi baik dalam bentuk insentif finansial maupun non-finansial.

NON-PERFORMANCE BONUSES AND STOCK OPTIONS

Throughout 2023, the Company did not provide bonuses without a direct correlation to performance contribution to the Company. On the other hand, the Company also did not implement a share option scheme for the Boards of Commissioners or Directors.

Long-Term Incentives

Throughout 2023, the Company did not provide long-term incentives for members of the Boards of Commissioners and Board of Directors, be it in the form of financial or non-financial incentives.

KEBIJAKAN KEPEMILIKAN SAHAM OLEH DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

SHARE OWNERSHIP POLICY BY THE BOARDS OF COMMISSIONERS AND DIRECTORS

PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) adalah BUMN berstatus perusahaan tertutup yang kepemilikan sahamnya sepenuhnya dimiliki oleh Negara Republik Indonesia, yang berarti tidak ada kepemilikan saham yang dimiliki oleh anggota Dewan Komisaris maupun Direksi.

PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) is a State-Owned Enterprise with a closed company status, whose share ownership is owned fully by the Republic of Indonesia, thus there is no share owned by members of the Boards of Commissioners or Directors.

KEBIJAKAN KEBERAGAMAN KOMPOSISI DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

POLICY ON DIVERSITY COMPOSITION OF THE BOARDS OF COMMISSIONERS AND DIRECTORS

Kebijakan mengenai keberagaman dalam komposisi Dewan Komisaris dan Direksi Perusahaan mengacu pada ketentuan yang ditetapkan oleh Pemegang Saham serta peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kebijakan ini mempertimbangkan berbagai aspek keberagaman, seperti jenis kelamin, usia, tingkat pendidikan, dan rentang pengalaman kerja. Pada tahun 2023, komposisi Dewan Komisaris dan Direksi Perusahaan tercermin sebagai berikut:

The policy on diversity in the composition of the Company's Boards of Commissioners and Board of Directors refers to provisions stipulated by Shareholders and applicable laws and regulations. This policy considers various aspects of diversity, such as gender, age, education level and range of work experience. In 2023, the composition of the Company's Boards of Commissioners and Board of Directors is reflected as follows:

Keberagaman Komposisi Dewan Komisaris

Diverse of the Composition of the Board of Commissioners

Nama Name	Jabatan Position	Usia Age	Jenis Kelamin Gender	Pendidikan Education	Pengalaman Kerja Work Experience	Keahlian Expertise
Saiful Haq Manan	Komisaris Independent Commissioner	66 Tahun Years Old	Laki-Laki Male	- Master of Business Administration, University of Denver (1984-1986) - Bachelor of Science in Business Administration, University of Denver (1981-1984) - Bachelor of Arts, Schiller University (1980-1981)	Memiliki pengalaman lebih dari 40 tahun di bidang keuangan, business advisory dan perpajakan. Has more than 40 years experience in finance, business advisory, and taxation.	Corporate Finance, Corporate Restructuring, Financial Restructuring, Strategic Planning, Taxation.
Hendar Ristriawan	Komisaris Independent Commissioner	65 Tahun Years Old	Laki-Laki Male	- S-1 Universitas Indonesia, Ilmu Hukum (1979-1984) - Bachelor of Law, University of Indonesia (1979-1984) - S-2 Universitas Krisnadwipayana, Ilmu Hukum (2009) - Master of Law, Krisnadwipayana University (2009) - S-3 Universitas Padjadjaran, Ilmu Hukum (2017) - Doctoral in Law, Padjadjaran University (2017)	Memiliki pengalaman lebih dari 30 tahun di bidang akuntansi dan hukum. Has more than 30 years experience in accounting and law.	Audit, State Treasury Law, Politics in Indonesia, and Public Policy.
Edmil Nurjamil	Komisaris Commissioner	56 Tahun Years Old	Laki-Laki Male	- Program Doktor/S3 Universitas Trisakti Ilmu Ekonomi (2022) - Doctor of Economics, Trisakti University (2022) - Pasca Sarjana/S2 STIE-ISM Tangerang Manajemen (2015) - Master of Management, STIE-ISM Tangerang (2015) - Sarjana/S1 STIE PBM Manajemen (2012) - Bachelor of Management, STIE PBM College (2012)	Memiliki pengalaman lebih dari 15 tahun di bidang pertahanan nasional dan sumber daya manusia Has more than 15 years experience in national defense and human resources.	National Defense, Military and Intelligence, Economics, and Human Resources.
Iwan Hari Sugiarto	Komisaris Independent Commissioner	63 Tahun Years Old	Laki-Laki Male	- SESPATI 1 (2009) - School of Staff and Higher Leadership 1 (2009) - SESPIMPOL (1999) - Staff and Leadership Training Institute of Indonesian Police (1999) - PTIK (1992) - Indonesian Police College (1992) - AKABRI Kepolisian (1985) - Indonesian Armed Forces Police Academy (1985)	Memiliki pengalaman lebih dari 35 tahun di bidang pertahanan nasional dan kebijakan publik. Has more than 35 years experience in national defense and public policy.	National Defense, Public Policy, Law in Indonesia, and Drug-related Investigation.
Susi Meyrista Tarigan	Komisaris Commissioner	47 Tahun Years Old	Perempuan Female	- Magister Akuntansi di Universitas Indonesia (2008) - Master of Accounting, University of Indonesia (2008) - Sarjana Akuntansi di Universitas Indonesia (2001) - Bachelor of Accounting, University of Indonesia (2001) - D3 Akuntansi di STAN (1997) - Diploma 3 in Accounting, STAN (1997)	Memiliki pengalaman lebih dari 20 tahun di bidang perencanaan dan sistem informasi. Has more than 20 years experience in planning and information system.	Accounting, Trade Planning, Strategic Planning, and Information System.
Budi Setiyadi	Komisaris Commissioner	61 Tahun Years Old	Laki-Laki Male	- Magister di UNTAG Surabaya - Master's Degree, 17 Agustus 1945 University, Surabaya - Sarjana di UNSWAGATI Cirebon - Bachelor's Degree, Swadaya Gunung Jati University, Cirebon	Memiliki pengalaman lebih dari 10 tahun di bidang kebijakan publik, transportasi darat, dan sumber daya manusia. Has more than 10 years experience in public policy, land transportation, and HR.	Public Policy, Land Transportation, Human Resources, and National Defense.

Keberagaman Komposisi Direksi

Diverse Composition of the Board of Directors

Nama Name	Jabatan Position	Usia Age	Jenis Kelamin Gender	Pendidikan Education	Pengalaman Kerja Work Experience	Keahlian Expertise
Ira Puspawati	Direktur Utama President Director	56 Tahun Years Old	Perempuan Female	- Doktor Manajemen Strategik di Universitas Indonesia Doctorate in Strategic Management, University of Indonesia - Magister Manajemen Pembangunan di Asian Institute of Management Master of Development Management, Asian Institute of Management - Sarjana Sosial Ekonomi Peternakan dari Universitas Brawijaya Bachelor of Social Economics in Animal Husbandry, Brawijaya University	Memiliki pengalaman kerja lebih dari 15 tahun di bidang sumber daya manusia dan perencanaan strategis. Has more than 15 years experience in HR and strategic planning.	Global Retail Operations, Human Resources, Strategic Planning, and International Trade.
Muhammad Yusuf Hadi	Direktur Komersial dan Pelayanan Commercial and Services Director	55 Tahun Years Old	Laki-Laki Male	Sarjana Ilmu Manajemen di Universitas Muhammadiyah Kupang, Nusa Tenggara Timur Bachelor of Management Science, Muhammadiyah Kupang University, East Nusa Tenggara	Memiliki pengalaman kerja lebih dari 12 tahun di bidang transportasi laut dan komersial. Has more than 12 years experience in maritime and commercial transportation.	Sea Transportation, Port and Ferry Management, Commercial in Transportation, and Customer Service
Djunia Satriawan	Direktur Keuangan, Teknologi Informasi, dan Manajemen Risiko Finance, IT & Risk Management Director	59 Tahun Years Old	Laki-Laki Male	Sarjana Ekonomi di Universitas Padjadjaran Bachelor of Economics, Padjadjaran University	Memiliki pengalaman lebih dari 15 tahun di bidang audit, keuangan, dan teknologi. Has more than 15 years experience in audit, finance and technology.	Audit, Compliance, Procurement, Finance, Technology, and Risk Management in Finance
Kusnadi C. Wijaya	Direktur Teknik dan Fasilitas Engineering and Facilities Director	45 Tahun Years Old	Laki-Laki Male	- Magister Akuntansi Sektor Publik di Universitas Padjadjaran Master of Accounting in Public Sector, Padjadjaran - Sarjana Akuntansi di Universitas Padjadjaran Bachelor of Accounting, Padjadjaran University	Memiliki pengalaman lebih dari 20 tahun di bidang audit dan operasional pelabuhan dan penyeberangan. Has more than 20 years experience in port and ferry auditing and operations.	Planning and Development
Harry Muhammad Adhi Caksono	Direktur Perencanaan dan Pengembangan Planning and Development Director	44 Tahun Years Old	Laki-Laki Male	- Magister MBA di Institut Teknologi Bandung Master of Business Administration, Bandung Institute of Technology - Sarjana Teknik Gas Petrokimia di Universitas Indonesia Bachelor of Petrochemical Engineering, University of Indonesia	Memiliki pengalaman lebih dari 20 tahun di bidang perencanaan strategis dan pariwisata. Has more than 20 years experience in strategic planning and tourism.	Business Administration, Strategic Planning, Corporate Transformation, and Tourism.
Wahyu Wibowo	Direktur SDM dan Layanan Korporasi HR and Corporate Services Director	52 Tahun Years Old	Laki-Laki Male	- Magister Manajemen Keuangan di Universitas Bhayangkara Master of Financial Management, Bhayangkara University - Sarjana Teknik Mesin di Institut Teknologi Nasional Malang Bachelor of Mechanical Engineering, National Institute of Technology Malang	Memiliki pengalaman lebih dari 25 tahun di bidang sumber daya manusia, pariwisata, dan transportasi. Has more than 25 years of experience in HR, tourism, and transportation	Human Resources Management, Corporate Law, Tourism, Infrastructure and Logistics, and Transportations.

ORGAN PENDUKUNG DEWAN KOMISARIS

SUPPORTING ORGANS OF THE BOARD OF COMMISSIONERS

Dalam menjalankan fungsi dan perannya, Dewan Komisaris didukung oleh organ pendukung Dewan Komisaris sesuai dengan Peraturan Menteri BUMN No. PER-2/MBU/03/2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara dan PER-3/MBU/03/2023 tentang Organ dan Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara. Organ pendukung Dewan Komisaris terdiri dari Komite Audit, Komite Nominasi dan Remunerasi, Komite Pemantau Risiko, dan Sekretaris Dewan Komisaris.

In fulfilling their positions and roles, the Board of Commissioners is supported by supporting organs in accordance with the Regulation of the Minister of SOEs No. PER-2/MBU/03/2023 concerning Guidelines for Governance and Significant Corporate Activities of State-Owned Enterprises and PER-3/MBU/03/2023 concerning Organs and Human Resources of State-Owned Enterprises. The supporting organs of the Board of Commissioners consist of the Audit Committee, Nomination and Remuneration Committee, Risk Oversight Committee, and Secretary to the Board of Commissioners.

KOMITE AUDIT

Komite Audit merupakan organ perusahaan yang dibentuk oleh Dewan Komisaris yang memiliki fungsi utama untuk membantu Dewan Komisaris dalam menjalankan fungsi pengawasan pada hal-hal yang terkait dengan kualitas laporan keuangan, memastikan efektivitas sistem pengendalian internal, pelaksanaan fungsi audit internal dan eksternal serta memastikan implementasi tata kelola dan kepatuhan Perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.

AUDIT COMMITTEE

The Audit Committee is a company organ formed by the Board of Commissioners that functions primarily to assist the Board of Commissioners in supervisory function on matters related to the quality of financial reports, ensuring the effectiveness of the internal control system, implementing internal and external audit functions as well as ensuring the Company's governance and compliance with applicable laws and regulations.

Dasar Pembentukan Komite Audit

Pembentukan Komite Audit didasarkan pada peraturan-peraturan sebagai berikut:

1. Peraturan Menteri BUMN No. PER-2/MBU/03/2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara;
2. Peraturan Menteri BUMN No. PER-3/MBU/03/2023 tentang Organ dan Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara;
3. Anggaran Dasar PT ASDP Indonesia Ferry (Persero);
4. Surat Keputusan Dewan Komisaris No. 09/KOM/VI/2020 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota-anggota Komite Audit.

Pedoman Kerja Komite Audit

Dalam menjalankan fungsi dan tanggung jawabnya, Komite Audit memiliki pedoman kerja melalui Piagam Komite Audit (*Audit Committee Charter*). Piagam Komite Audit telah ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris No. SK.06/KOM/XII/2022 tentang Piagam Komite Audit Perseroan. Untuk memastikan keakuratan, relevansi, dan kesesuaian dengan perkembangan kebutuhan serta kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku, Komite Audit secara berkala melakukan evaluasi menyeluruh terhadap isi dan substansi dari Piagam tersebut. Secara umum, Piagam Komite Audit Perusahaan memuat mengenai:

1. Tugas, Tanggung Jawab, serta Wewenang;
2. Komposisi, Struktur, dan Persyaratan Keanggotaan;
3. Tata Cara dan Prosedur Kerja;
4. Kebijakan Penyelenggaraan Rapat;
5. Sistem Pelaporan;
6. Penanganan Pengaduan;
7. Masa Tugas;
8. Kode Etik Komite Audit.

Tugas dan Tanggung Jawab Komite Audit

Komite Audit berperan sebagai mitra kerja Dewan Komisaris dalam menjalankan fungsi pengawasan dan pemeriksaan yang lebih mendalam terhadap berbagai aspek Perusahaan sesuai cakupan tanggung jawab Komite Audit. Berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris No. SK.06/KOM/XII/2022 tentang Piagam Komite Audit Perseroan, Komite Audit memiliki tugas pokok sebagai berikut:

Basis for Formation of the Audit Committee

The formation of the Audit Committee is based on the following regulations:

1. Regulation of Minister of SOEs No. PER-2/MBU/03/2023 concerning Guidelines for Governance and Significant Corporate Activities of State-Owned Enterprises;
2. Regulation of Minister of SOEs No. PER-3/MBU/03/2023 concerning Organs and Human Resources of State-Owned Enterprises;
3. Articles of Association of PT ASDP Indonesia Ferry (Persero);
4. Decree of the Board of Commissioners No. 09/KOM/VI/2020 on Appointment and Discharge of Audit Committee Members.

Audit Committee Charter

In carrying out their functions and responsibilities, the Audit Committee adheres to the Audit Committee Charter. The Audit Committee Charter was established under the Decree of the Board of Commissioners No. SK.06/KOM/XII/2022 concerning the Company Audit Committee Charter. To ensure accuracy, relevance and suitability to growing requirements and compliance with applicable regulations, the Audit Committee regularly evaluate the content and essence of the Charter comprehensively. In general, the Company's Audit Committee Charter contains:

1. Duties, Responsibilities and Authorities;
2. Composition, Structure, and Requirements of the Member;
3. Work Procedures;
4. Policy on Organizing Meeting;
5. Reporting System;
6. Complaint Handling;
7. Term of Service;
8. Audit Committee Code of Conduct.

Duties and Responsibilities of the Audit Committee

The Audit Committee's role as partner to the Board of Commissioners is to conduct in-depth oversight and audit functions on various aspects of the Company according to the scope of the Audit Committee's responsibilities. Based on the Decree of the Board of Commissioners No. SK.06/KOM/XII/2022 concerning the Company's Audit Committee Charter, the Audit Committee has the following main duties:

1. Melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan Perusahaan kepada publik atau pihak otoritas antara lain laporan keuangan, proyeksi, dan laporan lainnya terkait dengan informasi keuangan Perusahaan;
2. Melakukan penelaahan atas ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan kegiatan Perusahaan;
3. Memberikan pendapat independen dalam hal terjadi perbedaan pendapat antara manajemen dan akuntan publik atas jasa yang diberikan;
4. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai penunjukan akuntan yang didasarkan pada independensi, ruang lingkup penugasan, dan imbalan jasa;
5. Melakukan penelaahan atas pemeriksaan oleh auditor internal dan mengawasi pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas temuan auditor internal;
6. Menelaah pengaduan yang berkaitan dengan proses akuntansi dan pelaporan keuangan Perusahaan;
7. Menelaah dan memberikan saran kepada Dewan Komisaris terkait adanya potensi benturan kepentingan Perusahaan;
8. Menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi Perusahaan.

Wewenang Komite Audit

Dalam melaksanakan tugasnya, Komite Audit mempunyai wewenang dan mekanisme kerja sebagai berikut:

1. Akses kepada dokumentasi, data, serta informasi terkait karyawan, dana, aset, dan sumber daya perusahaan yang diperlukan menjadi bagian esensial dari tanggung jawab Komite Audit untuk memperoleh pemahaman yang mendalam mengenai berbagai aspek operasional Perusahaan. Dalam rangka memastikan ketaatan dan transparansi, akses terhadap informasi tersebut menjadi landasan bagi penilaian terhadap kinerja dan kepatuhan Perusahaan terhadap kebijakan internal dan peraturan eksternal yang berlaku;
2. Komunikasi langsung yang terjalin antara anggota Komite Audit dengan karyawan, termasuk Direksi, serta pihak yang mengurus fungsi audit internal, manajemen risiko, dan

1. Review the financial information that the Company will release to the public or authorities, including financial reports, projections, and other reports related to the Company's financial information;
2. Review compliance with laws and regulations relating to the Company's activities;
3. Provide independent opinions in the event of differing opinions between management and public accountant regarding the services provided;
4. Provide recommendations to the Board of Commissioners in appointing accountants requiring their independence, scope of assignment and compensation for services;
5. Review audits by internal auditors and supervise the implementation of follow-up actions by the Board of Directors related to the internal auditor's findings;
6. Review complaints related to the Company's accounting and financial reporting processes;
7. Review and advise the Board of Commissioners on the Company's potential conflicts of interest;
8. Maintain the confidentiality of Company's documents, data and information.

Authority of the Audit Committee

In carrying out their duties, the Audit Committee has the following authorities and work mechanisms:

1. Receiving access to necessary documentation, data and information on employees, funds, assets and Company resources is an essential part of the Audit Committee's responsibility to gain an in-depth understanding on various aspects of the Company's operations. To ensure compliance and transparency, getting access to these information serves as the basis for assessing the Company's performance as well as compliance with internal policies and applicable external regulations;
2. Direct communication between Audit Committee members and employees, including the Directors, as well as units in charge of internal audit, risk

bidang akuntansi, menjadi sarana utama dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab komite. Interaksi ini tidak hanya membantu dalam pemahaman mendalam terhadap proses internal Perusahaan, tetapi juga memfasilitasi pertukaran informasi yang diperlukan untuk mengevaluasi dan meningkatkan efektivitas sistem pengendalian internal serta proses audit;

3. Keterlibatan pihak independen di luar anggota Komite Audit dapat menjadi langkah yang diambil apabila diperlukan dalam mendukung pelaksanaan tugas komite. Pihak independen ini memberikan perspektif objektif dan bantuan yang diperlukan dalam menjalankan evaluasi mendalam terhadap aspek-aspek tertentu, memastikan bahwa proses pengawasan dilakukan dengan independen dan sesuai dengan standar yang berlaku;
4. Selain tugas-tugas yang telah diuraikan, Komite Audit juga menjalankan kewenangan lain yang diberikan oleh Dewan Komisaris, yang dapat meliputi berbagai aspek pengawasan, evaluasi, dan kepatuhan Perusahaan terhadap kebijakan dan regulasi yang berlaku, dengan tujuan untuk memastikan bahwa operasional Perusahaan berjalan sesuai dengan standar yang ditetapkan.

Pelaksanaan Tugas Komite Audit

Sepanjang tahun 2023, Komite Audit telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dalam mendukung tugas Dewan Komisaris sesuai dengan Piagam Komite Audit. Realisasi program kerja Komite Audit sepanjang tahun 2023 dilaporkan kepada Dewan Komisaris dengan pokok-pokok realisasi program kerja tahunan sebagai berikut:

1. Evaluasi atas pelaporan keuangan perusahaan;
2. Penilaian sistem pengendalian internal serta kepatuhan pada peraturan yang berlaku;
3. Penilaian audit internal;
4. Seleksi auditor eksternal;
5. Penilaian audit eksternal;
6. Penilaian terhadap prosedur yang dilaksanakan manajemen dalam menyampaikan informasi keuangan dan atau kebijakan;
7. Evaluasi temuan audit yang belum

management and accounting, is the primary mechanism towards fulfilling the committee's duties and responsibilities. The interaction helps to gain deeper understanding of the Company's internal processes, and to facilitates necessary information exchange to evaluate and improve the effectiveness of the internal control system and audit process;

3. Getting independent parties outside the Audit Committee members involved may be the necessary step to support the committee's duties. The independent party shall provide objective perspectives and necessary assistance to carry out in-depth evaluations of certain aspects, whilst ensuring that the monitoring process is carried out independently and in accordance with applicable standards;
4. In addition to the tasks outlined above, the Audit Committee is also granted other authorities by the Board of Commissioners, which may include various aspects of oversight, evaluation and Company's compliance with applicable policies and regulations, which aimed to ensure that the Company's operations run in accordance with established standards.

Implementation of Audit Committee Duties

Throughout 2023, the Audit Committee has performed their duties and responsibilities in supporting the Board of Commissioners according to the Audit Committee Charter. The Audit Committee's work program throughout 2023 is reported to the Board of Commissioners, with accomplished items of the annual work program as follows:

1. Evaluation of company financial reports;
2. Assessment of the internal control system and compliance with applicable regulations;
3. Assessment of internal audit;
4. Selection of external auditors;
5. Assessment of external audit;
6. Assessment of the procedures implemented by management in conveying financial information and/or policies;
7. Evaluation of audit findings that have not

ditindaklanjuti;

8. Identifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian Dewan Komisaris;
9. Pemantauan tindak lanjut saran/rekomendasi serta masukan-masukan Dewan Komisaris kepada Direksi.

Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Komite Audit

Pengangkatan dan pemberhentian anggota Komite Audit di Perusahaan mengacu pada Peraturan Menteri BUMN No. PER-3/MBU/03/2023 tentang Organ dan Sumber Daya Manusia BUMN. Penunjukan dan pemberhentian anggota komite menjadi wewenang Dewan Komisaris, yang kemudian dilaporkan kepada RUPS.

Masa jabatan bagi anggota Komite Audit ditetapkan paling lama selama 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk paling lama 2 (dua) tahun, dengan tidak mengurangi hak Dewan Komisaris untuk memberhentikan anggota tersebut sewaktu-waktu.

Susunan dan Komposisi Komite Audit

Pada tahun 2023, komposisi Komite Audit terdiri dari 4 (empat) orang yang terdiri dari 1 (satu) Ketua Komite Audit dan 3 (tiga) orang anggota Komite Audit. Ketua Komite Audit wajib merupakan anggota Dewan Komisaris Independen atau anggota Dewan Komisaris yang dapat bertindak independen. Sedangkan untuk anggota Komite Audit dapat dijabat oleh anggota Dewan Komisaris atau dari luar Perusahaan.

Susunan dan komposisi Komite Audit tahun 2023 mengacu pada Surat Keputusan Dewan Komisaris No. 09/KOM/VI/2020 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota-Anggota Komite Audit dengan susunan sebagai berikut:

been followed up;

8. Identification of issues requiring attention from the Board of Commissioners;
9. Oversight of the follow-up to recommendations and inputs from the Board of Commissioners to the Board of Directors.

Appointment and Discharge of Audit Committee Members

The appointment and discharge of Audit Committee members in the Company refers to the Regulation of Minister of SOEs No. PER-3/MBU/03/2023 concerning Organs and Human Resources of SOEs. Appointing and discharging members of Committee is the Board of Commissioners' authority, followed by report to the GMS.

The term of office for Audit Committee members is set for a maximum of 3 (three) years and can be reappointed for a maximum of 2 (two) years, without prejudice to the rights of the Board of Commissioners to discharge the member at any given time.

Structure and Composition of the Audit Committee

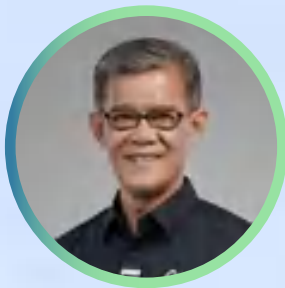
In 2023, the composition of the Audit Committee was 4 (four) people, composed of 1 (one) Chairperson and 3 (three) members. The Chairperson of the Audit Committee must be an independent member of the Board, or a member of the Board of Commissioners who can act independently. Meanwhile, members of the Audit Committee can be assumed by members of the Board of Commissioners or from outside the Company.

The structure and composition of the Audit Committee in 2023 referred to the Decree of the Board of Commissioners No. 09/KOM/VI/2020 on Appointment and Discharge of Audit Committee Members, with the following composition:

Nama Name	Jabatan Position	Keahlian Expertise	Periode Jabatan Term of Office
Hendar Ristriawan	Ketua (Komisaris Independen) Chairperson (Independent Commissioner)	Hukum dan Keuangan Law and Finance	Agustus 2018-sekarang August 2018-present
Edmil Nurjamil	Wakil Ketua (Komisaris) Deputy Chairperson (Commissioner)	Manajemen Keuangan Financial management	April 2020-sekarang April 2020-present
Triandi	Anggota (Pihak Independen) Member (Independent)	Akuntansi <i>Auditing</i> Audit Accounting	Januari 2020-sekarang January 2020-present
Made Sumadi Arta	Anggota (Pihak Independen) Member (Independent)	Akuntansi Manajemen Keuangan Financial Management Accounting	Juni 2020-sekarang June 2020-present

PROFIL ANGGOTA KOMITE AUDIT

PROFILE OF AUDIT COMMITTEE MEMBERS



Nama
Name

Hendar Ristriawan

Jabatan
Position

Ketua Komite Audit | Chairperson of
the Audit Committee

Profil dapat dilihat pada bagian Profil Dewan Komisaris.
*The profile is available in the Profile of the Board of
Commissioners section.*



Nama
Name

Edmil Nurjamil

Jabatan
Position

Wakil Ketua Komite Audit | Deputy
Chairperson of the Audit Committee

Profil dapat dilihat pada bagian Profil Dewan Komisaris.
*The profile is available in the Profile of the Board of
Commissioners section.*



Nama <i>Name</i>	Triandi
Jabatan <i>Position</i>	Anggota Komite Audit Member of the Audit Committee
Usia <i>Age</i>	62 Tahun Years Old
Kewarganegaraan <i>Nationality</i>	Indonesia
Domisili <i>Domicile</i>	Bogor
Pendidikan <i>Educational</i>	- Magister Akuntansi di Universitas Pancasila (2015) Master of Accounting at Pancasila University (2015) - Diploma IV Akuntansi di STAN (1991) Diploma IV in Accounting at STAN (1991)
Riwayat Pekerjaan <i>Work Experience</i>	- Anggota Komite Audit, PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) (2020-sekarang) Member of the Audit Committee, PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) (2020-present) - Anggota Komite Audit, PT Surveyor Indonesia (Persero) (2014-2019) Member of the Audit Committee, PT Surveyor Indonesia (Persero) (2014-2019) - Anggota Komite Audit, PT Dahana (Persero) (2009-2014) Member of the Audit Committee, PT Dahana (Persero) (2009-2014) - Dosen, Institut Bisnis dan Informatika Kesatuan Bogor (1996-sekarang) Lecturer, Kesatuan Institute of Business and Informatics, Bogor (1996-present) - Internal Auditor, Yayasan Kesatuan (2006-2017) Internal Auditor, Kesatuan Foundation (2006-2017) - Auditor, Kantor Akuntan Publik (2001-2010) Auditor, Public Accounting Firms (2001-2010) - Auditor Pemerintah (1985-2000) Auditor for Government (1985-2000)
Dasar Hukum Pengangkatan <i>Legal Basis for Appointment</i>	Keputusan Dewan Komisaris No. 03/KOM/I/2023 tanggal 20 Januari 2023 Decree of the Board of Commissioners No. 03/KOM/I/2020 dated 20 January 2023
Periode Jabatan <i>Term in Office</i>	20 Januari 2023 - sekarang 20 January 2023 - present



Nama <i>Name</i>	Made Sumadi Arta
Jabatan <i>Position</i>	Anggota Komite Audit <i>Member of the Audit Committee</i>
Usia <i>Age</i>	63 Tahun <i>Years Old</i>
Kewarganegaraan <i>Nationality</i>	Indonesia
Domisili <i>Domicile</i>	Jakarta
Pendidikan <i>Educational</i>	• Magister Manajemen di STIE IBII (1997) • <i>Diploma on Governmental Audit</i> di Modbury College of TAFE (1993) • Diploma III dan Diploma IV di STAN (1989)
Riwayat Pekerjaan <i>Work Experience</i>	• Anggota Komite Audit, PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) (2020-sekarang) <i>Member of the Audit Committee, PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) (2020-present)</i> • <i>Unit Head s/d General Manager Internal Audit</i> PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero) (2004-2017) <i>Unit Head to General Manager Internal Audit, PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero) (2004-2017)</i> • <i>Senior Manager s/d Assistant Vice President Internal Audit & Risk Management</i> Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) (1999-2004) <i>Senior Manager to Assistant Vice President Internal Audit & Risk Management National Banking Restructuring Agency (BPPN) (1999-2004)</i> • Ketua Tim s/d Pengawas, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (1989-1998) <i>Team Leader to Supervisor, Financial and Development Supervisory Agency (1989-1998)</i> • <i>Team Leader General Audit</i> perusahaan publik, Kantor Akuntan Publik Paul Lembong & Co (1987-1989) <i>Team Leader General Audit of public companies, Paul Lembong & Co Public Accounting Firm (1987-1989)</i>
Dasar Hukum Pengangkatan <i>Legal Basis for Appointment</i>	Keputusan Dewan Komisaris No. 04/KOM/VI/2023 tanggal 23 Juni 2023 <i>Decree of the Board of Commissioners No. 04/KOM/VI/2023 dated 23 June 2023</i>
Periode Jabatan <i>Term in Office</i>	3 (tiga) tahun <i>3 (three) years</i>

Independensi Anggota Komite Audit

Seluruh anggota Komite Audit Perusahaan menyatakan independensinya untuk bekerja secara independen, profesional dan objektif serta terbebas dari intervensi atau hal-hal yang berpotensi menimbulkan benturan kepentingan. Untuk itu, Perusahaan memastikan independensi anggota Komite Audit sesuai dengan kriteria independensi yang telah ditentukan.

Independency of Audit Committee Members

Every member of the Company's Audit Committee must declare their independence, professionalism and objectivity and are free from intervention or any potential of conflict of interest. Thus, the Company ensures the independence of Audit Committee members has been in accordance with the specified criteria of independence.

Kriteria Independensi <i>Criteria of Independence</i>	Hendar Ristriawan	Edmil Nurjamil	Triandi	Made Sumadi Arta
Tidak memiliki hubungan keuangan dengan Dewan Komisaris dan Direksi <i>Not having any financial relationship with the Boards of Commissioners and Directors</i>	√	√	√	√
Tidak memiliki hubungan kepengurusan di Perusahaan, entitas anak, maupun perusahaan afiliasi. <i>Not associated in management of the Company, subsidiaries, or affiliated companies</i>	√	√	√	√
Tidak memiliki hubungan kepemilikan saham di Perusahaan <i>Not having any share ownership in the Company</i>	√	√	√	√
Tidak memiliki hubungan keluarga dengan Dewan Komisaris, Direksi dan/atau sesama anggota Komite Audit <i>Not having familial relationship with the Board of Commissioners, Directors and/or members of the Audit Committee</i>	√	√	√	√
Tidak menjabat sebagai pengurus partai politik dan pejabat pemerintah daerah <i>Not serving in administration of any political party or is an official of regional government</i>	√	√	√	√

Program Pengembangan Kompetensi Komite Audit

Pada tahun 2023, pelatihan komite audit dilakukan oleh Sdr. Triandi dan Sdr. Made Sumadi Arta dengan rincian sebagai berikut

Competency Development Program for Audit Committee

In 2023, training for audit committee were conducted for Triandi and Made Sumadi Arta with the following details:

Nama Anggota Komite Audit <i>Audit Committee Member</i>	Nama Pelatihan <i>Training</i>	Lembaga Penyelenggara <i>Organizing Institution</i>	Waktu Pelaksanaan <i>Date</i>	Lokasi <i>Location</i>
	<i>Certification in Audit Committee Practices</i> <i>Certification in Audit Committee Practices</i>	Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) Institute of Indonesia Chartered Accountants	28 Juli 2023 28 July 2023	Online Online
	BLMI GRC Masterclass – Pre IPO dan Post IPO BLMI GRC Masterclass – Pre IPO and Post IPO	BUMN Leadership & Management Institute SOEs Leadership & Management Institute	10 Agustus 2023 10 August 2023	Online Online
Sdr. Triandi	BLM GRC Masterclass - Peningkatan dan Penerbitan Efek Bersifat Utang & Sukuk (EBUS)	BUMN Leadership & Management Institute SOEs Leadership & Management Institute	10 Agustus 2023 10 August 2023	Online Online
Sdr. Made Sumadi Arta	BLMI GRC Masterclass - Rating and Issuance of Debt and Sukuk Securities			
	<i>In-House Training & Certification QRG (Qualified Risk Governance Professional)</i> <i>In-House Training & Certification QRG (Qualified Risk Governance Professional)</i>	Lembaga Sertifikasi Profesi Mitra Kalyana Sejahtera LSP MKS Mitra Kalyana Sejahtera Profession Certification Institute	6-7 September 2023 6-7 September 2023	Online Online

Penilaian dan Evaluasi Kinerja Komite Audit

Penilaian dan evaluasi kinerja Komite Audit menjadi kewenangan Dewan Komisaris yang dilakukan sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun sekali, mengacu pada Kinerja Komite Audit secara kolektif dan kinerja masing-masing anggota Komite Audit.

Penilaian dan evaluasi didasarkan pada kriteria berupa pencapaian target pelaksanaan tugas yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Tahunan Komite Audit. Hasil penilaian tersebut menjadi bahan pertimbangan bagi Dewan Komisaris untuk mengangkat kembali dan/atau memberhentikan anggota Komite Audit untuk periode jabatan berikutnya.

KOMITE NOMINASI DAN REMUNERASI

Komite Nominasi dan Remunerasi merupakan organ pendukung yang dibentuk dan bertanggung jawab secara langsung kepada Dewan Komisaris. Komite Nominasi dan Remunerasi memiliki tugas dan tanggung jawab untuk mendukung Dewan Komisaris dalam melakukan pengawasan hal-hal yang terkait dengan pengelolaan sumber daya manusia di Perusahaan terutama terkait nominasi dan remunerasi.

Performance Appraisal and Evaluation of Audit Committee

Performance appraisal and evaluation of the Audit Committee is the authority of the Board of Commissioners and is performed at minimum once annually, by referring to the Performance of the Audit Committee, both collectively and individually.

Appraisal and evaluation are based on criteria of achievement of task implementation target that was specified in the Audit Committee's Annual Work Plan. The appraisal result be reviewed by the Board of Commissioners in reappointing and/or dismissing members of the Audit Committee for the subsequent term of office.

NOMINATION AND REMUNERATION COMMITTEE

The Nomination and Remuneration Committee is a supporting organ that was formed and is directly responsible to the Board of Commissioners. Their duty and responsibility is to support the Board of Commissioners in supervising matters related to human resource management in the Company, especially on nomination and remuneration.

Pembentukan Komite Nominasi dan Remunerasi tidak hanya sebatas pada pemenuhan tugas, melainkan juga sebagai wujud dari transparansi dalam proses nominasi dan remunerasi. Tugasnya yang penting terletak pada kontribusi yang diberikannya dalam menilai serta memberikan masukan terhadap kebijakan dan strategi Perusahaan, khususnya terkait manajemen sumber daya manusia dalam konteks nominasi dan remunerasi.

Dasar Pembentukan Komite Nominasi dan Remunerasi

Pembentukan Komite Nominasi dan Remunerasi didasarkan pada peraturan-peraturan sebagai berikut:

1. Peraturan Menteri BUMN No. PER-12/MBU/2012 tanggal 24 Agustus 2012 tentang Organ Pendukung Dewan Komisaris/Dewan Pengawas BUMN yang diubah melalui Peraturan Menteri BUMN No. PER-14/MBU/10/2021 sebagaimana terakhir kali diubah dengan Peraturan Menteri BUMN No. PER-3/MBU/03/2023 tentang Organ dan Sumber Daya Manusia BUMN.
2. Peraturan Menteri BUMN No. PER-5/MBU/09/2022 tentang Penerapan Manajemen Risiko pada BUMN.
3. Anggaran Dasar PT ASDP Indonesia Ferry (Persero).
4. Surat Keputusan Dewan Komisaris No. 06/KOM/IV/2020 dan No. 11/KOM/X/2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota-Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi Perusahaan Perseroan (Persero) PT ASDP Indonesia Ferry.

Pedoman Kerja Komite Nominasi dan Remunerasi

Pelaksanaan tugas dari Komite Nominasi dan Remunerasi mengikuti pedoman yang dikenal sebagai Piagam Komite Nominasi dan Remunerasi, yang telah ditetapkan oleh Dewan Komisaris. Pada tahun 2022 lalu, Perusahaan melakukan penyesuaian Piagam Komite Nominasi dan Remunerasi untuk memastikan relevansi dengan kebijakan terkini dan dalam rangka rencana Initial *Public Offering*. Proses evaluasi ini merupakan bagian integral dari upaya mereka untuk memastikan bahwa pedoman yang dianut tetap responsif terhadap perubahan regulasi.

The Nomination and Remuneration Committee was not established for task puposes only, but also to substantiate transparency in the nomination and remuneration process. Their crucial duties is to contribute in assessing and providing input on Company policies and strategies, especially regarding human resource management in the context of nomination and remuneration.

Basis for Establishing the Nomination and Remuneration Committee

The formation of the Nomination and Remuneration Committee was based on the following regulations:

1. Regulation of Minister of SOEs No. PER-12/MBU/2012 dated 24 August 2012 concerning Supporting Organs for the Board of Commissioners/Supervisory Board of SOEs, amended to Regulation of Minister of SOEs No. PER-14/MBU/10/2021, which latest amendment was Regulation of Minister of SOEs No. PER-3/MBU/03/2023 on Organs and Human Resources in SOEs.
2. Regulation of Minister of SOEs No. PER-5/MBU/09/2022 on the Implementation of Risk Management in SOEs.
3. Articles of Association of PT ASDP Indonesia Ferry (Persero).
4. Decree of the Board of Commissioners No. 06/KOM/IV/2020 and No. 11/KOM/X/2020 on Discharge and Appointment of Members of the Nomination and Remuneration Committee of PT ASDP Indonesia Ferry (Persero).

Nomination and Remuneration Committee Charter

The Nomination and Remuneration Committee implements their duties in accordance with the Nomination and Remuneration Committee Charter, which have been approved by the Board of Commissioners. In 2022, the Company improved the Nomination and Remuneration Committee Charter to ensure relevance to current policies, along with plan of Initial Public Offering. The evaluation is integral in efforts to ensure that the charter stays relevant with regulatory changes.

Tugas dan Tanggung Jawab Komite Nominasi dan Remunerasi

Komite Nominasi dan Remunerasi memiliki peran sentral dalam mendukung Dewan Komisaris dengan analisis mendalam serta memberikan pandangan yang profesional dan independen terkait pengelolaan SDM terutama dalam aspek manajemen talenta termasuk nominasinya, pengelolaan remunerasi karyawan dan Direksi termasuk meninjau usulan remunerasi Direksi.

Komite Nominasi dan Remunerasi bertanggung jawab secara langsung kepada Dewan Komisaris, dengan setiap kewajiban yang diberikan didasarkan pada fungsi dan tugas pokok yang telah ditetapkan sesuai dengan aturan yang berlaku. Adapun tugas dan tanggung jawab Komite Nominasi dan Remunerasi meliputi:

1. Melakukan *review* secara berkala atas Sistem Pengelolaan Talenta (*Talent Management System*) Perusahaan serta *monitoring* dan evaluasi atas pelaksanaannya;
2. Melakukan evaluasi terhadap sistem dan prosedur Pengklasifikasian Talenta (*Talent Classification*) yang dilakukan oleh Direksi;
3. Melakukan validasi dan kalibrasi atas talenta yang diusulkan oleh Direksi kepada Dewan Komisaris/Dewan Pengawas (*Selected Talent*), untuk menghasilkan daftar talenta yang akan dinominasikan oleh Dewan Komisaris/Dewan Pengawas kepada RUPS/Menteri (*Nominated Talent*);
4. Melakukan evaluasi terhadap calon wakil Perusahaan yang akan diusulkan sebagai anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris perusahaan anak, sebelum diajukan kepada RUPS/Menteri;
5. Melakukan evaluasi atas usulan KPI individu anggota Direksi;
6. Menyiapkan usulan sistem evaluasi kinerja individu bagi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas;
7. Menyiapkan usulan program pengembangan bagi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas;
8. Melakukan evaluasi atas kebijakan remunerasi bagi pegawai yang membutuhkan persetujuan/tanggapan dari Dewan Komisaris/Dewan Pengawas;

Duties and Responsibilities of the Nomination and Remuneration Committee

The Nomination and Remuneration Committee holds a central role in providing professional independent opinion and in-depth analysis to the Board of Commissioners on subject of HR management, especially in aspects of talent management including nominations, remuneration management for employee and Director, including review of Director's remuneration proposals.

The Nomination and Remuneration Committee is directly responsible to the Board of Commissioners, as tasks are assigned based on functions and duties established by applicable regulations. The duties and responsibilities of the Nomination and Remuneration Committee include:

1. Review the Company's Talent Management System as well as monitor and evaluate its implementation;
2. Evaluate the Talent Classification system and procedures implemented by the Board of Directors;
3. Validate and calibrate the Selected Talents proposed by the Board of Directors to the Board of Commissioners/Supervisory Board, to produce a list of Nominated Talents who would be appointed by the Board of Commissioners/Supervisory Board to the GMS/Minister;
4. Evaluate candidates who would be appointed as members of the Boards of Directors or Commissioners of the Company's subsidiaries, prior to submission to the GMS/Minister;
5. Evaluate the proposed KPI for individual members of the Board of Directors;
6. Draft individual performance evaluation system for members of the Board of Directors and/or the Board of Commissioners/Supervisory Board;
7. Prepare proposals of development program for members of the Board of Directors and/or the Board of Commissioners/Supervisory Board;
8. Evaluate remuneration policies for employees which require approval/response from the Board of Commissioners/Supervisory Board;

9. Melakukan evaluasi atas usulan Direksi mengenai struktur organisasi Perusahaan; 10. Menyusun <i>Charter</i>/Piagam Komite Nominasi dan Remunerasi; 11. Menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT) Komite Nominasi dan Remunerasi, serta menyampaikan laporan berkala sebagaimana yang telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku kepada Dewan Pengawas; 12. Melaksanakan tugas-tugas lain yang ditetapkan dalam Piagam Komite Nominasi dan Remunerasi. Komite Nominasi dan Remunerasi memiliki sejumlah kewenangan mengakses dokumen, data, dan informasi Perusahaan yang diperlukan terkait dengan pelaksanaan tugasnya; 13. Memperoleh masukan dari pihak eksternal/independen yang profesional dalam rangka pelaksanaan tugas dan peningkatan kemampuan Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi apabila diperlukan atas biaya Perusahaan serta melakukan kewenangan lain yang diberikan oleh Dewan Komisaris.	9. Evaluate proposals from the Board of Directors' on the Company's organizational structure; 10. Draft the Nomination and Remuneration Committee Charter; 11. Prepare the Annual Work Plan and Budget for the Nomination and Remuneration Committee, and present periodic reports to the Supervisory Board as specified in the applicable regulations; 12. Execute relevant duties as stipulated in the Nomination and Remuneration Committee Charter. The Nomination and Remuneration Committee is authorised to gain access to Company documents, data and information required for the implementation of their duties; 13. Obtain input from external/independent professional parties on duties implemented by and capability improvement for members of Nomination and Remuneration Committee, if necessary and at the Company's expense, including exercising authorities granted by the Board of Commissioners.

Pelaksanaan Tugas Komite Nominasi dan Remunerasi

Sepanjang tahun 2023, Komite Nominasi dan Remunerasi melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dalam mendukung tugas Dewan Komisaris sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Realisasi program kerja Komite Nominasi dan Remunerasi sepanjang tahun 2023 dilaporkan kepada Dewan Komisaris dengan kegiatan secara umum sebagai berikut:

1. Kegiatan Pokok Komite Nominasi dan Remunerasi

Sepanjang tahun 2023, Komite Nominasi dan Remunerasi secara bersama-sama atau bersama dengan Komisaris melakukan:

- Evaluasi terhadap *talent pool*;
- Evaluasi kebijakan remunerasi perusahaan terutama untuk Direksi;
- Melakukan *review* atas usulan KPI individu Direksi;
- Menyusun *Charter*/Piagam Komite Nominasi dan Remunerasi.

Implementation of the Nomination and Remuneration Committee Duty

Throughout 2023, the Nomination and Remuneration Committee carried out their duties and responsibilities in supporting the duties of the Board of Commissioners in accordance with applicable regulations. The realization of the Nomination and Remuneration Committee work program throughout 2023 was reported to the Board of Commissioners with the following activities:

1. Key Activities of the Nomination and Remuneration Committee

Throughout 2023, the Nomination and Remuneration Committee collectively or jointly with the Commissioners conducted the following:

- Evaluated talent pool;
- Evaluated the company's remuneration policy, especially for Directors;
- Reviewed the Board of Directors' individual KPI proposals;
- Prepared the Nomination and Remuneration Committee Charter.

2. Kegiatan Membantu Dewan Komisaris

Sepanjang tahun 2023, Komite Nominasi dan Remunerasi berkoordinasi dengan Direktur SDM dan Layanan Korporasi dalam rangka menyiapkan bahan rapat dan mengevaluasinya terkait dengan pembahasan kebijakan remunerasi, nominasi dan tupoksi manajemen dalam struktur organisasi.

3. Kegiatan Lain-lain

Komite Nominasi dan Remunerasi dalam Tahun 2023 juga mengikuti aktivitas yang diselenggarakan oleh perusahaan, misalnya upacara dalam rangka hari besar Nasional, acara halal bihalal, dan acara ulang tahun PT ASDP Indonesia Ferry (Persero).

2. Activities to assist the Board of Commissioners

Throughout 2023, the Nomination and Remuneration Committee coordinated with the Director of HR and Corporate Services in order to prepare and evaluate meeting materials related to remuneration, nomination and management duties in the organizational structure.

3. Other Activities

In 2023, the Nomination and Remuneration Committee also took part in events held by the company, such as ceremonies for national holidays, Eid al-Fitr gathering events, and PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) anniversary.

Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi

Pengangkatan dan pemberhentian anggota Komite Nominasi dan Remunerasi di Perusahaan mengacu pada Peraturan Menteri BUMN No. PER-3/MBU/03/2023 tentang Organ dan Sumber Daya Manusia BUMN. Penunjukan dan pemberhentian anggota Komite menjadi wewenang Dewan Komisaris, yang kemudian dilaporkan kepada RUPS.

Masa jabatan bagi anggota Komite Nominasi dan Remunerasi yang bukan bagian dari Dewan Komisaris ditetapkan paling lama selama 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk paling lama 2 (dua) tahun, dengan tidak mengurangi hak Dewan Komisaris untuk memberhentikan anggota tersebut sewaktu-waktu.

Susunan dan Komposisi Komite Nominasi dan Remunerasi

Pada tahun 2023, komposisi Komite Nominasi dan Remunerasi terdiri dari 3 (tiga) orang yang terdiri dari 1 (satu) Ketua Komite Nominasi dan Remunerasi dan 2 (dua) orang anggota Komite Nominasi dan Remunerasi. Ketua Komite Nominasi dan Remunerasi wajib merupakan anggota Dewan Komisaris. Sedangkan untuk anggota Komite Nominasi dan Remunerasi dapat dijabat oleh anggota Dewan Komisaris atau dari luar Perusahaan.

Appointment and Discharge of Nomination and Remuneration Committee Members

Appointing and discharging members of the Company's Nomination and Remuneration Committee refers to the Regulation of Minister of SOEs No. PER-3/MBU/03/2023 concerning Organs and Human Resources in SOEs. Appointing and discharging Committee members is the Board of Commissioners' authority, followed by report to the GMS.

The term of office for the Nomination and Remuneration Committee member who does not serve in the Board of Commissioners is set at maximum of 3 (three) years and can be reappointed for a maximum of 2 (two) years, without prejudice to the Board of Commissioners' rights to dismiss such member at any time.

Structure and Composition of the Nomination and Remuneration Committee

In 2023, the Nomination and Remuneration Committee was composed of 3 (three) persons, who are 1 (one) Chairperson and 2 (two) members of the Committee. The Chairperson of the Nomination and Remuneration Committee must also serves as member of the Board of Commissioners. Meanwhile, position of the Nomination and Remuneration Committee member can be assigned to member of the Board of Commissioners or to personnel outside the Company.

Susunan dan komposisi Komite Nominasi dan Remunerasi tahun 2023 mengacu pada Surat Keputusan Dewan Komisaris No. 05/KOM/IX/2022 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Perusahaan Perseroan (Persero) PT ASDP Indonesia Ferry tertanggal 27 September 2022 dengan susunan sebagai berikut:

The structure and composition of the Nomination and Remuneration Committee in 2023 was subjected to the Decree of the Board of Commissioners No. 05/KOM/IX/2022 on The Nomination and Remuneration Committee of PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) dated 27 September 2022, with the following composition:

Nama Name	Jabatan Position	Keahlian Expertise	Periode Jabatan Term of Office
Saiful Haq Manan	Ketua (Komisaris Utama/Komisaris Independen) Chairperson (President/Independent Commissioner)	Ekonomi dan Bisnis Economics and Business	April 2020-sekarang April 2020-present
Budi Setiyadi	Sekretaris (Komisaris) Secretary (Commissioner)	Hukum Law	Oktober 2022-sekarang October 2022-present
Hendar Ristriawan	Anggota (Komisaris Independen) Member (Independent Commissioner)	Hukum dan Audit Law and Audit	Oktober 2020-sekarang October 2020-present



Profil Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi

Profile of the Nomination and Remuneration Committee



Nama Name	Saiful Haq Manan
Jabatan Position	Ketua Komite Nominasi dan Remunerasi Chairperson of the Nomination and Remuneration Committee

Profil dapat dilihat pada bagian Profil Dewan Komisaris. |
The profile is available in the Profile of the Board of Commissioners section.



Nama Name	Budi Setiyadi
Jabatan Position	Sekretaris Komite Nominasi dan Remunerasi Secretary to the Nomination and Remuneration Committee

Profil dapat dilihat pada bagian Profil Dewan Komisaris. |
The profile is available in the Profile of the Board of Commissioners section.



Nama Name	Hendar Ristriawan
Jabatan Position	Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi Member of the Nomination and Remuneration Committee

Profil dapat dilihat pada bagian Profil Dewan Komisaris. | The profile is available in the Profile of the Board of Commissioners section.

Independensi Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi

Seluruh anggota Komite Nominasi dan Remunerasi Perusahaan menyatakan independensinya untuk bekerja secara independen, profesional dan objektif serta terbebas dari intervensi atau hal-hal yang berpotensi menimbulkan benturan kepentingan. Untuk itu, Perusahaan memastikan independensi anggota Komite Nominasi dan Remunerasi sesuai dengan kriteria independensi yang telah ditentukan.

Independence of the Nomination and Remuneration Committee Members

Every member of the Company's Nomination and Remuneration Committee declare that they are able to work independently, professionally and objectively, and are free from intervention or potential issues that may cause a conflict of interest. Thus, the Company ensures their independence by referencing the following specified criteria of independence.

Pemenuhan Independensi Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi Tahun 2023

Independence of Members of Nomination and Remuneration Committee in 2023

Kriteria Independensi <i>Criteria of Independence</i>	Saiful Haq Manan	Budi Setiyadi	Hendar Ristriawan
Tidak memiliki hubungan keuangan dengan Dewan Komisaris dan Direksi. <i>Not having any financial relationship with the Boards of Commissioners and Directors</i>	√	√	√
Tidak memiliki hubungan kepengurusan di Perusahaan, entitas anak, maupun perusahaan afiliasi. <i>Not associated in management of the Company, subsidiaries, or affiliated companies</i>	√	√	√
Tidak memiliki hubungan kepemilikan saham di Perusahaan <i>Not having any share ownership in the Company</i>	√	√	√
Tidak memiliki hubungan keluarga dengan Dewan Komisaris, Direksi dan/atau sesama anggota Komite Audit <i>Not having familial relationship with the Board of Commissioners, Directors and/or members of the Audit Committee</i>	√	√	√
Tidak menjabat sebagai pengurus partai politik dan pejabat pemerintah daerah <i>Not serving in administration of any political party or is an official of regional government</i>	√	√	√

Program Pengembangan Kompetensi Komite Nominasi dan Remunerasi

Sepanjang tahun 2023, Perusahaan tidak melakukan pengembangan kompetensi untuk anggota Komite Nominasi dan Remunerasi.

Penilaian dan Evaluasi Kinerja Komite Nominasi dan Remunerasi

Penilaian dan evaluasi kinerja Komite Nominasi dan Remunerasi menjadi kewenangan Dewan Komisaris yang dilakukan sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun sekali, mengacu pada Kinerja Komite Nominasi dan Remunerasi secara kolektif dan kinerja masing-masing anggota Komite Nominasi dan Remunerasi.

Penilaian dan evaluasi didasarkan pada kriteria berupa pencapaian target pelaksanaan tugas yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Tahunan Komite Nominasi dan Remunerasi. Hasil penilaian tersebut menjadi bahan pertimbangan

Competency Development Program for Nomination and Remuneration Committee

Throughout 2023, the Company did not organize training for members of the Nomination and Remuneration Committee.

Performance Appraisal and Evaluation of the Nomination and Remuneration Committee

The authority to appraise and evaluate the performance of the Nomination and Remuneration Committee belongs to the Board of Commissioners, and is performed a minimum of once annually, by referring to the collective and individual Performance of the Nomination and Remuneration Committee.

Appraisal and evaluation are based on criteria of achieved task implementation target specified in the Annual Work Plan of the Nomination and Remuneration Committee. The Board of Commissioners will use the resulting appraisal

bagi Dewan Komisaris untuk mengangkat kembali dan/atau memberhentikan anggota Komite Nominasi dan Remunerasi untuk periode jabatan berikutnya.

to decide reappointment and/or dismissal of members of the Nomination and Remuneration Committee for the next term of office.

KOMITE PEMANTAU RISIKO

Dewan Komisaris membentuk organ pendukung yaitu Komite Pemantau Risiko untuk membantu Dewan Komisaris dalam menjalankan fungsi pengawasan terutama terkait manajemen risiko. Komite Pemantau Risiko bertugas memberikan masukan terhadap kebijakan dan strategi Perusahaan untuk memastikan pengendalian risiko dari kebijakan dan strategi yang akan dijalankan oleh Perusahaan. Dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, Komite Pemantau Risiko bertanggung jawab secara langsung kepada Dewan Komisaris.

Dasar Pembentukan Komite Pemantau Risiko

Pembentukan Komite Pemantau Risiko didasarkan pada peraturan-peraturan sebagai berikut:

1. Peraturan Menteri BUMN No. PER-12/MBU/2012 tanggal 24 Agustus 2012 tentang Organ Pendukung Dewan Komisaris/Dewan Pengawas BUMN yang diubah melalui Peraturan Menteri BUMN No. PER-14/MBU/10/2021 sebagaimana terakhir kali diubah dengan Peraturan Menteri BUMN No. PER-3/MBU/03/2023 tentang Organ dan Sumber Daya Manusia BUMN;
2. Peraturan Menteri BUMN No. PER-5/MBU/09/2022 tentang Penerapan Manajemen Risiko pada BUMN;
3. Anggaran Dasar PT ASDP Indonesia Ferry (Persero);
4. Surat Keputusan Dewan Komisaris No. 01/KOM/I/2020 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota-Anggota Komite Pemantauan Manajemen Risiko.

RISK OVERSIGHT COMMITTEE

The Board of Commissioners formed a supporting organ, the Risk Oversight Committee, to assist them in carrying out their supervisory roles, specifically related to risk management. The Risk Oversight Committee is tasked with providing input on Company policies and strategies to ensure risk control during implementation by the Company. In carrying out their duties and responsibilities, the Risk Oversight Committee is directly responsible to the Board of Commissioners.

Basis for Establishing the Risk Oversight Committee

The formation of the Risk Oversight Committee is based on the following:

1. Regulation of Minister of SOEs No. PER-12/MBU/2012 dated 24 August 2012 concerning Supporting Organs for the Board of Commissioners/Supervisory Board of SOEs, amended to Regulation of Minister of SOEs No. PER-14/MBU/10/2021, which latest amendment was Regulation of Minister of SOEs No. PER-3/MBU/03/2023 on Organs and Human Resources in SOEs;
2. Regulation of Minister of SOEs No. PER-5/MBU/09/2022 on the Implementation of Risk Management in SOEs;
3. Articles of Association of PT ASDP Indonesia Ferry (Persero);
4. Decree of the Board of Commissioners No. 01/KOM/I/2020 on Appointment and Dismissal of Members of the Risk Management Oversight Committee.

Pedoman Kerja Komite Pemantau Risiko

Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, Komite Pemantau Risiko memiliki pedoman melalui Piagam Komite Pemantau Risiko. Komite Risiko secara berkala melakukan evaluasi menyeluruh terhadap piagam tersebut, untuk memastikan relevansi dengan peraturan-peraturan yang berlaku. Piagam Komite Pemantau Manajemen Risiko ditetapkan berdasarkan Keputusan Dewan Komisaris PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) No. SK.06/KOM/IX/2021 tentang Piagam Komite Pemantau Manajemen Risiko yang memuat:

1. Pendahuluan,
2. Pembentukan, Organisasi dan Masa Jabatan,
3. Tugas, Tanggung Jawab dan Wewenang,
4. Rapat, Pelaporan dan Anggaran,
5. Penutup.

Tugas dan Tanggung Jawab Komite Pemantau Risiko

Komite Pemantau Risiko memiliki tanggung jawab sentral dalam memberikan dukungan kepada Dewan Komisaris dengan pendapat yang bersifat profesional serta independen, yang bertujuan untuk memastikan penerapan yang efektif dari Manajemen Risiko Perusahaan (*Enterprise Risk Management*) serta penerapan prinsip-prinsip GCG. Tugas utamanya adalah memberikan sudut pandang yang mendalam dan objektif terhadap praktik manajemen risiko yang ada, serta memastikan bahwa aspek-aspek GCG terintegrasi dengan baik dalam strategi Perusahaan. Adapun tugas dan tanggung jawab Komite Pemantau Risiko terdiri dari:

1. Melakukan evaluasi dan memberikan rekomendasi terhadap efektivitas implementasi manajemen risiko Perusahaan oleh Divisi Manajemen Risiko, dengan menyelenggarakan pertemuan berkala serta metode lainnya untuk menyusun perkembangan dari tahapan-tahapan yang dilakukan oleh VP Manajemen Risiko dan VP Sistem Manajemen Perusahaan terkait GCG.
2. Meninjau penilaian risiko yang diberlakukan oleh Divisi Manajemen Risiko pada aspek pendapatan, pembiayaan (terutama dalam

Risk Oversight Committee Charter

In carrying out their duties and responsibilities, the Risk Oversight Committee follows the Risk Oversight Charter. The Risk Oversight Committee regularly evaluates the Charter comprehensively, to ensure its relevance to applicable regulations. The Risk Oversight Committee Charter was substantiated with the Decision of the Board of Commissioners of PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) No. SK.06/KOM/IX/2021 concerning the Risk Oversight Management Committee Charter, which contained:

1. Introduction,
2. Formation, Organization and Term of Office,
3. Duties, Responsibilities and Authorities,
4. Meetings, Reporting and Budget,
5. Conclusion.

Duties and Responsibilities of the Risk Oversight Committee

The Risk Oversight Committee has the core responsibility to support the Board of Commissioners with professional and independent opinions, aimed to ensure effective implementation of Enterprise Risk Management and the GCG principles. Their primary task is to give in-depth and objective perspective on current risk management practices, ensuring the integration of GCG aspects into the Company's strategy. The duties and responsibilities of the Risk Oversight Committee consist of:

1. Evaluate and make recommendations on the effectiveness of the Company's risk management implemented by the Risk Management Division, by organising regular meetings and create methods to compile the progress from stages carried out by the VP of Risk Management and the VP of Corporate Management Systems in relation to GCG.
2. Review the risk assessment implemented by the Risk Management Division on aspects of revenue, financing (especially

kaitannya dengan pelaksanaan *docking*), dan rencana investasi Perusahaan yang memiliki dampak material.

3. Mengawasi aktivitas Divisi Manajemen Risiko dalam mengontrol langkah-langkah mitigasi risiko oleh unit-unit kerja yang terkait.
4. Mengawasi implementasi rekomendasi yang diajukan oleh Komite Pemantau Risiko oleh Divisi Manajemen Risiko.
5. Melakukan pengawasan atas aktivitas Divisi Sistem Manajemen Perusahaan dalam memantau pelaksanaan GCG oleh unit-unit kerja yang terkait.
6. Mengawasi implementasi rekomendasi yang diajukan oleh Komite Pemantau Risiko oleh Divisi Sistem Manajemen Perusahaan untuk bidang GCG.
7. Melakukan analisis serta penilaian atas proposal RKAP serta RJPP yang disampaikan oleh Direksi.
8. Menelaah informasi terkait risiko dan manajemen risiko Perusahaan yang tercantum dalam laporan-laporan yang dipublikasikan, melalui serangkaian proses, termasuk diskusi dengan manajemen dan review laporan yang telah dipublikasikan.
9. Menelaah informasi penerapan GCG dalam laporan-laporan yang dipublikasikan, melalui rangkaian proses seperti diskusi dengan manajemen dan penilaian terhadap penerapan GCG.
10. Jika diperlukan, menggunakan jasa konsultan manajemen risiko atau konsultan GCG independen untuk menelaah kembali proses manajemen risiko atau aspek GCG yang telah diterapkan Perusahaan, dengan tugas memberikan masukan terkait kriteria serta kompetensi konsultan, dan mengawasi pekerjaan konsultan melalui Satuan Kerja Manajemen Risiko dan GCG.

in relation to docking implementation), and Company's investment plans that would have a material impact.

3. Supervise the Risk Management Division's activities in handling risk mitigation measures executed by work units.
4. Oversee the Risk Management Division implemented recommendations submitted by the Risk Oversight Committee.
5. Supervise the Division of Company Management Systems monitors the GCG implementation by relevant work units.
6. Oversee the Division of Company Management Systems implements recommendations related to the GCG sector that was given by the Risk Oversight Committee.
7. Analyse and assess proposals of WPB and Long-Term Company Plan drafted by the Board of Directors.
8. Review information related to the risks and risk management contained in published reports, through processes that include discussions with management and review of published reports.
9. Review information of GCG implementation in published reports, using approaches such as discussions with management and assessment of GCG implementation.
10. If necessary, employ a risk management consultant or independent GCG consultant to review the risk management process or implemented GCG aspects to gain input on the consultant's criteria and competencies, and have the Risk Management and GCG Work Unit to supervise the consultant's work.

Wewenang Komite Pemantau Risiko

Kewenangan Komite Pemantau Risiko sebagaimana penugasan yang diberikan oleh Dewan Komisaris meliputi hal-hal sebagai berikut:

1. Komite Pemantau Risiko beroperasi secara bersama-sama dengan kemandirian penuh dalam menjalankan tanggung jawabnya.

Authority of the Risk Oversight Committee

The assigned authority of the Risk Oversight Committee by the Board of Commissioners covers the following:

1. The Risk Oversight Committee to operate jointly with full independence in carrying out their responsibilities.

2. Komite Pemantau Risiko memiliki otoritas untuk mengakses semua dokumen, data, dan informasi Perusahaan yang relevan demi menjalankan tugasnya dengan efektif.
3. Dalam menggunakan otoritas sebagaimana disebutkan pada poin kedua, Komite Pemantau Risiko berkolaborasi dengan mitra kerja seperti Organ Pendukung Dewan Komisaris, unit-unit manajemen seperti Internal Audit, Manajemen Risiko, Sistem Manajemen Perusahaan, serta kantor regional dan cabang-cabang.
4. Prosedur kerja yang diikuti oleh Komite Pemantau Risiko sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam lampiran piagam ini dan mencerminkan kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku secara umum.
5. Komite memiliki kebijakan untuk menerima masukan dari pihak eksternal atau independen yang memiliki keahlian profesional demi menjalankan tugasnya dengan lebih baik, dengan biaya yang ditanggung oleh Perusahaan.
6. Komite Pemantau Risiko memiliki kewenangan tambahan yang telah diberikan oleh Dewan Komisaris untuk menjalankan tugasnya.

Pelaksanaan Tugas Komite Pemantau Risiko

Sepanjang tahun 2023, Komite Pemantau Risiko melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dalam mendukung tugas Dewan Komisaris sesuai dengan Piagam Komite Pemantau Risiko. Realisasi program kerja Komite Pemantau Risiko sepanjang tahun 2023 dilaporkan kepada Dewan Komisaris dengan kegiatan secara umum sebagai berikut:

1. Melaksanakan tugas pokok Komite Pemantau Risiko yakni berupa pengawasan dan evaluasi capaian penyelesaian program strategi Manajemen Risiko & QA secara triwulanan dan pengawasan dan evaluasi capaian penyelesaian program kerja GCG yang juga dilaksanakan secara triwulanan.
2. Melaksanakan penugasan khusus kepada Komite Pemantau Risiko yang dalam pelaksanaannya berupa pengawasan dan analisis kinerja keuangan perusahaan.
3. Mendukung kegiatan Dewan Komisaris yang dalam pelaksanaannya, Komite Pemantau Risiko melakukan pendampingan, baik berupa rapat internal, rapat bersama unit/divisi.

Implementation of the Duties of the Risk Oversight Committee

Throughout 2023, the Risk Oversight Committee performed their duties and responsibilities to support the Board of Commissioners according to the Charter of the Risk Oversight Committee. The Risk Oversight Committee accomplished work programs throughout 2023, which activities are reported as the following:

1. Executed main duties of the Risk Oversight Committee, which was to monitor and evaluate on quarterly basis the completion program of the Risk Management & QA strategy and the GCG work program.
2. Executed special assignments to the Risk Oversight Committee, which implementation was monitoring and analyzing the company's financial performance.
3. Supported the activities of the Board of Commissioners, in which the Risk Oversight Committee provided assistance in internal meetings and meetings with units/divisions.

Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Komite Pemantau Risiko

Masa jabatan anggota Komite Pemantau Risiko mengacu pada Keputusan Dewan Komisaris No. SK.06/KOM/IX/2021 tentang Piagam Komite Pemantau Risiko PT ASDP Indonesia Ferry (Persero), dengan uraian sebagai berikut:

1. Anggota Dewan Komisaris yang juga menjabat sebagai anggota Komite Pemantau Risiko memiliki masa jabatan yang sejalan dengan periode penunjukan mereka sebagai anggota Dewan Komisaris, yang ditetapkan oleh RUPS.
2. Untuk anggota Komite Pemantau Risiko yang tidak merupakan bagian dari Dewan Komisaris, masa jabatannya adalah 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang sekali selama 2 (dua) tahun, namun hal ini tidak mengurangi hak Dewan Komisaris untuk memberhentikan mereka kapan pun diperlukan.

Susunan dan Komposisi Komite Pemantau Risiko

Pada tahun 2023, komposisi Komite Pemantau Risiko terdiri dari 4 (empat) orang yang terdiri dari 1 (satu) Ketua Pemantau Risiko dan 3 (tiga) orang anggota Komite Pemantau Risiko. Ketua Komite Pemantau Risiko wajib merupakan anggota Dewan Komisaris. Sedangkan untuk anggota Komite Pemantau Risiko dapat dijabat oleh anggota Dewan Komisaris atau dari luar Perusahaan.

Susunan dan komposisi Komite Pemantau Risiko tahun 2023 mengacu pada Surat Keputusan Dewan Komisaris No. 01/KOM/I/2020 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota-Anggota Komite Pemantauan Manajemen Risiko dengan susunan sebagai berikut:

Appointment and Dismissal of Risk Oversight Committee Members

Terms of appointment for members of the Risk Oversight Committee refers to Decree of Board of Commissioners No. SK.06/KOM/IX/2021 on the Charter of the Risk Oversight Committee of PT ASDP Indonesia Ferry (Persero), with the following description:

1. Members of the Board of Commissioners who also serve as members of the Risk Oversight Committee hold their positions in line with the length of their appointment as members of the Board of Commissioners, which is decided by the GMS.
2. Term of office for members of the Risk Oversight Committee who are not in the Board of Commissioners is 3 (three) years, and can be reappointed for 2 (two) years, without prejudice to the rights of the Board of Commissioners to dismiss them whenever necessary.

Structure and Composition of the Risk Oversight Committee

In 2023, the Risk Oversight Committee had 4 (four) people, of which 1 (one) was the Chairperson of Risk Oversight Committee and 3 (three) were members of the Risk Oversight Committee. The Chairperson of the Risk Oversight Committee must also be a member of the Board of Commissioners. While members of the Risk Oversight Committee can be members of the Board of Commissioners or from outside the Company.

The structure and composition of the Risk Oversight Committee in 2023 referred to the Decree of the Board of Commissioners No. 01/KOM/I/2020 concerning Appointment and Dismissal of Members of the Risk Oversight Committee, with the following composition:

PROFIL ANGGOTA KOMITE PEMANTAU RISIKO

PROFILE OF THE RISK OVERSIGHT COMMITTEE MEMBERS



Nama Name	Susi Meyrista Tarigan
Jabatan Position	Ketua Komite Pemantau Risiko Chairperson of the Risk Oversight Committee

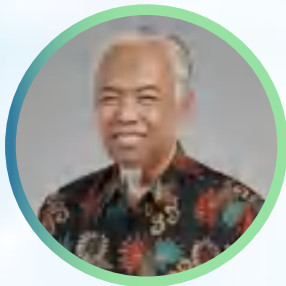
Profil dapat dilihat pada bagian Profil Dewan Komisaris. |
*The profile is available in the Profile of the Board of
Commissioners section.*



Nama Name	Iwan Hari Sugiarto
Jabatan Position	Wakil Ketua Komite Pemantau Risiko Deputy Chairperson of the Risk Oversight Committee

Profil dapat dilihat pada bagian Profil Dewan Komisaris. |
*The profile is available in the Profile of the Board of
Commissioners section.*





Nama <i>Name</i>	Agus Edy Susilo
Jabatan <i>Position</i>	Anggota Komite Pemantau Risiko <i>Member of the Risk Oversight Committee</i>
Usia <i>Age</i>	69 Tahun <i>Years Old</i>
Kewarganegaraan <i>Nationality</i>	Indonesia
Domisili <i>Domicile</i>	Jakarta
Pendidikan <i>Educational</i>	- Doktor Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi di Universitas Indonesia) <i>Doctorate in Economics, Faculty of Economics, University of Indonesia (2002)</i> - Magister Transportasi di ITB (1988) <i>Master of Transportation, ITB (1988)</i> - Sarjana Ekonomi di Universitas Mulawarman (1983) <i>Bachelor of Economy, University of Mulawarman (1983)</i>
Riwayat Pekerjaan <i>Work Experience</i>	- Anggota Komite Pemantau Risiko, PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) (2020-sekarang) <i>Member of the Risk Oversight Committee, PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) (2020-present)</i> - Staf Komisaris, PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) (2019-2020) <i>Staff to the Commissioner, PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) (2019-2020)</i> - Tenaga Ahli Direksi Bidang Ekonomi, Kepelabuhanan dan Pengawasan, PT Pelindo I (Persero) (2017-2019) <i>Senior Advisor for Director in Economics, Ports and Supervision, PT Pelindo I (Persero) (2017-2019)</i> - Komisaris, PT Prima Indonesia Logistik (2015-2019) <i>Commissioner, PT Prima Indonesia Logistik (2015-2019)</i> - Anggota Dewan Pengawas BLU Politeknik Penerbangan Surabaya (2017-2019) <i>Member of the Supervisory Board of Public Service Agency, Surabaya Aviation Polytechnic (2017-2019)</i> - Tenaga Ahli Bidang Ekonomi, Kepelabuhanan, dan Pengawasan Dewan Komisaris, PT Pelindo I (Persero) (2014-2017) <i>Senior Advisor in Economics, Ports and Supervisory of the Board of Commissioners, PT Pelindo I (Persero) (2014-2017)</i> - Tenaga Ahli Menteri Perhubungan Bidang PNBPN (2015-2016) <i>Senior Advisor for the Minister of Transportation for Non-Tax State Revenue (2015-2016)</i> - Staf Ahli Menteri Bidang Ekonomi, Kawasan dan Kemitraan (2014-2015) <i>Senior Ministerial Advisor for Economy, Regions and Partnerships (2014-2015)</i> - Inspektur Wilayah II (2012-2014) <i>Inspector of Region II (2012-2014)</i> - Inspektur Wilayah V (2011-2012) <i>Inspector of Region V (2011-2012)</i> - Kapus Kajian Kemitraan dan Pelayanan Jasa Transportasi (2009-2011) <i>Head of Center of Partnership and Transportation Services Studies (2009-2011)</i>
Dasar Hukum Pengangkatan <i>Legal Basis for Appointment</i>	Keputusan Dewan Komisaris No. 02/KOM/I/2023 tanggal 20 Januari 2023 <i>Decree of the Board of Commissioners No. 02/KOM/I/2023 dated 20 January 2023</i>
Periode Jabatan <i>Term in Office</i>	Januari 2020-sekarang <i>January 2020-present</i>



Nama <i>Name</i>	Eko Nur Surachman
Jabatan <i>Position</i>	Anggota Komite Pemantau Risiko Member of the Risk Oversight Committee
Usia <i>Age</i>	42 Tahun Years Old
Kewarganegaraan <i>Nationality</i>	Indonesia
Domisili <i>Domicile</i>	Tangerang
Pendidikan <i>Educational</i>	• Master of Commerce (Advanced) di University of Queensland, Australia (2011) Master of Commerce (Advanced), University of Queensland, Australia (2011) • Diploma IV Akuntansi di STAN (2006) Diploma IV in Accounting, STAN (2006)
Riwayat Pekerjaan <i>Work Experience</i>	• Head of Subdivision - Evaluation on Government Support to Infrastructure Project, Directorate of Government Support Management and Infrastructure Financing, Directorate General of Budget Financing and Risk Management, Kementerian Keuangan (Ministry of Finance) (2014-2016) • Head of Subdivision Risk of Transportation Infrastructure - Risk Management Unit - Fiscal Policy Agency, Kementerian Keuangan (Ministry of Finance) Republik Indonesia (2011 – 2014) • Risk Analyst, Risk Management Unit - Fiscal Policy Agency, Kementerian Keuangan (Ministry of Finance) Republik Indonesia (2008 – 2009) • Dosen (Lecturer), Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (2006-2008)
Dasar Hukum Pengangkatan <i>Legal Basis for Appointment</i>	Keputusan Dewan Komisaris No. 06/KOM/X/2023 tanggal 26 Oktober 2023 Decree of the Board of Commissioners No. 06/KOM/X/2023 dated 26 October 2023
Periode Jabatan <i>Term in Office</i>	26 Oktober 2020-sekarang 26 October 2020-present

Independensi Anggota Komite Pemantau Risiko

Seluruh anggota Komite Pemantau Risiko Perusahaan menyatakan independensinya untuk bekerja secara independen, profesional dan objektif serta terbebas dari intervensi atau hal-hal yang berpotensi menimbulkan benturan kepentingan. Untuk itu, Perusahaan memastikan independensi anggota Komite Pemantau Risiko sesuai dengan kriteria independensi yang telah ditentukan.

Independence of Risk Oversight Committee Members

Every members of the Company's Risk Oversight Committee declare that they are able to work independently, professionally and objectively, and are free from intervention or potential issues that may cause a conflict of interest. Thus, the Company ensures their independence by referencing the following specified criteria of independence.

Kriteria Independensi Criteria of Independence	Susi Meyrita Taringan	Iwan Hari Sugiarto	Agus Edy Susilo	Eko Nur Surachman
Tidak memiliki hubungan keuangan dengan Dewan Komisaris dan Direksi Not having any financial relationship with the Boards of Commissioners and Directors	√	√	√	√
Tidak memiliki hubungan kepengurusan di Perusahaan, entitas anak, maupun perusahaan afiliasi. Not associated in management of the Company, subsidiaries, or affiliated companies	√	√	√	√
Tidak memiliki hubungan kepemilikan saham di Perusahaan Not having any share ownership in the Company	√	√	√	√
Tidak memiliki hubungan keluarga dengan Dewan Komisaris, Direksi dan/atau sesama anggota Komite Audit Not having familial relationship with the Board of Commissioners, Directors and/or members of the Audit Committee	√	√	√	√
Tidak menjabat sebagai pengurus partai politik dan pejabat pemerintah daerah Not serving in administration of any political party or is an official of regional government	√	√	√	√

Program Pengembangan Kompetensi Komite Pemantau Risiko

Pada tahun 2023, pelatihan Komite Pemantau Risiko dilakukan oleh Sdr. Agus Eddy Susilo dan Sdr. Eko Nur Surachman dengan rincian sebagai berikut:

Competency Development Program for the Risk Oversight Committee

In 2023, training for the Risk Oversight Committee were organized for Agus Eddy Susilo and Eko Nur Surachman, with the following details:

Nama Anggota Komite	Nama Pelatihan Training	Lembaga Penyelenggara Organizing Institution	Waktu Pelaksanaan Date	Lokasi Location
Agus Eddy Susilo	CP3P (Certified Public Private Partnership Profesional) Certified Public Private Partnership Professional	APMG International APMG International	28 Agustus 2023 28 August 2023	Online Online
	BLMI GRC Masterclass – Pre IPO dan Post IPO BLMI GRC Masterclass – Pre IPO and Post IPO	BUMN Leadership & Management Institute SOEs Leadership & Management Institute	10 Agustus 2023 10 August 2023	Online Online
	BLM GRC Masterclass - Peningkatan dan Penerbitan Efek Bersifat Utang & Sukuk (EBUS) BLMI GRC Masterclass - Rating and Issuance of Debt and Sukuk Securities	BUMN Leadership & Management Institute SOEs Leadership & Management Institute	10 Agustus 2023 10 August 2023	Online Online
	BLM GRC Masterclass – Risk Management Effectiveness Evaluation BLM GRC Masterclass – Risk Management Effectiveness Evaluation	BUMN Leadership & Management Institute SOEs Leadership & Management Institute	7 September 2023 7 September 2023	Online Online
	BSE GRC Masterclass - Sosialisasi Peningkatan BUMN & Anak Perusahaan BUMN BSE GRC Masterclass - Risk Management Effectiveness Evaluation	BUMN Leadership & Management Institute SOEs Leadership & Management Institute	14 September 2023 14 September 2023	Online Online
	ESG for Boards - Governance of ESG ESG for Boards - Governance of ESG	BUMN Leadership & Management Institute SOEs Leadership & Management Institute	27 September 2023 27 September 2023	Online Online
	In-House Training & Certification QRG (Qualified Risk Governance Professional) In-House QRG (Qualified Risk Governance Professional) Training & Certification	Lembaga Sertifikasi Profesi Mitra Kalyana Sejahtera LSP MKS Mitra Kalyana Sejahtera Profession Certification Institute	6 - 7 September 2023 6 - 7 September 2023	Online Online
Eko Nur Surachman	CP3P (Certified Public Private Partnership Profesional) Certified Public Private Partnership Professional	APMG International APMG International	28 September 2023 28 September 2023	Online Online
	BLMI GRC Masterclass – Pre IPO dan Post IPO BLMI GRC Masterclass – Pre IPO and Post IPO	BUMN Leadership & Management Institute SOEs Leadership & Management Institute	10 Agustus 2023 10 August 2023	Online Online
	BLM GRC Masterclass - Peningkatan dan Penerbitan Efek Bersifat Utang & Sukuk (EBUS) BLMI GRC Masterclass - Rating and Issuance of Debt and Sukuk Securities	BUMN Leadership & Management Institute SOEs Leadership & Management Institute	10 Agustus 2023 10 August 2023	Online Online
	In-House Training & Certification QRG (Qualified Risk Governance Professional) In-House QRG (Qualified Risk Governance Professional) Training & Certification	Lembaga Sertifikasi Profesi Mitra Kalyana Sejahtera LSP MKS Mitra Kalyana Sejahtera Profession Certification Institute	6 - 7 September 2023 6 - 7 September 2023	Online Online

Penilaian dan Evaluasi Kinerja Komite Pemantau Risiko

Penilaian dan evaluasi kinerja Komite Pemantau Risiko menjadi kewenangan Dewan Komisaris yang dilakukan sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun sekali, mengacu pada Kinerja Komite Pemantau Risiko secara kolektif dan kinerja masing-masing anggota Komite Pemantau Risiko.

Performance Appraisal and Evaluation of the Risk Oversight Committee

The authority to appraise and evaluate the performance of the Company's Risk Oversight Committee belongs to the Board of Commissioners, and is performed a minimum of once annually, by referring to collective and individual performance of the Risk Oversight Committee.

Penilaian dan evaluasi didasarkan pada kriteria berupa pencapaian target pelaksanaan tugas yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Tahunan Komite Pemantau Risiko. Hasil penilaian tersebut menjadi bahan pertimbangan bagi Dewan Komisaris untuk mengangkat kembali dan/atau memberhentikan anggota Komite Pemantau Risiko untuk periode jabatan berikutnya.

Appraisal and evaluation are based on criteria of achieved task implementation target specified in the Annual Work Plan of the Risk Oversight Committee. The Board of Commissioners will use the resulting appraisal to decide the reappointment and/or dismissal of members of the Risk Oversight Committee for the next term of office.

SEKRETARIS DEWAN KOMISARIS

SECRETARY TO THE BOARD OF COMMISSIONERS

Profil Sekretaris Dewan Komisaris

Profile of Secretary to the Board of Commissioners



Nama <i>Name</i>	Wita Puspitarini
Usia <i>Age</i>	40 Tahun Years Old
Kewarganegaraan <i>Nationality</i>	Indonesia
Domisili <i>Domicile</i>	Jakarta
Pendidikan <i>Educational</i>	- Magister Teknologi Informasi di Universitas Indonesia (2018) Master of Information Technology, University of Indonesia (2018) - Sarjana Teknik Informatika di Sekolah Tinggi Teknologi Telkom Bandung (2007) Bachelor of Information Engineering, Telkom Institute of Technology, Bandung (2007)
Riwayat Pekerjaan <i>Work Experience</i>	- Sekretaris Dewan Komisaris PT ASDP Indonesia Ferry (2022-sekarang) Secretary to the Board of Commissioners of PT ASDP Indonesia Ferry (2022-present) - Pranata Komputer Muda pada Asisten Deputi Bidang Teknologi dan Informasi (01 April 2021-sekarang) Junior Computer Officer at Assistant Deputy for Technology and Information (01 April 2021-present) - Subkoordinator (09 Juni 2020-31 Maret 2021) Subcoordinator (09 June 2020-31 March 2021) - Kepala Subbidang Infrastruktur dan Pemeliharaan Teknologi Informasi (07 Juli 2017-08 Juni 2020) Head of Subdivision of Information Technology Infrastructure and Maintenance (07 July 2017-08 June 2020) - Kepala Subbidang Pengadaan Sumber Daya Manusia dan Manajemen Jabatan Fungsional (22 Oktober 2015-06 Juli 2017) Head of Subdivision of HR Acquisition and Functional Position Management (22 October 2015-06 July 2017)
Dasar Hukum Pengangkatan <i>Legal Basis for Appointment</i>	SK Dewan Komisaris No. 01/KOM/VIII/2022 tanggal 01 September 2022 Decree of the Board of Commissioners No. 01/KOM/VIII/2022 dated 01 September 2022
Periode Jabatan <i>Term in Office</i>	01 September 2022-sekarang 01 September 2022-present

Tugas dan Tanggung Jawab Sekretaris Dewan Komisaris

Dalam menjalankan perannya, Sekretaris Dewan Komisaris berperan sebagai pendukung utama Dewan Komisaris dalam pelaksanaan tugasnya. Tugas utama Sekretaris adalah memastikan bahwa segala aktivitas yang dilakukan oleh Dewan Komisaris sejalan dengan pedoman yang tertera dalam *Board Manual*. Tugas dan fungsi Sekretaris Dewan Komisaris yaitu sebagai berikut:

1. Melakukan manajemen administratif di sekitar lingkungan Dewan Komisaris;
2. Mengkoordinasikan pertemuan Dewan Komisaris serta dialog antara Dewan Komisaris dengan pemegang saham, Direksi, dan pihak-pihak terkait lainnya;
3. Menyediakan informasi dan data yang diperlukan oleh Dewan Komisaris dan komite-komite terkait, termasuk pemantauan implementasi keputusan, rekomendasi, dan arahan Dewan Komisaris; Menyiapkan materi administratif tentang laporan dan aktivitas Direksi dalam mengelola Perusahaan; Memberikan dukungan administratif dan pemantauan terkait kegiatan Direksi yang memerlukan persetujuan atau rekomendasi dari Dewan Komisaris dalam mengelola Perusahaan;
4. Menghimpun informasi teknis dari berbagai komite dan tenaga ahli yang berkaitan dengan Dewan Komisaris untuk kepentingan Dewan Komisaris. Sebagai bagian dari tanggung jawabnya, Sekretaris Dewan Komisaris harus memastikan dokumen-dokumen terkait administrasi tersebut tersimpan secara tertib di Perusahaan, mematuhi standar administrasi yang baik, serta mempromosikan praktik GCG.

Pelaksanaan Tugas Sekretaris Dewan Komisaris

Sekretaris Dewan Komisaris memainkan peran yang sangat signifikan dalam mendukung pelaksanaan tugas Dewan Komisaris dan memastikan efektivitas pengawasan sesuai dengan prinsip-prinsip GCG. Fungsi utama Sekretaris Dewan Komisaris

Duties and Responsibilities of the Secretary to the Board of Commissioners

In performing the role, the Secretary of the Board of Commissioners mainly support the Board of Commissioners in their duties. The Secretary's primary task is ensure activities carried out by the Board of Commissioners aligns with the Board Manual. The duties and roles of the Secretary to the Board of Commissioners are as follows:

1. Complete administrative management in relation to the Board of Commissioners;
2. Coordinate Board of Commissioners meetings and dialogue between the Board of Commissioners and shareholders, Directors, and other related parties;
3. Prepare information and data required by the Board of Commissioners and related committees, including monitoring the implementation of decisions, recommendations and directions from the Board of Commissioners; Prepare administrative reports and activities of the Board of Directors in managing the Company; Provide administrative and monitoring support related to the Board of Directors' management activities that require approval or recommendation from the Board of Commissioners;
4. Gather technical information from various committees and senior advisors in related to and for the benefit of the Board of Commissioners. The Secretary to the Board of Commissioners has responsibility to ensure that relevant administrative documents are inventoried in an orderly manner in the Company, according to standard administrative and GCG practices.

Implementation of the Duties of Secretary to the Board of Commissioners

The Secretary to the Board of Commissioners carries a significant role in supporting the Board of Commissioners' duties and ensuring the supervisory effectiveness as set in GCG principles. The Secretary's primary role to the Board of Commissioners assists

tidak hanya membantu Dewan Komisaris dalam menjalankan tugasnya, namun juga memastikan bahwa proses pengawasan dijalankan secara profesional dan efisien.

Pada tahun 2023, Sekretaris Dewan Komisaris telah melibatkan diri secara aktif dalam berbagai aspek tugasnya yang dapat dilihat lebih rinci sebagai berikut:

1. Mengurus, menyimpan, dan mengadministrasikan dokumen serta surat-menyurat Dewan Komisaris, termasuk menyiapkan persetujuan dan masukan/saran strategis dari Dewan Komisaris yang diberikan kepada Direksi;
2. Menyusun Laporan Pelaksanaan Tugas Dewan Komisaris tahun 2023;
3. Mengoordinasikan dan menyelenggarakan rapat Dewan Komisaris, mencakup penyusunan jadwal, materi, serta pengelolaan risalah rapat, sambil memantau tindak lanjut terhadap saran dan pandangan Dewan Komisaris;
4. Menyediakan data dan informasi yang dibutuhkan oleh Dewan Komisaris dan komite-komite di lingkungan Dewan Komisaris;
5. Mendampingi Dewan Komisaris dalam memantau dan mengevaluasi kinerja cabang;
6. Membantu dan mendukung tugas komite-komite di bawah Dewan Komisaris sesuai dengan peraturan yang berlaku, termasuk pemantauan Rencana Kerja dan memastikan penyelesaian laporan komite-komite di bawah Dewan Komisaris;
7. Menyusun Rencana Kerja Dewan Komisaris untuk tahun 2023.

them in carrying out their duties and ensures professional and efficient conduct in supervision process.

In 2023, the Secretary to the Board of Commissioners actively involved in various aspects of duties, which are detailed below:

1. Manage, store and administer documents and correspondence from the Board of Commissioners, including preparing approval and strategic advice from the Board of Commissioners to be passed to the Board of Directors;
2. Prepare Reports on the Implemented Duties of the Board of Commissioners for 2023;
3. Coordinate and organize the Board of Commissioners meetings, covering scheduling, draft material, and prepare meeting reports, followed by monitoring follow-up on suggestions and opinions from the Board of Commissioners;
4. Provide data and information required by the Board of Commissioners and committees under the Board of Commissioners;
5. Assist the Board of Commissioners in monitoring and evaluating branch offices performances;
6. Assist and support the committees under the Board of Commissioners in accordance with applicable regulations, including monitoring Work Plans and ensuring reports completion from the committees under the Board of Commissioners;
7. Prepare the Board of Commissioners' Work Plan for 2023.

Remunerasi Sekretaris Dewan Komisaris

Remunerasi bagi Sekretaris Dewan Komisaris dapat mencakup berbagai bentuk penerimaan, termasuk tetapi tidak terbatas pada honorarium, fasilitas, tunjangan, dan/atau insentif kerja. Besarnya pemberian ini akan diatur oleh Dewan Komisaris dengan mempertimbangkan kapabilitas finansial Perusahaan dengan tetap mematuhi ketentuan hukum yang berlaku. Adapun penetapan nilai remunerasi tersebut menjadi suatu keputusan yang melibatkan pertimbangan seksama terhadap berbagai

Remuneration for the Secretary to the Board of Commissioners

Remuneration for the Secretary to the Board of Commissioners may include various forms of income, including but not limited to honorarium, facilities, benefits and/or work incentives. The amount awarded is determined by the Board of Commissioners by taking into account the Company's financial capabilities while staying compliant with applicable law. Determining the nominal value of the remuneration is a decision that involves careful consideration of various factors, including individual performance,

faktor, termasuk kinerja individu, kontribusi strategis terhadap tujuan Perusahaan, serta kepatuhan terhadap norma-norma perundang-undangan yang berlaku.

Dalam konteks ini, Dewan Komisaris berkomitmen untuk memastikan bahwa kebijakan remunerasi yang diterapkan mencerminkan prinsip transparansi, keadilan, dan keberlanjutan finansial Perusahaan. Selanjutnya, untuk mencapai tingkat efektivitas optimal, Dewan Komisaris juga berwenang untuk merevisi dan menyesuaikan skema remunerasi sesuai dengan dinamika internal dan eksternal Perusahaan serta perubahan dalam regulasi perundang-undangan.

Penilaian dan Evaluasi Kinerja Sekretaris Dewan Komisaris

Evaluasi terhadap prestasi Sekretariat Dewan Komisaris dilakukan setiap tahun dengan menggunakan metode yang ditetapkan oleh Dewan Komisaris. Penilaian ini dilaksanakan secara rutin, berdasarkan pada pencapaian nyata dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab yang melekat pada peran Sekretaris Dewan Komisaris. Tujuan dari evaluasi kinerja ini adalah untuk memastikan bahwa Sekretaris Dewan Komisaris dapat menjalankan tugasnya dengan efektif dan efisien, sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh Dewan Komisaris. Evaluasi tersebut sejalan dengan upaya untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan fungsi Sekretariat Dewan Komisaris, yang pada akhirnya akan mendukung kinerja keseluruhan Dewan Komisaris.

strategic contribution to the Company's goals, as well as compliance with applicable laws.

In this context, the Board of Commissioners is committed to ensure that the remuneration policy reflects the Company's principles of transparency, fairness and financial sustainability. Furthermore, to achieve optimum effectiveness, the Board of Commissioners is authorized to revise and adjust the remuneration scheme in accordance with the Company's internal and external dynamics as well as changes in regulations.

Performance Appraisal and Evaluation of the Secretary to the Board of Commissioners

Accomplishment of the Secretary to the Board of Commissioners is evaluated annually using methods established by the Board of Commissioners. The appraisal is carried out regularly, based on substantiated achievements resulted from responsibilities embedded in the role of Secretary to the Board of Commissioners. The evaluation aims to ensure that the Secretary to the Board of Commissioners had performed the duties effectively and efficiently, according to standards set by the Board of Commissioners. The evaluation is in line with efforts to increase the effectiveness of the Secretary's role, which will ultimately affect the Board of Commissioners' overall performance.

ORGAN PENDUKUNG DIREKSI

SUPPORTING ORGANS OF THE BOARD OF DIRECTORS

SEKRETARIS PERUSAHAAN

Sekretaris Perusahaan memiliki peran krusial sebagai bagian dari organ pendukung Direksi sebagai penghubung antar organ Perusahaan dengan pihak internal maupun eksternal termasuk lembaga pemerintah, non-pemerintah dan pemegang saham. Selain menjalankan fungsi-fungsi komunikasi tersebut, Sekretaris Perusahaan juga berperan untuk mengelola aspek kesekretariatan Perusahaan, dengan tanggung jawab meliputi penyusunan kebijakan, perencanaan, serta memastikan efisiensi dan transparansi dalam setiap komunikasi dan kesekretariatan Perusahaan.

Perusahaan memiliki fungsi Sekretaris Perusahaan yang dijalankan oleh Sekretaris Perusahaan yang dipimpin oleh pejabat setingkat *Senior Vice President*. Pengangkatan dan pemberhentian Sekretaris Perusahaan menjadi kewenangan Direktur Utama yang dilakukan melalui mekanisme internal perusahaan dengan persetujuan Dewan Komisaris.

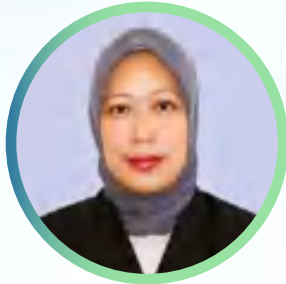
CORPORATE SECRETARY

As part of the supporting organs of the Board of Directors, the Corporate Secretary has a crucial role as a liaison between the Company's organs and internal & external parties including government institutions, non-government organisations and shareholders. Apart from taking the communication roles, the Corporate Secretary also manages the Company's secretarial aspect, with responsibilities include formulating policies, planning, and ensuring efficiency and transparency in the Company's communications and secretarial matters.

The Corporate Secretary role in the Company is carried out by Corporate Secretary, who is an executive of Senior Vice President level. The appointment and dismissal of the Corporate Secretary is within the President Director's authority that is executed through internal mechanisms with the approval of the Board of Commissioners.

Profil Sekretaris Perusahaan

Profile of Corporate Secretary



Nama <i>Name</i>	Shelvly Arifin
Usia <i>Age</i>	51 Tahun Years Old
Kewarganegaraan <i>Nationality</i>	Indonesia
Domisili <i>Domicile</i>	Jakarta
Pendidikan <i>Educational</i>	• <i>Master of Business Administration</i> di University of Grenoble (2013) <i>Master of Business Administration</i>, University of Grenoble (2013) • <i>Magister Bisnis Administrasi</i> di Universitas Indonesia (2013) <i>Master of Business Administration</i>, University of Indonesia (2013) • <i>Sarjana Ilmu Komunikasi</i> di Universitas Indonesia (2004) <i>Bachelor of Communication Science</i>, University of Indonesia (2004)
Riwayat Pekerjaan <i>Work Experience</i>	• Sekretaris Perusahaan, PT ASDP Indonesia Ferry (2020-sekarang) <i>Corporate Secretary</i>, PT ASDP Indonesia Ferry (2020-present) • VP International Business, Perum Peruri (2017) <i>VP of International Business</i>, Perum Peruri (2017) • VP <i>Creative & Marketing</i>, Shafira Corporation (2016-2017) <i>VP of Creative & Marketing</i>, Shafira Corporation (2016-2017) • Direktur, Perum Produksi Film Negara (2013-2016) <i>Director</i>, Perum Produksi Film Negara (2013-2016) • <i>General Manager</i>, PT Balai Pustaka (Persero) (2011-2012) <i>General Manager</i>, PT Balai Pustaka (Persero) (2011-2012) • <i>Directorate General of Marketing</i>, Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata Republik Indonesia (2010) <i>Directorate General of Marketing</i>, Ministry of Culture and Tourism of the Republic of Indonesia (2010) • <i>Project Manager</i>, <i>Public Relations and Cultural Events</i>, World Expo Shanghai (2010) <i>Project Manager</i>, <i>Public Relations and Cultural Events</i>, World Expo Shanghai (2010) • <i>Team Leader Special Task Force Image Building Spatial Planning</i>, Kementerian PUPR Republik Indonesia (2009) <i>Team Leader</i>, <i>Image Building Spatial Planning Special Task Force</i>, Ministry of Public Works and Public Housing of Republic of Indonesia (2009) • <i>Strategic Business Development Director</i>, PT Visi Anak Bangsa (2008-2009) <i>Strategic Business Development Director</i>, PT Visi Anak Bangsa (2008-2009) • <i>Assistant Manager Social and Environmental Affairs</i> (SEA) Indonesia & Malaysia, Adidas Group (2006-2008) <i>Assistant Manager Social and Environmental Affairs</i> (SEA) Indonesia & Malaysia, Adidas Group (2006-2008)
Dasar Hukum Pengangkatan <i>Legal Basis for Appointment</i>	Surat Keputusan Direktur Utama No. SK.852/PA.104/ASDP-2020 tanggal 08 Juli 2020 <i>Decree of President Director</i> No. SK.852/PA.104/ASDP-2020 dated 08 July 2020.
Periode Jabatan <i>Term in Office</i>	08 Juli 2020-sekarang 08 July 2020-present

Struktur Organisasi Sekretaris Perusahaan

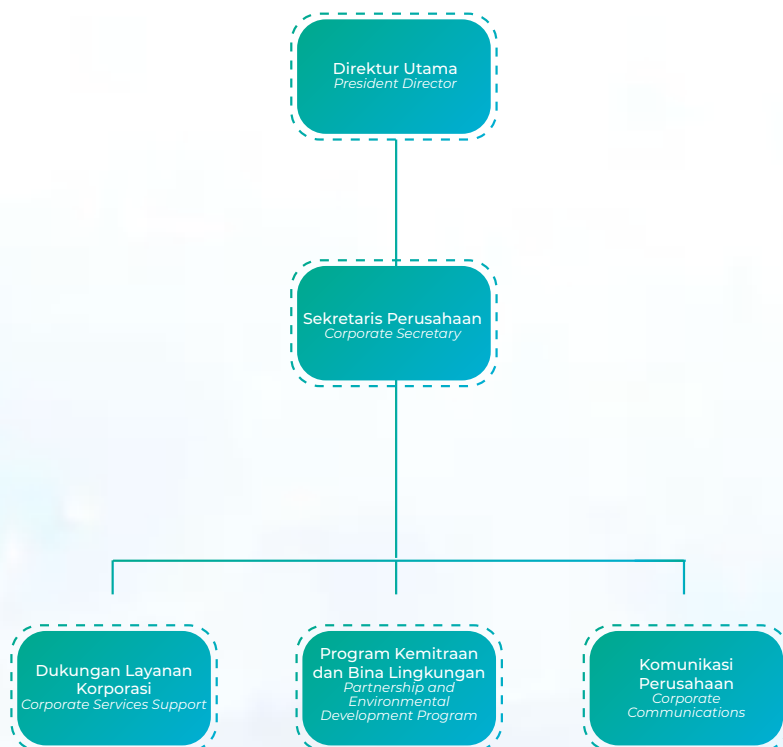
Sekretaris Perusahaan merupakan pejabat satu tingkat di bawah Direksi yang dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama. Sekretaris Perusahaan membawahi beberapa bidang kunci yang terdiri dari Bidang Dukungan Layanan Korporasi, Program Kemitraan dan Bina Lingkungan, serta Komunikasi Perusahaan.

Kedudukan Sekretaris Perusahaan ditetapkan dalam ketetapan struktur organisasi melalui Keputusan Direksi No. KD.75/HK.001/ASDP-2021, yang ditetapkan pada tanggal 16 Juli 2021, dan kemudian mengalami perubahan sebagaimana tercantum dalam Keputusan Direksi No. KD.128/HK.001/ASDP-2021, yang dikeluarkan pada tanggal 13 Desember 2021. Kedua keputusan tersebut menggambarkan perubahan dalam organisasi dan tata kerja Kantor Pusat dan Regional PT ASDP Indonesia Ferry (Persero), dengan fokus pada struktur dan tanggung jawab Sekretaris Perusahaan serta bidang-bidang yang menjadi wewenangannya.

Corporate Secretary Organizational Structure

The Corporate Secretary is an executive one level below the Directors, such that they report directly to the President Director. The Corporate Secretary oversees several key units consisting of Corporate Services Support, Partnership and Environmental Development Programs, as well as Corporate Communications.

The position of the Corporate Secretary is decided in the provisions for organizational structure through Decree of the Board Directors No. KD.75/HK.001/ASDP-2021 dated 16 July 2021, which then underwent changes as stated in Decree of the Board Directors No. KD.128/HK.001/ASDP-2021 that was issued on 13 December 2021. Both decrees describe changes in the organization and work procedures employed in the Head and Regional Offices of PT ASDP Indonesia Ferry (Persero), with a focus on the structure and responsibilities of the Corporate Secretary company and the scope of their authority.



Tugas dan Tanggung Jawab Sekretaris Perusahaan

Sebagai bagian dari organ pendukung Direksi yang memiliki peranan penting, Sekretaris Perusahaan memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

1. Melakukan pengelolaan dan koordinasi pelaksanaan layanan korporasi, program kemitraan dan bina lingkungan, penerapan prinsip GCG, serta mengurus hubungan eksternal Perusahaan.
2. Memberikan masukan yang berharga kepada Direktur Utama terkait rencana dan hasil dari kegiatan program kemitraan dan bina lingkungan, serta tata kelola perusahaan, sebagai upaya untuk memperbaiki dan mengembangkan Perusahaan.
3. Memimpin manajemen hubungan dan komunikasi dengan pihak eksternal, seperti kementerian dan pemegang saham, untuk memastikan kelancaran jalannya operasional bisnis Perusahaan.

Pedoman Kerja Sekretaris Perusahaan

Pelaksanaan fungsi Sekretaris Perusahaan mengacu pada beberapa pedoman dan peraturan yang mengatur mengenai tugas pokok, uraian tugas dan tanggung jawab serta pedoman komunikasi Perusahaan. Untuk itu pada pelaksanaannya, Sekretaris Perusahaan mengacu pada pedoman berikut:

1. Keputusan Direksi No. KD.128/ HK.001/ ASDP-2021 tanggal 13 Desember 2021 tentang Perubahan Keputusan Direksi No. KD.75/HK.001/ASDP2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pusat dan Regional PT ASDP Indonesia Ferry (Persero);
2. Peraturan Menteri BUMN No. PER-01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik;
3. Board Manual dan Peraturan Menteri BUMN No. PER-01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik.

Duties and Responsibilities of the Corporate Secretary

As a crucial part of the supporting organs of the Board of Directors, the Corporate Secretary role has the following duties and responsibilities:

1. Manage and coordinate the implementation of corporate services, partnership, and environmental development programs, application of GCG principles, and liaise with the Company's external relations.
2. Provide input to the President Director on plan and outcome of activities related to partnership and environmental development program, as well as corporate governance, in efforts to improve and expand the Company.
3. Lead the relationship and communications management with external parties, such as ministries and shareholders, to ensure the smooth running of the Company's business operations.

Company Secretary Work Guidelines

The Corporate Secretary perform their role by referring to several guidelines and regulations on primary duties, job descriptions, responsibilities as well as Company communication guidelines. In its implementation, the Corporate Secretary refers to the following guidelines:

1. Decree of the Board Directors No. KD.128/ HK.001/ASDP-2021 dated 13 December 2021 concerning Amendments to the Board Directors Decision No. KD.75/ HK.001/ASDP2021 on Organization and Work Procedures of the Head and Regional Offices of PT ASDP Indonesia Ferry (Persero);
2. Regulation of Minister of SOEs No. PER-01/MBU/2011 on The Implementation of Good Corporate Governance;
3. Board Manual and Regulation of Minister of SOEs No. PER-01/MBU/2011 on The Implementation of Good Corporate Governance.

Pelaksanaan Tugas Sekretaris Perusahaan

Seluruh program kerja dan tanggung jawab berhasil diimplementasikan oleh Sekretaris Perusahaan sepanjang tahun 2023. Dokumen laporan kinerja Sekretaris Perusahaan 2023 merinci secara komprehensif perjalanan eksekusi tugas, sesuai dengan penugasan yang terdistribusi dalam kerangka struktur organisasional. Komponen-komponen eksekusi tugas ini dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Melaksanakan *Corporate Communication*, yaitu berupa:
 - Pemantauan dan evaluasi liputan media massa untuk memahami reputasi Perusahaan,
 - Penilaian terhadap liputan berita.
2. Melaksanakan Dukungan Layanan Korporasi, yaitu berupa:
 - Pemanfaatan situs web korporasi,
 - Keterlibatan dalam dukungan sponsor,
 - Penyelenggaraan pertemuan Direksi.

Pengembangan Kompetensi Sekretaris Perusahaan

Sekretaris Perusahaan secara reguler mengikuti pengembangan kompetensi setiap tahunnya untuk memastikan pemenuhan kapabilitas dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Pada tahun 2023, Sekretaris Perusahaan mengikuti 3 program pengembangan kompetensi yaitu *Executive Leadership Development Program* (ELDP), *Qualified Risk Management Officer*, dan *In-house Training Media Handling*.

Penilaian dan Evaluasi Kinerja Sekretaris Perusahaan

Penilaian dan evaluasi kinerja Sekretaris Perusahaan dilakukan secara langsung oleh Direktur Utama merujuk pada mekanisme internal yang telah ditetapkan. Penilaian dilakukan berdasarkan indikator pencapaian target kinerja sesuai dengan kebijakan Perusahaan. Indikator-indikator pencapaian target dalam pelaksanaan tugas Sekretaris Perusahaan dipelajari secara rinci dan dirinci sebagai KPI yang telah disetujui secara bersama. Tugas-tugas khusus yang diberikan

Implementation of Corporate Secretary Duties

All work programs and responsibilities were successfully implemented by the Corporate Secretary throughout 2023. The report on 2023 Corporate Secretary performance detailed comprehensively the progress of task execution, resulted from assignments distributed within the organizational structure framework. The components of tasks execution can be described as follows:

1. Perform Corporate Communications, in the form of:
 - Monitoring and evaluation of mass media coverage to gain understanding of the Company's reputation,
 - Assessment of news coverage.
2. Implement Corporate Service Support, in the form of:
 - Utilization of corporate websites,
 - Involvement in sponsors support,
 - Organize Board of Directors meetings.

Competency Development for the Corporate Secretary

The Corporate Secretary regularly participated in annual competency development to ensure proper capabilities in carrying out the duties and responsibilities. In 2023, the Corporate Secretary participated in 3 competency development programs, namely the *Executive Leadership Development Program* (ELDP), *Qualified Risk Management Officer*, and *In-house Media Handling Training*.

Performance Appraisal and Evaluation of the Corporate Secretary

Appraisal and evaluation of the Corporate Secretary's performance is carried out by the President Director, referring to the established internal mechanisms. The appraisal is based on indicators of achieved target in accordance with the Company policy. The achieved target indicators for the Corporate Secretary's duties are examined in detail and are agreed as KPI. Specific tasks assigned by the Board of Directors are also performed by the Corporate Secretary as integral

oleh Direksi juga diemban oleh Sekretaris Perusahaan sebagai bagian integral dari tanggung jawabnya. Secara keseluruhan, pencapaian kinerja Sekretaris Perusahaan mencapai tingkat 103,80% dari KPI yang telah disetujui, dan implementasi program kerja dilakukan sesuai dengan rencana yang telah disusun dengan cermat.

SATUAN PENGAWASAN INTERNAL

Perusahaan menjalankan fungsi Audit Internal melalui Satuan Pengawasan Internal (SPI) dengan tujuan membantu organisasi dalam mencapai target yang telah ditetapkan melalui pendekatan yang sistematis dan teratur dalam mengevaluasi dan meningkatkan efektivitas proses manajemen risiko, pengendalian dan tata kelola. Sebagai bagian dari organ pendukung Direksi dalam mengelola Perusahaan, SPI memiliki peran vital terutama dalam membantu meningkatkan efisiensi dan efektivitas operasional perusahaan melalui identifikasi area-area yang memerlukan perbaikan atau peningkatan proses bisnis, pengendalian, dan pengelolaan sumber daya. SPI bukan hanya memiliki fungsi dasar, namun juga membantu Direksi dalam pengambilan keputusan yang tepat dengan menyediakan informasi yang relevan dan akurat mengenai risiko, kelemahan, dan peluang dalam operasi perusahaan. SPI juga menjalankan peran Audit internal dengan membantu perusahaan dalam mengidentifikasi, menilai, dan mengelola risiko yang dihadapi dalam menjalankan kegiatan operasionalnya. Melalui pemahaman yang mendalam mengenai berbagai risiko, SPI dapat memberikan rekomendasi untuk memperkuat sistem pengendalian internal dan mengurangi potensi kerugian bagi Perusahaan.

Keberadaan SPI sebagai eksekutor fungsi audit internal juga sejalan dengan ketaatan Perusahaan terhadap UU No. 19 Tahun 2003 mengenai BUMN, bersama dengan Peraturan Menteri Negara BUMN No. PER-02/MBU/03/2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan BUMN. SPI memiliki peranan penting dalam memastikan efektivitas penerapan GCG, manajemen risiko, kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku, pengembangan sistem manajemen Perusahaan.

part of the responsibilities. Overall, the Corporate Secretary accomplished 103.80% of the agreed KPI, and the implementation of the work program had been carried out in accordance with the carefully prepared plan.

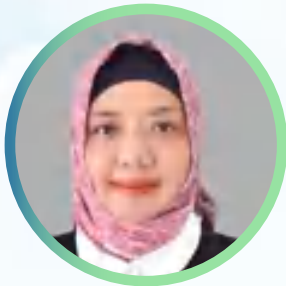
INTERNAL AUDIT UNIT

The Company assigned the Internal Audit Unit (SPI) to carry out the Internal Audit role with the objective to assist the organization in achieving the targets set through a systematic and regular approach in evaluating and improving the effectiveness of risk management, control and governance processes. As part of the Board of Directors' supporting organs in managing the Company, SPI has a vital role in helping to improve the efficiency and effectiveness of the company's operations by identifying areas of improvement in business processes, control and resource management. Aside from executing basic functions, SPI also assists the Board of Directors in decision making by providing relevant and accurate information on risks, weaknesses and opportunities in company operations. Moreover, SPI carries out the internal audit role by assisting the company in identifying, assessing and managing the risks faced in running its operational activities. Through in-depth understanding of various risks, SPI can provide recommendations to strengthen the internal control system and reduce the Company's potential losses.

SPI as executor of the internal audit function was in compliance with the Law No. 19/2003 concerning SOEs, along with Regulation of Minister of SOEs No. PER-02/MBU/03/2023 concerning Guidelines for Governance and Significant Corporate Activities of SOEs. SPI has an important role in ensuring the effectiveness of GCG implementation, risk management, compliance with applicable regulations, and development of the Company's management system.

Profil Kepala Satuan Pengawasan Internal

Profile of the Head of the Internal Audit Unit



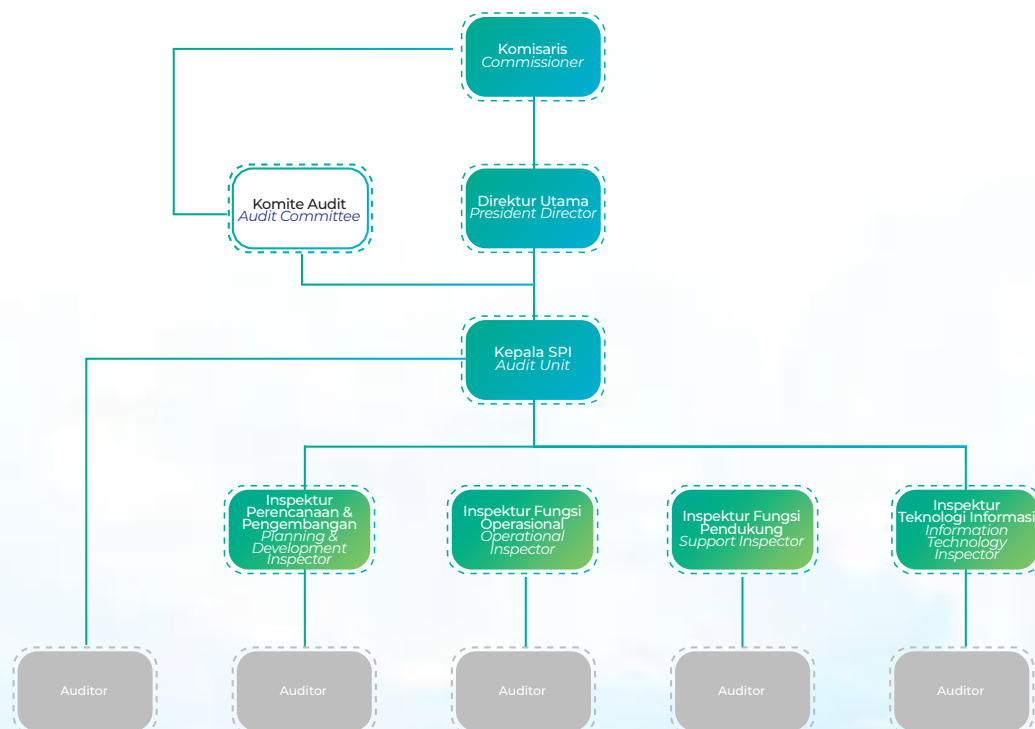
Nama <i>Name</i>	T. Damayanti
Usia <i>Age</i>	51 Tahun Years Old
Kewarganegaraan <i>Nationality</i>	Indonesia
Domisili <i>Domicile</i>	Jakarta
Pendidikan <i>Educational</i>	- Magister Manajemen di UII Yogyakarta Master of Management, UII Yogyakarta - Sarjana Akuntansi di UII Yogyakarta Bachelor of Accounting, UII Yogyakarta
Riwayat Pekerjaan <i>Work Experience</i>	- Kepala SPI, PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) (2020-sekarang) Head of Internal Audit Unit, PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) (2020-present) - Anggota DEWAS Dana Pensiun PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) (2015-sekarang) Member of Supervisory Board for Pension Funds, PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) (2015-present) - Vice President Logistik, PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) (2019-2020) VP of Logistics, PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) (2019-2020) - Vice President Bisnis Penunjang, PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) (2017-2019) VP of Supporting Business, PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) (2017-2019) - Vice President Pemantauan Penilaian Kinerja Perusahaan, PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) (2015-2017) VP for Monitoring Company Performance Assessment, PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) (2015-2017) - Vice President Usaha Penyeberangan Komersial, PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) (2013-2015) VP of Commercial Ferry Business, PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) (2013-2015) - Ketua Pembiayaan Pengadaan Kapal Ferry Ro Ro, PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) (2011-2017) Head of Procurement Financing for Ro Ro Ferry, PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) (2011-2017) - Manajer Senior Akuntansi, PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) (2006-2013) Senior Accounting Manager, PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) (2006-2013) - Plt. Manajer Senior Keuangan, PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) (2010) Acting Senior Finance Manager, PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) (2010) - Plt. Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa (2009-2010) Acting Head of Goods and Services Procurement Bureau (2009-2010)
Dasar Hukum Pengangkatan <i>Legal Basis for Appointment</i>	Surat Keputusan Direksi No. SK.210/PA104/ASDP-2020 tanggal 04 Februari 2020 Board of Directors Decree No. SK.210/PA104/ASDP-2020 dated 04 February 2020
Periode Jabatan <i>Term in Office</i>	Februari 2020-sekarang February 2020-present

Kedudukan dan Struktur Satuan Pengawasan Internal

Satuan Pengawasan Internal merupakan bagian dari struktur organisasi Perusahaan yang secara hierarkis berada di bawah naungan dan bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama. Dalam menjalankan tugasnya, SPI memiliki saluran komunikasi dengan Dewan Komisaris, baik secara langsung maupun tidak langsung melalui Komite Audit. Fungsi utama SPI adalah untuk berkoordinasi serta menyampaikan informasi terkait pelaksanaan dan hasil audit kepada pihak terkait. Terdapat prosedur yang jelas terkait kedudukan dan struktur organisasi dari Satuan Pengawasan Internal ini yang telah ditetapkan melalui Surat Keputusan Direksi No. KD.128/HK.001/ASDP-2021, yang merupakan perubahan dari keputusan sebelumnya, yaitu No. KD.75/HK.001/ASDP-2021, terkait dengan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pusat dan Regional PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) yang dikeluarkan pada tanggal 13 Desember 2021. Hal ini menegaskan bagaimana SPI berperan dalam struktur organisasi Perusahaan, menggaris-bawahi tanggung jawabnya, serta mekanisme komunikasinya dalam menyampaikan informasi audit kepada pihak terkait.

Position and Structure of the Internal Audit Unit

The Internal Audit Unit is part of the Company's organizational structure that is positioned under the supervision of and directly responsible to the President Director. In carrying out their duties, the Internal Audit Unit has direct and indirect communication channels to the Board of Commissioners, through the Audit Committee. Their main role is to coordinate and convey information on audit implementation and outcome to relevant parties. There are clear procedures for Internal Audit Unit's position and organizational structure, which was established through Decree of the Board of Directors No. KD.128/HK.001/ASDP-2021, which was amendment from Decree No. KD.75/HK.001/ASDP-2021 on Organization and Work Procedures of the Head and Regional Offices of PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) dated 13 December 2021. This affirms Internal Audit Unit's role within the Company's organizational structure, by underlining their responsibilities and communication system in conveying audit information to related parties.



Piagam Satuan Pengawasan Internal

Untuk mendukung Satuan Pengawasan Internal dalam menjalankan fungsi dan perannya, Satuan Pengawasan Internal telah dilengkapi dengan Piagam SPI yang memuat pengaturan mengenai:

1. Visi, Misi, Nilai, dan Tujuan Satuan Pengawasan Internal;
2. Struktur Organisasi, Ruang Lingkup, Tugas, dan Wewenang SPI;
3. Pedoman Standar Pelaksanaan Audit serta Hubungan Kerja Auditor dengan lingkungan eksternal yang mencakup Auditee, Auditor Eksternal, Komite Audit, serta Hubungan dengan Fungsi Penilaian Kinerja, dan Manajemen Risiko Perusahaan;
4. Kode Etik SPI yang dimaksudkan untuk mengarahkan sikap dan perilaku auditor internal dalam berinteraksi dengan internal maupun eksternal dalam melaksanakan penugasan serta dalam hubungannya dengan pihak lain.

Sesuai dengan SK.287/PA.205/ASDP-2018 tentang Piagam Satuan Pengawasan Internal PT ASDP Indonesia Ferry (Persero), pada tugas dan tanggung jawab SPI, butir m, menyebutkan menyebutkan bahwa SPI membuat dan mereview Piagam SPI dua tahun sekali. Sesuai dengan Surat Keputusan Bersama Direksi dan Dewan Komisaris PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) No. SK.488/HK.002/ASDP-2023, pada tahun 2023 SPI telah melaksanakan review dan pembaharuan Piagam Satuan Pengawasan Intern dengan memasukkan poin terkait tata kelola terintegrasi antara Satuan Pengawasan Intern Induk dengan Anak Usaha, serta adanya perubahan struktur organisasi sesuai dengan KD 75/HK.001/ASDP-2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pusat dan Regional PT ASDP Indonesia Ferry (Persero).

Pedoman Kerja Satuan Pengawasan Internal

Dalam struktur organisasi Perusahaan, SPI berperan sebagai sebuah entitas yang secara hierarkis berada di bawah naungan dan bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama. Fungsinya mencakup memiliki akses langsung ke Dewan Komisaris, baik secara langsung maupun tidak langsung melalui kerja sama dengan Komite Audit, untuk melakukan koordinasi dan menyampaikan informasi terkait

Internal Audit Charter

To support the Internal Audit Unit in carrying out their roles, they were equipped with an Internal Audit Charter which contains regulations regarding:

1. Vision, Mission, Values, and Objectives of the Internal Audit Unit;
2. Organizational Structure, Scope, Duties, and Authorities;
3. Guidelines for Audit Implementation Standards, and Auditor Working Relations with the external parties that includes Auditees, External Auditors, Audit Committees, Performance Appraisal, and Risk Management Team;
4. The Internal Audit Code of Conduct guides the internal auditors' conduct and behavior in interacting with internal and external parties in completing assignments and in their general relations with other parties.

According to SK.287/PA.205/ASDP-2018 on the Internal Audit Charter of PT ASDP Indonesia Ferry (Persero), section Duties and Responsibilities of Internal Audit Unit, point m, it is stated that Internal Audit Unit reviews the Internal Audit Charter every two years. In accordance with the Joint Decree of the Boards of Directors and Commissioners of PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) No. SK.488/HK.002/ASDP-2023, in 2023 SPI had reviewed and renewed of the Internal Audit Charter, by adding items related to integrated governance between the Holding's and the Subsidiaries' Internal Audit Unit as well as changes in the organizational structure in line with KD 75/HK.001/ASDP-2021 concerning the Organization and Work Procedures of the Head and Regional Offices of PT ASDP Indonesia Ferry (Persero).

Internal Audit Unit Work Guidelines

In the Company's organizational structure, the Internal Audit Unit acts as an entity that is hierarchically under the supervision of and directly responsible to the President Director. The role allows direct access to the Board of Commissioners, and indirect access through collaboration with the Audit Committee, to coordinate and inform audit implementation and outcome. The Internal Audit Charter was

pelaksanaan serta hasil audit yang dilakukan. Piagam Satuan Pengawasan Internal ditetapkan berdasarkan keputusan Surat Keputusan Bersama Direksi dan Komisaris Nomor SKB.325/HK.002/ASDP-2022 tentang Piagam Satuan Pengawasan Intern.

Tugas dan Tanggung Jawab Satuan Pengawasan Internal

Satuan Pengawasan Internal memiliki tanggung jawab utama untuk memastikan bahwa semua aktivitas yang terkait dengan manajemen Perusahaan dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang berlaku serta mengacu pada praktik terbaik yang dapat mendukung kelangsungan operasional Perusahaan. Tanggung jawab ini mencakup aspek-aspek berikut:

1. Mengawasi penyusunan dan pengelolaan RKAP untuk Audit Internal;
2. Merumuskan kebijakan dan strategi pengawasan internal serta bertanggung jawab atas perencanaan dan pelaksanaan audit terkait aktivitas Perusahaan sesuai regulasi yang berlaku;
3. Menetapkan kebijakan dan strategi serta memiliki tanggung jawab terhadap pengembangan sistem manajemen dan pengendalian dokumen Perusahaan;
4. Menjalankan audit sesuai dengan Program Kerja Pemeriksaan Tahunan (PKPT) yang telah ditetapkan, mencakup bidang Teknik, Fasilitas, Operasional, Komersial, Sumber Daya Manusia, K2L, Pemasaran, Keuangan, Administrasi, dan *General Affairs*;
5. Mengoordinasikan audit khusus yang di luar PKPT berdasarkan instruksi Direksi;
6. Mengatur dan meninjau Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) untuk setiap kegiatan audit yang telah dilakukan;
7. Mengatur distribusi Laporan Hasil Audit (LHA) kepada Direksi dan Komite Audit serta memenuhi permintaan dari pihak terkait dengan persetujuan Direksi.
8. Mengawasi pendampingan kepada auditor eksternal;
9. Memantau untuk memastikan tindak lanjut atas rekomendasi hasil audit, baik dari audit internal maupun eksternal.
10. Melakukan evaluasi terhadap mutu kegiatan audit internal dan mengevaluasi sistem serta prosedur audit;
11. Memberikan konsultasi independen dan objektif kepada Komite Audit terkait

established based on the Joint Decree of the Boards of Directors and Commissioners No. SKB.325/HK.002/ASDP-2022 concerning Internal Audit Charter.

Duties and Responsibilities of the Internal Audit Unit

The Internal Audit Unit is responsible for ensuring every management activities carried out in the Company complies with applicable regulations and employs best practices that support the continuity of the Company's operations. This responsibility includes the following aspects:

1. Oversee the preparation and management of WPB for Internal Audit;
2. Formulate internal monitoring policies and strategies and be responsible for planning and implementing audits related to Company activities in accordance with applicable regulations;
3. Set policies and strategies and take responsibility in the development of the Company's management system and document control;
4. Execute audits in accordance with the established Annual Audit Work Program (PKPT) on Engineering, Facilities; Operations; Commercial; Human Resources; Safety, Health and Environment (K2L); Marketing; Finance; Administration; and General Affairs;
5. Coordinate specific audits outside PKPT, following instructions from the Board of Directors;
6. Organize and review the Examination Result Reports following each audit.
7. Manage the distribution of Audit Result Reports to the Board of Directors and Audit Committee and complete requests from related parties with the Board of Directors' approval;
8. Oversee assistance to external auditors;
9. Monitor to ensure follow-up to audit recommendations, both from internal and external audits;
10. Evaluate the quality of internal audit activities, systems and procedures;
11. Provide independent and objective consultation to the Audit Committee regarding the supervisory function.

fungsi pengawasan.

Kode Etik dan Pernyataan Independensi Auditor Satuan Pengawasan Internal

Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, Satuan Pengawasan Internal memiliki kode etik yang harus diterapkan dalam setiap pelaksanaan kegiatannya yang mengacu pada standar internasional Praktik Profesional Audit Internal (*International Professional Practices Framework*, IPPF) yang dikeluarkan oleh *Institute of Internal Auditors* (IIA). Prinsip-prinsip kode etik yang harus dipatuhi oleh auditor internal adalah sebagai berikut:

Integritas

Integritas auditor internal dalam membangun kepercayaan dan memberikan dasar untuk mengandalkan penilaian mereka.

Objektivitas

Auditor internal menunjukkan tingkat objektivitas profesional tertinggi dalam mengumpulkan, mengevaluasi, dan mengkomunikasikan informasi tentang aktivitas atau proses yang diperiksa. Auditor internal melakukan penilaian yang seimbang dan objektif atas seluruh kondisi yang relevan dan tidak dipengaruhi oleh kepentingan mereka sendiri atau pihak lain dalam mengambil keputusan.

Kerahasiaan

Auditor internal menghormati nilai dan kepemilikan informasi yang mereka terima dan tidak mengungkapkan informasi tanpa izin yang sesuai kecuali terdapat kewajiban hukum atau profesional untuk melakukannya.

Kompetensi

Auditor internal menerapkan pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman yang diperlukan dalam melaksanakan proses audit internal.

Komposisi dan Kualifikasi Auditor Satuan Pengawasan Internal

Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab sampai dengan 31 Desember 2023, Satuan Pengawasan Internal beranggotakan 23 orang yang telah memenuhi persyaratan, kualifikasi dan kompetensi yang dipersyaratkan untuk menjadi anggota Satuan Pengawasan Internal, dengan rincian sebagai berikut:

Code of Conduct and Statement of Independence from Auditors of Internal Audit Unit

In carrying out their duties and responsibilities, the Internal Audit Unit follows Code of Conduct in their every activities that refers to the standards of International Professional Practices Framework (IPPF) issued by The Institute of Internal Auditors (IIA). The Code of Conduct principles that must be adhered to by internal auditors are as follows:

Integrity

The integrity of internal auditors builds trust and serves as a foundation for confidence in their assessment.

Objectivity

Internal auditors demonstrate the highest level of professional objectivity in collecting, evaluating, and communicating information about the activities or processes being examined. Internal auditors carry out a balanced and objective assessment of all relevant conditions and are not influenced by interests of their own or other parties in making decisions.

Confidentiality

Internal auditors respect the value and ownership of the information they receive and do not disclose information without appropriate authorization except for legal or professional obligation.

Competence

Internal auditors apply the knowledge, skills and experience necessary to carry out the internal audit process.

Composition and Qualifications of Auditors in Internal Audit Unit

As of 31 December 2023, the Internal Audit Unit consisted of 23 people who have fulfilled the requirements, qualifications and competencies to be members of the Internal Audit Unit, with the following details:

No	Nama Name	Jabatan Position	Pendidikan Education
1.	Theresia Damayanti	Kepala SPI Head of Internal Audit Unit	Sarjana Akuntansi, Magister Manajemen Bachelor of Accounting, Master of Management
2.	Anis Adinizam	Inspektur Inspector	Sarjana Ilmu Komunikasi, Magister Manajemen, Magister Administrasi Bisnis Bachelor of Communication Science, Master of Management, Master of Business Administration
3.	Imran Kuru	Inspektur Inspector	Sarjana Teknik Perkapalan Bachelor of Marine Engineering
4.	Siti Rosyanti	Inspektur Inspector	Sarjana Manajemen Keuangan dan Perbankan Bachelor of Financial Management and Banking
5.	Alvius D. Bago	Inspektur Inspector	Sarjana Manajemen Bachelor of Management
6.	Bayu Susilo	Auditor	Sarjana Teknik Perkapalan, Magister Business Administration Bachelor of Marine Engineering, Master of Business Administration
7.	Wahyu Jefri Perwira M.	Auditor	Sarjana Manajemen Bachelor of Management
8.	Bagus Gelis Pratama Putra	Auditor	Sarjana Teknik Perkapalan Bachelor of Marine Engineering
9.	Didi Juliansyah	Auditor	Sarjana Teknik Informatika, Magister Manajemen Bachelor of Information Technology, Master of Management
10.	Mohamad Rivai	Auditor	Sarjana Manajemen Pemasaran Bachelor of Marketing Management
11.	Indriasari Purboningrum	Auditor	Sarjana Ilmu Komunikasi Bachelor of Communication Science
12.	Budi Yanto	Auditor	Sarjana Akuntansi Bachelor of Accounting
15.	Febrinayanti	Auditor	Sarjana Akuntansi Bachelor of Accounting
16.	M. Farid Fanani	Auditor	Sarjana Akuntansi Bachelor of Accounting
17.	Rahmadian Martha Stania	Auditor	Sarjana Ilmu Komunikasi Bachelor of Communications
19.	Achmad Sunedi	Auditor	Sarjana Hukum Bachelor of Law
20.	Abdus Syukur	Auditor	

Satuan Pengawasan Internal juga memiliki 27 personil auditor yang telah memiliki sertifikasi terkait dengan tugas dan tanggung jawabnya sebagai auditor internal, dengan rincian sebagai berikut:

The Internal Audit Unit also has 27 auditors to perform their duties and responsibilities as internal auditors, with the following details:

No	Sertifikasi Certification	Jumlah Personel Tersertifikasi Number of Certified Personnel
1.	Professional Internal Audit (PIA)	3
2.	Sertifikasi Auditor Madya <i>Associate Auditor Certificate</i>	1
3.	Sertifikasi Auditor Muda <i>Senior Auditor Certificate</i>	11
4.	Certified Internal Audit Executive (CIAE)	5
5.	Qualified Chief Risk Officer (QCRO)	3
6.	Qualified Risk Management Officer (QRMO)	1
7.	Qualified Risk Management Professional (QRMP)	3

Pada tahun 2023, Satuan Pengawasan Internal mengalami perubahan komposisi personal auditor internal berdasarkan Surat Keputusan Direksi, dengan rincian sebagai berikut:

In 2023, the Internal Audit Unit experienced changes in the composition of internal auditors as structured in the Decree of the Board of Directors, with the following details:

Nama Name	Jabatan Position	Pendidikan Education	No. SK Decree No.	Keterangan Notes
Alvius D. Bago	Inspektur <i>Inspector</i>	Sarjana Manajemen <i>Bachelor of Management</i>	SK.205/PA.207/ASDP-2023	Cuti Sakit <i>Medical Leave</i>
Gunawan	Auditor	Sarjana <i>Bachelor Degree</i>	SK.58/PA.303/ASDP-2023	Pensiun <i>Retired</i>
Takari	Auditor	-	SK.543/PA.303/ASDP-2023	Pensiun <i>Retired</i>
Samiun	Auditor	Sarjana Manajemen <i>Bachelor of Management</i>	SK.820/PA.303/ASDP-2023	Pensiun <i>Retired</i>
Mety Susila	Auditor	-	SK.889/PA.104/ASDP-2023	Rotasi <i>Rotated</i>
Muda Prastya Dwi Siswanto	Auditor	Sarjana Psikologi <i>Bachelor of Psychology</i>	SK.889/PA.104/ASDP-2023	Promosi <i>Promoted</i>
Tanti Mardianti	Manager	Sarjana Teknik Industri <i>Bachelor of Industrial Engineering</i>	SK.889/PA.104/ASDP-2023	Rotasi <i>Rotated</i>
Marthen Yacob Lakahing	Manager	Sarjana Manajemen <i>Bachelor of Management</i>	SK.889/PA.104/ASDP-2023	Rotasi <i>Rotated</i>

Laporan Pelaksanaan Kegiatan Satuan Pengawasan Internal

Sepanjang tahun 2023, Satuan Pengawasan Internal telah menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dalam memastikan proses bisnis di Perusahaan telah berjalan sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku baik secara internal maupun eksternal. Kegiatan yang telah dijalankan sepanjang tahun 2023 di antaranya adalah:

1. Program Kerja Pemeriksaan Tahunan (PKPT) yang terdiri dari kegiatan pengawasan dengan ruang lingkup Kantor Cabang dan Kantor Pusat;
2. Monitoring tindak lanjut atas temuan kegiatan PKPT dan eksternal auditor;
3. Quality assurance SPI;
4. Jasa konsultasi;
5. Kegiatan pemeriksaan auditor eksternal Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI).

Program Kerja Pemeriksaan Tahunan (PKPT)

Pelaksanaan PKPT dilaksanakan dengan metode kegiatan site visit ke cabang. Sepanjang tahun 2023, Satuan Pengawasan Internal telah melakukan audit terhadap 16 (enam belas) cabang, dengan rincian sebagai berikut:

Internal Audit Unit Activity Report

Throughout 2023, the Internal Audit Unit carried out their duties and responsibilities in ensuring that business processes in the Company had run in compliance with applicable internal and external regulations. Activities carried out throughout 2023 include:

1. Annual Audit Work Program (PKPT), which is supervisory activities of Head and Branch Offices;
2. Monitored follow-up on the findings of PKPT and external auditor;
3. Internal Audit Unit quality assurance;
4. Consultation services;
5. Examination activities of the external auditor, The Audit Board of the Republic of Indonesia (BPK-RI).

Annual Audit Work Program

Implementation of the Annual Audit Work Programs was conducted upon site visits to branch offices. Throughout 2023, the Internal Audit Unit has conducted audits of 16 (sixteen) branches, with the following details:

Periode Period	Kantor Cabang Branch Office	Regional	Tanggal Pelaksanaan Date	Metode Method
Triwulan II Quarter II	Cabang Branch Luwuk	IV	5-10 April 2023	Site visit
	Cabang Branch Batulicin	II	5-10 April 2023	Site visit
	Cabang Branch Padang	I	10-15 April 2023	Site visit
	Cabang Branch Bangka	I	14-19 Mei 2023 14-19 May 2023	Site visit
	Cabang Branch Bau Bau	III	14-19 Mei 2023 14-19 May 2023	Site visit
	Cabang Branch Kayangan	III	21-26 Mei 2023 21-26 May 2023	Site visit
Triwulan III Quarter III	Cabang Branch Merauke	IV	2-7 Juli 2023 2-7 July 2023	Site visit
	Cabang Branch Selayar	III	4-9 Juli 2023 4-9 July 2023	Site visit
	Cabang Branch Bajoe	II	5-10 Juli 2023 5-10 July 2023	Site visit
	Cabang Branch Sape	III	17-22 Juli 2023 17-22 July 2023	Site visit
	Cabang Branch Batam	I	19-24 Juli 2023 19-24 July 2023	Site visit
Triwulan IV Quarter IV	Cabang Branch Bitung	IV	16-20 Oktober 2023 16-20 October 2023	Site visit & Desk Audit
	Cabang Branch Kupang	III	26-31 Oktober 2023 26-31 October 2023	Site visit & Desk Audit
	Cabang Branch Ambon	IV	30 Oktober-4 November 2023 30 October-4 November 2023	Site visit & Desk Audit
	Cabang Branch Merak	I	15-20 November 2023	Site visit & Desk Audit
	Cabang Branch Bakauheni	I	15-20 November 2023	Site visit & Desk Audit

PKPT dilaksanakan untuk memperbaiki operasional dan menciptakan nilai tambah bagi Perusahaan melalui pendekatan sistematis dalam mengidentifikasi, mengevaluasi dan memberikan rekomendasi terkait efektivitas proses bisnis, pengendalian internal, manajemen risiko dan tata kelola perusahaan. Rekomendasi yang diberikan bertujuan untuk meningkatkan kualitas penerapan tata kelola perusahaan bukan hanya di kantor cabang melainkan untuk Perusahaan secara keseluruhan.

Berdasarkan hasil audit yang dilakukan di 16 (enam belas) kantor cabang, Perusahaan perlu melakukan evaluasi dan penyempurnaan prosedur maupun kebijakan terkait dengan aktivitas yang dilakukan oleh Kantor Pusat maupun Kantor Cabang terutama pada proses terkait dengan operasional pelabuhan dan penyeberangan, pengelolaan keuangan, sumber daya manusia, pengadaan barang dan jasa.

Quality Assurance Satuan Pengawasan Internal

Dalam rangka meningkatkan kualitas dan kapabilitas auditor SPI maupun fungsi dan peran dari SPI, Perusahaan melaksanakan *assessment Quality Assurance* yang dilakukan oleh pihak independen yaitu Konsultan Deloitte. Proses *assessment Quality Assurance* dilakukan sesuai dengan standar IPPF-IIA untuk memastikan kesesuaian proses dengan *best practices* dan standar internasional.

Berdasarkan hasil *assessment* yang dilakukan, keseluruhan aktivitas dari Satuan Pengawasan Internal Perusahaan mencapai tingkat kesesuaian "Sebagian Sesuai" dengan standar yang berlaku. Hasil tersebut menunjukkan bahwa SPI Perusahaan masih memiliki area-area peningkatan untuk memenuhi kesesuaian dengan standar IIA. Dari 51 poin standar IIA, hasil *assessment* menunjukkan hasil sebagai berikut:

- 32 poin Telah Sesuai secara Umum
- 10 poin Sebagian Sesuai
- 2 poin Tidak Sesuai
- 7 poin *Not Applicable*

The Annual Audit Work Program is intended to improve operations and create added value for the Company using a systematic approach in identifying, evaluating and providing recommendations on the effectiveness of business processes, internal control, risk management and corporate governance. The recommendations proposed were aimed to improve the quality of corporate governance implementation not only in branch offices but also for the Company as a whole.

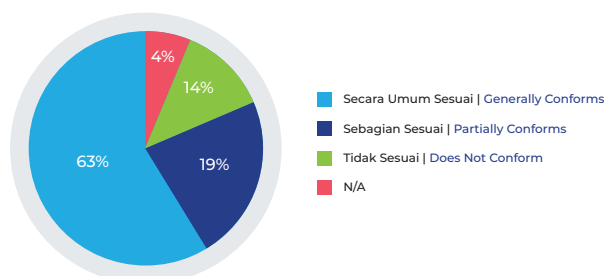
The audit result from 16 (sixteen) branch offices revealed that the Company needs to evaluate and improve procedures and policies related to activities carried out by the Head Office and Branch Offices, especially on processes related to port and ferry operations, financial management, human resources, procurement of goods and services.

Quality Assurance Internal Audit Unit

In order to improve the quality and capability of both the auditors as well as the function and roles, the Company ran a Quality Assurance assessment by an independent party, Deloitte Consulting. The Quality Assurance assessment was performed with IPPF-IIA standards to ensure conformity to best practices and international standards.

Based on the results of the assessment carried out, summed activities of the Company's Internal Audit Unit achieved "Partially Compliant" level of conformity with applicable standards. These results indicated that the Company's Internal Audit Unit still has areas of improvement to meet IIA standards. Of the standard 51 IIA points, the assessment results showed the following:

- 32 points *Generally Conforms*
- 10 points *Partially Conforms*
- 2 points *Does Not Conform*
- 7 points *were Not Applicable*



Fungsi Konsultatif Satuan Pengawasan Internal

Salah satu peran Satuan Pengawasan Internal adalah sebagai *business partner* dengan peran memberikan konsultasi dan pembinaan kepada unit kerja. Fungsi konsultasi dilakukan untuk meningkatkan nilai tambah bagi Perusahaan serta untuk perbaikan kualitas pengendalian internal, pengelolaan risiko dan penerapan tata kelola perusahaan untuk seluruh aspek bisnis dan operasional yang dijalankan oleh Perusahaan. Sepanjang tahun 2023, SPI telah memberikan konsultasi kepada 13 (tiga belas) pihak yang terdiri dari unit kerja, *project*, kantor cabang dan anak perusahaan, dengan rincian sebagai berikut:

Consultative Role of the Internal Audit Unit

One of the roles of Internal Audit Unit fills is a business partner who provides consultation and guidance to work units. The consulting action is taken to increase the Company's added value as well as to improve the quality of internal control, risk management and corporate governance implementation for all business and operational aspects in the Company. Throughout 2023, Internal Audit Unit provided consultations to 13 (thirteen) parties consisted of work units, projects, branch offices and subsidiaries, with the following details:

No	User	Topik Pembahasan Discussion Topic	Tanggal Date
1.	Divisi Manajemen Risiko Risk Management Division	Evaluasi pengendalian risiko korporat 2022 dan diskusi risiko korporat 2023. Evaluation of corporate risk control 2022 and discussion of corporate risk 2023.	6 Januari 2023 6 January 2023
2.	Divisi Keuangan & Perbendaharaan Finance & Treasury Division	Tindak lanjut penyelesaian PUK pada Fidias VI. Follow-up on PUK completion on Fidias VI.	25 Januari 2023 25 January 2023
3.	a. Divisi Keuangan & Perbendaharaan Finance & Treasury Division b. Divisi Akuntansi Accounting Division c. Divisi Optimalisasi Manajemen Armada Fleet Management Optimization Division	Pembahasan terkait masalah faktur pajak vendor. Discussion on vendor tax invoice issues.	13 Februari 2023 13 February 2023
4.	Bakauheni Harbour City (BHC) Project	Telaah model kerja sama Pengelolaan Masjid BSI Bakauheni dengan PT Bank Syariah Indonesia Maslahat dalam serah terima dan pengelolaan aset berupa bangunan masjid BSI Bakauheni. Review of cooperation model for BSI Bakauheni Mosque Management with PT Bank Syariah Indonesia Maslahat in handing over and managing assets, which is the BSI Bakauheni mosque building.	21 Maret 2023 21 March 2023
5.	Kantor Cabang Aceh Aceh Branch Office	Evaluasi penjualan tiket manual. Evaluate manual ticket sales.	23 Juni 2023 23 June 2023
6.	Divisi Supply Chain Management (SCM) SCM Division	Koordinasi P3DN. Coordination for Increased Use of Domestic Products.	05 September 2023
7.	Divisi Optimalisasi Manajemen Armada Fleet Management Optimization Division	Monitoring temuan bidang Teknik tahun 2023. Monitor findings in the Engineering sector in 2023.	21 Agustus 2023 21 August 2023
8.	Divisi Pengelolaan SDM HR Management Division	Upaya penyelesaian piutang pegawai. Efforts to settle employee receivables.	3 November 2023

No	User	Topik Pembahasan Discussion Topic	Tanggal Date
9.	Divisi Optimalisasi Manajemen Pelabuhan Port Management Optimization Division	Mekanisme Sistem SAP dan Fidias pada Pekerjaan Peningkatan Dermaga II Pelabuhan Merak & Dermaga Ponton menjadi <i>Movable Bridge</i> . <i>SAP and Fidias System Mechanism in the Work to Improve Pier II at Merak Port & Pontoon Pier into a Movable Bridge.</i>	9 November 2023
10.	Divisi Komersial Commercial Division	Upaya penyelesaian piutang usaha. <i>Efforts to settle trade receivables.</i>	10 November 2023
11.	Divisi Pengelolaan Properti & Umum Property & General Management Division	Permasalahan lahan tanah di Waingapu, Cabang Kupang. <i>Land issues in Waingapu, Kupang Branch.</i>	14 November 2023
12.	Divisi Keperintisan Pioneering Division	Review draft surat ke Dirjen Perhubungan Darat terkait Keperintisan. <i>Review the draft letter to the Director General of Land Transportation regarding Pioneering.</i>	16 November 2023
13.	Kantor Cabang Biak Biak Branch Office	Pembahasan penyelesaian pembayaran <i>outstanding</i> Cabang Biak tahun 2018 sd tahun 2021. <i>Discussed settlement of outstanding payments for Biak Branch from 2018 to 2021.</i>	27 November 2023
14.	Divisi Akuntansi Accounting Division	Pencatatan biaya BBM bunker di Cabang Merak, Bakauheni dan Ketapang. <i>Data log of bunker fuel costs at Merak, Bakauheni and Ketapang Branches.</i>	6 Desember 2023 6 December 2023
15.	PT Jembatan Nusantara	Issue temuan KAP tahun 2023 pada Jembatan Nusantara. <i>Issue of KAP findings in 2023 on the Jembatan Nusantara.</i>	7 Desember 2023 7 December 2023

Infrastruktur Sistem Manajemen Audit Internal

Satuan Pengawasan Internal memiliki peranan dalam *Governance, Risk and Control* (GRC) di lingkungan Perusahaan melalui sejumlah proses tata kelola yang dijalankan. Tata kelola yang berjalan di Satuan Pengawasan Internal meliputi seluruh tahapan mulai dari perencanaan program tahunan audit (PKPT), perencanaan penugasan audit, pelaksanaan audit, pelaporan audit serta pemantauan tindak lanjut audit. Salah satu tantangan yang dihadapi adalah memastikan dokumentasi dari mulai tahapan perencanaan hingga tindak lanjut audit dapat terdokumentasi dengan baik serta terintegrasi secara menyeluruh, sehingga memastikan akurasi, validitas dan kelengkapan informasi yang terjaga.

Untuk itu, Satuan Pengawasan Internal mendesain aplikasi Sistem Manajemen Audit Internal (SMAIL) sebagai infrastruktur penunjang untuk memastikan pengelolaan data, dokumen dan informasi yang terintegrasi. Aplikasi SMAIL dapat mengintegrasikan proses audit internal dari mulai perencanaan proses audit berdasarkan *Risk Based Audit* (RBA) hingga pengawasan

Infrastructure of Internal Audit Management System

The Internal Audit Unit has a role in Governance, Risk and Control (GRC) within the Company that are carried out through a number of governance processes. The governance in the Internal Audit Unit covers every stages starting from planning the annual audit program, planning audit assignments, performing audits, reporting audit and monitoring audit follow-up. One of the challenges faced is ensuring there were complete and thorough documentation, from the planning phase to follow-up phase, thereby ensuring that the accuracy, validity and entirety of the information is maintained.

For this reason, the Internal Audit Unit designed the Internal Audit Management System (*Sistem Manajemen Audit Internal*, SMAIL) application as the supporting infrastructure to ensure integrated management of data, documents and information. The SMAIL application allows integration of the internal audit processes, from planning it based on Risk Based Audit (RBA) to

tindak lanjut audit oleh *auditee* yang disertai *workflow* terkait untuk menghindari redundansi dan ketidaklengkapan informasi. Aplikasi SMAIL ini juga memiliki *dashboard* atas seluruh temuan audit yang dilaksanakan oleh SPI pada tahun berjalan dan dapat menampilkan kategorisasi temuan audit per bidang. Pengembangan aplikasi SMAIL telah memasuki tahapan UAT (*User Acceptance Test*) pada akhir tahun 2023 lalu dan direncanakan akan dirilis pada Triwulan I Tahun 2024.

Kebijakan dan Frekuensi Rapat Satuan Pengawasan Internal Bersama Direksi, Dewan Komisaris dan/atau Komite Audit

Satuan Pengawasan Internal memiliki agenda rapat berkala maupun insidental dengan Direksi, Dewan Komisaris maupun Komite Audit untuk membahas mengenai beberapa hal terutama terkait dengan laporan hasil audit dan progress tindak lanjut hasil audit.

Sepanjang tahun 2023, Satuan Pengawasan Internal melakukan rapat gabungan bersama Direksi maupun Komite Audit sesuai dengan tabel berikut:

Keterangan <i>Description</i>	Rapat Gabungan dengan <i>Joint Meeting with</i>	
	Direksi <i>Board of Directors</i>	Komite Audit <i>Audit Committee</i>
Jumlah Rapat <i>Number of Meetings</i>	6	4
Kehadiran <i>Attendance</i>	6	4

Hasil Temuan Audit dan *Monitoring Tindak Lanjutnya*

Berdasarkan temuan yang dilakukan dari hasil pemeriksaan, Satuan Pengawasan Internal memberikan rekomendasi kepada *auditee*. Tahapan selanjutnya merupakan tindak lanjut atas rekomendasi audit internal dengan tujuan untuk memberi keyakinan bahwa manajemen telah mengambil koreksi atas berbagai temuan yang dilaporkan.

Tindak lanjut rekomendasi audit bermanfaat untuk meningkatkan kinerja manajerial dan Perusahaan sehingga apabila

monitoring its follow-up by auditees, complete by relevant workflows to avoid redundancy and incomplete information. The SMAIL also displays dashboard for all audit findings carried out by Internal Audit Unit within the year, filterable by sector categorization. As of end of 2023, the SMAIL application development had reached the UAT (*User Acceptance Test*) phase and is planned to be released in the first quarter of 2024.

Policy and Frequency of Internal Audit Unit Meetings with the Boards of Directors, Commissioners and/or Audit Committee

The Internal Audit Unit had regular and incidental meetings agenda with the Board of Directors, Board of Commissioners and Audit Committee to discuss issues related to audit reports and progress on follow-up to audit results.

Throughout 2023, the Internal Audit Unit held joint meetings with the Board of Directors and Audit Committee, as described in the following table:

Audit Findings Results and Monitoring Follow-up

Based on the findings from the audit results, the Internal Audit Unit gives recommendations to the auditee. The next phase is follow-ups on internal audit recommendations, aimed to build trust that the management has taken actions upon various reported findings.

Further actions on audit recommendations are intended to improve Company's managerial performance such that any

terjadi inefisiensi maupun tidak efektifnya pelaksanaan operasional dapat segera diperbaiki, sehingga kegiatan operasional Perusahaan tetap dapat berjalan untuk mendukung pencapaian tujuan Perusahaan.

Dalam proses tindak lanjut rekomendasi, Satuan Pengawasan Internal memiliki tugas untuk melakukan *monitoring* tindak lanjut rekomendasi tersebut. *Monitoring* ini bertujuan untuk memastikan *auditee* dapat menindaklanjuti rekomendasi secara tepat dan memberikan konsultasi kepada *auditee* jika terjadi hambatan dalam pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi.

ongoing inefficient or ineffective operations may be corrected immediately in efforts to boost incremental achievements towards the Company's goals.

In implementing recommendations, the Internal Audit Unit is tasked to monitor the actions taken. The monitoring aims to ensure that the auditee follows up on recommendations appropriately and provides consultation to the auditee should any obstacle arises in its implementation.

Tabel *Monitoring* Tindak Lanjut Rekomendasi Atas Temuan Audit Kantor Pusat Tahun 2023
Table of Follow-up Recommendations Monitoring on Audit Findings at Head Office in 2023

<i>Auditee</i>	<i>Waktu Pelaksanaan</i> <i>Period</i>	<i>Jumlah Temuan</i> <i>Total Findings</i>	<i>Jumlah Rekomendasi</i> <i>Number of Recommendations</i>	<i>Sesuai Rekomendasi</i> <i>Conforms to Recommendations</i>	<i>Belum Sesuai</i> <i>Does Not Conform</i>	<i>Belum Tindak Lanjut</i> <i>Not Followed Up</i>	<i>Progress (%)</i>
Divisi Pengelolaan SDM, Divisi Keuangan & Perbendaharaan, serta Divisi Akuntansi <i>Divisions of HR Management; Finance & Treasury; and Division of Accounting</i>	Februari-April 2023 <i>February-April 2023</i>	5	9	7	2	0	100%
Divisi Komersial, Divisi Keuangan & Perbendaharaan <i>Divisions of Commercial; Finance & Treasury</i>	Februari-April 2023 <i>February-April 2023</i>	4	8	0	0	0	0
Direktorat Teknik <i>Engineering Directorate</i>	Februari-Maret 2023 <i>February-March 2023</i>	9	11	11	0	0	100%
<i>Project BHC</i>	Februari-Maret 2023 <i>February-March 2023</i>	4	9	5	4	3	100%

Tabel Monitoring Tindak Lanjut Rekomendasi Atas Temuan Audit Kantor Cabang Tahun 2023
Table of Follow-up Recommendations Monitoring on Audit Findings at Branch Office in 2023

Auditee	Waktu Pelaksanaan Period	Jumlah Temuan Total Findings	Jumlah Rekomendasi Number of Recommendations	Sesuai Rekomendasi Conforms to Recommendations	Belum Sesuai Does Not Conforms	Belum Tindak Lanjut Not Followed Up	Progress (%)
Cabang Branch Luwuk	5-10 April 2023	13	28	12	1	0	92%
Cabang Branch Batulicin	5-10 April 2023	15	32	15	0	0	100%
Cabang Branch Padang	10-15 April 2023	17	36	17	0	0	100%
Cabang Branch Bangka	14-19 Mei 2023 14-19 May 2023	16	37	16	0	0	100%
Cabang Branch Bau Bau	14-19 Mei 2023 14-19 May 2023	16	34	16	0	0	100%
Cabang Branch Kayangan	21-26 Mei 2023 21-26 May 2023	23	56	22	0	0	100%
Cabang Branch Merauke	2-7 Juli 2023 2-7 July 2023	16	37	16	0	0	100%
Cabang Branch Selayar	4-9 Juli 2023 4-9 July 2023	13	30	13	0	0	100%
Cabang Branch Bajoe	5-10 Juli 2023 5-10 July 2023	11	18	11	0	0	100%
Cabang Branch Sape	17-22 Juli 2023 17-22 July 2023	15	30	13	2	0	87%
Cabang Branch Batam	19-24 Juli 2023 19-24 July 2023	26	64	26	0	0	100%
Cabang Branch Bitung	16-20 Oktober 2023 16-20 October 2023	12	29	12	0	0	100%
Cabang Branch Kupang	26-31 Oktober 2023 26-31 October 2023	18	41	18	0	0	100%
Cabang Branch Ambon	30 Oktober – 4 November 2023 30 October-4 November 2023	19	37	19	0	0	100%
Cabang Branch Merak	15-20 November 2023	16	50	6	4	6	63%
Cabang Branch Bakauheni	15-20 November 2023	15	36	11	3	1	87%

Tabel Monitoring Tindak Lanjut Rekomendasi Atas Temuan Audit Anak Perusahaan Tahun 2023
Table of Follow-up Recommendations Monitoring on Audit Findings at Subsidiaries in 2023

<i>Auditee</i>	<i>Waktu Pelaksanaan Period</i>	<i>Jumlah Temuan Total Findings</i>	<i>Jumlah Rekomendasi Number of Recommendations</i>	<i>Sesuai Rekomendasi Conforms to Recommendations</i>	<i>Belum Sesuai Does Not Conforms</i>	<i>Belum Tindak Lanjut Not Followed Up</i>	<i>Progress (%)</i>
PT Jembatan Nusantara	Sept-Okt 2023 Sept-Oct 2023	13	30	0	0	0	0
PT Indonesia Ferry Properti	Sept-Okt 2023 Sept-Oct 2023	11	19	0	0	0	0

Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI)

Satuan Pengawasan Internal juga melakukan *monitoring* terhadap tindak lanjut rekomendasi atas hasil temuan audit dari Badan Pemeriksaan Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) dengan rincian sebagaimana tersaji dalam tabel berikut:

The Audit Board of the Republic of Indonesia (BPK RI)

The Internal Audit Unit also monitored the follow-up to recommendations based on audit findings from the Financial Audit Agency of the Republic of Indonesia (BPK RI), with details as presented in the following table:

<i>Jenis Temuan</i>	<i>Jumlah Temuan Total Findings</i>	<i>Jumlah Rekomendasi Number of Recommendations</i>	<i>Sesuai Conforms</i>	<i>Belum Sesuai Not Conforms</i>	<i>Belum Ditindaklanjuti Not Followed Up</i>	<i>Tidak Dapat Ditindaklanjuti Cannot Followed Up</i>
05/AUDITAMA VII/KINERJA/01/2016 29 JANUARI 2016						
TL sd. Semester I Th. 2023 Follow-ups until Semester I 2023	28	92	83	2	0	7
TL Semester II Th. 2023 Follow-ups Semester II 2023	-	-	1	1	0	0
TL sd. Semester II Th. 2023 Follow-ups until Semester II 2023	28	92	84	1	0	7
34/AUDITAMA VII/PDPT/07/2018 10 JULI 2018						
TL sd. Semester I Th. 2023 Follow-ups until Semester I 2023	10	28	25	3	0	0
TL Semester II Th. 2023 Follow-ups Semester II 2023	-	-	1	1	0	0
TL sd. Semester II Th. 2023 Follow-ups until Semester II 2023	10	28	26	2	0	0

Jenis Temuan	Jumlah Temuan <i>Total Findings</i>	Jumlah Rekomendasi <i>Number of Recommendations</i>	Sesuai <i>Conforms</i>	Belum Sesuai <i>Not Conforms</i>	Belum Ditindaklanjuti <i>Not Followed Up</i>	Tidak Dapat Ditindaklanjuti <i>Cannot Followed Up</i>
01/AUDITAMA VII/KINERJA/01/2022 31 JANUARI 2022						
TL Semester I Tahun 2022 Follow-ups until Semester I 2022	11	44	42	2	0	0
TL sd. Semester I Tahun 2023 Follow-ups until Semester I 2023	11	44	42	2	0	0
TL Semester II Tahun 2023 Follow-ups Semester II 2023	-	-	1	1	0	0
TL sd. Semester II Tahun 2023 Follow-ups until Semester II 2023	11	44	43	1	0	0
11/AUDITAMA VII/PDPT/03/2023 14 MARET 2023						
TL sd. Semester I Tahun 2023 Follow-ups until Semester I 2023	2	3	0	0	3	0
TL Semester II Tahun 2023 Follow-ups Semester II 2023	-	-	1	0	1	0
TL sd. Semester II Tahun 2023 Follow-ups until Semester II 2023	2	3	1	0	2	0
Jumlah Status Tindak Lanjut sd. Semester I Tahun 2023 Total Status of Follow-ups until Semester I 2023	51	167	154	4	2	7

Kantor Akuntan Publik

Hingga akhir tahun 2023, tidak terdapat temuan KAP yang memerlukan tindak lanjut dari Perusahaan. General Audit KAP tahun buku 2023 telah dilakukan di Kantor Cabang yang terdiri dari:

Public Accounting Firm

As of end of 2023, there were no findings that required follow-up from the Company. The General Audit of Public Accounting Firm for the 2023 financial year had been carried out at the following Branch Offices:

No	Cabang Branch	Tanggal Date
1	Ketapang	16 s.d 21 November 2023 16 to 21 November 2023
2	Batam	15 s.d 22 November 2023 15 to 22 November 2023
3	Bau-Bau	16 s.d 23 November 2023 16 to 23 November 2023
4	Ternate	24 s.d 30 November 2023 24 to 30 November 2023
5	Batulicin	23 s.d 29 November 2023 23 to 29 November 2023
6	Surabaya	11 s.d 16 Desember 2023 11 to 16 December 2023
7	Bakauheni	8 s.d 19 Januari 2024 8 to 19 January 2024
8	Merak	8 s.d 19 Januari 2024 8 to 19 January 2024

Penilaian dan Evaluasi Kinerja Satuan Pengawasan Internal

Tugas dan tanggung jawab Satuan Pengawasan Internal dituangkan ke dalam KPI yang disepakati sebagai acuan dan ukuran pencapaian target pelaksanaan tugas Satuan Pengawasan Internal. Penilaian kinerja Satuan Pengawasan Internal dilakukan secara langsung oleh Direktur Utama mengacu pada indikator pencapaian target pelaksanaan tugas Sistem Pengendalian Internal yang telah disepakati. Pada penilaian kinerja tahun 2023, Satuan Pengawasan Internal telah mencapai target program kerja sesuai dengan rencana kerja yang disusun.

Performance Appraisal and Evaluation of Internal Audit Unit

The duties and responsibilities of the Internal Audit Unit are outlined in the agreed KPI as a reference and measure for achievement of targets for the Internal Audit Unit duties. The performance appraisal of the Internal Audit Unit is carried out directly by the President Director, using the agreed indicators for targets achievement. In the 2023 performance appraisal, the Internal Audit Unit achieved the targeted work program according to the prepared work plan.

Pengembangan Kompetensi Satuan Pengawasan Internal

Dalam rangka meningkatkan kapasitas dan kapabilitas dari personil Satuan Pengawasan Internal, pada tahun 2023 dilakukan pengembangan kompetensi yang relevan dengan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Satuan Pengawasan Internal yang meliputi:

Development of Internal Audit Unit Competency

Aimed to increase the capacity and capability of the Internal Audit Unit personnels, throughout 2023, relevant competency development were carried out for the Internal Audit Unit. The programs include:

Tabel Pelaksanaan Pengembangan Kompetensi SPI Tahun 2023

Table of Implemented Competency Development for the Internal Audit Unit in 2023

Nama Pelatihan Training	Penyelenggara Organizer	Jenis Pelatihan Type	Tanggal Pelaksanaan Date	Nama Peserta Participant
<i>Fundamental of Cyber Security</i>	Institute Internal Audit	<i>Technical Skill</i>	15-16 Maret 2023 15-16 March 2023	Didi Juliansyah
<i>Purnabakti Retirement</i>	ASDP	<i>Soft Skill</i>	22-26 Mei 2023 22-26 May 2023	Takari
<i>Risk Budgeting</i>	Deloitte	<i>Technical Skill</i>	25-26 Mei 2023 22-26 May 2023	Tanti Mardianti
<i>Dasar-dasar Audit Basic of Audit</i>	PPAK	<i>Technical Skill</i>	12-22 Juni 2023 12-22 June 2023	Samion
<i>Certified Internal Audit Executive</i>	BPKP	<i>Technical Skill</i>	17 Mei-8 Juni 2023 17 May-8 June 2023	T. Damayanti
QRMP	CRMS	<i>Technical Skill</i>	19-23 Juni 2023 19-23 June 2023	1. Didi Juliansyah 2. Achmad Sunedi 3. Bayu Susilo
<i>Risk Maturity</i>	CRMS	<i>Technical Skill</i>	10-12 Juli 2023 10-12 July 2023	1. Siti Rosyanti 2. Tanti Mardianti 3. Rahmadian Martha 4. Wahyu Jefri 5. Bayu Susilo 6. Budi Yanto 7. Achmad Sunedi 8. Febrinayanti 9. Didi Juliansyah 10. M. Rivai 11. Indriasari
<i>Certified Internal Audit Executive</i>	BPKP	<i>Technical Skill</i>	14 Juli-4 Agustus 2023 14 July-4 August 2023	1. Imran Kuru 2. Muda Prastya 3. Indriasari 4. Rahmadian Martha
<i>Certified Internal Audit Executive</i>	BPKP	<i>Technical Skill</i>	15 September-5 Oktober 2023 15 September - 5 October 2023	1. Anis Adinizam 2. Bagus Gelis

Nama Pelatihan <i>Training</i>	Penyelenggara <i>Organizer</i>	Jenis Pelatihan <i>Type</i>	Tanggal Pelaksanaan <i>Date</i>	Nama Peserta <i>Participant</i>
Sertifikasi ISO 9001 dan ISO 45001 <i>Certification ISO 9001 and ISO 45001</i>	BSI	<i>Technical Skill</i>		1. Mety Susila 2. Budi Yanto 3. M. Rivai 4. Abdus Syukur 5. Wahyu Jefri 6. M. Farid Fanani 7. Rahmadian Martha Stania 8. Indriasari 9. Purboningrum 10. Tanti Mardianti
Sertifikasi <i>Qualified Internal Auditor</i> Tingkat Dasar <i>Certification of Qualified Internal Auditor, Basic Level</i>	Yayasan Pendidikan Internal Audit <i>The Center of Internal Audit Resources</i>	<i>Technical Skill</i>	27 November-9 Desember 2023 27 November-9 December 2023	1. Febrinayanti 2. Achmad Sunedi 3. Marthen Yacob Lakahing

AKUNTAN PUBLIK

PUBLIC ACCOUNTANT

Sebagai bagian dari sistem pengendalian internal, Perusahaan berkomitmen untuk memastikan integritas dalam penyajian Laporan Keuangan kepada pemegang saham melalui audit yang dilakukan oleh akuntan publik sebagai auditor eksternal yang independen. Perusahaan menggunakan jasa Kantor Akuntan Publik untuk menguji komponen Laporan Keuangan sehingga dapat dipastikan kewajaran dan kesesuaian pencatatan keuangan dengan Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku.

As part of the internal control system, the Company is committed to ensuring integrity in presenting the Financial Statements to shareholders through audits conducted by public accountants as the independent external auditors. The Company employs the Public Accounting Firm service to review financial report components in order to ensure the fairness and conformity of financial records with the applicable Financial Accounting Standards.

KEBIJAKAN DAN MEKANISME PENUNJUKAN AKUNTAN PUBLIK

Penunjukan Kantor Akuntan Publik sebagai auditor eksternal dilakukan atas persetujuan pemegang saham melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan tahun yang akan datang. Berdasarkan hasil RUPS persetujuan RKAP Tahun 2023, Perusahaan menunjuk KAP Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan untuk melakukan audit umum atas Laporan Keuangan Konsolidasian PT ASDP Indonesia Ferry (Persero)

POLICY AND APPOINTMENT MECHANISM OF PUBLIC ACCOUNTANT

The appointment of the Public Accounting Firm as an external auditor is made with the approval of shareholders through the General Meeting of Shareholders (GMS), approving the Company Work Plan and Budget (WPB) for the upcoming year. Based on the results of the GMS approving the 2023 WPB, the Company appointed KAP Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan to conduct a general audit of the Consolidated Financial Statements of PT ASDP Indonesia

entitas anak, serta Laporan Keuangan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Kecil Untuk Tahun Buku 2023 sesuai risalah RUPS persetujuan RKAP Tahun 2023.

Ferry (Persero) and its subsidiaries, as well as the Financial Statements of the Micro and Small Business Funding Program for the Fiscal Year 2023, in accordance with the minutes of the GMS approving the 2023 WPB.

PENUNJUKAN KANTOR AKUNTAN PUBLIK

Sepanjang 5 tahun terakhir, Perusahaan telah bekerja sama dengan Kantor Akuntan Publik sebagai berikut:

APPOINTMENT OF PUBLIC ACCOUNTING FIRM

Over the past five years, the Company has collaborated with the Public Accounting Firm as follows:

Tahun Buku <i>Financial Year</i>	Akuntan <i>Accountant</i>	Periode Akuntan <i>Period</i>	Kantor Akuntan Publik <i>Public Accounting Firm</i>	Periode Kantor Akuntan Publik <i>Terms of Public Accounting Firm</i>	Jasa yang Diberikan <i>Services Provided</i>	Opini Audit <i>Audit Opinion</i>
2023	Eishennoraz	4	Amir Abadi Yusuf, Aryanto, Mawar & Rekan	4	Laporan Keuangan Konsolidasi Consolidated Financial Reports	Wajar dalam semua hal yang material Presented fairly, in all material respects
2022	Eishennoraz	3	Amir Abadi Yusuf, Aryanto, Mawar & Rekan	3	Laporan Keuangan Konsolidasi Consolidated Financial Reports	Wajar dalam semua hal yang material Presented fairly, in all material respects
2021	Eishennoraz	2	Amir Abadi Yusuf, Aryanto, Mawar & Rekan	2	Laporan Keuangan Konsolidasi Consolidated Financial Reports	Wajar dalam semua hal yang material Presented fairly, in all material respects
2020	Eishennoraz	1	Amir Abadi Yusuf, Aryanto, Mawar & Rekan	1	Laporan Keuangan Konsolidasi Consolidated Financial Reports	Wajar dalam semua hal yang material Presented fairly, in all material respects
2019	Santoso	1	Hadori Sugiarto Adi & Rekan	1	Laporan Keuangan Konsolidasi Consolidated Financial Reports	Wajar dalam semua hal yang material Presented fairly, in all material respects

JASA LAIN YANG DIBERIKAN OLEH KANTOR AKUNTAN PUBLIK DAN AKUNTAN PUBLIK

Pada tahun 2023, tidak terdapat jasa lain yang diberikan oleh Kantor Akuntan Publik dan/atau Akuntan Publik selain dari Audit atas Laporan Keuangan Konsolidasi.

BIAYA AUDIT YANG DIBERIKAN UNTUK JASA YANG DIBERIKAN OLEH KANTOR AKUNTAN PUBLIK PADA TAHUN BUKU 2023

Besarnya biaya audit untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2023 atas Laporan Keuangan Audit adalah sebesar Rp1,69 miliar.

PENGAWASAN ATAS AUDITOR EKSTERNAL

Untuk memastikan pelaksanaan audit eksternal berjalan secara efektif, Dewan Komisaris melalui Komite Audit melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan audit yang dilakukan oleh auditor eksternal. Komite Audit melakukan pengawasan dan koordinasi dengan Satuan Pengawasan Internal selama pelaksanaan proses audit eksternal melalui pertemuan secara rutin dengan Kantor Akuntan Publik untuk memastikan pelaksanaan audit berjalan efektif. Di samping itu, Dewan Komisaris dan Direksi juga melakukan pemantauan secara aktif terhadap temuan-temuan pemeriksaan audit eksternal.

EFEKTIVITAS PELAKSANAAN AUDIT OLEH AKUNTAN PUBLIK

Perusahaan melakukan kajian atas efektivitas pelaksanaan audit oleh Akuntan Publik melalui Komite Audit berkoordinasi dengan Satuan Pengawasan Internal untuk memastikan bahwa seluruh temuan dapat ditindaklanjuti sesuai kewenangan yang ditetapkan dan meningkatkan kinerja baik dari segi keuangan maupun operasional. Perusahaan senantiasa berupaya menindaklanjuti setiap temuan audit, sehingga mampu menekan temuan-temuan di tahun berikutnya.

OTHER SERVICES PROVIDED BY PUBLIC ACCOUNTING FIRMS AND PUBLIC ACCOUNTANTS

In 2023, there was no other services provided by Public Accounting Firms and/or Public Accountants apart from Audited Consolidated Financial Statements.

AUDIT FEES PROVIDED FOR SERVICES PROVIDED BY PUBLIC ACCOUNTING FIRMS IN THE 2023 FINANCIAL YEAR

The audit fees for the financial year ending 31 December 2023 for the Audited Financial Statements was Rp1.69 billion.

SUPERVISION OF EXTERNAL AUDITORS

To ensure that the external audit was carried out effectively, the Board of Commissioners, through the Audit Committee, oversaw and evaluated the audit performed by the external auditor. The Audit Committee supervised and coordinated with the internal Audit Unit throughout the external audit process by organizing regular meetings with the Public Accounting Firm to ensure effective audit was carried out. In addition, the Boards of Commissioners and Directors also actively monitored findings from external audit.

EFFECTIVENESS OF AUDIT IMPLEMENTED BY PUBLIC ACCOUNTANT

The Company reviewed the effectiveness of audit implementation by Public Accountants through the Audit Committee in coordination with the Internal Audit Unit to ensure that all findings can be followed up according to the established authority and improve performance both from a financial and operational perspective. The Company always strives to follow up on every audit finding, in order to minimise the findings in the coming year.

SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL

INTERNAL CONTROL SYSTEM

TUJUAN PENGENDALIAN INTERNAL

Sistem Pengendalian Internal, sebagai bagian integral dari penerapan prinsip tata kelola yang optimal bagi sebuah perusahaan, memiliki sejumlah tujuan yang mendasar:

1. Tujuan Kepatuhan bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh operasi Perusahaan berjalan sesuai dengan berbagai regulasi dan undang-undang yang berlaku, baik yang ditetapkan oleh pemerintah maupun kebijakan internal Perusahaan itu sendiri.
2. Tujuan Informasi bertujuan untuk menyediakan laporan yang akurat, lengkap, relevan, dan disampaikan tepat waktu, agar menjadi dasar yang solid dalam pengambilan keputusan yang dapat dipercaya dan dipertanggungjawabkan.
3. Tujuan Operasional dimaksudkan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam pengelolaan aset dan sumber daya lainnya, dengan tujuan utama melindungi Perusahaan dari risiko kerugian yang mungkin terjadi.

KESESUAIAN PENGENDALIAN INTERNAL DENGAN KERANGKA COSO

Sistem pengendalian internal Perusahaan telah dirancang dan disesuaikan dengan *Internal Control Integrated Framework* yang diperkenalkan oleh *The Committee of Sponsoring Organization of the Treadway Commission* (COSO). Dalam perspektif COSO, tujuan dari pengendalian internal mencakup aspek operasional, pelaporan, dan kepatuhan. COSO mengidentifikasi komponen-komponen utama yang membentuk unsur-unsur pengendalian internal, yang terdiri dari:

1. Lingkungan pengendalian,
2. Penilaian risiko,
3. Aktivitas pengendalian,
4. Informasi dan komunikasi,
5. Kegiatan pemantauan.

INTERNAL CONTROL OBJECTIVES

The Internal Control System, as an integral part of optimal governance principles implementation in a company, has a number of primary objectives:

1. Objective of Compliance, aims to ensure that all Company operations are conducted in compliance with various applicable regulations and laws, set by the government and the Company's internal policies.
2. Objective of Information, aims to provide accurate, complete, relevant reports, which are delivered on time, such that the reports become a solid ground for trusted and reliable decision making.
3. Objective of Operations, aims to increase efficiency and effectiveness in managing assets and other resources, with the objective of protecting the Company from the risk of losses.

COMPLIANCE OF INTERNAL CONTROL WITH THE COSO FRAMEWORK

The Company's internal control system was designed and adapted to the Internal Control Integrated Framework, which was introduced by The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO). In the COSO framework, the internal control covers aspects of operations, reporting and compliance. COSO had identified main components that formed the internal control, which consisted of:

1. Controlled environment,
2. Risk assessment,
3. Control activities,
4. Information and communication,
5. Monitoring activities.

KEBIJAKAN SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL

Melalui keputusan Direksi No. KD.215/HK.002/ASDP-2019 tanggal 3 Oktober 2019, PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) menetapkan sebuah kebijakan yang sepenuhnya sejalan dengan prinsip-prinsip yang terdapat dalam *Internal Control Integrated Framework*, yang telah ditetapkan oleh COSO. *Framework* ini terdiri dari 5 komponen utama yang saling terkait dan mendukung efektivitas pengendalian internal sesuai dengan kerangka COSO yang telah diadopsi oleh Perusahaan. Hal ini menegaskan komitmen Perusahaan dalam memastikan bahwa sistem pengendalian internalnya mengikuti standar yang telah ditetapkan secara internasional, dengan fokus pada aspek-aspek yang terkait dalam *framework* COSO. Lima komponen yang menunjang efektivitas pengendalian internal sesuai dengan kerangka COSO yang diterapkan Perusahaan yaitu:

1. Lingkungan pengendalian merupakan kerangka yang mempengaruhi seluruh aspek Perusahaan, menciptakan lingkungan di mana setiap individu dalam organisasi berpartisipasi dalam pengendalian yang sesuai dengan perannya. Ini menjadi fondasi penting bagi elemen-elemen pengendalian internal lainnya, membangun landasan yang efektif bagi upaya pengendalian.
2. Penilaian risiko adalah serangkaian proses yang mencakup identifikasi dan analisis risiko serta penilaian terhadap risiko-risiko yang berpotensi menghambat pencapaian tujuan Perusahaan. Proses identifikasi risiko ini mempertimbangkan faktor-faktor internal dan eksternal. Melalui analisis risiko, dilakukan penilaian terhadap seberapa mungkin risiko tersebut terjadi (probabilitas), seberapa besar dampaknya bagi Perusahaan (dampak), serta memberikan strategi pengelolaan risiko. Penilaian risiko ini didasarkan pada pemahaman terhadap risiko-risiko yang dihadapi Perusahaan, toleransi risiko, dan upaya pengendalian risiko.
3. Kegiatan pengendalian merujuk pada kebijakan dan prosedur yang dirancang untuk memastikan pelaksanaan arahan dari Direksi, serta menjamin bahwa pengelolaan kegiatan pengendalian sejalan dengan karakteristik, kompleksitas, dan

INTERNAL CONTROL SYSTEM POLICY

Through Decree of the Board of Directors' No. KD.215/HK.002/ASDP-2019 dated 3 October 2019, PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) established a policy that was entirely aligned with the principles in the Internal Control Integrated Framework established by COSO. The framework consisted of 5 main interrelated components that promote the effectiveness of internal control, in keeping with the COSO framework that the Company adopted. The framework confirmed the Company's commitment in ensuring that their internal control system followed internationally established standards, with a focus on aspects related to the COSO framework. The five components that support the effectiveness of internal control in accordance with the Company's adopted COSO framework are:

1. The controlled environment is a framework that impacted every aspects of the Company, creating an environment where every individual in the organization is able to participates according to their roles. It served as an effective foundation for other components of internal control that would be endeavoured.
2. Risk assessment is a series of processes that include identification, analysis and assessment of risks that may potentially hinder efforts to accomplish the Company's objectives. Risk identification process takes into account internal and external factors. Risk analysis is an assessment to measure risk probabilities, size of the impacts on the Company, and to provide risk management strategies. The risk assessment conducted is based on an understanding of the risks faced by the Company, its risk tolerance and risk control efforts.
3. Control activities refer to policies and procedures designed to ensure the directives from the Board of Directors were implemented, and to ensure the control activities is conducted in line with the Company's character, complexity and scale.

skala Perusahaan. Ini meliputi pelaksanaan pengendalian di seluruh aktivitas Perusahaan, keterkaitannya dengan proses penilaian dan mitigasi risiko, penetapan kebijakan dan prosedur secara tertulis, dan implementasi prosedur yang telah ditetapkan oleh manajemen.

4. Informasi dan komunikasi melibatkan identifikasi, pencatatan, dan diseminasi informasi (baik keuangan maupun non-keuangan) yang relevan dengan tugas dan fungsi, disampaikan dalam format yang tepat untuk mempermudah pelaksanaan, pengendalian, dan pertanggungjawaban. Komunikasi ini perlu berjalan efektif baik di lingkungan internal Perusahaan maupun dalam interaksi dengan pihak eksternal yang terlibat.
5. Pemantauan pengendalian internal bertujuan untuk mengevaluasi kualitas Sistem Pengendalian Internal Perusahaan dalam periode tertentu. Proses ini melibatkan pemantauan rutin terhadap aktivitas yang sedang berlangsung, disertai dengan kegiatan manajemen rutin, supervisi, perbandingan, rekonsiliasi, dan langkah-langkah lain yang relevan. Evaluasi oleh unit independen juga dilakukan melalui penilaian independen, *review*, dan pengujian efektivitas Sistem Pengendalian Internal Perusahaan.

This applies to implementation of controls throughout the Company's activities, in relations to the risk assessment and mitigation process, the issuance of written policies and procedures, and the implementation of procedures established by management.

4. Information and communication covers identification, recording and dissemination of information (both financial and non-financial) that is relevant to tasks and roles, delivered in the suitable format to ease implementation, control and accountability. Communications needs to run effectively within the Company's internal environment as well as in interactions with external parties.
5. Monitoring of internal control aims to evaluate the quality of the Company's Internal Control System within a certain period. This process involves periodic monitoring of ongoing activities, parallel with regular management activities, supervision, comparison, reconciliation, and other relevant measures. Evaluation by an independent unit is also carried out through assessment, review and testing on the effectiveness of the Company's Internal Control System.

SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL TERKAIT OPERASIONAL

Sebuah Sistem Pengendalian Internal yang kokoh harus tidak hanya meningkatkan efektivitas dan efisiensi operasional Perusahaan tetapi juga memastikan pencapaian tujuan Perusahaan secara optimal. Proses ini melibatkan setiap unit dalam menjalankan aktivitas operasional sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan, mengidentifikasi risiko yang mungkin timbul, dan mengambil langkah-langkah mitigasi yang sesuai pada tingkat unit mereka sendiri. Pentingnya pelaksanaan yang optimal dari langkah-langkah ini sangat ditekankan dalam mencapai tujuan Perusahaan dan menjalankan prosedur yang telah ditetapkan.

INTERNAL CONTROL SYSTEMS RELATED TO OPERATIONS

A solid Internal Control System should not only increase the effectiveness and efficiency of the Company's operations but also ensures the optimum achievement of the Company's objectives. The process necessitates involvement from each unit in carrying out their operational activities in line with established procedures, identifying potential risks, and taking appropriate mitigation steps in their own unit. It was very important to emphasize optimum implementation of these steps in accomplishing the Company's objectives through established procedures.

Untuk memastikan bahwa aktivitas operasional sejalan dengan tujuan Perusahaan serta prosedur yang ada, Satuan Pengawasan Internal (SPI) berperan dalam melakukan audit pada setiap unit. Divisi Manajemen Risiko dan *Quality Assurance* juga bertanggung jawab atas pembaruan profil risiko dan melakukan pemantauan terhadap langkah-langkah mitigasi yang diterapkan dalam aktivitas operasional Perusahaan. Progres setiap unit dilaporkan kepada Direksi melalui rapat dan laporan tertulis yang disampaikan secara rutin.

SPI dan Divisi Manajemen Risiko dan *Quality Assurance* secara spesifik memberikan laporan berkala kepada Direksi dan Dewan Komisaris serta menjalin koordinasi yang erat dengan Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko. Di samping itu, Direksi juga menyajikan laporan tertulis melalui laporan manajemen yang mendalam serta melalui diskusi mengenai kinerja dan pelaksanaan operasional dalam rapat gabungan antara Direksi dan Dewan Komisaris. Semua upaya ini bertujuan untuk memastikan bahwa kontrol internal berfungsi optimal dalam mendukung pencapaian tujuan Perusahaan dan menjaga kelancaran operasional secara keseluruhan.

SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL TERKAIT KEUANGAN

Perusahaan berkomitmen untuk menjamin efektivitas dan pelaksanaan yang optimal dari pengendalian internalnya. Hal ini dilakukan dengan tujuan memberikan keyakinan yang tinggi terhadap keandalan setiap laporan keuangan yang disusun, yang dijalankan melalui penetapan kebijakan akuntansi serta penyusunan laporan keuangan yang sepenuhnya sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku secara umum. Adapun upaya yang ditekankan oleh Perusahaan adalah konsistensi dalam penerapan kebijakan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan, di mana tujuannya adalah untuk menghindari penyesuaian dan temuan yang mungkin dilakukan oleh auditor terkait dengan pengakuan, pengukuran, pencatatan, dan pembukuan transaksi, serta pengungkapan kebijakan akuntansi.

To ensure that operational activities are in line with the Company's objectives and procedures, the Internal Audit Unit conducts audits in each unit. The Risk Management and Quality Assurance Divisions are also responsible for updating risk profiles and monitors mitigation measures implemented in the Company's operational activities. The progress of each unit is reported to the Board of Directors through meetings and written reports submitted regularly.

Internal Audit Unit and Divisions of the Risk Management and Quality Assurance specifically presented periodic reports to the Boards of Directors and Commissioners whilst maintain intensive coordination with the Audit Committee and Risk Oversight Committee. Aside from that, the Board of Directors also presented written reports on in-depth management reports and discussions on operational performance and implementation in joint meetings between the Boards of Directors and Commissioners. All of these endeavors aim to ensure that internal controls may function optimally to support the attainment of the Company's objectives and to maintain general smooth running in operations.

INTERNAL CONTROL SYSTEM RELATED TO FINANCE

The Company is committed to ensure the effectiveness and optimal implementation of the internal controls. This was fulfilled as the Company aimed to build utmost trust in the reliability of each financial reports prepared, which process included issuance of accounting policies and preparation of financial reports in full accordance with widely accepted accounting standards. These endeavours highlighted the Company's consistency in implementing accounting policies and preparing financial reports, which objective was to avoid any adjustments and findings that the auditors may be compelled to make related to admission, measurement, recording, bookkeeping and disclosure of accounting policies.

Sejalan dengan hal ini, Perusahaan juga bertekad memastikan bahwa penyusunan laporan keuangan baik secara triwulanan maupun tahunan dilakukan sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku, serta diterbitkan tepat waktu. Upaya lebih lanjut dalam memastikan integritas penyajian laporan keuangan tahunan dilakukan melalui penunjukan Kantor Akuntan Publik (KAP) sebagai Auditor Eksternal yang bertanggung jawab untuk melaksanakan audit keuangan pada setiap periode tutup buku Perusahaan.

EVALUASI ATAS EFEKTIVITAS SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL

Perusahaan melakukan evaluasi efektivitas sistem pengendalian internal yang dilaksanakan oleh Satuan Pengawasan Internal dan Audit Eksternal. Evaluasi ini dilakukan sebagai bagian dari proses pengukuran terhadap efektivitas strategi yang digunakan dalam upaya mencapai tujuan Perusahaan. Pelaksanaan evaluasi Sistem Pengendalian Internal dilaksanakan melalui pelaporan yang terdiri atas tahapan sebagai berikut:

- Laporan Pengendalian Teknis,
- Laporan Pengendalian Prosedur,
- Laporan Pengendalian Unit Kerja,
- Laporan Sistem Pengendalian Internal.

Dewan Komisaris juga memiliki keterlibatan aktif dalam evaluasi efektivitas sistem pengendalian internal yang dilakukan melalui Komite Audit yang secara berkala melakukan evaluasi atas efektivitas sistem pengendalian internal. Laporan evaluasi yang dihasilkan oleh SPI maupun hasil evaluasi dari Dewan Komisaris, disampaikan kepada manajemen sebagai acuan untuk perbaikan sistem dan kebijakan yang lebih efektif untuk mendukung upaya pencapaian tujuan Perusahaan.

Selain itu, secara entitas evaluasi dilakukan oleh auditor eksternal, yakni Kantor Akuntan Publik (KAP) pada saat pelaksanaan *general audit* pada setiap tutup buku. Hasil audit atas efektivitas sistem pengendalian internal dituangkan dalam Laporan Auditor Independen. Untuk menjaga dan meningkatkan efektivitas sistem pengawasan dan pengendalian internal, perusahaan

In line with this, the Company was also committed to ensure that the preparation of financial reports, both quarterly and annually, was carried out in accordance with applicable financial accounting standards, and was published on time. Further efforts to ensure the integrity of the annual financial reports presented was by appointing a Public Accounting Firm as an External Auditor, who was responsible for financial audits at each financial year of the Company's reports.

EVALUATION OF THE EFFECTIVENESS OF THE INTERNAL CONTROL SYSTEM

The Company evaluates the effectiveness of the internal control system implemented by the Internal Audit Unit and External Audit. This evaluation is part of the process of quantifying the effectiveness of the strategies employed in achieving the Company's goals. The Internal Control System is evaluated by way of reporting, which consists of the following phases:

- Technical Control Report,
- Procedural Control Report,
- Work Unit Control Report,
- Internal Control System Report.

The Board of Commissioners, through the Audit Committee's regular evaluation, also actively involved in evaluating the effectiveness of the internal control system. Evaluation reports produced by Internal Audit Unit as well as evaluation results from the Board of Commissioners are submitted to management as a reference for improving systems and effective policies towards achieving the Company's goals.

Moreover, the evaluation is also conducted by an external auditor, namely the Public Accounting Firm for the general audit at every closing cycle. The audit results on the effectiveness of the internal control system are stated in the Independent Auditor's Report. To maintain and improve the effectiveness of the internal supervision and control system, the company periodically

melakukan *review* dan evaluasi sistem pengendalian internal secara berkala. Berdasarkan Laporan Auditor Independen tahun buku 2023 menunjukkan bahwa laporan keuangan perusahaan disajikan secara wajar dalam semua hal yang material dan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

PERNYATAAN DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI TENTANG EFEKTIVITAS PENGENDALIAN INTERNAL PERUSAHAAN

Berdasarkan evaluasi terhadap Sistem Pengendalian Internal Perusahaan selama tahun buku 2023, sebagaimana tercatat dalam Laporan Keuangan yang telah diaudit, dapat disimpulkan bahwa tidak ditemukan permasalahan signifikan yang terkait dengan pengendalian internal dan proses operasional Perusahaan. Pada dasarnya, keseluruhan Sistem Pengendalian Internal Perusahaan dinilai memenuhi standar yang memadai, menegaskan ketidakadaannya kekurangan atau kelemahan yang signifikan dan berpengaruh material.

reviews and evaluates the internal control system. The Independent Auditor's Report for the 2023 financial year showed that the company's financial reports were presented fairly in all material respects and in accordance with Indonesia Financial Accounting Standards.

STATEMENT BY THE BOARDS OF COMMISSIONERS AND DIRECTORS ON THE EFFECTIVENESS OF THE COMPANY'S INTERNAL CONTROL

Based on the evaluation of the Company's Internal Control System during the 2023 financial year, as recorded in the Audited Financial Report, it can be concluded that no significant issue were found related to the Company's internal control and operational processes. Essentially, the entire Company's Internal Control System had been assessed and found to meet adequate standards, confirming the absence of significant flaw that may have a material impact.

**INTERNAL AUDIT OF THE COMPANY PT ASDP INDONESIA FERRY (PERSERO)**

Jakarta, 27 Mei 2024

Bawarta 27 Mei 2024

Atas nama Dewan Komisaris dan Direksi, kami yang bertanda tangan di bawah ini:
On behalf of the Board of Commissioners and the Board of Directors, we, the undersigned:

Nama *Name* Saiful Haq Manan**Alamat Kantor** *Office Address* Jl. Jend. Ahmad Yani Km. 52A, Jakarta Pusat 10510**Alamat Domisili** *Domicile Address* Jl. Kuningan No.30 RT.1 RW.3 Gandaria Utara, Kebagoran Baru, Jakarta Selatan**Nomor Telepon** *Phone Number (Cell)* 8205811**Jabatan** *Position* Komisaris Utama**Nama** *Name* Ira Puspawati**Alamat Kantor** *Office Address* Jl. Jend. Ahmad Yani Km. 52A, Jakarta Pusat 10510**Alamat Domisili** *Domicile Address* Jl. Angkasa Raya No. 23 RT09/RW02 Mangga Sari, Duren Sawit, Jakarta Timur**Nomor Telepon** *Phone Number (Cell)* 4205811**Jabatan** *Position* Direktur Utama

Menyatakan bahwa:
Hereby state that:

Sehubungan dengan tanggung jawab terhadap Laporan Keuangan Konsolidasian PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) untuk Tanggal 31 Desember 2023 serta untuk Tahun yang berakhir pada 31 Desember 2023, dalam kaitannya dengan integritas laporan keuangan telah disusun dalam suatu sistem pengendalian internal perusahaan sesuai Program Satuan Pengawasan internal dan telah memenuhi kebijakan yang ditetapkan Dewan Komisaris dan Direksi serta telah dilaksanakan secara efektif dan efisien dalam seluruh aspek yang material.

Consolidated Financial statements of PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) on December 31, 2023, and for the year ending on December 31, 2023, the integrity of the financial statements has been included in the company's internal audit system in accordance with internal audit Charter. The internal audit system has met the policy determined by the Board of Commissioners and Board of Directors and has been implemented in effective and efficient manners in all material aspects.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.
Thus, the above statement is duly executed.

Atas nama Dewan Komisaris dan Direksi PT ASDP Indonesia Ferry (Persero),
On behalf of the Board of Commissioners and Board of Directors of PT ASDP Indonesia Ferry (Persero)

SAIFUL HAQ MANAN
Komisaris Utama
President/Chairman

IRA PUSPADEWI
Direktur Utama
President/ Director

MANAJEMEN RISIKO

RISK MANAGEMENT

Manajemen risiko merupakan bagian dari implementasi tata kelola perusahaan yang baik serta sistem pengendalian internal perusahaan. Manajemen risiko yang efektif membantu Perusahaan dalam mencapai tujuan, melindungi dan meningkatkan reputasi Perusahaan sekaligus menjaga kepentingan pemegang saham. Penerapan manajemen risiko juga memberikan pandangan yang komprehensif kepada pemangku kepentingan dan manajemen Perusahaan mengenai potensi peluang maupun ancaman yang dapat menimbulkan kerugian bagi Perusahaan.

Dewan Komisaris dan Direksi beserta jajarannya memiliki tugas mendasar dalam penerapan manajemen risiko terutama terkait dengan penilaian yang kuat terhadap risiko, pemantauan manajemen risiko dan pengendalian internal serta membangun budaya sadar risiko di seluruh insan Perusahaan. Untuk memastikan pengelolaan manajemen risiko yang optimal, Perusahaan menunjuk unit kerja yang secara khusus mengoordinasikan pelaksanaan manajemen risiko di Perusahaan melalui Divisi Manajemen Risiko.

KERANGKA KERJA MANAJEMEN RISIKO

Sistem manajemen risiko di Perusahaan didasarkan pada kerangka kerja *Enterprise Risk Management* serta Peraturan Menteri BUMN No. PER-2/MBU/03/2023, tanggal 24 Maret 2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara. Berdasarkan kerangka kerja tersebut, pengelolaan manajemen risiko di Perusahaan ditetapkan melalui SKB Dewan Komisaris dan Direksi PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) No. SK.772/HK.002/ASDP-2023, tanggal 1 Oktober 2023 tentang Pedoman Manajemen Risiko PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) dan Keputusan Direksi PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) No. KD.193/HK.002/ASDP-2023, tentang Pedoman Sistem Manajemen Keberlangsungan Usaha PT ASDP Indonesia Ferry (Persero).

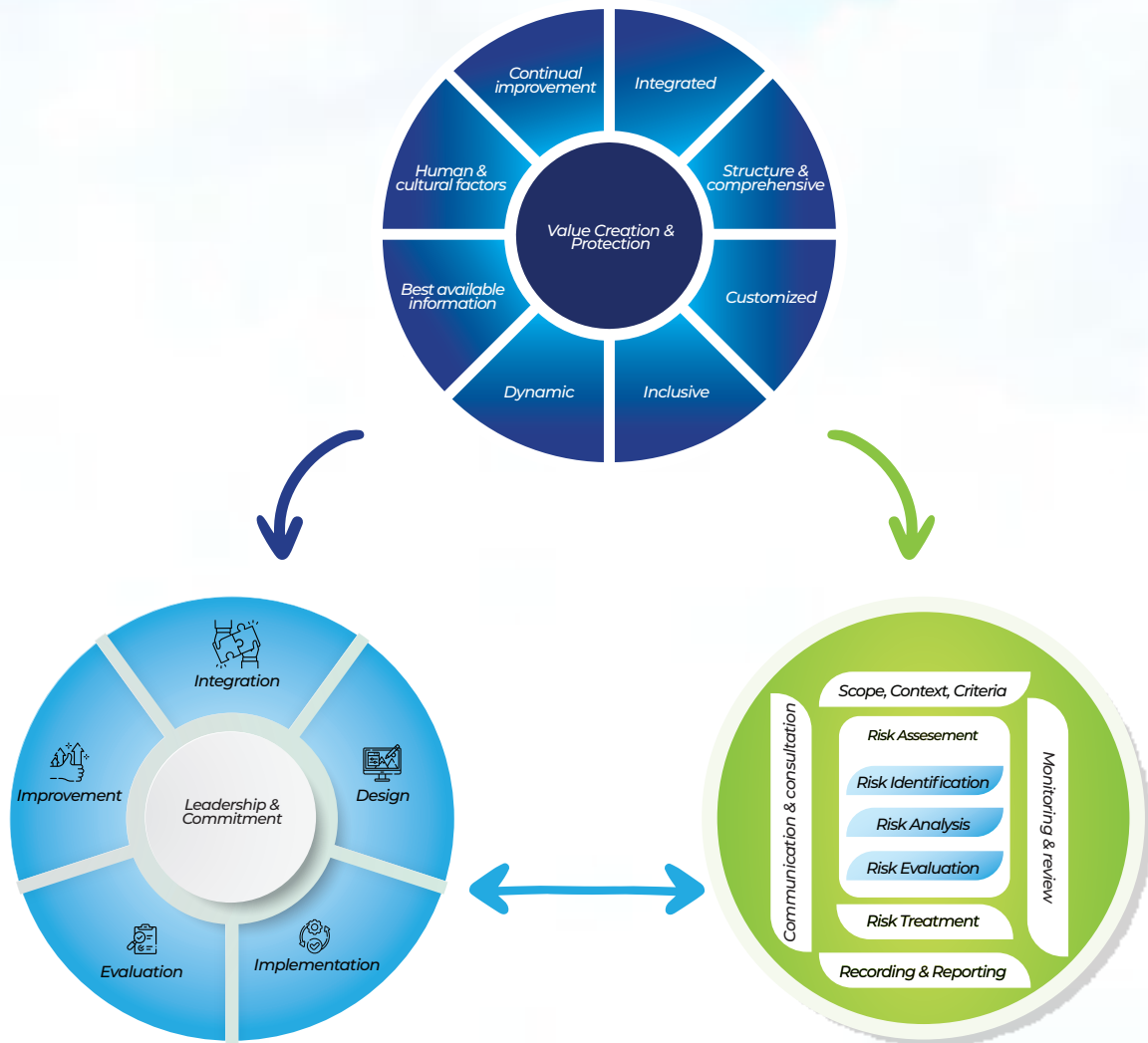
Risk management is part of the implementation of good corporate governance and internal control system. Effective risk management helps the Company achieve its goals, protect and elevate the Company's reputation while upholding the shareholders' interests. The implementation of risk management also allows a comprehensive view to stakeholders and Company's management on opportunities and threats that could bring losses to the Company.

The Boards of Commissioners and Directors along with their executives have core duties to implement risk management, especially upon assessment of risk, overseeing risk management and internal control, whilst raising culture of risk awareness among all Company personnels. To ensure optimal risk management, the Company forms a work unit, the Risk Management Division, whose specific duty is to coordinate the implementation of risk management in the Company.

RISK MANAGEMENT FRAMEWORK

The risk management system in the Company was based on the Enterprise Risk Management framework and Regulation of Minister of SOEs No. PER-2/MBU/03/2023, dated 24 March 2023 concerning Guidelines for Governance and Significant Corporate Activities of SOEs. Based on the framework, risk management in the Company is regulated in the Joint Decree of the Board of Commissioners of PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) No. SK.772/HK.002/ASDP-2023, dated 1 October 2023 concerning Guidelines of Risk Management in PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) and Decree of the Board of Directors of PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) No. KD.193/HK.002/ASDP-2023, concerning Guidelines for the Business Sustainability Management System of PT ASDP Indonesia Ferry (Persero).

Kerangka Kerja Manajemen Risiko Berbasis ISO 31000:2018 Risk Management Framework Based on ISO 31000:2018



ROADMAP PENGEMBANGAN MANAJEMEN RISIKO

Pada tahun 2023, Perusahaan telah memiliki *roadmap Enterprise Risk Management (ERM)* tahun 2023-2024 sebagai acuan dalam pelaksanaan tugas manajemen risiko perusahaan. *Roadmap* perusahaan di-update secara berkala untuk memastikan kesesuaian dan keselarasan antara pengelolaan risiko di Perusahaan dengan *best practice*. *Roadmap* Perusahaan ini menggambarkan target dan tujuan pengelolaan risiko Perusahaan.

Roadmap Pengembangan Manajemen Risiko Perusahaan 2023-2024 2023-2024 Development Roadmap for Corporate Risk Management

2023				
Q1	Q2	Q3	Q4	
1. Model Operasi Divisi Manajemen Risiko pada jangkauan Kantor Regional, Cabang, dan spesifikasi fungsi manajemen risiko bertema khusus. Operation Model of the Risk Management Division covering Regional & Branch Offices, and specific themed risk management functions.				
1.1. Kajian dan Penyesuaian Tugas dan Komponen serta Tanggung Jawab Manajemen Risiko & Anak Perusahaan Review and Adjustment of Duties, Components and Responsibilities of Risk Management & Subsidiaries	1.2. Pemutakhiran Struktur Fungsi Manajemen Risiko (Governance Risk, Thematic Advisor Risk & RRBP) Update of Risk Management Function Structure (Governance Risk, Thematic Advisor Risk & RRBP)			
1.3. Pelaporan & Pemantauan Risiko Terintegrasi Induk & Anak Perusahaan Parent & Subsidiary Integrated Risk Reporting & Supervision		1.3. Pemantauan berkala untuk laporan Risiko Terintegrasi (Per Kuartal)/ Regular supervision for Integrated Risk reports (Per Quarter)		
2. Proses Manajemen Risiko yang mengakomodir kebutuhan bisnis perusahaan Risk Management Process that accommodates the company's business needs				
2.A. Pemutakhiran <i>Risk Appetite</i> , <i>Risk Tolerance</i> , dan KRI Updates to Risk Appetite, Risk Tolerance, and KRI		2.B.1 Penyusunan Mekanisme <i>Risk-based Budgeting</i> Formulation of a Risk-based Budgeting Mechanism		
2.C.1 Pemutakhiran Pedoman Manajemen Risiko Berkesinambungan dan Turunannya Updates to Continuous Risk Management Guidelines and Their Derivatives		2.C.2 Integrasi Manajemen Risiko dengan BCM/SMKB Integration of Risk Management with BCM/SMKB		
2.C.12 Penyusunan Pedoman Strategis Manajemen Risiko* Preparation of Strategic Risk Management Guidelines*	2.C.1.4 Penilaian <i>Risk Maturity Index</i> (RMI) KBUMN Assessment of MSOE Risk Maturity Index (RMI).		2.C.3 Integrasi Manajemen Risiko dan ESG Sustainability/Integration of Risk Management and ESG/ Sustainability	
2.C.1.3 Pelaksanaan <i>Stress Testing</i> Stress Testing Implementation		2.D.1. Interaksi dengan Internal Audit Interaction with Internal Audit		
2.C.1.6 Pemantauan Risiko Operasional Supervision of Operational Risk	2.C.1.6 Pemantauan Berkala Risiko Operasional Regular Supervision of Operational Risk			
	2.C.4 Pemutakhiran Manajemen Risiko <i>Climate</i> Update on Climate Risk Management	2.C.1.5 Proses Manajemen Risiko Operasional Management of Operational Risk Process		
3. Peningkatan Kompetensi Manajemen Risiko, <i>Capability Building</i> & Aktivasi <i>Risk Culture</i> Increase Risk Management Competency, Capability Building & Activate Risk Culture				
		3.1. Program Peningkatan Kompetensi dan Aktivasi <i>Risk Culture</i> Competency Improvement Program and Risk Culture Activation		
		3.1. Pelaksanaan <i>Capability Building</i> dan Aktivasi <i>Risk Culture</i> Implementation of Capability Building and Activation of Risk Culture		
4. Peningkatan Teknologi Manajemen Risiko Improved Risk Management Technology				
	4.1.1 Pemutakhiran dan Rekonfigurasi e-RM sesuai dengan Pedoman Manajemen Risiko Update and Reconfigure e-RM in accordance with Risk Management Guidelines		4.1.2 Dokumentasi & Pemantauan <i>Loss Event</i> Loss Event Documentation & Supervision	
			4.1.3 Pengembangan Dashboard <i>Key Risk Indicator</i> (KRI) Key Risk Indicator (KRI) Dashboard Development	

ROADMAP FOR DEVELOPMENT OF RISK MANAGEMENT

In 2023, the Company employed the 2023-2024 Enterprise Risk Management (ERM) roadmap in implementing tasks related to corporate risk management. The roadmap is updated regularly to ensure suitability and synchronization between risk management used in the Company and existing best practices. The following roadmap describes the Company's risk management targets and objectives.

- Sebagian telah dilaksanakan/perlu peningkatan
Several had been implemented/
require improvement
- Referensi APS dan PER-5/MBU/09/2022
Reference of APS and PER-5/MBU/09/2022

Inisiatif PENINGKATAN maturitas MR
MR Maturity IMPROVEMENT Initiative

Inisiatif Enabler | Enabler Initiative

Kegiatan RUTIN MENJAGA maturitas MR
ROUTINE MAINTAINANCE of MR's maturity

Inisiatif Core | Core Initiative

Recurring

2024				
Q1	Q2	Q3	Q4	
	1.1. Evaluasi berkala peran & tanggung jawab Periodic evaluation of roles & responsibility			
2.A. Update Risk Appetite, Tolerance, & KRI Update Risk Appetite, Tolerance, & KRI	2.C.1.1 Evaluasi berkala Pedoman Manajemen Risiko Periodic evaluation of Risk management Guidelines			
	2.C.1.2 Evaluasi berkala Pedoman Strategis Manajemen Risiko Periodic evaluation of the Strategic Risk Management Guidelines			
2.D.1 Periodik Interaksi & Diskusi Per Kuartal dengan Internal Audit Periodic Quarterly Interaction and Discussion with Internal Audit				
3.1 & 3.2 Quarterly Refreshment to Increase Risk Management Competency, Capability Building & Risk Culture Activation Quarterly Refreshment of Increased Risk Management Competency, Capability Building & Risk Culture Activation				
3.3 Evaluasi pelaksanaan Capability Building & Aktivasi Risk Culture (Tahunan) Evaluation of the implementation of Capability Building & Risk Culture Activation (Annual)				
4.2 Pengembangan Teknologi BCM & BCM Crisis Management BCM Technology Development & BCM Crisis Management		4.3 Pengembangan Risk Analytics Risk Analytics Development		
			4.4 Outsource WBS Outsource WBS	

Profil Pengelola Divisi Manajemen Risiko

Profile of Manager of Risk Management Division



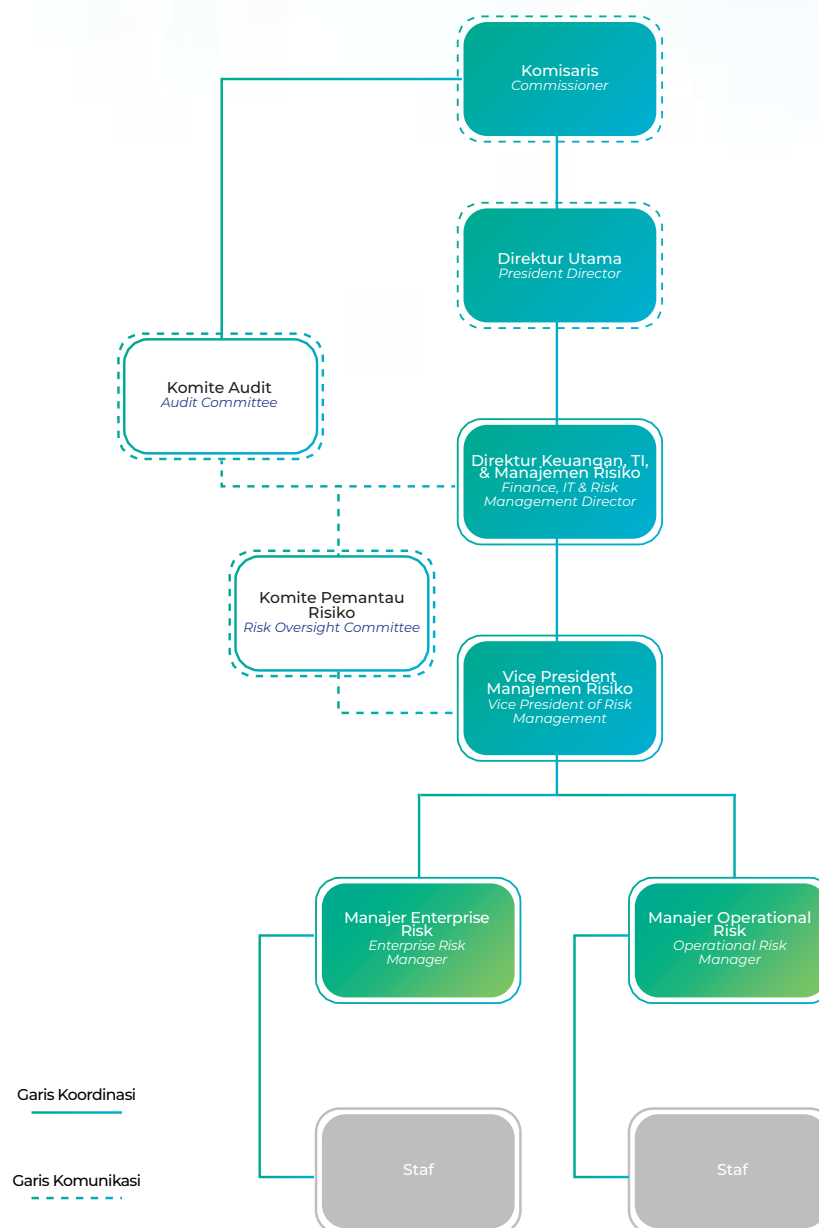
Nama <i>Name</i>	Nuke Dewi Novianti
Usia <i>Age</i>	40 Tahun Years Old
Kewarganegaraan <i>Nationality</i>	Indonesia
Domisili <i>Domicile</i>	Jakarta
Pendidikan <i>Educational</i>	- Magister Manajemen Strategik di Universitas Indonesia (2015) Master of Strategic Management, University of Indonesia (2015) - Sarjana Teknologi Pangan di Universitas Pasundan (2006) Bachelor of Food Technology, Pasundan University (2006)
Riwayat Pekerjaan <i>Work Experience</i>	Pekerjaan Umum Career: - Inspektur Regional I Sistem Pengendalian Internal (2019-2021) Inspector of Regional I of Internal Control System (2019-2021) - Manajer Pendidikan dan Pelatihan (2019) Education and Training Manager (2019) - Subkoordinator (09 Juni 2020-31 Maret 2021) Subcoordinator (09 June 2020-31 March 2021) - Manajer Pengembangan SDM (2018-2019) HR Development Manager (2018-2019) - Manajer Mutu (2014-2018) Quality Manager (2014-2018) - Manajer Manajemen Risiko (ERM) (2012-2014) Risk Management (ERM) Manager (2012-2014) Pelatihan Training: - Training dan Sertifikasi QCRO (27 Februari-1 Maret 2023) QCRO Training and Certification (27 February-1 March 2023) - Workshop Stress Testing (20-21 Maret 2023) Stress Testing Workshop (20-21 March 2023) - Training Awareness BCM (4 April 2023) BCM Awareness Training (4 April 2023) - Training Penyusunan Dokumen MKU (15-17 Mei 2023) MKU Document Preparation Training (15-17 May 2023) - Training Managing Legal Risk Based on ISO 31022:2020 (26-27 Juni 2023) Managing Legal Risk Based on ISO 31022:2020 Training (26-27 June 2023) - Executive Leadership Development Program (ELDP) (14-24 Juli 2023) Executive Leadership Development Program (ELDP) (14-24 July 2023) - BLMN GRC Masterclass Program: Pre IPO dan Post IPO (10 Agustus 2023) BLMN GRC Masterclass Program: Issuance & Rating of Debt & Sukuk Securities (10 August 2023) - Training Project Management (18-20 September 2023) Project Management Training (18-20 September 2023)
Dasar Hukum Pengangkatan <i>Legal Basis for Appointment</i>	Keputusan Direksi No. SK.468/PA.104/ASDP-2021 tanggal 19 Juli 2021 Decree of the Board of Directors No. SK.468/PA.104/ASDP-2021 dated 19 July 2021
Periode Jabatan <i>Term in Office</i>	Juli 2021-sekarang July 2021-present

KEDUDUKAN DAN STRUKTUR ORGAN DIVISI MANAJEMEN RISIKO

Dalam struktur organisasi Perusahaan, Manajemen Risiko berada di bawah naungan Direktorat Keuangan, TI & Manajemen Risiko. Kedudukan dan struktur Divisi Manajemen Risiko ditetapkan berdasarkan Keputusan Direksi No. KD.75/HK.001/ASDP-2021 tanggal 16 Juli 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pusat Dan Regional PT ASDP Indonesia Ferry (Persero).

POSITION AND ORGAN STRUCTURE OF THE RISK MANAGEMENT DIVISION

In the Company's organizational structure, Risk Management is under the responsibility of the Directorate of Finance, IT & Risk Management. The position and structure of the Risk Management Division was decided in Decree of the Board of Directors No. KD.75/HK.001/ASDP-2021 dated 16 July 2021 on the Organization and Work Procedures of the Head and Regional Offices of PT ASDP Indonesia Ferry (Persero).



PEDOMAN KERJA MANAJEMEN RISIKO

Dalam menjalankan tanggung jawabnya, Divisi Manajemen Risiko merujuk pada kerangka kerja yang telah ditetapkan, yang dikenal sebagai Pedoman Manajemen Risiko. Pedoman ini telah diresmikan berdasarkan keputusan bersama antara Direksi dan Dewan Komisaris, tercatat dalam Surat Keputusan No. SK.772/HK.002/ASDP-2023 yang dikeluarkan pada tanggal 1 Oktober 2023. Dokumen ini merupakan perbaruan dari Pedoman Manajemen Risiko sebelumnya yang dikeluarkan pada tahun 2020. Pedoman Manajemen Risiko menjadi panduan utama bagi Divisi Manajemen Risiko dalam mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mengelola risiko yang terkait dengan operasi dan kegiatan PT ASDP Indonesia Ferry (Persero). Ini mencakup proses analisis risiko, penentuan strategi manajemen risiko, serta langkah-langkah pemantauan dan penyesuaian berkelanjutan untuk mengoptimalkan upaya pengelolaan risiko Perusahaan.

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB PENGELOLA MANAJEMEN RISIKO

Tugas dan tanggung jawab Manajemen Risiko meliputi beberapa aspek, yaitu:

1. Pengelolaan risiko Perusahaan yang mencakup kebijakan, tahapan perencanaan, kerangka kerja, evaluasi risiko, perlakuan risiko, kontrol perbaikan risiko, dan komunikasi, serta penggabungan profil risiko dari semua unit kerja di Kantor Pusat, Regional, dan Cabang ke dalam Profil Risiko Korporat (*Enterprise Risk Management*).
2. Memastikan penerapan manajemen risiko agar dapat diterapkan secara optimal dalam seluruh proses Perusahaan.
3. Menjamin bahwa dilakukan peninjauan berkala untuk memastikan keakuratan metodologi serta kecukupan implementasi sistem informasi manajemen risiko, kepatuhan terhadap kebijakan dan prosedur manajemen risiko, dan penetapan batas risiko.
4. Mengarahkan dan memastikan pengembangan budaya manajemen risiko yang meresap di semua tingkatan organisasi.
5. Memastikan peningkatan kompetensi sumber daya manusia yang terlibat dalam Manajemen Risiko.

RISK MANAGEMENT WORK GUIDELINES

In carrying out their responsibilities, the Risk Management Division refers to the established framework known as the Risk Management Guidelines. The guidelines was approved with Joint Decree of the Boards of Commissioners and Directors No.SK.772/HK.002/ASDP-2023 issued on 1 Oktober 2023. This document was updated from 2020 Risk Management Guidelines. The Risk Management Guidelines served as the primary guidance for the Division of Risk Management in identifying, evaluating and managing risks related to the operations and activities of PT ASDP Indonesia Ferry (Persero). It covers the processes in risk analysis, decided strategies of risk management, as well as measures of continuous monitoring and adjustment to optimize the Company's risk management efforts.

DUTIES AND RESPONSIBILITIES OF RISK MANAGEMENT MANAGER

Risk Management duties and responsibilities include several aspects, namely:

1. Management of Company's risk which includes policies, planning, frameworks, risk evaluation, risk handling, risk improvement control, communication; and risk profiles compilation from all work units at the Head, Regional and Branch offices into the Corporate Risk Profile (*Enterprise Risk Management*).
2. Optimum implementation of risk management in all Company processes.
3. Ensured periodic reviews to determine the accuracy of the methodology, the adequacy of the risk management information system implementation, compliance with risk management policies and procedures, and the defining of risk limits.
4. Direct and ensure growth of risk management cultures spread extensively at all levels of the organization.
5. Ensure increased competency of employees involved in Risk Management.

6. Merencanakan dan menerapkan strategi Manajemen Kesiambungan Bisnis (*Business Continuity Management*).

6. Plan and implement strategies of Business Continuity Management.

KOMPOSISI KARYAWAN DIVISI MANAJEMEN RISIKO

Dalam menjalankan fungsinya sebagai pengelola risiko di Perusahaan, Divisi Manajemen Risiko didukung oleh personil yang memiliki latar belakang dan kompetensi mumpuni di bidang manajemen risiko. Divisi Manajemen Risiko didukung oleh 9 personil termasuk *Vice President* Manajemen Risiko, *Manajer Enterprise Risk*, *Manajer Operational Risk* dan staf Manajemen Risiko, dengan rincian personil sebagai berikut:

EMPLOYEE COMPOSITION IN DIVISION OF RISK MANAGEMENT

In carrying out their role as risk manager in the Company, the Risk Management Division is supported by personnels who possess strong background and competence in the risk management field. The Risk Management Division was supported by 9 personnels, including the *Vice President* of Risk Management, *Enterprise Risk Manager*, *Operational Risk Manager* and risk management staffs, with personal details as follows:

Nama Name	Jabatan Position	Pendidikan Education
Nuke Dewi Novianti	<i>Vice President</i> Manajemen Risiko VP of Risk Management	S2 Strategic Management, Universitas Indonesia Master of Strategic Management, University of Indonesia
Haniatur Rosyidah	<i>Manager Enterprise Risk</i>	SI Statistika, Universitas Diponegoro Bachelor of Statistics, Diponegoro University
Awaludin Ramadhani	<i>Manager Operational Risk</i>	SI Jurusan Manajemen, Universitas Sebelas Maret, Surakarta Bachelor of Management, Sebelas Maret University, Surakarta
Albert Pardomuan M.	<i>Staf Operational Risk</i>	SI Akuntansi Bachelor of Accounting
Miftachur Rohmatin	<i>Staf Enterprise Risk</i>	SI Teknik Industri, Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) Bachelor of Industrial Engineering, Sepuluh Nopember Institute of Technology
Rian Hidayatullah Pratama	<i>Staf Operational Risk</i>	SI Teknik Industri, Universitas Andalas Bachelor of Industrial Engineering, Andalas University
Mikhael Kristian Sinaga	<i>Staf Enterprise Risk</i>	SI Teknik Industri, Universitas Diponegoro Bachelor of Industrial Engineering, Diponegoro University
Okto Abdillah	<i>Staf Enterprise Risk</i>	SI Teknik Industri, Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) Bachelor of Industrial Engineering, Sepuluh Nopember Institute of Technology
Dedy Triwijaya	<i>Staf Operational Risk</i>	D3 Lalu Lintas ASDP Diploma 3 of Traffic, ASDP

KUALIFIKASI DAN SERTIFIKASI MANAJEMEN RISIKO

Perusahaan memastikan pengelolaan risiko di Perusahaan dilakukan secara komprehensif dengan memastikan personil pengelola risiko yang memiliki kualifikasi, dan kompetensi yang mendalam terutama mengenai prinsip-prinsip dasar, metode, analisis, dan strategi mitigasi risiko yang relevan. Untuk itu, Perusahaan melakukan sertifikasi kepada personil pengelola risiko dengan rincian sebagai berikut:

RISK MANAGEMENT QUALIFICATIONS AND CERTIFICATIONS

The Company ensures that risk management in the Company is implemented comprehensively by ensuring that risk management personnels have in-depth qualifications, and competence, especially regarding basic principles, methods, analysis, and relevant risk mitigation strategies. Thus, the Company deployed risk management personnels to obtain certifications, with the following details:

No	Sertifikasi Certification	Jumlah Personel Tersertifikasi Number of Certified Personnels
1.	QCRO (Qualified Chief Risk Officer)	1 orang person
2.	QRMP (Qualified Risk Management Professional)	2 orang persons
3.	QRMA (Qualified Risk Management Analyst)	7 orang persons
4.	Certified GRC Professional	2 orang persons
5.	Enterprise Risk Management Associate Professional (ERMAP)	3 orang persons

LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN DIVISI MANAJEMEN RISIKO

Sepanjang tahun 2023, Divisi Manajemen Risiko menjalankan berbagai kegiatan pengelolaan risiko maupun pengembangan sistem manajemen risiko di Perusahaan. Divisi Manajemen Risiko melaporkan pelaksanaan kegiatannya secara berkala kepada Direksi melalui Laporan Manajemen dan kepada Dewan Komisaris melalui Komite Pemantau Risiko. Berikut merupakan laporan kegiatan yang dijalankan Divisi Manajemen Risiko sepanjang tahun 2023:

1. Penyesuaian Kebijakan Manajemen Risiko sesuai ketentuan PER-2/MBU/03/2023 pada Bab III terkait Penerapan Manajemen Risiko BUMN;
2. Pengembangan aplikasi e-RM sebagai bentuk *enhancement* proses manajemen risiko dan kebutuhan penyesuaian PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) terhadap regulasi dan proses bisnis;
3. Asesmen tingkat kematangan manajemen risiko (*Risk Maturity Index*) tahun 2023 sebagai bentuk evaluasi penerapan Manajemen Risiko untuk membantu pencapaian tujuan Perusahaan. Pada tahun 2023 diperoleh skor RMI 3,09 (masuk dalam *level top down-to-systemic*);

REPORT OF ACTIVITY IMPLEMENTATION FOR DIVISION OF RISK MANAGEMENT

Throughout 2023, the Risk Management Division carried out various risk management activities and developed risk management systems in the Company. The Risk Management Division reported their activities regularly to the Board of Directors by submitting Management Reports, and to the Board of Commissioners through the Risk Oversight Committee. The following listed activities carried out by the Risk Management Division throughout 2023:

1. Amendment to Risk Management Policy according to provisions of PER-2/MBU/03/2023 in Chapter III on the Implementation of Risk Management in SOEs;
2. Development of the e-RM application to enhance the risk management process and to accommodate PT ASDP Indonesia Ferry (Persero)'s need to adjust to regulations and business processes;
3. Assessment of 2023 Risk Maturity Index in order to evaluate the implementation of Risk Management towards achieving the Company's goals. The RMI score for 2023 was 3.09, which was in 'top down-to-systemic' category;
4. Development of Business Continuity

4. Pengembangan *Business Continuity Management* (BCM) atau Sistem Manajemen Keberlangsungan Usaha (SMKU) sesuai ISO 22301:2029 untuk ruang lingkup Kantor Pusat, Cabang Merak, dan Cabang Bakauheni;
 5. *Monitoring* dan evaluasi atas profil risiko korporat tahun 2023 sebanyak 19 kali sesi diskusi asistensi, atas profil risiko setiap unit kerja yang terdiri dari 29 Profil Risiko Unit Kerja Kantor Pusat, 4 Profil Risiko Unit Kerja Regional, dan 27 Profil Risiko Unit Kerja Cabang;
 6. Asistensi manajemen risiko untuk penyusunan profil risiko korporat, unit kerja, proyek dan anak perusahaan tahun 2023;
 7. *Monitoring* risiko terhadap proyek PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) dan proyek anak perusahaan untuk profil risiko proyek yang sudah disusun *project owner*, dengan rincian sebagai berikut:
 - Profil risiko anak perusahaan PT Indonesia Ferry Properti (IFPRO),
 - Profil risiko anak perusahaan PT Jembatan Nusantara,
 - Proyek penghapusbukuan aset Merak,
 - Proyek *demolish* kantor Cabang Merak,
 - Proyek rehabilitasi KMP Jatra I,
 - Proyek pembangunan sistem *Human Capital Management System* (HCMS),
 - Proyek *bridging loan & top up equity* (PT IFPRO).
 8. Membangun *awareness* risiko bagi karyawan melalui beberapa kegiatan:
 - Kegiatan pengembangan kompetensi Manajemen Risiko bagi karyawan Perusahaan. Sampai dengan periode tahun 2023 jumlah pemegang sertifikasi manajemen risiko di Perusahaan mencapai 180 orang.
 - Kegiatan *risk culture* dengan cara internalisasi *framework* manajemen risiko Perusahaan melalui *monthly risk management poster*, *video campaign* pengelolaan risiko Perusahaan, dan kuis manajemen risiko setiap triwulan.
 - *Risk Agent Award* sebagai bentuk penghargaan yang diberikan kepada *Risk Officer* Terbaik dalam membantu koordinasi pelaksanaan manajemen risiko di masing-masing unit kerja.
 - *Risk Champion Award* sebagai penghargaan yang diberikan kepada Unit Kerja Terbaik yang telah menerapkan manajemen risiko dalam proses bisnis guna mencapai sasaran dan target yang ingin dicapai.
- Management (BCM) in accordance with ISO 22301:2029 for the Head Office, Merak and Bakauheni Branches;
5. Monitored and evaluated Company's 2023 risk profile on each work unit, which was conducted in 19 assistance discussion sessions, covering 29 Risk Profiles for Work Unit at Head Office, 4 Risk Profiles for Work Unit at Regional, and 27 Risk Profiles for Work Unit at Branches;
 6. Assisted in risk management duties to prepare risk profiles for corporate, work units, projects and subsidiaries in 2023;
 7. Risk monitoring on the Company's strategic and subsidiaries' projects, which risk profiles had been prepared by the project owners, on following projects:
 - Risk profile of the subsidiary PT Indonesia Ferry Properti (IFPRO),
 - Risk profile of the subsidiary PT Jembatan Nusantara,
 - Merak asset write-off project,
 - Office demolition at Merak branch,
 - KMP Jatra I rehabilitation project,
 - Human Capital Management System (HCMS) system development project,
 - Bridging loan & top up equity (PT IFPRO) project.
 8. Built risk awareness among employees through several activities:
 - Competency development activities on subject of Risk Management for employees. As of 2023, there were 180 people who are holders of Risk Management certification in the Company
 - Internalize risk management framework through risk culture activities, such as monthly risk management posters, risk management video campaigns, and quarterly risk management quizzes.
 - The Risk Agent Award, an appreciation given to the Best Risk Officer who had helped coordinate the implementation of risk management in each work unit.
 - The Risk Champion Award, an award given to the Best Work Unit that had implemented risk management in their business processes to achieve goals and targets.

9. Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan karyawan Divisi Manajemen Risiko.

9. Organised training for employees in Risk Management Division.

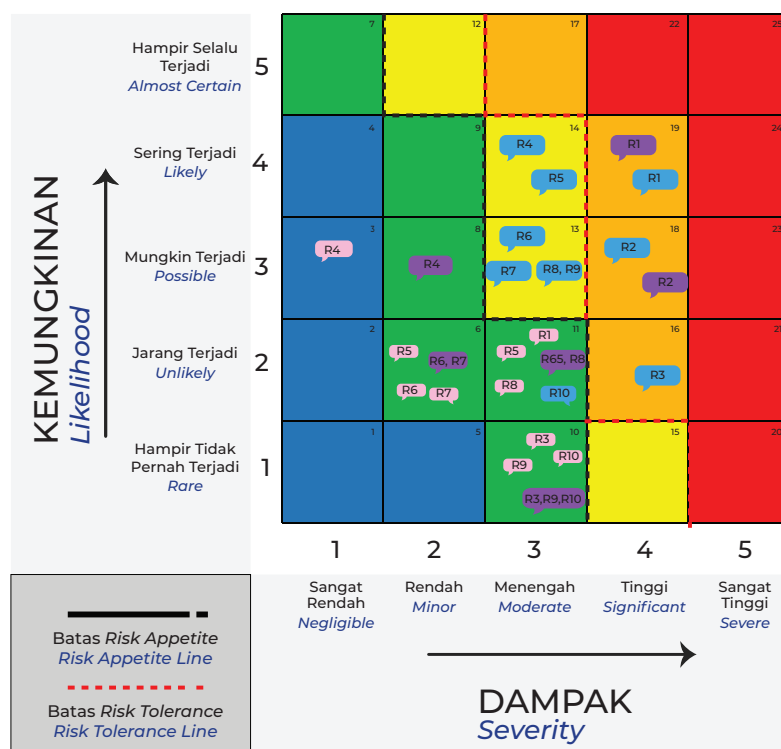
PROFIL RISIKO DAN MITIGASI RISIKO TAHUN 2023

Penentuan profil risiko di Perusahaan dilakukan melalui proses identifikasi, penilaian, dan dokumentasi terhadap berbagai risiko yang memiliki probabilitas untuk mempengaruhi pencapaian tujuan Perusahaan. Melalui profil risiko, Perusahaan dapat mengukur potensi dampak yang dapat terjadi sehingga Perusahaan dapat memetakan seluruh potensi risiko yang ada melalui *risk register*. Di samping itu, Perusahaan juga dapat menetapkan prioritas dan mitigasi risiko secara tepat berdasarkan faktor kemungkinan dan *level* dampak yang ditimbulkan dari risiko tersebut. Pada tahun 2023, Perusahaan mengidentifikasi risiko yang dipetakan dalam peta risiko sebagai berikut:

RISK PROFILE AND RISK MITIGATION IN 2023

Defining risk profiles in the Company went through processes of identification, assessment and documentation of various probable risks that could present obstacles in achieving the Company's objectives. The risk profiles allows the Company to measure the potential impact that may occur and create map of every existing potential risks through the risk register. Moreover, the Company can also set appropriate risk priorities and mitigation based on factor of possibilities and the extent of impact arising from the risk. In 2023, the Company identified risks that were mapped into the following risk map:

Peta dan Profil Risiko Perusahaan Tahun 2023
2023 Company Risk Map and Profile



No	Risiko Utama Main Risk	Inheren Inherent			Residual Residual			Terkini Current		
		Kemungkinan Probability	Dampak Impact	Nilai Risiko Risk Score	Kemungkinan Probability	Dampak Impact	Nilai Risiko Risk Score	Kemungkinan Probability	Dampak Impact	Nilai Risiko Risk Score
R1	Tidak Tercapainya Pendapatan Penyebrangan Perusahaan Underachieved Ferry Revenue	4	4	19	2	3	11	4	4	19
R2	Keterlambatan Investasi Armada Fleet Investment Delays	3	4	18	2	3	11	3	4	18
R3	Terjadinya Kecelakaan Armada (Kandas, Kebakaran, Tenggelam, Tubrukan) Fleet Accidents (Aground, Fire, Sinking, Collision)	2	4	16	1	3	10	1	3	10
R4	Pengelolaan Aset Yang Tidak Optimal Non-Optimal Asset Management	4	3	14	3	1	3	3	2	8
R5	Layanan Ferizy Tidak Terselenggara Sesuai Dengan Ketentuan Yang Berlaku Ferizy Non-compliance with Applicable Provisions	4	3	14	2	2	6	2	3	11
R6	Keterlambatan Proyek Bakauheni Harbour City Distrik 1 Meliputi Siger Dan Krakatau Park Delays in the BHC District 1 Projects including Siger and Krakatau Park	3	3	13	2	2	6	2	2	6
R7	Ketidaksiapan Infrastruktur Manajemen Karier Unprepared Career Management Infrastructure	3	3	13	2	2	6	2	2	6
R8	Tidak Tercapainya Target Kinerja, Dan GCG Anak Perusahaan Underachieved Performance Targets and GCG in Subsidiary	3	3	13	2	3	11	2	3	11
R9	Terjadinya Kegagalan Pada Infrastruktur TI Failure in IT Infrastructure	3	3	13	1	3	10	1	3	10
R10	Terjadinya Serangan Cyber Cyber Attack	2	3	11	1	3	10	1	3	10
Rata-rata Skor Risiko Average Risk Score		14,40			8,40			10,90		

* Skor Menengah

* Skor Rendah
- Menengah* Skor Rendah
- Menengah

Total Risiko per Level (Inherent Risk)	0	1	6	3	0
Total Risiko per Level (Residual Risk)	1	9	0	0	0
Total Risiko per Level (Current Risk)	0	8	0	2	0

Berdasarkan peta risiko tersebut, Perusahaan juga menetapkan berbagai langkah mitigasi untuk setiap risiko yang pada pelaksanaannya dilakukan pengawasan secara berkesinambungan guna memastikan mitigasi risiko dijalankan oleh masing-masing *risk owner*.

Based on the risk map, the Company also determined various mitigation steps for each risk. Implemented mitigation would be supervised on an ongoing basis to ensure risk mitigation was carried out by each risk owner.

Tabel Jenis dan Langkah Mitigasi Risiko Tahun 2023

Table of 2023 Risk Mitigation Types and Measures

No	Jenis Risiko <i>Risk Types</i>	Langkah Mitigasi <i>Mitigation Measures</i>
1.	Tidak tercapainya pendapatan penyeberangan perusahaan. <i>Company's ferriage income was underachieved.</i>	Produksi Production: - Melakukan evaluasi kinerja kapal bulanan dengan kontrol EBITDA per kapal per bulan dan potensi market pengguna jasa/penumpang penyeberangan per lintasan <i>Evaluated monthly vessel performance by controlling monthly EBITDA of each ship and market potential for ferry service users/crossings per route;</i> - Berkoordinasi dengan Divisi Pengadaan Armada bersama PMO terkait pantauan proses pengadaan kapal (target 2023 sebanyak 2 kapal rute Merak-Bakauheni, dan 1 kapal rute Lembar-Padangbai) <i>Coordinated with the Fleet Procurement Division and the PMO to monitor vessel procurement process (2023 targets were 2 ships for Merak-Bakauheni route, and 1 ship for Lembar-Padangbai route);</i> - Melakukan koordinasi dengan regional serta cabang-cabang dan Divisi Optimalisasi Manajemen Armada Kantor Pusat dan evaluasi potensi relokasi kapal (<i>fleet plan</i>) berdasarkan evaluasi kinerja No. 1 <i>Coordinated with regional, branch offices and the Division of Fleet Management Optimization at the Head Office and evaluate potential of fleet plan based on performance evaluation stated in No. 1;</i> - Melakukan evaluasi potensi penambahan kapasitas kapal (renovasi/modifikasi kapal) <i>Evaluated the potential for increased ship capacity (ship renovation/modification).</i> Tarif Rates: - Koordinasi dan pembahasan secara aktif dengan Tim Tarif dinas setempat dan stakeholder lainnya <i>Coordinated and discussed actively with the Tariff Team of the local agencies and other stakeholders.</i> Pesaing Competitor: - Optimalisasi skema kerja sama korporasi dengan mitra <i>Optimized corporate cooperation schemes with partners;</i> - Melakukan <i>business intelligence market research</i> untuk mengetahui peta persaingan, posisi ASDP di pasar, dan kondisi/strategi pesaing <i>Conducted business intelligence market research to understand the competitive mapping, ASDP's position in the market, and competitor analysis/strategies;</i> - Melakukan evaluasi potensi penambahan kapasitas kapal (renovasi/modifikasi kapal) <i>Evaluated the potential for increased ship capacity (ship renovation/modification);</i> - Menghitung elastisitas permintaan pasar terhadap <i>level of service</i>; dan elastisitas substitusi terhadap <i>level of service</i> pesaing <i>Calculated the elasticity of demand towards the level of service; and elasticity of substitution to competitors' levels of service.</i>
2.	Keterlambatan investasi armada. <i>Delay in fleet investment.</i>	Perencanaan Planning: - Divisi Komersial melakukan koordinasi dengan unit kerja terkait untuk pemenuhan dokumen perencanaan/pra pengadaan <i>The Commercial Division coordinated with relevant work units to complete planning/pre-procurement documents;</i> <i>Monitoring</i> dokumen pra pengadaan <i>Monitored pre-procurement documents.</i> Implementasi Implementation: - Divisi Pengadaan Armada berkoordinasi dengan BPKP apabila diperlukan pendampingan <i>The Fleet Procurement Division coordinated with Financial and Development Supervisory Board if any assistance was needed;</i> - Melaporkan progres pengadaan kapal secara berkala kepada Direksi <i>Regularly reported the progress of ship procurement to the Board of Directors;</i> - Secara aktif berkoordinasi dengan penyedia kapal, memonitor <i>website</i> yang menginformasikan penjualan/lelang kapal, dan/atau para <i>broker</i>/penyelenggara lelang kapal untuk mendapatkan kapal sesuai dengan spesifikasi yang dibutuhkan <i>Actively coordinated with ship providers, monitored websites displaying ship sales/auctions, and/or brokers/organizers of ship auction to acquire ships according to the required specifications;</i> - Melakukan evaluasi skema pengadaan kapal antara lain skema/pengadaan kapal baru, pengadaan kapal bukan baru, pengadaan dengan skema pembiayaan <i>Evaluated ship procurement schemes, among which are for new ship, non-new ship, financing schemes;</i> - Melakukan transaksi pembelian kapal <i>Made transactions on ship purchase;</i> - Mengkaji ulang skema lain pengadaan kapal yang akan dipergunakan <i>Reviewed other fleet procurement schemes that would be used.</i>

No	Jenis Risiko <i>Risk Types</i>	Langkah Mitigasi <i>Mitigation Measures</i>
3	Terjadinya kecelakaan armada (kandas, kebakaran, tenggelam, tubrukan). <i>Fleet accidents (aground, fire, sinking, collision).</i>	Alam Natural Cause: <i>Internal Audit ISM Code</i>, dengan memastikan kesiapan kru kapal dalam menghadapi cuaca buruk <i>Ran Internal Audit on ISM Code, and ensured the ship's crew readiness to face bad weather;</i> - Pelaksanaan Posko <i>Emergency Respond Team</i> saat terjadi kecelakaan <i>Set up an Emergency Response Team Post when an accident occurred;</i> - Pelaksanaan klarifikasi/investigasi saat terjadi kecelakaan <i>Clarified/investigated when an accident occurred.</i> People: <i>Internal Audit ISM Code</i>, dengan memastikan kesiapan kru kapal dalam menghadapi cuaca buruk <i>Ran Internal Audit on ISM Code, and ensured the ship's crew readiness to face bad weather;</i> - Pelaksanaan Posko <i>Emergency Respond Team</i> saat terjadi kecelakaan <i>Set up an Emergency Response Team Post when an accident occurred;</i> - Pelaksanaan klarifikasi/investigasi saat terjadi kecelakaan <i>Clarified/investigated when an accident occurred;</i> <i>Refreshing</i> dan peningkatan disiplin ABK/SDM, termasuk familiarisasi dan evaluasi <i>Organised refreshing activities and improved crew/HR discipline, including familiarization and evaluation;</i> - Melakukan penilaian oleh <i>port captain</i> <i>Perfomed an assessment by the port captain;</i> - Melakukan pelatihan dan pengembangan dari hasil penilaian kinerja yang telah dilakukan <i>Arranged training and development based on the results of performance appraisals carried out.</i> Teknis Technical Cause: - Pelaksanaan Posko <i>Emergency Respond Team</i> saat terjadi kecelakaan <i>Set up an Emergency Response Team Post when an accident occurred;</i> - Pelaksanaan klarifikasi/investigasi saat terjadi kecelakaan <i>Clarified/investigated when an accident occurred;</i> - Pemantauan mesin armada melalui aplikasi manajemen <i>monitoring</i> permesinan (SIEMON, Sistem <i>Engine Monitoring Online</i>), dan <i>safety device</i> untuk memantau tekanan oli, suhu <i>engine</i> dan RPM <i>Monitored fleet engine through application on machine management (SIEMON, System Engine Monitoring Online), and safety devices to monitor oil pressure, engine temperature and RPM;</i> <i>Monitoring</i> dan/atau survei kesiapan armada pra Angkutan Lebaran dan/atau agenda nasional <i>Monitored and/or surveyed fleet readiness prior to Eid and/or other national programs.</i> Operasional Operations: - Pelaksanaan Posko <i>Emergency Respond Team</i> saat terjadi kecelakaan <i>Set up an Emergency Response Team Post when an accident occurred;</i> - Pelaksanaan klarifikasi/investigasi saat terjadi kecelakaan <i>Clarified/investigated when an accident occurred;</i> <i>Top drill response</i> keadaan darurat terkoordinasi di lintasan utama Merak-Bakauheni dan Ketapang-Gilimanuk <i>Coordinated top drill response for emergencies on main routes of Merak-Bakauheni and Ketapang-Gilimanuk.</i>

No	Jenis Risiko <i>Risk Types</i>	Langkah Mitigasi <i>Mitigation Measures</i>
4	Pengelolaan aset yang tidak optimal. Suboptimal asset management.	Kebijakan Policy: - Memberikan usulan penghapusan aset, penyesuaian AD/ART terkait penghapusan aset <i>Proposed for asset write-offs, adjustments to Memorandum of Association/ Articles of Association related to asset write-offs;</i> - Melakukan sosialisasi KD Pengelolaan Aset ke setiap cabang <i>Publicized Directors' Decision on Asset Management to every branch;</i> - Penyelesaian prosedur pengelolaan aset dan komponen aset <i>Completed procedures on asset and asset components management.</i> Teknologi Informasi Information Technology: - Penyusunan aplikasi manajemen aset produksi <i>Prepared applications of production asset management;</i> - Melakukan <i>barcoding</i> pada aset <i>Performed barcoding on assets.</i> Pencatatan Recording: - Menyusun <i>master list</i> aset sebagai hasil dari inventarisasi aset dan melakukan <i>update</i> secara regular atas <i>master list</i> tersebut <i>Prepared a master list of assets based on asset inventory and regularly update it;</i> - Melakukan <i>clearance</i> aset bersama <i>asset owner</i> yang lain (QC, Umum & IT) <i>Conducted asset clearance with other asset owners (QC, General & IT).</i> Sertifikat Certificate: - Akan dilakukan MOU dengan BPN di wilayah regional, dll, serta adanya arsip dan pencarian seluruh lahan yg potensi maupun sedang sengketa <i>Planned to execute MOU with National Land Agency in regional areas, as well as build archives and search results of all potential or disputed land;</i> - Menganggarkan biaya dalam potensi ganti rugi atas sengketa dan persidangan lahan dan uang kerohiman <i>Budgeted funds for potential indemnity for land disputes, land trials and compensation fund.</i> - Mengurus hak kepemilikannya terlebih dahulu (sertifikat tanah) dapat diajukan secara <i>online</i>, koordinasi antara GM Cabang dengan kepala desa setempat terkait <i>history</i> catatan kepemilikan tanah tersebut <i>Applied land's freehold title, which can be submitted online, coordinated with the GM of branch office and the local village head regarding the history of land ownership records.</i> Implementasi Implementation: - Menginventarisasi aset-aset yang bermasalah baik yang terkait dengan hukum atau permasalahan lainnya <i>Made inventory of problematic assets, whether related to legal or other issues;</i> - Melakukan pendekatan kepada masyarakat setempat dan <i>stakeholder</i>, dan jika diperlukan melakukan koordinasi dengan APH apabila sampai batas tertentu dibutuhkan intervensi dari sisi penegakan hukum <i>Approached the local community and stakeholders and coordinated with law enforcement, in the extent which intervention was required.</i> Pencatatan Recording: - Meminta cabang/fungsi untuk <i>update progress</i> data ADK tiap 3 bulan sekali, apabila ADK telah selesai dibuktikan dengan BA <i>Progress</i> 100%, Cabang mengirimkan permohonan reklasifikasi aset ADK menjadi aset tetap dengan catatan nilai di SAP telah sesuai dengan nilai kontrak pekerjaan <i>Requested branch/function to update the Fixed Assets in Construction (ADK) data on quarterly basis, followed by official 100% progress report upon completion, submitted request from the branch for reclassification of ADK assets to fixed assets under condition that the value in SAP is in accordance with the work contract value;</i> - Pencatatan aset yang belum terinput di sistem, segera dilakukan akuisisi aset dan diakui di neraca perusahaan <i>Recorded assets that have not been inputted into the system, carried out asset acquisition immediately and recognized on the company's balance sheet;</i> - Membuat <i>master data list</i> aset yang akan dan sedang dibangun untuk keseluruhan perusahaan dan melakukan kontrol atas penyelesaian/mutasi aset yang sudah selesai. Ditunjuk PIC yang bertanggung jawab untuk melakukan kontrol atas <i>monitoring</i> aset dimaksud <i>Created a master data list of assets that would be and was being built for the entire company and exercised control over the completion/mutation of completed assets. A PIC was appointed to oversee control over monitoring the assets in question.</i>

No	Jenis Risiko <i>Risk Types</i>	Langkah Mitigasi <i>Mitigation Measures</i>
5	Layanan Ferizy tidak terselenggara sesuai dengan ketentuan yang berlaku. <i>Ferizy service was not in accordance with applicable regulations.</i>	1. Sosialisasi secara berkala terkait prosedur penanganan dan pengendalian gangguan operasional <i>e-ticketing system environment</i> KSO (NS-301 s.d NS-305) kepada petugas terkait <i>Disseminated regularly about procedures to handle and control operational disruptions on e-ticketing system environment KSO (NS-301 to NS-305) to relevant officers;</i> 2. Pelaksanaan <i>mystery shopper</i> secara berkala yang disertai dengan laporan evaluasi <i>Implemented mystery shoppers program regularly, followed by evaluation reports;</i> 3. Penataan <i>flow traffic</i> kendaraan di pelabuhan agar mempermudah petugas untuk memverifikasi data pengguna jasa <i>Arranged the vehicle traffic flow at the port to ease the officers in verifying service user data;</i> 4. Melakukan <i>rolling</i> petugas operasional (organik & <i>outsourcing</i>) <i>Put operational officers (organic & outsourced) on rolling duty;</i> 5. Penambahan petugas <i>stopper</i> (<i>outsourcing</i>) dengan kompetensi yang dipersyaratkan <i>Increased (outsourced) stopper officers according to the required competencies;</i> 6. Implementasi <i>buffer zone</i> (di luar pelabuhan) sebagai area filterisasi dan pengecekan kesesuaian data pengguna jasa bersama <i>stakeholder</i> terkait khususnya pada saat <i>peak season</i> <i>Designated buffer zone (off port) as area for filtering and checking the suitability of service user data with relevant stakeholders, especially during peak season;</i> 7. Penataan penempatan petugas operasional di area MB dan <i>side ramp</i> <i>Arranged placements of operational officers in the MB and side ramp areas;</i> 8. Melakukan penataan posisi dan/atau penambahan <i>manless</i> <i>Arrange positions and/or increase manless;</i> 9. Simulasi untuk mengetahui kehandalan server KSO dalam menerima <i>request</i> pada waktu <i>peak season</i> beserta menguji kemampuan dan kecepatan <i>recovery plan</i> apabila <i>server down</i> <i>Ran simulation to determine the KSO server reliability in receiving requests during peak season as well as tested the capability and speed of the recovery plan should the server went down;</i> 10. Melakukan simulasi/<i>drill</i> secara berkala <i>Conducted simulations/drills periodically;</i> 11. Membentuk tim Ferizy <i>Operations Support Team</i> untuk <i>standby 24/7</i> sebagai <i>first level support</i> <i>Formed a Ferizy Operation Support Team to be on standby 24/7 as first level support;</i> 12. Meminta cabang untuk dapat melakukan <i>tally</i> muatan secara berkala <i>Requested branches to tally loads periodically;</i> 13. Mengimplementasi <i>Chief Services Officer</i> di pelabuhan (pelayanan) <i>Appointed a Chief Services Officer at the Port (services);</i> 14. Mengimplementasi <i>Chief Security Officer</i> di pelabuhan (operasional) <i>Appointed a Chief Security Officer at the Port (operations);</i> 15. Menginisiasi pengamanan tertutup di pelabuhan <i>Initiated closed security at the port;</i> 16. Menginisiasi pengetatan aksi <i>open gate</i> <i>Initiated tightening of the open gate action;</i> 17. Menginisiasi pengetatan pemberian akses SAB sesuai dengan KD SKPT <i>Initiated tightening of SAB granted access in accordance with KD SKPT.</i> Kesisteman System: 1. Penggunaan sensor dimensi kendaraan <i>Utilised vehicle dimension sensors;</i> 2. Pemasangan CCTV <i>Counting</i> di pelabuhan <i>Installed Counting CCTV at the Port;</i> 3. Penambahan CCTV di pelabuhan dan kapal penyeberangan <i>Added CCTV at ports and ferries;</i> 4. Penambahan <i>turnstile</i> pejalan kaki di pelabuhan <i>Added pedestrian turnstiles at the port.</i>

No	Jenis Risiko <i>Risk Types</i>	Langkah Mitigasi <i>Mitigation Measures</i>
6	Keterlambatan proyek Bakauheni Harbour City Distrik 1 meliputi Siger dan Krakatau Park. <i>Delayed Bakauheni Harbour City District 1 project including Siger and Krakatau Parks.</i>	Pendanaan/Investasi Funding/Investment: - Melakukan pendekatan potensi kerja sama dengan <i>strategic investor</i> untuk <i>tenant</i> komersial di BHC <i>Worked on potential collaboration approach with strategic investors for commercial tenants at BHC.</i> Perijinan Licensing: - Melakukan <i>monitoring</i> kepada konsultan AMDAL untuk percepatan perijinan lingkungan nilai, dan pengawasan progres pekerjaan <i>Monitored AMDAL consultants to expedite environmental permits, and monitored work progress;</i> - Memasukkan unsur ESG di dalam skema bisnis dan operasional BHC <i>Incorporated ESG into BHC's business and operational schemes.</i> Implementasi Implementation: - Melakukan percepatan proses pengadaan konsultan jasa dengan berkoordinasi dengan Divisi Pengadaan <i>Expedited the procurement for service consultants by coordinating with Procurement Division;</i> - Membuat Rencana Anggaran untuk tahun 2023 dengan mempertimbangkan pekerjaan yang akan dilakukan pada tahun 2023 <i>Drafted 2023 Budget Plan by evaluating works to be carried out in 2023;</i> - Berkoordinasi secara bulanan dengan <i>Project Manajement Office</i> dan Direktur Perencanaan terkait perkembangan BHC Distrik 1 <i>Coordinated monthly with the Project Management Office and Planning Director on the development of BHC District 1;</i> - Mengoptimalkan fungsi <i>advisor project</i> <i>Optimized the project advisor role;</i> - Melakukan pembentukan tim operasional BHC untuk pengawasan dan supervisi secara langsung <i>Formed BHC operational team to monitor and supervise directly;</i> - Melakukan koordinasi rutin dengan Divisi OMP untuk <i>monitoring</i> dan pelaksanaan pengerjaan fisik renovasi Siger tahap II, jalan akses tahap II serta <i>skywalk/skybridge</i> <i>Coordinated regularly with the OMP Division to monitor and construction of Siger phase II renovation, phase II access road and skywalk/skybridge;</i> - Melakukan koordinasi rutin dengan Divisi PPU dan Divisi OMP untuk <i>monitoring</i> dan pelaksanaan pengerjaan fisik <i>amphitheater</i> dan <i>sports center</i> <i>Coordinated regularly with the PPU and OMP Divisions to monitor and build amphitheater and sports center.</i>
7	Ketidaksiapan infrastruktur Manajemen Karier. <i>Unprepared Career Management infrastructure.</i>	Kebijakan Policy: - Menyusun desain model kompetensi pada setiap level jabatan yang merupakan infrastruktur Manajemen Karier <i>Designed a competency model for each position level that formulated the Career Management infrastructure;</i> - Melakukan kegiatan <i>benchmark</i> pengembangan sistem Manajemen Karier <i>Benchmarked against career management system development;</i> - Melakukan sosialisasi kebijakan Manajemen Karier <i>Disseminated policies on Career Management.</i> IT: - Pembuatan sistem aplikasi HCMS Fase IA (administrasi) dan Fase IB (<i>performance</i>) <i>Created HCMS application system for Phase IA (administration) and Phase IB (performance).</i> SDM HR: - Melakukan survei pemahaman ke karyawan tentang Manajemen Karier <i>Conducted survey of awareness to employees on Career Management subject;</i> - Optimalisasi pelaksanaan sesi umpan balik (<i>feedback coaching</i>) dan program pengembangan kompetensi karyawan <i>Optimized the implementation of feedback coaching sessions and employee competency development programs.</i>

No	Jenis Risiko <i>Risk Types</i>	Langkah Mitigasi <i>Mitigation Measures</i>
8	Tidak tercapainya target kinerja, dan GCG anak perusahaan. <i>Underachieved performance targets and GCG of subsidiary.</i>	Kebijakan Policy: - Menyusun program GCG, seperti kebijakan, SOP yang belum ada di anak perusahaan, dengan target PT JN 2 SOP dan PT IFPRO 3 SOP di tahun 2023 <i>Developed GCG program, such as policies and SOPs that subsidiaries didn't have, with 2023 targets of 2 SOPs for PT JN and 3 SOPs PT IFPRO;</i> - Mengintegrasikan laporan keuangan induk dan anak perusahaan atau menyamakan COA antara laporan induk dengan anak <i>Integrated the parent's and subsidiaries' financial reports or equated the COA between the parent and subsidiary reports;</i> - Membuat <i>fleet plan</i> terintegrasi antara Induk dan Anak (JN) <i>Created an integrated fleet plan between holding and subsidiary (JN);</i> - Membuat kerangka <i>cost sharing</i> and <i>cost leadership</i> antara Induk dan Anak (JN) <i>Create a cost sharing and cost leadership framework between holding and subsidiary (JN);</i> - Membuat <i>business case</i> terintegrasi antara Induk dan Anak (IFPRO) terkait potensi peningkatan utilisasi terminal untuk meningkatkan pendapatan sewa dan okupansi <i>Created an integrated business case between holding and subsidiary (IFPRO) on the increased terminal utilization potential to increase rental income and occupancy;</i> - Berkolaborasi dengan anak perusahaan untuk mengembangkan bisnis perusahaan <i>Collaborated with subsidiaries to develop the company's business;</i> - Mendorong anak perusahaan untuk menyusun program strategis RJPP periode 5 tahun mendatang <i>Prompted subsidiaries to develop long term strategic programs for the next 5 years.</i> Operasional Operations: - Berkoordinasi dengan anak perusahaan untuk mendorong penyusunan <i>roadmap</i> investasi di PT IFPRO <i>Coordinated with subsidiary to prepare an investment roadmap at PT IFPRO;</i> - Membuat konsinyering atau <i>meeting</i> koordinasi dengan anak usaha terkait evaluasi kinerja anak perusahaan <i>Organised coordination meetings with subsidiaries to evaluate performances of subsidiaries;</i> - Melakukan evaluasi atas realisasi kinerja anak perusahaan (bulanan, triwulanan, semester, tahunan) <i>Evaluated the actualized subsidiary performance (monthly, quarterly, semester, yearly);</i> - Berkoordinasi dengan anak perusahaan untuk mendorong agar penyampaian laporan kinerja manajemen tepat waktu <i>Coordinated with subsidiaries for punctual submission of management performance reports.</i>
9	Terjadinya kegagalan pada infrastruktur TI. <i>Failure on IT infrastructure.</i>	- Kontrak berdasarkan SLA dengan penyedia jasa jaringan komunikasi data <i>SLA-based contract with data communication network service providers;</i> - Menyediakan <i>backup link</i> dari <i>provider</i> yang berbeda <i>Equipped backup links from different providers;</i> - Menyediakan <i>data centre</i> dari <i>provider</i> yang berbeda (DC1/DC2), menggunakan mekanisme 2 DC (<i>active-active</i>) <i>Prepared data centers from different providers (DC1/DC2), using a 2 DC (active-active) mechanism;</i> - Melakukan pemeliharaan rutin dan terjadwal dengan dukungan pihak ketiga menggunakan kontrak <i>support maintenance</i> <i>Carried out routine and scheduled maintenance through maintenance support contracts with third party.</i>
10	Terjadinya serangan cyber. <i>Cyber attacked.</i>	- Membangun budaya <i>cyber security</i> secara berkala <i>Steadily built culture of cyber security;</i> - Implementasi anti virus <i>Anti-virus implementation;</i> - Implementasi <i>firewall</i> <i>Firewall implementation;</i> - Update anti virus <i>Updated anti-virus;</i> - Update <i>firewall</i> <i>Updated firewalls;</i> <i>Back up & recovery system</i> <i>Built back up & recovery system;</i> <i>Pentest</i> <i>Pentest;</i> - Penggunaan <i>antispam</i> dan <i>gateway mail server</i> <i>Use of antispam and mail server gateways;</i> - Melakukan <i>hardening server</i> <i>Server hardening;</i> - Pembuatan <i>blueprint security</i> <i>Created a security blueprint;</i> - Membuat kajian untuk penanganan cyber dengan membentuk Tim SOC <i>Managed Service</i> <i>Made a review study for cyber management by forming a SOC Managed Service Team.</i>

EVALUASI ATAS EFEKTIVITAS PELAKSANAAN MANAJEMEN RISIKO

Pengelolaan risiko di Perusahaan dilakukan di seluruh lini bisnis dan proses bisnis oleh pemilik proses selaku *risk owner*. Peran dari pengelola manajemen risiko yaitu untuk memastikan pengelolaan risiko telah dilakukan secara efektif sesuai dengan kebijakan, peraturan dan *best practices* yang berlaku. Pengelola manajemen risiko berperan dalam melakukan validasi dan verifikasi atas identifikasi dan mitigasi risiko, memantau manajemen risiko yang dilakukan oleh *risk owner* serta melakukan pendampingan melalui *coaching & mentoring* terhadap penyusunan profil risiko maupun pada proses pengelolaan risiko oleh masing-masing *risk owner*.

Untuk memastikan pengelolaan risiko di Perusahaan berjalan secara efektif, Perusahaan melakukan penilaian pelaksanaan manajemen risiko melalui asesmen *risk maturity index* (RMI) yang dilakukan oleh asesor independen. Pada tahun 2023, Perusahaan memperoleh skor RMI sebesar 3,09 yang termasuk dalam *level top down-to-systemic*. Pada *level* ini, proses manajemen risiko Perusahaan telah terdefinisi dan terstandarisasi secara *top-down* serta menjadi bagian dari kegiatan Perusahaan namun pengelolaan manajemen risiko perlu ditingkatkan secara berkelanjutan dan terintegrasi.

Dalam pelaksanaan asesmen *risk maturity index*, terdapat beberapa indikator penilaian yang digunakan beserta skor pada setiap indikator sebagai berikut:

EVALUATION OF THE EFFECTIVENESS OF RISK MANAGEMENT IMPLEMENTATION

In the Company, risk management is implemented across all business lines and processes by the process owner in the capacity as risk owner. The role of the risk management manager is to ensure that risk management has been carried out effectively in accordance with applicable policies, regulations and best practices. Risk management managers validates and verifies risk identification and mitigation, monitors risk management carried out by risk owners and provides assistance through coaching & mentoring in the risk profiles formulation and the risk management process by each risk owner.

To ensure risk management runs effectively, the Company assesses the risk management implementation using a Risk Maturity Index (RMI) that is carried out by an independent assessor. In 2023, the Company obtained an RMI score of 3.09, which falls in the top down-to-systemic level category. In this category, the Company's risk management process has been defined and standardized in a top-down manner and has become part of the Company's activities, however, it still needs improvements to make it sustainable and integrated.

In risk maturity index assessment, several indicators used and their respective scores are described as follows:

Tahun Year		2022	2023
Skor Score		2.8	3.09
Tata Kelola Risiko Risk Governance	Konten & Definisi Risiko <i>Risk Context & Definition</i>	2.75	3.00
	Kerangka Kerja Manajemen Risiko <i>Risk Management Framework</i>	3.00	3.33
	Peran & Tanggung Jawab Manajemen Risiko <i>Risk Management Roles & Responsibilities</i>	2.67	3.33
	Pengawasan Strategis Risiko <i>Strategic Risk Oversight</i>	2.75	3.00
Infrastruktur Risiko Risk Infrastructure	Fungsi Manajemen Risiko <i>Risk Management Function</i>	2.50	3.00
	Alat Bantu Manajemen Risiko <i>Risk Management Tools</i>	2.71	3.14
	Pemantauan Manajemen Risiko yang Objektif <i>Objective Oversight of Risk Management</i>	3.00	3.00
Kepemilikan Risiko Risk Ownership	Tanggung Jawab Unit Bisnis <i>Business Unit Responsibilities</i>	2.80	3.00
	Tanggung Jawab Unit Pendukung <i>Support Unit Responsibilities</i>	3.00	3.00

PROGRAM PENGEMBANGAN KOMPETENSI MANAJEMEN RISIKO

Perusahaan memastikan pengelolaan risiko di Perusahaan dijalankan secara optimal sesuai dengan *best practices* yang berlaku. Untuk itu, Perusahaan berupaya meningkatkan kompetensi personil pengelola risiko untuk memastikan jalannya pengelolaan risiko secara optimal. Pengembangan kompetensi ini juga tidak hanya ditujukan bagi pengelola risiko, melainkan untuk *risk owner* dan seluruh pemangku kepentingan di Perusahaan. Sepanjang tahun 2023, Perusahaan melakukan kegiatan pengembangan kompetensi manajemen risiko sebagai berikut:

RISK MANAGEMENT COMPETENCY DEVELOPMENT PROGRAM

The Company ensures that risk management in the Company is carried out optimally in accordance with applicable best practices. Thus, the Company seeks to improve the competency of risk management personnels to ensure optimal risk management. The competency development was not only aimed at risk managers, but also for risk owners and all stakeholders in the Company. Throughout 2023, the Company had carried out activities of risk management competency development, as follows:

1. Pengembangan kompetensi manajemen risiko bagi karyawan di Divisi Manajemen Risiko untuk setiap *level* jabatan.
 2. *Risk Awareness Campaign* untuk meningkatkan pemahaman manajemen risiko bagi karyawan berupa sosialisasi *monthly risk management poster*, *video campaign* pengelolaan risiko Perusahaan, dan kuis manajemen risiko setiap triwulan.
 3. *Risk Agent Award* sebagai bentuk penghargaan yang diberikan kepada *Risk Officer* terbaik dalam membantu koordinasi pelaksanaan manajemen risiko di masing-masing unit kerja.
 4. *Risk Champion Award* merupakan program *reward*/penghargaan yang diberikan kepada unit kerja terbaik, yang telah menerapkan manajemen risiko dalam proses bisnis guna mencapai sasaran dan target yang ingin dicapai.
1. Competency development on Risk Management for employees of every levels in Risk Management Division.
 2. Risk Awareness Campaign to increase employees' awareness about risk management through monthly risk management poster, risk management video campaigns, and quarterly risk management quizzes.
 3. The Risk Agent Award, an appreciation given to the Best Risk Officer who had helped coordinate the implementation of risk management in each work unit.
 4. The Risk Champion Award, an award given to the best work unit that had implemented risk management in their business processes to achieve goals and targets.

Program Pengembangan Kompetensi di Divisi Manajemen Risiko Competency Development Program in the Risk Management Division

Nama Karyawan Employee	Jabatan Position	Nama Pelatihan Name of Training	Waktu Pelaksanaan Date
Nuke Dewi Novianti	Vice President Manajemen Risiko Vice President of Risk Management	Training dan Sertifikasi QCRO QCRO Training and Certification	27 Februari-1 Maret 2023 27 February-1 March 2023
		Workshop Stress Testing Stress Testing Workshop	20-21 Maret 2023 20-21 March 2023
		Training Awareness BCM BCM Awareness Training	4 April 2023 4 April 2023
		Training Penyusunan Dokumen MKU Training on Preparing MKU Documents	15-17 Mei 2023 15-17 May 2023
		Training Managing Legal Risk Based on ISO 31022:2020 Training on Managing Legal Risk Based on ISO 31022:2020	26-27 Juni 2023 26-27 June 2023
		Executive Leadership Development Program (ELDP)	14-24 Juli 2023 14-24 July 2023
		BLMN GRC Masterclass Program: Pre IPO dan Post IPO BLMN GRC Masterclass Program: Pre IPO and Post IPO	10 Agustus 2023 10 August 2023
		BLMN GRC Masterclass Program: Penerbitan & Pemeringkatan Efek Bersifat Utang & Sukuk (EBUS) BLMN GRC Masterclass Program: Issuance & Rating of Debt & Sukuk Securities	10 Agustus 2023 10 August 2023
		Training Project Management Project Management Training	18-20 September 2023 18-20 September 2023

Nama Karyawan Employee	Jabatan Position	Nama Pelatihan Name of Training	Waktu Pelaksanaan Date
Awaludin Ramadhani	Manajer Operational Risk Operational Risk Manager	Training ESG ESG Training	6-8 Februari 2023 6-8 February 2023
		Training KRI KRI Training	13 Februari-14 Maret 2023 13 February-14 March 2023
		Workshop Stress Testing Stress Testing Workshop	20-21 Maret 2023 20-21 March 2023
		Training Awareness BCM BCM Awareness Training	4 April 2023 4 April 2023
		Training Penyusunan Dokumen MKU Training on Preparing MKU Documents	15-17 Mei 2023 15-17 May 2023
		Training & Sertifikasi QRMP QRMP Training & Certification	19-23 Juni 2023 19-23 June 2023
		Training Risk Management Maturity Risk Management Maturity Training	10-12 Juli 2023 19-23 July 2023
Haniatur Rosyidah	Manajer Enterprise Risk Enterprise Risk Manager	Penyuluhan KPPU KPPU briefing	23 November 2023 23 November 2023
		Workshop Stress Testing Stress Testing Workshop	20-21 Maret 2023 20-21 March 2023
		Training Awareness BCM BCM Awareness Training	4 April 2023 4 April 2023
		Training Penyusunan Dokumen MKU Training on Preparing MKU Documents	15-17 Mei 2023 15-17 May 2023
		Training & Sertifikasi QRMP QRMP Training & Certification	19-23 Juni 2023 19-23 June 2023
		Training Risk Management Maturity Risk Management Maturity Training	10-12 Juli 2023 10-12 July 2023
		Managerial Leadership Development Program	11-16, 18-20 Agustus 2023 11-16, 18-20 August 2023
Albert Pardomuan Manurung	Analisis Operational Risk Operational Risk Analyst	Training Risk Management Maturity Risk Management Maturity Training	10-12 Juli 2023 10-12 July 2023
		Training KRI KRI Training	13 Februari-14 Maret 2023 13 February-14 March 2023
		Workshop Stress Testing Stress Testing Workshop	20-21 Maret 2023 20-21 March 2023
		Training Awareness BCM BCM Awareness Training	4 April 2023 4 April 2023
		Training Penyusunan Dokumen MKU Training on Preparing MKU Documents	15-17 Mei 2023 15-17 May 2023
		Penyuluhan KPPU KPPU briefing	23 November 2023 23 November 2023

Nama Karyawan Employee	Jabatan Position	Nama Pelatihan Name of Training	Waktu Pelaksanaan Date
Rian Hidayatullah Pratama	Staf Operational Risk Operational Risk Staff	Workshop Stress Testing Stress Testing Workshop	20-21 Maret 2023 20-21 March 2023
		Training Awareness BCM BCM Awareness Training	4 April 2023 4 April 2023
		Training Penyusunan Dokumen MKU Training on Preparing MKU Documents	15-17 Mei 2023 15-17 May 2023
		Training Project Risk Management Project Risk Management Training	15-16 Mei 2023 15-16 May 2023
		Penyuluhan KPPU KPPU briefing	23 November 2023 23 November 2023
		Training dan Sertifikasi QRMA QRMA Training and Certification	7-10 Februari 2023 7-10 February 2023
		Training Project Management Project Management Training	25-27 September 2023 25-27 September 2023
Miftachur Rohmatin	Staf Enterprise Risk Enterprise Risk Staff	Training KRI KRI Training	13 Februari-14 Maret 2023 13 February-14 March 2023
		Workshop Stress Testing Stress Testing Workshop	20-21 Maret 2023 20-21 March 2023
		Training Awareness BCM BCM Awareness Training	4 April 2023 4 April 2023
		Training Penyusunan Dokumen MKU Training on Preparing MKU Documents	15-17 Mei 2023 15-17 May 2023
		Training Risk Management Maturity Risk Management Maturity Training	10-12 Juli 2023 10-12 July 2023
Mikhael Kristian Sinaga	Staf Enterprise Risk Enterprise Risk Staff	Training Integration QMS and Risk Management QMS Integration and Risk Management Training	31 Juli-2 Agustus 2023 31 July-2 August 2023
		CEO Talk "Staying Agile-Experiences and Practices" CEO Talk "Staying Agile-Experiences and Practices"	22 Agustus 2023 22 August 2023
		GRC Masterclass: Sosialisasi Pemeringkatan BUMN & Anak Perusahaan BUMN GRC Masterclass: Socialization of the Ranking of SOEs & SOEs Subsidiaries	21 September 2023 21 September 2023
		BSE GRC Masterclass - Introduction to EDG & IFC Performance Standard BSE GRC Masterclass - Introduction to EDG & IFC Performance Standard	20 September 2023 20 September 2023
		Training & Sertifikasi QRMA QRMA Training & Certification	25-29 September 2023 25-29 September 2023
Okto Abdillah	Staf Enterprise Risk Enterprise Risk Staff	CEO Talk "Staying Agile-Experiences and Practices" CEO Talk "Staying Agile-Experiences and Practices"	22 Agustus 2023 22 August 2023
		GRC Masterclass: Sosialisasi Pemeringkatan BUMN & Anak Perusahaan BUMN GRC Masterclass: Socialization of the Ranking of SOEs & SOEs Subsidiaries	14 September 2023 14 September 2023
		Training & Sertifikasi QRMA QRMA Training & Certification	25-29 September 2023 25-29 September 2023
		CEO Talk "Regulasi, Teknologi, dan SDM sebagai Inisiatif Strategis Pengembangan Parwisata" CEO Talk "Regulation, Technology and Human Resources as Strategic Initiatives for Tourism Development"	5 Oktober 2023 5 October 2023

Program Capacity Building Karyawan pada Bidang Manajemen Risiko Employee Capacity Building Programs in the Risk Management

Nama Pelatihan Training	Sasaran Peserta Targeted Participants	Jumlah Peserta Total Participants	Waktu Pelaksanaan Date
Inhouse workshop Key Risk Indicator	Risk officer (staf) Risk officer (staff)	63 orang people	13-14 Maret 2023 13-14 March 2023
Workshop Stress Test	Pejabat D-1, Pejabat D-2, dan Staf BoD-1 Executive, BoD-2 Executive, and Staff	38 orang people	20-21 Maret 2023 20-21 March 2023
Inhouse Training dan Sertifikasi QRMO (Qualified Risk Management Officer) Inhouse Training and QRMO Certification	Risk officer (staf) Risk officer (staff)	16 orang people	10-12 Mei 2023 10-12 May 2023
Workshop Risk Based Budgeting	Pejabat D-1, Pejabat D-2, dan Staf BoD-1 Executive, BoD-2 Executive, and Staff	47 orang people	25-26 Mei 2023 25-26 May 2023
Inhouse Training dan Sertifikasi QRMP (Qualified Risk Management Professional) Inhouse Training and QRMP Certification	Pejabat D-2 BoD-2 Executive	33 orang people	19-23 Juni 2023 19-23 June 2023
Inhouse Training dan Sertifikasi QCRO (Qualified Chief Risk Officer) Inhouse Training and QCRO Certification	Pejabat D-1 BoD-1 Executive	27 orang people	3-4 Juli 2023 3-4 July 2023
Inhouse Workshop Risk Management Maturity	SPI dan Divisi Manajemen Risiko Internal Audit Unit and Risk Management Division	15 orang people	10-12 Juli 2023 10-12 July 2023
Inhouse Training dan Sertifikasi QRGP (Qualified Risk Governance Professional) Inhouse Training and QRGP Certification	Dewan Komisaris, Direksi, Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko Board of Commissioners, Board of Directors, Audit Committee and Risk Oversight Committee	16 orang people	Batch 1 27-28 Juli 2023 27-28 July 2023 Batch 2 6-7 September 2023 6-7 September 2023

PERKARA HUKUM YANG BERDAMPAK MATERIAL YANG DIHADAPI PERUSAHAAN, ENTITAS ANAK, ANGGOTA DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS

LEGAL CASES THAT HAVE A MATERIAL IMPACT TO THE COMPANY, SUBSIDIARIES, MEMBERS OF THE BOARD OF DIRECTORS AND BOARD OF COMMISSIONERS

Isu yang signifikan mencakup berbagai aspek hukum yang dihadapi oleh Perusahaan, termasuk baik kasus litigasi maupun non-litigasi. Perusahaan harus menghadapi berbagai permasalahan hukum yang melibatkan Entitas Anak, Dewan Komisaris, Direksi, maupun Perusahaan sendiri dan potensi sanksi administrasi dari otoritas terkait. Kasus litigasi, yang merujuk pada permasalahan hukum yang diselesaikan melalui lembaga peradilan seperti Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, Pengadilan Pajak, dan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, menjadi bagian integral dari tantangan hukum yang mungkin dihadapi oleh Perusahaan.

Dalam menjalankan operasionalnya, manajemen dan seluruh pemangku kepentingan Perusahaan secara konsisten mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku serta proaktif dalam mengantisipasi setiap tindakan atau kebijakan yang memiliki potensi untuk menimbulkan permasalahan hukum. Tindakan ini mencerminkan komitmen Perusahaan untuk memastikan kepatuhan terhadap norma hukum dan untuk mengelola risiko hukum secara efektif dalam konteks kegiatan bisnisnya.

Significant issues loomed over various legal aspects faced by the Company, including litigation and non-litigation cases. The Company faced legal issues that involved Subsidiaries, the Board of Commissioners, the Board of Directors, and the Company itself, along with potential administrative penalties from the relevant authorities. Litigation cases, which are legal issues resolved through judicial institutions such as the District Court, High Court, Tax Court and Corruption Crimes Court, makes up majority of the legal challenges the Company may face.

In their operations, Company's management and stakeholders consistently comply with applicable laws and regulations and stays proactive in anticipating any actions or policies that could cause legal problems. The work approach reflects the Company's commitment to ensure compliance with laws and to manage legal risks effectively in their business activities.

PERKARA HUKUM YANG DIHADAPI PERUSAHAAN

Pada tahun 2023, Perusahaan menghadapi sejumlah perkara hukum yang melibatkan proses litigasi. Dalam konteks ini, perlu dicatat bahwa entitas bisnis tersebut terlibat dalam beberapa kasus hukum yang memerlukan penyelesaian melalui jalur litigasi.

LEGAL CASES FACED BY THE COMPANY

In 2023, the Company faced several legal cases involving court proceedings. In this context, it should be mentioned that the business entities were involved in several legal cases that required resolution through judicial means.

Perkara Litigasi yang Dihadapi Perusahaan Tahun 2023 Litigation Cases Faced by the Company in 2023

No	Pokok Perkara dan Kasus Posisi <i>Lawsuit Cases and Positions</i>	Status Penyelesaian <i>Settlement Status</i>	Risiko dan Nilai Nominal Tuntutan/Gugatan <i>Risk and Nominal Value of Claim/Suit</i>	Sanksi <i>Penalty</i>
1	Gugatan wanprestasi PT Infiniti Indosakti kepada PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) <i>Lawsuit for negligence from PT Infiniti Indosakti against PT ASDP Indonesia Ferry (Persero)</i>	Relaas putusan kasasi di tingkat Mahkamah Agung 13 Desember 2023, upaya hukum lain yang akan digunakan PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) adalah dengan peninjauan kembali. <i>Released the cassation verdict at the Supreme Court on 13 December 2023, PT ASDP Indonesia Ferry (Persero)'s legal remedy would be judicial review.</i>	Rp76.500.000.000	-
2	Gugatan perbuatan melawan hukum PT Graha Fatta kepada PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) <i>Lawsuit for unlawful act from PT Graha Fatta against PT ASDP Indonesia Ferry (Persero)</i>	Perkara telah selesai di tingkat banding dan sudah berkekuatan hukum tetap pada 7 November 2023 dimenangkan oleh PT ASDP Indonesia Ferry (Persero). <i>The case was completed at appeal phase and the legally binding verdict was issued on 7 November 2023, won by PT ASDP Indonesia Ferry (Persero).</i>	Putusan sudah berkekuatan hukum tetap dan dimenangkan oleh PT ASDP Indonesia Ferry (Persero). <i>The verdict was legally binding and was won by PT ASDP Indonesia Ferry (Persero).</i>	-
3	Gugatan wanprestasi PT Dian Sentosa kepada PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) <i>Lawsuit for negligence from PT Dian Sentosa against PT ASDP Indonesia Ferry (Persero)</i>	Relaas putusan kasasi di tingkat Mahkamah Agung pada 13 November 2023, upaya hukum lain yang akan digunakan PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) adalah dengan peninjauan kembali. <i>Released the cassation verdict of the Supreme Court on 13 November 2023, PT ASDP Indonesia Ferry (Persero)'s legal remedy would be judicial review.</i>	Rp23.108.020.000	-
4	Gugatan perbuatan melawan hukum PT Persada Gading Elok kepada PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) <i>Lawsuit for unlawful act from PT Persada Gading Elok against PT ASDP Indonesia Ferry (Persero)</i>	Gugatan tanggal 10 Oktober 2023, status perkara saat ini masih dalam proses mediasi di tingkat Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. <i>Lawsuit was issued on 10 October 2023, the case status was being mediated at the Central Jakarta District Court.</i>	Rp8.284.182.865	-

No	Pokok Perkara dan Kasus Posisi <i>Lawsuit Cases and Positions</i>	Status Penyelesaian <i>Settlement Status</i>	Risiko dan Nilai Nominal Tuntutan/Gugatan <i>Risk and Nominal Value of Claim/Suit</i>	Sanksi <i>Penalty</i>
5	Gugatan perbuatan melawan hukum dari Sdr. Tugino, Sdr. Ratim, Sdr. Jamino, Sdr. Sugeng dan Sdr. Waluyo kepada PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) <i>Lawsuit for unlawful act from Mr. Tugino, Mr. Ratim, Mr. Jamino, Mr. Sugeng and Mr. Waluyo against PT ASDP Indonesia Ferry (Persero)</i>	Perkara telah selesai di tingkat kasasi pada tanggal 5 April 2023 dan dimenangkan oleh PT ASDP Indonesia Ferry (Persero). <i>The case was completed at the cassation level on 5 April 2023 and was won by PT ASDP Indonesia Ferry (Persero).</i>	Putusan sudah berkekuatan hukum tetap dan dimenangkan oleh PT ASDP Indonesia Ferry (Persero). <i>The verdict was legally binding and was won by PT ASDP Indonesia Ferry (Persero).</i>	-
6	Gugatan perbuatan melawan hukum dari Sdr. Turyono, Sdr. Tugino, dkk kepada PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) <i>Lawsuit for unlawful act from Mr. Turyono, Mr. Tugino, et al against PT ASDP Indonesia Ferry (Persero)</i>	Gugatan tanggal 10 Oktober 2023, status perkara saat ini dalam tahap proses persidangan di Pengadilan Negeri Kalianda. <i>Lawsuit was issued on 10 October 2023, the case status was in the trial stage at the Kalianda District Court.</i>	Lahan seluas 25.000 m ² <i>Land area of 25,000 m²</i>	-

PERKARA HUKUM YANG DIHADAPI DEWAN KOMISARIS DAN/ATAU DIREKSI

Sepanjang periode tahun 2023, Dewan Komisaris maupun Direksi Perusahaan tidak menghadapi kendala atau masalah hukum yang berdampak substansial. Seluruh kegiatan dan operasional yang dilakukan oleh kedua lembaga tersebut berjalan dengan kepatuhan terhadap norma-norma hukum yang berlaku, sehingga tidak ada konflik atau ketidaksesuaian yang dapat menciptakan potensi risiko hukum.

LEGAL CASES FACED BY THE BOARDS OF COMMISSIONERS AND/OR DIRECTORS

Throughout 2023, the Company's Boards of Commissioners and Directors did not face any legal issues of substantial impact. All activities and operations were carried out by both organs in compliance with applicable legal norms, such that there were neither conflicts nor inconsistencies that could potentially lead to legal risks.

PERKARA HUKUM YANG DIHADAPI ENTITAS ANAK

Selama periode tahun 2023, tidak terdapat permasalahan hukum yang dihadapi oleh Entitas Anak Perusahaan, baik dalam ranah perdata maupun pidana.

LEGAL CASES FACED BY SUBSIDIARIES

During 2023, the Subsidiaries did not face any legal issues, neither civil nor criminal cases.

SANKSI ADMINISTRATIF

ADMINISTRATIVE PENALTY

Selama tahun 2023, tidak terdapat sanksi administratif yang diberlakukan terhadap entitas Perusahaan, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi maupun entitas Anak Perusahaan oleh pihak otoritas terkait. Pada periode tersebut, entitas Perusahaan bersama dengan anggota Dewan Komisaris dan Direksi tidak mengalami penegakan tindakan hukum atau sanksi pemerintah dalam bentuk administratif yang dapat mempengaruhi operasional dan kepemimpinan mereka.

During 2023, there were no administrative penalty imposed, neither on Company's entities, Subsidiaries' entities, nor on members of the *Boards of Commissioners and Directors* by relevant authorities. Throughout the year, the Company and the members of the *Boards of Commissioners* and Directors also were not implicated in any legal action or government penalty that may resulted in administrative penalty that affected their operations and leaderships.

AKSES DATA DAN INFORMASI PERUSAHAAN

DATA ACCESS AND COMPANY INFORMATION

AKSES DATA DAN INFORMASI PERUSAHAAN

Perusahaan memandang bahwa pengungkapan informasi yang komprehensif bukan sekadar pemenuhan kewajiban semata, melainkan sebagai bentuk transparansi dan implementasi tata kelola perusahaan yang baik sebagai menjadi fondasi utama dalam membangun citra Perusahaan yang solid di hadapan masyarakat luas dan pemangku kepentingan.

Perusahaan berupaya memberikan informasi yang memadai dan akuntabel kepada stakeholders dengan memperhatikan ketentuan internal terkait dengan pengelolaan data dan pengendalian informasi perusahaan. Komitmen Perseroan ditunjukkan dengan penyajian informasi yang selalu diperbaharui sesuai situasi terkini melalui berbagai saluran baik secara langsung maupun tidak langsung.

DATA ACCESS AND COMPANY INFORMATION

The Company considered comprehensive information disclosure beyond mere obligations, but part of transparency in good corporate governance implementation as the vital foundation in building a solid Company image for the wider community and stakeholders.

The Company strives to provide adequate and accountable information to stakeholders while still being heedful to internal regulations related to data management and control of company information. The Company's commitment is demonstrated by presenting most recent information that is relevant to ongoing situation through various channels, both directly and indirectly.

SEKRETARIS PERUSAHAAN

Perusahaan melalui Sekretaris Perusahaan menjalankan fungsi komunikasi Perusahaan yang ditujukan bagi pemangku kepentingan internal dan eksternal. Fungsi ini dijalankan melalui Unit Kerja Komunikasi Perusahaan dan Unit Kerja Hubungan Investor dan Kelembagaan yang masing-masing memegang peranan penting dalam aspek komunikasi Perusahaan.

ALAMAT KANTOR PUSAT

Perusahaan memastikan ketersediaan akses terhadap data dan informasi perusahaan bagi *stakeholders* baik secara *online* maupun dalam bentuk media cetak. Selain itu, data dan informasi perusahaan dapat juga diperoleh melalui alamat dan kontak berikut:

Jl. Jend. Achmad Yani Kav. 52 A,
Jakarta, 10510 Indonesia
Telp (+6221) 420 8911-13-15
Faks (+6221) 421 0544

SITUS WEB

Data dan informasi mengenai Perusahaan tersedia secara daring melalui situs web resmi dengan alamat www.asdp.id. Situs web ini didesain dengan tampilan bilingual, tersedia dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris. Menghadirkan beberapa halaman utama seperti Beranda, Tentang Kami, Layanan Kami, dan Hubungan Kami, situs ini menyajikan beragam informasi yang substansial dan dapat diakses oleh masyarakat umum, para pemegang saham, serta pihak-pihak terkait lainnya.

Di samping itu, situs web Perusahaan juga menyediakan berbagai tautan informasi tambahan, termasuk panduan Pembayaran Tiket *Online*, Prakiraan Cuaca, informasi seputar karier, Lelang, serta berbagai tautan lainnya. Melalui situs web, Perusahaan juga memberikan akses kepada Laporan Tahunan dalam format *softcopy* yang dapat diunduh dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris.

CORPORATE SECRETARY

The Corporate Secretary carries out the Company's communication role that is aimed at internal and external stakeholders. This role is performed by the Corporate Communications Work Unit as well as the Investor and Institutional Relations Work Unit, each plays an important role in the Company's communication aspects.

HEAD OFFICE ADDRESS

The Company ensures that access to company data and information is available for stakeholders, both online and on print media. Additionally, company data and information can also be obtained through the following address and contacts:

Jl. Jend. Achmad Yani Kav. 52 A,
Jakarta, 10510 Indonesia
Tel (+6221) 420 8911-13-15
Fax (+6221) 421 0544

WEBSITE

Data and information about the Company is available online on the official website at www.asdp.id. The website was designed in bilingual pages, Indonesian and English. Presented as main pages are Homepage, About Us, Services, and Relations, the site presents substantial information that can be accessed by the general public, shareholders and other related parties.

In addition, the Company's website also provides additional information links, including instructions for Online Ticket Payment, Weather Forecasts, information about Careers, Auctions, and other links. The Company's website also gives access to the Annual Reports in softcopy format, which can be downloaded in Indonesian and English.

MEDIA SOSIAL

Perusahaan memiliki sejumlah saluran komunikasi tambahan yang dapat diakses oleh khalayak melalui berbagai *platform* media sosial seperti Twitter, Facebook, dan Instagram. Pengelolaan media sosial dilakukan oleh tim khusus yang bertanggung jawab atas pengelolaan akun-akun media sosial tersebut. Tujuan dari tim ini adalah untuk memastikan bahwa informasi yang disampaikan memadai, akurat, dan dapat memberikan respon secara cepat terhadap pertanyaan yang masuk melalui media sosial.

MEDIA CETAK

Media cetak memiliki peran penting sebagai saluran akses yang memungkinkan akses terhadap informasi Perusahaan dalam berbagai bentuk, termasuk *company profile*, buletin/majalah Lintas Nusa, dan Laporan Tahunan (*Annual Report*). Semua ini berfungsi sebagai sumber informasi yang dapat diakses oleh para pemegang saham, masyarakat umum, dan pihak-pihak terkait lainnya yang memiliki kepentingan terhadap Perusahaan.

LAPORAN TAHUNAN DAN LAPORAN KEBERLANJUTAN

Setiap tahun, Perusahaan menyusun dua laporan penting yaitu Laporan Tahunan dan Laporan Keberlanjutan yang terintegrasi dalam 1 (satu) laporan tahunan terintegrasi. Melalui laporan ini, Perusahaan berupaya menyampaikan laporan kinerja Perusahaan selama 1 (satu) tahun buku pada seluruh aspek termasuk menggambarkan pencapaian, proyeksi, dan gambaran menyeluruh tentang kinerja dan arah strategis Perusahaan. Sementara Laporan Keberlanjutan berfokus pada aspek keberlanjutan, termasuk tanggung jawab sosial perusahaan, dampak lingkungan, dan inisiatif keberlanjutan yang dijalankan. Laporan-laporan ini tidak hanya ditujukan kepada pemegang saham Perusahaan untuk memberikan gambaran yang komprehensif tentang kinerja, tetapi juga disampaikan kepada regulator untuk memenuhi kewajiban peraturan yang berlaku. Selain itu, laporan-

SOCIAL MEDIA

The Company has additional communication channels accessible by the public through various social media platforms such as Twitter, Facebook, and Instagram. Social media management is carried out by a designated team who is responsible for managing these social media accounts. The team's objective is to ensure that the information uploaded is adequate, accurate, and provide a quick response to questions received via social media.

PRINT MEDIA

Print media plays an important role as a gateway that allows access to Company information in various forms, covering company profiles, Lintas Nusa bulletin/magazine, and Annual Reports. All of these functions as a source of information that can be accessed by shareholders, the general public and other related parties who have interest in the Company.

ANNUAL REPORT AND SUSTAINABILITY REPORT

Every year, the Company prepares two important report, namely the Annual Reports and the Sustainability Reports, which are combined into 1 (one) integrated annual report. Through the reports, the Company presents their performance for 1 (one) financial year in all aspects covering from achievements, projections and comprehensive picture of the Company's performance and strategic direction. Meanwhile, the Sustainability Reports focuses on aspects of sustainability, including corporate social responsibility, environmental impacts, and sustainability initiatives that have been implemented. These reports are addressed not only to Company shareholders to provide a comprehensive picture on performance, but are also submitted to regulators to fulfill applicable regulatory obligations. Aside from that, these reports are also published on the mass media

laporan ini juga disebarluaskan kepada media massa dan masyarakat agar informasi mengenai Perusahaan dapat diakses dan dipahami oleh berbagai pemangku kepentingan.

and the public at large, such that information about the Company can be accessed and understood by various stakeholders.

SIARAN PERS

Sepanjang tahun 2023, Perusahaan telah secara aktif menggunakan siaran pers dengan menerbitkan sebanyak 199 artikel. Melalui serangkaian siaran pers ini, Perusahaan bertujuan untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat secara transparan dan terbuka. Di bawah ini merupakan rekapitulasi siaran pers per bulan selama tahun 2023:

PRESS CONFERENCE

Throughout 2023, the Company had actively utilised press releases by publishing 199 articles. Through the press releases, the Company aimed to convey information to the public in a transparent manner. Below is a summarized issued press releases by month during 2023:

Bulan Month	Jumlah Siaran Pers Number of Press Releases
Januari January	13
Februari February	12
Maret March	14
April April	34
Mei May	13
Juni June	17
Juli July	15
Agustus August	15
September September	17
Oktober October	12
November November	13
Desember December	24
Total	199

MONITORING DAN EVALUASI PEMBERITAAN PERUSAHAAN

Sebagai upaya untuk memastikan citra perusahaan yang positif, Perusahaan melakukan *monitoring* dan evaluasi terhadap pemberitaan Perusahaan melalui *media monitoring* yang dilakukan di berbagai media baik dalam bentuk media *online*, media cetak dan media TV.

Sepanjang tahun 2023, terdapat 88.489 pemberitaan mengenai Perusahaan yang terdiri dari 84.434 berita pada media *online*, 3.334 berita pada media cetak, serta 721 klip berita dari media TV.

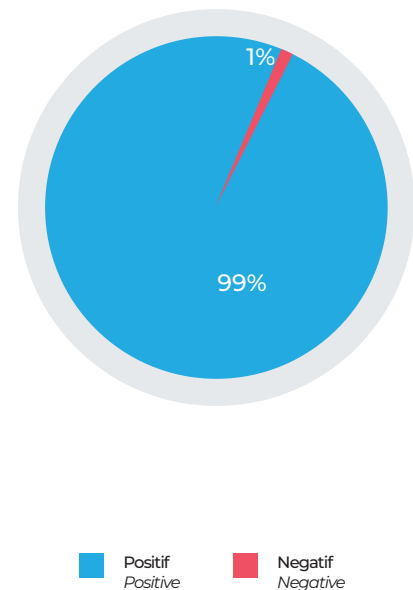
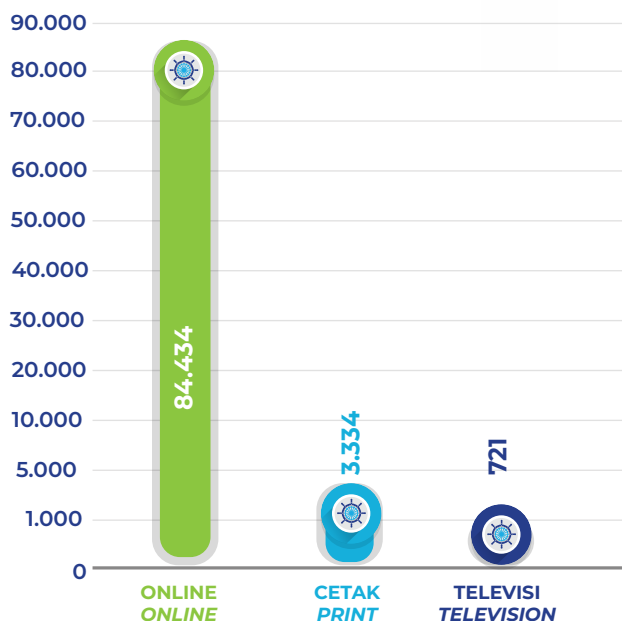
Perusahaan melakukan *monitoring* terhadap sentimen pemberitaan terhadap Perusahaan yang didominasi oleh pemberitaan positif sebesar 92%, dan pemberitaan negatif sebesar 1%.

MONITORING AND EVALUATION OF COMPANY NEWS

With efforts to ensure a positive company image, the Company monitors and evaluates news about the Company through media monitoring in various online, print and TV media channels.

Throughout 2023, there were 88,489 news coverages about the Company, consisting of 84,434 news coverage in online media, 3,334 news in print media, and 721 news clips on TV.

The Company also monitored the sentiment towards the Company implied by these news, which was dominated by positive reportage at 92%, and negative reportage at 1%.



PEDOMAN ETIKA PERUSAHAAN/ KODE ETIK

COMPANY ETHICS GUIDELINES/ CODE OF CONDUCT

Pedoman Etika Perusahaan atau *Code of Conduct* (CoC) memberikan arahan yang jelas mengenai harapan terhadap perilaku setiap individu di ASDP dalam segala interaksi dengan pemegang saham, rekan kerja, pemasok/rekanan, pemerintah, dan masyarakat. Seluruh keputusan dan langkah yang diambil oleh setiap anggota Perusahaan yang mewakili entitas tersebut diharapkan untuk memenuhi standar integritas yang tertinggi, bahkan ketika standar tersebut tidak secara eksplisit tercakup dalam hukum dan regulasi yang berlaku di Indonesia.

Penyusunan Pedoman Etika Perusahaan memiliki tujuan utama untuk memberikan panduan perilaku yang konsisten dengan visi dan misi Perusahaan secara profesional dan beretika. Hal ini juga dimaksudkan untuk mengurangi potensi risiko melalui pengelolaan yang lebih baik serta berkontribusi dalam membangun reputasi yang kuat bagi Perusahaan. Pedoman ini tidak hanya sekadar aturan, tetapi juga menjadi landasan untuk membangun hubungan yang harmonis, memupuk sinergi, dan memastikan keuntungan saling berdampak positif antara Perusahaan dan berbagai pihak yang berkepentingan (*stakeholders*). Kode etik yang terdapat dalam Pedoman Etika Perusahaan mengacu pada beragam peraturan dan ketentuan yang relevan, sebagai berikut:

1. UU No. 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara juncto UU No. 6 Tahun 2023 Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
2. UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas juncto UU No. 6 Tahun 2023 Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;

The Company's Code of Conduct (CoC) provides clear direction on the expected behavior of each individual at ASDP in their interactions with shareholders, colleagues, suppliers/partners, the government and the community. Every decisions and measures taken by representative members of the Company are expected to meet the highest standards of integrity, even though the standard is not explicitly stated by applicable laws and regulations in Indonesia.

The Company's Code of Conduct was formulated with the primary objective to provide behavioral guidance that is consistent with the Company's vision and mission in a professional and ethical manner. It is also intended to reduce potential risks through better management and to impart impeccable reputation of the Company. The guideline serves beyond a set of rule, it also functions as groundwork in building harmonious relationships, fostering synergy, and ensuring mutual benefits that impact positively to the Company and the stakeholders. The ethical guide contained in the Company's Code of Conduct refers to various relevant rules and regulations, which are:

1. Law No. 19/2003 concerning State-Owned Enterprises in conjunction with Law No. 6/2023 Stipulation of Government Regulations in Lieu of Law No. 2/2022 concerning Job Creation To Become Law;
2. Law No. 40/2007 concerning Limited Liability Company in conjunction with Law No. 6/2023 on Stipulation of Government Regulation in Lieu of Law No. 2/2022 concerning Job Creation becomes Law;

3. Peraturan Negara BUMN No. PER-01/MBU/2011 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri BUMN No. PER-09/MBU/2012 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) pada BUMN;
4. Peraturan Menteri BUMN No. PER-2/MBU/03/2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara;
5. Surat Edaran Menteri BUMN No. SE-05/MBU/2013 tentang *Roadmap* menuju BUMN Bersih;
6. Keputusan Sekretaris Menteri BUMN No. SK-16/S.MBU/2012 tentang Indikator/Parameter Penilaian dan Evaluasi atas Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) pada BUMN;
7. Pedoman Umum Governansi Korporat Indonesia (PUG-KI), Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG), 2021;
8. Anggaran Dasar Perusahaan dan perubahannya.
3. Regulation of the Minister of SOEs No. PER-01/MBU/2011, amended in No. PER-09/MBU/2012 concerning the Implementation of Good Corporate Governance in SOEs;
4. Regulation of Minister of SOEs No. PER-2/MBU/03/2023 concerning Guidelines for Governance and Significant Corporate Activities of State-Owned Enterprises;
5. Circular of the Minister of SOEs No. SE-05/MBU/2013 concerning Roadmap towards Clean SOEs;
6. Decree of the Secretary Minister of SOEs No. SK-16/S.MBU/2012 concerning Indicators/Parameters for Assessment and Evaluation on the Implementation of Good Corporate Governance by SOEs;
7. General Guidelines for Indonesian Corporate Governance (PUG-KI), National Committee for Governance Policy (KNKG), 2021;
8. Company's Articles of Association and amendments thereto.

Pedoman Etika Perusahaan, diatur dan ditetapkan melalui SKB antara Direksi dan Dewan Komisaris No. SK.310/HK.002/ASDP-2022 pada tanggal 14 April 2022, menandai langkah penting dalam menggambarkan komitmen Perusahaan terhadap standar perilaku yang diharapkan dari seluruh staf yang terikat dengan Perusahaan. Upaya pemutakhiran CoC tahun 2020 dilakukan pada periode akhir tahun 2021 hingga awal tahun 2022, mencerminkan keseriusan Perusahaan dalam meninjau kembali, menyempurnakan, dan menyesuaikan CoC yang telah ada.

Penetapan ini bukan hanya sekadar proses administratif; ini mengindikasikan penerapan secara luas dari Pedoman Etika tersebut untuk semua karyawan, termasuk unsur Direksi dan Dewan Komisaris, menggarisbawahi pentingnya kesetaraan dalam mematuhi standar perilaku yang telah ditetapkan. Langkah tambahan yang signifikan adalah penandatanganan Pernyataan Komitmen Kepatuhan terhadap Pedoman Etika Perusahaan, yang dilakukan setiap tahun oleh Direksi, Dewan Komisaris, dan seluruh staf. Tindakan ini bukan hanya sekadar formalitas, melainkan representasi nyata dari tekad Perusahaan untuk memberlakukan dan mengamalkan nilai-nilai yang tercantum dalam

The Company's Code of Conduct, which was regulated and established through Joint Decree of the Boards of Commissioners and Directors No. SK.310/HK.002/ASDP-2022 on 14 April 2022, marked an important step that showed the Company's commitment to standardise the expected behavior of every person tied with the Company. Endeavors to improve the 2020 CoC, which were carried out in late 2021 to early 2022, reflected the Company's commitment in reviewing and improving the existing CoC.

The officiation of the code was not to be taken as administrative process only; it indicated a broad application of the Code of Conduct for every employee, including members of the Boards of Commissioners and Directors, highlighting the importance of equality in complying with established behavioral standards. A significant procedure added was the signing of the Statement of Commitment of Compliance with Code of Conduct, which was renewed annually by the Board of Commissioners, Board of Directors, and all employee. This action goes beyond formality, but a concrete implementation of the Company's

Pedoman Etika kepada semua bagian dari lingkup Perusahaan, menegaskan komitmen kolektif dalam menerapkan standar perilaku yang tinggi dan konsisten bagi seluruh Insan Perusahaan.

KEPATUHAN TERHADAP KODE ETIK

Kode etik adalah suatu peraturan yang bersifat menyeluruh bagi semua individu yang terlibat dalam ASDP, mulai dari Dewan Komisaris, Direksi, hingga seluruh karyawan. Setiap individu di dalam Perusahaan ini didorong untuk memiliki kesadaran yang tinggi dalam menerapkan etika yang baik, hal ini diharapkan dapat tidak hanya meningkatkan reputasi Perusahaan, tetapi juga memperkuatnya di mata publik. Pentingnya kode etik ini terletak pada komitmen Perusahaan untuk tunduk pada segala ketentuan hukum dan standar etika tertinggi di setiap wilayah di mana Perusahaan menjalankan aktivitas bisnis dan operasionalnya. Manajemen Perusahaan diwajibkan untuk memelihara norma dan nilai-nilai etika dalam setiap aspek pengelolaannya.

Penegakan kode etik di seluruh tingkatan organisasi juga diwujudkan melalui proses penandatanganan Lembar Pernyataan Kepatuhan Standar Etika Perusahaan dan GCG Code. Semua pihak, termasuk Dewan Komisaris, Direksi, dan karyawan, telah secara resmi menandatangani pernyataan ini sebagai bagian dari komitmen mereka untuk menerapkan *Code of Conduct* dan GCG Code. Implementasi nilai-nilai etika ini menjadi bagian integral dari upaya memastikan ketaatan pada prinsip-prinsip GCG.

Perusahaan memerintahkan kepada setiap entitas di bawah ASDP, baik anak Perusahaan, afiliasi, maupun pemangku kepentingan lainnya, untuk memahami dan mematuhi sepenuhnya panduan kode etik, prinsip-prinsip GCG, Anggaran Dasar Perusahaan, serta segala peraturan perundang-undangan yang relevan, terutama yang berkaitan dengan tanggung jawab dan kewajiban individu masing-masing. Hal ini menjadi landasan kuat dalam memastikan bahwa Perusahaan beroperasi dengan standar yang etis dan sesuai dengan regulasi yang berlaku.

commitment to enforce and practice the CoC values in each of the Company's activities, thereby reaffirming collective commitment of every personnel to carry out high and consistent behavioral standards.

COMPLIANCE WITH THE CODE OF CONDUCT

The Code of Conduct is a comprehensive regulation addressed to all individuals involved in ASDP, from the Boards of Commissioners and Directors to all employees. Every individual within the Company is encouraged to have a heightened awareness in ethical conduct, which would lead to improved public perception of Company's reputation. The emphasis on the Code of Conduct also goes hand in hand with the Company's commitment to comply with legal provisions and the highest ethical standards in the region where the Company carries out its business and operational activities. Company management is required to maintain ethical norms and values in every managerial aspect.

Enforcement of the Code of Conduct at all levels of the organization is also manifested through the signing of Statement of Compliance with Corporate Ethical Standards and GCG Code. All parties, including the Board of Commissioners, Directors and employees, have officially signed the statement as part of their commitment to implement the Code of Conduct and GCG Code. Implementing ethical values is integral in efforts to ensure compliance with GCG principles.

The Company instructed every entity of subsidiaries, affiliates, or other stakeholders under the administration of ASDP to fully understand and comply with the Code of Conduct, GCG principles, the Company's Articles of Association, and all relevant laws and regulations, especially in the context of individual responsibilities and duties. This becomes a solid foundation to ensure that the Company operates with ethical standards and in accordance with applicable regulations.

PENYEBARLUASAN KODE ETIK

Untuk memastikan kode etik Perusahaan dipahami oleh seluruh pemangku kepentingan internal, Perusahaan melakukan sosialisasi Pedoman Etika Perusahaan. Upaya ini juga diharapkan menjadi suatu langkah preventif agar tidak terjadi pelanggaran kode etik. Sosialisasi dilakukan kepada Dewan Komisaris, Direksi dan karyawan baik di kantor pusat, kantor regional maupun kantor cabang serta anak perusahaan yang selanjutnya dilakukan penandatanganan Lembar Pernyataan Kepatuhan Standar Etika Perusahaan dan GCG Code.

NILAI BUDAYA PERUSAHAAN

Sesuai dengan arahan Kementerian BUMN pada tahun 2020 mengenai *Core Values* AKHLAK yang terdiri dari Nilai-Nilai Amanah, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif, sebagaimana ditetapkan dalam Surat Edaran Menteri BUMN No. SE-7/MBU/07/2020 tanggal 1 Juli 2020 tentang Nilai-Nilai Utama (*Core Values*) Sumber Daya Manusia BUMN, maka semua BUMN termasuk ASDP telah menyelaraskan *core values* (I-ASDP) dengan *core values* (AKHLAK) BUMN.

Perusahaan juga memiliki motto "*We Bridge the Nation*" atau "Bangga Menyatukan Nusantara" yang menjadi dasar bagi insan perusahaan untuk senantiasa bekerja keras dan cerdas, menjaga komitmen dan kebanggaan untuk melayani kepentingan pengguna jasa sekaligus kepentingan Negara.

UPAYA PENERAPAN DAN PENEGAKAN KODE ETIK

Setiap karyawan di ASDP memiliki tanggung jawab untuk patuh terhadap Kode Etik, peraturan internal, serta kebijakan lainnya. Mereka juga diharapkan untuk tidak membiarkan hal-hal yang bertentangan dengan kode etika ASDP terjadi tanpa tindakan. Ketika ditemukan perilaku yang melanggar kode etika Perusahaan, hal ini dianggap sebagai suatu pelanggaran etik.

DISSEMINATION OF THE CODE OF CONDUCT

To ensure the Company's Code of Conduct is understood by every internal stakeholders, the Company communicated the Code of Conduct broadly. The effort is expected to embody preventive measure in deterring Code of Conduct violations. The program was disseminated to the Boards of Commissioners, Directors and employees at the head office, regional offices and branch offices as well as subsidiaries, followed by the signing of the Statement of Compliance with Company Ethics Standards and GCG Code.

COMPANY VALUES

Complying with the Ministry of SOEs' directive in 2020 regarding the AKHLAK Core Values, which consisted of Trustworthy, Competent, Harmonious, Loyal, Adaptive and Collaborative (*Amanah, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif*), as specified in the Circular Letter of the Minister of SOEs No. SE-7/MBU/07/2020 dated 1 July 2020 on the Core Values of Human Resources in SOEs, every SOEs including ASDP have aligned their core values (I-ASDP) with AKHLAK as the SOEs' core values.

The Company's motto of "*We Bridge the Nation*" is quintessential for the employee to always put in hard and smart work, uphold their commitment and pride in serving the interests of service users as well as the country.

EFFORTS TO IMPLEMENT AND ENFORCE THE CODE OF CONDUCT

Every employee at ASDP is responsible to comply with the Code of Conduct, internal regulations and other policies. They are also encourage not to overlook when a violation against the ASDP Code of Conduct happens. Violating behavior against the Code of Conduct is discovered is considered an ethical violation. Therefore,

Oleh karena itu, segala laporan terkait potensi atau indikasi pelanggaran *Code of Conduct* akan ditindaklanjuti sesuai prosedur yang telah ditetapkan.

Setiap insan Perusahaan dapat melaporkan potensi dan/atau indikasi pelanggaran *Code of Conduct* kepada Perusahaan yang selanjutnya akan ditindaklanjuti sesuai dengan prosedur dan mekanisme berikut:

1. Setiap insan ASDP Indonesia Ferry harus melaporkan setiap fakta penyimpangan *Code of Conduct* kepada pihak terkait dan identitas pelapor dilindungi;
2. Pelaporan pelanggaran disampaikan secara tertulis/melalui email/melalui situs WBS ASDP kepada Sekretariat Pelaporan Dugaan Pelanggaran untuk diklarifikasi dan klasifikasi. Apabila memenuhi syarat akan diteruskan kepada Tim Pengelola Pengaduan Dugaan Pelanggaran;
3. Menindaklanjuti setiap laporan dan menyampaikan hasil kajiannya kepada Direksi atau Komisaris sesuai dengan lingkup tanggung jawabnya;
4. Perusahaan menyelesaikan setiap pelaporan pelanggaran yang diajukan *stakeholders* termasuk karyawan dan/atau perwakilan *stakeholders* terkait dengan pelanggaran Pedoman Etika Perusahaan;
5. Karyawan yang melakukan penyimpangan *Code of Conduct* memiliki hak untuk didengar penjelasannya di hadapan atasan langsung sebelum pemberian tindakan pembinaan atau hukuman disiplin;
6. Pihak-pihak yang berpartisipasi dalam pelaporan pelanggaran berhak mendapat perlindungan hukum dari Perusahaan;
7. Pihak-pihak yang berjasa menyelamatkan Perusahaan dengan mengungkap perkara yang merugikan secara material dan non materiil berhak mendapatkan penghargaan dari Perusahaan;
8. Penjelasan dan ketentuan selengkapnyanya diatur dalam Kebijakan dan Prosedur Sistem Pelaporan Dugaan Pelanggaran (*Whistleblowing System*) Perusahaan.

all reports on potential or indications of violations will be followed up according to the established procedures.

Every Company employee may report potential and/or indications of CoC violations to the Company, and the report will be followed up in accordance with these procedures and mechanisms:

1. Every ASDP Indonesia Ferry employee must report any factual violations of the Code of Conduct to the relevant party. The reporter's identity shall be protected;
2. Violation report is submitted in writing/via email/via the ASDP WBS website to the Whistleblowing Secretariat for clarification and classification. If it meets the requirements, it will be forwarded to the Complaints Management Team for Alleged Violations.
3. The team will follow up and submit the review on every report to the Boards of Commissioners or Directors in accordance with their scope and responsibilities;
4. The Company resolves every violation report submitted by stakeholders, including those from employees and/or stakeholder representatives;
5. Alleged violators of Code of Conduct have the rights to explain to their immediate superior before decision of rehabilitation or disciplinary punishment is dealt;
6. Parties involved in whistleblowing have the rights to receive legal protection from the Company;
7. Parties who exposes the case and contributes to relieve material and non-material potential damages from the Company have the rights to receive awards from the Company;
8. Detailed explanations and provisions are regulated in the Company's Policy and Procedure for Whistleblowing System.

SANKSI PELANGGARAN KODE ETIK

Seluruh karyawan Perusahaan yang terbukti melakukan pelanggaran atas Pedoman Etika Perusahaan akan menerima sanksi berupa tindakan-tindakan indisipliner sesuai dengan tingkat pelanggaran yang dilakukannya. Sementara mitra kerja yang terbukti melakukan pelanggaran akan dikenakan sanksi sesuai peraturan dan keputusan Perusahaan. Jika pelanggaran adalah pelanggaran pidana dan perdata akan diteruskan kepada pihak yang berwajib.

JUMLAH PELANGGARAN KODE ETIK

Perusahaan senantiasa melakukan pengawasan terhadap implementasi kode etik dan memfasilitasi pelaporan dugaan tindak pelanggaran kode etik melalui *whistleblowing system*. Sepanjang tahun 2023, tidak terdapat laporan dugaan pelanggaran yang masuk pada Sekretariat WBS, sehingga tidak ada laporan dugaan pelanggaran yang perlu dilakukan pengadministrasian. Klasifikasi dan klarifikasi atas laporan dugaan pelanggaran yang masuk dan diteruskan kepada Tim Pengelola WBS.

EVALUASI KUALITAS PENERAPAN KODE ETIK

Kualitas penerapan Pedoman Etika Perusahaan di perusahaan dievaluasi secara berkala. Salah satunya terkait pelanggaran Pedoman Etika perusahaan dan pengaduan yang masuk dari pelapor secara langsung atau melalui *Whistleblowing System*. Perusahaan memandang bahwa kualitas penerapan kode etik yang baik dapat diukur melalui *trend* pelanggaran kode etik. Berdasarkan hasil evaluasi untuk tahun 2023, Perusahaan memandang bahwa penerapan kode etik di Perusahaan telah dilakukan secara optimal yang dibuktikan dengan tidak adanya laporan dugaan pelanggaran etik yang dilaporkan melalui *whistleblowing system*.

PENALTY FOR VIOLATING THE CODE OF CONDUCT

Every employees who are proven guilty violating the Company's Code of Conduct will be dealt penalties in the form of disciplinary actions according to the severity of the violation committed. Meanwhile, partners who are proven to have committed violations will be subjected to penalties in accordance with Company regulations and decisions. If the violation falls into either criminal or civil case, it will be handed over to the authorities.

COUNT OF CODE OF CONDUCT VIOLATIONS

The Company always monitors the implementation of Code of Conduct and facilitates reports of allegations submitted into whistleblowing system. Throughout 2023, there was no report of allegation submitted to the WBS Secretariat, hence no administration work were completed. Classification and clarification of allegation report was received and transferred to the WBS Management Team.

EVALUATION OF THE IMPLEMENTATION QUALITY OF THE CODE OF CONDUCT

The implementation quality of the Code of Conduct is evaluated periodically. The evaluation includes matters involving Code of Conduct violations and submitted complaint from reporter or through the Whistleblowing System. The Company believes that the quality of Code of Conduct implementation can be measured through trends in CoC violations. Based on the evaluation results for 2023, the Company concluded that the CoC implementation in the Company had been carried out optimally as evidenced by zero allegation report delivered through whistleblowing system.

Trend Pelanggaran Kode Etik Tahun 2022-2023

Trends in Code of Conduct Violations in 2022-2023

Klasifikasi <i>Classification</i>	2022	2023
Ringan <i>Mild</i>	10	0
Sedang <i>Moderate</i>	25	0
Berat <i>Severe</i>	27	0
Total	62	0

KEBIJAKAN ANTI KORUPSI DAN GRATIFIKASI

ANTI-CORRUPTION AND GRATIFICATION POLICY

Perusahaan menyadari bahwa praktik korupsi dan gratifikasi merupakan suatu tindakan menyimpang dan menjadi bentuk pelanggaran terhadap norma-norma sosial maupun hukum yang berlaku. Untuk itu, Perusahaan memiliki komitmen yang tinggi untuk menghindari tindakan-tindakan yang terkait dengan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). Dewan Komisaris, Direksi dan manajemen senior berkomitmen untuk menjadi teladan yang baik bagi seluruh karyawan dalam upaya menciptakan lingkungan kerja yang berintegritas dan terhindar dari konflik kepentingan.

The Company understands that corruption and gratification is wrongful and violates both social norms and applicable laws. Thus, the Company hold strong commitment to avoid practices related to Corruption, Collusion, and Nepotism (KKN). The Board of Commissioners, Board of Directors and senior management are committed to being exemplary role models for all employees in the effort to create a workplace environment that has integrity and is exempt from conflicts of interest.

KEBIJAKAN ANTI KORUPSI DAN SISTEM MANAJEMEN ANTI PENYUAPAN

Wujud komitmen Perusahaan dalam membentuk lingkungan kerja yang berintegritas diwujudkan melalui kebijakan anti korupsi dan sistem manajemen anti penyuapan berlandaskan pada UU No. 20 Tahun 2002 tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun 2000 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Komitmen tersebut dituangkan melalui kebijakan dan prosedur sebagai berikut:

1. Keputusan Direksi No. KD.129/OP.404/ASDP-2021 tanggal 15 Desember 2021 tentang Sistem Manajemen Anti Penyuapan di Lingkungan PT ASDP Indonesia Ferry (Persero);
2. Surat Edaran Direksi No. SE.01226/UM.003/ASDP-2023 tanggal 27 Desember 2023 tentang Imbauan Pencegahan dan Pengendalian Gratifikasi;
3. Surat Edaran Direksi No. SE.1202/UM.003/ASDP-2023 tanggal 13 April tentang Imbauan Pencegahan dan Pengendalian Gratifikasi;

ANTI-CORRUPTION POLICY AND ANTI-BRIBERY MANAGEMENT SYSTEM

The Company's commitment to create an upright working climate was made possible through anti-corruption policies and anti-bribery management system, which were formulated based on Law No. 20/2002 concerning Amendments to Law No. 31/2000 on the Eradication of Corruption Crimes. This commitment was expressed through the following policies and procedures:

1. Decree of the Board of Directors No. KD.129/OP.404/ASDP-2021 dated 15 December 2021 on the Anti-Bribery Management System in PT ASDP Indonesia Ferry (Persero);
2. Circular of the Board of Directors No. SE.01226/UM.003/ASDP-2023 dated 27 December 2023 on Appeal for Prevention and Gratification Control;
3. Circular of the Board of Directors No. SE.1202/UM.003/ASDP-2023 dated 13 April concerning Appeal for Prevention and Gratification Control;

4. Panduan terkait Penerimaan dan Pemberian Hadiah serta Pencegahan Penyuapan;
5. Prosedur Pengendalian Gratifikasi (ZM-205).

4. Guidelines on Accepting, Gifting and Preventing Bribery;
5. Gratification Control Procedures (ZM-205).

PROGRAM DAN PROSEDUR ANTI KORUPSI DAN GRATIFIKASI

Dalam upaya menjunjung integritas Perusahaan terhadap tindakan korupsi dan gratifikasi, Perusahaan telah memiliki berbagai perangkat peraturan, prosedur dan program kerja yang dikelola secara menyeluruh oleh Divisi Sistem Manajemen Perusahaan. Beberapa prosedur yang terkait dengan pengendalian anti korupsi dan gratifikasi di antaranya adalah:

1. Prosedur ZM 205 – Pengendalian Gratifikasi;
2. Prosedur ZM 206 – Internal Audit SMAP (Sistem Manajemen Anti Penyuapan);
3. Prosedur ZM 207 – Tinjauan Manajemen SMAP;
4. Prosedur ZM 208 – Ketidaksesuaian, Tindakan Perbaikan, dan Pencegahan SMAP;
5. Prosedur ZM 209 – Manajemen Risiko SMAP;
6. Prosedur ZM 210 – Kinerja SMAP.

Di samping itu, Perusahaan juga melakukan berbagai program kerja anti korupsi dan gratifikasi di antaranya melalui sosialisasi dan pelatihan anti korupsi dan gratifikasi, survei pemahaman GCG dan SMAP serta penyiapan aplikasi *Sistem Manajemen Good Corporate Governance* (Simagov) yang dapat diakses melalui komputer karyawan yang terhubung dengan jaringan Perusahaan.

PELATIHAN DAN SOSIALISASI PROGRAM ANTI KORUPSI DAN GRATIFIKASI

Kebijakan Anti Korupsi dan Pengendalian Gratifikasi telah diintegrasikan secara menyeluruh ke berbagai tingkatan hierarki organisasi Perusahaan serta kepada berbagai pihak yang memiliki kepentingan terhadap Perusahaan. Seiring dengan berjalannya

ANTI-CORRUPTION AND GRATIFICATION PROGRAMS AND PROCEDURES

In efforts to uphold the Company's integrity against corruption and gratification, the Company has an array of regulations, procedures and work programs which were managed comprehensively by the Company's Management Systems Division. Several procedures related to anti-corruption and gratification control include:

1. ZM 205 Procedure – Gratification Control;
2. ZM 206 Procedure – Internal Audit of SMAP (Anti-Bribery Management System);
3. ZM 207 Procedure – Management Review of SMAP;
4. ZM 208 Procedure – Nonconformities, Corrective Actions and Prevention of SMAP;
5. ZM 209 Procedure – Risk Management of SMAP;
6. ZM 210 Procedure – Performance of SMAP.

In addition, the Company also carried out various anti-corruption and anti-gratification programs including dissemination and training on anti-corruption and gratification, survey on understanding of GCG and SMAP as well as developed the *Good Corporate Governance Management System* (Simagov) application which can be accessed via employee computers connected to the Company's network.

TRAINING AND DISSEMINATION OF ANTI-CORRUPTION AND GRATIFICATION PROGRAMS

The Anti-Corruption and Gratification Control Policy has been extensively integrated into the Company's organizational hierarchy as well as to multiple parties who have interest in the Company. As 2023 progressed, the Division of Management Systems that

tahun 2023, Divisi Sistem Manajemen yang bertanggung jawab atas penerapan GCG secara konsisten telah mengadakan sejumlah kegiatan sosialisasi terkait anti korupsi dan gratifikasi. Kegiatan ini meliputi pendekatan yang berkelanjutan, termasuk sosialisasi yang terjadwal secara rutin serta kegiatan insidental yang menangani isu-isu spesifik terkait gratifikasi. Program sosialisasi yang dijalankan sepanjang tahun 2023 diantaranya:

1. Rapat Sosialisasi Survei Pemahaman GCG dan SMAP pada 14 Maret 2024 kepada PIC Unit Kerja Kantor Pusat, Regional dan Cabang;
2. Video Sosialisasi Pengendalian Gratifikasi, SMAP dan Prinsip 4 No's (*No Gift, No Bribery, No Kickback, No Luxurious Hospitality*) pada bulan Desember 2023 yang juga bertepatan dalam peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia (Hakordia) 2023;
3. Pemasangan poster Sosialisasi Pengendalian Gratifikasi, SMAP dan Prinsip 4 No's (*No Gift, No Bribery, No Kickback, No Luxurious Hospitality*) pada *desktop/laptop* karyawan pada bulan Desember 2023 yang juga bertepatan dalam peringatan Hakordia 2023.

was responsible for GCG implementation consistently held several outreach activities related to anti-corruption and gratification. The activities employed sustainable approach, by organising regularly scheduled outreach and occasional activities that addressed specific issues related to gratification. Dissemination programs that was implemented throughout 2023 include:

1. Held Dissemination Meeting on the GCG and SMAP Comprehension Survey on 14 March 2023 to the PIC of the Head Office, Regional and Branch Office Work Units;
2. Video to Promoting Gratification Control, SMAP and the 4 No's Principle (*No Gift, No Bribery, No Kickback, No Luxurious Hospitality*) in December 2023, which also coincided with the commemoration of World Anti-Corruption Day (Hakordia) 2023;
3. Installed posters Promoting Gratification Control, SMAP and the 4 No's Principle (*No Gift, No Bribery, No Kickback, No Luxurious Hospitality*) on employees' desktops/laptops in December 2023, coincided with the 2023 Hakordia.

PENGELOLAAN PENGENDALIAN GRATIFIKASI

Gratifikasi, dalam konteks ini, merujuk pada pemberian atau penerimaan yang meliputi uang, barang, diskon, komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, akomodasi, perjalanan wisata, layanan kesehatan gratis, dan berbagai fasilitas lainnya dengan nilai apapun. Tindakan ini dapat terjadi baik di dalam maupun di luar negeri, bisa dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik, dan dilakukan oleh individu yang terafiliasi dengan Perusahaan dalam kaitannya dengan jabatan atau kewenangannya di Perusahaan. Hal ini dapat berpotensi menimbulkan konflik kepentingan di masa mendatang.

Untuk membatasi pemberian, terdapat ketentuan yang mengizinkan pemberian maksimal 1 juta Rupiah dalam satu tahun kepada satu penerima yang sama, dengan pengecualian jika pemberian tersebut

MANAGING GRATIFICATION CONTROL

Gratification, in this context, refers to the giving or receiving of money, goods, discount, commission, interest-free loan, travel ticket, accommodation, travel trip, free medical service, and various other facilities of any value. This action may occur both within and outside the country, can be carried out using electronic means or without electronic means, and is carried out by individuals affiliated with the Company in relation to their position or authority in the Company. This could potentially cause future conflicts of interest.

To limit gifting, there are provisions that allow a maximum gift of 1 million Rupiah per annum to the same recipient, with the exception that the gift is not monetary. The Company also established a Gratification

tidak dalam bentuk uang. Perusahaan juga membentuk Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) yang memiliki tanggung jawab untuk melakukan pengendalian, menerima dan menindaklanjuti pelaporan terkait dugaan tindakan gratifikasi di Perusahaan.

Control Unit (UPG) who is responsible to control, receive and follow up on reports related to alleged gratification cases in the Company.

LAPORAN PENERIMAAN GRATIFIKASI TAHUN 2023

Sepanjang tahun 2023, Unit Pengendalian Gratifikasi tidak menerima laporan terkait dugaan tindakan gratifikasi baik dalam bentuk penerimaan, penolakan atau pemberian gratifikasi yang harus disalurkan kepada KPK untuk dianalisis dan ditetapkan status kepemilikannya oleh KPK.

GRATIFICATION REPORT RECEIVED IN 2023

Throughout 2023, the Gratification Control Unit did not receive any reports regarding gratification, either of accepting, rejecting or giving, in which information must be forwarded to the Corruption Eradication Committee so that its ownership status can be analysed and determined by the Committee.

SISTEM PELAPORAN DUGAAN PELANGGARAN

WHISTLEBLOWING SYSTEM

Perusahaan memiliki komitmen yang tinggi dalam menciptakan lingkungan kerja yang berkualitas dan memiliki integritas tinggi sehingga dapat menciptakan nilai serta reputasi yang baik di mata pemangku kepentingan. Sejalan dengan komitmen tersebut, Perusahaan menerapkan sistem pelaporan pelanggaran (*Whistleblowing System*, WBS) sebagai salah satu bentuk dari sistem pengendalian internal, dalam hal ini bertujuan untuk mendeteksi perbuatan atau indikasi *fraud*, penyalahgunaan wewenang dan perilaku ketidakpatuhan. Di samping itu, WBS juga ditujukan untuk mendorong *awareness* dan kepedulian dari seluruh karyawan untuk menghindari perilaku tidak etis yang dapat menyebabkan citra buruk bagi Perusahaan.

The Company is highly committed to create an excellent and honourable workplace environment such that it may create value and good reputation in the stakeholders' perception. With this commitment, the Company implements a Whistleblowing System (WBS) as a form of internal control system in order to discover indications or actions of fraud, abuse of authority and non-compliant behavior. In addition, WBS is also employed to raise awareness and wariness from every employees to avoid unethical behavior that may jeopardize the Company's reputation.

KEBIJAKAN DAN RUANG LINGKUP WHISTLEBLOWING SYSTEM

Penerapan WBS merupakan bagian integral dari upaya penguatan prinsip-prinsip GCG serta penerapan CoC. Komitmen penerapan WBS tertuang melalui SKB antara Dewan Komisaris dan Direksi PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) melalui SK.152/HK.002/ASDP-2021 yang merupakan hasil perubahan dari keputusan sebelumnya, yaitu SK.806/HK.002/ASDP-2020, yang memperinci langkah-langkah dan ruang lingkup dari pelaporan dugaan pelanggaran di Perusahaan. Setiap tindakan atau indikasi yang menunjukkan adanya pelanggaran yang dilakukan oleh siapa pun di lingkungan Perusahaan dapat dilaporkan melalui WBS. Kebijakan ini diberlakukan bagi seluruh Insan ASDP dengan ketentuan pengaturan secara umum, yaitu sebagai berikut:

1. Pelapor Dugaan Pelanggaran adalah Insan ASDP dan pemangku kepentingan (*stakeholders*) lainnya;
2. Terlapor Dugaan Pelanggaran adalah insan ASDP yang diduga melakukan pelanggaran.

WHISTLEBLOWING SYSTEM POLICY AND SCOPE

WBS implementation is a vital part in strings of endeavours to strengthen the GCG principles and CoC implementation. The commitment to implement WBS was stated in the Joint Decree of the Boards of Commissioners and Directors of PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) No. SK.152/HK.002/ASDP-2021, which resulted from changes to the previous decree No. SK.806/HK.002/ASDP-2020 on which contained detailed steps and scopes of whistleblowing system at the Company. Any action or indication that implies a person has committed violation against the Company can be reported through the WBS. This policy applies to all ASDP personnels with general stipulation, as follows:

1. The Whistleblower is an ASDP personnel and stakeholders;
2. The Alleged Party is an ASDP personnel who is being suspected of breaching the code.

DASAR HUKUM PENERAPAN WHISTLEBLOWING SYSTEM

Penerapan WBS di lingkungan Perusahaan didasarkan pada landasan hukum yang berlaku yang mencakup serangkaian peraturan dan undang-undang yang telah ditetapkan, yaitu sebagai berikut:

1. UU No. Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara juncto UU No. Nomor 6 Tahun 2023 Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
2. UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas juncto UU No.6 Tahun 2023 Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.15Tahun1992tentangPengalihanBentuk Perusahaan Umum (Perum) Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan menjadi Perusahaan (Persero);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 45 Tahun 2005 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan, dan Pembubaran BUMN;
5. Peraturan Menteri BUMN No. PER-01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik pada BUMN juncto No. PER-09/MBU/2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Negara BUMN No. PER-01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik pada BUMN;
6. Keputusan Menteri Negara BUMN selaku RUPS Perusahaan Perseroan (Persero) PT ASDP Indonesia Ferry No. KEP117/MBU/2011 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Direktur Utama Perusahaan Perseroan (Persero) PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) dan No. SK.94/MBU/06/2015 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota-Anggota Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT ASDP Indonesia Ferry;
7. Anggaran Dasar PT ASDP Indonesia Ferry (Persero);
8. Pernyataan Keputusan Rapat Perusahaan Perseroan (Persero) PT ASDP Indonesia Ferry (Persero);

LEGAL BASIS FOR IMPLEMENTING THE WHISTLEBLOWING SYSTEM

WBS implementation within the Company is based on the applicable law which includes a series of established regulations and laws, namely as follows:

1. Law No. 19/2003 concerning State-Owned Enterprises in conjunction with Law No. 6/2023 Stipulation of Government Regulations in Lieu of Law No. 2/2022 concerning Job Creation To Become Law;
2. Law No. 40/2007 concerning Limited Liability Companies in conjunction with Law No. 6/2023 Stipulation of Government Regulations in Lieu of Law No. 2/2022 concerning Job Creation To Become Law;
3. Government Regulation No. 15/1992 concerning Transfer of Form Public Company (Perum) for Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan to Company (Persero);
4. Government Regulation No. 45/2005 concerning the Establishment, Management, Supervision and Dissolution of SOEs;
5. Regulation of the Minister of SOEs No. PER-01/MBU/2011 concerning the Implementation of Good Corporate Governance in SOEs juncto No. PER-09/MBU/2012 concerning Amendments to Regulation of the Minister for SOEs No. PER-01/MBU/2011 concerning the Implementation of Good Corporate Governance in SOEs;
6. Decree of the Minister of SOEs as the GMS of the PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) No. KEP117/MBU/2011 concerning the Dismissal and Appointment of the President Director of PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) and No. SK.94/MBU/06/2015 concerning Dismissal and Appointment of Members of the Board of Directors of PT ASDP Indonesia Ferry (Persero);
7. Articles of Association of PT ASDP Indonesia Ferry (Persero);
8. Decisions of the Corporate Meeting of PT ASDP Indonesia Ferry (Persero);

9. SKB Dewan Komisaris dan Direksi PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) No. SK.152/HK.002/ASDP2021, tentang Perubahan SKB Dewan Komisaris dan Direksi No. SK.806/HK.002/ASDP-2020 tentang Sistem Pelaporan Dugaan Pelanggaran (*Whistleblowing System*) PT ASDP Indonesia Ferry (Persero);
10. Keputusan Direksi PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) No. KD.128/HK.001/ASDP-2021 tanggal 13 Desember 2021 tentang Perubahan Keputusan Direksi PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) No. KD.75/HK.001/ASDP-2021 tanggal 16 Juli 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pusat dan Regional PT ASDP Indonesia Ferry (Persero);
11. Perjanjian Kerja Bersama (PKB) tahun 2019-2021 antara PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) dengan Serikat Pekerja tanggal 14 Agustus 2019 sesuai Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Kementerian Ketenagakerjaan RI No. KEP.185/PHIJSKPK/PKB/VIII/2019 tanggal 21 Agustus 2019.
9. Joint Decree of the Board of Commissioners and the Board of Directors of PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) No. SK.152/HK.002/ASDP2021, concerning Amendments to the Joint Decree of the Board of Commissioners and the Board of Directors No. SK.806/HK.002/ASDP-2020 concerning the Whistleblowing System PT ASDP Indonesia Ferry (Persero);
10. Decision of the Board of Directors of PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) No. KD.128/HK.001/ASDP-2021 dated 13 December 2021 concerning Amendments to the Decision of the Board of Directors of PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) No. KD.75/HK.001/ASDP -2021 dated 16 July 2021 concerning the Organization and Work Procedures of the Head and Regional Offices of PT ASDP Indonesia Ferry (Persero);
11. Collective Labor Agreement for 2019-2021 between PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) and the Labor Union dated 14 August 2019 in accordance with the Decision of the Director General of Industrial Relations and Social Security for Workers of the Ministry of Manpower of the Republic of Indonesia No. KEP.185/PHIJSKPK/PKB/VIII/2019 dated 21 August 2019.

PENGELOLA WHISTLEBLOWING SYSTEM

SKB terbaru dari Dewan Komisaris dan Direksi PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) No. SK.152/HK.002/ASDP-2021 mengenai Perubahan SKB sebelumnya (SK.806/HK.002/ASDP-2020) tentang Sistem Pelaporan Dugaan Pelanggaran (*Whistleblowing System*) menegaskan proses pelaporan terkait indikasi pelanggaran harus dilakukan melalui prosedur yang telah ditetapkan dan diawasi secara profesional oleh Tim Pengelola WBS dan Sekretariat WBS yang bertindak sebagai Unit Pengelola Sistem Pelaporan Dugaan Pelanggaran. Mekanisme ini bertujuan untuk memastikan bahwa pelaporan dugaan pelanggaran dijalankan sesuai standar yang telah ditetapkan dan dikelola oleh pihak yang memiliki keahlian, integritas dan objektivitas yang kuat. Tim Pengelola WBS yang menangani pelaporan dugaan pelanggaran antara lain sebagai berikut:

WHISTLEBLOWING SYSTEM MANAGER

The most recent Joint Decree from the Board of Commissioners and Board of Directors of PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) No. SK.152/HK.002/ASDP-2021 regarding amendments to the previous Joint Decree (SK.806/HK.002/ASDP-2020) concerning the Whistleblowing System emphasized that the processing of reports containing indications of violations must be carried out through established procedures and is professionally monitored by the WBS Management Team and the WBS Secretariat who would act as the Management Unit for the Whistleblowing System. The mechanism aimed to ensure that reporting of suspected violations is carried out according to established standards and is managed by parties with stellar expertise, integrity and objectivity. The WBS Management Team who handles reports of suspected violations includes the following:

1. Tim Pengelola WBS I menangani pelaporan pelanggaran dengan terduga pelaku pelanggaran adalah Karyawan. Ketua Tim Pengelola WBS I adalah *Vice President* Sistem Manajemen Perusahaan dan anggota terdiri dari *Vice President* Pengelolaan SDM dan anggota Komite Pemantau Risiko.
 2. Tim Pengelola WBS II menangani pelaporan pelanggaran dengan terduga pelaku pelanggaran adalah karyawan yang bertugas sebagai tim pengelola WBS I. Ketua Tim Pengelola WBS II adalah Direktur Utama dan anggota terdiri dari Direktur dan Anggota Komite Audit;
 3. Tim Pengelola WBS III menangani pelaporan dengan terduga pelaku pelanggaran adalah Direksi, Dewan Komisaris dan organ Pendukung Dewan Komisaris. Ketua Tim Pengelola WBS III adalah Komisaris Utama dan anggota adalah anggota Komisaris, Direksi dan Anggota Komite Audit.
1. The WBS I Management Team handles violation reports whose suspected perpetrators is an employee. The WBS I Management Team is headed by Vice President of Company Management Systems; and the members consist of Vice President of HR Management and members of Risk Oversight Committee.
 2. The WBS II Management Team handles violation reports whose suspected perpetrators is an employee in WBS I management team. The WBS II Management Team is headed by President Director and the members consist of Directors and members of the Audit Committee;
 3. The WBS III Management Team handles violation reports whose suspected perpetrators is a Director, Commissioner, and members of supporting organs to the Board of Commissioners. The WBS III Management Team is headed by the President Commissioner and the members consist of Commissioners, Directors and members of Audit Committee.

SARANA DAN MEKANISME PENYAMPAIAN LAPORAN DUGAAN PELANGGARAN

Perusahaan menyediakan beragam saluran komunikasi, termasuk surat, email, aplikasi WBS, dan juga pelaporan langsung kepada Sekretariat WBS. Apabila terdapat indikasi pelanggaran di lingkungan Perusahaan, informasi tersebut dapat dilaporkan kepada Sekretariat Pelaporan Dugaan Pelanggaran, yang kemudian akan disampaikan kepada Tim Pengelola WBS. Proses penanganan laporan atau pengaduan terkait pelanggaran mengikuti beberapa langkah: pertama, semua pengaduan, baik dari internal maupun eksternal, diperlakukan sebagai informasi yang bersifat rahasia; kedua, dilakukan perlindungan terhadap pihak yang memberikan laporan dan pengaduan mengenai perilaku yang mencurigakan; ketiga, melakukan penelitian atau investigasi kebenaran terkait dugaan pelanggaran; terakhir, jika dugaan pelanggaran melibatkan anggota Direksi, laporan akan disampaikan kepada Dewan Komisaris. Setiap laporan yang diterima akan dianalisis,

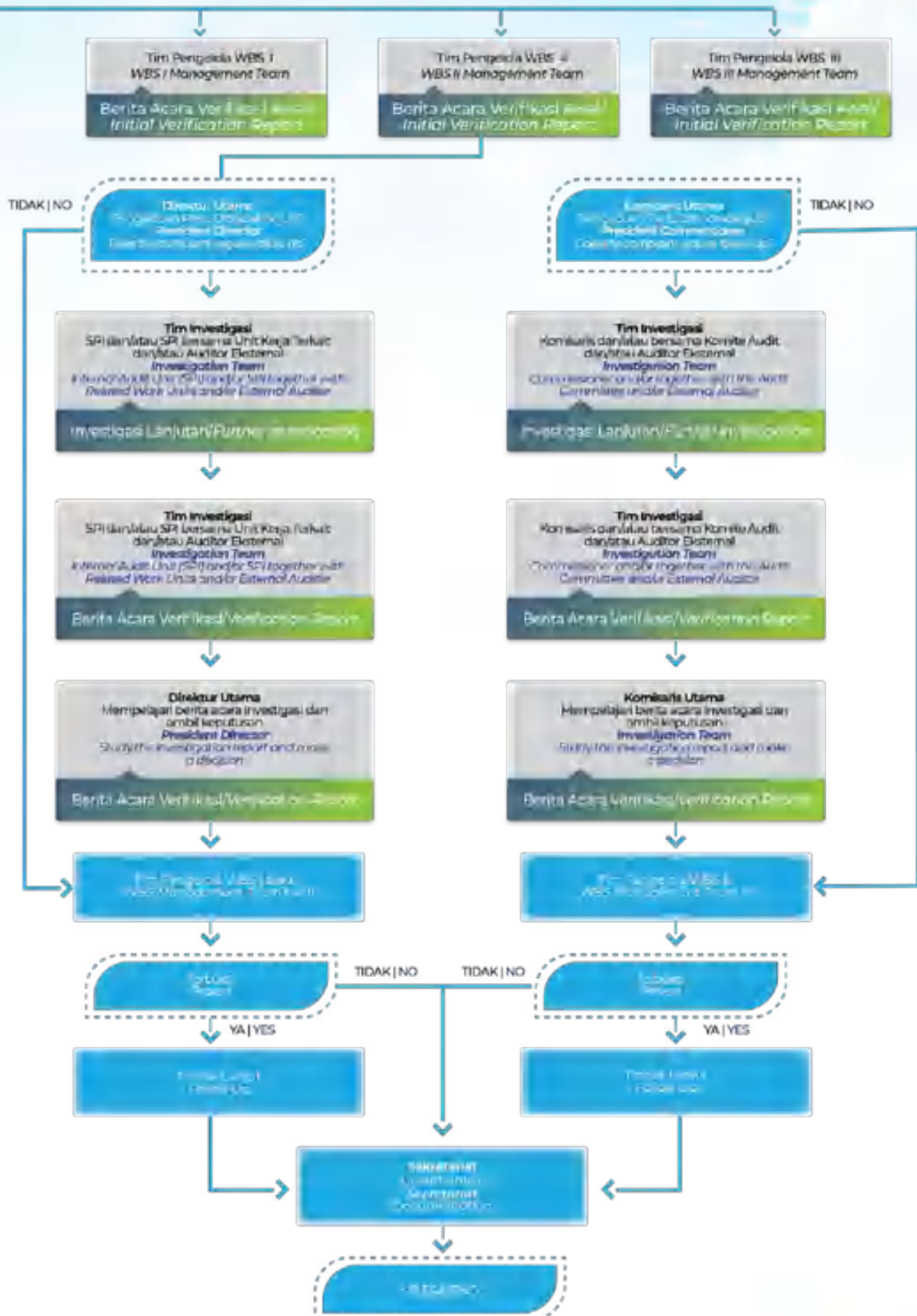
FACILITY AND MECHANISM FOR SUBMITTING REPORTS OF ALLEGED VIOLATIONS

The Company provides various communication channels, including letters, emails, WBS applications, and also direct reporting to the WBS Secretariat. Any information of indication of violation within the Company can be reported to the WBS Secretariat, which will be forwarded to the WBS Management Team. The process for handling reports or complaints related to violations follows several steps: first, all complaints, both internal and external, are treated as confidential information; second, protection is provided for parties who submitted reports and complaints about suspicious behavior; third, conduct research or investigate the fact on alleged violations; lastly, should the alleged violation involves a member of the Board of Directors, a report will be submitted to the Board of Commissioners. Every report received will be analyzed, classified and followed up through an in-depth investigation focused on gathering

diklasifikasikan, dan ditindaklanjuti melalui penyelidikan mendalam yang berfokus pada pengumpulan fakta. Keputusan terkait kebenaran atau ketidakbenaran dari laporan tersebut diambil dengan mempertimbangkan dampak tindakan, tingkat kesengajaan, serta motif di balik perilaku yang dilaporkan.

facts. Decisions regarding the validity or falseness of the report are weighed by considering the impact of the action, the level of intentionality, and the motives behind the reported behavior.





SOSIALISASI WHISTLEBLOWING SYSTEM

Perusahaan secara terus-menerus mengembangkan dan meningkatkan pemahaman mengenai WBS di semua tingkatan organisasi dengan serangkaian langkah. Salah satu dari upaya tersebut adalah dengan mendistribusikan Pedoman *Whistleblowing System*, *Code of Conduct*, dan *Code of Corporate Governance* secara digital melalui email kepada seluruh insan Perusahaan. Selain itu, Perusahaan juga melakukan sosialisasi Pedoman *Whistleblowing System* kepada pihak internal dan eksternal melalui situs web Perusahaan, tujuannya adalah untuk memastikan pemahaman yang baik terkait dengan kebijakan Pelaporan Dugaan Pelanggaran (WBS) dan untuk memperluas pengetahuan ini ke lebih banyak individu yang terlibat dengan Perusahaan.

PERLINDUNGAN BAGI PELAPOR DAN MEKANISME PENANGANAN PENGADUAN

Perusahaan telah mengimplementasikan sistem WBS yang mengakomodasi hak-hak penting bagi pelapor dalam melaporkan masalah yang berkaitan dengan pelanggaran atau ketidakpatuhan. Perlindungan yang diberikan kepada pelapor tidak hanya mencakup kerahasiaan identitas mereka, namun juga mencakup sejumlah langkah perlindungan yang dirancang untuk mencegah tindakan balasan dari pihak yang dilaporkan, menghindari risiko pemecatan, penurunan jabatan atau *grade*, serta penundaan kenaikan *grade*. Lebih dari itu, sistem ini memastikan perlindungan terhadap pelapor dari tekanan atau ancaman tindakan fisik yang mungkin timbul sebagai konsekuensi dari pengungkapan mereka. Semua aspek ini diatur secara jelas dalam kebijakan WBS ASDP, yaitu:

1. Setiap anggota Dewan Komisaris, Direksi, Komite-Komite yang ada serta karyawan dapat menyampaikan laporan mengenai dugaan pelanggaran terhadap CoC kepada Perusahaan secara pribadi, melalui surat, maupun *email*.

WHISTLEBLOWING SYSTEM DISSEMINATION

The Company continuously develops and improves awareness of the WBS at all organization levels through measured programs. One of the efforts was emailed digital version of Guidelines of Whistleblowing System, Code of Conduct, and Code of Corporate Governance to all Company employees. In addition, the Company also displayed the Guidelines of WBS on the Company website accessible to internal and external parties. The aim was to ensure proper awareness of the WBS policy and to spread the information to more individuals involved with the Company.

PROTECTION FOR WHISTLEBLOWERS AND COMPLAINT HANDLING MECHANISMS

In WBS system, the Company has accommodated vital rights for whistleblowers upon reporting issues of violations or non-compliance. Whistleblower's protection afforded the confidentiality of their identities, and also protective measures designed to prevent retaliation from the exposed party, circumvented the risk of dismissal, demotion or delay in grade increase. Moreover, the system ensures the whistleblowers protection from consequential pressure or physical threats that may arise from the disclosure. These following aspects are clearly regulated in the ASDP Whistleblowing System policy, namely:

1. Each member of the Board of Commissioners, the Board of Directors, Committees and employees is allowed to submit reports of suspected Code of Conduct violations to the Company personally, via letter or email.

2. Semua pelapor harus mencantumkan identitasnya dengan jelas. Pelaporan yang dilakukan tanpa identitas akan diperlakukan sebatas informasi awal, sedangkan tindak lanjut atas pelaporan tersebut akan diputuskan oleh Sekretariat WBS.
 3. Identitas pelapor akan dirahasiakan, kecuali apabila timbul hal-hal sebagai berikut:
 - Identitas pelapor diperlukan dalam kaitan dengan laporan atau penyidikan yang dilakukan oleh Pemerintah;
 - Isi pelaporan sejalan dengan kepentingan Perusahaan dan sejalan dengan tujuan CoC ini;
 - Identitas pelapor diperlukan untuk mempertahankan posisi ASDP di depan hukum.
2. All reporters must state their identity clearly. Anonymous reports will be treated as initial information, while the follow-up will be decided by the WBS Secretariat.
 3. The whistleblower's identity will be kept confidential, unless the following situation arises:
 - The reporter's identity is required for reports or investigations to be carried out by the Government;
 - The report contents are in line with the Company's interests and in line with the objectives of the Code of Conduct;
 - The reporter's identity is necessary to maintain ASDP's position before the law.

PELAPORAN DAN PENANGANAN PENGADUAN SERTA TINDAK LANJUTNYA

Sepanjang tahun 2023, Sekretariat WBS tidak menerima laporan dugaan pelanggaran sehingga tidak ada laporan dugaan pelanggaran yang perlu dilakukan pengadministrasian, klasifikasi maupun klarifikasi atas laporan dugaan pelanggaran yang masuk dan diteruskan kepada Tim Pengelola WBS.

REPORTING, COMPLAINT HANDLING AND FOLLOW-UP

Throughout 2023, the WBS Secretariat did not receive reports of alleged violations such that there were no reports of alleged violations that needed to be administered, classified or clarified on the alleged violation reports that were received and forwarded to the Whistleblowing System Management Team.

LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA

REPORT OF STATE OFFICIALS' WEALTH

Sebagai wujud penguatan komitmen terhadap pemberantasan tindakan korupsi dan gratifikasi di Perusahaan, Dewan Komisaris dan Direksi serta pejabat struktural sampai 2 (dua) tingkat di bawah Direksi didorong untuk mengedepankan integritas dan transparansi dalam setiap pelaksanaan aktivitas bisnis. Hal ini diwujudkan dengan mewajibkan untuk menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) secara transparan dan tepat waktu.

To strengthen the commitment to eradicate all acts of corruption and gratification in the Company, the Board of Commissioners and the Board of Directors as well as 2 (two) levels of structural officials below the Director are expected to prioritize integrity and transparency in every implementation of business activities. One of the ways to realize it is by mandating the submission of Report of State Officials' Wealth (LHKPN) to the Corruption Eradication Commission (KPK) in a transparent and timely manner.

DASAR HUKUM

Pengelolaan LHKPN di lingkungan Perusahaan didasarkan pada sejumlah peraturan dan regulasi yang berlaku. Peraturan dan regulasi tersebut menjadi landasan dalam pelaksanaan proses pelaporan, kriteria yang harus dipenuhi, dan tanggung jawab yang berkaitan dengan pelaporan harta kekayaan para penyelenggara negara. Landasan yang digunakan dalam pengelolaan LHKPN di Perusahaan, di antaranya adalah:

1. UU No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari KKN;
2. UU No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
3. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi No. 07 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Pejabat Negara;
4. Surat Edaran Menteri BUMN No. SE-12/MBU/10/2021 tentang Kewajiban Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) bagi Pejabat di Lingkungan Badan Usaha Milik Negara.

LEGAL BASIS

Managing LHKPN in the Company is executed based on several applicable regulations. These laws and regulations are the basis for the reporting process, the obligatory criteria, and other responsibilities related to assets reporting. The legal basis employed in managing LHKPN in the Company include:

1. Law No. 28/1999 concerning Clean and Corruption, Collusion, Nepotism-Free State Officials;
2. Law No. 30/2002 concerning the Corruption Eradication Commission (KPK);
3. KPK Regulation No. 07/2016 concerning Procedures for Registration, Announcement and Inspection of State Officials' Assets;
4. Circular Letter of the Minister of SOEs No. SE-12/MBU/10/2021 concerning the Obligation to Submit Wealth Reports of State Administrators (LHKPN) for Officials within State-Owned Enterprises.

KEBIJAKAN PENYAMPAIAN DAN PENGELOLAAN LHKPN

Perusahaan telah mengambil langkah serius dalam menegakkan kebijakan terkait penyampaian dan pengelolaan LHKPN melalui implementasi Keputusan Direksi No. KD.14/PA.109/ASDP-2023 Tentang Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) melalui Sistem e-LHKPN di Lingkungan PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) dan Anak Perusahaan Terafiliasi. Kebijakan ini tidak hanya mencerminkan komitmen Perusahaan terhadap tata kelola yang baik dalam pelaporan LHKPN, namun juga merinci langkah-langkah yang harus diikuti dalam proses penyampaian, pengelolaan, serta menegaskan kewajiban pegawai yang harus melaporkan LHKPN. Penetapan sanksi bagi pegawai yang tidak memenuhi kewajiban melaporkan LHKPN juga termasuk dalam upaya Perusahaan untuk memastikan kepatuhan terhadap regulasi terkait. Di samping itu, Perusahaan juga menetapkan kebijakan tambahan melalui Surat Keputusan Direksi No. SK.631/PA.105/ASDP-2021 yang menunjuk Administrator Instansi dan Administrator Unit Kerja Aplikasi e-Registration e-LHKPN di PT ASDP Indonesia Ferry (Persero), yang menegaskan tanggung jawab dan tata kelola terkait pengelolaan sistem pelaporan LHKPN.

PENGELOLA LHKPN

Koordinasi terkait pengelolaan LHKPN di PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) dilakukan oleh *Vice President* Pengelolaan SDM di Divisi Pengelolaan SDM dengan tanggung jawab spesifik yang meliputi:

1. Kolaborasi dengan KPK meliputi kegiatan berikut:
 - Memantau dan mengevaluasi tingkat kepatuhan dalam pelaporan LHKPN serta mengumumkan kepemilikan harta.
 - Menggunakan aplikasi e-LHKPN yang dapat diakses melalui www.elhkpn.kpk.go.id.
 - Memberikan penyuluhan mengenai kewajiban pelaporan LHKPN dan memberikan panduan teknis terkait proses pengisian formulir LHKPN.

POLICY OF LHKPN SUBMISSION AND MANAGEMENT

The Company took earnest steps in enforcing policies on the submitting and managing LHKPN by implementing Decree of the Board of Directors No. KD.14/PA.109/ASDP-2023 concerning Submission of LHKPN via the e-LHKPN System within PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) and Affiliated Subsidiaries. The policy reflected the Company's commitment to GCG by reporting LHKPN, whilst also provide detailed steps on the process of submitting, managing, and confirming the employees' mandatory obligations. Determining penalties for employees who fails to report the obligatory LHKPN is accounted as the Company's efforts to ensure compliance with said regulations. Moreover, the Company also established additional policies that emphasized responsibility and governance regarding the management of the LHKPN reporting system through Decree of the Board of Directors No. SK.631/PA.105/ASDP-2021, which appointed Agency Administrators and Work Unit Administrators for the e-Registration e-LHKPN at PT ASDP Indonesia Ferry (Persero).

LHKPN MANAGER

Coordination in managing LHKPN at PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) is carried out by Vice President for HR Management in the HR Management Division with specific responsibilities, which include:

1. Collaboration with the KPK for the following activities:
 - Monitor and evaluate the compliance level in LHKPN reporting and announced property possessed wealth.
 - Employed e-LHKPN application that can be accessed via www.elhkpn.kpk.go.id.
 - Organise briefings on LHKPN reporting obligations and provide technical instructions on filling out the LHKPN form.

2. Melakukan verifikasi terhadap informasi yang disampaikan oleh KPK tentang kepatuhan para pelapor LHKPN dan menyajikan hasil verifikasi tersebut kepada KPK.
3. Mengirimkan informasi kepada KPK mengenai data kepegawaian dan setiap perubahan jabatan yang mengharuskan pelapor LHKPN untuk melakukan pembaruan.
4. Memperbarui informasi sebagaimana yang diperlukan dalam aplikasi e-LHKPN.
5. Memberikan pengingat kepada pelapor LHKPN agar mematuhi kewajiban pelaporan sesuai jadwal yang ditentukan.

MEKANISME PELAPORAN LHKPN

Pengungkapan harta kekayaan dari para pejabat Perusahaan diatur berdasarkan prinsip-prinsip yang tercantum dalam UU No. 28 tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari KKN (UU PNBKKN). UU ini mewajibkan para penyelenggara negara untuk menjalani proses pemeriksaan atas kekayaan mereka sebelum, selama, dan setelah masa jabatannya serta untuk melaporkan serta mengumumkan kekayaan mereka sebelum dan setelah menjabat. Mekanisme yang ditetapkan dalam UU tersebut bertujuan untuk menciptakan transparansi dalam kepemilikan aset para pejabat, memberikan dasar bagi pemeriksaan yang jujur terhadap kekayaan mereka, dan memastikan adanya pengungkapan yang akurat mengenai perubahan-perubahan dalam kekayaan mereka sepanjang masa jabatan.

LAPORAN LHKPN TAHUN 2023

Pada tahun 2023, penanggung jawab pengelolaan LHKPN telah melaksanakan serangkaian proses terkait pengelolaan LHKPN meliputi sosialisasi dan bimbingan teknis mengenai LHKPN kepada para wajib lapor. Sepanjang tahun 2023, seluruh wajib lapor di Perusahaan telah melakukan pelaporan LHKPN tahun 2022 secara tepat waktu. Artinya, capaian pelaporan LHKPN di Perusahaan mencapai 100% dengan jumlah Wajib Lapor LHKPN sebesar 281 pejabat.

2. Verify the information submitted by the KPK concerning the compliance of LHKPN reports and present the verification results to the KPK.
3. Submit employment information to the KPK and any changes in position that require update from the LHKPN reporter.
4. Update information as required in the e-LHKPN application.
5. Set reminders for LHKPN reporters to comply with mandatory reporting within the specified schedule.

LHKPN REPORTING MECHANISM

Assets disclosure of Company officials is regulated based on the principles stated in Law No. 28/1999 concerning Clean and Corruption, Collusion, Nepotism-Free State Officials (UU PNBKKN). The law requires state officials to undergo an audit process of their assets before, during and after their term of office and to report and declare their assets before and after taking office. The mechanisms set out in the law aim to create transparency in officials' asset ownership, provide a basis for an honest examination of their assets, and ensure accurate disclosure of changes in their assets throughout their terms of office.

LHKPN REPORTING MECHANISM

In 2023, the person in charge to manage LHKPN had performed the necessary processes related to LHKPN management, including dissemination and providing technical guidance on LHKPN to mandatory reporting officials. Throughout 2023, all mandatory reporters in the Company have reported their 2022 LHKPN in a timely manner. This showed that the achievement of LHKPN reporting in the Company was 100%, with LHKPN mandatory reporters totaled at 281 officials.

INFORMASI PEMBERIAN DANA UNTUK KEGIATAN SOSIAL DAN POLITIK

INFORMATION ON PROVIDING FUNDS FOR SOCIAL AND POLITICAL ACTIVITIES

PEMBERIAN DANA KEGIATAN SOSIAL

Perusahaan menyalurkan dana untuk kegiatan sosial melalui program Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perusahaan. Dana tersebut dialokasikan secara khusus dan ditetapkan melalui RKAP. Informasi mengenai pemberian dana untuk kegiatan sosial diuraikan pada bagian pembahasan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan yang menjadi bagian tidak terpisahkan dalam Laporan Tahunan ini.

PROVIDING FUNDS FOR SOCIAL ACTIVITIES

The Company allocates funds for social activities through the Corporate Social and Environmental Responsibility program. The funds are specifically allocated and decided in the Company's WPB. Information on funds allocations targeted for social activities is described in the Corporate Social Responsibility section, which is inseparable from the Annual Report.

PEMBERIAN DANA KEGIATAN POLITIK

Perusahaan memiliki kebijakan mengenai pemberian dana untuk kegiatan politik yang tertuang dalam CoC. Melalui pedoman tersebut, Perusahaan tidak diperkenankan untuk terlibat dalam memberikan dana untuk kegiatan politik atau memberikan dana kepada partai politik.

PROVIDING FUNDS FOR POLITICAL ACTIVITIES

The Company has a policy regarding funding for political activities, as stated in the CoC. The guideline stated that the Company is not permitted to be involved in funding neither political activities nor political parties.

PENGADAAN BARANG DAN JASA

PROCUREMENT OF GOODS AND SERVICES

Pengadaan barang dan jasa merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari aktivitas Perusahaan yang bertujuan untuk menunjang segala kebutuhan barang maupun jasa yang dibutuhkan untuk menjalankan aktivitas Perusahaan. Pengadaan barang dan jasa di Perusahaan dilakukan dengan menjunjung tinggi prinsip GCG melalui proses pengadaan barang dan jasa yang bertanggung jawab terhadap keadilan operasional terutama dalam hal transparansi. Perusahaan menyadari terdapat potensi risiko kecurangan yang dapat mengganggu penerapan GCG di Perusahaan seperti tindakan korupsi, kolusi, nepotisme maupun persaingan usaha yang tidak etis. Oleh karena itu, Perusahaan menerapkan serangkaian kebijakan dan prosedur sebagai langkah preventif untuk memastikan proses pengadaan barang dan jasa yang transparan dan berintegritas.

Procuring goods and services is an inseparable part of the Company's activities which aims to support every required goods and services necessary to execute the Company's business. Goods and services are procured by always upholding GCG principles through a responsible process in operational fairness, especially in its transparency. The Company realises the potential risk of fraud that could obstruct the GCG implementation in the Company, such as corruption, collusion, nepotism and unethical business competition. Therefore, the Company takes preventive measure by implementing a set of policies and procedures to ensure the integrity and transparency of the procurement process.

KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG DAN JASA

Perusahaan memiliki landasan kebijakan untuk pengadaan barang dan jasa sehingga pelaksanaan proses pengadaan barang dan jasa dapat dilakukan secara efektif, efisien, dan memenuhi prinsip tata kelola perusahaan yang baik. Pada tahun 2023, Perusahaan melakukan perubahan kebijakan pengadaan barang dan jasa yang dituangkan ke dalam KD.345/UM.201/ASDP-2023 tentang Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa di Lingkungan PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) yang disahkan pada tanggal 9 Oktober 2023. Perubahan kebijakan meliputi perubahan batas kewenangan nilai pengadaan dan pengenaan sanksi administratif bagi penyedia. Perubahan kebijakan ini merupakan wujud komitmen Perusahaan untuk terus berupaya melakukan perbaikan pada proses pengadaan barang dan jasa secara berkelanjutan untuk memperkuat penerapan GCG pada proses pengadaan barang dan jasa.

POLICY OF PROCUREMENT GOODS AND SERVICES

The Company has a policy for procuring goods and services such that the procurement process can be carried out effectively, efficiently and aligns with the GCG principles. In 2023, the Company amended its policy on procurement of goods and services as outlined in KD.345/UM.201/ASDP-2023 concerning Policy on Procurement of Goods and Services in PT ASDP Indonesia Ferry (Persero), which was ratified on 9 October 2023. Changes included authorised limits for procurement value and administrative penalties for vendors. The policy change reflected the Company's commitment to make continuous improvements in order to strengthen GCG implementation in the procurement of goods and services process.

Kebijakan pengadaan barang dan jasa tidak hanya mengatur mengenai kebijakan teknis seperti metode pengadaan dan batasan kewenangan nilai pengadaan semata, namun juga mengatur berbagai aspek lain yang bertujuan untuk memastikan pengadaan barang dan jasa yang memiliki kualitas yang baik. Dalam kebijakan pengadaan barang dan jasa juga memuat mengenai aspek seleksi penyedia, penilaian kinerja penyedia hingga pengelolaan hubungan dengan penyedia untuk memastikan Perusahaan mendapatkan barang dan/atau jasa yang berkualitas.

Di samping itu, Perusahaan juga memiliki kebijakan yang berkaitan dengan pemenuhan kode etik sesuai Pedoman Etika Perusahaan. Perusahaan menekankan bahwa seluruh pihak yang bekerja sama dengan Perusahaan harus memenuhi dan mematuhi persyaratan yang tercantum dalam Pedoman Etika Perusahaan yang dilakukan melalui sosialisasi dan ditegaskan dalam kontrak kerja secara tertulis. Penyedia barang dan jasa juga diwajibkan untuk menandatangani Pakta Integritas yang ditujukan agar seluruh proses bisnis terkait pengadaan barang dan jasa maupun pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan berjalan secara objektif dan mematuhi peraturan yang berlaku.

ETIKA PERUSAHAAN DALAM PENGADAAN BARANG DAN JASA

Pelaksanaan pengadaan barang dan jasa di lingkungan ASDP didasarkan pada prinsip-prinsip GCG yang menjadi landasan utama. Perusahaan menetapkan suatu kewajiban bagi penyedia untuk menandatangani Pakta Integritas sebagai manifestasi komitmen yang kuat terhadap penerapan GCG dalam setiap proses pengadaan barang dan jasa. Langkah ini sangat penting guna memastikan bahwa keseluruhan alur bisnis dan operasional berjalan dengan integritas dan sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan. Keputusan-keputusan yang dibuat dalam proses ini senantiasa diarahkan oleh prinsip objektivitas, dengan tujuan menghindari segala bentuk dominasi yang tidak seimbang dari pihak-pihak yang terlibat serta tidak terpengaruh oleh kepentingan satu pihak saja. Sementara itu, para pejabat dan setiap pihak yang terlibat dalam pengadaan barang dan jasa diwajibkan memiliki pemahaman yang mendalam akan etika yang mengatur proses pengadaan tersebut, yaitu sebagai berikut:

The policy on goods and services procurement not only regulated technical aspect such as procurement methods and authorised limits for procurement value, but also regulated other aspects aimed at ensuring the quality of goods and services procured. The policy covered aspects of selecting vendor, vendor performance appraisal and managing relationships with vendor to ensure the Company obtain quality goods and/or services.

In addition, the Company policies also included CoC compliance. The Company emphasized that every party in cooperation with the Company must fulfill and comply with the requirements stated in the Company's Code of Conduct. It was informed through dissemination and confirmed in a written cooperation contract. Suppliers of goods and services were also obligated to sign an Integrity Pact, which was aimed at ensuring all business processes related to the procurement of goods and services and its implementation thereof can be performed objectively and in compliance with applicable regulations.

COMPANY ETHICS IN PROCUREMENT OF GOODS AND SERVICES

Procurement of goods and services within ASDP is implemented in line with GCG principles as its foundation. The Company stipulated that vendors are obligated to sign an Integrity Pact as a manifested commitment to implement GCG in every procurement process. This step is crucial in ensuring the entire business and operational flow runs with integrity and in accordance with established rules. Decisions made throughout the processes are always driven by objectivity, aimed at avoiding all types of disproportionate monopoly from the parties involved, and are free from the interests of any party. Meanwhile, officials and every party involved in the procurement of goods and services must have in-depth understanding on ethics that governs the procurement process, which are as follows:

1. Menjalankan kewajiban dengan disiplin, bertanggung jawab untuk mencapai target dan tujuan pengadaan barang dan jasa, serta memastikan kelancaran prosesnya. 2. Beroperasi secara profesional dan independen, menjaga kerahasiaan informasi yang sensitif untuk mencegah potensi penyimpangan dalam pengadaan barang dan jasa. 3. Menghindari pengaruh yang dapat mengakibatkan persaingan usaha yang tidak sehat, baik secara langsung maupun tidak langsung. 4. Bertanggung jawab penuh atas keputusan yang diambil sesuai dengan perjanjian tertulis dengan pihak terkait. 5. Mencegah konflik kepentingan di antara pihak yang terlibat agar tidak menyebabkan persaingan usaha yang tidak sehat dalam pengadaan barang dan jasa. 6. Memastikan tidak ada pemborosan atau kebocoran keuangan negara/Perusahaan dalam proses pengadaan barang dan jasa. 7. Mencegah penyalahgunaan kekuasaan atau praktik kolusi yang mungkin terjadi. 8. Menolak pemberian, penawaran, atau janji terkait hadiah, imbalan, komisi, rabat, atau apapun kepada siapa pun yang diketahui atau diduga terkait dengan pengadaan barang dan jasa.	1. Perform duties with discipline, be responsible for achieving targets and objectives for goods and services procurement, and ensure the smooth running of the process. 2. Operate professionally and independently, maintain the confidentiality of sensitive information to prevent potential error in the procurement of goods and services. 3. Avoid influences that could result in unhealthy business competition, either directly or indirectly. 4. Take full responsibility for decisions taken in accordance with written agreements with related parties. 5. Prevent conflicts of interest among the parties involved to avoid unhealthy business competition in procuring goods and services. 6. Ensure no excessive spending or loss of state/Company funds in the process of procuring goods and services. 7. Prevent abuse of power or collusive practices that may occur. 8. Refuse to give, offer, or promise any gifts, rewards, commissions, rebates, or other forms to anyone known or suspected to be affiliated with procurement of goods and services.

TAHAPAN DAN MEKANISME PENGADAAN BARANG DAN JASA

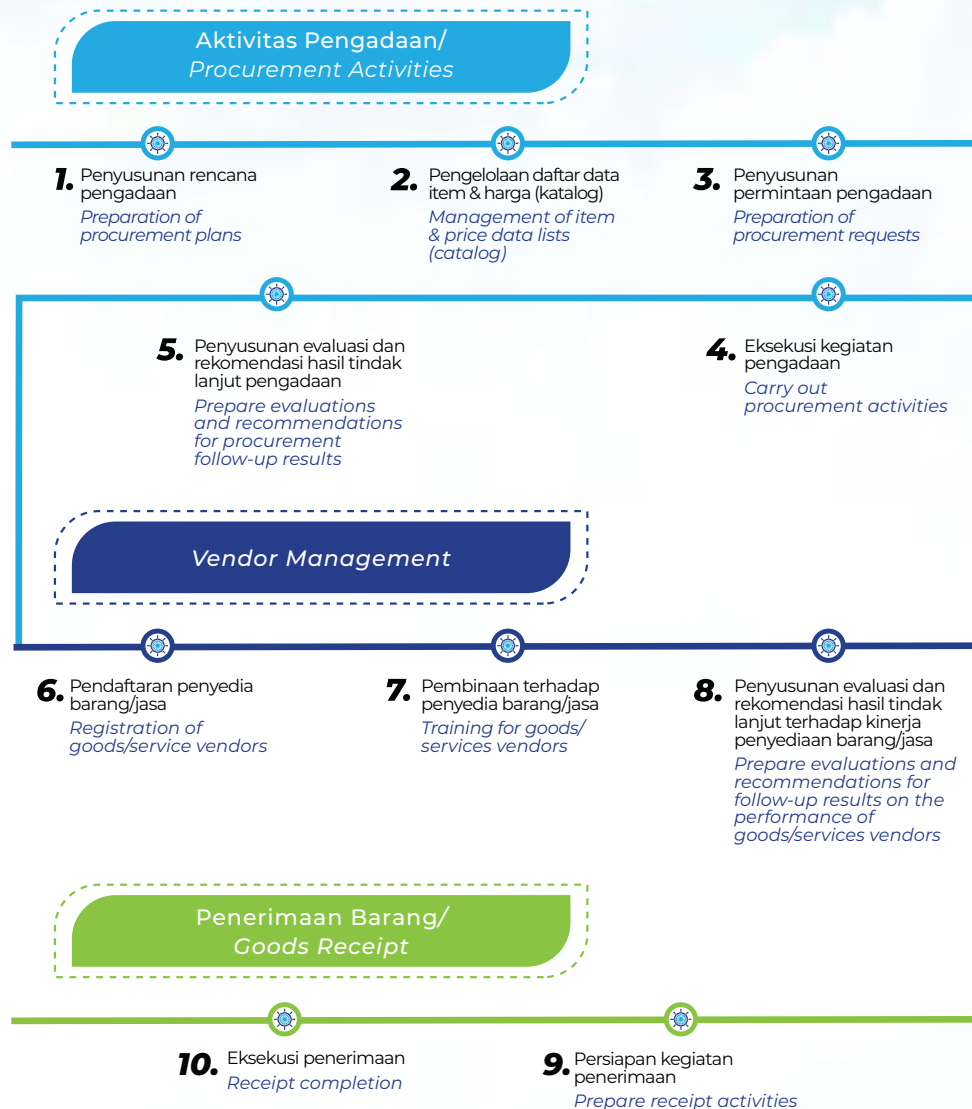
Perusahaan selalu menerapkan standar kualifikasi yang menjadi dasar minimal untuk melaksanakan berbagai kegiatan. Khususnya dalam pekerjaan yang memiliki risiko teknis atau komersial yang tinggi, atau dalam tugas yang kompleks, persyaratan kualifikasi bisa diperluas dengan ketentuan yang lebih spesifik dan khusus. Ini bisa mencakup persyaratan terkait dengan peralatan, keahlian tenaga kerja, dan pengalaman yang dibutuhkan. Sebagai bagian dari proses kualifikasi, penyedia diharuskan untuk menyatakan secara tertulis bahwa segala informasi yang mereka berikan dalam proses kualifikasi adalah benar. Dalam kasus ditemukannya informasi yang dipalsukan atau tidak benar, sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku akan diberlakukan terhadap pihak yang terlibat.

STAGES AND MECHANISMS FOR PROCUREMENT OF GOODS AND SERVICES

The Company always applies minimum qualification standards in carrying out various activities, especially in professions that require high technical or commercial risks, or in complex tasks, then required qualification can be expanded to be more specific and specialized. The qualification may include requirements related to equipment, workforce skills, and specific experience. As part of the qualifying process, vendors are required to put in writing affirming that any information they have provided during the qualification process is correct. In cases where falsified or incorrect information is found, penalties in accordance with applicable provisions will be applied to the parties involved.

Gambaran umum mengenai proses pengadaan barang dan jasa digambarkan melalui ilustrasi berikut:

A general overview of the goods and services procurement process is depicted through the following illustration:



KEGIATAN PENGADAAN BARANG DAN JASA

Sepanjang tahun 2023, Divisi *Supply Chain Management* melaksanakan kegiatan terkait pengadaan barang dan jasa di antaranya:

1. Divisi *Supply Chain Management* melaksanakan 10.392 program pengadaan barang dan jasa dengan realisasi nilai mencapai Rp1,6 triliun yang terdiri dari Rp1,04 triliun berasal dari kantor pusat dan Rp556 miliar merupakan pengadaan barang dan jasa kantor cabang. Secara rinci, frekuensi pengadaan barang dan jasa disajikan dalam tabel berikut:

No	Material Grup Group of Materials	Frekuensi Frequency
1	Jasa Services	3.617
2	Peralatan Equipments	3.554
3	Suku Cadang Spare Parts	1.299
4	Bahan Bakar Fuel	866
5	Lainnya Others	466
6	Barang Umum General Goods	393
7	Barang IT IT Equipments	77
8	Barang Cetak Printed Materials	71
9	Perhotelan Hospitality	26
10	Barang Promosi Promotional Items	23
Jumlah Total		10.392

2. Penilaian kinerja penyedia barang dan jasa yang dilakukan dilakukan setelah penyedia menyelesaikan kewajibannya sesuai dengan surat pemesanan barang dan jasa dan atau kontrak yang diterima oleh rekanan. Penilaian kinerja penyedia pada periode tahun 2023 mencatatkan hasil yang memuaskan dengan skor sebesar 92,73.
3. *Survey Kepuasan Vendor* atas Proses Pengadaan Barang dan Jasa yang merupakan suatu bentuk evaluasi bersama terkait penerapan prinsip, kebijakan serta etika dalam pelaksanaan proses pengadaan barang & jasa. Pada tahun 2023, survei dilakukan kepada terdapat

GOODS AND SERVICES PROCUREMENT ACTIVITIES

Throughout 2023, the Supply Chain Management Division fulfilled operations related to the procurement of goods and services including:

1. The Supply Chain Management Division carried out procurement programs for 10,392 goods and services with a total realized value of Rp1.6 trillion, consisted of Rp1.04 trillion from the head office and Rp556 billion from branch office. In detail, the frequency of procurement of goods and services is presented in the following table:

2. The performance review on goods and services vendors were performed after the vendors had fulfilled their responsibilities in accordance with the order letter and/or contract they've received. The vendor performance review in the 2023 recorded satisfactory results with a score of 92.73.
3. Vendor Satisfaction Survey on the Goods and Services Procurement Process is a form of joint evaluation on the application of principles, policies and ethics in implementing the Goods & Services Procurement process. In 2023, the surveys were

71 responden yang merupakan penyedia barang dan jasa melalui metode pengisian angket dengan 17 pertanyaan. Hasil survei kepuasan *vendor* menunjukkan bahwa proses pengadaan barang dan jasa di Perusahaan telah berjalan dengan baik dan memuaskan walaupun terdapat beberapa potensi peningkatan proses yang lebih baik.

4. Melaksanakan *vendor gathering* sebagai wujud dalam membangun hubungan yang baik dengan penyedia barang dan jasa. Pada tahun 2023, Perusahaan mengadakan *gathering* dengan tema *Gathering Sinergi BUMN* yang dilakukan antara perusahaan dengan PT Pos Indonesia (Persero) pada tanggal 1-2 Desember 2023.

conducted with 71 respondents who are vendors of goods and services using a questionnaire method with 17 questions. The results of the vendor satisfaction survey showed that the Company's procurement process was conducted well and satisfactorily, although there was potential for process improvements.

4. Organised vendor gatherings to build good relationships with vendors. In 2023, the Company held a gathering themed *BUMN Synergy Gathering* between the Company and PT Pos Indonesia (Persero) on 1-2 December 2023.

TRANSPARANSI PRAKTIK KEPATUHAN

TRANSPARENCY OF COMPLIANCE PRACTICES

KESESUAIAN PENYAJIAN LAPORAN TAHUNAN DAN LAPORAN KEUANGAN DENGAN PERATURAN YANG BERLAKU DAN STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN (SAK)

Informasi yang terdapat dalam Laporan Tahunan ini melibatkan beragam analisis dan evaluasi performa yang mengacu pada Laporan Keuangan Perusahaan untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2023. Laporan tersebut telah melalui proses audit yang dilakukan oleh pihak independen yaitu Kantor Akuntan Publik Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan. Adapun Laporan Keuangan Konsolidasian Perusahaan disusun dan dipresentasikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) di Indonesia, yang termasuk dalamnya adalah Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK). Hal ini mencakup Pernyataan dan Interpretasi yang dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan (DSAK) Ikatan Akuntan Indonesia.

Selain itu, Perusahaan telah memastikan bahwa laporan keuangan konsolidasi telah mematuhi Peraturan Pasar Modal yang berlaku, termasuk di dalamnya adalah Peraturan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam-LK) No. VIII.G.7 yang mengatur Pedoman Penyajian Laporan Keuangan, dan Keputusan Ketua Bapepam-LK No. KEP-347/BL/2012 tentang Penyajian dan Pengungkapan Laporan Keuangan Emiten atau Perusahaan Publik. Segala informasi yang tercantum dalam laporan ini telah dipenuhi dengan kepatuhan terhadap standar akuntansi yang berlaku serta regulasi yang ditetapkan oleh otoritas yang berwenang di bidang keuangan dan pasar modal.

CONFORMITY OF ANNUAL REPORTS AND FINANCIAL REPORTS PRESENTATION WITH APPLICABLE REGULATIONS AND FINANCIAL ACCOUNTING STANDARDS

The information contained in this Annual Report involves various analysis and performance evaluations that refer to the Company's Financial Report for the year ending 31 December 2023. The report had been audited by an independent party, namely the Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan Public Accounting Firm. The Company's Consolidated Financial Statements was prepared and presented in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards (SAK), which included the Statement of Financial Accounting Standards (PSAK). This included Statements and Interpretations issued by the Financial Accounting Standards Board (DSAK) of the Institute of Indonesia Chartered Accountants.

In addition, the Company ensured that the consolidated financial statements comply with applicable Capital Market Regulations, including Regulation of Capital Market and Financial Institution Supervisory Agency (Bapepam-LK) No. VIII.G.7 which regulates Guidelines for Presenting Financial Reports, and Decree of the Chairman of Bapepam-LK No. KEP-347/BL/2012 concerning Presentation and Disclosure of Financial Reports of Issuers or Public Companies. All information contained in this report had complied with applicable accounting standards and regulations established by the authorities in the financial and capital markets.

PENGUNGKAPAN SEGMENT OPERASI PADA LAPORAN KEUANGAN

Sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan yang diatur dalam PSAK No. 5 (Penyesuaian 2015) mengenai Segmen Operasi, Perusahaan telah mengadopsi penilaian dan penyajian informasi mengenai segmen operasi yang sesuai untuk keperluan manajemen. Informasi ini disusun dan disajikan berdasarkan kelompok jenis usaha dan aspek geografis sebagai metode pelaporan yang tercantum dalam bagian "Informasi Segmen" pada Laporan Keuangan Audit tahun buku 2023.

KESESUAIAN BUKU LAPORAN TAHUNAN DAN LAPORAN TAHUNAN DIGITAL

Laporan Tahunan Perusahaan, yang telah diajukan kepada pemegang saham, investor, serta pemangku kepentingan, dan yang telah dipublikasikan di situs web resmi Perusahaan, telah diintegrasikan secara konsisten dengan isi dan konten yang terdapat dalam buku cetak Laporan Tahunan yang telah diterbitkan oleh Perusahaan. Semua informasi yang terdapat dalam laporan yang disampaikan secara digital maupun dalam bentuk cetak telah disusun dan disajikan dengan kesesuaian yang mutlak untuk memastikan bahwa informasi yang diakses oleh berbagai pihak memiliki keseragaman dan akurasi yang konsisten sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh Perusahaan.

LAPORAN ATAS AKTIVITAS PERUSAHAAN YANG MENCEMARI LINGKUNGAN

Sepanjang tahun 2023, tidak ada laporan yang menyebutkan adanya dampak negatif terhadap lingkungan dari aktivitas yang dilakukan oleh Perusahaan. Selama periode tersebut, Perusahaan secara serius mempertimbangkan dan memperhatikan setiap aspek yang terkait dengan operasional bisnisnya demi memastikan bahwa tidak ada dampak yang merugikan terhadap lingkungan sekitarnya. Hal ini menjadi fokus utama dalam menjalankan segala kegiatan bisnis agar dapat beroperasi secara bertanggung jawab terhadap lingkungan dan komunitas sekitar.

DISCLOSURE OF OPERATING SEGMENTS IN FINANCIAL REPORTS

In accordance with Financial Accounting Standards regulated in PSAK No. 5 (2015 Adjustments) regarding Operating Segments, the Company has adopted the assessment and presentation of information regarding operating segments that is appropriate for management purposes. This information was compiled and presented based on business groups and geographical aspects as a reporting method listed in the "Segment Information" section of the Audited Financial Report for the 2023 financial year.

CONSISTENCY OF ANNUAL REPORT BOOKS AND DIGITAL ANNUAL REPORTS

The Company's Annual Report, which was submitted to shareholders, investors and stakeholders, and which was published on the Company's official website, had been consistently integrated with the content contained in the printed version of Annual Report published by the Company. All information presented in digital version and in printed version of the reports had been prepared and presented with absolute conformity to ensure that the information accessed by different parties has uniformity and consistent accuracy in accordance with the standards set by the Company.

REPORT ON COMPANY ACTIVITIES THAT IMPACT THE ENVIRONMENT

Throughout 2023, there was no reports mentioning any negative impacts on the environment from activities carried out by the Company. During this period, the Company intensely weighed and attended to every aspect related to its business operations to ensure that there was no detrimental impact on the surrounding environment. This was the essential focus in conducting all business activities, such that we may operate responsibly towards the environment and surrounding communities.

PENGUNGKAPAN PEMENUHAN KEWAJIBAN PERPAJAKAN

Sampai akhir tahun 2023, tidak ada catatan kejadian yang melibatkan Perusahaan dalam masalah perpajakan. Perusahaan telah dengan konsisten dan sepenuhnya mentaati serta mematuhi segala kewajiban pembayaran dan pelaporan pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Seluruh proses terkait pemenuhan pajak telah dilakukan dengan tingkat kepatuhan yang optimal, memastikan bahwa Perusahaan tidak terlibat dalam situasi yang melibatkan ketidakpatuhan atau pelanggaran terhadap peraturan perpajakan yang berlaku.

KEBIJAKAN PEMBERIAN KOMPENSASI JANGKA PANJANG

Perusahaan ini tidak termasuk dalam kategori Perusahaan Terbuka yang memiliki catatan sahamnya di Bursa, dengan seluruh kepemilikan sahamnya dimiliki oleh Negara Republik Indonesia. Sehubungan dengan hal tersebut, tidak ada kebijakan yang diterapkan terkait pemberian kompensasi jangka panjang, seperti program kepemilikan saham yang diarahkan kepada manajemen (*Management Stock Ownership Program*, MSOP) maupun program kepemilikan saham bagi para karyawan (*Employee Stock Ownership Program*, ESOP). Hal ini menunjukkan bahwa Perusahaan memiliki struktur kepemilikan yang berbeda dengan Perusahaan Terbuka dan tidak mengimplementasikan program-program kompensasi tersebut karena karakteristik kepemilikannya yang dikuasai oleh Negara Republik Indonesia.

PENERAPAN ATAS PEDOMAN TATA KELOLA

Perusahaan ini tidak termasuk dalam kategori Perusahaan Terbuka yang memiliki pencatatan sahamnya di Bursa Saham. Oleh karena itu, sebagai konsekuensi dari statusnya tersebut, Perusahaan tidak diwajibkan untuk mematuhi regulasi yang tercantum dalam Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka. Karena tidak ada pencatatan saham di pasar publik, Perusahaan tidak terikat pada aturan dan ketentuan khusus yang biasanya berlaku untuk perusahaan yang terdaftar secara publik.

DISCLOSURE OF FULFILLMENT OF TAX OBLIGATIONS

Until the end of 2023, there were no incidents involving the Company in tax-related issues. The Company has consistently and fully adhered to and complied with all tax payment and reporting obligations in accordance with applicable regulations. All processes related to tax compliance have been carried out with optimal adherence, ensuring that the Company is not involved in any situations of non-compliance or violation of existing tax regulations.

LONG-TERM COMPENSATION POLICY

This Company was excluded from the category of Public Company, which has its share records on the Stock Exchange, as all share ownership was owned by the Republic of Indonesia. Therefore, there is no policy implemented regarding the provision of long-term compensation, such as Management Stock Ownership Program (MSOP) or Employee Stock Ownership Program (ESOP). This showed that the Company had a different ownership structure from a public company and does not implement these compensation programs because of the characteristics of its ownership, which was controlled by the Republic of Indonesia.

IMPLEMENTATION OF GOVERNANCE GUIDELINES

This Company was excluded from the category of Public Company, which has its shares listed on the Stock Exchange. Therefore, as a consequence of its status, the Company was not required to comply with the regulations contained in the Guidelines for Public Company Governance. Since there was no share listed on the public market, the Company was not bound by the special rules and regulations that usually apply to publicly listed companies.

PENERBITAN LAPORAN TAHUNAN TERINTEGRASI

Perusahaan telah merilis sebuah laporan tahunan terintegrasi yang dirancang sesuai dengan kriteria yang ditentukan dalam SEOJK 16/2021 tentang Bentuk dan Isi Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik serta sesuai standar *Annual Report Award* (ARA) 2023. Laporan Tahunan 2023 menyajikan informasi secara komprehensif meliputi aspek kinerja historis yang terdiri dari aspek risiko, peluang, dan proyeksi Perusahaan di masa depan. Informasi ini terdokumentasi dalam Bagian Ikhtisar Data Keuangan Penting, Bab Analisis dan Pembahasan Manajemen, serta Bab Tata Kelola Perusahaan. Tujuan utamanya adalah memberikan pemahaman yang lebih dalam kepada para pemegang saham dan pihak yang memiliki kepentingan terhadap Perusahaan, membantu mereka memahami dengan lebih baik tujuan strategis korporasi dan langkah-langkah yang diambil untuk mencapai penciptaan nilai jangka panjang yang berkelanjutan. Dengan demikian, laporan ini berfungsi sebagai alat komunikasi penting untuk memperjelas pencapaian Perusahaan serta arah strategisnya kepada pemangku kepentingan.

PUBLISHING INTEGRATED ANNUAL REPORT

The Company had released an integrated annual report designed in accordance with the criteria specified in SEOJK 16/2021 concerning the Form and Content of Annual Reports of Issuers or Public Companies and in accordance with the standards of 2023 Annual Report Award (ARA). The 2023 Annual Report presented comprehensive information covering historical performance aspects consisted of aspects of risks, opportunities and future projections of the Company. This information was documented in the sections of Financial Performance Highlight, Management Analysis and Discussion chapter, and Corporate Governance chapter. The primary objective was to help the Company's shareholders and any interested parties with a deeper understanding of the Company's strategic objectives and the measures taken to achieve long-term, sustainable value creation. Thus, this report served as an important communication tool to describe the Company's achievements and strategic direction to stakeholders.



07 TATA KELOLA TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN

*SOCIAL AND ENVIRONMENTAL
RESPONSIBILITY GOVERNANCE*

Perusahaan menyadari bahwa dalam menjalankan aktivitas bisnis, perlu menjaga keseimbangan antara aspek *people*, *profit*, dan *planet*. Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) menjadi salah satu wujud menjaga keseimbangan tersebut dan merupakan bagian dari penerapan tata kelola keberlanjutan (*sustainability governance*) di Perusahaan. Hal ini ditujukan dalam upaya untuk menjaga keberlanjutan bisnis yang dapat menciptakan nilai bagi seluruh pemangku kepentingan, serta mewujudkan kehidupan yang baik bagi semua pihak sesuai dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals*, SDGs) di waktu saat ini maupun di masa depan.

Praktik keberlanjutan ini diwujudkan melalui pelaksanaan program TJSL dalam berbagai aspek, seperti aspek sosial kemasyarakatan, ketenagakerjaan, produk dan/atau jasa, ekonomi, maupun lingkungan. Pelaksanaan program TJSL dilakukan secara sistematis dengan mencermati kebutuhan yang relevan dengan kondisi ekonomi, sosial, dan lingkungan yang terjadi di internal maupun di eksternal Perusahaan untuk memastikan program TJSL yang efektif dan tepat sasaran.

DASAR PENERAPAN PROGRAM TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN

Program TJSL yang dilaksanakan oleh Perusahaan, dilandaskan pada peraturan perundangan-undangan dan rangkaian regulasi pendukung yang berlaku, antara lain:

1. Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas Pasal 74;
2. Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal Pasal 15 dan Pasal 35;
3. Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
4. Undang-Undang No. 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara Pasal 2;
5. Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;

The Company realizes that in conducting business, it is necessary to maintain a balance between aspects of people, profit, and planet. Corporate Social and Environmental Responsibility (CSR) is a way to maintain that balance and is part of implementing sustainability governance in the Company. This is aimed at maintaining business sustainability that can create value for all stakeholders, and constructing a good life for all parties in accordance with the Sustainable Development Goals (SDGs) at present and in the future.

The sustainability practice is achieved through the CSR program implementation in various aspects such as social aspects, employment, products and/or services, economics, and the environment. The CSR program is implemented systematically by paying attention to relevant demands in economic, social and environmental situations that occur in the Company's internal and external surroundings to ensure that the CSR program is effective and on target.

BASIS FOR IMPLEMENTING SOCIAL AND ENVIRONMENTAL RESPONSIBILITY PROGRAMS

The CSR program implemented by the Company is based on a series of applicable laws, regulations and supporting regulations, including:

1. Law No. 40/2007 concerning Limited Liability Companies Article 74;
2. Law No. 25/2007 concerning Capital Investment Article 15 and Article 35;
3. Law No. 32/2009 concerning Environmental Protection and Management;
4. Law No. 19/2003 concerning State-Owned Enterprises Article 2;
5. Law No. 6/2023 concerning Stipulation of Government Regulations in Lieu of Law No. 2/2022 concerning Job Creation Becoming Law;

6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas;
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB);
8. Peraturan Menteri BUMN No. PER-1/MBU/03/2023 tentang Penugasan Khusus dan Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha Milik Negara;
9. Peraturan Menteri BUMN No. PER-2/MBU/03/2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara; dan
10. Surat Edaran Menteri BUMN No. SE-1/MBU/02/2023 tahun 2023 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Penyaluran Bantuan Sosial dan Kemanusiaan pada Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan BUMN.

Selain mengacu pada perundang-undangan dan rangkaian regulasi pendukung, pada proses implementasi perusahaan juga mengacu kepada prinsip maupun standar internasional yang relevan, seperti ISO 26000:2010, *The Ten United Nations Global Impact, Guidance on Social Responsibility*, dan berorientasi pada pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs).

KOMITMEN SERTA KEBIJAKAN PENERAPAN PROGRAM TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN

Komitmen Perusahaan terhadap program TJSL tertuang dalam kebijakan yaitu, Keputusan Direksi No. KD.306/KU.207/ASDP-2023 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) dan perubahan-perubahannya, serta melalui prosedur program TJSL. Hal tersebut dilakukan untuk memastikan bahwa pelaksanaan program TJSL dapat berjalan sesuai dengan peraturan yang berlaku dan berdampak pada pemangku kepentingan.

Perusahaan juga telah menunjuk tim khusus untuk mengelola program TJSL melalui Unit Kerja TJSL yang berada di bawah tanggung jawab Divisi *Corporate Secretary*. Tim pengelola

Apart from referring to law and supporting regulations, the Company's implementation process also refer to relevant international principles and standards, such as ISO 26000:2010, *The Ten United Nations Global Impact, Guidance on Social Responsibility*, and is oriented towards achieving the Sustainable Development Goals. (SDGs).

BASIS FOR IMPLEMENTING SOCIAL AND ENVIRONMENTAL RESPONSIBILITY PROGRAMS

The Company's commitment to the CSR program is stated in Board of Directors' Decree No. KD.306/KU.207/ASDP-2023 concerning Social and Environmental Responsibility in PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) and its amendments as well as in procedures of CSR program. It ensures that the implementation of CSR program run in accordance with applicable regulations and brings impact on stakeholders.

The Company has also appointed a special team to manage the CSR program through the CSR Work Unit, which is under the responsibility of the Corporate Secretary

TJSL memiliki tanggung jawab dalam melaksanakan keseluruhan program TJSL mulai dari perencanaan, pelaksanaan hingga evaluasi program TJSL.

Dalam melaksanakan program TJSL, Perusahaan menerapkan prinsip-prinsip sebagai berikut:

1. Terintegrasi, yaitu berdasarkan analisa risiko dan proses bisnis yang memiliki keterkaitan dengan pemangku kepentingan;
2. Terarah, yaitu memiliki arah yang jelas untuk mencapai tujuan perusahaan;
3. Terukur dampaknya, yaitu memiliki kontribusi dan memberikan manfaat yang menghasilkan perubahan atau nilai tambah bagi pemangku kepentingan dan perusahaan;
4. Akuntabilitas, yaitu dapat dipertanggungjawabkan sehingga menjauhkan dari potensi penyalahgunaan dan penyimpangan;
5. Hukum dan tata kelola, untuk terwujudnya kepastian hukum dan tata kelola yang efektif, transparan, akuntabel, dan partisipatif untuk menciptakan stabilitas keamanan dan mencapai negara berdasarkan hukum.

Perusahaan memastikan program TJSL dapat memberikan dampak seluas-luasnya kepada pemangku kepentingan terutama bagi penerima manfaat TJSL itu sendiri. Untuk itu, penyusunan program TJSL dilakukan sesuai dengan kondisi aktual yang dilakukan melalui proses pemetaan sosial. Proses ini bertujuan untuk mengidentifikasi masalah sosial yang terjadi di sekitar wilayah operasional Perusahaan agar program dapat dirancang sesuai dengan kebutuhan masyarakat sekitar, sehingga program yang dilaksanakan mampu mendorong masyarakat untuk lebih berdaya dan mandiri. Komitmen tersebut dituangkan oleh Perusahaan melalui berbagai program TJSL yang dirancang untuk dijalankan sepanjang tahun 2023. Program TJSL tersebut dibagi ke dalam empat pilar yang dimiliki oleh Perusahaan, yaitu sosial, ekonomi, lingkungan, serta hukum dan tata kelola. Untuk meningkatkan optimalisasi pengelolaan program TJSL, Perusahaan memiliki unit kerja tersendiri yang dikhususkan untuk mengelola TJSL di Perusahaan.

Division. The CSR management team has responsibility for implementing complete CSR program starting from planning, implementation to evaluation.

In implementing the CSR program, the Company applies the following principles:

1. Integrated, based on risk analysis and business processes that are related to stakeholders;
2. Directed, having a clear direction to achieve company goals;
3. Measurable impact, provide contribution and benefits that produce change or added value for stakeholders and the company;
4. Accountability, being accountable to avoid potential abuse and irregularities;
5. Law and governance, to create legal certainty and effective, transparent, accountable and participatory governance to create secured stability and achieve a lawful state.

The Company ensures that the CSR program gives the widest possible impact on stakeholders, especially the CSR beneficiaries. For this reason, the preparation of the CSR program is carried out in accordance with actual conditions from a social mapping process. This process aims to identify ongoing social problems around the Company's operational areas so that programs are designed to fulfil the needs of the surrounding community, and the programs implemented motivates the community to be more empowered and independent. The Company's commitment is outlined in various CSR programs designed to be implemented throughout 2023. The CSR program is divided into four pillars, namely social, economic, environmental, as well as law and governance. To improve the optimization of CSR program management, the Company has assigned a specific work unit to manage CSR in the Company.

Informasi mengenai kinerja dan program TJSL telah disampaikan secara komprehensif dalam Laporan Keberlanjutan Tahun 2023. Laporan ini disajikan secara terpisah namun merupakan bagian integral dari Laporan Tahunan Perusahaan. Dengan penyajian secara terpisah dari Laporan Tahunan, Perusahaan berusaha memberikan pemahaman menyeluruh mengenai inisiatif, pencapaian, dan komitmen dalam aspek TJSL yang lebih komprehensif dan terfokus pada pembahasan mengenai laporan keberlanjutan. Pada Laporan Tahunan ini, Perusahaan akan memaparkan secara ringkas mengenai peran Perusahaan dalam melaksanakan program TJSL.

ORGANISASI PENANGGUNG JAWAB DAN PENGELOLA PROGRAM TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN

Berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) No. SK.488/PA.055/ASDP-2021 tentang Penetapan Uraian Jabatan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pusat dan Regional PT ASDP Indonesia Ferry (Persero), penanggung jawab dan pengelola program TJSL di lingkup Perusahaan adalah *Corporate Secretary* melalui Manajer Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan. Pengelola TJSL bertanggung jawab untuk melakukan perencanaan program dan anggaran, pengelolaan program dan evaluasi program kerja TJSL setiap tahun. Di samping itu, unit kerja TJSL juga bertanggung jawab untuk menyusun kerangka kerja, visi, dan *roadmap* TJSL dalam jangka panjang serta menjadi penanggung jawab untuk mengintegrasikan seluruh aspek TJSL.

Di samping itu, dalam praktiknya pelaksanaan TJSL tidak hanya dilakukan oleh unit kerja TJSL, melainkan dilakukan oleh divisi lain yang memiliki relevansi dengan aspek-aspek TJSL. Divisi yang terlibat dalam pelaksanaan TJSL adalah sebagai berikut:

Information on CSR performance and programs was presented comprehensively in the 2023 Sustainability Report, which will appear separately but is an integral part of the Company's Annual Report. By presenting it separately from the Annual Report, the Company seeks to provide an extensive understanding of aspects of CSR initiatives, achievements and commitments that is more comprehensive, and focused on discussions about sustainability. In this Annual Report, the Company will briefly describe the Company's role in the CSR program implementation.

ORGANIZATION RESPONSIBLE FOR AND MANAGING SOCIAL AND ENVIRONMENTAL RESPONSIBILITY PROGRAMS

Based on the Decree of the Board of Directors of PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) No. SK.488/PA.055/ASDP-2021 concerning Defining of Organizational Position Descriptions and Work Procedures for the Head Office and Regional Offices of PT ASDP Indonesia Ferry (Persero), the official in charge to manage CSR program within the Company is Corporate Secretary through the Corporate Social Responsibility Manager. CSR Manager is responsible to execute budget and program planning, program management, and annual evaluation of CSR work programs. Aside from that, the CSR work unit is also responsible for formulating the long-term CSR framework, vision, roadmap and for integrating all aspects of CSR.

Moreover, in its practice, CSR implementation were carried out not only by the CSR work unit, but also by other divisions that have relevance to CSR. The divisions involved in implementing CSR are as follows:

No	Aspek Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan <i>Aspects of Corporate Social and Environmental Responsibility</i>	Penanggung Jawab <i>Unit Responsible</i>
1	Lingkungan Environment	Corporate Secretary Division
2	Hak Asasi Manusia Human Rights	- Divisi Perencanaan Organisasi & Sistem SDM Human Capital Planning Division - Divisi Pengelolaan SDM HR Management Division
3	Praktik Ketenagakerjaan, Kesehatan, dan Keselamatan Kerja Employment, Health and Safety Practices	- Divisi Perencanaan Organisasi & Sistem SDM Human Capital Planning Division - Divisi Pengelolaan SDM HR Management Division - Divisi Keselamatan, Kesehatan dan Lingkungan (K2L) Safety, Health and Environment Division - Sub Divisi Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) Occupational Health and Safety Sub Division
4	Pengembangan Sosial dan Kemasyarakatan Social and Community Development	Corporate Secretary Division
5	Pelanggan Customer	- Divisi Operasional Operations Division - Divisi Pelayanan Pelanggan Customer Service Division
6	Praktik Operasi yang Adil Fair Operating Practices	Satuan Pengawas Internal Internal Audit Unit

PELIBATAN PEMANGKU KEPENTINGAN

Dalam membangun tata kelola berkelanjutan, Perusahaan senantiasa membangun komunikasi dan keterlibatan dari seluruh pemangku kepentingan. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa Perusahaan dapat memahami harapan dan masukan dari pihak-pihak yang memiliki kepentingan dan terlibat dalam aktivitas bisnis, untuk selanjutnya dapat diselaraskan dengan strategi bisnis maupun program TJSL Perusahaan.

Keterlibatan dengan pemangku kepentingan juga memiliki tujuan untuk mengidentifikasi dampak aktual dan potensial terhadap kegiatan bisnis Perusahaan, termasuk dampaknya terhadap aspek ekonomi, lingkungan, dan sosial. Informasi ini kemudian digunakan untuk merancang tindakan pencegahan dan mitigasi terhadap potensi dampak negatif.

Perusahaan melakukan pemetaan pemangku kepentingan (*stakeholders mapping*) guna mengidentifikasi kategori pemangku kepentingan yang berdampak atau memberikan dampak pada operasional Perusahaan, dengan mempertimbangkan

STAKEHOLDERS INVOLVEMENT

In building sustainability governance, the Company always builds communication and involvement from all stakeholders. This aims to ensure that the Company understands the expectations and suggestions from parties with interests and are involved in business activities, so as to ensure alignment with the Company's business strategy and CSR program.

Engagement with stakeholders to identify actual and potential impacts on the Company's business activities, including impacts on economic, environmental and social aspects. This information is then used to design prevention and mitigation measures against potential negative impacts.

The Company drafted stakeholder mapping to identify categories of stakeholders who are affected or cause impact on the Company's operations, taking into account economic, environmental, and social dimensions. The mapping was created with

dimensi ekonomi, lingkungan, dan sosial. Pemetaan ini dilakukan dengan tujuan memahami relasi antara Perusahaan dan pemangku kepentingan, mengetahui potensi serta masalah yang ada, sehingga program yang akan dijalankan dapat tepat sasaran sesuai dengan ekspektasi para pemangku kepentingan, dan menyusun rencana program yang efektif. Berdasarkan hasil identifikasi tersebut, Perusahaan telah mengkategorikan pemangku kepentingan ke dalam enam kelompok, yaitu pemegang saham, pemerintah, karyawan, pengguna jasa atau pelanggan, pemasok dan masyarakat umum. Setiap pemangku kepentingan memiliki isu utama dan metode pendekatan yang berbeda antar satu sama lain, yang secara rinci disajikan pada tabel berikut ini:

the objective to understand the relationship between the Company and its stakeholders, understanding the potential and existing problems, such that the program implemented can fulfil the expectations of stakeholders, and develop an effective program plan. Based on the identification results, the Company has categorized stakeholders into six groups, namely shareholders, government, employees, service users or customers, suppliers, and the general public. Each stakeholder has core issues and approaches that are uniquely different, as presented in detail in the following table:

Pemetaan dan Pelibatan Pemangku Kepentingan Perusahaan *Mapping and Involvement of Company Stakeholders*

Pemangku Kepentingan Stakeholders	Isu Utama Main Issue	Metode Pelibatan Involvement Method
Pemegang Saham Shareholders	Memaksimalkan nilai Perusahaan bagi Pemegang Saham, serta mengoptimalkan pencapaian <i>key performance indicators</i> . <i>Maximize Company's value for Shareholders, as well as optimize the key performance indicators achievement.</i>	- Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). <i>General Meeting of Shareholders (GMS).</i> - Rapat Dewan Komisaris dengan Komite. <i>Joint Meeting of the Board of Commissioners with Committees.</i>
Pemerintah Government	Menjamin kelancaran dan keamanan pelabuhan dan penyeberangan untuk mengoptimalkan proses bisnis yang mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. <i>Ensure the smooth operations and security of ports and ferries to optimize business processes that drive national economic growth.</i>	- Pelaporan terkait hasil kinerja, keamanan pelabuhan dan penyeberangan, serta ketenagakerjaan. <i>Reports related to performance results, port and ferry security, and employment.</i> - Kerja sama terkait Penerimaan Modal Negara. <i>Cooperation related to State Capital Participation.</i> - Rapat Dengar Pendapat dengan DPR. <i>Hearing Meeting with the Parliamentary.</i>
Karyawan Employee	Menciptakan lingkungan kerja yang nyaman dan aman bagi karyawan, serta memastikan kesejahteraan karyawan. <i>Create a positive and safe work environment for employees, and ensure employee welfare.</i>	- Perayaan Hari Ulang Tahun Perusahaan. <i>Company Anniversary Celebration.</i> - Acara internal Perusahaan. <i>Internal Company events.</i> - Pertemuan dengan Serikat Pekerja. <i>Meeting with Union.</i> - Simulasi Tanggap Darurat Bencana. <i>Simulation of Disaster Emergency Response.</i> - Pendidikan dan pelatihan untuk seluruh karyawan. <i>Knowledge and training for all employees.</i> - Survei kepuasan karyawan. <i>Employee satisfaction survey.</i>

Pemangku Kepentingan Stakeholders	Isu Utama Main Issue	Metode Pelibatan Involvement Method
Pengguna Jasa atau Pelanggan Service Users or Customers	Menyediakan jasa penyeberangan yang berkualitas dan memenuhi kepuasan pengguna jasa atau pelanggan. Provide quality ferry transportation services and meeting the satisfaction of service users or customers.	- Penyediaan layanan pelanggan Provide customer service. - Survei kepuasan pelanggan. Customer satisfaction survey. - Aplikasi Ferizy. Ferizy application.
Pemasok Supplier	Menyediakan, membangun, dan mengelola pelabuhan dan penyeberangan yang berkualitas dan memenuhi kepuasan pemasok. Provide, build and manage quality ports and ferry services, and fulfill supplier satisfaction.	- Survei vendor Vendor survey. - Business review meeting. Business review meeting.
Masyarakat Umum General Public	Menjamin kelancaran dan keamanan pelabuhan dan penyeberangan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional yang akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Ensure the smooth and safe operations of ports and ferriage to encourage national economic growth which will improve community welfare.	- Kegiatan TJSL. CSR activities. - Forum dengan masyarakat sekitar untuk mendapat aspirasi terkait kebutuhan masyarakat Forums with local communities to gain community aspirations.

PENGEMBANGAN KOMPETENSI TERKAIT ASPEK KEBERLANJUTAN

Perusahaan secara berkelanjutan melakukan pengembangan kompetensi terkait dengan aspek keberlanjutan sebagai upaya untuk memperkuat dan meningkatkan kualitas SDM dalam penerapan tata kelola keberlanjutan. Pada tahun 2023, pengembangan kompetensi ini diutamakan untuk Dewan Komisaris dan Direksi serta penanggung jawab program TJSL. Satu program pengembangan kompetensi terkait aspek keberlanjutan yaitu ESG for Boards yang diselenggarakan oleh BUMN Leadership & Management Institute secara online pada 27 September 2023.

COMPETENCY DEVELOPMENT RELATED TO SUSTAINABILITY ASPECTS

The Company continuously develops competencies on sustainability aspects in efforts to strengthen and improve the human resource capability in implementing sustainability governance. In 2023, the competency development was prioritized for the Boards of Commissioners and Directors as well as executives responsible for the CSR program. One competency development program related to sustainability was ESG for Boards, which was organized by the SOEs Leadership & Management Institute virtually on 27 September 2023.

PENILAIAN RISIKO ATAS ASPEK KEBERLANJUTAN

Dalam pengelolaan aspek keberlanjutan, Perusahaan senantiasa melakukan proses manajemen risiko melalui kerangka kerja ISO 31000 dan Peraturan Menteri BUMN No. PER-2/MBU/03/2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara. Melalui kerangka kerja ini, Perusahaan dapat menghasilkan sistem manajemen risiko yang terintegrasi di seluruh Perusahaan dengan perspektif yang menyeluruh.

Komitmen Perusahaan terkait manajemen risiko atas aspek keberlanjutan dituangkan melalui Surat Keputusan Bersama Dewan Komisaris dan Direksi PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) No. SK.772/HK.002/ASDP-2023 tentang Pedoman Manajemen Risiko PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) dan Keputusan Direksi PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) No. KD.193/HK.002/ASDP-2023, tentang Pedoman Sistem Manajemen Keberlangsungan Usaha PT ASDP Indonesia Ferry (Persero).

Dalam praktiknya, manajemen risiko atas aspek keberlanjutan dilakukan oleh Divisi Manajemen Risiko berkoordinasi dengan Divisi *Corporate Secretary* dan Unit Kerja TJSL yang dimulai dari proses perencanaan, pelaksanaan hingga evaluasi program TJSL. Divisi Manajemen Risiko juga berkoordinasi dengan divisi lain yang memiliki keterkaitan dengan aspek keberlanjutan seperti, Divisi Operasional, Divisi Pelayanan Pelanggan, Divisi K2L, Divisi Pengelolaan SDM dan Divisi Pengembangan Organisasi dan Sistem SDM serta, Divisi Hukum. Hal tersebut dilakukan untuk memastikan manajemen risiko pada aspek lingkungan terutama pencemaran dan pengendalian emisi, ekonomi, dan pengembangan masyarakat, ketenagakerjaan dan keselamatan tenaga kerja, hukum serta tata kelola keberlanjutan. Direksi memiliki peran dalam mengelola, melakukan pengawasan, peninjauan, dan evaluasi atas penerapan manajemen risiko pada aspek keberlanjutan secara berkala terutama apabila terdapat isu-isu strategis yang perlu diputuskan oleh Direksi.

RISK ASSESSMENT OF SUSTAINABILITY ASPECTS

In managing sustainability, the Company consistently adhere to risk management processes of the ISO 31000 framework and Regulation of Minister of SOEs No. PER-2/MBU/03/2023 concerning Guidelines for Governance and Significant Corporate Activities of State-Owned Enterprises. Through this framework, the Company produced an integrated risk management system on the entire Company with a comprehensive perspective.

The Company's commitment in risk management about sustainability is stated in the Joint Decree of the Boards of Commissioners and Directors of PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) No. SK.772/HK.002/ASDP-2023 concerning Risk Management Guidelines for PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) and Decree of the Board of Directors of PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) No. KD.193/HK.002/ASDP-2023, concerning Guidelines for the Business Continuity Management System of PT ASDP Indonesia Ferry (Persero).

Realistically, risk management on sustainability aspects is carried out by the Risk Management Division in coordination with the Corporate Secretary Division and the CSR Work Unit, beginning with the planning process, implementation to evaluation of the CSR program. The Risk Management Division also coordinates with other divisions on aspects of sustainability, such as the Operations Division, Customer Service Division, HSE Division, HR Management Division, Human Capital Planning Division, and Legal Division. This ensured risk management in environmental aspects, especially pollution and emission control, economic and community development, employment and worker safety, law, and sustainability governance. The Board of Directors held roles in managing, supervising, reviewing and evaluating the risk management implementation in sustainability on a regular basis, most importantly at times when the Board of Directors is required to make decision on strategic issues.

TANTANGAN TERKAIT ASPEK KEBERLANJUTAN

Perusahaan menyadari bahwa dalam implementasi tata kelola keberlanjutan dan program TJSL, selalu dihadapkan pada sejumlah tantangan keberlanjutan. Tantangan tersebut dapat berupa perubahan dan krisis lingkungan semakin cepat, serta persaingan usaha yang ketat. Di samping itu, perubahan regulasi terkait aspek keberlanjutan yang berubah kian cepat juga menjadi tantangan tersendiri bagi Perusahaan untuk mampu beradaptasi dengan perubahan regulasi tersebut. Dalam menghadapi tantangan keberlanjutan tersebut, Perusahaan melakukan berbagai langkah, di antaranya melakukan transformasi digital, melakukan inovasi yang berorientasi pada *green energy* dan *green building*, melakukan pengembangan kompetensi yang berorientasi pada keberlanjutan, serta mendorong menjaga kesiapan armada maupun infrastruktur yang andal.

CHALLENGES RELATED TO SUSTAINABILITY ASPECTS

The Company realizes that implementation of sustainability governance and CSR program will always face a number of challenges. These challenges include increasingly rapid environmental changes and the crises they bring, as well as fierce business competition. Apart from that, changes in regulations related to sustainability aspects are changing rapidly, thus presenting challenges for the Company to adapt to the regulatory changes. In facing these sustainability challenges, the Company is taking various steps, such as digital transformation, create innovations oriented towards green energy and green building, develop competencies oriented towards sustainability, and maintain the fleet readiness and reliable infrastructure.

STRATEGI TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN

STRATEGY IN SOCIAL AND ENVIRONMENTAL RESPONSIBILITY

Program TJSL menjadi salah satu komitmen Perusahaan dalam mengambil peran untuk mencapai SDGs dalam aspek ekonomi, sosial, lingkungan serta hukum, dan tata kelola dengan prinsip yang lebih terintegrasi, terarah dan terukur, serta dapat dipertanggungjawabkan. Perusahaan telah menyusun strategi TJSL termasuk kerangka kerja dan program TJSL yang disesuaikan dengan karakteristik bisnis, potensi dampak bisnis yang ditimbulkan, serta kebutuhan masyarakat sekitar area kerja Perusahaan.

One of the Company's commitments in the CSR program is taking an active role in achieving the SDGs related to economic, social, environmental as well as legal and governance aspects through better integration, targeted, measurable and accountability. The Company has developed CSR strategies that include tailored CSR framework and programs to business characteristics, potential business impacts, and the community needs around the Company's working area.

KERANGKA KERJA PROGRAM TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN

Dalam menyusun program kerja TJSL yang komprehensif, Perusahaan mengadopsi kerangka kerja ISO 26000 yang menjadi standar global dalam pelaksanaan TJSL. Kerangka kerja ISO 26000 memberikan garis besar tentang prinsip dan area inti yang harus dikelola oleh Perusahaan, untuk memastikan Perusahaan dapat mengidentifikasi dan mengontrol risiko tanggung jawab sosial tertentu dan dampaknya. Sehingga dalam praktiknya, Perusahaan dapat memastikan area-area TJSL yang harus dikelola dan memiliki relevansi dengan kegiatan Perusahaan sehingga Perusahaan dapat berkontribusi dalam pencapaian tujuan Pembangunan berkelanjutan.

PROGRAM FRAMEWORK OF SOCIAL AND ENVIRONMENTAL RESPONSIBILITY

In preparing a comprehensive CSR work program, the Company adopts the ISO 26000 framework, a global standard for CSR implementation. The ISO 26000 framework outlines principles and core areas that the Company must manage to ensure identification and risks control of specific social responsibility and their impacts. Thus, the Company is able to ascertain on CSR areas relevant to the Company's activities that need to be managed so that the Company can achieve sustainable development goals.

Kerangka Kerja ISO 26000 Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan *ISO 26000 Framework for Social and Environmental Responsibility*



Sesuai dengan kerangka kerja tersebut, terdapat 7 subjek tanggung jawab sosial yang menjadi area pengelolaan TJSL Perusahaan yang meliputi tata kelola organisasi, hak asasi manusia, praktik ketenagakerjaan, lingkungan, operasi yang adil, isu pelanggan, serta pelibatan dan pengembangan komunitas masyarakat. subjek TJSL tersebut selanjutnya menjadi dasar bagi perusahaan dalam menyusun pilar TJSL yang menjadi acuan dalam penyusunan program kerja TJSL.

As shown in the framework, there are 7 subjects of social responsibility that becomes the scope of Company's CSR management. The subjects include organization governance, human rights, labour practices, the environment, fair operating practices, consumer issues, and community involvement and development. The CSR subjects serve as the basis for the company to prepare the CSR pillars, which will become points of reference in formulating the CSR work program.

PILAR PROGRAM TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN

Penyusunan pilar TJSL mengacu pada 7 subjek dalam ISO 26000 tentang TJSL dan Peraturan Menteri BUMN No. PER 1/MBU/03/2023 tentang Penugasan Khusus dan Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan BUMN. Berdasarkan acuan tersebut, Perusahaan memformulasikan 4 (empat) pilar TJSL yang mencakup keseluruhan aspek dan subjek yang tercantum dalam ISO 26000 maupun Peraturan Menteri BUMN. Keempat pilar TJSL Perusahaan meliputi:

PILLARS OF THE SOCIAL AND ENVIRONMENTAL RESPONSIBILITY PROGRAM

The formulation of the CSR pillars refers to the 7 subjects in ISO 26000 concerning CSR and Regulation of Minister of SOEs No. PER 1/MBU/03/2023 concerning Special Assignments and Social and Environmental Responsibility Programs for SOEs. Based on these references, the Company formulated 4 (four) pillars of CSR which cover all aspects and subjects listed in ISO 26000 and in Ministerial Regulation. The four pillars of the Company's CSR are:

Sosial <i>Social</i>	Untuk tercapainya pemenuhan hak dasar manusia yang berkualitas secara adil dan setara untuk meningkatkan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat di Indonesia. The fulfillment of quality basic human rights in fair and equal manner to improve welfare for all Indonesian people.
Lingkungan <i>Environment</i>	Untuk pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan yang berkelanjutan sebagai penyangga seluruh kehidupan. For sustainable natural resources and environmental management to support all lives.
Ekonomi <i>Economy</i>	Untuk tercapainya pertumbuhan ekonomi berkualitas melalui keberlanjutan peluang kerja dan usaha, inovasi, industri inklusif, infrastruktur memadai, energi bersih yang terjangkau dan didukung kemitraan. To achieve quality economic growth through sustainable employment and business opportunities, innovation, inclusive industry, adequate infrastructure, affordable clean energy and supported by partnerships.
Hukum dan Tata Kelola <i>Law and Governance</i>	Untuk terwujudnya kepastian hukum dan tata kelola yang efektif, transparan, akuntabel dan partisipatif untuk menciptakan stabilitas keamanan dan mencapai negara yang berdasarkan hukum. To create legal certainty and effective, transparent, accountable and participatory governance in order to create secured stability and achieve a lawful state.

Berdasarkan keempat pilar TJSL, Perusahaan kemudian menyusun program kerja yang relevan dengan setiap pilar TJSL. Proses penyusunan program tidak hanya melibatkan pihak internal, namun juga melibatkan pihak eksternal melalui *social mapping* untuk memastikan relevansi program dengan isu yang terjadi di masing-masing pemangku kepentingan dan di wilayah kerja yang memiliki karakteristik sosial maupun geografis yang beragam. Hasil dari *social mapping* kemudian disusun menjadi program kerja TJSL termasuk penyusunan anggarannya yang selanjutnya ditetapkan dalam RKAP.

RELEVANSI PROGRAM TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN DENGAN SDGS

Pemerintah mendorong seluruh BUMN untuk berkontribusi dalam pencapaian SDGs. Dalam merespon hal tersebut, Perusahaan berkomitmen untuk mendukung upaya tersebut sejalan dengan peran BUMN sebagai *agent of development* yang diharapkan dapat mendorong pembangunan di seluruh aspek keberlanjutan. Dalam menjalankan program TJSL, Perusahaan memetakan pilar TJSL dan relevansinya dengan SDGs sehingga dapat dipastikan bahwa program TJSL yang dilaksanakan sejalan dengan sasaran SDGs.

Based on the four CSR pillars, the Company prepared work programs that were relevant to respective CSR pillar. The program preparation process involved internal and external parties by tapping into social mapping to ensure program relevance to issues occurring to each stakeholder and in work areas with diverse social and geographical characteristics. The results from social mapping are compiled into a CSR work program, including drafted budget which is inputted in the WPB.

RELEVANCY OF SOCIAL AND ENVIRONMENTAL RESPONSIBILITY PROGRAMS TO THE SDGS

The government encourages all SOEs to contribute to achieving the SDGs. Responding to this, the Company, assumed its role of SOEs as an agent of development, remained committed to support efforts to encourage development in all aspects of sustainability. In implementing the CSR program, the Company mapped the CSR pillars and their relevancy to the SDGs to assured that the CSR program implemented was in line with the SDGs targets.

Relevansi Pilar TJSL dengan SDGs *Relevancy of the CSR Pillars to the SDGs*



PROGRAM TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN TAHUN 2023

Berdasarkan ketentuan yang tertuang dalam Peraturan Menteri BUMN No. PER-1/MBU/03/2023 mengenai Penugasan Khusus dan Program TJSL BUMN, serta sesuai dengan peraturan internal yang ditetapkan, Perusahaan telah mengalokasikan dana untuk pelaksanaan program TJSL tahun 2023. Anggaran ini disepakati dan ditetapkan dalam RKAP Tahun 2023, mencerminkan komitmen perusahaan untuk melaksanakan inisiatif sosial dan lingkungan sebagai bagian integral dari operasional dan tanggung jawab korporatnya. Berikut rincian anggaran program TJSL tahun 2023 yang telah ditetapkan oleh Perusahaan dan dibagi ke dalam empat pilar:

2023 PROGRAM FOR SOCIAL AND ENVIRONMENTAL RESPONSIBILITY

Based on the provisions in the Regulation of Minister of SOEs No. PER-1/MBU/03/2023 concerning Special Assignments and the CSR Program in the SOEs, as well as in accordance with established internal regulations, the Company had allocated funds for implementing the CSR program in 2023. The budget was agreed and stipulated in the 2023 WPB, reflecting the company's commitment to implement social and environmental initiatives as an integral part of its operations and corporate responsibilities. The following shows details of the 2023 CSR program budget that was set by the Company and was divided into four pillars:

No	Pilar Pillars	Target RKAP 2023 (Rp) 2023 WPB Target (Rp)
1	Sosial Social	3.635.000.000
2	Ekonomi Economy	1.825.000.000
3	Lingkungan Environment	3.275.000.000
4	Hukum dan Tata Kelola Law and Governance	25.000.000
TOTAL		8.760.000.000

PENCAPAIAN PROGRAM TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN TAHUN 2023

Sepanjang tahun 2023, Perusahaan telah merealisasikan anggaran program TJSL sebesar Rp8,58 miliar pada empat pilar program TJSL yang dilakukan di seluruh wilayah kerja Perusahaan. Realisasi tersebut mencapai 97,96% dari target RKAP 2023 dan lebih tinggi dibandingkan dengan realisasi anggaran TJSL tahun 2022 yang mencapai Rp6,56 miliar. Peningkatan ini didorong oleh perencanaan program TJSL yang lebih terarah serta penguatan komitmen Perusahaan terhadap pelaksanaan program TJSL.

ACHIEVEMENT OF THE SOCIAL AND ENVIRONMENTAL RESPONSIBILITY PROGRAM IN 2023

Throughout 2023, the Company had disbursed CSR budget of Rp8.58 billion onto four pillars of the CSR program carried out throughout all of the Company's work areas. The realized program was 97.96% of the 2023 WPB target and was higher than the 2022 realized CSR funds at Rp6.56 billion. This increase was the result of better targeted program planning and stronger Company commitment to implementing the CSR program.

Tabel Perbandingan Target dan Realisasi Anggaran TJSL 2023 (Rupiah)
Comparison Table of 2023 CSR Budget Target and Realization (Rupiah)

No	Pilar Pillars	Target RKAP 2023 2023 WPB Target	Realisasi 2023 2023 Realization	Pencapaian (%) Achievement (%)
1	Sosial <i>Social</i>	3.635.000.000	2.237.488.400	61,55%
2	Ekonomi <i>Economy</i>	1.825.000.000	1.983.372.317	108,68%
3	Lingkungan <i>Environment</i>	3.275.000.000	4.360.267.886	133,14%
4	Hukum dan Tata Kelola <i>Law and Governance</i>	25.000.000	-	0,00%
TOTAL		8.760.000.000	8.581.128.603	97,96%

Pada tahun 2023, Perusahaan memfokuskan pelaksanaan program TJSL pada pilar lingkungan dengan catatan realisasi anggaran pilar lingkungan menjadi yang terbesar yaitu sebesar Rp4,36 miliar dengan capaian terhadap RKAP mencapai 133,14%. Hal ini sejalan dengan komitmen Perusahaan dalam merespon isu lingkungan yang kian meningkat, sehingga Perusahaan berupaya berperan secara optimal dalam menjaga kelestarian lingkungan.

In 2023, the Company focused on the implementation of the environmental pillar of CSR program, as it recorded largest budget realization at Rp4.36 billion, or 133.14% of the target set in WPB. This was in line with the Company's commitment to greater responsiveness on environmental issues, leading the Company to put more effort to optimally preserving the environment.

MEMBANGUN BUDAYA KEBERLANJUTAN

Salah satu upaya dalam mendorong implementasi aspek keberlanjutan di Perusahaan yaitu, dengan membangun budaya keberlanjutan bagi seluruh karyawan di Perusahaan. Upaya ini dilakukan melalui program budaya maupun penerapan kebijakan yang terdiri dari *risk culture & awareness*, *anti-fraud campaign*, *safety culture & awareness*, sosialisasi sistem manajemen anti penyuapan, dan budaya hemat energi untuk menunjang aspek lingkungan.

Penanggung jawab budaya keberlanjutan berada pada masing-masing divisi yang terkait dengan aspek-aspek keberlanjutan yang dalam pelaksanaannya berkoordinasi dengan *Corporate Secretary* yang membawahi Unit Kerja Komunikasi Perusahaan untuk menunjang proses sosialisasi dan internalisasi budaya yang terarah.

BUILDING A CULTURE OF SUSTAINABILITY

One of the efforts to motivate the implementation of sustainability aspects in the Company is by building a culture of sustainability among all Company's employees. The effort is carried out through cultural programs and policies implementation consisting of *risk culture & awareness*, *anti-fraud campaign*, *safety culture & awareness*, socialization of anti-bribery management systems, and energy saving culture to support environmental aspects.

The executives responsible for sustainability culture are appointed from each division that closely related to aspects of sustainability. Their duties implementation are coordinated with the Corporate Secretary, who oversees the Corporate Communications Work Unit, to support the manner of guided socialization and culture internalization.

TANGGUNG JAWAB SOSIAL ASPEK HAK ASASI MANUSIA

SOCIAL RESPONSIBILITY ASPECTS OF HUMAN RIGHTS

Mengacu pada pedoman ISO 26000 tentang Tanggung Jawab Sosial, HAM mencakup beberapa aspek kritis, termasuk non-diskriminasi dan perhatian terhadap kelompok rentan; menghindari kerumitan; hak-hak sipil dan politik; hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya; serta hak-hak dasar pekerja. Perusahaan telah secara penuh melaksanakan cakupan definitif ini, baik dalam kegiatan operasional yang melibatkan karyawan, pelanggan, dan mitra, maupun dalam keterlibatan dengan masyarakat di wilayah sekitar pelabuhan.

Dalam konteks ini, Perusahaan menjadikan HAM sebagai dasar yang mendasari hubungan dengan setiap individu yang terlibat atau terkena dampak langsung atau tidak langsung dari kegiatan operasional dan usaha yang dilakukan. Ini mencakup kebijakan dan praktik yang mempromosikan non-diskriminasi, perlindungan kelompok rentan, penghindaran kerumitan, dan penghormatan terhadap hak-hak dasar pekerja. Hal ini tercermin dalam berbagai aspek aktivitas perusahaan, baik itu melibatkan internal (karyawan) maupun eksternal (pelanggan, mitra, dan masyarakat). Pendekatan ini tidak hanya sejalan dengan standar ISO 26000, tetapi juga mencerminkan komitmen Perusahaan untuk menjunjung tinggi nilai-nilai HAM dalam seluruh dimensi operasionalnya.

KOMITMEN DAN KEBIJAKAN

PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) memiliki komitmen yang tinggi dan kuat untuk mewujudkan dan melindungi HAM dari setiap individu yang terlibat. Komitmen tersebut dituangkan melalui berbagai kebijakan terutama terkait dengan pengelolaan SDM dan hubungan industrial yang menegaskan komitmen Perusahaan terkait HAM. Selain itu, Perusahaan juga memastikan bahwa setiap individu menerima kesempatan

Referring to the ISO 26000 guidelines on Social Responsibility, human rights cover several critical aspects, including non-discrimination and better attention to vulnerable groups; avoidance of complications; civil and political rights; economic, social and cultural rights; as well as workers' basic rights. The Company has fully implemented the defined scopes, both in operational activities involving employees, customers and partners, as well as in community engagement in the area around the port.

In this context, the Company places human rights as the basis for every direct or indirect relationship with individuals affected by operational and business activities. This includes policies and practices that promote non-discrimination, protection of vulnerable groups, avoidance of complexity, and respect for workers' basic rights. It is reflected in various aspects of the company's activities involving internal party (employees) and external parties (customers, partners and the community). The approach aligns with the ISO 26000 standard, and reflects the Company's commitment to uphold human rights in all operational dimensions.

COMMITMENTS AND POLICIES

PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) commits strongly to fulfil and protect human rights for every individual. This commitment is expressed through various policies, especially policies on HR management and industrial relations, which emphasize the Company's commitment to human rights. Moreover, the Company ensures that every individual receives equal opportunities to training, education and competency. The Company

yang sama dalam pelatihan, pendidikan, dan kompetensi. Perusahaan pun bertekad untuk memperkuat hubungan industri dan menghargai HAM serta kewajibannya sesuai dengan peraturan dan kebijakan yang berlaku.

Perusahaan telah memiliki kebijakan terkait tanggung jawab terhadap HAM yang berpedoman pada peraturan dan kebijakan terkait HAM, baik nasional maupun internasional yang berlaku. Kebijakan tersebut secara garis besar memuat isu HAM di Perusahaan di seluruh lini bisnis perusahaan dan pemangku kepentingan, yaitu kesetaraan dan kesempatan kerja, pekerja di bawah umur, pekerja paksa, kebebasan berserikat dan berkumpul, dan waktu kerja.

PELAKSANAAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL ASPEK HAK ASASI MANUSIA

Kesetaraan dan Kesempatan Kerja

PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) memastikan kesetaraan peluang kerja bagi setiap individu untuk berkarier, mengembangkan diri, dan memberikan kontribusi dalam membangun organisasi tanpa membedakan jenis kelamin, usia, suku, agama, ras, golongan, dan faktor keberagaman lainnya. Seluruh proses manajemen sumber daya manusia dimulai dari rekrutmen hingga pemenuhan remunerasi/kesejahteraan dan hak-hak karyawan lainnya, harus memprioritaskan prinsip kesetaraan dan kesempatan yang sama bagi semua karyawan. Pengangkatan calon karyawan didasari oleh hasil seleksi, hasil evaluasi selama masa percobaan dan orientasi karyawan secara objektif dan transparan.

Hingga 31 Desember 2023, Perusahaan memiliki 4.738 karyawan yang tersebar di seluruh wilayah operasional Perusahaan. Karyawan di Perusahaan terbagi ke dalam karyawan darat dan karyawan laut yang komposisinya dapat dilihat pada tabel berikut ini:

is determined to strengthen industrial relations and respect human rights along with its obligations according to applicable regulations and policies.

The Company has set down policies for commitment on human rights as guided by applicable national and international regulations and policies of the same subject. In general, the policy contains human rights issues across all Company's business lines and stakeholders, which are equality and employment opportunities, child workers, forced labor, freedom of association and assembly, and working time.

IMPLEMENTATION OF SOCIAL RESPONSIBILITY IN ASPECTS OF HUMAN RIGHTS

Equality and Employment Opportunities

PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) ensures equal employment opportunities for all individuals to build careers, develop themselves, and contribute to building the organization without discriminating gender, age, ethnicity, religion, race, class and other diversity factors. The process of human resource management, from recruitment to providing remuneration and other employee rights, must prioritize the principles of equality and equal opportunities for all employees. Prospective employees are appointed based on selection results, evaluation results during the trial period and employee orientation in an objective and transparent manner.

As of 31 December 2023, the Company employed 4,738 people spread throughout the Company's operational areas. Employees are categorized into ashore employees and marine employees, which composition can be seen in the following table:

Jenis Karyawan Employee Type	Laki-Laki Male	Perempuan Female	Total
Darat Ashore	1.326	345	1.671
Laut Marine	3.063	4	3.067
Total	4.389	349	4.738

Perusahaan memastikan bahwa proporsi karyawan laki-laki yang lebih banyak disebabkan oleh dominasi jumlah pelamar laki-laki yang melamar di Perusahaan. Dalam upaya menciptakan kesetaraan dan menghormati prinsip-prinsip inklusivitas, Perusahaan dengan seksama mengelola proses penerimaan tenaga kerja untuk memberikan peluang yang setara bagi semua individu, tanpa memandang jenis kelamin. Selain itu, Perusahaan pun menekankan kebijakan remunerasi dan manfaat yang sama untuk semua karyawan, tanpa adanya perbedaan antara karyawan laki-laki dan perempuan. Pendekatan ini mencerminkan komitmen Perusahaan untuk menciptakan lingkungan kerja yang adil dan aman bagi seluruh karyawan yang mendorong pertumbuhan karier tanpa memandang gender, serta memberikan penghargaan yang setara atas kontribusi yang diberikan oleh setiap karyawan, baik laki-laki maupun perempuan.

Sepanjang tahun 2023, Perusahaan juga tidak mendapatkan laporan maupun temuan terkait tindakan diskriminasi terhadap suku, ras, jenis kelamin, agama, opini politik, latar belakang sosial, atau bentuk diskriminasi lainnya yang melibatkan pihak-pihak terkait, baik internal maupun eksternal, di seluruh operasional Perusahaan. Perusahaan juga memberikan dukungan terhadap partisipasi pekerja perempuan sesuai dengan ketentuan dalam Keputusan Direksi PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) No. KD.229/PA-207/ASDP-2023 tentang Cuti dan Izin Meninggalkan Pekerjaan Karyawan di Lingkungan PT ASDP Indonesia Ferry (Persero), yang mengatur mengenai cuti haid, cuti melahirkan, dan cuti keguguran kandungan.

Pemenuhan Ketentuan Terkait Tenaga Kerja Anak dan Tenaga Kerja Paksa

Sesuai dengan regulasi ketenagakerjaan yang berlaku, Perusahaan tunduk pada larangan mempekerjakan anak-anak dan melibatkan tenaga kerja paksa. Sejalan dengan prinsip-prinsip ini, Perusahaan mengambil komitmen tegas untuk tidak melibatkan individu di bawah usia yang diizinkan dan menghindari segala bentuk tenaga kerja paksa. Komitmen ini mencerminkan komitmen kuat Perusahaan untuk menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia

The Company verified that the greater proportion of male employees resulted from predominantly male applicants applying to the Company. In efforts to create equality and respect the principles of inclusivity, the Company is conscientiously overlooking and managing the recruitment process to provide equal opportunities for all individuals, regardless of gender. Moreover, the Company also emphasized the equal remuneration and benefits policy for all employees, without discriminating male and female employees. This approach reflected the Company's commitment to create a fair and safe work environment to boost employees career growth regardless of gender as well as being equally appreciative for the contributions made by employees, men or women.

Throughout 2023, the Company did not receive any reports or findings related to discriminatory acts against ethnicity, race, gender, religion, political opinion, social background, or other forms of discrimination involving internal and external parties, throughout all Company's operations. The Company also supports female workers to partake menstrual leave, maternity leave, and miscarriage leave, under the provisions in the Decree of the Board of Directors of PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) No. KD.229/PA-207/ASDP-2023 concerning Leave and Permission to Leave Work for Employees of PT ASDP Indonesia Ferry (Persero).

Fulfillment of Provisions Related to Child Labor and Forced Labor

In accordance with applicable labor regulations, the Company is subjected to the prohibition on employing children and engaging in forced labor. In line with these principles, the Company firmly commits to disengage employees under the permitted age and to avoid all forms of forced labor. This commitment reflects the Company's strong commitment to uphold human rights and fully comply with laws and regulations

(HAM) dan mematuhi sepenuhnya regulasi serta peraturan terkait ketenagakerjaan dan HAM. Perusahaan terus berkomitmen untuk menjadi pelopor dalam perlindungan HAM, mengawasi kepatuhan terhadap regulasi, dan menciptakan budaya kerja yang mendukung kesejahteraan dan penghormatan terhadap hak-hak individu di seluruh lapisan masyarakat.

Kebebasan Berserikat dan Berkumpul

Setiap karyawan di Perusahaan memiliki hak yang sah untuk berserikat, berkumpul, dan menyampaikan pendapat mereka. Bentuk nyata implementasi dapat dilihat pada dukungan dan dorongan yang diberikan oleh Perusahaan terhadap inisiatif para karyawan untuk membentuk organisasi Serikat Pekerja (SP) sebagai wadah untuk berekspresi bersama dan ruang aman untuk mengutarakan pendapatnya. Keberadaan serikat pekerja dianggap sebagai saluran yang sangat penting untuk memfasilitasi penyelesaian permasalahan antara karyawan dan manajemen, memungkinkan karyawan dengan lebih mudah menyampaikan masalah yang dihadapi di lapangan, sementara manajemen dapat memberikan respon yang memadai terhadap aspirasi karyawan. Dengan terbentuknya wadah ini, diharapkan terjalin komunikasi yang baik antara karyawan dan Perusahaan, memperkuat kerja sama dan keterlibatan aktif dalam proses pengambilan keputusan organisasi.

Status karyawan di Perusahaan hingga saat ini adalah karyawan PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) sebagaimana tercantum dalam Perjanjian Kerja Bersama (PKB) antara Perusahaan dan Serikat Pekerja PT ASDP Indonesia Ferry (Persero). Dengan adanya Serikat Pekerja ini, karyawan memiliki jalur formal untuk menyampaikan aspirasi mereka sebagai anggota organisasi pekerja yang secara resmi diwadahi oleh Perusahaan.

Perusahaan telah mengambil tindakan konkret dalam mendukung kegiatan Serikat Pekerja dengan mengembangkan hubungan industrial yang kondusif. Pendekatan ini diwujudkan dengan memberikan kesempatan kepada perwakilan karyawan untuk menyampaikan aspirasinya yang dicantumkan melalui PKB 2023-2025 yang secara berkala disusun ulang, ditinjau, dan ditandatangani oleh pihak manajemen Perusahaan dan Serikat Pekerja.

on employment and human rights. The Company continues to be committed to being a pioneer in protecting human rights, monitoring compliance with regulations, and creating a work culture that supports welfare and respect for individual rights at all levels of society.

Freedom of Association and Assembly

Every employee in the Company has the legal rights to associate, gather, and express their opinions. The implementation materialised in the Company's support for the employees' initiative to form a Workers Union (SP) as a forum for collective expression and a safe space to express their opinions. The Workers Union is viewed as an important channel to facilitate issues resolution between employees and management, allowing employees to easily convey issues encountered in the field, while management can provide adequate responses to employee aspirations. It is expected that this forum would help to establish good communication between employees and the Company, strengthen cooperation and active involvement in the organizational decision-making process.

The employees status working at the Company to date is employees of PT ASDP Indonesia Ferry (Persero), as stated in the Collective Work Agreement between the Company and the Workers Union of PT ASDP Indonesia Ferry (Persero). Within the organization, employees have a validated channel to convey their aspirations as members of a workers' organization officially recognized by the Company.

The Company has taken concrete actions to support Workers Union's activities by building conducive industrial relations. This action transpired by presenting opportunities to employee representatives to convey their aspirations, which were then included in the 2023-2025 Collective Work Agreement as it was periodically drafted, reviewed and signed by the Company's management and the Workers' Union.

Waktu Kerja

Waktu kerja diartikan sebagai waktu karyawan melakukan pekerjaan di tempat bekerja yang ditentukan oleh Perusahaan yang dilaksanakan pada pagi, siang, dan/atau malam hari. Perusahaan telah memiliki kebijakan terkait waktu kerja pegawai sesuai dengan kebijakan dan peraturan yang berlaku, serta ketentuan International Labor Organization (ILO). Waktu kerja di Perusahaan diatur dan dituangkan dalam Perjanjian Kerja Bersama 2023-2025 PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) dan Surat Edaran No. SE.1691/OP.005/ASDP-2022 tentang Instruksi Cuti Nakhoda & KKM/Masinis I Serta Pembagian Tugas Jaga dan Rest Hour Sesuai MLC 2006. Waktu kerja dibedakan menjadi waktu kerja karyawan administrasi dan operasional, dengan ketentuan sebagai berikut:

Working Hours

Working Hours is defined as the hours employees carry out work at the workplace determined by the Company, whether in the morning, afternoon, and/or evening. The Company has a policy regarding employee working time that complied with applicable policies and regulations as well as the provisions of the International Labor Organization (ILO). Working hours at the Company are regulated and outlined in the 2023-2025 Collective Work Agreement of PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) and Circular Letter No. SE.1691/OP.005/ASDP-2022 on Instructions on Leave for Captain & Chief/Machinists I and the Distribution of Guard Duties and Rest Hours in Accordance with MLC 2006. Working time is categorized into administrative and operational employees, with the following provisions:

Kategori Karyawan Employee Category	Waktu Kerja Working Time	Total Jam Kerja per Minggu Total Working Hours per Week
Karyawan administrasi (non-shift) Administrative employees (non-shift)	5 (lima) hari kerja dalam 1 (satu) minggu dengan ketentuan waktu kerja 8 (delapan) jam 1 (satu) hari. 5 (five) working days in 1 (one) week, with 8 (eight) hours of working time in 1 (one) day.	40 jam/minggu 40 hours/week
Karyawan operasional (shift) Operational employees (shift)	5 (lima) hari kerja dalam 1 (satu) minggu dengan ketentuan waktu kerja 8 (delapan) jam 1 (satu) hari. 5 (five) working days in 1 (one) week, with 8 (eight) hours of working time in 1 (one) day. - Pengaturan pembagian waktu kerja disesuaikan dengan kebutuhan operasional. Arrangements of work time distribution are adjusted to operational needs.	40 jam/minggu 40 hours/week
Karyawan laut Marine employees	- Waktu kerja dan istirahat menyesuaikan jadwal operasional kapal. Work and rest times are adjusted to the ship's operational schedule. - Jam istirahat minimal 10 (sepuluh) jam dalam periode 24 (dua puluh empat) jam dan dapat dibagi dua, dengan ketentuan salah satunya tidak boleh <6 (enam) jam. Minimum rest hours are 10 (ten) hours in a 24 (twenty four) hour period and can be divided into two, provided that one of them cannot be <6 (six) hours. - Interval waktu istirahat tidak boleh melebihi 14 (empat belas) jam. Rest intervals must not exceed 14 (fourteen) hours.	+/- 84 jam/minggu +/- 84 hours/week

Catatan: Tidak terdapat aturan baku terhadap perhitungan total jam kerja karyawan laut (bersifat dinamis), perhitungan jam kerja karyawan laut dilakukan berdasarkan perhitungan gross working hour.

Note: There is no standard rules to calculate total working hours for marine employees (dynamic), marine employees working hours is calculated as gross working hour.

Perusahaan menetapkan hari libur pada hari Sabtu dan Minggu, serta libur resmi yang sudah ditetapkan oleh pemerintah dan/atau Perusahaan. Untuk karyawan operasional, diberlakukan jam kerja *shift* dengan pengaturan jam kerja dan waktu libur ditentukan berdasarkan waktu pelayanan kapal di setiap Kantor Cabang dengan mempertimbangkan operasional Perusahaan.

Perusahaan pun menyediakan berbagai macam jenis hak cuti bagi para karyawan, yang diberikan sesuai dengan kondisi dan kebutuhan masing-masing individu. Penyediaan hak cuti ini memiliki tujuan untuk memberikan waktu istirahat setelah bekerja selama periode tertentu dengan harapan dapat meningkatkan produktivitas para karyawan ketika kembali ke lingkungan kerja. Hak cuti karyawan tertuang dalam Keputusan Direksi PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) No. KD.229/PA-207/ASDP-2023 tentang Cuti dan Izin Meninggalkan Pekerjaan Karyawan di Lingkungan PT ASDP Indonesia Ferry (Persero). Beberapa jenis hak cuti yang diberikan oleh Perusahaan antara lain berupa cuti tahunan, cuti awak kapal, cuti besar, cuti haid, cuti melahirkan, cuti keguguran kandungan, cuti sakit, dan cuti di luar tanggungan Perusahaan.

Selain hak cuti, Perusahaan memberikan izin bagi karyawannya untuk meninggalkan pekerjaan dengan alasan-alasan tertentu dengan jumlah hari izin tertentu seperti izin menikah, izin menikahkan anak, izin mengkhitan anak, izin membaptis anak, dan izin lainnya yang berkaitan dengan kepentingan dan hubungan keluarga karyawan dengan batasan jumlah hari yang ditetapkan.

Perusahaan juga mengatur terkait waktu kerja lembur, di mana waktu ini adalah waktu yang dipergunakan karyawan untuk menyelesaikan pekerjaan melebihi waktu kerja. Waktu kerja lembur dituangkan dalam Keputusan Direksi PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) No. KD.361/HK.002/ASDP-2023 tentang Perubahan Keputusan Direksi PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) No. KD.140/HK.002/ASDP-2022 tentang Waktu Kerja, Waktu Istirahat, Waktu Kerja Lembur, dan Perhitungan Upah Kerja Lembur di Lingkungan PT ASDP Indonesia Ferry (Persero).

The Company sets non-working days on Saturdays and Sundays, as well as on official holidays set by the government and/or the Company. For operational employees, work shift is applied with working hours and holiday set around vessel service times at each Branch Office relating to the Company's operations.

The Company also provides various types of leave for employees, which are given according to the conditions and needs of each individual. Employee leave of absence aims to provide rest time after working for a certain period with the expectation of increased employee productivity when they return to the work environment. Employees' rights to take leave are stated in the Decree of the Board of Directors of PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) No. KD.229/PA-207/ASDP-2023 concerning Leave and Permission to Leave Work for Employees in PT ASDP Indonesia Ferry (Persero). Several types of leave rights provided by the Company include annual leave, ship crew leave, long leave, menstrual leave, maternity leave, miscarriage leave, sick leave, and leave outside the Company's coverage.

Apart from the rights to leave, the Company gives permission for employees to leave work for certain reasons for a limited number of days, such as permission in event of marriage, permission to hand their children into marriage, permission in event of children circumcision, permission in event of children getting baptized, and other permissions related to the employees interests and family relationships.

The Company also regulates overtime work, defined as time used by employees to complete work beyond working time. Overtime work is stated in the Decree of the Board of Directors of PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) No. KD.361/HK.002/ASDP-2023 concerning Changes to the Decree of the Directors of PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) No. KD.140/HK.002/ASDP-2022 concerning Working Time, Rest Time, Overtime Working Time, and Calculation of Overtime Wages in PT ASDP Indonesia Ferry (Persero).

DAMPAK PROGRAM TANGGUNG JAWAB SOSIAL ASPEK HAK ASASI MANUSIA TERHADAP KEBERLANJUTAN PERUSAHAAN

Sepanjang tahun 2023, Perusahaan tidak mendapatkan pelaporan maupun keluhan dari seluruh pemangku kepentingan terkait pelanggaran HAM yang dilakukan oleh Perusahaan dan/atau karyawan Perusahaan. Perusahaan memahami pentingnya menerapkan pengembangan usaha dengan mengutamakan prinsip operasi yang adil, dan sebagai bentuk komitmennya untuk tunduk dan taat pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Komitmen tersebut berdampak pada terbangunnya hubungan baik antara organisasi dan lembaga pemerintah, serta antara organisasi dengan berbagai mitra seperti pemasok, kontraktor, pelanggan, pesaing, dan asosiasi di mana mereka berkegiatan maupun dengan karyawan secara langsung. Hubungan baik tersebut menjadi salah satu poin penting yang menunjang keberlanjutan Perusahaan di masa depan.

IMPACT OF SOCIAL RESPONSIBILITY PROGRAM IN ASPECTS OF HUMAN RIGHTS ON COMPANY SUSTAINABILITY

Throughout 2023, the Company received no reports or complaints from any stakeholders regarding human rights violations committed by the Company and/or Company employees. The Company understands the importance of developing business by emphasizing fair operating principles, and thus it commits to comply with applicable laws and regulations. This commitment has impacted the forming of good relationships with government institutions, as well as with various partners such as suppliers, contractors, customers, competitors, and associations where they operate and with employees directly. The good relationship is one of the important points that supports the Company's sustainability in the future.



TANGGUNG JAWAB SOSIAL ASPEK KETENAGAKERJAAN, KESEHATAN DAN KESELAMATAN KERJA

SOCIAL RESPONSIBILITY ASPECTS OF EMPLOYMENT, OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY

Perusahaan memiliki komitmen yang tinggi dalam memastikan pengelolaan ketenagakerjaan yang adil dan transparan, serta memastikan kesehatan, dan keselamatan kerja dari seluruh karyawan Perusahaan. Perusahaan selalu menaati peraturan dan kebijakan yang mengatur terkait Ketenagakerjaan, Kesehatan, dan Keselamatan Kerja di Indonesia, serta menjadikan peraturan dan kebijakan tersebut sebagai landasan dalam menyusun peraturan dan kebijakan internal, serta program kerja terkait Ketenagakerjaan, Kesehatan, dan Keselamatan Kerja di Perusahaan.

KOMITMEN DAN KEBIJAKAN

Pemahaman mendalam Perusahaan terhadap keterkaitan era antara hubungan industrial dan karyawan di Perusahaan mendorong Perusahaan untuk bertekad dan berkomitmen dalam menyediakan tempat kerja yang aman dan nyaman bagi karyawan, serta menjadi tempat kerja idaman bagi karyawan. Implementasi Perusahaan terkait Tanggung Jawab Sosial aspek Ketenagakerjaan, Kesehatan, dan Keselamatan Kerja mengacu pada Undang-Undang No. 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja, Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, dan Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. 5 Tahun 1996 tentang Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja. Perusahaan menetapkan kebijakan aspek Ketenagakerjaan, Kesehatan, dan Keselamatan Kerja, yaitu:

The Company is highly committed to ensure fair and transparent employment management and occupational health, and safety of all Company employees. The Company always complies with the regulations, and policies governing Employment, Occupational Health and Safety in Indonesia, and used it to formulate internal regulations and policies as well as work programs related to same topic in the Company.

COMMITMENTS AND POLICIES

The Company's in-depth understanding of the relationship between industrial relations and employees encourages the Company to be determined and committed to providing a safe and positive workplace for employees as well as becoming an ideal workplace for employees. The Company's implementation of Social Responsibility aspects of Employment, Occupational Health and Safety refers to Law No. 1/1970 concerning Work Safety, Law No. 6/2023 concerning Stipulation of Government Regulations in Lieu of Law No. 2 of 2022 concerning Job Creation Becoming Law, and Minister of Manpower Regulation No. 5/1996 concerning Occupational Safety and Health Management Systems. The Company established policies regarding Employment, Occupational Health, and Safety aspects, which include:

1. Perjanjian Kerja Bersama 2023-2025 PT ASDP Indonesia Ferry (Persero); 2. Keputusan Direksi PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) No. KD.20/PA.203/ASDP-2018 tentang Jaminan Pemeliharaan Kesehatan di Lingkungan PT ASDP Indonesia Ferry (Persero); 3. Keputusan Direksi PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) No. KD.37/PA.001/ASDP-2015 tentang Pedoman Pengadaan Karyawan di Lingkungan PT ASDP Indonesia Ferry (Persero); 4. Keputusan Direksi PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) No. KD.36/PA.002/ASDP-2015 tentang Program Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) Karyawan di Lingkungan PT ASDP Indonesia Ferry (Persero); 5. Keputusan Direksi PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) No. KD.95/PA.002/ASDP-2023 tentang Pendidikan Lanjutan Karyawan di Lingkungan PT ASDP Indonesia Ferry (Persero); 6. Keputusan Direksi PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) No. KD.229/PA-207/ASDP-2023 tentang Cuti dan Izin Meninggalkan Pekerjaan Karyawan di Lingkungan PT ASDP Indonesia Ferry (Persero); 7. Keputusan Direksi PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) No. KD.361/HK.002/ASDP-2023 tentang Perubahan Keputusan Direksi PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) No. KD.140/HK.002/ASDP-2022 tentang Waktu Kerja, Waktu Istirahat, Waktu Kerja Lembur dan Perhitungan Upah Kerja Lembur di Lingkungan PT ASDP Indonesia Ferry (Persero).	1. Collective Work Agreement 2023-2025 PT ASDP Indonesia Ferry (Persero); 2. Decree of the Board of Directors of PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) No. KD.20/PA.203/ASDP-2018 concerning Health Insurance in PT ASDP Indonesia Ferry (Persero); 3. Decree of the Board of Directors of PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) No. KD.37/PA.001/ASDP-2015 concerning Guidelines for Employee Recruitment in PT ASDP Indonesia Ferry (Persero); 4. Decree of the Board of Directors of PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) No. KD.36/PA.002/ASDP-2015 concerning Employee Education and Training Programs in PT ASDP Indonesia Ferry (Persero); 5. Decree of the Board of Directors of PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) No. KD.95/PA.002/ASDP-2023 concerning Employee Continuing Education in PT ASDP Indonesia Ferry (Persero); 6. Decree of the Board of Directors of PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) No. KD.229/PA-207/ASDP-2023 concerning Leave and Permission to Leave Work for Employees in PT ASDP Indonesia Ferry (Persero); 7. Decree of the Board of Directors of PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) No. KD.361/HK.002/ASDP-2023 concerning Changes to the Decree Board of the Directors of PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) No. KD.140/HK.002/ASDP-2022 concerning Working Time, Rest Time, Overtime and Calculation of Overtime Wages in PT ASDP Indonesia Ferry (Persero).

STRUKTUR ORGANISASI PENGELOLA SDM

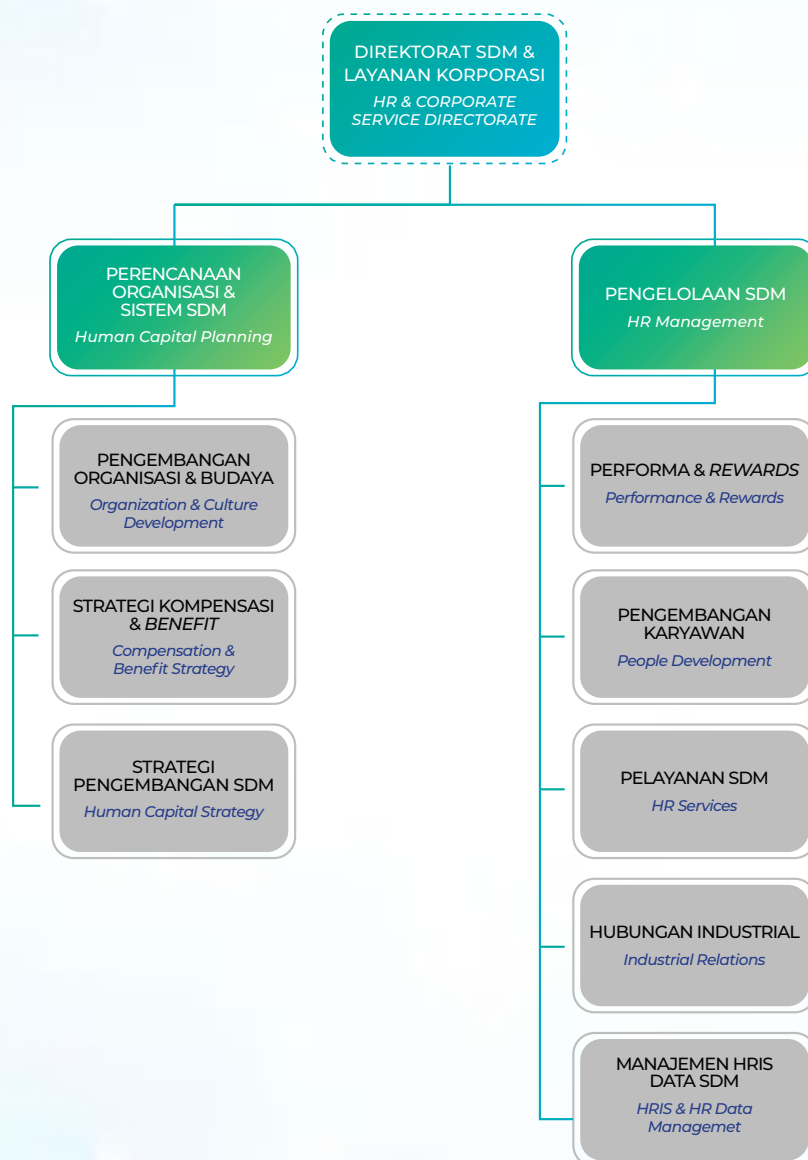
Sebagai bagian dari komitmen perusahaan terhadap prinsip keberlanjutan, terlebih terkait SDM, Perusahaan telah menetapkan sebuah unit kerja khusus yang memiliki peran integral dalam mengelola SDM di Perusahaan. Unit kerja ini berada di bawah Direktorat Sumber Daya Manusia dan Layanan Korporasi, yaitu Divisi Perencanaan Organisasi & Sistem SDM dan Divisi Pengelolaan SDM.

HR MANAGEMENT ORGANIZATIONAL STRUCTURE

As part of the company's commitment to sustainability principles, especially on the subject of HR, the Company established a work unit with the essential role of managing the human resources in the Company. This work unit is under the Directorate of Human Resources and Corporate Services, namely the HR Organization & Planning Division and the HR Management Division.

Divisi Perencanaan Organisasi & Sistem SDM bertanggung jawab atas perencanaan pengelolaan SDM di Perusahaan, sedangkan Divisi Pengelolaan SDM bertanggung jawab atas implementasi pengelolaan SDM. Adapun struktur organisasi pengelola SDM di Perusahaan, yaitu sebagai berikut:

The Human Capital Planning Division is responsible for planning HR management in the Company, while the HR Management Division is responsible for implementing HR management. The organizational structure of HR management in the Company is as follows:



PELAKSANAAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL ASPEK TENAGA KERJA

Remunerasi dan Kesejahteraan

Perusahaan memandang karyawan sebagai sumber daya yang penting dan memegang peran kunci sebagai pendorong utama pertumbuhan kinerja Perusahaan. Untuk itu Perusahaan menerapkan kebijakan remunerasi sebagai bentuk penghargaan kepada karyawan sesuai dengan ketentuan yang diatur melalui beberapa kebijakan yang berkaitan dengan remunerasi dan kesejahteraan karyawan. Komitmen Perusahaan terhadap kebijakan remunerasi pun menegaskan prinsip kesetaraan dan keadilan, di mana pemberian remunerasi dilakukan tanpa membedakan gender, ras, suku, dan lainnya di semua tingkat jabatan.

Komitmen terhadap pemenuhan kebutuhan karyawan tercermin dalam kebijakan pemberian gaji di atas upah minimum regional (UMR). Pada tahun 2023, rata-rata rasio gaji karyawan baru dengan upah terendah dibandingkan dengan UMR mencapai 1,6 kali. Rasio tersebut menunjukkan bahwa pemberian gaji di Perusahaan berada di atas UMR dengan besaran 1,6 kali lebih besar dibandingkan UMR.

Pengembangan Kompetensi

Kehadiran SDM handal, yang dilengkapi dengan kapasitas dan kualitas yang unggul, memiliki peran krusial dalam mendukung Perusahaan mencapai tujuan strategisnya. Oleh karena itu, Perusahaan berkomitmen untuk terus meningkatkan kapasitas dan kualitas seluruh karyawannya melalui program-program pendidikan dan pengembangan kompetensi yang holistik. Program ini tidak hanya diintegrasikan sebagai inisiatif untuk mencapai tujuan Perusahaan, melainkan juga dianggap sebagai hak yang melekat pada setiap karyawan. Dengan peningkatan kapasitas dan kualitas, para karyawan dapat lebih efektif mengembangkan karier mereka di lingkungan kerja Perusahaan.

IMPLEMENTATION OF SOCIAL RESPONSIBILITY ON ASPECTS OF LABOR

Remuneration and Welfare

The Company regard employees as a crucial resource and playing a key role as the primary driver of the Company's performance growth. Thus, the Company implements a remuneration policy as a form of reward for employees through several policies on remuneration and employee welfare in accordance with the regulations and provisions in effect. The Company's commitment to remuneration policy also emphasizes the principles of equality and justice, where remuneration is calculated without differing gender, race, ethnicity, and other factors across all levels of position.

Commitment to fulfil employee needs is reflected in the policy of remuneration above the regional minimum wage (UMR). In 2023, the average salary ratio of new employees compared to the minimum wage was 1.6 times. This ratio shows that salaries at the Company are 1.6 times higher than the regional minimum wage.

Competency Development

Reliable human resources, prepared with outstanding capacity and quality, perform crucial roles in supporting the Company to achieve its strategic goals. Therefore, the Company is committed to continuing to grow the capacity and quality of all its employees through holistic education and competency development programs. These program would be integrated as initiatives to achieve the Company's goals, and also considered inherent rights of every employee. By increasing their capacities and qualities, employees can be more effective in developing their careers within the Company's work environment.

Pengembangan kompetensi SDM di Perusahaan mengacu dan didasari oleh Keputusan Direksi PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) No. KD.36/PA.002/ASDP-2015 tentang Program Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) Karyawan di Lingkungan PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) dan Keputusan Direksi PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) No. KD.95/PA.002/ASDP-2023 tentang Pendidikan Lanjutan Karyawan di Lingkungan PT ASDP Indonesia Ferry (Persero).

Sepanjang tahun 2023, Perusahaan melaksanakan berbagai program pendidikan dan pelatihan sebagai bentuk pengembangan kompetensi SDM di Perusahaan. Sebanyak 2,092 karyawan mengikuti pelatihan di sepanjang tahun 2023 dan total anggaran sebesar Rp19.063.298.628 dengan rincian sebagai berikut:

The development of HR competency in the Company refers to and is based on the Decree of the Board of Directors of PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) No. KD.36/PA.002/ASDP-2015 concerning Employee Education and Training Programs in PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) and the Decree of the Board of Directors of PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) No. KD.95/PA.002/ASDP-2023 concerning Employee Continuing Education in PT ASDP Indonesia Ferry (Persero).

Throughout 2023, the Company organized various education and training programs to develop HR competency in the Company. A total of 2,092 employees participated in training throughout 2023 and the total budget was Rp19,063,298,628, with the following details:

Uraian Description	Target Target	Realisasi Realization
Karyawan Darat Ashore Employees		
Jumlah Pelatihan Number of Training	186	136
Durasi Pelatihan (dalam jam) Training Duration (in hours)	132.664	129.384
Jumlah Peserta Number of Participants	1.793	1.238
Biaya Pelatihan Training Costs	Rp16.825.414.379	Rp15.663.592.710
Karyawan Laut Marine Employees		
Jumlah Pelatihan Number of Training	42	18
Durasi Pelatihan (dalam jam) Training Duration (in hours)	64.764	21.440
Jumlah Peserta Number of Participants	2.245	854
Biaya Pelatihan Training Costs	Rp3.937.650.000	Rp3.399.705.918

Survei Kepuasan dan Keterikatan Karyawan

Perusahaan dengan tegas memandang Survei Kepuasan dan Keterikatan Karyawan sebagai salah satu wujud pelaksanaan tanggung jawab sosial terhadap aspek tenaga kerja. Melalui survei ini, Perusahaan berkomitmen untuk terus memahami dan meningkatkan kesejahteraan serta kepuasan karyawan, sekaligus membangun keterikatan yang kuat antara karyawan dan Perusahaan. Hasil survei pada tahun 2023 menunjukkan pencapaian yang membanggakan, dengan Indeks Kepuasan sebesar 4,02, mengalami kenaikan sebesar 0,36 poin dibandingkan tahun sebelumnya.

Employee Satisfaction and Engagement Survey

The Company firmly views the Employee Satisfaction and Engagement Survey as a form of social responsibility implementation as it relates to of labor. Through the surveys, the Company is committed to continuously understand and improve employee welfare and satisfaction, whilst building a strong engagement between employees and the Company. The survey results in 2023 showed encouraging achievements, with Satisfaction Index of 4.02, an increase of 0.36 points compared to the previous year. Likewise, the Engagement Index reached 4.21, an increase of 0.01 points from the previous year.

Begitu juga dengan Indeks Keterlekatan yang mencapai angka 4,21, meningkat sebesar 0,01 poin dari tahun sebelumnya. Kedua indikator ini masuk dalam kategori PUAS, mencerminkan keberhasilan Perusahaan dalam menciptakan lingkungan kerja yang memotivasi dan memenuhi harapan karyawan. Hasil survei ini tidak hanya menjadi acuan bagi perbaikan berkelanjutan di masa depan, tetapi juga memperkuat komitmen Perusahaan dalam memberdayakan sumber daya manusia dan menciptakan hubungan kerja yang berkelanjutan.

Turnover Karyawan

Rasio pergantian karyawan juga mencerminkan budaya dan sistem kerja organisasi, dapat dianggap sebagai petunjuk keberhasilan dalam membentuk lingkungan kerja yang mendukung. Selain itu, rasio pergantian karyawan dapat mengindikasikan produktivitas dan kesetiaan SDM. Terhitung hingga akhir tahun 2023, Perusahaan memiliki *turnover rate* sebesar 3,1%. Perusahaan mencatat pengurangan karyawan dengan total 151 karyawan, dengan rincian sebagai berikut:

The two indexes fall in the SATISFIED category, reflecting the Company's success in building a motivating work environment that meets employee expectations. The survey results served as a point for future continuous improvement, and to strengthen the Company's commitment to empower employees and create sustainable working relationships.

Employee Turnover

The employee turnover ratio also reflects the organization's culture and work system, and can be considered an indicator of success in establishing a supportive work environment. Moreover, employee turnover ratio can indicate employee productivity and loyalty. As of the end of 2023, the Company has a turnover rate of 3.1%. The record showed that the number of employees who departed totalled at 151 persons, with the following details:

Penyebab Pengurangan <i>Causes of Turnover</i>	Jumlah Karyawan <i>Number of Employees</i>
Meninggal dunia Passed Away	3
Mengundurkan diri Resign	50
Mangkir Absent	23
Sakit Berkepanjangan Medical Leave	5
Bersifat Mendesak Urgent	7
Pelanggaran Disiplin Disciplinary Violations	3
Pensiun Retired	57
Penugasan ke Anak Perusahaan Assigned to Subsidiaries	3
Total	151

STRUKTUR ORGANISASI PENGELOLA KESEHATAN DAN KESELAMATAN KERJA

Pelaksanaan program terkait TJSL merupakan suatu tanggung jawab yang diemban oleh seluruh karyawan Perusahaan. Sebagai bagian dari komitmen Perusahaan terhadap prinsip-prinsip keberlanjutan, Perusahaan telah menetapkan sebuah satuan kerja khusus yang memiliki peran integral dalam merancang, mengkoordinasikan, dan mengevaluasi program-program TJSL. Satuan khusus ini beroperasi di bawah dua direktorat yang berbeda, mencerminkan kompleksitas dan keragaman tanggung jawab.

Pertama-tama, terdapat satuan kerja yang berada di bawah Direktorat SDM dan Layanan Korporasi, yang bertugas untuk memantau dan mengawasi kegiatan yang berkaitan dengan keselamatan dan kesejahteraan karyawan. Fokus utama dari direktorat ini adalah memastikan bahwa setiap inisiatif TJSL mendukung dan meningkatkan standar keselamatan serta kesejahteraan karyawan, menciptakan lingkungan kerja yang aman, dan mendukung perkembangan profesional.

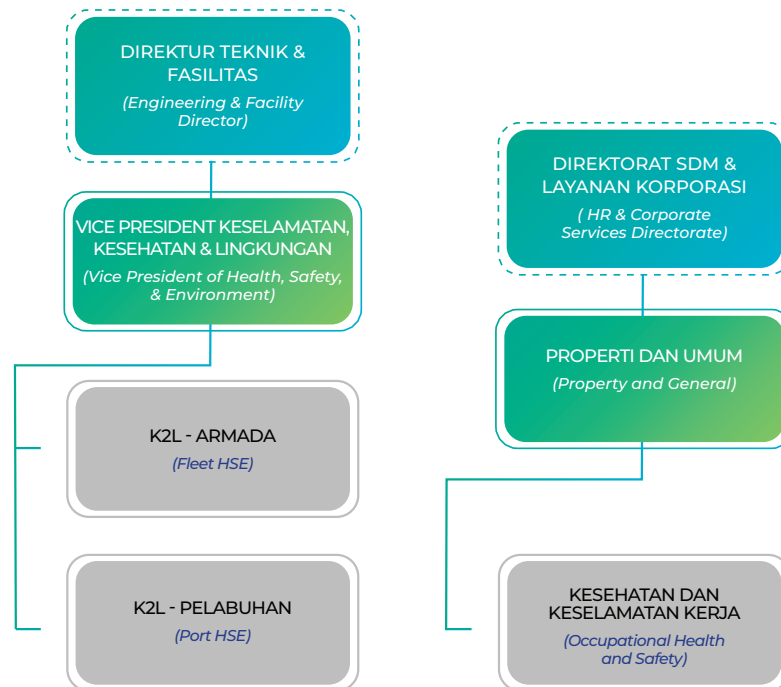
Selanjutnya, terdapat satuan kerja lainnya yang tergabung dalam bagian Direktorat Teknik dan Fasilitas. Satuan kerja ini secara khusus bertanggung jawab dalam menjalankan operasi keselamatan yang terfokus pada aspek keamanan kapal dan perlindungan lingkungan pelabuhan. Adapun struktur organisasi pengelolaan kesehatan dan keselamatan kerja di Perusahaan yaitu sebagai berikut:

ORGANIZATIONAL STRUCTURE FOR OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY MANAGEMENT

Implementation of CSR-related programs is a responsibility carried out by every Company employees. As part of the Company's commitment to sustainability principles, the Company has assigned a designated work unit with an integral role in designing, coordinating, and evaluating CSR programs. This unit operates under two different directorates, reflecting the complexity and diversity of their responsibilities.

Firstly, there is a work unit under the Directorate of HR and Corporate Services that is tasked to monitor and supervise activities related to employee safety and welfare. The main focus of this directorate is to ensure that every CSR initiative supports and improves safety standards and employee welfare, creates a safe work environment, and supports professional development.

Furthermore, there are other work units that are positioned under of the Engineering and Facilities Directorate. The work units are specifically responsible for carrying out safety operations that focus on aspects of vessels security and port environmental protection. The organizational structure of occupational health and safety management in the Company is as follows:



PELAKSANAAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL ASPEK KESEHATAN DAN KESELAMATAN KERJA

Program Kerja Kesehatan dan Keselamatan Kerja

Selama tahun 2023, Perusahaan telah melaksanakan sejumlah inisiatif pengelolaan terkait aspek kesehatan dan keselamatan kerja guna meningkatkan standar dan keberlanjutan lingkungan kerja. Berbagai program tersebut dirancang dengan cermat dan secara komprehensif untuk mencakup berbagai aspek yang relevan yang terdiri dari:

1. Pengukuran Lingkungan Kerja dan Sertifikasi Alat Keselamatan di Pelabuhan yang telah tersertifikasi SMK3;
2. Melakukan latihan kebakaran di Gedung Kantor Pusat;
3. Latihan keadaan darurat untuk seluruh kapal sesuai jenis kapal;
4. *Top Drill* gabungan antara Kantor Cabang dan Kapal;
5. Pengukuran *Safety Assessment* Perusahaan;
6. Melakukan penilaian implementasi dan audit internal terhadap Sistem Manajemen Keselamatan/ISM-Code;

IMPLEMENTATION OF SOCIAL RESPONSIBILITY ASPECTS OF OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY

Occupational Health and Safety Work Program

During 2023, the Company has implemented numerous management initiatives related to occupational health and safety aspects to improve work environment standards and sustainability. These various programs were designed carefully and comprehensively to cover various relevant aspects consisting of:

1. Conducted Evaluation of the Work Environment and Certification of Safety Equipment in Ports that had been certified with SMK3 (Occupational Health and Safety Management System);
2. Conducted fire drills at the Head Office Building;
3. Exercised emergency drills for all ships according to ship types;
4. Exercised combined *Top Drill* between Branch Offices and Ships;
5. Measured Company Safety Assessment;
6. Conducted implementation assessments and internal audits of the Safety Management System/ISM-Code;

7. Melakukan pembaharuan *Safety Management Certificate* (SMC);
8. *Medical Check Up* setahun sekali terhadap karyawan darat untuk Cabang.

7. Renewed the *Safety Management Certificate* (SMC);
8. Annual *Medical Check Up* for ashore employees at Branch Offices.

KINERJA KESEHATAN DAN KESELAMATAN KERJA

Perusahaan telah berdedikasi dan berupaya sepenuh hati dalam melaksanakan berbagai program Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) sepanjang tahun 2023 dengan tujuan utama untuk mencapai tingkat nol kecelakaan kerja dan mencegah terjadinya kasus penyakit yang disebabkan oleh lingkungan kerja. Upaya kolaboratif dan dedikasi yang tinggi dari seluruh personel Perusahaan dalam menerapkan langkah-langkah proaktif untuk K3 telah menghasilkan pencapaian yang optimal.

Dari aspek keselamatan operasional kapal, pada tahun 2023 Perusahaan mencatatkan indeks *Rate of Accident* (RoA) sebesar 0,17 lebih rendah dibandingkan indeks RoA tahun lalu 2022 yaitu 0,20. Sementara itu dari aspek keselamatan karyawan, Perusahaan melakukan pengukuran *Incident Rate* (IR) yang mengukur persentase jumlah kecelakaan kerja yang terjadi di tempat kerja untuk setiap karyawan. Pada tahun 2023, *incident rate* di Perusahaan tercatat sebesar 0,02%.

DAMPAK PROGRAM TANGGUNG JAWAB SOSIAL ASPEK KESEHATAN DAN KESELAMATAN KERJA

Selama tahun 2023, tidak ada laporan resmi yang diajukan baik oleh karyawan maupun pihak-pihak terkait mengenai dampak negatif yang mungkin timbul dari pelaksanaan kegiatan operasional perusahaan. Selain itu, tidak terdapat sanksi atau denda yang dikenakan sebagai konsekuensi dari pelanggaran terhadap ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku, terutama yang berkaitan dengan aspek kesehatan dan keselamatan kerja. Hal ini mencerminkan program kerja yang dilakukan mampu memberikan dampak positif bagi Perusahaan sehingga operasional Perusahaan dapat berjalan dengan lancar tanpa hambatan yang berarti.

OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY PERFORMANCE

The Company has dedicated and made endeavours to implement various Occupational Safety and Health (OSH) programs throughout 2023, with the main objective of achieving zero work accident and preventing cases of disease caused by the work environment. Collaborative efforts and high dedication from all Company personnel in implementing proactive steps for OSH had resulted in optimal achievements.

In the aspect of ship operational safety, in 2023 the Company recorded a *Rate of Accident* (RoA) index of 0.17, lower than the 2022 RoA index of 0.20. Meanwhile, in the aspect of employee safety, there is Company's the *Incident Rate* (IR), which measures the percentage of work accidents that occur in the workplace for each employee. In 2023, the incident rate at the Company was recorded at 0.02%.

IMPACT OF THE SOCIAL RESPONSIBILITY PROGRAM IN OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY ASPECTS

Throughout 2023, there were no official reports submitted by neither employees nor related parties regarding the negative impacts that may have arisen from the company's operational activities. In addition, there were no sanctions or fines imposed as a consequence of violations of applicable laws and regulations, especially those relating to occupational health and safety aspects. This reflected that the work program carried out was able to impact positively on the Company such that the Company's operations can run smoothly without significant obstacles.

TANGGUNG JAWAB SOSIAL ASPEK SOSIAL DAN KEMASYARAKATAN

SOCIAL RESPONSIBILITY ASPECTS OF SOCIAL AND COMMUNITY

KOMITMEN DAN KEBIJAKAN

ASDP berkomitmen untuk terus berkontribusi dalam pengembangan sosial kemasyarakatan sebagai bentuk upaya menjaga keberlangsungan lingkungan serta memberikan sumbangsih kepada masyarakat di wilayah operasional Perusahaan. Upaya tersebut diwujudkan dengan melaksanakan program-program tanggung jawab sosial masyarakat secara berkelanjutan dan konsisten yang rutin dilaksanakan setiap tahunnya, baik dalam bentuk donasi maupun aksi langsung.

Upaya Perusahaan dalam memenuhi komitmen tanggung jawab sosial masyarakat dibuktikan dengan perancangan program TJSL dengan memenuhi 4 (empat) prinsip yang tertera pada Peraturan Menteri BUMN No. PER-1/MBU/03/2023 tentang Penugasan Khusus dan Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha Milik Negara. Adapun prinsip tersebut antara lain:

1. Terintegrasi, yaitu berdasarkan analisa risiko dan proses bisnis yang memiliki keterkaitan dengan pemangku kepentingan;
2. Terarah, yaitu memiliki arah yang jelas untuk mencapai tujuan Perseroan;
3. Terukur dampaknya, yaitu memiliki kontribusi dan memberikan manfaat yang menghasilkan perubahan atau nilai tambah bagi pemangku kepentingan dan Perseroan; dan
4. Akuntabilitas yaitu dapat dipertanggung-jawabkan sehingga menjauhkan dari potensi penyalahgunaan dan penyimpangan.

COMMITMENTS AND POLICIES

ASDP is committed make continuous contribution to community development in efforts to maintain environmental sustainability and contribute to the community around the Company's operational areas. These endeavors were realized through thorough implementation of community programs in a sustainable and consistent manner. Programs are consistently carried out every year, through donations and direct actions.

The Company's efforts to fulfil its commitment of social responsibility to the community is proven by designing the CSR program to meet all 4 (four) principles stated in Regulation of Minister of SOEs No. PER-1/MBU/03/2023 concerning Special Assignments and Social and Environmental Responsibility Programs for State-Owned Enterprises. These principles are:

1. Integrated, based on risk analysis and business processes that are associated to stakeholders;
2. Directional, having a clear direction to achieve the Company's goals;
3. Measurable impact, which is to contribute and provide benefits that produce change or added value for the stakeholders and the Company; and
4. Accountability, which is being accountable to avoid potential abuse and irregularities.

PELAKSANAAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL ASPEK SOSIAL DAN KEMASYARAKATAN

Sepanjang tahun 2023, Perusahaan telah melaksanakan program TJSL aspek sosial dan kemasyarakatan yang terdiri dari:

Pilar Pembangunan Sosial

1. Bantuan santunan anak yatim dan dhuafa;
2. Bantuan sembako untuk masyarakat di Karimun Jawa, Merak, Sumbawa Barat, dan Jakarta;
3. Bantuan kegiatan kurban Hari Raya Idul Adha di Kawasan BHC Pelabuhan Bakauheni;
4. Mudik Bersama dan Mudik Gratis bersama BUMN di Banten, Jakarta, Ambon, dan Maluku;
5. Kolaborasi BUMN Pelita Warna di Lapas Kelas I Cipinang;
6. Bantuan program insidentil tahap III Pemuda Langsa Bersatu berupa bantuan sembako;
7. Bantuan pendanaan kegiatan keagamaan di Bakauheni.

Pilar Pembangunan Ekonomi

1. Dukungan dalam bentuk sponsorship untuk kegiatan seminar, pelatihan dan workshop kewirausahaan di Banda Aceh dan Banten;
2. Partisipasi Festival Parekraf Lampung 2023;
3. Bantuan dana UMKM di Kota Sabang dan Banyuwangi;
4. Bantuan pelabuhan penyeberangan milik BPTD XXII di Bitung, Sulawesi Utara.

Pilar Lingkungan

1. Penyediaan air bersih melalui pembuatan sumur air bersih dan penyediaan sanitasi layak di Merak, Banten dan Raja Ampat, Papua;
2. Pembangunan infrastruktur keagamaan di Banyuwangi, Batam, Kepulauan Riau, Banten, Jember, dan Bali;
3. Pengadaan mesin pengolahan plastik BUMDes Bina Warga Desa Pasuruan, Kec. Penengahan, Lampung Selatan;
4. Kolaborasi BUMN penanaman pohon di Mandalika, Lombok;
5. Program penanaman mangrove "Madura Moljeh Asreh" di Sampang, Jawa Timur;

IMPLEMENTATION OF SOCIAL RESPONSIBILITY IN ASPECTS OF SOCIAL AND COMMUNITY

Throughout 2023, the Company had implemented the CSR program on social and community aspects, which consisted of:

Pillars of Social Development

1. Donation for the orphans and impoverished;
2. Aid of basic goods for communities in Karimun Jawa, Merak, West Sumbawa and Jakarta;
3. Aid for Eid al-Adha sacrifice activities in the BHC area, Bakauheni Port;
4. Joint Homecoming and Free Homecoming program with SOEs in Banten, Jakarta, Ambon, and Maluku;
5. Pelita Warna program in collaboration with SOEs in Cipinang Class I Penitentiary;
6. Aid for the 3rd phase circumstantial program for the Langsa Youth in the form of basic goods;
7. Funding aid for religious activities in Bakauheni.

Pillars of Economic Development

1. Support by sponsorship for seminars, training and entrepreneurship workshops in Banda Aceh and Banten;
2. Participation in the 2023 Lampung Tourism and Creative Economy Festival;
3. Funding assistance for MSMEs in Sabang and Banyuwangi;
4. Assistance to the ferry port owned by BPTD XXII in Bitung, North Sulawesi.

Pillar of Environments

1. Provision of clean water through clean water wells construction and provision of adequate sanitation in Merak, Banten and Raja Ampat, Papua;
2. Development of religious infrastructure in Banyuwangi, Batam, Riau Islands, Banten, Jember, and Bali;
3. Procurement of plastic processing machines for Village-Owned Enterprises for the Community Development of Pasuruan Village, Penengahan District, South Lampung;
4. SOEs collaboration to plant trees in Mandalika, Lombok;
5. "Madura Moljeh Asreh" mangrove planting program in Sampang, East Java;

6. Program insidentil di Banten, Bali, dan Nanggroe Aceh Darussalam.

6. Circumstantial programs in Banten, Bali, and Nanggroe Aceh Darussalam.

DAMPAK OPERASI TERHADAP MASYARAKAT

Dalam realisasinya, Perusahaan telah membawa dampak yang signifikan kepada masyarakat sekitar. Melalui inisiatif-inisiatif seperti dukungan pengembangan ekonomi lokal, akses terhadap pendidikan, dan pemberian fasilitas kesehatan, Perusahaan memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan kualitas hidup masyarakat. Pemberdayaan masyarakat juga menjadi fokus dengan memberikan dukungan dan pelatihan untuk mengembangkan keterampilan dan sumber daya lokal. Program ini tidak hanya meningkatkan tingkat keterlibatan masyarakat dalam kegiatan sosial, tetapi juga menciptakan kesadaran dan tanggung jawab sosial yang lebih besar di antara warganya.

Selain itu, Perusahaan berperan dalam pengentasan ketidaksetaraan dengan memberikan akses dan fasilitas yang lebih baik terhadap UMKM, layanan kesehatan, dan pendidikan. Dengan pendekatan yang holistik, Perusahaan telah menciptakan lingkungan yang mendukung perkembangan komunitas secara menyeluruh, menjadikannya sebuah upaya yang lebih besar dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat di berbagai aspek.

MEKANISME PENANGANAN PENGADUAN DAN KONFLIK SOSIAL KEMASYARAKATAN

Dalam rangka membangun hubungan baik dengan masyarakat, Perusahaan terus berupaya memfasilitasi akses komunikasi yang efisien untuk terus meningkatkan penanganan keluhan. Masyarakat dapat menyampaikan pengaduan atau keluhan melalui platform WBS Perusahaan maupun penyampaian secara langsung kepada pengelola WBS dan humas di setiap kantor cabang. Perusahaan secara aktif melakukan peninjauan dan evaluasi terhadap pengaduan yang masuk untuk selanjutnya akan ditindaklanjuti secara transparan. Perusahaan juga memiliki mekanisme dan perangkat keadaan darurat dan konflik sosial kemasyarakatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

IMPACT OF OPERATIONS ON COMMUNITY

In its realization, the Company brought significant impact on the surrounding communities. Through initiatives of, for example, supporting local economic development, opening access to education, and providing health facilities, the Company contributed tangibly to improve the community's quality of life. Focus was also put into community empowerment by providing support and trainings to develop local skills and resources. This program not only increased community involvement in social activities, but also creates greater social awareness and responsibility among the community.

In addition, the Company took roles in reducing inequalities by providing better access and facilities to MSMEs, health services, and education. With a holistic approach, the Company created a supportive environment towards general community development, triggering a greater drive to improve the communities' quality of life in many aspects.

MECHANISM FOR HANDLING COMPLAINTS AND SOCIAL CONFLICTS

In order to build good relations with the community, the Company continues to facilitate efficient communication access to improve complaint handling. The public can submit complaints through the Company's WBS platform or submit them directly to the WBS manager and public relations unit at each branch office. The Company actively reviews and evaluates incoming complaints and follows it up in transparent manner. The Company has also put in place mechanisms and instruments for emergencies and social conflicts in accordance with applicable regulations.

DAMPAK PROGRAM TANGGUNG JAWAB SOSIAL ASPEK SOSIAL DAN KEMASYARAKATAN TERHADAP KEBERLANJUTAN PERUSAHAAN

Dengan berfokus melalui kontribusi positif kepada kesejahteraan masyarakat dan pemberdayaan komunitas, Perusahaan telah berupaya menjadi agen perubahan yang peduli terhadap isu-isu sosial. Jejak rekam positif ini menciptakan citra perusahaan sebagai mitra yang bertanggung jawab dan memperkuat ikatan antara perusahaan dan komunitas di wilayah operasional Perusahaan, hal ini mendukung keberlanjutan bisnis Perusahaan dalam jangka panjang dan menciptakan hubungan kerja sama Perusahaan dengan masyarakat yang berkelanjutan.

BIAYA PROGRAM KERJA TANGGUNG JAWAB SOSIAL ASPEK SOSIAL DAN KEMASYARAKATAN

Perusahaan telah merealisasikan program kerja tanggung jawab sosial dan kemasyarakatan dengan biaya sebesar Rp8,4 miliar di tahun 2023. Jumlah tersebut terbagi ke dalam beberapa pilar TJSL yang rinciannya dapat dilihat pada tabel Pencapaian Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Tahun 2023 pada bagian Strategi TJSL dalam Laporan Tahunan ini.

IMPACT OF THE SOCIAL RESPONSIBILITY PROGRAM IN ASPECTS OF SOCIAL AND COMMUNITY TOWARDS COMPANY SUSTAINABILITY

By focusing on positive contributions to community welfare and community empowerment, the Company becomes an agent of change that concerns about social issues. This positive track record helped shape the Company's image as a responsible partner. It also strengthens the ties between the Company and the communities surrounding the Company's operational areas, that will support Company's long-term business sustainability and creates a lasting cooperative relationships between the Company and the communities.

COSTS OF THE WORK PROGRAM FOR SOCIAL RESPONSIBILITY IN ASPECTS OF SOCIAL AND COMMUNITY

The Company has implemented a social community responsibility work program totaling at Rp8.4 billion in 2023. This amount was divided into several CSR pillars, with detailed breakdowns illustrated in the table of 2023 Achievements of Social and Environmental Responsibility Program contained in the CSR Strategy section in this year's report.

TANGGUNG JAWAB SOSIAL ASPEK PRODUK DAN/ATAU JASA SERTA PELANGGAN

SOCIAL RESPONSIBILITY ASPECTS OF PRODUCTS AND/OR SERVICES AND CUSTOMERS

KOMITMEN DAN KEBIJAKAN

Menjaga kepuasan konsumen merupakan komitmen Perusahaan dalam mengelola bisnis dan operasional Perusahaan. Oleh karena itu, komitmen tersebut diwujudkan dengan terus berinovasi sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan pelanggan. Untuk memperkuat pelayanan yang diberikan, Perusahaan juga terus berupaya memperbaiki serangkaian kebijakan manajemen terkait aspek tingkat layanan dan pengaduan konsumen. Adapun kebijakan Perusahaan terhadap standar layanan sebagai berikut:

1. Keputusan Direksi PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) No. KD.226/HK.002/ASDP-2023 tentang Standar *Hospitality Frontliners* di Lingkungan PT ASDP Indonesia Ferry (Persero), yang bertujuan untuk meningkatkan profesionalisme dan perbaikan pelayanan yang berkelanjutan, serta menjadi acuan bagi Perusahaan dalam melaksanakan pelatihan *frontliners* dalam meningkatkan kualitas pelayanan kepada pengguna jasa;
2. Keputusan Direksi PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) No. KD.217/OP.204/ASDP-2022 tentang Desain *Service Touch Point* di Lingkungan PT ASDP Indonesia Ferry (Persero), yang bertujuan untuk memastikan pelaksanaan dan pola interaksi dengan pengguna jasa, serta menjadi panduan dalam penyelenggaraan, *monitoring*, dan perbaikan atas kualitas pelayanan yang konsisten;
3. Keputusan Direksi PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) No. KD.437/HK/002/ASDP-2023 Tentang *Service Recovery Guidance* di Lingkungan PT ASDP Indonesia Ferry (Persero).

COMMITMENTS AND POLICIES

Maintaining customer satisfaction is the part of commitment in managing the Company's business and operations. This commitment can be realized by continuous innovation to meet customer's needs and demands. To improve the services provided, the Company continues to improve management policies related to aspects of service levels and consumer complaints. The Company's policy regarding service standards is as follows:

1. Decree of the Board of Directors of PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) No. KD.226/HK.002/ASDP-2023 concerning Standards for *Hospitality Frontliners* in PT ASDP Indonesia Ferry (Persero), which aims to increase professionalism and continuous service improvement, and be set as the Company's reference for carrying out frontliner training to improve the service quality to customers.
2. Decree of the Board of Directors of PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) No. KD.217/OP.204/ASDP-2022 concerning *Service Touch Point Design* in the PT ASDP Indonesia Ferry (Persero), which aims to ensure implementation and interaction patterns with service users, and be the guide in organizing, monitoring and improving consistent service quality.
3. Decree of the Board of Directors of PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) No. KD.437/HK/002/ASDP-2023 concerning *Service Recovery Guidance* within PT ASDP Indonesia Ferry (Persero).

PELAKSANAAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL ASPEK PRODUK DAN/ATAU JASA SERTA PELANGGAN

Perusahaan terus berupaya memberikan nilai tambah bagi pelanggan untuk mewujudkan kelangsungan usaha yang berkelanjutan. Inisiatif yang dilakukan Perusahaan dalam mengelola kepuasan konsumen antara lain melalui kegiatan survei kepuasan pelanggan yang dilakukan secara rutin, penyediaan sarana komunikasi pelanggan di berbagai sosial media untuk menyampaikan hal-hal terkait produk dan layanan Perusahaan serta penanganan keluhan pelanggan melalui *contact center* yang tersedia dalam 24 jam selama 7 hari. Di samping itu, Perusahaan secara rutin juga melaksanakan beberapa *event* untuk membangun hubungan dengan pelanggan seperti *event* Hari Pelanggan Nasional, hari besar nasional hingga *event* di sosial media.

Perusahaan memiliki komitmen tinggi dalam memberikan kualitas layanan terbaik yang mengacu pada beberapa kebijakan dan pedoman berikut:

1. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia No. PM 62 tahun 2019 tentang Standar Pelayanan Minimal Angkutan Penyeberangan;
2. KD.267/HK.101/ASDP-2017 tentang Standar Pelayanan dan Fasilitas Kapal PT ASDP Indonesia Ferry (Persero);
3. KD.268/HK.101/ASDP-2017 tentang Standar Pelayanan dan Fasilitas Pelabuhan PT ASDP Indonesia Ferry (Persero);
4. KD.217/OP.204/ASDP-2022 tentang Desain Service Touch Point di Lingkungan PT ASDP Indonesia Ferry (Persero);
5. KD.226/HK.002/ASDP-2023 tentang Standar Hospitality Frontliners di Lingkungan PT ASDP Indonesia Ferry (Persero).

Selain berpedoman pada aturan tersebut, Perusahaan juga turut aktif dalam kegiatan Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik (PEKPPP) yang diselenggarakan oleh Kementerian PANRB serta Pelayanan Prima yang diselenggarakan oleh Kementerian Perhubungan Republik Indonesia.

IMPLEMENTATION OF SOCIAL RESPONSIBILITY IN ASPECTS OF PRODUCTS AND/OR SERVICES AND CUSTOMERS

The Company strives to provide added value for customers to build sustainable business continuity. Initiatives carried out by the Company in managing customer satisfaction include routine customer satisfaction surveys, set up customer communication channel on various social media to inform about Company's products and services as well as handling of customer complaints through a 24/7 contact center. Aside from that, the Company also regularly organized events to build relationships with customers, such as events on National Customer Day, events on national holidays, and events and quizzes on social media.

The Company is highly committed to provide the best quality service, which refers to the following policies and guidelines:

1. Regulation of the Minister of Transportation of the Republic of Indonesia No. PM 62 of 2019 concerning Minimum Service Standards for Ferry Transport;
2. KD.267/HK.101/ASDP-2017 concerning Service Standards and Ship Facility for PT ASDP Indonesia Ferry (Persero);
3. KD.268/HK.101/ASDP-2017 concerning Service Standards and Port Facility for PT ASDP Indonesia Ferry (Persero);
4. KD.217/OP.204/ASDP-2022 concerning Service Touch Point Design within PT ASDP Indonesia Ferry (Persero);
5. KD.226/HK.002/ASDP-2023 concerning Standards for Frontliners Hospitality within PT ASDP Indonesia Ferry (Persero).

Apart having these guidelines, the Company also actively participated in Monitoring and Evaluation of Public Service Delivery Performance (PEKPPP), which is activities organized by the Ministry of Administrative and Bureaucratic Reform as well as Excellent Services concept from the Ministry of Transportation of the Republic of Indonesia.

SURVEI KEPUASAN PELANGGAN

Pengukuran Kepuasan Pelanggan dilakukan secara rutin setiap satu tahun sekali dengan melibatkan konsultan eksternal untuk mengukur tingkat kepuasan pelanggan sekaligus menyaring masukan dari pelanggan. Hasil survei kepuasan pelanggan menjadi dasar bagi Perusahaan untuk melakukan peningkatan layanan kepada pelanggan yang akan dituangkan dalam program kerja dan penyempurnaan kebijakan maupun standar layanan Perusahaan. Pada tahun 2023, Perusahaan melakukan survei kepuasan pelanggan oleh pihak independen dengan capaian skor kepuasan pelanggan mencapai 5,34. Skor ini mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2022 yang tercatat sebesar 5,31.

MEKANISME PENGADUAN KELUHAN PELANGGAN

Keluhan dan masukan pelanggan merupakan suatu hal yang dianggap berharga bagi Perusahaan karena dapat menjadi dasar evaluasi atas kualitas layanan yang diberikan Perusahaan. Untuk memfasilitasi pengaduan keluhan pelanggan, Perusahaan menyediakan *contact center* yang tersedia selama 24 jam yang sigap dalam menangani keluhan pelanggan. Selain itu, Perusahaan juga mulai menempatkan *customer service* di 4 (empat) pelabuhan yaitu Pelabuhan Merak (Eksekutif dan Reguler), Pelabuhan Bakauheni (Eksekutif dan Reguler), Pelabuhan Ketapang, dan Pelabuhan Gilimanuk, yang secara langsung dapat berkomunikasi dengan pelanggan baik untuk pengaduan keluhan sekaligus penyelesaian masalah yang dihadapi oleh pelanggan sehingga setiap keluhan pelanggan dapat secara langsung diselesaikan oleh Perusahaan.

Segala bentuk keluhan dan pengaduan dapat disampaikan melalui saluran yang telah disediakan pada *contact center* (021) 191 atau 08111-021191, serta melalui email cs@indonesiaferry.co.id atau cs@asdp.id.

Seluruh pelaporan yang masuk akan diterima oleh Divisi Pelayanan Pelanggan dan segera ditindaklanjuti oleh divisi dan cabang terkait. Pengaduan secara langsung juga dapat dilakukan baik melalui petugas di lapangan, kantor cabang, maupun kantor pusat.

CUSTOMER SATISFACTION SURVEY

Customer Satisfaction Assessment is performed annually by appointing external consultants to measure the customer satisfaction level and screen suggestions from customers. The Company uses the customer satisfaction survey results as the basis to improve services to customers, which will be outlined in the Company's work programs, policies improvements, and service standards. In 2023, survey conducted by the independent party resulted in a customer satisfaction score of 5.34. This score increased compared to 2022, of 5.31.

CUSTOMER COMPLAINT MECHANISM

Customer complaints and suggestions are deemed valuable for the Company as they serve as the basis for service quality evaluation the Company had provided. To facilitate customer complaints, the Company set up a 24-hour contact centre to promptly handle customer complaints. Apart from that, the Company has also started to establish customer service at 4 (four) ports, namely Merak Port (Executive and Regular), Bakauheni Port (Executive and Regular), Ketapang Port, and Gilimanuk Port, where the customers can directly express their complaints or having their problems promptly resolved by the Company.

All forms of complaints and grievances can be submitted through the channels provided, which are the contact center at (021) 191 or 08111-021191, and by email at cs@indonesiaferry.co.id or cs@asdp.id.

All incoming reports will be received by the Customer Service Division and will immediately be followed up by the relevant division and branch. Direct complaints can also be delivered through officers in the field, branch offices or head office.

TANGGUNG JAWAB SOSIAL ASPEK LINGKUNGAN HIDUP

SOCIAL RESPONSIBILITY ON ENVIRONMENTAL ASPECTS

KOMITMEN DAN KEBIJAKAN

Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup merupakan upaya sistematis dan terpadu untuk melestarikan lingkungan hidup. Perusahaan senantiasa berkomitmen memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pemenuhan standar lingkungan hidup yang berkelanjutan. Oleh karena itu, Perusahaan terus berupaya meningkatkan tata kelola perusahaan yang baik dan mengembangkan kompetensi sumber daya manusia guna merealisasikan prinsip keberlanjutan yang terarah, terukur, dan terintegrasi sehingga pihak yang terdampak dapat merasakan manfaat yang maksimal. Di samping itu, komitmen Perusahaan terkait keberlanjutan lingkungan hidup diatur dalam Keputusan Direksi PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) No. KD.34/HK.002/ASDP/2014 tentang Pemberlakuan Sistem Manajemen Keselamatan dan Perlindungan Lingkungan dan Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup (DELH).

Untuk menerapkan program tanggung jawab lingkungan hidup secara komprehensif, Perusahaan juga telah membentuk Prosedur Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup sesuai dengan Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Prosedur ini meliputi pencegahan pencemaran dan perlindungan lingkungan hidup yang memuat kajian evaluasi terhadap kegiatan yang berjalan.

ISU-ISU DAN RISIKO LINGKUNGAN HIDUP YANG RELEVAN DENGAN PERUSAHAAN

Dalam menjalankan aktivitas operasional, Perusahaan dihadapkan pada sejumlah isu dan risiko terkait dengan lingkungan hidup. Terlebih,

COMMITMENTS AND POLICIES

Environmental protection and management requires systematic and integrated efforts of environmental preservation. The Company is always committed to contribute significantly to fulfil sustainable environmental standards. Therefore, the Company continues to improve good corporate governance and develop human resource competencies in order to bring about directed, measurable, and integrated sustainability principles such that the affected parties can gain the maximum benefits. Aside from that, the Company's commitment to environmental sustainability is regulated in the Decree of the Board of Directors of PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) No. KD.34/HK.002/ASDP/2014 concerning Implementation of Safety and Environmental Protection Management Systems and Environmental Evaluation Documents (DELH).

To implement a comprehensive environmental responsibility program, the Company also established a Procedure of Environmental Document in accordance with Law No. 32/2009 concerning Environmental Protection and Management. The procedure contains prevention of pollution and environmental protection with an evaluation review of ongoing activities.

ENVIRONMENTAL ISSUES AND RISKS RELEVANT TO THE COMPANY

In carrying out operational activities, the Company is faced with issues and risks related to the environment. Moreover, the Company's operations are carried out on land and in sea

operasional Perusahaan dilakukan di darat dan di wilayah laut sehingga risiko terhadap lingkungan laut menjadi cukup signifikan. Perusahaan telah memetakan berbagai isu dan risiko lingkungan hidup yang relevan dengan Perusahaan antara lain:

1. Potensi risiko pencemaran lingkungan dari aktivitas operasional kapal berupa emisi gas buang kapal;
2. Potensi risiko pencemaran lingkungan akibat tumpahan BBM kapal;
3. Potensi risiko pencemaran lingkungan akibat limbah B3 dan Non-B3 yang dihasilkan dari aktivitas operasional di kapal maupun pelabuhan.

regions, thus the risk to the marine environment can be quite significant. The Company has mapped various environmental issues and risks that are relevant to the Company, including:

1. Potential risk of environmental pollution from ship operational activities, in form of ship exhaust emissions;
2. Potential risk of environmental pollution due to ship fuel spills;
3. Potential risk of environmental pollution due to Toxic and Hazardous Materials (B3), and Non-Toxic Non-Hazardous Materials (non-B3 waste) resulted from operational activities on ships and ports.

PELAKSANAAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL ASPEK LINGKUNGAN HIDUP

Pelaksanaan tanggung jawab lingkungan merupakan bentuk komitmen Perusahaan untuk memenuhi peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan lingkungan guna mewujudkan kegiatan operasional yang berkelanjutan. Untuk mewujudkan hal tersebut, di tahun 2023 Perusahaan telah merealisasikan program-program tanggung jawab lingkungan hidup yang meliputi pengelolaan energi, pengelolaan sumber daya air, pengelolaan emisi udara, dan pengelolaan limbah.

PENGELOLAAN ENERGI

Dalam rangka mewujudkan perusahaan yang peduli terhadap keberlangsungan hidup, Perusahaan berupaya untuk mengoptimalkan penggunaan energi baik dalam operasional kantor, operasional pelabuhan, maupun operasional penyeberangan. Perusahaan telah mengambil langkah-langkah konkret untuk mengurangi penggunaan energi listrik sebagai bagian dari komitmen terhadap keberlanjutan lingkungan dan efisiensi operasional. Di antara langkah-langkah tersebut, Perusahaan telah mengimplementasikan sistem manajemen BBM di seluruh kapal melalui Aplikasi Sistem *Monitoring* Konsumsi BBM, kebijakan pengurangan penggunaan lampu pada siang hari, menggunakan lampu ramah lingkungan,

IMPLEMENTATION OF SOCIAL RESPONSIBILITY IN ENVIRONMENTAL ASPECTS

Carrying out environmental responsibility is the Company's way to fulfil commitment to comply with laws and regulations in environmental protection towards sustainable operational activities. To bring this about, in 2023 the Company carried out environmental programs that comprised of energy management, water resources management, air emissions management, and waste management.

ENERGY MANAGEMENT

In order to build a company that is concerned about the conditions related to sustainable living, the Company endeavors to optimize energy use in office operations, port operations and ferry operations. The Company has taken concrete steps to reduce electrical energy use as part of its commitment to environmental sustainability and operational efficiency. Among the measures taken, the Company has implemented a fuel management system on all ships through the application of Fuel Consumption Monitoring System, a policy to reduce lightings during the day, installation of eco-friendly bulbs, relevant division and branch. switched off the air

serta mematikan sistem pendingin udara dan pencahayaan ruangan setelah waktu operasional selesai menggunakan teknologi otomatisasi yang membantu mengoptimalkan penggunaan energi. Upaya-upaya ini tidak hanya mendukung tanggung jawab sosial perusahaan terhadap lingkungan, tetapi juga menciptakan efisiensi biaya melalui pengurangan konsumsi energi.

Sepanjang tahun 2023, Perusahaan melakukan pencatatan konsumsi energi BBM untuk operasional kapal yang tercatat sebesar 72.311 kiloliter, menurun dibandingkan tahun 2022 sebesar 74.022 kiloliter. Penurunan konsumsi BBM tersebut didorong oleh berbagai program kerja penghematan energi yang dilakukan secara konsisten di seluruh lini Perusahaan.

PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR

Perusahaan telah mengambil inisiatif aktif untuk mengurangi penggunaan air dengan menerapkan kebijakan dan teknologi yang mendukung keberlanjutan lingkungan. Sebagai contoh, Perusahaan telah menggunakan kran air otomatis untuk mengontrol dan mengurangi pemakaian air. Selain itu, Perusahaan juga berusaha meningkatkan kesadaran karyawan dalam penggunaan air yang bijak melalui pamflet, *campaign* video, dan sosialisasi melalui *email*. Perusahaan tidak hanya mengurangi biaya operasional tetapi juga aktif berpartisipasi untuk menjaga keberlanjutan ketersediaan air bersih dan membangun budaya bijak menggunakan air.

Sepanjang tahun 2023, Perusahaan mencatat penggunaan air untuk operasional kapal yaitu sebesar 1,339,030 m³, meningkat dibandingkan penggunaan air di tahun 2022 sebesar 1,246,192 kiloliter. Peningkatan ini terutama didorong oleh peningkatan jumlah trip di hampir seluruh lintasan Perusahaan.

PENGELOLAAN EMISI UDARA

Perusahaan menyadari bahwa aktivitas operasional kapal merupakan salah satu penyumbang emisi yang cukup signifikan bagi lingkungan. Untuk itu, Perusahaan melakukan pengelolaan dan pengendalian emisi yang

conditioning and lighting system after end of operational hours using automation technology that helps optimize energy use. These efforts not only support corporate social responsibility towards the environment, but also increase cost efficiencies through reduced energy consumption.

Throughout 2023, the Company recorded fuel energy consumption for ship operations at 72,311 kilolitres, a decrease compared to 2022 of 74,022 kilolitres. The reduction in fuel consumption was driven by consistent energy saving work programs carried out across the Company.

WATER RESOURCES MANAGEMENT

The Company has taken active initiatives to reduce water use by implementing policies and technologies that support environmental sustainability. For example, the Company installed automatic water taps to control and reduce water usage. In parallel, the Company has also deployed a campaign to increase employee awareness of wise water use through media of pamphlets, video campaigns, and email. By adopting both technological and awareness campaign, the Company managed to reduce operational costs while actively participated in maintaining the sustainable availability of clean water and building a culture of wise water use.

Throughout 2023, the Company recorded water use for ship operations of 1,339,030 m³, an increase compared to 2022 water use of 1,246,192 kilolitres. This increase was due to increase number of trips on majority of the Company's routes.

AIR EMISSION MANAGEMENT

The Company realizes that ship operational activities are a significant contributor to emissions to the environment. Hence, the Company manages and controls the emissions produced through various steps of monitor, measure,

dihasilkan melalui berbagai langkah yaitu melalui pemantauan dan pengukuran emisi yang dihasilkan untuk memastikan bahwa emisi yang dihasilkan sesuai dengan baku mutu lingkungan yang berlaku. Perusahaan juga mulai melakukan penggunaan energi berkelanjutan baik pada operasional di pelabuhan dan kapal. Untuk operasional pelabuhan dan kapal, Perusahaan telah mengimplementasikan Anjungan Listrik Mandiri (ALMA) atau Stasiun Pengisian Listrik Kapal Sandar (SPLiKS) untuk menghubungkan penggunaan listrik dari darat pada saat kapal sedang sandar istirahat/off dengan durasi di atas 4 jam per hari sehingga dapat mengurangi pemakaian BBM untuk generator. Perusahaan juga telah menggunakan bahan bakar ramah lingkungan untuk kapal yaitu B30 yang merupakan bahan bakar biodiesel dengan campuran minyak nabati sebesar 30%. Kemudian di area kantor, Perusahaan telah menggunakan PLTS di Gedung Eksekutif Pelabuhan Merak dan Bakauheni.

Di samping itu, guna mendukung pengurangan emisi gas buang, Perusahaan juga telah menyediakan SPKLU di beberapa pelabuhan untuk mendukung program elektrifikasi kendaraan bermotor. Selain itu, Perusahaan juga mulai menggunakan kendaraan elektrik yang diperuntukkan bagi Direksi untuk mendukung program Pemerintah dan Kementerian BUMN dalam mendorong penggunaan kendaraan elektrik di lingkungan pemerintahan dan BUMN. Pada tahun 2023, Perusahaan juga menggelar aksi penanaman pohon sebanyak 4.050 bibit pohon di 27 cabang dalam rangka memperingati HUT ke-78 RI dan Hari Konservasi Alam Nasional.

Untuk memastikan pengelolaan emisi yang terukur, Perusahaan melakukan pendataan emisi terutama dari operasional kapal sebagai kontributor emisi terbesar. Sepanjang tahun 2023, emisi yang dihasilkan dari operasional kapal untuk yaitu sebesar 191.188 ton CO₂ eq, lebih rendah dibandingkan emisi tahun 2022 sebesar 200.599 ton CO₂ eq. Penurunan emisi ini salah satunya didorong oleh program efisiensi BBM yang dilakukan sebagai wujud komitmen Perusahaan dalam mengurangi dampak pencemaran udara.

and ensure that the emissions produced comply with applicable environmental quality standards. The Company has begun to shift to sustainable energy resources in both port and ship operations. For port and ship operations, the Company installed automated electric charging machine (ALMA) or ship docking electric charging station (SPLiKS) to promote electricity usage on land when the ship docks for longer than 4 hours per day in order to reduce fuel consumption used for generators. The Company has also switched to environmentally friendly fuel for ships, named B30, which is biodiesel fuel containing 30% vegetable oil. In the office areas, the Company has used solar power in the Merak and Bakauheni Ports Executive Buildings.

In addition, to support the reduction of exhaust emissions, the Company has installed Public Electric Vehicle Charging Station (SPKLU) at several ports to support the motor vehicle electrification program. Moreover, the Company also shifted vehicles intended for Directors to electric cars in efforts to support the Government and Ministry of SOEs programs in encouraging the use of electric vehicles in government and SOEs environments. In 2023, the Company organized tree planting action whereby 4,050 tree seedlings were planted in 27 branch offices to commemorate the 78th Anniversary of Indonesian Independence Day and National Nature Conservation Day.

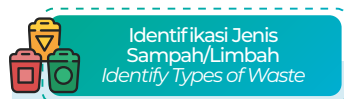
To ensure measurable emissions management, the Company collects emissions data, especially from ship operations as the largest emissions contributor. Throughout 2023, emissions from ship operations amounted to 191,188 tons of CO₂ equivalent, lower than 2022 emissions of 200,599 tons of CO₂ equivalent. The reduced emissions was partly driven by the fuel efficiency program carried out in the Company's commitment to reduce air pollution impact.

PENGELOLAAN LIMBAH

Kegiatan operasional pelabuhan dan penyeberangan berkontribusi terhadap limbah yang dihasilkan sehingga berpotensi mencemari lingkungan. Oleh karena itu, Perusahaan berkomitmen untuk bertanggung jawab atas segala limbah yang diproduksi dengan membuat skema pengelolaan limbah yang sistematis untuk mendorong praktek pengelolaan limbah yang berkelanjutan, serta menciptakan kesadaran dan partisipasi aktif kru kapal dalam upaya pelestarian lingkungan melalui pengurangan limbah. Perusahaan melakukan identifikasi klasifikasi limbah untuk mengetahui potensi pencemaran yang mungkin terjadi, selanjutnya dilakukan pengelompokan jenis limbah berdasarkan kategori tertentu untuk kemudian dilakukan penanganan sebelum akhirnya dilakukan pembuangan setelah memenuhi persyaratan pembuangan limbah dan dilakukan sesuai batas wilayah yang telah ditetapkan pada peraturan dan standar internasional.

WASTE MANAGEMENT

Port and ferry operational activities contribute to waste production, which has the potential to pollute the environment. Therefore, the Company is committed to take responsibility for all waste produced by building a systematic waste management scheme to encourage sustainable waste management practices, and create awareness and active participation from ship crews in efforts to preserve the environment through waste reduction. The Company identify waste classifications to determine the potential pollution that may occur. Subsequently, the waste are grouped based on specific categories, then managed prior to disposal to meet the waste disposal criteria, and handled in accordance with the territory borders determined in regulations benchmarked to international standards.



Identifikasi Jenis Sampah/Limbah Identify Types of Waste

Pada tahap ini semua sampah yang dihasilkan dari proses operasional kapal dan pelabuhan diidentifikasi dan dikelompokkan sesuai dengan kategori tertentu.

In this stage, all waste generated from ship and port operational processes is identified and grouped by certain categories.



Penanganan Sampah/Limbah Waste Handling

Pada tahap ini sampah ditampung sesuai dengan kategori jenis sampah dan lokasi/tempat penampungan yang sesuai.

At this stage, waste is collected according to the waste category and appropriate location/area.



Proses Pembuangan Disposal Process

Proses pembuangan limbah, terutama di wilayah perairan, mengacu pada skema batas wilayah pembuangan sampah yang telah disusun berdasarkan peraturan perundangan nasional dan internasional yang berlaku.

The waste disposal process, especially in water, refers to the design of waste disposal border area, which was set based on applicable national and international laws and regulations.

Limbah yang dihasilkan oleh Perusahaan dapat berupa limbah B3 (Bahan Berbahaya & Beracun) maupun non-B3 misalnya limbah dari pelumas dan BBM yang digunakan dalam operasional kapal, limbah makanan dan minuman dari penyediaan kantin maupun yang dihasilkan oleh mitra bisnis maupun limbah lainnya yang terkait dengan aktivitas pelabuhan, penyeberangan, dan usaha aneka jasa.

Waste generated by the Company can be Toxic and Hazardous Materials (B3) or Non-Toxic and Non-Hazardous Materials (non-B3 waste). For example, waste from lubricants and fuel used in ship operations, food and beverage waste from canteen operations by business partners, or other waste related to port, ferry, and miscellaneous services.

Perusahaan telah memiliki TPS limbah B3 di Pelabuhan Bakauheni untuk mitigasi dampak pencemaran terhadap lingkungan. Selain itu, Perusahaan juga melakukan pengelolaan limbah secara mandiri maupun bekerja sama dengan pihak ketiga dalam hal pengangkutan maupun pengolahan sebelum limbah dibuang ke TPS.

Sepanjang tahun 2023, Perusahaan baru melakukan pendataan untuk limbah non-B3 yang tercatat sebesar 2.368,66 ton yang berasal dari 159 kapal yang beroperasi. Pada tahun 2024, Perusahaan tengah berupaya untuk melakukan pendataan limbah B3 agar Perusahaan dapat mengukur potensi risiko pencemaran lingkungan secara lebih akurat dan terukur.

BIAYA PROGRAM KERJA TANGGUNG JAWAB SOSIAL ASPEK LINGKUNGAN HIDUP

Selama tahun 2023, Perusahaan telah berkontribusi tanggung jawab sosial pada lingkungan hidup dengan realisasi biaya sebesar Rp4,36 miliar, yang terdiri atas beberapa program dan kegiatan, seperti program penanaman pohon, penyediaan tong sampah, pembangunan infrastruktur sanitasi, kegiatan *Ocean Clean Up Day*, dan program lingkungan lainnya.

MEKANISME PENGADUAN ASPEK LINGKUNGAN HIDUP

ASDP berkomitmen untuk menindak lanjuti segala laporan dan pengaduan yang diterima, serta melakukan tinjauan lapangan untuk memastikan laporan yang masuk. Perusahaan telah memiliki mekanisme pengaduan yang komunikatif dan terarah dalam menanggapi masalah lingkungan hidup yang terjadi di wilayah operasional Perusahaan. Segala bentuk keluhan dan pengaduan dapat disampaikan melalui saluran yang telah disediakan pada *contact center* (021) 191 atau 08111-021191, serta melalui *email* pelanggan@indonesiaferry.co.id. Seluruh pelaporan yang masuk akan diterima oleh Divisi Pelayanan dan segera ditindaklanjuti oleh Divisi Keselamatan, Kesehatan & Lingkungan. Pengaduan secara langsung juga dapat dilakukan baik melalui petugas di lapangan, kantor cabang, maupun kantor pusat.

The Company has a temporary storage site for hazardous & toxic waste at Bakauheni Harbour to mitigate the impact of pollution on the environment. Apart from that, the Company also manages waste independently or collaborates with third parties for transportation and processing prior to waste disposed into temporary storage areas.

Throughout 2023, the Company collected data only on non-B3 waste, which was recorded at 2,368.66 tons from 159 operating vessels. In 2024, the Company would put endeavours to collect data on B3 waste so that the Company would be able to measure the potential risk of environmental pollution more accurately and quantifiable.

COSTS OF WORK PROGRAM IN SOCIAL RESPONSIBILITY IN ENVIRONMENTAL ASPECTS

During 2023, the Company has contributed to environmental responsibility with realized disbursed costs amounting to Rp4.36 billion. It consisted of several programs and activities, such as the tree planting program, trash cans furnishing, construction of sanitation infrastructures, and *Ocean Clean Up Day* activities, and other environmental programs

COMPLAINT MECHANISM FOR ENVIRONMENTAL ASPECTS

ASDP is committed to follow up on all reports and complaints received, as well as conducting field reviews to confirm the reports received. The Company has a communicative and targeted complaint mechanism in responding to environmental issues that occur in the Company's operational areas. All forms of complaints can be submitted via the mediums provided: contact center at (021) 191 or 08111-021191, and via email at pelanggan@indonesiaferry.co.id. Every reports will be received by the Service Division and will be immediately followed up by the Safety, Health & Environment Division. Direct complaints can also be made through officers in the field, branch offices or head office.

REFERENSI SEOJK NO.16/ SEOJK.04/2021

REFERENCE OF SEOJK NO.16/SEOJK.04/2021

No.	Materi dan Penjelasan	Description	Halaman Page																																		
Umum General																																					
1	Laporan Tahunan dicetak dengan kualitas yang baik dan menggunakan jenis dan ukuran huruf yang mudah dibaca.	The Annual Report is printed in good quality and uses legible font and size.	√																																		
2	Laporan Tahunan harus dapat diperbanyak dalam bentuk salinan dokumen cetak dan salinan dokumen elektronik.	The Annual Report can be reproduced in printed and electronic copies.	√																																		
3	Laporan Tahunan disajikan dalam Bahasa Indonesia yang baik dan benar dan minimal 1 (satu) bahasa asing yaitu Bahasa Inggris, dengan muatan informasi yang sama.	The Annual Report is presented in proper Indonesian and at least 1 (one) foreign language, namely English, with the same information content.	√																																		
4	Laporan Tahunan ditampilkan di situs web perusahaan.	The Annual Report is displayed on the company website.	√																																		
Ikhtisar Data Keuangan Penting Summary of Key Financial Information																																					
Ikhtisar data keuangan penting memuat informasi keuangan yang disajikan dalam bentuk perbandingan selama 3 (tiga) tahun buku atau sejak memulai usahanya jika Emiten atau Perusahaan Publik tersebut menjalankan kegiatan usahanya kurang dari 3 (tiga) tahun, paling sedikit memuat: Summary of key financial information contains financial information presented in 3 (three) fiscal year comparisons or since the commencement of the business if the Issuer or Public Company started its business for less than 3 (three) years, and at least contain: <table><tr><td>a. Pendapatan/penjualan;</td><td>a. Revenue/Sales;</td></tr><tr><td>b. Laba bruto;</td><td>b. Gross profit;</td></tr><tr><td>c. Laba (rugi);</td><td>c. Profit (loss);</td></tr><tr><td>d. Jumlah laba (rugi) yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk dan kepentingan non pengendali;</td><td>d. Total profit (loss) attributable to equity holders of the parent entity and non-controlling interest;</td></tr><tr><td>e. Total laba (rugi) komprehensif;</td><td>e. Total comprehensive profit (loss);</td></tr><tr><td>f. Jumlah laba (rugi) komprehensif yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk dan kepentingan non pengendali;</td><td>f. Total comprehensive profit (loss) attributable to equity holders of the parent entity and noncontrolling interest;</td></tr><tr><td>g. Laba (rugi) per saham;</td><td>g. Earning (loss) per share;</td></tr><tr><td>h. Jumlah aset;</td><td>h. Total assets;</td></tr><tr><td>i. Jumlah liabilitas;</td><td>i. Total liabilities;</td></tr><tr><td>j. Jumlah ekuitas;</td><td>j. Total equities;</td></tr><tr><td>k. Rasio laba (rugi) terhadap jumlah aset;</td><td>k. Profit (loss) to total assets ratio;</td></tr><tr><td>l. Rasio laba (rugi) terhadap ekuitas;</td><td>l. Profit (loss) to equities ratio;</td></tr><tr><td>m. Rasio laba (rugi) terhadap pendapatan/ penjualan;</td><td>m. Profit (loss) to income ratio;</td></tr><tr><td>n. Rasio lancar;</td><td>n. Current ratio;</td></tr><tr><td>o. Rasio liabilitas terhadap ekuitas;</td><td>o. Liabilities to equities ratio;</td></tr><tr><td>p. Rasio liabilitas terhadap jumlah aset; dan</td><td>p. Liabilities to total assets ratio; and</td></tr><tr><td>q. Informasi dan rasio keuangan lainnya yang relevan dengan Emiten atau Perusahaan Publik dan jenis industrinya.</td><td>q. Other information or financial ratios relevant to the Issuer or Public Company and the type of industry.</td></tr></table>			a. Pendapatan/penjualan;	a. Revenue/Sales;	b. Laba bruto;	b. Gross profit;	c. Laba (rugi);	c. Profit (loss);	d. Jumlah laba (rugi) yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk dan kepentingan non pengendali;	d. Total profit (loss) attributable to equity holders of the parent entity and non-controlling interest;	e. Total laba (rugi) komprehensif;	e. Total comprehensive profit (loss);	f. Jumlah laba (rugi) komprehensif yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk dan kepentingan non pengendali;	f. Total comprehensive profit (loss) attributable to equity holders of the parent entity and noncontrolling interest;	g. Laba (rugi) per saham;	g. Earning (loss) per share;	h. Jumlah aset;	h. Total assets;	i. Jumlah liabilitas;	i. Total liabilities;	j. Jumlah ekuitas;	j. Total equities;	k. Rasio laba (rugi) terhadap jumlah aset;	k. Profit (loss) to total assets ratio;	l. Rasio laba (rugi) terhadap ekuitas;	l. Profit (loss) to equities ratio;	m. Rasio laba (rugi) terhadap pendapatan/ penjualan;	m. Profit (loss) to income ratio;	n. Rasio lancar;	n. Current ratio;	o. Rasio liabilitas terhadap ekuitas;	o. Liabilities to equities ratio;	p. Rasio liabilitas terhadap jumlah aset; dan	p. Liabilities to total assets ratio; and	q. Informasi dan rasio keuangan lainnya yang relevan dengan Emiten atau Perusahaan Publik dan jenis industrinya.	q. Other information or financial ratios relevant to the Issuer or Public Company and the type of industry.	16 - 18
a. Pendapatan/penjualan;	a. Revenue/Sales;																																				
b. Laba bruto;	b. Gross profit;																																				
c. Laba (rugi);	c. Profit (loss);																																				
d. Jumlah laba (rugi) yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk dan kepentingan non pengendali;	d. Total profit (loss) attributable to equity holders of the parent entity and non-controlling interest;																																				
e. Total laba (rugi) komprehensif;	e. Total comprehensive profit (loss);																																				
f. Jumlah laba (rugi) komprehensif yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk dan kepentingan non pengendali;	f. Total comprehensive profit (loss) attributable to equity holders of the parent entity and noncontrolling interest;																																				
g. Laba (rugi) per saham;	g. Earning (loss) per share;																																				
h. Jumlah aset;	h. Total assets;																																				
i. Jumlah liabilitas;	i. Total liabilities;																																				
j. Jumlah ekuitas;	j. Total equities;																																				
k. Rasio laba (rugi) terhadap jumlah aset;	k. Profit (loss) to total assets ratio;																																				
l. Rasio laba (rugi) terhadap ekuitas;	l. Profit (loss) to equities ratio;																																				
m. Rasio laba (rugi) terhadap pendapatan/ penjualan;	m. Profit (loss) to income ratio;																																				
n. Rasio lancar;	n. Current ratio;																																				
o. Rasio liabilitas terhadap ekuitas;	o. Liabilities to equities ratio;																																				
p. Rasio liabilitas terhadap jumlah aset; dan	p. Liabilities to total assets ratio; and																																				
q. Informasi dan rasio keuangan lainnya yang relevan dengan Emiten atau Perusahaan Publik dan jenis industrinya.	q. Other information or financial ratios relevant to the Issuer or Public Company and the type of industry.																																				

No.	Materi dan Penjelasan	Description	Halaman Page
Informasi Saham Stock Information			
Informasi saham (jika ada) paling sedikit memuat: Stock information (if any) contains at least:			
1	Saham yang telah diterbitkan untuk setiap masa triwulan yang disajikan dalam bentuk perbandingan selama 2 (dua) tahun buku terakhir, paling sedikit memuat: a. Jumlah saham yang beredar; b. Volume perdagangan pada bursa efek tempat saham dicatatkan; c. Harga saham tertinggi, terendah, dan penutupan berdasarkan harga pada bursa efek tempat saham dicatatkan; dan d. Volume perdagangan pada bursa efek tempat saham dicatatkan.	Shares issued for every quarter presented in a comparative format for the last 2 fiscal years, covering at least: a. Number of outstanding shares; b. Market capitalization based on the price at the stock exchange where the shares are listed on; c. Highest, lowest, and closing share prices at the stock exchange where the shares are listed on; and d. Trading volume at the stock exchange where the shares are listed on.	122-123
2	Dalam hal terjadi Aksi Korporasi, seperti pemecahan saham (<i>stock split</i>), penggabungan saham (<i>reverse stock</i>), dividen saham, saham bonus, dan perubahan nilai nominal saham, penerbitan efek konversi, serta penambahan dan pengurangan modal informasi saham sebagaimana dimaksud pada angka 1) ditambahkan penjelasan paling sedikit mengenai: a. Tanggal pelaksanaan aksi korporasi; b. Rasio pemecahan saham, penggabungan saham, dividen saham, saham bonus, jumlah efek konversi yang diterbitkan, dan perubahan nilai nominal saham; c. Jumlah saham beredar sebelum dan sesudah aksi korporasi; dan d. Jumlah efek konversi yang dilaksanakan (jika ada); dan e. Harga saham sebelum dan sesudah aksi korporasi.	In the event of Corporate Actions, such as stock split, reverse stock, stock dividend, bonus share, and change in the nominal value of shares, issuance of convertible securities, as well as capital additions and deductions, stock information as referred to in point 1) shall be added with explanation on: a. Date of corporate action; b. Ratios of stock split, reverse stock, stock dividend, bonus share and changes in the nominal value of shares; c. Number of outstanding shares before and after corporate action; d. Amount of convertible bonds/stocks exercised (if any); and e. Share price before and after corporate action.	122-123
3	Dalam hal terjadi penghentian sementara perdagangan saham, dan/atau penghapusan pencatatan saham dalam tahun buku, Emiten atau Perusahaan Publik menjelaskan alasan penghentian sementara perdagangan saham dan/atau pembatalan pencatatan saham tersebut.	In the event of a temporary suspension of share trading (suspension) and/or delisting in the fiscal year, the Issuer or Public Company provides explanation on the reason for the suspension and/or delisting;	122-123
4	Dalam hal penghentian sementara perdagangan saham sebagaimana dimaksud pada angka 3) dan/atau proses pembatalan pencatatan saham masih berlangsung hingga akhir periode Laporan Tahunan, Emiten atau Perusahaan Publik menjelaskan tindakan yang dilakukan untuk menyelesaikan penghentian sementara perdagangan saham dan/atau penghapusan pencatatan saham tersebut.	In the event that the temporary suspension of share trading as referred to in point 3) and/or the delisting is still effect until the date of the annual report period, Issuer or Public Company should explains the actions taken to resolve the temporary suspension of share trading and/or delisting.	122-123

No.	Materi dan Penjelasan	Description	Halaman Page
Laporan Direksi The Board Of Directors Report			
Laporan Direksi paling sedikit memuat uraian singkat mengenai: The Board of Directors report should at least contain:			
1	Kinerja Emiten atau Perusahaan Publik, paling sedikit memuat: a. Strategi dan kebijakan strategis Emiten atau Perusahaan Publik; b. Peranan Direksi dalam perumusan strategi dan kebijakan strategis Emiten atau Perusahaan Publik; c. Proses yang dilakukan Direksi untuk memastikan implementasi strategi Emiten atau Perusahaan Publik; d. Perbandingan antara hasil yang dicapai dengan yang ditargetkan Emiten atau Perusahaan Publik; dan e. Kendala yang dihadapi Emiten atau Perusahaan Publik.	The performance of the Issuer or Public Company, at least covers: a. Strategy and strategic policies of the Issuer or Public Company; b. Role of the Board of Directors in formulating strategies and strategic policies of Issuer or Public Company; c. Process carried out by the Board of Directors to ensure the implementation of the Issuer's or Public Company's strategies; d. Comparison between results achieved and targets by the Issuer or Public Company; and e. Challenges faced by the Issuer or Public Company.	40-56
2	Gambaran tentang prospek usaha Emiten atau Perusahaan Publik; dan	Description of business prospects of the Issuer or Public Company; and	40-56
3	Penerapan tata kelola Emiten atau Perusahaan Publik.	implementation of governance of the Issuer or Public Company.	40-56
Laporan Dewan Komisaris The Board Of Commissioners Report			
Laporan Dewan Komisaris paling sedikit memuat uraian singkat mengenai: The Board Of Commissioners report should at least contain:			
1	Penilaian terhadap kinerja Direksi mengenai pengelolaan Emiten atau Perusahaan Publik, termasuk pengawasan Dewan Komisaris dalam perumusan dan implementasi strategi Emiten atau Perusahaan Publik yang dilakukan oleh Direksi;	Evaluation of the performance of the Board of Directors on the management of Issuer or Public Company, including the supervision of the Board Of Commissioners in the formulation and of strategy implementation of Issuer or Public Company carried out by the Board of Directors;	26-38
2	Pandangan atas prospek usaha Emiten atau Perusahaan Publik yang disusun oleh Direksi; dan	Views on the business prospects of the Issuer or Public Company prepared by the Board of Directors; and	26-38
3	Pandangan atas penerapan tata kelola Emiten atau Perusahaan Publik.	Views on the implementation of governance of the Issuer or Public Company.	26-38
Profil Emiten atau Perusahaan Publik Profile of the Issuer or Public Company			
Profil Emiten atau Perusahaan Publik paling sedikit memuat informasi: Profile of Issuer or Public Company contains at least the following information:			
1	Nama Emiten atau Perusahaan Publik termasuk apabila terdapat perubahan nama, alasan perubahan, dan tanggal efektif perubahan nama pada tahun buku.	Name of the Issuer or Public Company, including change of name, reason of change, and the effective date of the name change in the fiscal year.	62-63 66-67
2	Akses terhadap Emiten atau Perusahaan Publik termasuk kantor cabang atau kantor perwakilan yang memungkinkan masyarakat dapat memperoleh informasi mengenai Emiten atau Perusahaan Publik, meliputi: a. Alamat; b. Nomor telepon; c. Alamat surat elektronik; dan d. Alamat situs web.	Access to Issuer or Public Company, including branch offices or representative offices, where public can access information about Issuer or Public Company, including: a. Address; b. Telephone number; c. E-mail address; and d. Website address.	63
3	Riwayat singkat Emiten atau Perusahaan Publik.	Brief history of the Issuer or Public Company.	64-65
4	Visi dan misi Emiten atau Perusahaan Publik serta budaya perusahaan (<i>corporate culture</i>) atau nilai-nilai perusahaan.	Vision, mission and the corporate culture or values of the Issuer or Public Company.	72-74
5	Kegiatan usaha menurut anggaran dasar terakhir, kegiatan usaha yang dijalankan pada tahun buku, serta jenis barang dan/atau jasa yang dihasilkan.	Line of business according to the latest articles of association, business activities carried out in the fiscal year, and types of goods and/or services produced.	75-76

No.	Materi dan Penjelasan	Description	Halaman Page
6	Wilayah operasional Emiten atau Perusahaan Publik, wilayah operasional merupakan wilayah atau daerah pelaksanaan kegiatan operasional atau jangkauan dari kegiatan operasional perusahaan.	Operational area of the Issuer or Public Company; operational area that is the area of the implemented operational activities or the extent of the company's operational activities.	77-79
7	Struktur Organisasi Emiten atau Perusahaan Publik dalam bentuk bagan, paling sedikit sampai dengan struktur 1 (satu) tingkat di bawah Direksi termasuk komite di bawah Direksi (jika ada) dan komite di bawah Dewan Komisaris, disertai dengan nama dan jabatan.	Structure of organization of the Issuer or Public Company in chart format, at least covering one level below the Board of Directors, including committees under the Board of Directors (if any) and under the Board of Commissioners, with the names and titles.	80-81
8	Daftar keanggotaan asosiasi industri baik dalam skala nasional maupun internasional yang berkaitan dengan penerapan keuangan berkelanjutan.	Memberships in industry association both on a national and international scale, related to the implementation of sustainable finance.	133
9	Profil Direksi, paling sedikit memuat: a. Nama dan jabatan yang sesuai dengan tugas dan tanggung jawab; b. Foto terbaru; c. Usia; d. Kewarganegaraan; e. Riwayat pendidikan dan/atau sertifikasi; f. Riwayat jabatan, meliputi informasi: 1. Dasar hukum penunjukan sebagai anggota Komisaris; 2. Rangkap jabatan; dan 3. Pengalaman kerja beserta periode waktunya baik di dalam maupun di luar Emiten atau Perusahaan Publik. g. Hubungan afiliasi dengan anggota Direksi lainnya, anggota Dewan Komisaris, dan pemegang saham utama (jika ada) meliputi nama pihak yang terafiliasi; h. Perubahan komposisi anggota Direksi dan alasan perubahannya. Dalam hal tidak terdapat perubahan komposisi anggota Direksi, maka diungkapkan mengenai hal tersebut.	Profiles of members of the Board of Directors, covering at least: a. Name and position according to duties and responsibilities; b. Recent photograph; c. Age; d. Citizenship; e. Education background and/or certification; f. Employment history, covering information on: 1. Legal basis for the appointment as a member of the Board of Directors; 2. Concurrent positions; and 3. Work experience and term of office in and outside of the Issuer or Public Company. g. Affiliation with other members of the Boards of Directors, Commissioners, the majority shareholders (if any), including the name of the affiliated party; h. Changes and reasons for the change in the composition of the Board of Directors. In the event that there is no change in the composition of the members of the Board of Directors, this matter shall be disclosed.	95-105
10	Profil Dewan Komisaris, paling sedikit memuat: a. Nama dan jabatan yang sesuai dengan tugas dan tanggung jawab; b. Foto terbaru; c. Usia; d. Kewarganegaraan; e. Riwayat pendidikan dan/atau sertifikasi; f. Riwayat jabatan, meliputi informasi: 1. Dasar hukum penunjukan sebagai anggota Komisaris; 2. Rangkap jabatan; dan 3. Pengalaman kerja beserta periode waktunya baik di dalam maupun di luar Emiten atau Perusahaan Publik. g. Hubungan afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, pemegang saham utama, dan pengendali baik langsung maupun tidak langsung sampai kepada pemilik individu, meliputi nama pihak yang terafiliasi; h. Pernyataan independensi Komisaris Independen dalam hal Komisaris Independen telah menjabat lebih dari 2 (dua) periode; i. Perubahan komposisi anggota Dewan Komisaris dan alasan perubahannya.	Profiles of members of the Board of Commissioners, covering at least: a. Name and position according to duties and responsibilities; b. Recent photograph; c. Age; d. Citizenship; e. Education background and/or certification; f. Employment history, covering information on: 1. Legal basis for the appointment as a member of the Board of Commissioners; 2. Concurrent positions; and 3. Work experience and term of office in and outside of the Issuer or Public Company. g. Affiliation with other members of the Boards of Commissioners, major shareholders, and controllers either directly or indirectly to individual owners, including the name of the affiliated party; h. Statement of independence from the Independent Commissioner in the event that the Independent Commissioner has served more than 2 (two) terms; i. Changes in the composition of the members of the Board of Commissioners and the reasons for the changes.	82-93

No.	Materi dan Penjelasan	Description	Halaman Page
11	Dalam hal terdapat perubahan susunan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang terjadi setelah tahun buku berakhir sampai dengan batas waktu penyampaian Laporan Tahunan, susunan yang dicantumkan dalam Laporan Tahunan adalah susunan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang terakhir dan sebelumnya.	In the event that there were changes to the composition of the Board of Directors and/or the Board of Commissioners that occurred after the end of the fiscal year up to the deadline for submitting the Annual Report, the composition included in the Annual Report is the last and previous composition of the Board of Directors and/or the Board of Commissioners.	37 & 55
12	Jumlah Karyawan menurut jenis kelamin, jabatan, usia, tingkat pendidikan, dan status ketenagakerjaan (tetap/kontrak) dalam tahun buku.	Employees statistics by gender, position, age, education level, and employment status (permanent/contracted) in the fiscal year.	112-116
13	Nama Pemegang Saham dan persentase kepemilikan pada awal dan akhir tahun buku, yang terdiri dari: a. Pemegang saham yang memiliki 5% (lima persen) atau lebih saham Emiten atau Perusahaan Publik; b. Anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris yang memiliki saham Emiten atau Perusahaan Publik; dan c. Kelompok pemegang saham masyarakat, yaitu kelompok pemegang saham yang masing-masing memiliki kurang dari 5% (lima persen) saham Emiten atau Perusahaan Publik.	Names of Shareholders and percentage of ownership at the beginning and end of the fiscal year, which consists of: a. Shareholders who own 5% (five percent) or more shares of the Issuer or Public Company; b. Members of the Board of Directors and Commissioners who own shares of the Issuer or Public Company; and c. Community shareholder group, namely the group of shareholders who each own less than 5% (five percent) of the shares of the Issuer or Public Company.	122-123
14	Persentase kepemilikan tidak langsung atas saham Emiten atau Perusahaan Publik oleh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris pada awal dan akhir tahun buku, termasuk informasi mengenai pemegang saham yang terdaftar dalam daftar pemegang saham untuk kepentingan kepemilikan tidak langsung anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris.	The percentage of indirect ownership of the shares of the Issuer Or Public Company by members of the Boards of Directors and the Board of Commissioners at the beginning and end of the fiscal year, including information on registered shareholders for the benefit of indirect ownership of members of the Board of Directors and the Board of Commissioners.	123
15	Jumlah Pemegang Saham dan persentase kepemilikan per akhir tahun buku berdasarkan klasifikasi: a. Kepemilikan institusi lokal; b. Kepemilikan institusi asing; c. Kepemilikan individu lokal; dan d. Kepemilikan individu asing.	Number of Shareholders and percentage of ownership at the end of the fiscal year based on classification: a. Ownership in local institutions; b. Ownership in foreign institutions; c. Local individual ownership; and d. Foreign individual ownership;	123
16	Informasi mengenai pemegang saham utama dan pengendali Emiten atau Perusahaan Publik, baik langsung maupun tidak langsung, sampai kepada pemilik individu, yang disajikan dalam bentuk skema atau bagan;	Information regarding the majority and controlling shareholders of the Issuer or Public Company, either directly or indirectly, up to the individual owner, which is presented in the chart or schematic format.	123
17	Nama Entitas Anak, Perusahaan Asosiasi, Perusahaan Ventura Bersama dimana Emiten atau Perusahaan Publik memiliki pengendalian bersama entitas (jika ada), beserta persentase kepemilikan saham, bidang usaha, total aset, dan status operasi entitas anak, perusahaan asosiasi, perusahaan ventura bersama tersebut. Untuk entitas anak, ditambahkan informasi mengenai alamat entitas anak tersebut.	The name of the Subsidiary, Associate, Joint Venture company where the Issuer or Public Company has joint control of the entity (if any), and with the percentage of share ownership, line of business, total assets, and operating status of the subsidiary, associate company, joint venture company. For a subsidiary, information about the address of the subsidiary is added.	125-129

No.	Materi dan Penjelasan	Description	Halaman Page
18	Kronologi Pencatatan Saham, jumlah saham, nilai nominal, dan harga penawaran dari awal pencatatan hingga akhir tahun buku serta nama Bursa Efek di mana saham Emiten atau Perusahaan Publik dicatatkan, termasuk pemecahan saham (<i>stock split</i>), penggabungan saham (<i>reverse stock</i>), dividen saham, saham bonus, dan perubahan nilai nominal saham, pelaksanaan efek konversi, pelaksanaan penambahan dan pengurangan modal (jika ada).	Chronology of Share Listing, number of shares, nominal value, and offering price from the beginning of listing to the end of the fiscal year as well as the name of the Stock Exchange where the shares of the Issuer or Public Company are listed, including stock splits, reverse stock, dividends shares, bonus shares, and changes in the nominal value of shares, implementation of conversion effects, implementation of capital additions and removal (if any).	130
19	Informasi pencatatan Efek lainnya selain Efek sebagaimana dimaksud pada angka 18, yang belum jatuh tempo paling sedikit memuat nama Efek, tahun penerbitan, tingkat suku bunga/imbal hasil, tanggal jatuh tempo, nilai penawaran, dan peringkat Efek (jika ada).	Information on securities listing other than the securities as referred to in point 18), which have not matured, at least contain the name of the securities, year of issue, interest rate/yield, maturity date, offering value, and securities rating (if any).	130
20	Informasi Penggunaan Jasa Akuntan Publik (AP) dan Kantor Akuntan Publik (KAP) beserta jaringan/asosiasi/aliansinya meliputi: a. Nama dan alamat; b. Periode penugasan; c. Informasi jasa audit dan/atau non audit yang diberikan; d. Biaya jasa (<i>fee</i>) audit dan/atau non audit untuk masing-masing penugasan yang diberikan selama tahun buku; dan e. Dalam hal AP dan KAP beserta jaringan/asosiasi/aliansinya, yang ditunjuk tidak memberikan jasa non audit, maka diungkapkan mengenai informasi tersebut.	Information on the use of a Public Accountant (AP) and a Public Accounting Firm (KAP) services and their networks/associations/alliances including: a. Name and address; b. Assignment period; c. Information on audit and/or non-audit services provided; d. Audit and/or non-audit fees for each assignment given during the fiscal year; and e. In the event that AP and KAP and their network/association/alliance, which are appointed to not provide non-audit services, then the information is disclosed.	130
21	Nama dan alamat Lembaga dan/atau Profesi Penunjang Pasar Modal selain AP dan KAP.	Name and address of Capital Market Supporting Institutions and/or Professions other than AP and KAP.	131
Analisis dan Pembahasan Manajemen Management Discussion and Analysis			
1	Tinjauan Operasi per Segmen operasi sesuai dengan jenis industri Emiten atau Perusahaan Publik, paling sedikit mengenai: a. Produksi, yang meliputi proses, kapasitas, dan perkembangannya; b. Pendapatan/penjualan; dan c. Profitabilitas.	Operational review per segment of operations according to the type of industry of the Issuer or Public Company, containing at least: a. Production, including process, capacity, and growth; b. Sales/revenue; and c. Profitability.	166-173
2	Kinerja Keuangan Komprehensif yang mencakup perbandingan kinerja keuangan dalam 2 (dua) tahun buku terakhir, penjelasan tentang penyebab adanya perubahan dan dampak perubahan tersebut, paling sedikit mengenai: a. Aset lancar, aset tidak lancar, dan total asset; b. Liabilitas jangka pendek, liabilitas jangka panjang, dan total liabilitas; c. Ekuitas; d. Pendapatan/penjualan, beban, laba (rugi), penghasilan komprehensif lain, dan total laba (rugi) komprehensif; dan e. Arus kas.	A comprehensive analysis on the financial statements that includes a comparison between the financial performance of the last 2 (two) financial years, and explanation on the causes and impact of such changes, at least covering: a. Current assets, non-current assets, and total assets; b. Short-term liabilities, long-term liabilities and total liabilities; c. Equities; d. Revenue/sales, expenses, profit (loss), other comprehensive income, and total comprehensive profit (loss), and e. Cash flows.	174-194
3	Kemampuan Membayar Utang atau Kewajiban dengan menyajikan perhitungan rasio yang relevan.	Ability to pay debts or obligations by providing the relevant ratios.	195-197
4	Tingkat Kolektibilitas Piutang Emiten atau Perusahaan Publik dengan menyajikan perhitungan rasio yang relevan.	Account receivables collectability of the Issuer or Public Company by presenting the relevant ratios.	197-200

No.	Materi dan Penjelasan	Description	Halaman Page
5	Struktur modal dan kebijakan manajemen atas struktur modal tersebut disertai dasar penentuan kebijakan dimaksud.	Capital structure and management policies on the capital structure, including the basis for the policy.	201-202
6	Bahasan mengenai Ikatan yang Material untuk Investasi Barang Modal dengan penjelasan paling sedikit meliputi: a. Tujuan dari ikatan tersebut; b. Sumber dana yang diharapkan untuk memenuhi ikatan tersebut; c. Mata uang yang menjadi denominasi; dan d. Langkah yang direncanakan Emiten atau Perusahaan Publik untuk melindungi risiko dari posisi mata uang asing yang terkait	Discussion of material ties for capital goods investment with information on at least: a. The purpose of the bond; b. The expected source of funds to fulfill the commitment; c. Currency of denomination; and d. Measures taken by the Issuer or Public Company to protect the position of a related foreign currency against risk.	218
7	Bahasan mengenai Investasi Barang Modal yang Direalisasikan dalam tahun buku terakhir, paling sedikit meliputi: a. Jenis investasi barang modal; b. Tujuan investasi barang modal; dan c. Nilai investasi barang modal yang dikeluarkan.	Discussion of capital goods investments realized in the last fiscal year, at least contains: a. Type of capital goods investment; b. Purpose of capital goods investment; and c. Value of capital goods investments.	218
8	Informasi dan Fakta Material yang Terjadi setelah Tanggal Laporan Akuntan (jika ada).	Material information and fact occurring after the date of the accountant's report (if any).	231
9	Prospek usaha dari Emiten atau Perusahaan Publik dikaitkan dengan kondisi industri, ekonomi secara umum dan pasar internasional disertai data pendukung kuantitatif dari sumber data yang layak dipercaya.	Information on the prospect of the Issuer or Public Company in connection with the condition of the industry, economy in general and the international market, supported with quantitative data from reliable sources.	236-239
10	Perbandingan antara Target/Proyeksi pada awal tahun buku dengan hasil yang dicapai (realisasi), mengenai: a. Pendapatan/penjualan; b. Laba (rugi); c. Struktur modal; atau d. Hal lainnya yang dianggap penting bagi Emiten atau Perusahaan Publik.	Comparison between the target/projection at the beginning of the fiscal year with the results achieved, regarding: a. Revenue/sales; b. Profit (loss); c. Capital structure; or d. Other matters deemed important to the Issuer or Public Company.	205-213
11	Target/Proyeksi yang ingin dicapai Emiten atau Perusahaan Publik untuk 1 (satu) tahun mendatang, mengenai: a. Pendapatan/penjualan; b. Laba (rugi); c. Struktur modal; atau d. Hal lainnya yang dianggap penting bagi Emiten atau Perusahaan Publik.	Targets/projections to be achieved by the Issuer or Public Company for the next 1 (one) year, regarding: a. Revenue/sales; b. Profit (loss); c. Capital structure; d. Other matters deemed important to the Issuer or Public Company.	205-213
12	Aspek Pemasaran atas barang dan/atau jasa Emiten atau Perusahaan Publik, paling sedikit mengenai strategi pemasaran dan pangsa pasar.	Marketing aspects of the goods and/or services of the Issuer or Public Company, at least regarding the marketing strategy and market share.	164-165
13	Uraian mengenai Dividen selama 2 (dua) tahun buku terakhir (jika ada), paling sedikit memuat: a. Kebijakan dividen; b. Tanggal pembayaran dividen kas dan/atau tanggal distribusi dividen non kas; c. Jumlah dividen per saham (kas dan/atau non kas); dan d. Jumlah dividen per tahun yang dibayar.	Description of Dividends for the last 2 (two) fiscal years, at least: a. Dividend policy; b. Date of payment of cash dividends and/or date of distribution of non-cash dividends; c. Amount of dividends per share (cash and/or non-cash); and d. Amount of dividends distributed per year.	216-217

No.	Materi dan Penjelasan	Description	Halaman Page
14	Realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum, dengan ketentuan: - Dalam hal selama tahun buku, Emiten memiliki kewajiban menyampaikan laporan realisasi penggunaan dana, maka diungkapkan realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum secara kumulatif sampai dengan akhir tahun buku; dan - Dalam hal terdapat perubahan penggunaan dana sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai laporan realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum, maka Emiten menjelaskan perubahan tersebut.	Realization of the use of proceeds from the public offering, provided that: - During the fiscal year, the Issuer has an obligation to report the realization of the use of proceeds, then the realization of the cumulative use of the proceeds from the public offering shall be disclosed until the end of the fiscal year; and - In the event that there were changes in the use of funds as regulated in the Financial Services Authority Regulation regarding the report on the realization of the use of the proceeds from the public offering, the Issuer shall explain the change.	230
15	Informasi material (jika ada), antara lain mengenai investasi, ekspansi, divestasi, penggabungan/peleburan usaha, akuisisi, restrukturisasi utang/modal, transaksi material, transaksi afiliasi, dan transaksi benturan kepentingan, yang terjadi pada tahun buku, paling sedikit memuat: Tanggal, nilai, dan objek transaksi; - Tanggal, nilai, dan objek transaksi; - Nama pihak yang melakukan transaksi; - Sifat hubungan afiliasi (jika ada); - Penjelasan mengenai kewajaran transaksi; - Pemenuhan ketentuan terkait; dan - Dalam hal terdapat hubungan afiliasi, selain mengungkapkan informasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a) sampai dengan huruf e), Emiten atau Perusahaan Publik juga mengungkapkan informasi: - Pernyataan Direksi bahwa transaksi afiliasi telah melalui prosedur yang memadai untuk memastikan bahwa transaksi afiliasi dilaksanakan sesuai dengan praktik bisnis yang berlaku umum antara lain dilakukan dengan memenuhi prinsip transaksi yang wajar (armslength principle); dan - Peran Dewan Komisaris dan Komite Audit dalam melakukan prosedur yang memadai untuk memastikan bahwa transaksi afiliasi dilaksanakan sesuai dengan praktik bisnis yang berlaku umum antara lain dilakukan dengan memenuhi prinsip transaksi yang wajar (armslength principle); - Untuk transaksi afiliasi atau transaksi material yang merupakan kegiatan usaha yang dijalankan dalam rangka menghasilkan pendapatan usaha dan dijalankan secara rutin, berulang, dan/atau berkelanjutan, ditambahkan penjelasan bahwa transaksi afiliasi atau transaksi material tersebut merupakan kegiatan usaha yang dijalankan dalam rangka menghasilkan pendapatan usaha dan dijalankan secara rutin, berulang, dan/atau berkelanjutan; - Untuk pengungkapan transaksi afiliasi dan/atau transaksi benturan kepentingan yang merupakan hasil pelaksanaan transaksi afiliasi dan/atau transaksi benturan kepentingan yang telah disetujui pemegang saham independen, ditambahkan informasi mengenai tanggal pelaksanaan RUPS yang menyetujui transaksi afiliasi dan/atau transaksi benturan kepentingan tersebut; - Dalam hal tidak terdapat transaksi afiliasi dan/atau transaksi benturan kepentingan, maka diungkapkan mengenai hal tersebut.	Material information (if any), regarding investment, expansion, divestment, business merger/consolidation, acquisition, debt/capital restructuring, material transactions, affiliated transactions, and transactions with conflict of interest, which occurred during the fiscal year, at least covering: - Date, value, and object of the transaction; - Name of the transacting parties; - Nature of the affiliation (if any); - Explanation of the fairness of the transaction; - Compliance with related provisions; and - In the event that there is an affiliation relationship, in addition to information disclosure as referred to in point a) to e), the Issuer or Public Company also discloses: - Statement from the Board of Directors that the affiliate transaction has gone through adequate procedures to ensure that the affiliate transaction is carried out in accordance with generally accepted business practices, by complying with the arms-length principle; and - The role of the Board of Commissioners and the Audit Committee in carrying out adequate procedures to ensure that affiliated transactions are carried out in accordance with generally accepted business practices, by complying with the arms-length principle; - For affiliated or material transactions which are business activities carried out to generate business income and are carried out regularly, repeatedly, and/or continuously, an explanation is added that the affiliated or material transactions are business activities carried out to generate operating income and carried out regularly, repeatedly, and/or continuously; - For disclosure of affiliated transactions and/or transactions with conflict of interest resulting from the implementation of affiliated transactions and/or transactions with conflict of interest that have been approved by independent shareholders, information regarding the date of the GMS that approved the affiliated transactions and/or conflict of interest transactions is added; - In the event that there is no affiliated transaction and/or transactions with conflict of interest, this matter shall be disclosed.	229-230

No.	Materi dan Penjelasan	Description	Halaman Page
16	Perubahan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berpengaruh signifikan terhadap Emiten atau Perusahaan Publik dan dampaknya terhadap laporan keuangan (jika ada); dan	Changes in the laws and regulations that have a significant effect on Issuer or Public Company and their impact on financial statements (if any).	231
17	Perubahan Kebijakan Akuntansi, alasan dan dampaknya terhadap laporan keuangan (jika ada).	Changes in accounting policies, reasons and impact on financial statements (if any).	234

Tata Kelola Emiten atau Perusahaan Publik | Issuer or Public Company Governance

Tata kelola Emiten atau Perusahaan Publik paling sedikit memuat uraian singkat mengenai:
Issuer or Public Company governance contains a brief description of:

1	RUPS, paling sedikit memuat: a. Informasi mengenai keputusan RUPS pada tahun buku dan 1 (satu) tahun sebelum tahun buku meliputi: 1. Keputusan RUPS pada tahun buku dan 1 (satu) tahun sebelum tahun buku yang direalisasikan pada tahun buku; dan 2. Keputusan RUPS pada tahun buku dan 1 (satu) tahun sebelum tahun buku yang belum direalisasikan beserta alasan belum direalisasikan; b. Dalam hal Emiten atau Perusahaan Publik menggunakan pihak independen dalam pelaksanaan RUPS untuk melakukan perhitungan suara, maka diungkapkan mengenai hal tersebut.	GMS, at least contains: a. Information regarding the resolutions of the GMS in the fiscal year and 1 (one) year prior to the fiscal year covering: 1. Resolutions of the GMS in the fiscal year and 1 (one) year prior that were realized in the fiscal year; and 2. Resolutions of the GMS in the fiscal year and 1 (one) year prior that have not been realized and the reasons; b. In the event that the Issuer or Public Company uses an independent party in the conduct of the GMS to calculate the votes, then this matter shall be disclosed.	250-256
2	Direksi, mencakup antara lain: a. Tugas dan tanggung jawab masing-masing anggota Direksi. Informasi mengenai tugas dan tanggung jawab masing-masing anggota Direksi diuraikan dan dapat disajikan dalam bentuk tabel. b. Pernyataan bahwa Direksi memiliki pedoman atau piagam (charter) Direksi; c. Kebijakan dan pelaksanaan frekuensi rapat Direksi, rapat Direksi bersama Dewan Komisaris, dan tingkat kehadiran anggota Direksi dalam rapat tersebut termasuk kehadiran dalam RUPS. Informasi tingkat kehadiran anggota Direksi dalam rapat Direksi, rapat Direksi bersama Dewan Komisaris, atau RUPS dapat disajikan dalam bentuk tabel. d. Pelatihan dan/atau peningkatan kompetensi anggota Direksi: 1. Kebijakan pelatihan dan/atau peningkatan kompetensi anggota Direksi, termasuk program orientasi bagi anggota Direksi yang baru diangkat (jika ada); dan 2. Pelatihan dan/atau peningkatan kompetensi yang diikuti anggota Direksi dalam tahun buku (jika ada); e. Penilaian Direksi terhadap kinerja komite yang mendukung pelaksanaan tugas Direksi pada tahun buku paling sedikit memuat: 1. Prosedur penilaian kinerja; dan 2. Kriteria yang digunakan seperti capaian kinerja selama tahun buku, kompetensi dan kehadiran dalam rapat; dan f. Dalam hal Emiten atau Perusahaan Publik tidak memiliki komite yang mendukung pelaksanaan tugas Direksi, maka diungkapkan mengenai hal tersebut.	The Board of Directors, at least contains: a. Duties and responsibilities of each member of the Board of Directors; Information regarding the duties and responsibilities of each member of the Board of Directors is described and presented in tabular form. b. Statement that the Board of Directors has guidelines or charter; c. Policies and frequency of the Board of Directors meetings, meetings of the Board of Directors with the Board of Commissioners, and the attendance rate of members of the Board of Directors in the meeting including the GMS. The information can be presented in tabular form; d. Training and/or competency development of members of the Board of Directors: 1. Policies for training and/or competency development of members of the Board of Directors, including an onboarding program for newly appointed members (if any); and 2. Training and/or competency development attended by members of the Board of Directors in the fiscal year (if any); e. The Board of Directors' performance appraisal of the committees that support the execution of the Board of Directors' duties for the fiscal year, at least contain: 1. Performance appraisal procedures; and 2. Criteria used, such as performance achievements during the fiscal year, competence and attendance at meetings; and f. In the event that the Issuer or Public Company does not have any committee to support the implementation of the duties of the Board of Directors, this matter shall be disclosed.	276-289

No.	Materi dan Penjelasan	Description	Halaman Page
3	Dewan Komisaris, paling sedikit memuat: - Tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris; - Pernyataan bahwa Dewan Komisaris memiliki pedoman atau piagam (<i>charter</i>) Dewan Komisaris; - Kebijakan dan pelaksanaan frekuensi rapat Dewan Komisaris, rapat Dewan Komisaris bersama Direksi dan tingkat kehadiran anggota Dewan Komisaris dalam rapat tersebut termasuk kehadiran dalam RUPS. Informasi tingkat kehadiran anggota Dewan Komisaris dalam rapat Dewan Komisaris, rapat Dewan Komisaris bersama Direksi, atau RUPS dapat disajikan dalam bentuk tabel. - Pelatihan dan/atau peningkatan kompetensi anggota Dewan Komisaris: - Kebijakan pelatihan dan/atau peningkatan kompetensi anggota Dewan Komisaris, termasuk program orientasi bagi anggota Dewan Komisaris yang baru diangkat (jika ada); dan - Pelatihan dan/atau peningkatan kompetensi yang diikuti anggota Dewan Komisaris dalam tahun buku (jika ada). - Penilaian kinerja Direksi dan Dewan Komisaris serta masing-masing anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris, paling sedikit memuat: - Prosedur pelaksanaan penilaian kinerja; - Kriteria yang digunakan seperti capaian kinerja selama tahun buku, kompetensi dan kehadiran dalam rapat; dan - Pihak yang melakukan penilaian. - Penilaian Dewan Komisaris terhadap kinerja Komite yang mendukung pelaksanaan tugas Dewan Komisaris pada tahun buku meliputi: - Prosedur penilaian kinerja; dan - Kriteria yang digunakan seperti capaian kinerja selama tahun buku, kompetensi dan kehadiran dalam rapat.	The Board of Commissioners, at least contains: - Duties and responsibilities of the Board of Commissioners; - Statement that the Board of Commissioners has guidelines or charter; - Policies and frequency of meetings of the Board of Commissioners, meetings of the Board of Commissioners with the Board of Directors and the attendance rate of members of the Board of Commissioners in these meetings including the GMS. The information can be presented in tabular form; - Training and/or competency improvement of members of the Board of Commissioners: - Policy on competency training and/or development for members of the Board of Commissioners, including onboarding program for newly appointed members (if any); and - Competency training and/or development attended by members of the Board of Commissioners in the fiscal year (if any). - Performance appraisal of the Boards of Directors and Commissioners as well as each member of the Boards of Directors and Commissioners, at least containing: - Procedures for implementing performance appraisals; - Criteria used, such as performance achievements during the fiscal year, competency and attendance at meetings; and - Party conducting the assessment. - Board of Commissioners' assessment of the performance of the Committees that support the execution of duties of the Board of Commissioners in the fiscal year, includes: - Performance appraisal procedures; and - Criteria use, such as performance achievements during the fiscal year, competency and attendance at meetings.	257-275
4	Nominasi dan Remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris. - Prosedur nominasi, meliputi uraian singkat mengenai kebijakan dan proses nominasi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris; - Prosedur dan pelaksanaan remunerasi Direksi dan Komisaris antara lain: - Prosedur penetapan remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris; - Struktur remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris seperti, gaji, tunjangan, tantiem/bonus dan lainnya; dan - Besarnya remunerasi masing-masing anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris; Pengungkapan informasi dapat disajikan dalam bentuk tabel.	The Nomination and Remuneration of the Boards of Directors and Commissioners. - Nomination procedure, including a brief description of the policies and process to nominate members of the Boards of Directors and/or Commissioners; - Procedures and implementation of remuneration for the Boards of Directors and Commissioners, among others: - Procedures to determine remuneration for the Boards of Directors and Commissioners; - Remuneration structure of the Boards of Directors and Commissioners such as salary, allowances, tantiem/bonus and others; and - Amount of remuneration for each member of the Boards of Directors and Commissioners; Disclosure of information can be presented in tabular form.	292-299

No.	Materi dan Penjelasan	Description	Halaman Page
5	Dewan Pengawas Syariah, bagi Emiten atau Perusahaan Publik yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah sebagaimana tertuang dalam anggaran dasar.	The Sharia Supervisory Board, for Issuer or Public Company that carry out business activities based on sharia principles as stated in the articles of association.	Tidak relevan dengan kegiatan Perusahaan Irrelevant with the Company's activities.
6	Komite Audit, paling sedikit memuat: a. Nama dan jabatannya dalam keanggotaan komite; b. Usia; c. Kewarganegaraan; d. Riwayat pendidikan; e. Riwayat jabatan, meliputi informasi: 1. Dasar hukum penunjukan sebagai anggota komite; 2. Rangkap jabatan, baik sebagai anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan/atau anggota komite serta jabatan lainnya (jika ada); dan 3. Pengalaman kerja beserta periode waktunya baik di dalam maupun di luar Emiten atau Perusahaan Publik. f. Periode dan masa jabatan anggota komite audit; g. Pernyataan independensi komite audit; h. Pelatihan dan/atau peningkatan kompetensi yang telah diikuti dalam tahun buku (jika ada); i. Kebijakan dan pelaksanaan frekuensi rapat komite audit dan tingkat kehadiran anggota komite audit dalam rapat tersebut; dan j. Pelaksanaan kegiatan komite audit pada tahun buku sesuai dengan yang dicantumkan dalam pedoman atau piagam (charter) komite audit.	The Audit Committee, at least contains: a. Name and position in committee membership; b. Age; c. Nationality; d. Educational history; e. Position history, including information on: 1. Legal basis for appointment as committee member; 2. Concurrent positions, either as a member of the Board of Commissioners, Directors, and/or committee as well as other positions (if any); and 3. Work experience and time period both in and outside the Issuer or Public Company. f. Period and term of office of the audit committee members; g. Statement of independence of the audit committee; h. Training and/or competency development attended in the fiscal year (if any); i. Policies and frequency of audit committee meetings and the attendance rate of audit committee members in those meetings; and j. The implementation of the audit committee's activities for the fiscal year in accordance with the audit committee guidelines or charter.	303-312

No.	Materi dan Penjelasan	Description	Halaman Page
7	Komite atau fungsi nominasi dan remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik, paling sedikit memuat: - Nama dan jabatannya dalam keanggotaan komite; - Usia; - Kewarganegaraan; - Riwayat pendidikan; - Riwayat jabatan, meliputi informasi: - Dasar hukum penunjukan sebagai anggota komite; - Rangkap jabatan, baik sebagai anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan/atau anggota komite serta jabatan lainnya (jika ada); dan - Pengalaman kerja beserta periode waktunya baik di dalam maupun di luar Emiten atau Perusahaan Publik. - Periode dan masa jabatan anggota komite; - Pernyataan independensi komite; - Pelatihan dan/atau peningkatan kompetensi yang telah diikuti dalam tahun buku (jika ada); - Uraian tugas dan tanggung jawab; - Pernyataan bahwa telah memiliki pedoman atau piagam (charter); - Kebijakan dan pelaksanaan frekuensi rapat dan tingkat kehadiran anggota dalam rapat tersebut; - Uraian singkat pelaksanaan kegiatan pada tahun buku; dan - Dalam hal tidak dibentuk komite nominasi dan remunerasi, Emiten atau Perusahaan Publik cukup mengungkapkan informasi sebagaimana dimaksud dalam huruf i) sampai dengan huruf l) dan mengungkapkan: - Alasan tidak dibentuknya komite; dan - Pihak yang melaksanakan fungsi nominasi dan remunerasi.	The nomination and remuneration committee or function of the Issuer or Public Company, at least containing: - Name and position in committee membership; - Age; - Nationality; - Educational history; - Position history, including information on: - Legal basis for appointment as committee member; - Concurrent positions, either as a member of the Board of Commissioners, Directors, and/or committee member and other positions (if any); and - Work experience and time period both in and outside the Issuer or Public Company; - Period and term of office of the committee members; - Statement of committee independence; - Training and/or competency development attended in the fiscal year (if any); - Description of duties and responsibilities; - Statement that the committee has a guideline or charter; - Policies and frequency of meetings and attendance rate of members at the meeting; - Brief description of the implementation of activities in the fiscal year; and - In the event that nomination and remuneration committee is not formed, the Issuer or Public Company to disclose the information as referred to in point i) to l) and disclose: - Reasons for not forming the committee; and - Party carrying out the nomination and remuneration function.	312-320
8	Komite Lain yang dimiliki Emiten atau Perusahaan Publik dalam rangka mendukung fungsi dan tugas Direksi dan/atau Dewan Komisaris, yang mencakup antara lain: - Nama dan jabatannya dalam keanggotaan komite; - Usia; - Kewarganegaraan; - Riwayat pendidikan; - Riwayat jabatan, meliputi informasi: - Dasar hukum penunjukan sebagai anggota komite; - Rangkap jabatan, baik sebagai anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan/atau anggota komite serta jabatan lainnya (jika ada); dan - Pengalaman kerja beserta periode waktunya baik di dalam maupun di luar Emiten atau Perusahaan Publik. - Periode dan masa jabatan anggota komite; - Pernyataan independensi komite; - Pelatihan dan/atau peningkatan kompetensi yang telah diikuti dalam tahun buku (jika ada); - Uraian tugas dan tanggung jawab; - Pernyataan bahwa telah memiliki pedoman atau piagam (charter) komite; - Kebijakan dan pelaksanaan frekuensi rapat komite dan tingkat kehadiran anggota komite dalam rapat tersebut; dan - Uraian singkat pelaksanaan kegiatan komite pada tahun buku.	Other committees owned by Issuer or Public Company to support the functions and duties of the Boards of Directors (if any) and/or Commissioners, at least containing: - Name and position in committee membership; - Age; - Nationality; - Educational history; - Position history, including information on: - Legal basis for appointment as committee member; - Concurrent positions, either as a member of the Board of Commissioners, Directors, and/or committee and other positions (if any); and - Work experience and time period both in and outside the Issuer or Public Company; - Period and term of office of the committee members; - Statement of committee independence; - Training and/or competency development attended in the fiscal year (if any); and - Description of duties and responsibilities; - Statement that the committee has guidelines or charters; - Policies and frequency of committee meetings and the attendance rate of committee members at the meeting; and - Brief description of the committee's activities for the fiscal year.	320-330

No.	Materi dan Penjelasan	Description	Halaman Page
9	Sekretaris perusahaan, paling sedikit memuat: a. Nama; b. Domisili; c. Riwayat jabatan, meliputi: 1. Dasar hukum penunjukan sebagai sekretaris perusahaan; dan 2. Pengalaman kerja beserta periode waktunya baik di dalam maupun di luar Emiten atau Perusahaan Publik. d. Riwayat pendidikan; e. Pelatihan dan/atau peningkatan kompetensi yang diikuti dalam tahun buku; dan f. Uraian singkat pelaksanaan tugas sekretaris perusahaan pada tahun buku.	Corporate secretary, at least contains: a. Name; b. Domicile; c. Position history, including: 1. Legal basis for appointment as company secretary; and 2. Work experience and time period both in and outside the Issuer or Public Company. d. Educational history; e. Training and/or competency development attended during the fiscal year; and f. Brief description of the implementation of the duties of the corporate secretary for the fiscal year.	334-339
10	Unit audit internal, paling sedikit memuat: a. Nama kepala unit audit internal; b. Riwayat jabatan, meliputi: 1. Dasar hukum penunjukan sebagai kepala unit audit internal; dan 2. Pengalaman kerja beserta periode waktunya baik di dalam maupun di luar Emiten atau Perusahaan Publik; c. Kualifikasi atau sertifikasi sebagai profesi audit internal (jika ada); d. Pelatihan dan/atau peningkatan kompetensi yang diikuti dalam tahun buku; e. Struktur dan kedudukan unit audit internal; f. Uraian tugas dan tanggung jawab; g. Pernyataan bahwa telah memiliki pedoman atau piagam (charter) unit audit internal; dan h. Uraian singkat pelaksanaan tugas unit audit internal pada tahun buku termasuk kebijakan dan pelaksanaan frekuensi rapat dengan Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau komite audit.	Internal audit unit, at least contains: a. Name of the head of the internal audit unit; b. Position history, including: 1. Legal basis for the appointment as head of the internal audit unit; and 2. Work experience and time period both in and outside the Issuer or Public Company; c. Qualification or certification as an internal audit (if any); d. Training and/or competency development attended during the fiscal year; e. Structure and position of the internal audit unit; f. Description of duties and responsibilities; g. Statement that the internal audit unit has had guidelines or charters; and h. Brief description of the implementation of the internal audit unit's duties for the fiscal year including the policy and frequency of meetings with the Boards of Directors, Commissioners, and/or audit committee.	339-358
11	Uraian mengenai sistem pengendalian internal (internal control) yang diterapkan oleh Emiten atau Perusahaan Publik, paling sedikit memuat: a. Pengendalian keuangan dan operasional, serta kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan lainnya; b. Tinjauan atas efektivitas sistem pengendalian internal; dan c. Pernyataan Direksi dan/atau Dewan Komisaris atas kecukupan sistem pengendalian internal.	Description of the internal control system implemented by the Issuer or Public Company, at least containing: a. Financial and operational control, as well as compliance with other laws and regulations; b. Review of the effectiveness of the internal control system; and c. Statement of the Boards of Directors and/or Commissioners on the adequacy of the internal control system.	361-367
12	Sistem manajemen risiko yang diterapkan oleh Emiten atau Perusahaan Publik, paling sedikit memuat: a. Gambaran umum mengenai sistem manajemen risiko Emiten atau Perusahaan Publik; b. Jenis risiko dan cara pengelolaannya; c. Tinjauan atas efektivitas sistem manajemen risiko Emiten atau Perusahaan Publik; dan d. Pernyataan Direksi dan/atau Dewan Komisaris atau komite audit atas kecukupan sistem manajemen risiko.	The risk management system implemented by the Issuer or Public Company, at least contains: a. General description of the risk management system of the Issuer or Public Company; b. Types of risks and mitigation measures; c. Review of the effectiveness of risk management system of the Issuer or Public Company; and d. Statement of the Board of Directors and/or the Board of Commissioners or the audit committee on the adequacy of the risk management system.	368-391

No.	Materi dan Penjelasan	Description	Halaman Page
13	Perkara hukum yang berdampak material yang dihadapi oleh Emiten atau Perusahaan Publik, entitas anak, anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris (jika ada), paling sedikit memuat: a. Pokok perkara/gugatan; b. Status penyelesaian perkara/gugatan; dan c. Pengaruhnya terhadap kondisi Emiten atau Perusahaan Publik.	Legal cases with material impact faced by the Issuer or Public Company, its subsidiaries, members of the Boards of Directors and Commissioners (if any), at least contain: a. Substance of the case/claim; b. Status of settlement of cases/claims; and c. Impact on the Issuer or Public Company.	392
14	Informasi tentang sanksi administratif/sanksi yang dikenakan kepada Emiten atau Perusahaan Publik, anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi, oleh Otoritas Jasa Keuangan dan otoritas lainnya pada tahun buku (jika ada).	Information on administrative sanctions/sanctions imposed on Issuer or Public Company, members of the Boards of Commissioners and Directors, by the Financial Services Authority and other authorities for the fiscal year (if any).	395
15	Informasi mengenai kode etik Emiten atau Perusahaan Publik meliputi: a. Pokok-pokok kode etik; b. Bentuk sosialisasi kode etik dan upaya penegakannya; dan c. Pernyataan bahwa kode etik berlaku bagi anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan karyawan Emiten atau Perusahaan Publik.	Information regarding the code of ethics of the Issuer or Public Company includes: a. Key points of the code of ethics; b. Form of socialization of the code of ethics and its enforcement efforts; and c. Statement that the code of ethics applies to members of the Boards of Directors, Commissioners, and employees of Issuer or Public Company.	400-406
16	Uraian mengenai kebijakan pemberian kompensasi jangka panjang berbasis kinerja kepada manajemen dan/atau karyawan.	Brief description of the policy of long-term performance-based compensation to management and/or employees.	432
17	Uraian singkat mengenai kebijakan pengungkapan informasi mengenai: a. Kepemilikan saham anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris; b. Pelaksanaan atas kebijakan dimaksud.	Brief description of the information disclosure policy regarding: a. Share ownership of members of the Boards of Directors and Commissioners; b. Implementation of the policy.	265 & 285
18	Uraian mengenai Sistem Pelaporan Pelanggaran di Emiten atau Perusahaan Publik (jika ada), antara lain meliputi: a. Cara penyampaian laporan pelanggaran; b. Perlindungan bagi pelapor; c. Penanganan pengaduan; d. Pihak yang mengelola pengaduan; dan e. Hasil dari penanganan pengaduan, paling sedikit: 1. Jumlah pengaduan yang masuk dan diproses dalam tahun buku; dan 2. Tindak lanjut pengaduan.	Description of the Whistleblowing System at the Issuer or Public Company, at least containing: a. Method of submitting a violation report; b. Protection for whistleblowers; c. Complaint handling; d. Party managing the complaint; and e. Result of complaint handling, at least: 1. Number of complaints received and processed in the fiscal year; and 2. Follow-up on complaints.	411-419
19	Uraian mengenai kebijakan anti korupsi Emiten atau Perusahaan Publik.	Description of anti-corruption policy of the Issuer or Public Company.	407-410
20	Penerapan atas Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka bagi Emiten yang menerbitkan Efek Bersifat Ekuitas atau Perusahaan Publik, meliputi: a. Pernyataan mengenai rekomendasi yang telah dilaksanakan; dan/atau b. Penjelasan atas rekomendasi yang belum dilaksanakan, disertai alasan dan alternatif pelaksanaannya (jika ada).	Implementation of Governance Guidelines for the Public Company for Issuer issuing Equity Securities or Public Company, including: a. Statement regarding the recommendations that have been implemented; and/or b. Explanation of recommendations that have not been implemented, with reasons and alternative implementations (if any).	246

No.	Materi dan Penjelasan	Description	Halaman Page
Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Corporate Social and Environmental Responsibility			
1	Informasi yang diungkapkan dalam bagian tanggung jawab sosial dan lingkungan merupakan Laporan Keberlanjutan (<i>Sustainability Report</i>) sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 51/POJK.03/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten, dan Perusahaan Publik, paling sedikit memuat: a. Penjelasan strategi keberlanjutan; b. Ikhtisar aspek keberlanjutan (ekonomi, sosial, dan lingkungan hidup); c. Profil singkat Emiten atau Perusahaan Publik; d. Penjelasan Direksi; e. Tata kelola keberlanjutan; f. Kinerja keberlanjutan; g. Verifikasi tertulis dari pihak independen, jika ada; h. Lembar umpan balik (<i>feedback</i>) untuk pembaca; dan i. Tanggapan Emiten atau Perusahaan Publik terhadap umpan balik laporan tahun sebelumnya.	Information disclosed in the social and environmental responsibility section is a Sustainability Report, as intended in Financial Services Authority Regulation No. 51/POJK.03/2017 concerning the Implementation of Sustainable Finance for Financial Services Institutions, Issuers and Public Companies, containing at least: a. Explanation of the sustainability strategy; b. Overview of sustainability aspects (economic, social, and environmental); c. Brief profile of the Issuer or Public Company; d. Explanation of the Board of Directors; e. Sustainability governance; f. Sustainability performance; g. Written verification from an independent party, if any; h. Feedback sheet for readers; and i. Response of the Issuer or Public Company to the previous year's report feedback.	435-479
2	Laporan Keberlanjutan sebagaimana dimaksud pada angka 1), harus disusun sesuai Pedoman Teknis Penyusunan Laporan Keberlanjutan (<i>Sustainability Report</i>) Bagi Emiten dan Perusahaan Publik sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.	The Sustainability Report as referred to in point 1), must be prepared in accordance with the Technical Guidelines for Formulating Sustainability Reports for Issuers and Public Companies as stated in Appendix II which is an inseparable part of this Financial Services Authority Circular Letter.	435-479
3	Informasi Laporan Keberlanjutan (<i>Sustainability Report</i>) pada angka 1) dapat: a. Diungkapkan pada bagian lain yang relevan di luar bagian tanggung jawab sosial dan lingkungan, seperti penjelasan Direksi terkait Laporan Keberlanjutan diungkapkan dalam bagian terkait Laporan Direksi; dan/atau b. Merujuk pada bagian lain di luar bagian tanggung jawab sosial dan lingkungan dengan tetap mengacu pada Pedoman Teknis Penyusunan Laporan Keberlanjutan (<i>Sustainability Report</i>) Bagi Emiten dan Perusahaan Publik sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini, seperti profil Emiten atau Perusahaan Publik.	Sustainability Report information in point 1) can: a. Disclose in other relevant sections aside from social and environmental responsibility section, such as the Directors' explanation regarding the Sustainability Report disclosed in the relevant section of the Directors' Report; and/or b. Refer to other sections aside from the social and environmental responsibility section while still referring to the Technical Guidelines for Formulating Sustainability Reports for Issuers and Public Companies as listed in Appendix II, which is an inseparable part of this Financial Services Authority Circular Letter, such as the profile of Issuer or Public Company.	435-479
4	Laporan Keberlanjutan (<i>Sustainability Report</i>) sebagaimana dimaksud pada angka 1) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Tahunan namun dapat disajikan secara terpisah dengan Laporan Tahunan.	The Sustainability Report as referred to in point 1) is an inseparable part of the Annual Report but can be presented separately from the Annual Report.	435-479

No.	Materi dan Penjelasan	Description	Halaman Page
5	Dalam hal Laporan Keberlanjutan disajikan secara terpisah dengan Laporan Tahunan, informasi yang diungkapkan dalam Laporan Keberlanjutan dimaksud harus:	In the event that the Sustainability Report is presented separately from the Annual Report, the information disclosed in the Sustainability Report must:	435-479
	a. Memuat seluruh informasi sebagaimana dimaksud pada angka 1); dan b. Disusun sesuai Pedoman Teknis Penyusunan Laporan Keberlanjutan (<i>Sustainability Report</i>) Bagi Emiten dan Perusahaan Publik.	a. Contain all information as intended in number 1); and b. Prepared in accordance with the Technical Guidelines for Formulating Sustainability Reports for Issuers and Public Companies.	
6	Dalam hal Laporan Keberlanjutan disajikan secara terpisah dengan Laporan Tahunan, maka dalam bagian tanggung jawab sosial dan lingkungan memuat informasi bahwa informasi mengenai tanggung jawab sosial dan lingkungan telah diungkapkan dalam Laporan Keberlanjutan yang disajikan secara terpisah dari Laporan Tahunan.	In the event that the Sustainability Report is presented separately from the Annual Report, then the social and environmental responsibility section contains information that reports regarding social and environmental responsibility has been disclosed in the Sustainability Report, which is presented separately from the Annual Report.	435-479
7	Penyampaian Laporan Keberlanjutan (<i>Sustainability Report</i>) yang disajikan secara terpisah dengan Laporan Tahunan harus disampaikan bersamaan dengan penyampaian Laporan Tahunan.	Sustainability Report presented separately from the Annual Report is to be submitted together with the submission of the Annual Report.	435-479
Laporan Keuangan Tahunan yang Telah Diaudit Audited Annual Financial Report			
1	Laporan keuangan tahunan yang dimuat dalam Laporan Tahunan disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia dan telah diaudit oleh Akuntan. Laporan keuangan dimaksud memuat pernyataan mengenai pertanggungjawaban atas laporan keuangan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal yang mengatur mengenai tanggung jawab Direksi atas laporan keuangan atau peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal yang mengatur mengenai laporan berkala Perusahaan Efek dalam hal Emiten merupakan Perusahaan Efek.	The annual financial reports included in the Annual Report are prepared in accordance with Financial Accounting Standards in Indonesia and audited by a Public Accountant. The financial report contains a statement regarding the accountability for financial statements as regulated in the Financial Services Authority Regulation regarding the Board of Directors' responsibility for financial reports or the laws and regulations in the capital market sector which regulates the periodic reports of securities companies in the event that the Issuer is a securities company.	496-569
Surat Pernyataan Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris tentang Tanggung Jawab atas Laporan Tahunan Statement Letters of Members of the Boards of Directors and Commissioners Regarding Responsibilities for the Annual Report			
1	Surat pernyataan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris tentang tanggung jawab atas Laporan Tahunan disusun sesuai dengan format Surat Pernyataan Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris tentang Tanggung Jawab atas Laporan Tahunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.	Statements of members of the Boards of Directors and Commissioners regarding the responsibilities of the Annual Report being prepared in accordance with the format of Statement Letters Of Members Of The Board Of Directors And Members Of The Board Of Commissioners regarding Responsibilities For The Annual Report as contained in the Appendix I, which is an integral part of Circular Letter of Financial Services Authority.	58-59





08 LAPORAN KEUANGAN

FINANCIAL REPORT



Halaman ini sengaja dikosongkan.
This page is intentionally left blank.



PT ASDP INDONESIA FERRY (PERSERO) DAN ENTITAS ANAKNYA

**Laporan Keuangan Konsolidasian
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022**

**PT ASDP INDONESIA FERRY (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAKNYA**

Daftar Isi

Halaman

Surat Pernyataan Direksi

Laporan Auditor Independen

**Laporan Keuangan Konsolidasian
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022**

Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian	1
Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian	3
Laporan Perubahan Ekuitas Konsolidasian	4
Laporan Arus Kas Konsolidasian	5
Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian	6

Informasi Keuangan Tersendiri Perusahaan:

Laporan Posisi Keuangan (Entitas Induk)	Lampiran I
Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain (Entitas Induk)	Lampiran II
Laporan Perubahan Ekuitas (Entitas Induk)	Lampiran III
Laporan Arus Kas (Entitas Induk)	Lampiran IV
Ikhtisar Kebijakan Akuntansi Penting, Daftar Investasi, dan Metode Pencatatan Investasi	Lampiran V

**SURAT PERNYATAAN DIREKSI
TENTANG TANGGUNG JAWAB ATAS
LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
PADA 31 DESEMBER 2023 DAN 2022**

**DIRECTORS' STATEMENT LETTER
RELATING TO THE RESPONSIBILITY ON THE
CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE YEARS ENDED
DECEMBER 31, 2023 AND 2022**

**PT ASDP INDONESIA FERRY (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK**

**PT ASDP INDONESIA FERRY (PERSERO) AND
SUBSIDIARIES**

Kami yang bertanda tangan dibawah ini

We, the undersigned:

1. Nama/ Name :	Ira Puspawati
Alamat Kantor/ Office Address :	Jl. Jend Achmad Yani Kav 52 A Jakarta Pusat 10510
Alamat Domisili sesuai KTP atau Kartu Identitas Lain/ Domicile as stated in ID Card :	Jl. Anggrek Raya No. 23 RT 08 RW 02 Kel. Malaka Sari, Kecamatan Duren Sawit Jakarta Timur
Nomor Telepon/ Phone Number :	021 – 4208911
Jabatan/ Position :	Direktur Utama
2. Nama/ Name :	Djunia Satriawan
Alamat Kantor/ Office Address :	Jl. Jend Achmad Yani Kav 52 A Jakarta Pusat 10510
Alamat Domisili sesuai KTP atau Kartu Identitas Lain/ Domicile as stated in ID Card :	Taman Permata Cikunir Blok A 10 No. 22 RT 001 RW 014 Jaka Mulya Bekasi Selatan
Nomor Telepon/ Phone Number :	021 – 4208911
Jabatan/ Position :	Direktur Keuangan TI & Manajemen Risiko

Menyatakan bahwa:

State that:

1. Kami bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan Keuangan konsolidasian PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) dan entitas anak ("Perusahaan");	1. <i>We are responsible for the preparation and the presentation of the consolidated financial statements of PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) and subsidiaries ("the Company");</i>
2. Laporan Keuangan konsolidasian telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia;	2. <i>The consolidated financial statements have been prepared and presented in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards;</i>
3. a. Semua informasi dalam laporan keuangan konsolidasian telah dimuat secara lengkap dan benar;	3. a. <i>All information contained in the consolidated financial statements is complete and correct;</i>
b. Laporan keuangan konsolidasian Perusahaan tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material; dan	b. <i>The Company's consolidated financial statements do not contain misleading material information or facts, nor do not omit material information or facts; and</i>
4. Kami bertanggung jawab atas sistem pengendalian intern dan aplikasinya di dalam Perusahaan.	4. <i>We are responsible for the Company's internal control system and its application.</i>

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya

This statement letter is made truthfully

Jakarta, 28 Februari 2024

Atas Nama dan Mewakili Direksi/ *On Behalf on the Board of Directors*
Direktur Utama

Direktur Keuangan IT
& Manajemen Risiko

Ira Puspawati

Djunia Satriawan

PT ASDP Indonesia Ferry (Persero)

Kantor Pusat
Jl. Jend. Ahmad Yani Kav. 52 A
Jakarta 10510, Indonesia
T 021-420-8911 12 13-14

www.asdp.id

We Bridge the Nation

Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan

Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan
Registered Public Accountants

RSM Indonesia

Part 3 ASL Level 10

A. İsmail Süslümanlı Kay: 50

Copyright © 2004 Anderson

T-62215401440

T+62 215 140 1350

doi:10.1186/1745-6215-14-105

Nomor : 00169/2.1030/AU.1/06/1155-4/1/II/2024

Laporan Auditor Independen

Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan Direksi
PT ASDP Indonesia Ferry (Persero)

Laporan Audit atas Laporan Keuangan Konsolidasian

Opini

Kami telah mengaudit laporan keuangan konsolidasian PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) dan Entitas Anaknya ("Grup"), yang terdiri dari laporan posisi keuangan konsolidasian tanggal 31 Desember 2023, serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian, laporan perubahan ekuitas konsolidasian, dan laporan arus kas konsolidasian untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta catatan atas laporan keuangan konsolidasian, termasuk ikhtisar kebijakan akuntansi material.

Menurut opini kami, laporan keuangan konsolidasian terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan konsolidasian Grup tanggal 31 Desember 2023, serta kinerja keuangan konsolidasian dan arus kas konsolidasiannya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Basis Opini

Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Tanggung jawab kami menurut standar tersebut diuraikan lebih lanjut dalam paragraf Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan Konsolidasian pada laporan kami. Kami independen terhadap Grup berdasarkan kelentuan etika yang relevan dalam audit kami atas laporan keuangan konsolidasian di Indonesia, dan kami telah memenuhi tanggung jawab etika lainnya berdasarkan ketentuan tersebut. Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.

Hal lain

Audit kami atas laporan keuangan konsolidasian PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) dan entitas anaknya pada tanggal 31 Desember 2023 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut terlampir, dilaksanakan dengan tujuan untuk merumuskan suatu opini atas laporan keuangan konsolidasian tersebut secara keseluruhan. Informasi keuangan Perusahaan (entitas induk) terlampir, yang terdiri dari laporan posisi keuangan tanggal 31 Desember 2023, serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan ekuitas, dan laporan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, dan suatu ikhtisar kebijakan akuntansi signifikan dan informasi penjelasan lainnya (secara kolektif disebut sebagai "Informasi Keuangan Entitas Induk") yang disajikan sebagai informasi tambahan terhadap laporan keuangan konsolidasian tersebut di atas, disajikan untuk tujuan analisis tambahan dan bukan merupakan bagian dari laporan keuangan konsolidasian tersebut di atas yang diharuskan menurut Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia. Informasi Keuangan Entitas Induk merupakan tanggung jawab manajemen serta dihasilkan dari dan berkaitan secara langsung dengan catatan akuntansi dan catatan lainnya yang mendasarinya yang digunakan untuk menyusun laporan keuangan konsolidasian tersebut di atas. Informasi Keuangan Entitas Induk telah menjadi objek prosedur audit yang diterapkan dalam audit atas laporan keuangan konsolidasian tersebut di atas berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Menurut opini kami, Informasi Keuangan Entitas Induk disajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, berkaitan dengan laporan keuangan konsolidasian tersebut di atas secara keseluruhan.

THE POWER OF BEING UNDERSTOOD
ASSURANCE | TAX | CONSULTING

Informasi lain

Manajemen bertanggung jawab atas informasi lain. Informasi lain terdiri dari informasi yang tercantum dalam laporan tahunan, tetapi tidak termasuk dalam laporan keuangan konsolidasian dan laporan auditor kami. Laporan tahunan diharapkan akan tersedia bagi kami setelah tanggal laporan auditor ini.

Opini kami atas laporan keuangan konsolidasian tidak mencakup informasi lain, dan oleh karena itu, kami tidak menyatakan bentuk keyakinan apapun atas informasi lain tersebut.

Sehubungan dengan audit kami atas laporan keuangan konsolidasian, tanggung jawab kami adalah untuk membaca informasi lain yang teridentifikasi di atas jika tersedia, dan dalam melaksanakannya, mempertimbangkan apakah informasi lain mengandung ketidakkonsistensian material dalam laporan keuangan konsolidasian atau pemahaman yang kami peroleh selama audit, atau mengandung kesalahan penyajian material.

Ketika kami membaca laporan tahunan, jika kami menyimpulkan bahwa terdapat suatu kesalahan penyajian material di dalamnya, kami diharuskan untuk mengomunikasikan hal tersebut kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola dan mengambil tindakan tepat berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia.

Tanggung Jawab Manajemen dan Pihak yang Bertanggung Jawab atas Tata Kelola terhadap Laporan Keuangan Konsolidasian

Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan konsolidasian tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh manajemen untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan konsolidasian yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasian, manajemen bertanggung jawab untuk menilai kemampuan Grup dalam mempertahankan kelangsungan usahanya, mengungkapkan, sesuai dengan kondisinya, hal-hal yang berkaitan dengan kelangsungan usaha, dan menggunakan basis akuntansi kelangsungan usaha, kecuali manajemen memiliki intensi untuk melikuidasi Grup atau menghentikan operasi, atau tidak memiliki alternatif yang realistis selain melaksanakannya.

Pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola bertanggung jawab untuk mengawasi proses pelaporan keuangan Grup.

Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan Konsolidasian

Tujuan kami adalah untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, dan untuk menerbitkan laporan auditor yang mencakup opini kami. Keyakinan memadai merupakan suatu tingkat keyakinan tinggi, namun bukan merupakan suatu jaminan bahwa audit yang dilaksanakan berdasarkan Standar Audit akan selalu mendeteksi kesalahan penyajian material ketika hal tersebut ada. Kesalahan penyajian dapat disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan dan dianggap material jika, baik secara individual maupun secara agregat, dapat diekspektasikan secara wajar akan memengaruhi keputusan ekonomi yang diambil oleh pengguna berdasarkan laporan keuangan konsolidasian tersebut.

Sebagai bagian dari suatu audit berdasarkan Standar Audit, kami menerapkan pertimbangan profesional dan mempertahankan skeptisisme profesional selama audit. Kami juga:

- Mengidentifikasi dan menilai risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan konsolidasian, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, mendesain dan melaksanakan prosedur audit yang responsif terhadap risiko tersebut, serta memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat untuk menyediakan basis bagi opini kami. Risiko tidak terdeteksinya kesalahan penyajian material yang disebabkan oleh kecurangan lebih tinggi dari yang disebabkan oleh kesalahan, karena kecurangan dapat melibatkan kolusi, pemalsuan, penghilangan secara sengaja, pernyataan salah, atau pengabaian pengendalian internal.
- Memperoleh suatu pemahaman tentang pengendalian internal yang relevan dengan audit untuk mendesain prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektifan pengendalian internal Grup.

- Mengevaluasi ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan serta kewajaran estimasi akuntansi dan pengungkapan terkait yang dibuat oleh manajemen.
- Menyimpulkan ketepatan penggunaan basis akuntansi kelangsungan usaha oleh manajemen dan, berdasarkan bukti audit yang diperoleh, apakah terdapat suatu ketidakpastian material yang terkait dengan peristiwa atau kondisi yang dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan Grup untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Ketika kami menyimpulkan bahwa terdapat suatu ketidakpastian material, kami diharuskan untuk menarik perhatian dalam laporan auditor kami ke pengungkapan terkait dalam laporan keuangan konsolidasian atau, jika pengungkapan tersebut tidak memadai, harus menentukan apakah perlu untuk memodifikasi opini kami. Kesimpulan kami didasarkan pada bukti audit yang diperoleh hingga tanggal laporan auditor kami. Namun, peristiwa atau kondisi masa depan dapat menyebabkan Grup tidak dapat mempertahankan kelangsungan usaha.
- Mengevaluasi penyajian, struktur, dan isi laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan, termasuk pengungkapannya, dan apakah laporan keuangan konsolidasian mencerminkan transaksi dan peristiwa yang mendasarinya dengan suatu cara yang mencapai penyajian wajar.
- Memeroleh bukti audit yang cukup dan tepat terkait informasi keuangan entitas atau aktivitas bisnis Grup untuk menyatakan opini atas laporan keuangan konsolidasian. Kami bertanggung jawab atas arahan, supervisi, dan pelaksanaan audit Grup. Kami tetap bertanggung jawab sepenuhnya atas opini audit kami.

Kami mengomunikasikan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola mengenai, antara lain, ruang lingkup dan saat yang direncanakan atas audit, serta temuan audit signifikan, termasuk setiap defisiensi signifikan dalam pengendalian internal yang teridentifikasi oleh kami selama audit.

Laporan Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan dan Pengendalian Internal

Kami juga melakukan pengujian atas kepatuhan Entitas Induk terhadap peraturan perundang-undangan tertentu dan pengendalian internal. Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan tertentu dan pengendalian internal adalah tanggung jawab manajemen. Tanggung jawab kami terletak pada pernyataan kesimpulan atas kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan pengendalian internal berdasarkan audit kami. Pengujian atas kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan tertentu dan pengendalian internal tersebut kami laksanakan berdasarkan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara yang diterbitkan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia dan Pernyataan Standar Audit No. 62 (Seksi 801) yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia.

Laporan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan pengendalian intern disampaikan secara terpisah kepada manajemen, masing-masing dalam laporan kami nomor R/046.AAT/eiz/2024 dan R/047.AAT/eiz/2024.

Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan



Eishennoraz

Nomor Izin Akuntan Publik: AP.1155

Jakarta, 28 Februari 2024



PT ASDP INDONESIA FERRY (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAKNYA
LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Pada Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
(Disajikan Dalam Rupiah Penuh, Kecuali Dinyatakan Lain)

	Catatan	2023 Rp	2022 Rp
ASET			
ASET LANCAR			
Kas dan Setara Kas	4, 33, 37	1.488.344.956.314	1.341.490.853.172
Piutang Usaha	5, 37		
Pihak Berelasi	33	1.347.070.562	3.317.679.812
Pihak Ketiga		35.327.859.477	28.519.162.355
Aset Keuangan Lancar Lainnya	6, 37	55.306.553.619	54.531.246.075
Pendapatan yang Masih Harus Diterima	7, 37		
Pihak Berelasi	33	200.126.590.942	44.795.677.685
Pihak Ketiga		4.636.984.092	30.827.173.991
Persediaan	8	94.708.673.075	80.950.768.144
Pajak Dibayar di Muka	16.a	6.833.299.463	64.698.051.571
Uang Muka dan Biaya Dibayar di Muka	9	63.131.632.120	47.635.984.566
Jumlah Aset Lancar		1.949.763.619.664	1.696.766.597.371
ASET TIDAK LANCAR			
Aset Keuangan Tidak Lancar Lainnya	10, 37	275.526.865.611	277.280.114.349
Uang Muka dan Biaya Dibayar di Muka Jangka Panjang		455.810.635	488.175.884
Properti Investasi	11	703.319.700.000	665.536.600.000
Aset Tetap	12	8.057.901.887.317	7.277.013.237.961
Aset Hak-Guna	13	48.382.410.187	76.258.086.731
Aset Takberwujud	14	20.350.210.221	17.391.769.229
Aset Pajak Tangguhan	16.d	--	512.179.225
Jumlah Aset Tidak Lancar		9.105.936.883.971	8.314.480.163.379
JUMLAH ASET		11.055.700.503.635	10.011.246.760.750

Catatan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan

PT ASDP INDONESIA FERRY (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAKNYA
LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan)
Pada Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
(Disajikan Dalam Rupiah Penuh, Kecuali Dinyatakan Lain)

	Catatan	2023 Rp	2022 Rp
LIABILITAS JANGKA PENDEK			
Utang Bank Modal Kerja	20	--	20.000.000.000
Utang Usaha	15, 37		
Pihak Berelasi	33	55.673.240.263	107.314.611.051
Pihak Ketiga		353.270.672.568	197.809.257.144
Utang Pajak	16.b	37.506.475.332	33.688.208.807
Utang Asuransi	17, 37	26.601.646.067	23.750.369.602
Beban Akrua dan Provisi	18, 35.a, 37	275.787.731.805	202.315.116.673
Liabilitas Jangka Pendek Lainnya	19, 37		
Pihak Berelasi	33	10.714.003.871	125.811.276.546
Pihak ketiga		126.831.516.253	68.750.121.522
Bagian Liabilitas Jangka Panjang yang Jatuh Tempo dalam Satu Tahun:			
Utang Bank	20	262.779.222.583	78.097.349.184
Pinjaman Sindikasi	21, 37, 38	28.200.000.000	24.411.158.400
Liabilitas Sewa	13, 38	35.821.365.877	37.799.648.325
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek		1.213.185.874.619	919.747.117.254
LIABILITAS JANGKA PANJANG			
Liabilitas Jangka Panjang - Setelah Dikurangi Bagian Yang Jatuh Tempo Dalam Satu Tahun:			
Utang Bank	20	570.612.661.142	931.193.758.548
Pinjaman Sindikasi	21, 38	654.503.916.666	438.180.293.382
Liabilitas Sewa	13, 38	12.105.998.813	37.352.941.821
Liabilitas Keuangan Jangka Panjang Lainnya	37	7.792.751.277	4.665.842.727
Liabilitas Imbalan Pascakerja	22	144.320.970.340	142.105.812.883
Liabilitas Pajak Tangguhan	16.d	68.466.424.557	68.974.507.710
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang		1.457.802.722.795	1.622.473.157.071
JUMLAH LIABILITAS		2.670.988.597.414	2.542.220.274.325
EKUITAS			
Modal Saham - nilai nominal Rp1.000.000			
Modal Dasar - 6.000.000 saham			
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh - 5.173.195 saham	24	5.173.195.000.000	5.173.195.000.000
Tambahan Modal Disetor	25	397.010.172.065	8.445.362.065
Saldo Laba			
Telah Ditentukan Penggunaannya	26	1.831.026.929.440	1.368.261.856.102
Belum Ditentukan Penggunaannya		809.212.619.476	768.065.949.095
Ekuitas Yang Dapat Diatribusikan Kepada:			
Pemilik Entitas Induk		8.210.444.720.981	7.317.968.167.262
Kepentingan Nonpengendali		174.267.185.240	151.058.319.163
JUMLAH EKUITAS		8.384.711.906.221	7.469.026.486.425
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS		11.055.700.503.635	10.011.246.760.750

Catatan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan

PT ASDP INDONESIA FERRY (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAKNYA
LAPORAN LABA RUGI DAN
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN KONSOLIDASIAN
 Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
 Pada Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
 (Disajikan Dalam Rupiah Penuh, Kecuali Dinyatakan Lain)

	Catatan	2023 Rp	2022 Rp
PENDAPATAN USAHA	27	4.924.833.905.474	4.322.161.355.618
BEBAN POKOK PENDAPATAN	28	(3.239.785.478.329)	(2.890.946.868.126)
LABA BRUTO		1.685.048.427.145	1.431.214.487.492
BEBAN USAHA			
Beban Administrasi dan Umum	29	(1.088.885.756.757)	(840.688.534.554)
Pendapatan Lainnya	30	216.269.187.276	182.388.800.613
Beban Lainnya	30	(20.829.082.180)	(32.356.499.483)
Beban Pajak Final		(37.374.012.320)	(33.559.466.757)
LABA USAHA		754.228.763.164	706.998.787.311
Pendapatan Keuangan	31	51.190.982.813	41.389.226.068
Beban Keuangan	31	(139.540.019.036)	(132.201.822.301)
LABA SEBELUM PAJAK		665.879.726.941	616.186.191.078
BEBAN PAJAK PENGHASILAN	16.e	(29.340.137.475)	(31.011.798.938)
LABA TAHUN BERJALAN		636.539.589.466	585.174.392.140
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN			
Pengukuran Kembali Liabilitas Imbalan Pasti	22	(10.638.033.593)	(25.761.167.715)
Pajak Penghasilan Terkait	16.d	2.219.053.923	2.138.375.870
Jumlah Penghasilan Komprehensif Lain Setelah Pajak		(8.418.979.670)	(23.622.791.845)
JUMLAH LABA KOMPREHENSIF		628.120.609.796	561.551.600.295
Laba Tahun Berjalan Yang Dapat Diatribusikan Kepada:			
Pemilik Entitas Induk		613.449.069.695	563.765.073.338
Kepentingan Nonpengendali		23.090.519.771	21.409.318.802
JUMLAH LABA TAHUN BERJALAN		636.539.589.466	585.174.392.140
Laba Komprehensif Yang Dapat Diatribusikan Kepada:			
Pemilik Entitas Induk		604.911.743.719	540.099.221.007
Kepentingan Nonpengendali		23.208.866.077	21.452.379.288
JUMLAH LABA KOMPREHENSIF		628.120.609.796	561.551.600.295

*) Direklasifikasi (Catatan 40)

**PT ASDP INDONESIA FERRY (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAKNYA**
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS KONSOLIDASIAN
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
(Disajikan Dalam Rupiah Penuh, Kecuali Dinyatakan Lain)

Catatan	Ekuitas yang Dapat Diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk						
	Modal Ditempatkan Dan Disetor Rp	Tambahan Modal Disetor Rp	Saldo Laba			Kepentingan Nonpengendali Rp	Jumlah Ekuitas Rp
			Telaah Ditentukan Penggunaannya Rp	Belum Ditentukan Penggunaannya*) Rp	Jumlah Rp		
PER 31 DESEMBER 2021	5.173.195.000.000	8.445.362.065	1.042.809.239.338	553.419.344.852	6.777.868.946.255	129.605.939.875	6.907.474.886.130
26	-	--	325.452.616.764	(325.452.616.764)	--	--	--
Laba Tahun Berjalan	-	--	--	563.765.073.338	563.765.073.338	21.409.318.802	585.174.392.140
Penghasilan Komprehensif Lain	-	--	--	(23.665.852.331)	(23.665.852.331)	43.060.486	(23.622.791.845)
PER 31 DESEMBER 2022	5.173.195.000.000	8.445.362.065	1.368.261.856.102	768.065.949.095	7.317.968.167.262	151.058.319.163	7.469.026.486.425
25	-	388.564.810.000	--	--	388.564.810.000	--	388.564.810.000
26	-	--	462.765.073.338	(462.765.073.338)	--	--	--
Cadangan Umum	-	--	--	(101.000.000.000)	(101.000.000.000)	--	(101.000.000.000)
Dividen Tunai	-	--	--	613.449.069.695	613.449.069.695	23.090.519.771	636.539.589.466
Laba Tahun Berjalan	-	--	--	(8.537.325.976)	(8.537.325.976)	118.346.306	(8.418.979.670)
Penghasilan Komprehensif Lain	-	--	--	--	--	--	--
PER 31 DESEMBER 2023	5.173.195.000.000	397.010.172.065	1.831.026.929.440	809.212.619.476	8.210.444.720.981	174.267.185.240	8.384.711.906.221

*) Saldo Laba Termasuk Pengukuran Kembali Program Imbalan Pasti

Catatan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan

PT ASDP INDONESIA FERRY (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAKNYA
LAPORAN ARUS KAS KONSOLIDASIAN
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
(Disajikan Dalam Rupiah Penuh, Kecuali Dinyatakan Lain)

	Catatan	2023 Rp	2022 Rp
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI			
Penerimaan dari Pelanggan		4.919.995.817.602	4.322.806.655.099
Pembayaran Kas kepada Pemasok		(1.995.716.260.917)	(2.069.281.439.697)
Pembayaran kepada Karyawan		(1.116.106.569.968)	(983.682.892.292)
Pembayaran Beban Usaha		(509.824.712.750)	(350.134.254.001)
Penerimaan Lain-lain		78.001.781.027	49.246.214.132
Pembayaran Bunga Pinjaman		(120.138.180.953)	(107.155.315.190)
Penerimaan Bunga	32	51.190.982.813	41.389.226.068
Pembayaran Pajak Penghasilan		(168.167.487.238)	(109.813.833.328)
Penerimaan Restitusi Pajak	16	1.331.394.655	--
Kas Neto Diperoleh dari Aktivitas Operasi		1.140.566.764.271	793.374.360.791
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI			
Penerimaan Jaminan Usaha		19.964.753.750	20.003.560.497
Pembayaran Jaminan Usaha		(24.185.383.497)	(41.222.580.474)
Perolehan Aset Takberwujud	14	(8.212.373.388)	(6.257.758.834)
Perolehan Aset Tetap	12	(777.972.326.761)	(819.455.903.991)
Hasil Penjualan Aset Tetap	12	1.517.520.014	--
Pembayaran Uang Muka Pembangunan	9	--	(8.065.454.555)
Pembayaran Akuisisi Entitas Anak	33	--	(837.871.965.767)
Kas Neto Digunakan untuk Aktivitas Investasi		(788.887.809.882)	(1.692.870.103.124)
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN			
Pencairan Pinjaman Sindikasi	21	705.000.000.000	--
Pembayaran Pinjaman Sindikasi	21	(462.591.451.782)	(20.741.081.915)
Pembayaran Pinjaman Bank	20	(195.899.224.007)	(120.132.214.198)
Penerimaan Pinjaman Bank	20	--	600.000.000.000
Penerimaan Pinjaman Pihak Berelasi	19	25.324.713.300	2.720.251.986
Pembayaran Pinjaman Pihak Berelasi		(140.421.985.975)	--
Pembayaran Dividen		(101.000.000.000)	--
Pembayaran Utang Pembiayaan	23	--	(26.005.176.402)
Pembayaran Liabilitas Sewa	38	(35.224.729.903)	(53.645.429.851)
Kas Neto Diperoleh dari (Digunakan untuk) Aktivitas Pendanaan		(204.812.678.367)	382.196.349.620
KENAIKAN (PENURUNAN) BERSIH KAS DAN SETARA KAS		146.866.276.022	(517.299.392.713)
PENGARUH SELISIH KURS ATAS KAS DAN SETARA KAS		(12.172.880)	6.594.525
KAS DAN SETARA KAS AWAL TAHUN		1.341.490.853.172	1.858.783.651.360
KAS DAN SETARA KAS AKHIR TAHUN		1.488.344.956.314	1.341.490.853.172

Informasi transaksi yang tidak mempengaruhi arus kas disajikan dalam Catatan 38

**PT ASDP INDONESIA FERRY (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
(Disajikan Dalam Rupiah Penuh, Kecuali Dinyatakan Lain)

1. Umum

1.a. Pendirian Perusahaan

PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) ("Perusahaan") didirikan pada tahun 1973 dengan nama Proyek Angkutan Sungai Danau dan Ferry (PASDF) berdasarkan Surat Keputusan Menteri Perhubungan Republik Indonesia No. KM.50/R/PHB-1973 tanggal 27 Maret 1973, di bawah pembinaan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 1986, status Perusahaan ditetapkan menjadi Perusahaan Umum Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan (PERUM ASDP). Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 15 tahun 1992 tanggal 17 Maret 1992, Pemerintah meningkatkan status dari bentuk PERUM ASDP menjadi PT Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan (Persero).

Anggaran dasar telah mengalami beberapa perubahan, terakhir berdasarkan Akta No. 9 tanggal 1 September 2021 yang dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta. Perubahan tersebut telah diterima oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan surat keputusan No. AHU-AH.01.03-0449066 tanggal 16 September 2021.

Sesuai dengan anggaran dasar Perusahaan, ruang lingkup kegiatan Perusahaan terutama meliputi bidang penyelenggaraan jasa pelabuhan, jasa angkutan sungai, danau dan penyeberangan dan jasa angkutan laut. Perusahaan mulai beroperasi secara komersial pada tahun 1973.

Perusahaan berkedudukan dan berkantor pusat di Jalan Ahmad Yani No. 52 A, Jakarta Timur. Jumlah cabang operasional dan pelabuhan Perusahaan terdiri dari 29 Cabang operasional dan 34 pelabuhan sesuai dengan surat keputusan Direksi PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) No.SK.1545/HK.001/ASDP-2017 tanggal 4 Desember 2017 tentang penetapan kelas cabang di lingkungan PT ASDP Indonesia Ferry (Persero).

Pemerintah Republik Indonesia adalah pemegang saham Perusahaan, dengan kepemilikan 100%.

1.b. Dewan Komisaris, Direksi dan Karyawan

Susunan anggota Dewan Komisaris dan Dewan Direksi Perusahaan pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 35 tanggal 16 Juni 2023 yang telah diberitahukan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan Surat Pemberitahuan No.AHU-AH.01.09-0129702 tanggal 20 Juni 2023 dan Akta No. 3 tanggal 3 November 2022 yang telah mendapat persetujuan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan Surat Pemberitahuan No.AHU-AH.01.09-0136433 tanggal 28 Desember 2022, adalah sebagai berikut:

	2023	2022
Dewan Komisaris		
Komisaris Utama :	Saiful Haq Manan	Saiful Haq Manan
Komisaris Independen :	Iwan Hari Sugiarto	Iwan Hari Sugiarto
Komisaris Independen :	Hendar Ristriawan	Hendar Ristriawan
Komisaris :	Susi Mayrista Tarigan	Susi Mayrista Tarigan
Komisaris :	Budi Setiyadi	Budi Setiyadi
Komisaris :	Edmil Nurjamil	Edmil Nurjamil
Dewan Direksi		
Direktur Utama :	Ira Puspawati	Ira Puspawati
Direktur Teknik dan Fasilitas :	Kusnadi Chandra Wijaya	Kusnadi Chandra Wijaya
Direktur Perencanaan dan Pengembangan :	Harry Muhammad Adhi Caksono	Harry Muhammad Adhi Caksono
Direktur Komersial dan Pelayanan :	Muhammad Yusuf Hadi	Muhammad Yusuf Hadi
Direktur SDM dan Layanan Korporasi :	Wahyu Wibowo	Wahyu Wibowo
Direktur Keuangan dan Teknologi Informasi :	Djunia Satriawan	Djunia Satriawan

Pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 jumlah karyawan Perusahaan masing-masing sejumlah 4.738 dan 4.627 orang (tidak diaudit).

**PT ASDP INDONESIA FERRY (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
(Disajikan Dalam Rupiah Penuh, Kecuali Dinyatakan Lain)

1.c. Komite Audit, Sekretaris Perusahaan, dan Kepala Internal Audit

Susunan anggota Komite Audit pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

	2023 dan 2022
Ketua	Hendar Ristriawan
Wakil Ketua	Edmil Nurjamil
Anggota	Made Sumadi Arta
Anggota	Triandi

Sekretaris Perusahaan adalah Shelly Arifin masing-masing pada 31 Desember 2023 dan 2022. Kepala Internal Audit Perusahaan pada 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing dijabat oleh Theresia Damayanti.

1.d. Struktur Entitas Anak

Perusahaan memiliki pengendalian atas entitas anak yang dikonsolidasi pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 sebagai berikut:

Entitas Anak	Kegiatan Usaha Utama	Lokasi Domisili	Tahun Beroperasi Komersil	Persentase Kepemilikan		Total Aset	
				2023 %	2022 %	2023 Rp	2022 Rp
PT Indonesia Ferry Properti	Perdagangan Umum dan Real Estat	Jakarta	2017	51,00	51,00	1.146.902.107.288	1.167.903.966.797
PT Jembatan Nusantara	Jasa Pelayaran	Surabaya	2022	99,99	99,99	1.696.660.781.298	1.723.854.781.737

PT Indonesia Ferry Property (IFPRO)

Berdasarkan Akta No. 21 tanggal 5 September 2017 yang dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, Perusahaan memiliki 120.000 lembar saham senilai Rp120.000.000.000 yang mewakili kepemilikan sebesar 51%. Akta pendirian ini telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam surat keputusan No.AHU.0041206.AH.01.01 tahun 2017 tanggal 19 September 2017.

Berdasarkan Akta No.10 tanggal 6 Februari 2018 yang dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Para Pemegang Saham IFPRO menyetujui untuk melakukan peningkatan modal ditempatkan dan disetor menjadi sebesar Rp309.583.000.000 dengan nilai per lembar saham sebesar Rp1.000.000. Atas peningkatan modal disetor tersebut, kepemilikan perusahaan menjadi sebesar Rp157.887.000.000 atau 51%. Akta tersebut telah diberitahukan perubahannya kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat No.AHU-AH.01.03-0063595 tanggal 12 Februari 2018.

PT Jembatan Nusantara (JN)

JN mengalami beberapa kali perubahan anggaran dasar terakhir Akta No. 8 tanggal 17 Oktober 2022 yang dibuat di hadapan Atika Batohir, S.H., M.Kn., Notaris di Surabaya. Akta perubahan ini telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No.AHU-0075049.AH.01.02 TAHUN 2022 tanggal 18 Oktober 2022.

Berdasarkan Akta No. 140 tanggal 22 Februari 2022 oleh Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, yang telah disahkan dengan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-AH.01.03-0116605 tanggal 22 Februari 2022, Pemegang Saham JN menyetujui perjanjian jual beli 1.573.115.400 lembar saham milik PT Mahkota Pratama dan 174.790.600 lembar saham milik PT Indonesia VIP, setara dengan 100% kepemilikan saham JN, kepada Perusahaan dan menyetujui pembelian 7 kapal dari PT Prima Eksekutif.

Berdasarkan Akta No. 16 tanggal 13 Juli 2022 oleh Eva Purwanti, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, yang telah disahkan dengan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-AH.01.03-0267941 tanggal 20 Juli 2022, Pemegang Saham menyetujui untuk meningkatkan modal disetor JN sebesar Rp380.000.000.000 sehingga total modal saham JN menjadi sebesar Rp1.253.953.000.000.

**PT ASDP INDONESIA FERRY (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
(Disajikan Dalam Rupiah Penuh, Kecuali Dinyatakan Lain)

Berdasarkan Akta Notaris No. 6 tanggal 12 Oktober 2022 oleh Aryanti Artisari, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta dan telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0204896.AH.01.11.TAHUN 2022 tanggal 13 Oktober 2022, Perusahaan mengalihkan sejumlah 174.791 lembar saham JN senilai Rp87.395.500 kepada Dana Pensiun ASDP.

2. Informasi Kebijakan Akuntansi Material

2.a. Kepatuhan Terhadap Standar Akuntansi Keuangan (SAK)

Laporan keuangan konsolidasian telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia yang meliputi Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) dan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (ISAK) yang diterbitkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan-Ikatan Akuntan Indonesia (DSAK-IAI).

2.b. Dasar Pengukuran dan Penyusunan Laporan Keuangan Konsolidasian

Laporan keuangan konsolidasian meliputi laporan keuangan Perusahaan dan Entitas anak (selanjutnya secara kolektif disebut sebagai "Grup").

Laporan keuangan konsolidasian disusun dan disajikan berdasarkan asumsi kelangsungan usaha serta atas dasar akrual, kecuali laporan arus kas konsolidasian. Dasar pengukuran dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasian ini adalah konsep biaya perolehan, kecuali beberapa akun tertentu yang didasarkan pengukuran lain sebagaimana dijelaskan dalam kebijakan akuntansi masing-masing akun tersebut. Biaya perolehan umumnya didasarkan pada nilai wajar imbalan yang diserahkan dalam pemerolehan aset.

Laporan arus kas konsolidasian disajikan dengan metode langsung (*direct method*) dengan mengelompokkan arus kas dalam aktivitas operasi, investasi dan pendanaan.

Mata uang penyajian yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasian ini adalah Rupiah yang merupakan mata uang fungsional Grup. Setiap entitas di dalam Grup menetapkan mata uang fungsional sendiri dan unsur-unsur dalam laporan keuangan dari setiap entitas diukur berdasarkan mata uang fungsional tersebut.

2.c. Pernyataan dan Interpretasi Standar Akuntansi Baru dan Revisi yang Berlaku Efektif pada Tahun Berjalan

Berikut amendemen dan penyesuaian atas standar yang berlaku efektif untuk periode yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2023; dengan penerapan dini diperkenankan yaitu:

- Amendemen PSAK 1: Penyajian Laporan Keuangan tentang Pengungkapan Kebijakan Akuntansi;
- Amendemen PSAK 16: Aset Tetap tentang Hasil Sebelum Penggunaan yang Diintensikan;
- Amendemen PSAK 25: Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi, dan Kesalahan tentang Definisi Estimasi Akuntansi;
- Amendemen PSAK 46: Pajak Penghasilan tentang Pajak Tangguhan terkait Aset dan Liabilitas yang timbul dari Transaksi Tunggal; dan
- Revisi PSAK 107: Akuntansi Ijarah.

Implementasi standar-standar tersebut tidak memiliki dampak yang material terhadap jumlah yang dilaporkan di periode berjalan atau tahun sebelumnya.

2.d. Prinsip-prinsip Konsolidasian

Laporan keuangan konsolidasian mencakup laporan keuangan Grup seperti disebutkan pada Catatan 1.d.

Entitas anak adalah entitas yang dikendalikan oleh Grup, yakni Grup terekspos, atau memiliki hak, atas imbal hasil variabel dari keterlibatannya dengan entitas dan memiliki kemampuan untuk mempengaruhi imbal hasil tersebut melalui kemampuan kini untuk mengarahkan aktivitas relevan dari entitas (kekuasaan atas *investee*).

**PT ASDP INDONESIA FERRY (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
(Disajikan Dalam Rupiah Penuh, Kecuali Dinyatakan Lain)

Keberadaan dan dampak dari hak suara potensial dimana Grup memiliki kemampuan praktis untuk melaksanakan (yakni hak substantif) dipertimbangkan saat menilai apakah Grup mengendalikan entitas lain.

Laporan keuangan konsolidasian Grup mencakup hasil usaha, arus kas, aset dan liabilitas dari Perusahaan dan seluruh entitas anak yang, secara langsung dan tidak langsung, dikendalikan oleh Perusahaan. Entitas anak dikonsolidasikan sejak tanggal efektif akuisisi, yaitu tanggal dimana Grup secara efektif memperoleh pengendalian atas bisnis yang diakuisisi, sampai tanggal pengendalian berakhir.

Entitas induk menyusun laporan keuangan konsolidasian dengan menggunakan kebijakan akuntansi yang sama untuk transaksi dan peristiwa lain dalam keadaan yang serupa. Seluruh transaksi, saldo, penghasilan, beban, dan arus kas dalam intra kelompok usaha terkait dengan transaksi antar entitas dalam kelompok usaha dieliminasi secara penuh.

Grup mengatribusikan laba rugi dan setiap komponen dari penghasilan komprehensif lain kepada pemilik entitas induk dan kepentingan nonpengendali meskipun hal tersebut mengakibatkan kepentingan nonpengendali memiliki saldo defisit. Grup menyajikan kepentingan nonpengendali di ekuitas dalam laporan posisi keuangan konsolidasian, terpisah dari ekuitas pemilik entitas induk.

Perubahan dalam bagian kepemilikan entitas induk pada entitas anak yang tidak mengakibatkan hilangnya pengendalian adalah transaksi ekuitas (yaitu transaksi dengan pemilik dalam kapasitasnya sebagai pemilik). Ketika proporsi ekuitas yang dimiliki oleh kepentingan nonpengendali berubah, Grup menyesuaikan jumlah tercatat kepentingan pengendali dan kepentingan nonpengendali untuk mencerminkan perubahan kepemilikan relatifnya dalam entitas anak. Selisih antara jumlah dimana kepentingan nonpengendali disesuaikan dan nilai wajar dari jumlah yang diterima atau dibayarkan diakui langsung dalam ekuitas dan diatribusikan pada pemilik dari entitas induk.

2.e. Kombinasi Bisnis

Kombinasi bisnis adalah suatu transaksi atau peristiwa lain dimana pihak pengakuisisi memperoleh pengendalian atas satu atau lebih bisnis. Kombinasi bisnis dicatat dengan menggunakan metode akuisisi. Imbalan yang dialihkan dalam suatu kombinasi bisnis diukur pada nilai wajar, yang dihitung sebagai hasil penjumlahan dari nilai wajar tanggal akuisisi atas seluruh aset yang dialihkan oleh Grup, liabilitas yang diakui oleh Grup kepada pemilik sebelumnya dari pihak yang diakuisisi dan kepentingan ekuitas yang diterbitkan oleh Grup dalam pertukaran pengendalian dari pihak yang diakuisisi. Biaya-biaya terkait akuisisi diakui sebagai beban pada periode saat biaya tersebut terjadi dan jasa diterima.

Pada tanggal akuisisi, aset teridentifikasi yang diperoleh dan liabilitas yang diambil alih diakui pada nilai wajar kecuali untuk aset dan liabilitas tertentu yang diukur sesuai dengan standar yang relevan.

Komponen kepentingan non-pengendali pada pihak diakuisisi diukur baik pada nilai wajar ataupun pada bagian proporsional instrumen kepemilikan yang ada dalam jumlah yang diakui atas aset neto teridentifikasi dari pihak diakuisisi.

Jika akuntansi awal untuk kombinasi bisnis belum selesai pada akhir periode pelaporan saat kombinasi terjadi, Grup melaporkan jumlah sementara untuk pos-pos yang proses akuntansinya belum selesai dalam laporan keuangannya. Selama periode pengukuran, pihak pengakuisisi menyesuaikan, aset atau liabilitas tambahan yang diakui, untuk mencerminkan informasi baru yang diperoleh tentang fakta dan keadaan yang ada pada tanggal akuisisi dan, jika diketahui, akan berakibat terhadap pengakuan aset dan liabilitas dimaksud pada tanggal tersebut.

**PT ASDP INDONESIA FERRY (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
(Disajikan Dalam Rupiah Penuh, Kecuali Dinyatakan Lain)

Pada tanggal akuisisi, goodwill diukur pada harga perolehan yang merupakan selisih lebih antara (a) nilai gabungan dari imbalan yang dialihkan dan jumlah setiap kepentingan non-pengendali, atas (b) jumlah neto teridentifikasi dari aset yang diperoleh dan liabilitas yang diambil alih. Jika imbalan tersebut kurang dari nilai wajar aset neto entitas anak yang diakuisisi, selisih tersebut diakui dalam laporan laba rugi sebagai keuntungan dari akuisisi entitas anak setelah sebelumnya manajemen menilai kembali apakah telah mengidentifikasi dengan tepat seluruh aset yang diperoleh dan liabilitas yang diambil alih serta mengakui setiap aset atau liabilitas tambahan yang dapat diidentifikasi dalam penelaahan tersebut.

2.f. Transaksi Dengan Pihak-Pihak Yang Berelasi

Pihak berelasi adalah orang atau entitas yang terkait dengan entitas pelapor:

- a) Orang atau anggota keluarga dekatnya mempunyai relasi dengan entitas pelapor jika orang tersebut:
 - i. Memiliki pengendalian atau pengendalian bersama atas entitas pelapor;
 - ii. Memiliki pengaruh signifikan atas entitas pelapor; atau
 - iii. Merupakan personil manajemen kunci entitas pelapor atau entitas induk dari entitas pelapor.
- b) Suatu entitas berelasi dengan entitas pelapor jika memenuhi salah satu hal berikut:
 - i. Entitas dan entitas pelapor adalah anggota dari kelompok usaha yang sama (artinya entitas induk, entitas anak, dan sesama entitas anak berikutnya saling berelasi dengan entitas lainnya);
 - ii. Satu entitas adalah entitas asosiasi atau ventura bersama dari entitas lain (atau entitas asosiasi atau ventura bersama yang merupakan anggota suatu kelompok usaha, di mana entitas lain tersebut adalah anggotanya);
 - iii. Kedua entitas tersebut adalah ventura bersama dari pihak ketiga yang sama;
 - iv. Satu entitas adalah ventura bersama dari entitas ketiga dan entitas yang lain adalah entitas asosiasi dari entitas ketiga;
 - v. Entitas tersebut adalah suatu program imbalan pascakerja untuk imbalan kerja dari salah satu entitas pelapor atau entitas yang terkait dengan entitas pelapor. Jika entitas pelapor adalah entitas yang menyelenggarakan program tersebut, maka entitas sponsor juga berelasi dengan entitas pelapor;
 - vi. Entitas yang dikendalikan atau dikendalikan bersama oleh orang yang diidentifikasi dalam huruf (a);
 - vii. Orang yang diidentifikasi dalam huruf (a) (i) memiliki pengaruh signifikan atas entitas atau personil manajemen kunci entitas (atau entitas induk dari entitas);
 - viii. Entitas, atau anggota dari kelompok di mana entitas merupakan bagian dari kelompok tersebut, menyediakan jasa personil manajemen kunci kepada entitas pelapor atau kepada entitas induk dari entitas pelapor.

Entitas yang berelasi dengan Pemerintah adalah entitas yang dikendalikan, dikendalikan bersama, atau dipengaruhi oleh Pemerintah. Pemerintah mengacu kepada instansi pemerintah dan badan yang serupa baik lokal, nasional maupun internasional.

Entitas yang berelasi dengan Pemerintah dapat berupa entitas yang dikendalikan atau dipengaruhi secara signifikan oleh Kementerian Keuangan yang merupakan Pemegang Saham entitas, atau entitas yang dikendalikan oleh Pemerintah Republik Indonesia melalui Kementerian Negara BUMN sebagai kuasa pemegang saham.

Seluruh transaksi dan saldo yang signifikan dengan pihak berelasi diungkapkan dalam catatan yang relevan.

2.g. Transaksi dan Saldo dalam Mata Uang Asing

Dalam menyiapkan laporan keuangan, setiap entitas di dalam Grup mencatat dengan menggunakan mata uang dari lingkungan ekonomi utama di mana entitas beroperasi ("mata uang fungsional"). Mata uang fungsional Perusahaan dan seluruh entitas anak adalah Rupiah.

PT ASDP INDONESIA FERRY (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan)
 Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
 Pada Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
 (Disajikan Dalam Rupiah Penuh, Kecuali Dinyatakan Lain)

Transaksi-transaksi selama tahun berjalan dalam mata uang asing dicatat dalam Rupiah dengan kurs spot antara Rupiah dan valuta asing pada tanggal transaksi.

Pada akhir periode pelaporan, pos moneter dalam mata uang asing dijabarkan ke dalam Rupiah menggunakan kurs penutup, yaitu kurs tengah Bank Indonesia pada 31 Desember 2023 dan 2022 sebagai berikut:

	2023	2022
	Rp	Rp
USD	15.416	15.731
EUR	17.140	16.713

Selisih kurs yang timbul dari penyelesaian pos moneter dan dari penjabaran pos moneter dalam mata uang asing diakui dalam laba rugi.

2.h. Kas dan Setara kas

Kas dan setara kas termasuk kas, kas di bank (rekening giro), dan deposito berjangka yang jatuh tempo dalam jangka waktu tiga bulan atau kurang pada saat penempatan yang tidak digunakan sebagai jaminan atau tidak dibatasi penggunaannya.

2.i. Persediaan

Persediaan dinyatakan berdasarkan jumlah terendah antara biaya perolehan dan nilai realisasi neto. Biaya persediaan terdiri dari seluruh biaya pembelian, biaya konversi dan biaya lain yang timbul sampai persediaan berada dalam kondisi dan lokasi saat ini. Biaya perolehan ditentukan dengan metode rata-rata tertimbang. Nilai realisasi neto merupakan taksiran harga jual dalam kegiatan usaha biasa dikurangi estimasi biaya penyelesaian dan estimasi biaya yang diperlukan untuk membuat penjualan.

2.j. Biaya Dibayar di Muka

Biaya dibayar di muka diamortisasi sesuai masa manfaat dengan menggunakan metode garis lurus (*straight-line method*).

2.k. Properti Investasi

Properti investasi adalah properti (tanah atau bangunan atau bagian dari suatu bangunan atau kedua-duanya) yang dikuasai oleh pemilik atau penyewa melalui sewa pembiayaan untuk menghasilkan sewa atau untuk kenaikan nilai atau kedua-duanya, dan tidak untuk digunakan dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa atau untuk tujuan administratif; atau dijual dalam kegiatan usaha sehari-hari.

Properti investasi diakui sebagai aset jika dan hanya jika besar kemungkinan manfaat ekonomik masa depan yang terkait dengan properti investasi akan mengalir ke entitas; dan biaya perolehan properti investasi dapat diukur dengan andal.

Properti investasi pada awalnya diukur sebesar biaya perolehan, meliputi harga pembelian dan setiap pengeluaran yang dapat diatribusikan secara langsung (biaya jasa hukum, pajak pengalihan properti, dan biaya transaksi lain). Biaya transaksi termasuk dalam pengukuran awal tersebut.

Setelah pengakuan awal, Grup memilih menggunakan model nilai wajar dan mengukur seluruh properti investasi berdasarkan nilai wajar. Keuntungan atau kerugian yang timbul dari perubahan nilai wajar properti investasi diakui dalam laba rugi pada periode terjadinya.

Penentuan nilai wajar investasi didasarkan pada penilaian oleh penilai independen yang mempunyai kualifikasi profesional yang telah diakui dan relevan serta memiliki pengalaman terkini di lokasi dan kategori properti investasi yang dinilai.

**PT ASDP INDONESIA FERRY (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
(Disajikan Dalam Rupiah Penuh, Kecuali Dinyatakan Lain)

Biaya pemeliharaan dan perbaikan dibebankan pada laba rugi pada saat terjadinya, sedangkan pemugaran dan penambahan dikapitalisasi.

Grup mengalihkan properti ke, atau dari, properti investasi jika, dan hanya jika, ketika properti memenuhi, atau berhenti memenuhi, definisi properti investasi dan terdapat bukti atas perubahan penggunaan, mencakup:

- Dimulainya penggunaan oleh pemilik, atau, pengembangan untuk pemilik, untuk pengalihan dari properti investasi menjadi properti yang digunakan sendiri;
- Dimulainya pengembangan untuk dijual, untuk pengalihan dari properti investasi menjadi persediaan;
- Berakhirnya pemakaian oleh pemilik, untuk pengalihan dari properti yang digunakan sendiri menjadi properti investasi; dan
- Insepsi sewa operasi kepada pihak lain, untuk pengalihan dari persediaan menjadi properti investasi.

Properti investasi dihentikan pengakuannya pada saat dilepaskan atau ketika tidak digunakan lagi secara permanen dan tidak memiliki manfaat ekonomi masa depan yang diperkirakan dari pelepasannya. Keuntungan atau kerugian yang timbul dari penghentian atau pelepasan ditentukan dari selisih antara hasil neto pelepasan dan jumlah tercatat aset, dan diakui dalam laba rugi pada periode terjadinya penghentian atau pelepasan.

2.1. Aset Tetap

Aset tetap pada awalnya diakui sebesar biaya perolehan yang meliputi harga perolehannya dan setiap biaya yang dapat diatribusikan langsung untuk membawa aset ke kondisi dan lokasi yang diinginkan agar aset siap digunakan sesuai intensi manajemen.

Apabila relevan, biaya perolehan juga dapat mencakup estimasi awal biaya pembongkaran dan pemindahan aset tetap dan restorasi lokasi aset tetap, kewajiban tersebut timbul ketika aset tetap diperoleh atau sebagai konsekuensi penggunaan aset tetap selama periode tertentu untuk tujuan selain untuk memproduksi persediaan selama periode tersebut.

Setelah pengakuan awal, aset tetap kecuali tanah dinyatakan sebesar biaya perolehan dikurangi akumulasi penyusutan dan akumulasi rugi penurunan nilai.

Tanah diakui sebesar harga perolehannya dan tidak disusutkan.

Penyusutan aset tetap dimulai pada saat aset tersebut siap untuk digunakan sesuai maksud penggunaannya dan dihitung dengan menggunakan metode garis lurus berdasarkan estimasi masa manfaat ekonomis aset sebagai berikut:

	Tahun
Bangunan, Rumah Dinas dan Kantor	5 - 20
Bangunan Pelabuhan	5 - 20
Armada Kapal	5 - 30
Kendaraan	5
Peralatan Kantor	5

Aset tetap yang dikonstruksi sendiri disajikan sebagai bagian aset tetap sebagai "Aset Dalam Penyelesaian" dan dinyatakan sebesar biaya perolehannya. Semua biaya yang terjadi sehubungan dengan penyelesaian aset tersebut dikapitalisasi sebagai bagian dari biaya perolehan aset tetap dalam penyelesaian.

Akumulasi biaya perolehan akan dipindahkan ke masing-masing pos aset tetap yang sesuai pada saat aset tersebut selesai dikerjakan atau siap digunakan dan disusutkan sejak beroperasi.

**PT ASDP INDONESIA FERRY (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
(Disajikan Dalam Rupiah Penuh, Kecuali Dinyatakan Lain)

Nilai tercatat dari suatu aset tetap dihentikan pengakuannya pada saat pelepasan atau ketika tidak terdapat lagi manfaat ekonomis masa depan yang diharapkan dari penggunaan atau pelepasannya. Keuntungan atau kerugian yang timbul dari penghentian pengakuan tersebut (yang ditentukan sebesar selisih antara jumlah hasil pelepasan neto, jika ada, dan jumlah tercatatnya) dimasukkan dalam laba rugi pada saat penghentian pengakuan tersebut dilakukan.

Pada akhir periode pelaporan, Grup melakukan penelaahan berkala atas masa manfaat, nilai residu, metode penyusutan, dan sisa umur pemakaian berdasarkan kondisi teknis.

2.m. Aset Takberwujud

Aset takberwujud diukur sebesar nilai perolehan pada pengakuan awal. Setelah pengakuan awal, aset takberwujud dicatat pada biaya perolehan dikurangi akumulasi amortisasi dan akumulasi rugi penurunan nilai (jika ada). Umur manfaat aset takberwujud dinilai apakah terbatas atau tidak terbatas.

Aset takberwujud dengan umur manfaat terbatas

Aset takberwujud dengan umur manfaat terbatas diamortisasi selama umur manfaat ekonomis dengan metode garis lurus.

Amortisasi dihitung sebagai penghapusan biaya perolehan aset takberwujud, dikurangi nilai residunya, atas umur ekonomisnya sehubungan dengan lisensi *software* selama 5 tahun.

Periode amortisasi dan metode amortisasi untuk aset takberwujud dengan umur manfaat terbatas ditelaah setidaknya setiap akhir tahun buku.

2.n. Sewa

Pada tanggal inisiasi kontrak, Grup menilai apakah kontrak merupakan, atau mengandung sewa. Suatu kontrak merupakan atau mengandung sewa jika kontrak tersebut memberikan hak untuk mengendalikan penggunaan aset identifikasian selama suatu jangka waktu untuk dipertukarkan dengan imbalan.

Untuk menilai apakah kontrak memberikan hak untuk mengendalikan penggunaan aset identifikasian selama suatu jangka waktu, Grup menilai apakah selama periode penggunaan, Grup memiliki dua hal berikut:

- a. Hak untuk mendapatkan secara substansial seluruh manfaat ekonomi dari penggunaan aset identifikasian; dan
- b. Hak untuk mengarahkan penggunaan aset identifikasian, yaitu hanya jika:
 - (i) Grup memiliki hak untuk mengarahkan bagaimana dan untuk tujuan apa aset digunakan selama periode penggunaan; atau
 - (ii) keputusan yang relevan tentang bagaimana dan untuk tujuan apa aset digunakan telah ditentukan sebelumnya dan:
 - Grup memiliki hak mengoperasikan aset (atau mengarahkan pihak lain untuk mengoperasikan aset dengan cara yang telah ditentukan) selama periode penggunaan, tanpa pemasok memiliki hak untuk mengubah instruksi operasi tersebut; atau
 - Grup mendesain aset (atau aspek tertentu dari aset) dengan cara menetapkan sebelumnya bagaimana dan untuk tujuan apa aset akan digunakan selama periode penggunaan.

Grup Sebagai Penyewa (Lessee)

Pada tanggal permulaan, Grup mengakui aset hak-guna dan liabilitas sewa.

Pada tanggal permulaan, Grup mengukur aset hak-guna pada biaya perolehan, yang meliputi jumlah pengukuran awal liabilitas sewa, pembayaran sewa yang dilakukan pada atau sebelum tanggal permulaan dikurangi dengan insentif yang diterima, biaya langsung awal yang dikeluarkan oleh Grup, dan estimasi biaya yang akan dikeluarkan oleh Grup dalam membongkar dan memindahkan aset pendasar atau untuk merestorasi aset pendasar ke kondisi yang disyaratkan dan ketentuan sewa, kecuali biaya-biaya tersebut dikeluarkan untuk menghasilkan persediaan.

**PT ASDP INDONESIA FERRY (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
(Disajikan Dalam Rupiah Penuh, Kecuali Dinyatakan Lain)

Setelah tanggal permulaan, Grup mengukur aset hak-guna dengan menerapkan model biaya, kecuali entitas menerapkan model pengukuran lain.

Pada tanggal permulaan, Grup mengukur liabilitas sewa pada nilai kini pembayaran sewa yang belum dibayar pada tanggal tersebut. Pembayaran sewa didiskontokan dengan menggunakan suku bunga implisit dalam sewa, jika suku bunga tersebut dapat ditentukan. Jika suku bunga tersebut tidak dapat ditentukan, maka Grup menggunakan suku bunga pinjaman inkremental Grup.

Setelah tanggal permulaan, Grup mengukur liabilitas sewa dengan:

- meningkatkan jumlah tercatat untuk merefleksikan bunga atas liabilitas sewa;
- mengurangi jumlah tercatat untuk merefleksikan sewa yang telah dibayar; dan
- mengukur kembali jumlah tercatat untuk merefleksikan penilaian kembali atau modifikasi sewa atau untuk merefleksikan pembayaran sewa tetap secara substansi revisian.

Grup sebagai Pemberi Sewa (Lessor)

Grup mengakui aset untuk sewa operasi di laporan posisi keuangan sesuai sifat aset tersebut. Biaya langsung awal sehubungan proses negosiasi sewa operasi ditambahkan ke jumlah tercatat dari aset sewaan dan diakui sebagai beban selama masa sewa dengan dasar yang sama dengan pendapatan sewa operasi. Sewa kontinjen, apabila ada, diakui sebagai pendapatan pada periode terjadinya. Pendapatan sewa operasi diakui sebagai pendapatan atas dasar garis lurus selama masa sewa.

2.o. Pengakuan Pendapatan dan Beban

Dalam menentukan pengakuan pendapatan, Grup melakukan analisa transaksi melalui lima langkah analisa berikut:

- Mengidentifikasi kontrak dengan pelanggan, dengan kriteria sebagai berikut:
 - Kontrak telah disetujui oleh pihak-pihak terkait dalam kontrak.
 - Grup bisa mengidentifikasi hak dari pihak-pihak terkait dan jangka waktu pembayaran dari barang atau jasa yang akan dialihkan.
 - Kontrak memiliki substansi komersial.
- Mengidentifikasi kewajiban pelaksanaan dalam kontrak. Kewajiban pelaksanaan merupakan janji-janji dalam kontrak untuk menyerahkan barang atau jasa yang memiliki karakteristik berbeda ke pelanggan.
- Menentukan harga transaksi, setelah dikurangi diskon, retur, insentif penjualan, pajak penjualan barang mewah, pajak pertambahan nilai dan pungutan ekspor, yang berhak diperoleh suatu entitas sebagai kompensasi atas diteruskannya barang atau jasa yang dijanjikan ke pelanggan.
- Mengalokasi harga transaksi ke setiap kewajiban pelaksanaan dengan menggunakan dasar harga jual dari setiap barang atau jasa berbeda yang dijanjikan di kontrak.
- Mengakui pendapatan ketika kewajiban pelaksanaan telah dipenuhi (sepanjang waktu atau pada suatu waktu tertentu).

Kewajiban pelaksanaan dapat dipenuhi dengan cara sebagai berikut:

- Suatu waktu tertentu (umumnya janji untuk menyerahkan barang ke pelanggan); atau
- Sepanjang waktu (umumnya janji untuk menyerahkan jasa ke pelanggan). Untuk kewajiban pelaksanaan yang dipenuhi sepanjang waktu waktu, Grup memilih ukuran penyelesaian yang sesuai untuk penentuan jumlah pendapatan yang harus diakui karena telah terpenuhinya kewajiban pelaksanaan.

Suatu kewajiban pelaksanaan dipenuhi pada suatu waktu tertentu kecuali jika memenuhi salah satu kriteria berikut, dalam hal ini dipenuhi dari sepanjang waktu:

- Pelanggan secara bersamaan menerima dan menggunakan manfaat yang diberikan oleh pelaksanaan Grup sebagaimana yang dilakukan Grup;
- Pelaksanaan Grup menciptakan atau meningkatkan aset yang dikendalikan pelanggan saat aset itu dibuat atau ditingkatkan; dan
- Pelaksanaan Grup tidak menciptakan aset dengan penggunaan alternatif untuk Grup dan Grup memiliki hak yang dapat diberlakukan atas pembayaran untuk pelaksanaan yang diselesaikan hingga saat ini.

**PT ASDP INDONESIA FERRY (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
(Disajikan Dalam Rupiah Penuh, Kecuali Dinyatakan Lain)

Pendapatan dari penjualan barang diakui pada saat pengendalian atas barang telah berpindah kepada pelanggan. Pendapatan jasa diakui pada saat pelanggan menerima dan mengonsumsi manfaat dari jasa tersebut.

Beban diakui pada saat terjadinya, dengan menggunakan dasar akrual.

2.p. Imbalan Kerja

Imbalan Kerja Jangka Pendek

Imbalan kerja jangka pendek diakui ketika seorang karyawan telah bekerja dalam suatu periode akuntansi. Jumlah imbalan kerjanya diukur berdasarkan nilai nominal tanpa memperhitungkan nilai tunainya.

Imbalan kerja jangka pendek mencakup antara lain upah, gaji, bonus dan insentif.

Imbalan Pascakerja

Imbalan pascakerja seperti uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak dihitung berdasarkan Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah No. 35 tahun 2021.

Grup mengakui jumlah liabilitas imbalan pasti neto sebesar nilai kini kewajiban imbalan pasti pada akhir periode pelaporan dikurangi nilai wajar aset program yang dihitung oleh aktuaris independen dengan menggunakan metode *Projected Unit Credit*. Nilai kini kewajiban imbalan imbalan pasti ditentukan dengan mendiskontokan imbalan tersebut.

Grup mencatat tidak hanya kewajiban hukum berdasarkan persyaratan formal program imbalan pasti, tetapi juga kewajiban konstruktif yang timbul dari praktik informal entitas.

Biaya jasa kini, biaya jasa lalu dan keuntungan atau kerugian atas penyelesaian, serta bunga neto atas liabilitas (aset) imbalan pasti neto diakui dalam laba rugi.

Pengukuran kembali atas liabilitas (aset) imbalan pasti neto yang terdiri dari keuntungan dan kerugian aktuarial, imbal hasil atas aset program dan setiap perubahan dampak batas atas aset diakui sebagai penghasilan komprehensif lain.

Pesangon

Grup mengakui pesangon sebagai liabilitas dan beban pada tanggal yang lebih awal di antara:

- a. Ketika Grup tidak dapat lagi menarik tawaran atas imbalan tersebut; dan
- b. Ketika Grup mengakui biaya untuk restrukturisasi yang berada dalam ruang lingkup PSAK 57 dan melibatkan pembayaran pesangon.

Grup mengukur pesangon pada saat pengakuan awal dan mengukur serta mengakui perubahan selanjutnya sesuai dengan sifat imbalan kerja.

2.q. Pajak Penghasilan

Beban pajak adalah jumlah gabungan pajak kini dan pajak tangguhan yang diperhitungkan dalam menentukan laba rugi pada suatu periode. Pajak kini dan pajak tangguhan diakui dalam laba rugi, kecuali pajak penghasilan yang timbul dari transaksi atau peristiwa yang diakui dalam penghasilan komprehensif lain atau secara langsung di ekuitas. Dalam hal ini, pajak tersebut masing-masing diakui dalam penghasilan komprehensif lain atau ekuitas.

Jumlah pajak kini untuk periode berjalan dan periode sebelumnya yang belum dibayar diakui sebagai liabilitas. Jika jumlah pajak yang telah dibayar untuk periode berjalan dan periode-periode sebelumnya melebihi jumlah pajak yang terutang untuk periode tersebut, maka kelebihannya diakui sebagai aset. Liabilitas (aset) pajak kini untuk periode berjalan dan periode sebelumnya diukur sebesar jumlah yang diperkirakan akan dibayar kepada (direstitusi dari) otoritas perpajakan, yang dihitung menggunakan tarif pajak (dan undang-undang pajak) yang telah berlaku atau secara substantif telah berlaku pada akhir periode pelaporan.

**PT ASDP INDONESIA FERRY (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
(Disajikan Dalam Rupiah Penuh, Kecuali Dinyatakan Lain)

Manfaat terkait dengan rugi pajak yang dapat ditarik untuk memulihkan pajak kini dari periode sebelumnya diakui sebagai aset. Aset pajak tangguhan diakui untuk akumulasi rugi pajak belum dikompensasi dan kredit pajak belum dimanfaatkan sepanjang kemungkinan besar laba kena pajak masa depan akan tersedia untuk dimanfaatkan dengan rugi pajak belum dikompensasi dan kredit pajak belum dimanfaatkan.

Seluruh perbedaan temporer kena pajak diakui sebagai liabilitas pajak tangguhan, kecuali perbedaan temporer kena pajak yang berasal dari pengakuan awal aset atau liabilitas dari transaksi yang bukan kombinasi bisnis dan pada saat transaksi tidak mempengaruhi laba akuntansi atau laba kena pajak (rugi pajak).

Aset pajak tangguhan diakui untuk seluruh perbedaan temporer dapat dikurangkan sepanjang kemungkinan besar laba kena pajak akan tersedia sehingga perbedaan temporer dapat dimanfaatkan untuk mengurangi laba dimaksud, kecuali jika aset pajak tangguhan timbul dari pengakuan awal aset atau pengakuan awal liabilitas dalam transaksi yang bukan kombinasi bisnis dan pada saat transaksi tidak mempengaruhi laba akuntansi atau laba kena pajak (rugi pajak).

Aset dan liabilitas pajak tangguhan diukur dengan menggunakan tarif pajak yang diharapkan berlaku ketika aset dipulihkan atau liabilitas diselesaikan, berdasarkan tarif pajak (dan peraturan pajak) yang telah berlaku atau secara substantif telah berlaku pada akhir periode pelaporan. Pengukuran aset dan liabilitas pajak tangguhan mencerminkan konsekuensi pajak yang sesuai dengan cara Grup memperkirakan, pada akhir periode pelaporan, untuk memulihkan atau menyelesaikan jumlah tercatat aset dan liabilitasnya.

Jumlah tercatat aset pajak tangguhan ditelaah ulang pada akhir periode pelaporan. Grup mengurangi jumlah tercatat aset pajak tangguhan jika kemungkinan besar laba kena pajak tidak lagi tersedia dalam jumlah yang memadai untuk mengkompensasikan sebagian atau seluruh aset pajak tangguhan tersebut. Setiap pengurangan tersebut dilakukan pembalikan atas aset pajak tangguhan hingga kemungkinan besar laba kena pajak yang tersedia jumlahnya memadai.

Grup melakukan saling hapus aset pajak tangguhan dan liabilitas pajak tangguhan jika dan hanya jika:

- a. Grup memiliki hak yang dapat dipaksakan secara hukum untuk melakukan saling hapus aset pajak kini terhadap liabilitas pajak kini; dan
- b. Aset pajak tangguhan dan liabilitas pajak tangguhan terkait dengan pajak penghasilan yang dikenakan oleh otoritas perpajakan yang sama atas:
 - i. Entitas kena pajak yang sama; atau
 - ii. Entitas kena pajak yang berbeda yang bermaksud untuk memulihkan aset dan liabilitas pajak kini dengan dasar neto, atau merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitas secara bersamaan, pada setiap periode masa depan dimana jumlah signifikan atas aset atau liabilitas pajak tangguhan diperkirakan untuk diselesaikan atau dipulihkan. Entitas kena pajak yang berbeda yang bermaksud untuk memulihkan aset dan liabilitas pajak kini dengan dasar neto, atau merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitas secara bersamaan, pada setiap periode masa depan dimana jumlah signifikan atas aset atau liabilitas pajak tangguhan diperkirakan untuk diselesaikan atau dipulihkan.

Grup melakukan saling hapus atas aset pajak kini dan liabilitas pajak kini jika dan hanya jika, Grup:

- a. Memiliki hak yang dapat dipaksakan secara hukum untuk melakukan saling hapus atas jumlah yang diakui; dan
- b. Bermaksud untuk menyelesaikan dengan dasar neto atau merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitas secara bersamaan.

2.r. Musyarakah

Musyarakah adalah akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan sedangkan kerugian berdasarkan porsi kontribusi dana. Dana tersebut meliputi kas atau aset nonkas yang diperkenankan oleh syariah. Pendapatan usaha

**PT ASDP INDONESIA FERRY (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
(Disajikan Dalam Rupiah Penuh, Kecuali Dinyatakan Lain)

musyarakah yang menjadi hak mitra aktif diakui sebesar haknya sesuai dengan kesepakatan atas pendapatan usaha musyarakah. Sedangkan pendapatan usaha untuk mitra pasif diakui sebagai hak pihak mitra pasif atas bagi hasil dan liabilitas.

2.s. Instrumen Keuangan

Pengakuan dan Pengukuran Awal

Grup mengakui aset keuangan atau liabilitas keuangan dalam laporan posisi keuangan konsolidasian, jika dan hanya jika, Grup menjadi salah satu pihak dalam ketentuan pada kontrak instrumen tersebut. Pada saat pengakuan awal aset keuangan atau liabilitas keuangan, Grup mengukur pada nilai wajarnya. Dalam hal aset keuangan atau liabilitas keuangan tidak diukur pada nilai wajar melalui laba rugi, nilai wajar tersebut ditambah atau dikurang dengan biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung dengan perolehan atau penerbitan aset keuangan atau liabilitas keuangan tersebut. Biaya transaksi yang dikeluarkan sehubungan dengan perolehan aset keuangan dan penerbitan liabilitas keuangan yang diklasifikasikan pada nilai wajar melalui laba rugi dibebankan segera.

Pengukuran Selanjutnya Aset Keuangan

Aset keuangan Grup diklasifikasikan sebagai berikut: aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan yang diamortisasi.

Aset Keuangan yang Diukur pada Biaya Perolehan Diamortisasi

Aset keuangan diukur pada biaya perolehan diamortisasi ketika kedua kondisi berikut terpenuhi:

- 1) Aset keuangan dikelola dalam model bisnis yang bertujuan untuk memiliki aset keuangan dalam rangka mendapatkan arus kas kontraktual saja; dan
- 2) Persyaratan kontraktual dari aset keuangan tersebut memberikan hak pada tanggal tertentu atas arus kas yang semata dari pembayaran pokok dan bunga (*Solely Payments of Principal and Interest - SPPI*) dari jumlah pokok terutang.

Aset keuangan ini diukur pada jumlah yang diakui pada awal pengakuan dikurangi dengan pembayaran pokok, kemudian dikurangi atau ditambah dengan jumlah amortisasi kumulatif atas perbedaan jumlah pengakuan awal dengan jumlah pada saat jatuh tempo, dan penurunan nilainya.

Pendapatan keuangan dihitung dengan menggunakan metode suku bunga efektif dan diakui di laba rugi. Perubahan pada nilai wajar diakui di laba rugi ketika aset dihentikan atau direklasifikasi.

Aset keuangan yang diklasifikasikan menjadi aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi dapat dijual ketika terdapat peningkatan risiko kredit. Penghentian untuk alasan lain diperbolehkan namun jumlah penjualan tersebut harus tidak signifikan jumlahnya atau tidak sering.

Pengukuran Selanjutnya Liabilitas Keuangan

Grup mengklasifikasikan seluruh liabilitas keuangan sehingga setelah pengakuan awal liabilitas keuangan diukur pada biaya perolehan diamortisasi, kecuali:

- a) Liabilitas keuangan pada nilai wajar melalui laba rugi. Liabilitas dimaksud, termasuk derivative yang merupakan liabilitas, selanjutnya akan diukur pada nilai wajar.
- b) Liabilitas keuangan yang timbul ketika pengalihan aset keuangan yang tidak memenuhi kualifikasi penghentian pengakuan atau ketika pendekatan keterlibatan berkelanjutan diterapkan.
- c) Kontrak jaminan keuangan dan komitmen untuk menyediakan pinjaman dengan suku bunga dibawah pasar. Setelah pengakuan awal, penerbit kontrak dan penerbit komitmen selanjutnya mengukur kontrak tersebut sebesar jumlah yang lebih tinggi antara:
 - i. Jumlah penyisihan kerugian; dan
 - ii. Jumlah yang pertama kali diakui dikurangi dengan, jika sesuai, jumlah kumulatif dari penghasilan yang diakui sesuai dengan prinsip PSAK 72.
- d) Imbalan kontijensi yang diakui oleh pihak pengakusisi dalam kombinasi bisnis ketika PSAK 22 diterapkan. Imbalan kontijensi selanjutnya diukur pada nilai wajar dan selisihnya dalam laba rugi.

**PT ASDP INDONESIA FERRY (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
(Disajikan Dalam Rupiah Penuh, Kecuali Dinyatakan Lain)

Liabilitas Keuangan Yang Diukur pada Nilai Wajar Melalui Laba Rugi

Saat pengakuan awal Grup dapat membuat penetapan yang takterbatalkan untuk mengukur liabilitas keuangan pada nilai wajar melalui laba rugi, jika diizinkan oleh standar atau jika penetapan akan menghasilkan informasi yang lebih relevan, karena:

- a) Mengeliminasi atau mengurangi secara signifikan inkonsistensi pengukuran atau pengakuan (kadang disebut sebagai "accounting mismatch") yang dapat timbul dari pengukuran aset atau liabilitas atau pengakuan keuntungan dan kerugian atas aset atau liabilitas dengan dasar yang berbeda-beda; atau
- b) Sekelompok liabilitas keuangan atau aset keuangan dan liabilitas keuangan dikelola dan kinerjanya dievaluasi berdasarkan nilai wajar, sesuai manajemen risiko atau strategi investasi yang terdokumentasi, dan informasi dengan dasar nilai wajar dimaksud atas kelompok tersebut disediakan secara internal untuk personil manajemen kunci Grup.

Penghentian Pengakuan Aset dan Liabilitas Keuangan

Grup menghentikan pengakuan aset keuangan, jika dan hanya jika hak kontraktual atas arus kas yang berasal dari aset keuangan berakhir atau Grup mengalihkan hak kontraktual untuk menerima kas yang berasal dari aset keuangan atau tetap memiliki hak kontraktual untuk menerima kas tetapi juga menanggung kewajiban kontraktual untuk membayar arus kas yang diterima tersebut kepada satu atau lebih pihak penerima melalui suatu kesepakatan. Jika Grup secara substansial mengalihkan seluruh risiko dan manfaat atas kepemilikan aset keuangan, maka Grup menghentikan pengakuan aset keuangan dan mengakui secara terpisah sebagai aset atau liabilitas untuk setiap hak dan kewajiban yang timbul atau yang masih dimiliki dalam pengalihan tersebut. Jika Grup secara substansial tidak mengalihkan dan tidak memiliki seluruh risiko dan manfaat atas kepemilikan aset keuangan tersebut dan masih memiliki pengendalian, maka Grup mengakui aset keuangan sebesar keterlibatan berkelanjutan dengan aset keuangan tersebut. Jika Grup secara substansial masih memiliki seluruh risiko dan manfaat atas kepemilikan aset keuangan, maka Grup tetap mengakui aset keuangan tersebut.

Grup menghentikan pengakuan liabilitas keuangan, jika dan hanya jika, liabilitas keuangan tersebut berakhir, yaitu ketika kewajiban yang ditetapkan dalam kontrak dilepaskan atau dibatalkan atau kadawaluarsa.

Penurunan Nilai Aset Keuangan

Aset keuangan dinilai apakah terdapat indikasi penurunan nilai pada setiap akhir periode pelaporan. Aset keuangan diturunkan nilainya apabila terdapat bukti obyektif sebagai akibat adanya satu atau lebih peristiwa yang terjadi setelah pengakuan awal aset keuangan tersebut dan dilakukan estimasi terhadap arus kas masa depan dari investasi tersebut yang akan terdampak.

Pada setiap tanggal pelaporan, Grup mengukur penyisihan kerugian instrumen keuangan sejumlah kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya jika risiko kredit atas instrumen keuangan tersebut telah meningkat secara signifikan sejak pengakuan awal. Namun, jika risiko kredit instrumen keuangan tersebut tidak meningkat secara signifikan sejak pengakuan awal, maka mengakui sejumlah kerugian kredit ekspektasian 12 bulan.

Grup menerapkan metode yang disederhanakan untuk mengukur kerugian kredit ekspektasian tersebut terhadap piutang usaha dan aset kontrak tanpa komponen pendanaan yang signifikan.

Grup menganggap aset keuangan gagal bayar ketika pihak ketiga tidak mampu membayar kewajiban kreditnya kepada Grup secara penuh. Periode maksimum yang dipertimbangkan ketika memperkirakan kerugian kredit ekspektasian adalah periode maksimum kontrak dimana Grup terekspos terhadap risiko kredit.

Pengukuran kerugian kredit ekspektasian dari instrumen keuangan dilakukan dengan suatu cara yang mencerminkan:

- i. Jumlah yang tidak bias dan rata-rata probabilitas tertimbang yang ditentukan dengan mengevaluasi serangkaian kemungkinan yang dapat terjadi;
- ii. Nilai waktu uang; dan

**PT ASDP INDONESIA FERRY (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
(Disajikan Dalam Rupiah Penuh, Kecuali Dinyatakan Lain)

- iii. Informasi yang wajar dan didukung yang tersedia tanpa biaya atau upaya berlebihan pada tanggal pelaporan mengenai peristiwa masa lalu, kondisi kini, dan perkiraan kondisi ekonomi masa depan.

Aset keuangan dapat dianggap tidak mengalami peningkatan risiko kredit secara signifikan sejak pengakuan awal jika aset keuangan memiliki risiko kredit yang rendah pada tanggal pelaporan. Risiko kredit pada instrumen keuangan dianggap rendah ketika aset keuangan tersebut memiliki risiko gagal bayar yang rendah, peminjam memiliki kapasitas yang kuat untuk memenuhi kewajiban arus kas kontraktualnya dalam jangka waktu dekat dan memburuknya kondisi ekonomi dan bisnis dalam jangka waktu panjang mungkin, namun tidak selalu, menurunkan kemampuan peminjam untuk memenuhi kewajiban arus kas kontraktualnya. Untuk menentukan apakah aset keuangan memiliki risiko kredit rendah, Grup dapat menggunakan peringkat risiko kredit internal atau penilaian eksternal. Misal, aset keuangan dengan peringkat "*investment grade*" berdasarkan penilaian eksternal merupakan instrumen yang memiliki risiko kredit yang rendah, sehingga tidak mengalami peningkatan risiko kredit secara signifikan sejak pengakuan awal.

Metode Suku Bunga Efektif

Metode suku bunga efektif adalah metode yang digunakan untuk menghitung biaya perolehan diamortisasi dari aset atau liabilitas keuangan (atau kelompok aset atau liabilitas keuangan) dan metode untuk mengalokasikan pendapatan bunga atau beban bunga selama periode yang relevan.

Suku bunga efektif adalah suku bunga yang secara tepat mendiskontokan estimasi pembayaran atau penerimaan kas masa depan selama perkiraan umur dari instrumen keuangan, atau jika lebih tepat, digunakan periode yang lebih singkat untuk memperoleh jumlah tercatat neto dari aset keuangan atau liabilitas keuangan.

Pada saat menghitung suku bunga efektif, Grup mengestimasi arus kas dengan mempertimbangkan seluruh persyaratan kontraktual dalam instrumen keuangan tersebut, seperti pelunasan dipercepat, opsi beli dan opsi serupa lain, tetapi tidak mempertimbangkan kerugian kredit masa depan. Perhitungan ini mencakup seluruh komisi dan bentuk lain yang dibayarkan atau diterima oleh pihak-pihak dalam kontrak yang merupakan bagian takterpisahkan dari suku bunga efektif, biaya transaksi, dan seluruh premium atau diskonto lain.

Reklasifikasi

Grup mereklasifikasi aset keuangan ketika Grup mengubah tujuan model bisnis untuk pengelolaan aset keuangan sehingga penilaian sebelumnya menjadi tidak dapat diterapkan.

Ketika Grup mereklasifikasi aset keuangan, maka Grup menerapkan reklasifikasi secara prospektif dari tanggal reklasifikasi. Grup tidak menyajikan kembali keuntungan, kerugian (termasuk keuntungan atau kerugian penurunan nilai), atau bunga yang diakui sebelumnya.

Saling Hapus Aset Keuangan dan Liabilitas Keuangan

Aset keuangan dan liabilitas keuangan disalinghapuskan, jika dan hanya jika, Grup saat ini memiliki hak yang dapat dipaksakan secara hukum untuk melakukan saling hapus atas jumlah yang telah diakui tersebut; dan berintens untuk menyelesaikan secara neto atau untuk merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitasnya secara simultan.

Pengukuran Nilai Wajar

Nilai wajar adalah harga yang akan diterima untuk menjual suatu aset atau harga yang akan dibayar untuk mengalihkan suatu liabilitas dalam transaksi teratur antara pelaku pasar pada tanggal pengukuran.

Nilai wajar aset dan liabilitas keuangan diestimasi untuk keperluan pengakuan dan pengukuran atau untuk keperluan pengungkapan.

**PT ASDP INDONESIA FERRY (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
(Disajikan Dalam Rupiah Penuh, Kecuali Dinyatakan Lain)

Nilai wajar dikategorikan dalam level yang berbeda dalam suatu hierarki nilai wajar berdasarkan pada apakah input suatu pengukuran dapat diobservasi dan signifikansi input terhadap keseluruhan pengukuran nilai wajar:

- i. Harga kuotasian (tanpa penyesuaian) di pasar aktif untuk aset atau liabilitas yang identik yang dapat diakses pada tanggal pengukuran (Level 1);
- ii. Input selain harga kuotasian yang termasuk dalam Level 1 yang dapat diobservasi untuk aset atau liabilitas, baik secara langsung maupun tidak langsung (Level 2);
- iii. Input yang tidak dapat diobservasi untuk aset atau liabilitas (Level 3).

Dalam mengukur nilai wajar aset atau liabilitas, Grup sebisa mungkin menggunakan data pasar yang dapat diobservasi. Apabila nilai wajar aset atau liabilitas tidak dapat diobservasi secara langsung, Grup menggunakan teknik penilaian yang sesuai dengan keadaannya dan memaksimalkan penggunaan input yang dapat diobservasi yang relevan dan meminimalkan penggunaan input yang tidak dapat diobservasi.

Perpindahan antara level hierarki nilai wajar diakui oleh Grup pada akhir periode pelaporan dimana perpindahan terjadi.

3. Sumber Ketidakpastian Estimasi dan Pertimbangan Akuntansi Kritis

Penyusunan laporan keuangan konsolidasian Grup mengharuskan manajemen untuk membuat pertimbangan, estimasi dan asumsi yang mempengaruhi jumlah yang dilaporkan dari pendapatan, beban, aset dan liabilitas, dan pengungkapan atas liabilitas kontinjensi, pada akhir periode pelaporan. Ketidakpastian mengenai asumsi dan estimasi tersebut dapat mengakibatkan penyesuaian material terhadap nilai tercatat pada aset dan liabilitas dalam periode pelaporan berikutnya.

Estimasi dan Asumsi

Asumsi utama masa depan dan sumber utama ketidakpastian estimasi yang lain pada tanggal pelaporan yang memiliki risiko signifikan bagi penyesuaian yang material terhadap nilai tercatat aset dan liabilitas untuk tahun berikutnya diungkapkan di bawah ini. Grup mendasarkan asumsi dan estimasi pada parameter yang tersedia pada saat laporan keuangan konsolidasian disusun. Asumsi dan situasi mengenai perkembangan masa depan mungkin berubah akibat perubahan pasar atau situasi di luar kendali Grup. Perubahan tersebut dicerminkan dalam asumsi terkait pada saat terjadinya.

i. Ketidakpastian Estimasi

Estimasi Umur Manfaat Aset Tetap

Grup melakukan penelaahan berkala atas masa manfaat ekonomis aset tetap berdasarkan faktor-faktor seperti kondisi teknis (estimasi daya pakai, pengoperasian, pemeliharaan) dan perkembangan teknologi di masa depan. Hasil operasi di masa depan akan dipengaruhi secara material atas perubahan estimasi ini yang diakibatkan oleh perubahan faktor yang telah disebutkan di atas. Nilai tercatat aset tetap disajikan di Catatan 12.

Estimasi Beban Pensiun dan Imbalan Pascakerja

Nilai kini liabilitas imbalan pascakerja yang masih harus dibayar tergantung pada beberapa faktor yang ditentukan dengan dasar aktuarial berdasarkan beberapa asumsi. Asumsi yang digunakan untuk menentukan biaya (penghasilan) mencakup tingkat diskonto. Perubahan asumsi ini akan mempengaruhi jumlah tercatat imbalan pascakerja.

Grup menentukan tingkat diskonto yang sesuai pada akhir periode pelaporan, yakni tingkat suku bunga yang harus digunakan untuk menentukan nilai kini arus kas keluar masa depan estimasian yang diharapkan untuk menyelesaikan liabilitas. Dalam menentukan tingkat suku bunga yang sesuai, Grup mempertimbangkan rata-rata tingkat suku bunga obligasi pemerintah pada pasar yang aktif yang didenominasikan dalam mata uang Rupiah.

Asumsi kunci liabilitas imbalan pascakerja sebagian ditentukan berdasarkan kondisi pasar saat ini. Informasi tambahan diungkapkan pada Catatan 22.

**PT ASDP INDONESIA FERRY (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
(Disajikan Dalam Rupiah Penuh, Kecuali Dinyatakan Lain)

Cadangan Kerugian Penurunan Nilai Piutang Usaha

Grup menilai penurunan nilai pada aset keuangan dengan biaya perolehan yang diamortisasi pada setiap tanggal pelaporan. Dalam menentukan apakah rugi penurunan nilai harus dicatat dalam laba rugi, manajemen harus mempertimbangkan informasi yang wajar dan terdorong yang tersedia tanpa biaya atau upaya berlebihan pada tanggal pelaporan mengenai peristiwa masa lalu, kondisi kini, dan perkiraan kondisi ekonomi masa depan. Grup menerapkan pendekatan yang disederhanakan untuk mengukur kerugian kredit ekspektasian yang menggunakan *roll rate* dan *discounted cash flow* untuk menilai kas dan setara kas, dana yang dibatasi penggunaannya, piutang usaha dan piutang lain-lain. Nilai tercatat aset keuangan telah diungkapkan dalam Catatan 6.

Realisasi dari Aset Pajak Tangguhan

Aset pajak tangguhan diakui atas seluruh rugi fiskal yang belum digunakan sepanjang besar kemungkinannya bahwa penghasilan kena pajak akan tersedia sehingga rugi fiskal tersebut dapat digunakan. Estimasi oleh manajemen yang disyaratkan untuk menentukan jumlah aset pajak tangguhan yang dapat diakui, berdasarkan saat penggunaan dan tingkat penghasilan kena pajak dan strategi perencanaan pajak masa depan.

Pengukuran Nilai Wajar untuk Properti Investasi

Properti investasi Grup diukur pada nilai wajar untuk tujuan pelaporan keuangan. Dalam mengestimasi nilai wajar, Grup menugaskan penilai independen untuk melakukan penilaian. Penilaian tersebut didasarkan pada pendekatan pendapatan, pendekatan biaya, dan pendekatan pasar. Nilai tercatat properti investasi diungkapkan dalam Catatan 11.

ii. Pertimbangan Penting dalam Penentuan Kebijakan Akuntansi

Pertimbangan berikut ini dibuat oleh manajemen dalam rangka penerapan kebijakan akuntansi Grup yang memiliki pengaruh paling signifikan atas jumlah yang diakui dalam laporan keuangan konsolidasian.

Klasifikasi Aset dan Liabilitas Keuangan

Grup menetapkan klasifikasi atas aset dan liabilitas tertentu sebagai aset keuangan dan liabilitas keuangan dengan mempertimbangkan bila definisi yang ditetapkan PSAK 71. Dengan demikian, aset keuangan dan liabilitas keuangan diakui sesuai dengan kebijakan akuntansi Grup seperti diungkapkan pada Catatan 2.s dan 38.

4. Kas dan Setara Kas

	2023 Rp	2022 Rp
Kas	7.883.203.473	6.856.946.582
Bank		
Pihak Berelasi (Catatan 33)		
<u>Rupiah</u>		
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	199.104.608.933	191.257.138.218
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	158.955.056.932	100.322.908.489
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	111.921.543.384	51.511.316.007
PT Bank Syariah Indonesia Tbk	7.216.180.569	14.331.820.699
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	8.346.915.894	6.022.333.609
	<u>485.544.305.712</u>	<u>363.445.517.022</u>
<u>Dolar Amerika Serikat</u>		
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (2023: USD39,470.93; 2022: USD4,189,68)	608.484.010	65.907.886
<u>Euro</u>		
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (2023: EUR609,46; 2022: EUR729,48)	10.446.195	12.191.529
	<u>618.930.205</u>	<u>78.099.415</u>

**PT ASDP INDONESIA FERRY (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
(Disajikan Dalam Rupiah Penuh, Kecuali Dinyatakan Lain)

	2023 Rp	2022 Rp
Pihak Ketiga		
<u>Rupiah</u>		
PT Bank Central Asia Tbk	105.621.739.367	77.007.995.183
PT Bank CIMB Niaga Tbk	88.150.333.970	70.796.051.916
PT Bank Danamon Indonesia Tbk	--	806.887
PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk	904.135.763	--
	<u>194.676.209.100</u>	<u>147.804.853.986</u>
<u>Dolar Amerika Serikat</u>		
PT Bank Danamon Indonesia Tbk	--	451.168
(2023: Nihil; 2022: USD28.68)	--	451.168
Total Bank	680.839.445.017	511.328.921.591
Deposito Berjangka		
Pihak Berelasi (Catatan 33)		
<u>Rupiah</u>		
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	200.000.000.000	150.000.000.000
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	127.084.347.824	210.000.000.000
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	125.000.000.000	225.000.000.000
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	100.000.000.000	150.000.000.000
PT Bank Raya Indonesia Tbk	--	50.000.000.000
PT Bank Syariah Indonesia Tbk	210.000.000.000	--
<u>Dolar Amerika Serikat</u>		
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	37.537.960.000	38.304.984.999
Total Deposito Berjangka	799.622.307.824	823.304.984.999
Total	1.488.344.956.314	1.341.490.853.172
Tingkat Bunga Deposito	2,00%-6,00%	2,25%-4,25%
Jangka Waktu	3 bulan	3 bulan

Tidak ada saldo kas dan setara kas yang digunakan sebagai jaminan.

5. Piutang Usaha

a. Berdasarkan Pelanggan

	2023 Rp	2022 Rp
Pihak Berelasi (Catatan 33)		
Cadangan Kerugian Penurunan Nilai	1.652.679.870	3.610.112.242
	(305.609.308)	(292.432.430)
Sub Total	<u>1.347.070.562</u>	<u>3.317.679.812</u>
Pihak Ketiga		
Cadangan Kerugian Penurunan Nilai	61.258.800.012	56.074.017.328
	(25.930.940.535)	(27.554.854.973)
Sub Total	<u>35.327.859.477</u>	<u>28.519.162.355</u>
Total	36.674.930.039	31.836.842.167

b. Berdasarkan Umur

	2023 Rp	2022 Rp
Belum Jatuh tempo	36.329.219.312	26.509.029.847
Sampai Dengan 30 hari	6.458.702.523	8.541.780.901
31 - 60 hari	2.515.190.688	3.462.973.684
60 - 90 hari	2.629.068.200	2.776.358.240
Lebih dari 90 hari	14.979.299.159	18.393.986.898
Sub Total	<u>62.911.479.882</u>	<u>59.684.129.570</u>
Cadangan Kerugian Penurunan Nilai	(26.236.549.843)	(27.847.287.403)
Total	36.674.930.039	31.836.842.167

PT ASDP INDONESIA FERRY (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan)
 Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
 Pada Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
 (Disajikan Dalam Rupiah Penuh, Kecuali Dinyatakan Lain)

c. Mutasi Cadangan Kerugian Penurunan Nilai

	2023 Rp	2022 Rp
Saldo Awal	27.847.287.403	29.896.300.719
Akuisisi Entitas Anak	--	563.614.528
Penambahan (Catatan 29)	22.364.274.166	8.200.371.752
Pemulihan (Catatan 30)	(23.975.011.726)	(10.812.999.596)
Total	26.236.549.843	27.847.287.403

Seluruh piutang usaha didenominasi dalam mata uang Rupiah.

Manajemen berpendapat bahwa cadangan kerugian penurunan nilai piutang diatas cukup untuk menutupi kerugian yang mungkin timbul dari tidak tertagihnya piutang usaha di kemudian hari.

Piutang usaha dijadikan jaminan atas pinjaman sindikasi (Catatan 21).

6. Aset Keuangan Lancar Lainnya

	2023 Rp	2022 Rp
Bank Garansi	20.691.332.500	24.911.962.247
Dana yang Dibatasi Penggunaannya	20.649.249.604	20.649.249.604
Kas Kapal Loket yang Belum Dipertanggungjawabkan	1.577.400.173	1.481.849.955
Lain-lain	12.388.571.342	7.488.184.269
Total	55.306.553.619	54.531.246.075

Bank Garansi merupakan jaminan pekerjaan atas pengoperasian trip subsidi kapal pada lintasan perintis antara Direktorat Jenderal Perhubungan Darat dengan Perusahaan.

Dana yang dibatasi penggunaannya merupakan rekening penampungan pendapatan jasa pelabuhan Dermaga IV Merak-Bakauheni antara Perusahaan dengan PT Infinity Indosakti. Perusahaan juga mencatat utang atas rekening penampungan tersebut (Catatan 19).

7. Pendapatan yang Masih Harus Diterima

	2023 Rp	2022 Rp
Pihak Berelasi (Catatan 33)	224.208.744.686	44.795.677.685
Cadangan Kerugian Penurunan Nilai	(24.082.153.744)	--
Sub Total	200.126.590.942	44.795.677.685
Pihak Ketiga	4.636.984.092	30.827.173.991
Total	204.763.575.034	75.622.851.676

Pendapatan yang masih harus diterima terutama merupakan penjualan bahan bakar minyak divisi aneka usaha kerjasama cabang Merak.

**PT ASDP INDONESIA FERRY (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
(Disajikan Dalam Rupiah Penuh, Kecuali Dinyatakan Lain)

8. Persediaan

	2023	2022
	Rp	Rp
Suku Cadang dan Perlengkapan Kapal	89.282.692.048	75.945.084.241
Bahan Bakar	3.155.384.538	2.263.018.126
Perlengkapan dan Perabotan Hotel	2.270.596.489	2.742.665.777
Total	94.708.673.075	80.950.768.144

Manajemen berpendapat bahwa persediaan telah mencerminkan nilai realisasi bersihnya, sehingga tidak perlu dilakukan penyisihan atas persediaan tersebut.

Manajemen tidak mengasuransikan persediaan terhadap risiko kerugian atas kebakaran dan pencurian mengingat jenis, sifat dan risiko masing-masing persediaan pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022.

Tidak terdapat persediaan yang dijadikan jaminan atas liabilitas dan pinjaman lainnya.

9. Uang Muka dan Biaya Dibayar di Muka

	2023	2022
	Rp	Rp
Uang Muka:		
Pihak Berelasi (Catatan 33)		
Pembangunan	8.065.454.555	8.065.454.555
Pihak ketiga	32.131.051.473	24.490.674.563
Sub Total	40.196.506.028	32.556.129.118
Biaya Dibayar di Muka:		
Asuransi	8.966.245.603	9.078.514.866
Sewa	3.034.126.200	1.645.320.444
Lain-lain	10.934.754.289	4.356.020.138
Sub Total	22.935.126.092	15.079.855.448
Total	63.131.632.120	47.635.984.566

10. Aset Keuangan Tidak Lancar Lainnya

	2023	2022
	Rp	Rp
Deposito yang Dijaminkan	275.000.000.000	275.000.000.000
Pendapatan Yang Masih Harus Diterima	3.779.078.274	2.347.293.146
Piutang Pegawai	2.287.477.596	3.777.631.586
Cadangan Kerugian Penurunan Nilai	(5.539.690.259)	(3.844.810.383)
Total	275.526.865.611	277.280.114.349

Deposito yang dijaminkan merupakan deposito milik Perusahaan yang menjadi jaminan utang bank di PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (Catatan 20).

PT ASDP INDONESIA FERRY (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan)
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
(Disajikan Dalam Rupiah Penuh, Kecuali Dinyatakan Lain)

Mutasi cadangan kerugian penurunan nilai adalah sebagai berikut:

	2023 Rp	2022 Rp
Saldo Awal	3.844.810.383	3.295.996.835
Penambahan (Catatan 29)	2.937.133.399	1.647.805.610
Pemulihan (Catatan 30)	(1.242.253.523)	(1.098.992.062)
Total	5.539.690.259	3.844.810.383

Manajemen berpendapat bahwa cadangan kerugian penurunan nilai piutang diatas cukup untuk menutupi kerugian yang mungkin timbul dari tidak tertagihnya piutang pegawai di kemudian hari.

11. Properti Investasi

	2023			
	Saldo Awal Rp	Reklasifikasi Rp	Kenaikan Nilai Wajar Rp	Saldo Akhir Rp
Nilai Wajar				
Tanah	112.035.400.000	(63.221.929.153)	90.043.929.153	138.857.400.000
Bangunan	553.501.200.000	2.458.733.252	8.502.366.748	564.462.300.000
Total	665.536.600.000	(60.763.195.901)	98.546.295.901	703.319.700.000

	2022			
	Saldo Awal Rp	Reklasifikasi Rp	Kenaikan Nilai Wajar Rp	Saldo Akhir Rp
Nilai Wajar				
Tanah	108.582.700.000	--	3.452.700.000	112.035.400.000
Bangunan	568.951.400.000	(21.685.969.946)	6.235.769.946	553.501.200.000
Total	677.534.100.000	(21.685.969.946)	9.688.469.946	665.536.600.000

Properti investasi terutama merupakan bangunan Sasoro Mall Merak, Anjungan Mall Bakauheni dan Plaza Labuan Bajo, serta beberapa tanah yang tersebar di berbagai cabang di seluruh Indonesia.

Berdasarkan laporan penilai KJPP Muttaqin Bambang Purwanto Rozak Uswatun dan Rekan dalam laporan No. 00039/2.0027-05/PI/06/0278/1/2024 tanggal 31 Januari 2024 dan No. 00041/2.0027-05/PI/05/0278/1/2024 tanggal 8 Februari 2024 dan nilai wajar dari properti investasi pada 31 Desember 2023 untuk tanah sebesar Rp138.857.400.000 serta bangunan sebesar Rp20.099.900.000 dan Rp544.362.400.000. Dan laporan No. 00037/2.0027-05/PI/06/0278/1/2023 tanggal 31 Januari 2023 dan No. 00025/2.0027-05/PI/05/0278/1/2023 tanggal 13 Januari 2023 untuk tanah sebesar Rp112.035.400.000 serta bangunan sebesar Rp18.213.200.000 dan Rp535.288.000.000.

Pendekatan yang digunakan dalam menentukan nilai wajar properti adalah pendekatan pasar, pendekatan pendapatan dan pendekatan biaya. Metodologi penilaian yang digunakan dalam pendekatan pasar adalah metode perbandingan data pasar, metodologi yang digunakan dalam pendekatan biaya adalah metode biaya pengganti terdepresiasi, dan metodologi yang digunakan dalam pendekatan pendapatan adalah arus kas terdiskonto.

Pada tahun 2023, Grup melakukan reklasifikasi properti investasi menjadi aset tetap untuk tanah sebesar Rp64.510.000.000 dan untuk bangunan sebesar Rp3.362.699.998 dan pada tahun 2022, untuk bangunan sebesar Rp21.685.969.946 (Catatan 12).

Pada tahun 2023, Grup melakukan reklasifikasi aset tetap menjadi properti investasi untuk tanah sebesar Rp1.288.070.847 dan untuk bangunan masing-masing Rp5.821.433.250 (Catatan 12).

PT ASDP INDONESIA FERRY (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan)
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
(Disajikan Dalam Rupiah Penuh, Kecuali Dinyatakan Lain)

Pada tahun 2023 dan 2022, kenaikan nilai wajar masing-masing sebesar Rp98.546.295.901 dan Rp9.688.469.946 yang diakui pada pendapatan dan beban lainnya (Catatan 31).

Pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, bangunan dan sarana prasarana – properti investasi dijaminkan untuk pinjaman sindikasi (Catatan 21).

Pendapatan sewa dan beban operasi langsung dari properti investasi pada laba rugi untuk tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

	2023 Rp	2022 Rp
Pendapatan Usaha (Catatan 27)		
Aneka Jasa dan Kerjasama	17.034.317.443	20.472.550.228
Beban Pokok Pendapatan (Catatan 28)		
Aneka Jasa dan Kerjasama	8.324.437.786	17.972.557.749

12. Aset Tetap

	2023				
	Saldo Awal Rp	Penambahan Rp	Pengurangan Rp	Reklasifikasi Rp	Saldo Akhir Rp
Harga Perolehan					
Tanah	192.595.004.982	3.906.968.797	--	63.221.929.153	259.723.902.932
Bangunan, Rumah Dinas dan Kantor	531.724.220.794	5.251.081.223	(6.557.733.489)	178.181.664.611	708.599.233.139
Bangunan Pelabuhan	3.625.366.956.945	29.610.900.093	(825.591.116)	247.959.297.993	3.902.111.563.915
Armada Kapal	6.318.518.950.161	499.412.859.526	(22.448.124.156)	27.454.505.481	6.822.938.191.012
Kendaraan	64.234.648.954	1.114.725.293	--	--	65.349.374.247
Peralatan Kantor	283.078.336.227	107.652.034.951	--	--	390.730.371.178
Aset Dalam Penyelesaian	379.377.073.739	519.588.566.878	--	(456.054.201.337)	442.911.439.280
Sub Total	<u>11.394.895.191.802</u>	<u>1.166.537.136.761</u>	<u>(29.831.448.761)</u>	<u>60.763.195.901</u>	<u>12.592.364.075.703</u>
Akumulasi Penyusutan					
Bangunan, Rumah Dinas dan Kantor	55.739.041.407	13.292.115.021	(6.557.733.489)	--	62.473.422.939
Bangunan Pelabuhan	1.232.516.876.103	166.753.951.142	(825.591.116)	--	1.398.445.236.129
Armada Kapal	2.576.561.310.849	222.948.475.478	(21.372.705.742)	--	2.778.137.080.585
Kendaraan	57.441.100.202	2.527.478.221	--	--	59.968.578.423
Peralatan Kantor	195.623.625.280	39.814.245.030	--	--	235.437.870.310
Sub Total	<u>4.117.881.953.841</u>	<u>445.336.264.892</u>	<u>(28.756.030.347)</u>	<u>--</u>	<u>4.534.462.188.386</u>
Nilai Buku	<u>7.277.013.237.961</u>				<u>8.057.901.887.317</u>

	2022				
	Saldo Awal Rp	Akuisisi Entitas Anak Rp	Penambahan Rp	Pengurangan Rp	Reklasifikasi/ Penyesuaian Rp
Harga Perolehan					
Tanah	193.113.205.343	--	--	--	(518.200.361)
Bangunan, Rumah Dinas dan Kantor	277.864.631.611	6.557.102.250	8.505.517.450	--	238.796.969.483
Bangunan Pelabuhan	3.557.894.871.918	--	42.791.825.000	--	24.680.260.027
Armada Kapal	3.644.611.864.692	2.214.469.386.515	472.505.793.973	(11.042.413.936)	(2.025.681.083)
Kendaraan	59.776.851.563	3.520.233.333	1.188.949.898	--	(251.385.840)
Peralatan Kantor	247.880.857.132	--	22.997.556.773	--	12.199.922.322
Aset Dalam Penyelesaian	319.106.434.666	--	321.069.643.762	--	(260.799.004.689)
Sub Total	<u>8.300.248.716.925</u>	<u>2.224.546.722.098</u>	<u>869.059.286.856</u>	<u>(11.042.413.936)</u>	<u>12.082.879.859</u>
Akumulasi Penyusutan					
Bangunan, Rumah Dinas dan Kantor	32.145.195.552	6.417.901.833	17.175.944.022	--	--
Bangunan Pelabuhan	1.080.865.835.901	--	151.651.040.202	--	--
Armada Kapal	1.730.818.050.268	593.898.586.515	264.512.032.372	(10.490.293.240)	(2.177.065.066)
Kendaraan	51.491.260.390	2.339.433.333	3.610.406.479	--	--
Peralatan Kantor	162.679.183.878	--	32.944.441.402	--	--
Sub Total	<u>3.057.999.525.989</u>	<u>602.655.921.681</u>	<u>469.893.864.477</u>	<u>(10.490.293.240)</u>	<u>(2.177.065.066)</u>
Nilai Buku	<u>5.242.249.190.936</u>				<u>7.277.013.237.961</u>

PT ASDP INDONESIA FERRY (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan)
 Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
 Pada Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
 (Disajikan Dalam Rupiah Penuh, Kecuali Dinyatakan Lain)

Pembebanan penyusutan dialokasikan sebagai berikut:

	2023 Rp	2022 Rp
Beban Pokok - Usaha Penyeberangan (Catatan 28)	235.159.388.491	265.175.508.385
Beban Pokok - Usaha Pelabuhan (Catatan 28)	147.768.469.766	153.596.535.544
Beban Pokok - Usaha Aneka dan Jasa (Catatan 28)	15.919.731.521	9.690.000.357
Beban Administrasi dan Umum (Catatan 29)	46.488.675.114	41.431.820.191
Total	445.336.264.892	469.893.864.477

Pengurangan aset tetap merupakan penghapusan dan penjualan aset tetap untuk tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

	2023 Rp	2022 Rp
Penghapusan Aset Tetap		
Harga Perolehan	--	11.042.413.936
Akumulasi Penyusutan	--	(10.490.293.240)
Kerugian Penghapusan Aset Tetap (Catatan 28)	--	552.120.696
	2023 Rp	2022 Rp
Penjualan Aset Tetap		
Harga Jual	1.517.520.014	--
Dikurangi: Nilai Buku	1.075.418.414	--
Keuntungan Penjualan Aset Tetap (Catatan 30)	442.101.600	--

Aset tetap dalam konstruksi terdiri dari pembangunan peningkatan dermaga di Merak dan Ketapang, serta pembangunan hotel tahap II dan *Multifunction* di Kawasan Marina Labuan Bajo. Jangka waktu penyelesaian pembangunan tersebut berkisar antara 6 (enam) sampai dengan 10 (sepuluh) bulan. Pada 31 Desember 2023, persentase penyelesaian dari berkisar antara 10% sampai dengan 95%.

Manajemen berkeyakinan tidak terdapat masalah dengan perpanjangan hak atas tanah karena seluruh tanah diperoleh secara sah dan didukung dengan bukti pemilikan yang memadai.

Pada tahun 2023, Grup melakukan reklasifikasi properti investasi menjadi aset tetap untuk tanah sebesar Rp64.510.000.000 dan untuk bangunan sebesar Rp3.362.699.998 dan pada tahun 2022, untuk bangunan sebesar Rp21.685.969.946 (Catatan 11).

Pada tahun 2023, Grup melakukan reklasifikasi aset tetap menjadi properti investasi untuk tanah sebesar Rp1.288.070.847 dan untuk bangunan masing-masing Rp5.821.433.250 (Catatan 11).

Aset tetap Grup telah diasuransikan kepada PT Asuransi Jasa Indonesia (Persero) terhadap segala risiko masing-masing dengan jumlah pertanggungan sebesar Rp9.084.406.591.127 dan USD588.000.000 untuk periode 31 Desember 2023 dan Rp8.737.887.268.614 dan USD592.000.000 untuk periode 31 Desember 2022. Manajemen berkeyakinan jumlah pertanggungan tersebut cukup untuk menutup kemungkinan kerugian atas aset yang dipertanggungkan.

Berdasarkan penelaahan aset tetap secara individual pada akhir tahun, manajemen berkeyakinan bahwa tidak terdapat indikasi penurunan nilai aset tetap pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022.

Sebagian aset tetap digunakan sebagai jaminan atas Pinjaman Sindikasi (Catatan 21).

**PT ASDP INDONESIA FERRY (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
(Disajikan Dalam Rupiah Penuh, Kecuali Dinyatakan Lain)

13. Aset Hak-Guna

Rincian aset hak-guna adalah sebagai berikut:

	2023				
	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Koreksi	Saldo Akhir
	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp
Harga Perolehan					
Bangunan	36.314.084.986	2.796.522.764	(19.110.554.225)	(15.807.458)	19.984.246.067
Peralatan Komputer	126.892.377.153	--	--	(1.538.434.291)	125.353.942.862
Kapal	17.348.850.000	--	--	--	17.348.850.000
Kendaraan	4.467.236.082	2.593.778.479	--	--	7.061.014.561
Sub Total	185.022.548.221	5.390.301.243	(19.110.554.225)	(1.554.241.749)	169.748.053.490
Akumulasi Penyusutan					
Bangunan	26.373.868.732	3.077.619.505	(19.110.554.225)	(9.645.229)	10.331.288.783
Peralatan Komputer	78.250.299.244	25.070.788.572	--	(948.515.916)	102.372.571.900
Kapal	3.847.360.000	3.469.770.000	--	--	7.317.130.000
Kendaraan	292.933.514	1.051.719.106	--	--	1.344.652.620
Sub Total	108.764.461.490	32.669.897.183	(19.110.554.225)	(958.161.145)	121.365.643.303
Nilai Buku	76.258.086.731				48.382.410.187

	2022			
	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir
	Rp	Rp	Rp	Rp
Harga Perolehan				
Bangunan	36.758.381.824	1.052.560.957	(1.496.857.795)	36.314.084.986
Peralatan Komputer	137.063.384.762	--	(10.171.007.609)	126.892.377.153
Kapal	8.000.850.000	9.348.000.000	--	17.348.850.000
Kendaraan	--	4.467.236.082	--	4.467.236.082
Sub Total	181.822.616.586	14.867.797.039	(11.667.865.404)	185.022.548.221
Akumulasi Penyusutan				
Bangunan	23.990.910.359	3.026.481.833	(643.523.460)	26.373.868.732
Peralatan Komputer	57.109.743.651	25.378.475.431	(4.237.919.838)	78.250.299.244
Kapal	533.390.000	3.313.970.000	--	3.847.360.000
Kendaraan	--	292.933.514	--	292.933.514
Sub Total	81.634.044.010	32.011.860.778	(4.881.443.298)	108.764.461.490
Nilai Buku	100.188.572.576			76.258.086.731

Rincian liabilitas sewa adalah sebagai berikut:

	2023 Rp	2022 Rp
Liabilitas Sewa		
Tidak lebih dari 1 tahun	35.221.961.275	34.851.549.525
Lebih dari 1 tahun	17.319.477.932	49.182.112.848
Total	52.541.439.207	84.033.662.373
Dikurangi Bagian Bunga	(4.614.074.517)	(8.881.072.227)
Nilai Kini Pembayaran Sewa Minimum	47.927.364.690	75.152.590.146
Dikurangi Bagian Jatuh Tempo Dalam Satu Tahun	(35.821.365.877)	(37.799.648.325)
Bagian Jangka Panjang	12.105.998.813	37.352.941.821

Beban yang timbul untuk tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

	2023 Rp	2022 Rp
Jumlah yang Diakui di Laba Rugi yang Timbul dari Sewa adalah Sebagai Berikut :		
Beban Bunga atas Liabilitas Sewa (Catatan 31)	4.054.498.685	5.748.556.933
Beban Penyusutan Aset Hak-Guna (Catatan 28 dan 29)	32.669.897.183	32.011.860.778
Beban terkait Liabilitas Sewa Jangka Pendek	5.977.651.132	16.826.750.878
Total	42.702.047.000	54.587.168.589

PT ASDP INDONESIA FERRY (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan)
 Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
 Pada Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
 (Disajikan Dalam Rupiah Penuh, Kecuali Dinyatakan Lain)

14. Aset Takberwujud

Rincian aset takberwujud adalah sebagai berikut:

	2023			
	Saldo Awal Rp	Penambahan Rp	Reklasifikasi Rp	Saldo Akhir Rp
Harga Perolehan				
Lisensi <i>Software</i>	25.300.955.174	8.212.373.388	--	33.513.328.562
Sub Total	25.300.955.174	8.212.373.388	--	33.513.328.562
Akumulasi Penyusutan				
Lisensi <i>Software</i>	7.909.185.945	5.253.932.396	--	13.163.118.341
Sub Total	7.909.185.945	5.253.932.396	--	13.163.118.341
Nilai Buku	17.391.769.229			20.350.210.221

	2022			
	Saldo Awal Rp	Penambahan Rp	Reklasifikasi Rp	Saldo Akhir Rp
Harga Perolehan				
Lisensi <i>Software</i>	19.043.196.340	6.257.758.834	--	25.300.955.174
Sub Total	19.043.196.340	6.257.758.834	--	25.300.955.174
Akumulasi Penyusutan				
Lisensi <i>Software</i>	2.982.290.426	4.926.895.519	--	7.909.185.945
Sub Total	2.982.290.426	4.926.895.519	--	7.909.185.945
Nilai Buku	16.060.905.914			17.391.769.229

Beban amortisasi untuk tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp5.253.932.396 dan Rp4.926.895.519 (Catatan 29).

15. Utang Usaha

	2023 Rp	2022 Rp
Pihak Berelasi (Catatan 33)	55.673.240.263	107.314.611.051
Pihak Ketiga	353.270.672.568	197.809.257.144
Total	408.943.912.831	305.123.868.195

Akun ini terutama merupakan utang terkait pengadaan barang dan jasa, serta utang kepada perusahaan pelayaran terkait penjualan tiket terpadu.

Seluruh saldo utang usaha dalam mata uang Rupiah dan tidak ada jaminan yang diberikan yang diberikan oleh Grup atas perolehan utang ini.

16. Perpajakan

a. Pajak Dibayar di Muka

	2023 Rp	2022 Rp
Entitas Anak - IFPRO		
Pajak Pertambahan Nilai	2.451.101.913	61.381.217.027
Pajak Penghasilan		
Pasal 28.a - 2023	2.396.757.661	--
Pasal 28.a - 2022	1.985.439.889	1.985.439.889
Pasal 28.a - 2021	--	1.331.394.655
Total	6.833.299.463	64.698.051.571

PT ASDP INDONESIA FERRY (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan)
 Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
 Pada Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
 (Disajikan Dalam Rupiah Penuh, Kecuali Dinyatakan Lain)

Pada tahun 2023, IFPRO menerima Surat Ketetapan Pajak (SKP) untuk tahun 2021 beserta Surat Perintah Membayar Ketetapan Pajak (SPMKP) sebagai berikut:

Tahun Pajak	Jenis Pajak	Nomor Surat Ketetapan Pajak	Tanggal Terbit	Total Rp
2021	Pajak Penghasilan Badan	00026/406/21/093/23	29-May-23	1.331.394.655
2021	Pajak Pertambahan Nilai	00028/407/21/093/23	29-May-23	63.409.755.543
2021	Kompensasi Utang Pajak melalui Potongan SPMKP	00240A	14-Jun-23	(6.025.449.687)
	Total Restitusi			<u>58.715.700.511</u>

Jumlah restitusi tersebut telah diterima Perusahaan pada tanggal 16 dan 19 Juni 2023.

b. Utang Pajak

	2023 Rp	2022 Rp
Perusahaan		
Pajak Penghasilan		
Pasal 4 (2)	2.599.818.889	1.809.058.671
Pasal 15	2.677.197.699	1.828.709.061
Pasal 21	11.692.339.012	5.324.203.020
Pasal 22	198.203.308	461.762.216
Pasal 23	1.048.555.060	1.842.937.041
Pasal 25	2.114.498.201	1.043.321.865
Pasal 29	5.803.993	10.881.636.898
Pajak Pertambahan Nilai Masukan (PPN Wapu)	8.329.481.789	6.262.321.698
Pajak Pertambahan Nilai Keluaran	2.444.426.240	934.239.545
Sub Total	31.110.324.191	30.388.190.015
Entitas Anak		
Pajak Penghasilan		
Pasal 4 (2)	4.155.270.816	4.961.298
Pasal 23	95.045.016	640.866.447
Pasal 21	406.779.960	1.169.745.349
Pasal 15	748.503.088	755.864.260
Pajak Pertambahan Nilai Keluaran	3.101.852	5.100.354
PB1	987.450.409	723.481.084
Sub Total	6.396.151.141	3.300.018.792
Jumlah	<u>37.506.475.332</u>	<u>33.688.208.807</u>

c. Pajak Kini

	2023 Rp	2022 Rp
Perusahaan		
Pajak Kini	27.116.987.480	25.720.141.700
Pajak Tangguhan	3.956.629.353	7.730.002.245
Sub Total	31.073.616.833	33.450.143.945
Entitas Anak		
Pajak Tangguhan	(1.733.479.358)	(2.902.906.633)
Penyesuaian Pajak Periode Lalu	--	464.561.626
Sub Total	(1.733.479.358)	(2.438.345.007)
Konsolidasian		
Pajak Kini	27.116.987.480	25.720.141.700
Pajak Tangguhan	2.223.149.995	4.827.095.612
Penyesuaian Pajak Periode Lalu	--	464.561.626
Total	<u>29.340.137.475</u>	<u>31.011.798.938</u>

PT ASDP INDONESIA FERRY (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan)
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
(Disajikan Dalam Rupiah Penuh, Kecuali Dinyatakan Lain)

Rekonsiliasi antara laba sebelum pajak penghasilan menurut laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian dengan taksiran laba kena pajak untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

	2023	2022
	Rp	Rp
Laba Sebelum Pajak Penghasilan Konsolidasian	665.879.726.941	616.186.191.078
Dikurangi: Laba (Rugi) Entitas Anak		
Sebelum Beban Pajak Penghasilan	58.140.796.668	(23.765.112.116)
Disesuaikan dengan Jurnal Eliminasi Konsolidasi	(700.614.464)	113.340.938.200
Laba Sebelum Pajak Penghasilan Perusahaan	608.439.544.737	526.610.364.994
Koreksi Non Final		
Beda Tetap		
Beban Pajak	96.833.288.053	66.613.458.211
Sumbangan	--	11.904.639.260
Manfaat Karyawan	--	40.201.995.413
Denda Pajak	1.416.515.575	86.845.868
Kenaikan Nilai Wajar Properti Investasi - bersih	(89.471.895.901)	(2.839.700.000)
Pendapatan Denda/Klaim/Pinalti	(25.959.771.710)	(5.415.371.974)
Jumlah Beda Tetap	(17.181.863.983)	110.551.866.778
Beda Waktu		
Penyusutan Aset Tetap	(26.675.928.436)	(37.253.401.755)
Penyusutan Aset Hak Guna	31.297.684.433	(837.545.168)
Liabilitas Sewa	(33.384.276.399)	--
Imbalan Pascakerja	(11.233.934.617)	(4.619.089.424)
Cadangan Penurunan Nilai Piutang	22.011.776.141	8.243.661.952
Jumlah Beda Waktu	(17.984.678.878)	(34.466.374.395)
Pendapatan Yang Dikenakan PPh Final		
Beban Pokok Penyeberangan	1.713.804.006.300	1.548.105.543.613
Beban Usaha Penyeberangan	566.636.779.056	411.292.013.517
Beban Non Usaha	246.366.764	4.745.450.273
Pendapatan Penyeberangan	(2.618.346.353.727)	(2.348.740.412.425)
Pendapatan Usaha Aneka Jasa atas Sewa	(37.051.716.184)	(41.146.853.448)
Pendapatan Bunga Deposito dan Jasa Giro	(75.303.049.787)	(60.041.863.837)
Jumlah Pendapatan - Dikenakan PPh Final	(450.013.967.578)	(485.786.122.307)
Penghasilan Kena Pajak	123.259.034.298	116.909.735.069
Penghasilan Kena Pajak - Dibulatkan	123.259.034.000	116.909.735.000
PPh Badan Terutang:		
22% X Rp123.259.034.000 (2022: 22% X Rp116.909.735.000)	27.116.987.480	25.720.141.700
Pajak Penghasilan Dibayar di Muka		
Pasal 22	425.771.404	407.026.461
Pasal 23	2.382.610.019	1.911.615.973
Pasal 25	24.302.802.064	12.519.862.368
Jumlah Pajak Penghasilan Dibayar di Muka	27.111.183.487	14.838.504.802
Utang Pajak Penghasilan - Perusahaan	5.803.993	10.881.636.898
Utang Pajak Penghasilan - Entitas Anak	--	--
Kurang Bayar Pajak Penghasilan Badan	5.803.993	10.881.636.898

**PT ASDP INDONESIA FERRY (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
(Disajikan Dalam Rupiah Penuh, Kecuali Dinyatakan Lain)

d. Pajak Tangguhan

	2022	Dikreditkan (Dibebankan) ke Laba Rugi	Dikreditkan (Dibebankan) ke Penghasilan Komprehensif Lain	2023
	Rp	Rp	Rp	Rp
a. Aset (Liabilitas) Pajak Tangguhan				
Entitas Anak				
Penyusutan Aset Tetap	(514.416.369)	(1.054.610.541)	--	(1.569.026.910)
Liabilitas Imbalan Pasca Kerja	263.346.554	119.088.216	(68.153.485)	314.281.285
Penyisihan Piutang	763.249.040	359.386.550	--	1.122.635.590
Selisih Nilai Wajar Kombinasi Bisnis	(52.031.457.687)	2.309.615.133	--	(49.721.842.554)
Total Aset (Liabilitas) Pajak Tangguhan	(51.519.278.462)	1.733.479.358	(68.153.485)	(49.853.952.589)
b. Liabilitas Pajak Tangguhan				
Perusahaan				
Penyisihan Piutang	5.651.436.938	4.842.590.751	--	10.494.027.689
Aset Tetap	(51.630.891.892)	(5.868.704.256)	--	(57.499.596.148)
Aset Hak-Guna	(1.637.488.484)	6.885.490.575	--	5.248.002.091
Liabilitas Sewa	--	(7.344.540.808)	--	(7.344.540.808)
Liabilitas Imbalan Kerja	30.673.893.415	(2.471.465.615)	2.287.207.408	30.489.635.208
Total Liabilitas Pajak Tangguhan	(16.943.050.023)	(3.956.629.353)	2.287.207.408	(18.612.471.968)
Total Aset (Liabilitas) Pajak Tangguhan	(68.462.328.485)	(2.223.149.995)	2.219.053.923	(68.466.424.557)

	2021	Dikreditkan (Dibebankan) ke Laba Rugi	Dikreditkan (Dibebankan) ke Penghasilan Komprehensif Lain	Entitas Akuisisian	2022
	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp
a. Aset Pajak Tangguhan					
Entitas Anak					
Penyusutan Aset Tetap	(23.074.522)	(491.341.847)	--	--	(514.416.369)
Liabilitas Imbalan Pasca Kerja	336.412.583	(48.279.828)	(24.786.201)	--	263.346.554
Penyisihan Piutang	728.672.272	34.576.768	--	--	763.249.040
Selisih Nilai Wajar Kombinasi Bisnis	--	3.407.951.540	--	(55.439.409.227)	(52.031.457.687)
Total Aset Pajak Tangguhan	1.042.010.333	2.902.906.633	(24.786.201)	(55.439.409.227)	(51.519.278.462)
b. Liabilitas Pajak Tangguhan					
Perusahaan					
Penyisihan Piutang	5.848.513.886	(197.076.948)	--	--	5.651.436.938
Penyusutan Aset Tetap	(41.818.816.996)	(9.812.074.896)	--	--	(51.630.891.892)
Aset Hak-Guna	(1.453.228.547)	(184.259.937)	--	--	(1.637.488.484)
Liabilitas Imbalan Kerja	26.047.321.808	2.463.409.536	2.163.162.071	--	30.673.893.415
Total Liabilitas Pajak Tangguhan	(11.376.209.849)	(7.730.002.245)	2.163.162.071	--	(16.943.050.023)
Total Aset (Liabilitas) Pajak Tangguhan	(10.334.199.516)	(4.827.095.612)	2.138.375.870	(55.439.409.227)	(68.462.328.485)

e. Rekonsiliasi

Rekonsiliasi antara beban pajak penghasilan dan hasil perkalian laba Akuntansi Sebelum pajak dengan tarif pajak yang berlaku adalah sebagai berikut:

	2023 Rp	2022 Rp
Laba Sebelum Pajak Penghasilan Konsolidasian	665.879.726.941	616.186.191.078
Laba (Rugi) Entitas Anak Sebelum Beban Pajak Penghasilan	58.140.796.668	(23.765.112.116)
Disesuaikan dengan Jurnal Eliminasi Konsolidasi	(700.614.464)	113.340.938.200
Laba Sebelum Pajak Penghasilan Perusahaan	608.439.544.737	526.610.364.994
Laba Sebelum Pajak Setelah Pembulatan	608.439.544.000	526.610.364.000
Tarif Pajak yang Berlaku	22%	22%
Pajak Penghasilan Sesuai Tarif Pajak yang Berlaku	133.856.699.680	115.854.280.080
Pengaruh Pajak atas Beda Tetap	(3.780.010.076)	24.321.410.691
Pengaruh Pajak atas Beda Waktu	(3.956.629.353)	(7.582.602.367)
Pengaruh Pajak atas Pengaruh Koreksi Pajak Final	(99.003.072.771)	(106.872.946.704)
Beban Pajak Kini - Perusahaan	27.116.987.480	25.720.141.700

PT ASDP INDONESIA FERRY (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan)
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
(Disajikan Dalam Rupiah Penuh, Kecuali Dinyatakan Lain)

	2023 Rp	2022 Rp
Beban Pajak Tangguhan - Perusahaan	3.956.629.353	4.322.050.705
Efek Perubahan Tarif Pajak	--	--
Beban Pajak Penghasilan - Perusahaan	31.073.616.833	30.042.192.405
Beban Pajak Tangguhan - Entitas Anak	(1.733.479.358)	505.044.907
Beban Pajak Kini - Penyesuaian Periode Lalu	--	464.561.626
Beban Pajak Kini Konsolidasian	29.340.137.475	31.011.798.938

f. Administrasi

Berdasarkan peraturan perpajakan yang berlaku, Perusahaan menghitung, menetapkan dan membayar sendiri jumlah pajak yang terutang. Direktorat Jenderal Pajak dapat menetapkan dan mengubah kewajiban pajak dalam batas waktu 5 (lima) tahun sejak tanggal terutangnya pajak.

Sebagaimana dijelaskan dalam Catatan 25 atas laporan keuangan, Perusahaan pada tanggal 4 Januari 2017 telah mengikuti program pengampunan pajak.

g. Surat Ketetapan Pajak

Selama tahun 2023, Perusahaan telah membayar Surat Tagihan Pajak atas PPh 21 Masa tahun 2018, 2019, 2020, 2021 dan 2022 sebesar Rp1.007.932.500, dan membayar Surat Tagihan Pajak atas PPh 4 ayat 2 Masa tahun 2019 sebesar Rp 3.535.840, dan membayar Surat Tagihan Pajak atas PPh 23 Masa tahun 2019, 2020, 2021, dan 2022 sebesar Rp11.668.767, serta membayar Surat Tagihan Pajak atas PPN Masa tahun 2018, 2020, 2021, dan 2022 sebesar Rp106.404.574.

17. Utang Asuransi

	2023 Rp	2022 Rp
Pihak Berelasi (Catatan 33)		
PT Jasa Raharja (Persero)	5.379.514.005	4.815.290.044
PT Jasa Raharja Putera	21.222.132.062	18.935.079.558
Total	26.601.646.067	23.750.369.602

Akun ini merupakan utang kepada perusahaan asuransi terkait dengan asuransi kecelakaan penumpang, kendaraan bermotor dan barang-barang yang disebrangkan, serta barang lainnya yang dipertanggungkan.

18. Beban Akrua dan Provisi

	2023 Rp	2022 Rp
Beban Akrua		
Umum	229.829.493.769	155.736.809.025
Administrasi Kantor	23.364.290.070	23.560.152.348
Kepelabuhanan	479.624.820	1.534.312.513
Lain-Lain	1.462.152.778	831.672.419
Sub Total	255.135.561.437	181.662.946.305
Provisi (Catatan 35.a)	20.652.170.368	20.652.170.368
Total	275.787.731.805	202.315.116.673

Beban akrual umum per tanggal 31 Desember 2022 termasuk saldo utang Perusahaan terkait akuisi saham sebesar Rp48.500.000.000 (Catatan 32).

**PT ASDP INDONESIA FERRY (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
(Disajikan Dalam Rupiah Penuh, Kecuali Dinyatakan Lain)

19. Liabilitas Jangka Pendek Lainnya

	2023 Rp	2022 Rp
Pihak Berelasi (Catatan 33)	10.714.003.871	125.811.276.546
Pihak Ketiga		
Sales Channel	52.808.281.160	14.743.138.360
Utang Bagi Hasil PT Infinity Indosakti	20.649.249.604	20.649.249.604
Uang Jaminan	7.153.919.154	9.279.222.700
Asuransi dan Kesejahteraan Karyawan	6.768.390.389	6.915.092.669
Utang Pelayaran	9.310.421.975	2.395.125.258
Lain-lain	30.141.253.971	14.768.292.931
Sub Total	126.831.516.253	68.750.121.522
Total	137.545.520.124	194.561.398.068

20. Utang Bank

	2023 Rp	2022 Rp
Kredit Modal Kerja		
<u>Entitas Anak - JN</u>		
Pihak Berelasi		
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	--	20.000.000.000
Sub Total	--	20.000.000.000
Kredit Investasi		
<u>Perusahaan</u>		
Pihak Berelasi		
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	525.000.000.000	600.000.000.000
Sub Total	525.000.000.000	600.000.000.000
<u>Entitas Anak - JN</u>		
Pihak Berelasi		
<u>Pokok Utang</u>		
PT Bank Syariah Indonesia Tbk	139.779.539.976	153.676.889.259
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	108.150.000.000	146.550.000.000
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	53.799.999.999	99.599.999.999
<u>Bunga Ditangguhkan</u>		
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	6.662.343.750	6.662.343.750
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	--	2.801.874.724
Sub Total	308.391.883.725	409.291.107.732
Dikurangi: Bagian yang Jatuh Tempo Dalam Satu Tahun	(149.999.999.801)	(78.097.349.184)
Total Utang Bank Jangka Panjang	683.391.883.924	931.193.758.548

Perusahaan

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk

Berdasarkan Akta Perjanjian Kredit No. 1-4 yang dibuat dihadapan Notaris Sriyani Burlian, S.H di Jakarta tanggal 25 Mei 2022, Perusahaan memperoleh fasilitas Kredit Modal Transaksi Khusus dengan batas maksimum kredit sebesar Rp975.000.000.000. Jangka waktu pinjaman berlaku lima tahun (termasuk *availability period* dan *grace period* selama 12 bulan setelah akad kredit) dengan tingkat bunga pinjaman sebesar 7% per tahun. Tujuan dari pinjaman ini adalah untuk membiayai transaksi dengan PT Mahkota Pratama dan PT Indonesia VIP terkait akuisisi 100% saham PT Jembatan Nusantara, pelunasan kapal afiliasi dan pengalihan kapal, dan *refinancing shareholder* atas pelunasan pinjaman kepada PT Bank Oke Indonesia Tbk dan PT Chandra Sakti Utama.

**PT ASDP INDONESIA FERRY (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
(Disajikan Dalam Rupiah Penuh, Kecuali Dinyatakan Lain)

Pinjaman ini dijamin dengan:

- Saham PT Jembatan Nusantara dengan nilai penjaminan Rp873.953.000
- Deposito giro yang dimiliki dalam bentuk jaminan gadai dengan nilai penjaminan Rp275.000.000.000 (Catatan 10).

Sehubungan dengan fasilitas kredit tersebut, Perusahaan diharuskan menjaga ekuitas selalu positif, kolektibilitas fasilitas kredit dalam keadaan lancar, rasio *Debt Equity Ratio* maksimal 150%, dan menjaga rasio *Debt Service Coverage Ratio* diatas 100%.

Selama fasilitas kredit belum lunas, maka tanpa persetujuan tertulis Perusahaan tidak diperkenankan:

- Melakukan penurunan modal dasar atau modal disetor;
- Mengajukan permohonan pernyataan pailit kepada Pengadilan Niaga untuk menyatakan pailit Perusahaan;
- Mengalihkan/menyerahkan kepada pihak lain, sebagian atau seluruhnya atas hak dan kewajiban yang timbul berkaitan dengan Fasilitas Kredit ini;
- Mengagunkan aset Perusahaan termasuk aset JN kecuali aset yang telah dijaminkan pada saat transaksi akuisisi ini dilakukan;
- Memberikan fasilitas/pinjaman kepada pihak manapun, kecuali pemberian pinjaman kepada pegawai dan/atau pemberian pinjaman dalam rangka menjalankan kegiatan usaha sehari-hari Perusahaan yang wajar;
- Membuat perjanjian dan transaksi tidak wajar
- Mengadakan kontrak atau perjanjian dengan pihak lain dan/atau afiliasinya yang dapat mempengaruhi secara negatif kelancaran usaha Perusahaan;
- Melakukan divestasi aset/penjualan saham JN;
- Perusahaan dilarang untuk menunggak dalam jumlah berapapun, dalam keadaan apapun yang disebabkan oleh sebab apapun.

Pada tanggal 31 Desember 2023, Perusahaan telah memenuhi syarat dan kondisi pinjaman yang ditetapkan Bank.

Saldo per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp525.000.000.000. Pada tanggal 24 November 2023, Perusahaan telah melakukan pembayaran sebesar Rp75.000.000.000.

Entitas Anak - JN

PT Bank Syariah Indonesia Tbk

Berdasarkan perjanjian kredit No. BNISy/CRD/288/R tanggal 29 Juni 2018, JN memperoleh fasilitas pinjaman musyarakah mutanaqisah produktif dari PT Bank Syariah Indonesia Tbk dengan rincian sebagai berikut:

Fasilitas Musyarakah Mutanaqisah

Plafon Kredit	: Rp163.016.260.829
Nisbah Bagi Hasil	: Bank 39,96% dan Nasabah 60,64%
Jangka Waktu	: Sampai dengan 25 Juli 2026
Tujuan	: <i>Refinancing</i> syariah 2 kapal

Perjanjian diatas telah beberapa kali mengalami adendum, adapun perubahan terakhir yaitu melalui perjanjian No. 01/ADD-006/CB1-FOG/VII/2021/MMQ tanggal 28 Juli 2021. Dengan rincian sebagai berikut:

Fasilitas Musyarakah Mutanaqisah

Plafon Kredit	: Rp161.077.113.461
Nisbah Bagi Hasil	: Bank 39,96% dan Nasabah 60,64%
Jangka Waktu	: Sampai dengan 25 Juli 2027
Tujuan	: Restrukturisasi fasilitas Musyarakah Mutanaqisah

**PT ASDP INDONESIA FERRY (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
(Disajikan Dalam Rupiah Penuh, Kecuali Dinyatakan Lain)

Fasilitas pinjaman ini dijamin dengan aset JN (Catatan 12):

- 1 unit kapal penumpang dengan nama KMP Mahkota Nusantara sesuai dengan dokumen kepemilikan *Grosse Akta Pendaftaran Kapal* No. 2296 tanggal 29 Mei 2009 dan *Akta Hipotek Pertama* No. 17/2018 tanggal 8 Agustus 2018;
- 1 unit kapal penumpang dengan nama KMP Safira Nusantara sesuai dengan dokumen kepemilikan *Grosse Akta Pendaftaran Kapal* No. 4947 tanggal 6 Maret 2012 dan *Akta Hipotek Pertama* No. 50/2020 tanggal 29 Juli 2020.

Selama kredit belum lunas, JN diwajibkan untuk:

- Perbandingan antara aset lancar dan utang lancar harus diupayakan minimal 1,0 kali;
- Perbandingan antara jumlah utang dengan modal maksimal 2,2 kali;
- Perbandingan antara EBITDA dengan kewajiban angsuran minimal 1,0 kali;
- Tidak menjual atau memindahtangankan aset yang diagungkan/ dijaminkan di bank;
- Tidak mengikat diri sebagai penjamin utang atau menjaminkan aset JN yang telah diagungkan/dijaminkan kepada bank;
- Tidak mengajukan permohonan untuk dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga atau mengajukan permohonan penundaan pembayaran utang kepada Pengadilan Niaga, melakukan pembubaran atau likuidasi berdasarkan keputusan RUPS;
- Tidak melakukan kegiatan usaha yang bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah.

Manajemen berkomitmen untuk memenuhi dan memastikan pemenuhan kewajiban-kewajiban sesuai ketentuan *covenant* melalui pemastian pembayaran-pembayaran kewajiban dan terus-menerus memperbaiki manajemen operasional dan keuangan JN, serta berkomunikasi intens dengan para kreditur.

Pada tanggal 31 Desember 2023, JN belum memenuhi rasio dan pembatasan yang disyaratkan. Meskipun demikian, PT Bank Syariah Indonesia Tbk masih memperlakukan pinjaman ini sebagai kredit jangka panjang sesuai perjanjian kredit melalui surat PT Bank Syariah Indonesia Tbk No.03/886-3/C tanggal 29 Desember 2023.

Jumlah pembayaran pinjaman pada tahun 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp13.897.349.283 dan Rp4.961.990.193. Nilai terutang pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp139.779.539.976 dan Rp153.676.889.259.

PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk

Berdasarkan perjanjian kredit No. 16.006 tanggal 19 Agustus 2016 dan persetujuan pemberian fasilitas kredit No. SPM/2.1/308/R tanggal 28 Agustus 2016, JN memperoleh fasilitas kredit dari PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk dengan rincian sebagai berikut:

Fasilitas Kredit Investasi

Plafon Kredit	: Rp180.000.000.000
Tingkat Bunga	: 11,25% per tahun
Jangka Waktu	: Sampai dengan 18 Agustus 2023
Tujuan	: Pembiayaan 7 kapal

Pada tanggal 30 April 2020, atas perjanjian tersebut dilakukan restrukturisasi melalui surat keputusan kredit No. SPM/2.1/192/R. Dengan rincian sebagai berikut tersebut:

Fasilitas Kredit Investasi

Plafon Kredit	: Rp87.550.000.000
Tingkat Bunga	: 11,25% per tahun
Jangka Waktu	: Sampai dengan 25 Agustus 2024
Tujuan	: Restrukturisasi fasilitas kredit

**PT ASDP INDONESIA FERRY (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
(Disajikan Dalam Rupiah Penuh, Kecuali Dinyatakan Lain)

Berdasarkan perjanjian kredit No. 009/SPM/PKKI/2019 tanggal 20 Mei 2019, JN memperoleh fasilitas kredit dari PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk dengan rincian sebagai berikut:

Fasilitas Kredit Investasi

Plafon Kredit : Rp100.000.000.000
Tingkat Bunga : 11,25% per tahun
Jangka Waktu : Sampai dengan 25 Agustus 2024
Tujuan : Pembiayaan 2 kapal

Pada tanggal 4 Juni 2020, atas perjanjian tersebut dilakukan restrukturisasi melalui surat keputusan kredit No. SPM/2.1/232b/R. dan telah dilakukan addendum melalui Akta No. 85 pada tanggal 14 Maret 2023 dengan rincian sebagai berikut tersebut:

Fasilitas Kredit Investasi

Plafon Kredit : Rp88.100.000.000
Tingkat Bunga : 8,25% per tahun dengan pembebanan 9,00% dan 2,25% ditangguhkan
Jangka Waktu : Sampai dengan 19 Mei 2026
Tujuan : Restrukturisasi fasilitas kredit

Fasilitas-fasilitas tersebut dijamin dengan:

- i. Piutang usaha (Catatan 5);
- ii. Kapal (Catatan 12); dan
- iii. Persediaan (Catatan 8).

JN diwajibkan untuk menjaga *current ratio* minimal 1 kali, *debt equity ratio* maksimal 2,5 kali, dan *debt service coverage* minimal 100,00%.

Selama kredit belum lunas, JN diwajibkan untuk:

- Menggunakan dana JN untuk tujuan di luar usaha yang dibiayai dengan fasilitas Bank BNI;
- Mengikatkan diri sebagai penjamin, menjaminkan harta kekayaan yang telah dijaminkan kepada pihak lain;
- Membagi laba usaha dan membayar dividen kepada pemegang saham;
- Melakukan likuidasi atau pembubaran atau tindakan kepailitan;
- Mengubah bidang usaha;
- Membuka usaha baru yang tidak terkait dengan usaha yang telah ada;
- Membuat perjanjian dan transaksi tidak wajar;
- Menyerahkan atau mengalihkan seluruh atau sebagian dari hak dan atau kewajiban saudara yang timbul berdasarkan perjanjian kredit;
- Menarik kembali modal yang disetor;
- Merubah bentuk atau status hukum JN, merubah anggaran dasar (kecuali meningkatkan modal perusahaan) berupa memindahtangankan saham JN baik antar pemegang saham maupun kepada kepada pihak lain yang mengakibatkan perubahan pemegang saham dominan;
- Menjual atau menjaminkan harta kekayaan JN kepada pihak lain termasuk unit-unit kapal yang belum menjadi jaminan/agunan di bank atau lembaga keuangan lainnya;
- Menerima fasilitas kredit baru baik dari bank lain maupun lembaga keuangan lainnya;
- Melakukan merger akuisisi atau reorganisasi atau investasi/penyertaan kepada JN lain;
- Melakukan investasi yang melebihi *proceed* JN;
- Menggadaikan atau dengan cara lain mempertanggungkan saham JN kepada pihak manapun;
- Melakukan *interfinancing* dengan JN afiliasi, induk JN dan atau anak JN kecuali yang berhubungan dengan operasional JN;
- Menerbitkan atau menjual saham kecuali dikonversi menjadi modal, yang dibuat secara notariil;
- Melunasi seluruh atau sebagian hutang kepada pemegang saham dan atau perusahaan afiliasi yang belum atau telah didudukkan sebagai pinjaman subordinasi fasilitas kredit BNI;
- Melunasi atau membayar pokok atau biaya bunga dan atau biaya-biaya lainnya atas pinjaman kepada pihak yang telah disetujui atau ditetapkan dalam perjanjian kredit, akan tetapi tidak terbatas kepada pemegang saham dan atau afiliasinya;
- Memberikan pinjaman kepada pihak lain, kecuali dalam rangka transaksi operasional usaha yang lazim atau wajar berdasarkan penilaian BNI.

**PT ASDP INDONESIA FERRY (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
(Disajikan Dalam Rupiah Penuh, Kecuali Dinyatakan Lain)

Berdasarkan surat No.KU.8/B/073/JN/II/Dir-21 tanggal 18 Februari 2022 perihal permohonan persetujuan atas rencana pengambilalihan saham JN, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk menyetujui atas permohonan tersebut melalui surat No. KOM1/4.1/101/R pada tanggal 21 Februari 2022.

Manajemen berkomitmen untuk memenuhi dan memastikan pemenuhan kewajiban-kewajiban sesuai ketentuan *covenant* melalui pemastian pembayaran-pembayaran kewajiban dan terus-menerus memperbaiki manajemen operasional dan keuangan Perusahaan, serta berkomunikasi intens dengan para kreditur. Berdasarkan hasil konfirmasi No. COB 3/5/064, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk menyatakan bahwa bagian jangka pendek atas pinjaman Perusahaan adalah sebesar Rp41.550.000.000 dari seluruh pinjaman jangka panjang.

Jumlah pembayaran pinjaman pada tahun 2023 adalah sebesar Rp38.400.000.000. Nilai terutang pada tanggal 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp114.812.343.750.

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk

Berdasarkan perjanjian kredit No. 8 dan 9 tanggal 8 Maret 2017 oleh Notaris Vestina Ria Kartika, S.H., M.H., di Jakarta, JN memperoleh fasilitas kredit modal kerja dan kredit investasi dari PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Fasilitas pinjaman ini digunakan untuk operasional JN.

Perjanjian ini telah beberapa kali mengalami adendum, adapun perubahan terakhir yaitu melalui Akta No. 28 dan 29 tanggal 29 Juni 2021 oleh Notaris Vestina Ria Kartika, S.H., M.H., di Jakarta dengan rincian sebagai berikut:

Fasilitas Kredit Modal Kerja

Plafon Kredit : Rp20.000.000.000
Tingkat Bunga : 11,50% per tahun
Jangka Waktu : Sampai dengan 9 Maret 2023

Fasilitas Kredit Investasi

Plafon Kredit : Rp131.800.000.000
Tingkat Bunga : 11,50% per tahun
Jangka Waktu : Sampai dengan 8 Februari 2025

Fasilitas-fasilitas tersebut dijamin dengan:

- i. Piutang usaha (Catatan 5);
- ii. Kapal (Catatan 12); dan
- iii. Persediaan (Catatan 8).

Selama kredit belum lunas, JN diwajibkan untuk:

- Tidak melakukan *merger* dan *go public*;
- Tidak melakukan perubahan/pengalihan kepemilikan saham, perubahan struktur permodalan yang menyebabkan kepemilikan saham menjadi minoritas;
- Tidak mengikatkan diri sebagai penanggung atau penjamin utang;
- Tidak memperoleh pinjaman/kredit baru dari bank atau lembaga lain;
- Tidak melakukan investasi, peluasan usaha atau penjualan aset melebihi Rp100.000.000.000;
- Tidak melakukan pengajuan pailit ke Pengadilan Niaga tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari bank;
- Tidak melakukan perlunasan dan atau membayar hutang kepada pemegang saham sebelum hutang di bank dilunasi;
- Tidak memberikan pinjaman kepada pemegang saham dan pihak berelasi dengan alasan apapun.

**PT ASDP INDONESIA FERRY (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
(Disajikan Dalam Rupiah Penuh, Kecuali Dinyatakan Lain)

Berdasarkan surat No.KU.8/B/015/JN/II/Dir-22 tanggal 17 Februari 2022 perihal permintaan persetujuan tertulis dan pemberitahuan terkait rencana akuisisi JN sehubungan dengan ketentuan *Negative Covenants* dalam perjanjian kredit investasi dan kredit modal kerja, pengalihan kepemilikan saham telah disetujui dan ditandatangani oleh PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk pada tanggal 21 Februari 2022.

Pada 31 Desember 2023, JN telah memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh bank.

Jumlah pembayaran pinjaman pada tahun 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp65.601.874.724 dan Rp32.069.125.276. Nilai terutang pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp53.799.999.999 dan Rp122.401.874.723. Pada tanggal 5 April 2023, JN telah melunasi pinjaman fasilitas kredit modal kerja.

21. Pinjaman Sindikasi

	2023 Rp	2022 Rp
Pihak Berelasi (Catatan 34)		
Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (Eximbank)	100.000.000.000	--
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	--	146.012.894.668
PT Bank Raya Indonesia Tbk	--	77.591.007.252
PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero)	--	107.740.564.205
Sub Total	100.000.000.000	331.344.466.125
Pihak Ketiga		
PT Bank Central Asia Tbk	605.000.000.000	131.246.985.657
Sub Total	705.000.000.000	462.591.451.782
Dikurangi: Biaya Transaksi yang Belum Diamortisasi	(22.296.083.334)	--
Total	682.703.916.666	462.591.451.782
Dikurangi: Bagian yang Jatuh Tempo Dalam Satu Tahun	(28.200.000.000)	(24.411.158.400)
Bagian Jangka Panjang	654.503.916.666	438.180.293.382

Perjanjian Sindikasi - 2019

Berdasarkan Perjanjian Kredit Sindikasi No. 3 pada tanggal 3 Oktober 2019 antara IFPRO, entitas anak, dengan kreditur yang terdiri dari PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk ("BRI"), PT Bank Raya Indonesia Tbk (d/h PT Bank Rakyat Indonesia Agroniaga Tbk), PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero), pihak berelasi dan PT Bank Central Asia Tbk ("BCA"), pihak ketiga telah sepakat untuk menyediakan suatu fasilitas pinjaman Kredit Investasi dan IDC dalam Rupiah pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp660.032.000.000. Pinjaman ini digunakan untuk membiayai proyek IFPRO.

Plafon pinjaman sindikasi per masing-masing bank adalah sebagai berikut:

	Kredit Tranche I Rp	Kredit Tranche II Rp	Kredit Tranche IIIA Rp	Kredit Tranche IIIB Rp	Kredit IDC Tranche IIIA Rp	Kredit IDC Tranche IIIB Rp	TOTAL Rp
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	56.303.278.265	54.481.404.726	41.510.484.209	43.053.900.753	2.264.008.290	2.386.923.757	200.000.000.000
PT Bank Central Asia Tbk	50.392.601.392	48.761.986.802	38.154.091.140	37.532.786.689	2.022.366.678	1.989.434.287	178.853.266.988
PT Bank Raya Indonesia Tbk (d/h PT Bank Rakyat Indonesia Agroniaga Tbk)	28.821.882.210	27.889.257.573	25.905.102.754	17.383.757.464	1.384.799.979	940.666.044	102.325.466.024
PT Sarana Multi Infrastruktur	50.392.601.392	48.761.986.802	--	75.686.877.829	--	4.011.800.965	178.853.266.988
Total	185.910.363.259	179.894.635.903	105.569.678.103	173.657.322.735	5.671.174.947	9.328.825.053	660.032.000.000

Suku bunga fasilitas kredit ini ditetapkan sebesar JIBOR 3 bulan ditambah margin (4,65%) per tahun. Kreditur sindikasi memberikan masa tenggang (*grace period*) untuk pembayaran pokok kredit selama 24 bulan terhitung sejak tanggal penandatanganan Perjanjian ini.

Jangka waktu kredit berdasarkan perjanjian kredit adalah 12 tahun sejak tanggal penandatanganan Perjanjian ini termasuk masa tenggang (*grace period*).

**PT ASDP INDONESIA FERRY (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir

Pada Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

(Disajikan Dalam Rupiah Penuh, Kecuali Dinyatakan Lain)

IFPRO setuju untuk membayar *structuring fee* kepada kreditur sindikasi dengan jadwal sebagai berikut:

a. *Structuring Fee*

- 50% (lima puluh persen) dari *structuring fee* wajib dibayarkan paling lambat 5 (lima) hari kerja bank setelah penandatanganan perjanjian; dan
- 50% (lima puluh persen) dari *structuring fee* wajib dibayarkan paling lambat 3 (tiga) bulan sejak pembayaran pertama *structuring fee*.

b. *Agency Fee*

Pembayaran pertama kali dilakukan paling lambat pada 5 (lima) hari kerja setelah penandatanganan Perjanjian Kredit dan selanjutnya dibayar pada saat setiap ulang tahun Perjanjian Kredit.

c. *Commitment Fee*

Dibayarkan sebesar 0.5% dari sisa *outstanding* tiap Fasilitas Kredit *Tranche I, Tranche II, Tranche III A* dan *Tranche III B*. Pembayaran *commitment fee* dilakukan paling lambat 5 hari kerja bank setelah tanggal berakhirnya jangka waktu penyediaan kredit masing-masing fasilitas kredit.

Pinjaman ini digunakan untuk membiayai proyek IFPRO dan dijamin dengan:

- Jaminan Fidusia atas Bangunan serta benda-benda lain milik debitur yang melekat diatas tanah yang berada di lokasi proyek termasuk namun tidak terbatas atas Bangunan Dermaga Eksekutif Pelabuhan Merak dan Dermaga Eksekutif Pelabuhan Bakauheni dan Kawasan Pelabuhan Labuan Bajo (Catatan 12);
- Jaminan Fidusia atas Pendapatan dan Piutang Usaha (Catatan 5);
- Jaminan Fidusia atas hasil klaim bank garansi terhadap pekerjaan pekerjaan pembangunan;
- Insfratraktur proyek yang diterima dari kontraktor dan atau supplier/vendor atau pemasok;
- Jaminan Fidusia atas hasil klaim asuransi;
- Gadai atas rekening penampungan; dan
- *Cessie* atas perjanjian kerja sama tentang pemanfaatan lahan untuk kegiatan Bangun Guna Serah (BGS)/*Build Operate Transfer* (BOT) Terminal Eksekutif dan Area Komersial di pelabuhan Merak dan Bakauheni tanggal 30 April 2019 antara Perusahaan dan PT ASDP Indonesia Ferry (Persero), pemegang saham, ("Perjanjian Bangun Guna Serah Merak-Bakauheni") dan Perjanjian kerja sama pemanfaatan Lahan untuk kegiatan Bangun Guna Serah (BGS)/*Build Operate Transfer* (BOT) Hotel, Marina dan Area Komersial di Pelabuhan Labuan Bajo antara IFPRO dan Perusahaan, pemegang saham, tanggal 30 April 2019 ("Perjanjian Bangun Guna Serah Labuan Bajo") ("*Cessie* atas Perjanjian Bangun Guna Serah").

Berdasarkan ketentuan-ketentuan dalam perjanjian kredit, IFPRO, entitas anak harus menjaga rasio keuangan berikut yang harus dipenuhi 3 tahun setelah penandatanganan perjanjian kredit ini (tahun 2023):

- *Leverage* (Total Current Asset : Total Current Liabilities) kurang dari 30%;
- *Current ratio* (Total Current Asset : Total Current Liabilities) lebih besar dari 100%; dan
- *Debt Service Coverage Ratio* [EBITDA : (*Interest Expense* + *Current Portion Long Term Liabilities*)] lebih besar dari 125%.

Selama utang belum dilunasi IFPRO tanpa persetujuan tertulis dari kreditur sindikasi terlebih dahulu, IFPRO, entitas anak berjanji tidak akan melakukan:

- Mengajukan permohonan dan/atau menyuruh pihak lain mengajukan permohonan kepada Pengadilan untuk dinyatakan pailit atau meminta penundaan pembayaran hutang atau agar diangkat pengampu atas suatu bagian atau semua aset IFPRO;
- Mengalihkan/menyerahkan kepada pihak lain, sebagian atau seluruhnya atas hak dan kewajiban yang timbul berkaitan dengan fasilitas kredit;
- Mengadakan perubahan atas status kelembagaan, maksud tujuan dan kegiatan usaha IFPRO;
- Mengubah susunan pemegang saham IFPRO;
- Membayar atau membayar kembali tagihan atau piutang berupa apapun juga yang sekarang dan atau/dikemudian hari akan diberikan oleh para pemegang saham dan/atau afiliasi IFPRO baik berupa hutang pokok, bunga dan lain-lain jumlah uang yang wajib dibayar (hutang subordinasi), kecuali pembayaran kewajiban pokok hutang dan/atau bunga kepada pemegang saham tersebut timbul dari kegiatan operasional usaha IFPRO;

PT ASDP INDONESIA FERRY (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan)

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir

Pada Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

(Disajikan Dalam Rupiah Penuh, Kecuali Dinyatakan Lain)

- Melakukan perubahan terhadap struktur permodalan IFPRO (*corporate structure*), termasuk namun tidak terbatas, melakukan peleburan, penggabungan, pengambilalihan, dan/atau pembubaran;
- Memindahkan atau mengalihkan haknya dan/atau memindahkan/mengalihkan tanggung jawab dan kewajiban IFPRO terkait Perjanjian BGS kepada pihak lain;
- Bertindak sebagai penanggung atau perjanjian dalam bentuk dan dengan nama apapun juga dan/atau menjaminkan atau mengagunkan harta kekayaan IFPRO kecuali menjaminkan/mengagunkan kekayaan kepada Kreditur sebagaimana termaktub dalam Dokumen Jaminan;
- Mengadakan perjanjian kredit/pembiayaan yang dapat menimbulkan kewajiban IFPRO kepada pihak ketiga;
- Mengadakan penyertaan baru dalam perusahaan-perusahaan lain dan atau turut membiayai perusahaan-perusahaan lain dan atau turut membiayai perusahaan-perusahaan lain;
- Memberikan kredit kepada pihak manapun termasuk tetapi tidak terbatas kepada pemegang saham, kecuali pemberian pinjaman kepada pegawai dan/atau untuk kegiatan usaha normal dan usaha IFPRO;
- Melakukan pembagian dividen, kecuali dalam hal setelah pembagian dividen *Financial Covenant* terpenuhi, cukup memberitahukan kepada Kreditur Sindikasi;
- Melakukan investasi yang nilainya sama dengan atau melebihi dari 20% dari nilai aset IFPRO;
- Melakukan perubahan yang bersifat material atas perjanjian BGS;
- Menjual atau melepaskan harta tidak bergerak atau harta kekayaan utama dalam menjalankan usahanya, kecuali dalam rangka menjalankan usaha sehari-hari;
- Melakukan transaksi dengan seseorang atau sesuatu pihak termasuk tidak terbatas dengan perusahaan afiliasinya, dengan cara yang berbeda atau di luar praktek dan kebiasaan yang ada.

Pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, IFPRO telah mematuhi seluruh hal-hal yang telah dipersyaratkan dalam perjanjian pinjaman.

Pada tanggal 22 Desember 2023, IFPRO telah melunasi pinjaman sindikasi sebesar Rp444.283.035.782.

Perjanjian Sindikasi – 2023

Berdasarkan Akta Perjanjian Kredit No. 31 pada tanggal 18 Desember 2023 dari Notaris Ashoya Ratam, S.H. M.Kn, notaris di Jakarta, Perusahaan memperoleh fasilitas kredit investasi sindikasi dari PT Bank Central Asia Tbk (“BCA”) pihak ketiga dan Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (“LPEI”), pihak berelasi dengan *limit* kredit fasilitas sebesar Rp705.000.000.000. Jangka waktu fasilitas kredit sampai dengan tersebut adalah sebagai berikut:

	BCA			LPEI	Total
	III Rp	I.A Rp	I.B Rp	I.C Rp	Rp
Total Komitmen	305.000.000.000	200.000.000.000	100.000.000.000	100.000.000.000	705.000.000.000
Tujuan					
1 Pembayaran kembali Fasilitas Kredit Eksisting	305.000.000.000	--	--	--	305.000.000.000
2 Pelunasan hutang kontraktor	--	--	--	44.654.581.369	44.654.581.369
3 Pembayaran pokok SHL PP	--	--	53.654.581.369	55.345.418.631	109.000.000.000
4 Pembayaran pokok SHL ASDP	--	67.654.581.369	46.345.418.631	--	114.000.000.000
5 Pembayaran Biaya-biaya terkait Fasilitas	--	22.162.500.000	--	--	22.162.500.000
6 Pencairan Pinjaman	--	110.182.918.631	--	--	110.182.918.631
Total Penarikan Per Tranche	305.000.000.000	200.000.000.000	100.000.000.000	100.000.000.000	705.000.000.000

Perusahaan wajib menggunakan Fasilitas sesuai dengan tujuan pinjaman, yaitu:

a) Fasilitas Kredit Investasi I:

- Tranche I.A, Fasilitas ini digunakan untuk melakukan pelunasan Perjanjian Pinjaman Pemegang Saham Eksisting dan/atau pelunasan Fasilitas Kredit Eksisting yang digunakan untuk membiayai pembangunan Hotel Meurorah dan Area Komersial di Kawasan Wisata Labuan Bajo dengan suku bunga 7.75%.
- Tranche I.B, Fasilitas ini digunakan untuk pelunasan Pinjaman Pemegang Saham Eksisting yang digunakan untuk membiayai pembangunan Hotel Meurorah dan Area Komersial di Kawasan Wisata Labuan Bajo dengan suku bunga 7.50%.
- Tranche I.C, Fasilitas ini digunakan untuk pelunasan Perjanjian Pinjaman Pemegang Saham

PT ASDP INDONESIA FERRY (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan)
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
(Disajikan Dalam Rupiah Penuh, Kecuali Dinyatakan Lain)

Eksisting dan/atau pelunasan Hutang kepada Kontraktor yang digunakan untuk membiayai pembangunan Hotel Meurorah dan Area Komersial Bajo di Kawasan Wisata Labuan bajo dengan suku bunga 6%.

- b) Fasilitas Kredit Investasi II:
 - i. Tranche II.A, Fasilitas ini digunakan untuk pembiayaan pembangunan Hotel dan Area Komersial serta fasilitas penunjang di Kawasan Marina Labuan Bajo dengan suku bunga 6%.
 - ii. Tranche II.B, Fasilitas ini digunakan untuk pembiayaan pembangunan Dermaga Marina di Kawasan Marina Labuan Bajo dengan suku bunga 6%.
- c) Fasilitas Kredit Investasi III:
Fasilitas ini akan digunakan pembayaran kembali dengan menggunakan fasilitas baru (*refinancing*) Fasilitas Kredit Eksisting, baik secara *take over* maupun yang telah dilunasi menggunakan pinjaman pemegang saham yang digunakan untuk membiayai pembangunan proyek Dermaga Eksekutif Pelabuhan Merak dan Dermaga Eksekutif Pelabuhan Bakauheni dengan suku bunga 7.75%.

Jangka waktu fasilitas kredit ini adalah maksimal 12 tahun sejak tanggal penandatanganan Perjanjian ini.

- Jatuh tempo Fasilitas Kredit Investasi I adalah 144 bulan sejak tanggal perjanjian.
- Jatuh tempo Fasilitas Kredit Investasi Tranche II adalah 180 bulan sejak tanggal perjanjian.
- Jatuh tempo Fasilitas Kredit Investasi Tranche III adalah 144 bulan sejak tanggal perjanjian.

Antara Perusahaan dengan PT Bank Central Asia Tbk., dan dijamin dengan:

- Gadai Atas Rekening Penampungan.
- Kuasa Untuk Mengelola dan Melakukan Penarikan Dari Rekening.

Kuasa untuk yang diberikan Perusahaan kepada BCA atas rekening yang digadaikan, sebagai berikut:

1. Rekening Pengumpulan (*Collection Account*) nomor 2050050109
2. Rekening Proyek (*Project Account*) nomor 2050050206
3. Rekening Pembayaran Utang (*Debt Service Account*) nomor 2050050192
4. Rekening Cadangan Pembayaran Utang (*Debt Service Reserve Account*) nomor 2050050176
5. Rekening Penjaminan Kredit (Penjamin Kredit *Account*) nomor 2050050184
6. Rekening Operasional nomor 2050050087

Semua rekening yang digadaikan dalam mata uang Rupiah atas nama PT Indonesia Ferry Properti

- Gadai Atas Rekening Penjaminan Kredit.
- Kuasa Untuk Mengelola dan Melakukan Penarikan Dari Rekening Penjaminan Kredit.
- Akta Pemberian Cessie Sebagai Jaminan Atas Hak Dalam Perjanjian Kerjasama.
- Kuasa Untuk Menjual Aset.

Antara Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia dengan PT Bank Central Asia Tbk dan dijamin dengan:

- *Coverage* penjamin sebesar 70% dari nilai penjamin.
- Biaya imbal jasa penjamin dihitung berdasarkan tarif penjamin dikalikan nilai penjamin dan jangka waktu penjamin yaitu keseluruhan sebesar Rp9.133.583.333.

Berdasarkan ketentuan-ketentuan dalam perjanjian kredit, Perusahaan harus menjaga rasio keuangan berikut yang harus dipenuhi 12 tahun setelah penandatanganan perjanjian kredit ini yaitu:

- a) Debitur harus memastikan bahwa:
 - i. Rasio Utang terhadap Ekuitas dari Debitur tidak boleh melebihi 3(tiga) kali;
 - ii. Rasio Lancar dari Debitur tidak boleh kurang dari 1 (satu) kali; dan
 - iii. DSCR dari Debitur tidak boleh kurang dari 1 (satu) kali.
- b) Debitur wajib mempertahankan ekuitas tetap positif.

Pada tanggal 31 Desember 2023, Perusahaan telah mematuhi seluruh hal-hal yang telah dipersyaratkan dalam perjanjian pinjaman.

Nilai terutang pada tanggal 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp682.703.916.666.

**PT ASDP INDONESIA FERRY (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
(Disajikan Dalam Rupiah Penuh, Kecuali Dinyatakan Lain)

22. Liabilitas Imbalan Pascakerja

Total liabilitas imbalan kerja yang disajikan dalam laporan posisi keuangan konsolidasian dan beban imbalan kerja yang diakui dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 dihitung oleh Kantor Konsultan Aktuaria I Gde Eka Sarmaja, FSAI dan Rekan, aktuaris independen.

	2023 Rp	2022 Rp
Dana Pensiun	27.061.928.609	41.054.539.149
Imbalan Pascakerja	117.259.041.731	101.051.273.734
Tunjangan Hari Tua	--	--
Total Liabilitas	144.320.970.340	142.105.812.883

a) Dana Pensiun

Program Pensiun Iuran Pasti

Biaya pensiun iuran pasti masing-masing pada tahun 2023 dan 2022 adalah sebesar Rp5.955.227.907 dan Rp4.374.911.384 yang dikelola oleh Dana Pensiun PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) untuk kompensasi pensiun pegawai.

Program Pensiun Manfaat Pasti

Perusahaan menyelenggarakan program dana pensiun manfaat pasti untuk sebagian besar karyawan yang memenuhi persyaratan. Program dana pensiun tersebut dikelola oleh Dana Pensiun PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) yang peraturannya telah disetujui oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia. Program dana pensiun memberikan imbalan pascakerja berdasarkan penghasilan dasar pensiun dan masa kerja karyawan. Jumlah karyawan Perusahaan peserta dana pensiun masing-masing adalah 1.167 dan 1.302 pada 31 Desember 2023 dan 2022.

Liabilitas program pensiun manfaat pasti karyawan adalah sebagai berikut:

	2023 Rp	2022 Rp
Nilai Kini Liabilitas	321.244.714.267	316.387.602.297
Nilai Wajar Aset	(294.182.785.658)	(275.333.063.148)
Liabilitas yang Diakui	27.061.928.609	41.054.539.149

Beban pensiun adalah sebagai berikut:

	2023 Rp	2022 Rp
Biaya Jasa Kini	6.778.251.486	6.888.809.081
Biaya Jasa Lalu	--	(26.564.563.815)
Biaya Bunga	19.908.034.788	20.159.698.409
Pendapatan Bunga Dari Aset	(17.136.853.395)	(14.956.297.691)
Beban yang Diakui	9.549.432.879	(14.472.354.016)

Mutasi liabilitas program pensiun manfaat pasti Perusahaan adalah sebagai berikut:

	2023 Rp	2022 Rp
Liabilitas Awal Tahun	41.054.539.149	93.715.982.297
Pendapatan (Beban) Tahun Berjalan	9.549.432.879	(14.472.354.016)
Penghasilan Komprehensif Lain	(1.492.660.803)	(15.783.492.619)
Iuran Pemberian Kerja	(22.049.382.616)	(22.405.596.513)
Liabilitas Akhir Tahun	27.061.928.609	41.054.539.149

PT ASDP INDONESIA FERRY (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan)
 Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
 Pada Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
 (Disajikan Dalam Rupiah Penuh, Kecuali Dinyatakan Lain)

Rekonsiliasi saldo awal dan akhir dari pengukuran kembali liabilitas program pensiun manfaat pasti yang diakui di penghasilan komprehensif lain adalah sebagai berikut:

	2023 Rp	2022 Rp
Saldo Awal	96.536.326.531	112.319.819.150
Efek Perubahan dari Penyesuaian Pengalaman	1.869.856.580	(161.698.643.115)
Keuntungan Aktuarial pada Aset Program	518.323.764	(10.836.791.477)
Efek Perubahan dari Asumsi Aktuarial	1.525.112.724	156.751.941.973
Efek Perubahan dari Asumsi Demografik	(5.405.953.871)	--
Saldo Akhir Tahun	95.043.665.728	96.536.326.531

b) Imbalan Pascakerja

Liabilitas imbalan pascakerja dalam laporan posisi keuangan adalah sebagai berikut:

	2023 Rp	2022 Rp
Liabilitas imbalan pasca kerja dana pensiun yang diakui pada laporan posisi keuangan:		
Nilai Kini Liabilitas	117.259.041.731	101.051.273.734
Nilai Wajar Aset	--	--
Liabilitas yang Diakui	117.259.041.731	101.051.273.734

Beban imbalan pascakerja Grup dialokasikan pada beban produksi dan beban usaha sebagai berikut:

	2023 Rp	2022 Rp
Biaya imbalan pasca kerja yang dibebankan pada laporan laba (rugi):		
Biaya Jasa Kini	8.714.955.404	3.629.270.431
Biaya Bunga	6.384.306.923	1.608.987.283
Biaya Jasa Lalu	6.195.330.286	68.213.722.701
Keuntungan (Kerugian) atas penyelesaian	75.436.481	723.964.745
Beban Diakui	21.370.029.094	74.175.945.160

Perubahan estimasi liabilitas atas imbalan pascakerja dalam laporan posisi keuangan adalah sebagai berikut:

	2023 Rp	2022 Rp
Rekonsiliasi cadangan kewajiban imbalan pasca kerja:		
Liabilitas Awal Tahun	101.051.273.734	26.210.083.116
Pembayaran Imbalan	(16.634.994.705)	(25.063.009.377)
Beban Tahun Berjalan	21.370.029.094	74.175.945.160
Penghasilan Komprehensif Lain	11.472.733.608	25.728.254.835
Liabilitas Akhir Tahun	117.259.041.731	101.051.273.734

Rekonsiliasi saldo awal dan akhir dari pengukuran kembali liabilitas imbalan pascakerja yang diakui di penghasilan komprehensif lain adalah sebagai berikut:

	2023 Rp	2022 Rp
Saldo Awal	66.627.771.478	40.899.516.643
Dampak karena perubahan asumsi finansial	2.592.675.029	(2.315.093.972)
Dampak karena penyesuaian pengalaman	1.339.136.278	28.043.348.807
Dampak karena penyesuaian demografik	7.540.922.301	--
Saldo Akhir Tahun	78.100.505.086	66.627.771.478

PT ASDP INDONESIA FERRY (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan)
 Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
 Pada Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
 (Disajikan Dalam Rupiah Penuh, Kecuali Dinyatakan Lain)

Program imbalan pasti memberikan eksposur Grup terhadap risiko tingkat bunga dan risiko gaji, sebagai berikut:

- Risiko Tingkat Bunga**
 Nilai kini kewajiban pensiun imbalan pasti dihitung menggunakan tingkat diskonto yang ditetapkan dengan mengacu pada imbal hasil obligasi korporasi berkualitas tinggi. Penurunan suku bunga obligasi akan meningkatkan liabilitas program.
- Risiko Gaji**
 Nilai kini kewajiban imbalan pasti dihitung dengan mengacu pada gaji masa depan peserta program. Dengan demikian, kenaikan gaji peserta program akan meningkatkan liabilitas program itu.

Analisa Sensitivitas

Asumsi aktuarial yang signifikan untuk penentuan kewajiban imbalan pasti adalah tingkat diskonto dan kenaikan gaji yang diharapkan. Analisa sensitivitas dibawah ditentukan berdasarkan masing-masing perubahan asumsi yang mungkin terjadi pada akhir periode pelaporan dan semua asumsi lain akhir periode pelaporan, dengan semua asumsi lain konstan.

	2023		2022	
	Dana Pensiun	Nilai Kini Kewajiban Imbalan Pascakerja	Dana Pensiun	Nilai Kini Kewajiban Imbalan Pascakerja
	Rp	Rp	Rp	Rp
Analisa Sensivitas Tingkat Diskonto				
Jika Tingkat +1%	327.174.515.109	128.073.503.276	310.785.162.061	107.739.699.621
Jika Tingkat -1%	327.649.835.631	129.390.424.744	322.398.684.585	108.422.361.046
Analisa Sensivitas Kenaikan Gaji				
Jika Tingkat +1%	327.126.335.783	126.799.914.266	321.868.700.146	104.905.412.772
Jika Tingkat -1%	326.794.415.244	125.904.256.247	311.181.581.846	104.696.568.792

Profil Jatuh Tempo Pembayaran Imbalan Pascakerja adalah:

	2023 Rp	2022 Rp
Nilai Kini Manfaat Diharapkan akan Dibayar di:		
- sampai dengan 2 tahun	30.361.580.525	28.340.897.745
- 2 sampai dengan 5 tahun	56.225.957.345	54.309.185.328
- 5 sampai dengan 10 tahun	88.390.782.207	75.200.122.275
- diatas 10 tahun	128.926.165.843	76.785.368.602

Asumsi aktuaria yang digunakan dalam menentukan beban dan liabilitas imbalan pensiun dan imbalan pasca kerja pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

	2023	2022
Usia pensiun	56 tahun	56 tahun
Tingkat kematian	GAM - 1971 (IFPRO: TMI IV)	GAM - 1971 (IFPRO: TMI IV)
Tingkat cacat:		
Usia 20 - 55 tahun	0,01%	0,01%
Tingkat pengunduran diri:		
Usia 18 - 45 tahun	5% per tahun	5% per tahun
Usia 46 - 55 tahun	10 % pada usia 46, turun 1% linier sampai usia 55	10 % pada usia 46, turun 1% linier sampai usia 55
Kenaikan Gaji	6% per tahun (IFPRO: 8% per tahun, JN: 4% per tahun)	5-6% per tahun (IFPRO: 8% per tahun, JN: 1% per tahun)

PT ASDP INDONESIA FERRY (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan)
 Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
 Pada Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
 (Disajikan Dalam Rupiah Penuh, Kecuali Dinyatakan Lain)

	2023	2022
Tingkat bunga:		
Kewajiban	6,50 % per tahun (IFPRO: 6,93% per tahun)	6,75 % per tahun (IFPRO: 6,93% per tahun)
Aset	6,25 % per tahun	6,25 % per tahun
Metode	<i>Projected Unit Credit</i>	<i>Projected Unit Credit</i>

c) Tunjangan Hari Tua

Perusahaan memberikan tunjangan hari tua yang pendanaannya dikelola oleh Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912.

Liabilitas tunjangan hari tua dalam laporan posisi keuangan adalah sebagai berikut:

	2023 Rp	2022 Rp
Nilai kini liabilitas	18.121.719.185	22.037.558.838
Nilai wajar aset program	81.288.773.740	77.391.968.252
Status Pendanaan	(63.167.054.555)	(55.354.409.414)
Dampak dari Batas Aset	63.167.054.555	55.354.409.414
	--	--

Perubahan estimasi liabilitas atas tunjangan hari tua dalam laporan posisi keuangan adalah sebagai berikut:

	2023 Rp	2022 Rp
Liabilitas awal tahun	--	--
(Pendapatan) Beban tahun berjalan	1.079.598.208	(14.890.876.096)
Penghasilan komprehensif lain	657.960.788	15.816.405.499
Iuran pemberian kerja	(1.737.558.996)	(925.529.403)
Liabilitas Akhir Tahun	--	--

Beban tunjangan hari tua Perusahaan dialokasikan pada beban produksi dan beban usaha sebagai berikut:

	2023 Rp	2022 Rp
Biaya jasa kini	946.753.735	1.741.711.839
Biaya jasa lalu	--	(16.703.349.285)
Biaya bunga	1.130.671.011	2.537.419.273
Pendapatan bunga dari aset	(4.867.093.646)	(4.556.418.465)
Bunga atas dampak batasan aset	3.736.422.635	2.018.999.192
Biaya administrasi dan/atau pajak (tidak disediakan dalam imbalan pasti)	132.844.473	70.761.350
Beban (Pendapatan) yang diakui	1.079.598.208	(14.890.876.096)

Rekonsiliasi saldo awal dan akhir dari pengukuran kembali tunjangan hari tua yang diakui di penghasilan komprehensif lain adalah sebagai berikut:

	2023 Rp	2022 Rp
Saldo Awal	8.056.036.767	(7.760.368.732)
Dampak karena perubahan asumsi finansial	157.573.684	(1.935.831.622)
Dampak karena perubahan asumsi demografik	(2.772.632.117)	--
Dampak karena penyesuaian pengalaman	(1.307.155.738)	(5.148.366.132)
Imbal hasil pada aset program	503.952.453	1.869.180.109
Perubahan pada batas atas aset	4.076.222.506	21.031.423.144
Saldo Akhir Tahun	8.713.997.555	8.056.036.767

**PT ASDP INDONESIA FERRY (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
(Disajikan Dalam Rupiah Penuh, Kecuali Dinyatakan Lain)

23. Utang Pembiayaan

	2023 Rp	2022 Rp
PT PANN Pembiayaan Maritim (Persero)	201.294.072	201.294.072
Dikurangi: Bunga	(201.294.072)	(201.294.072)
Sub Total	--	--
Bagian:		
Jangka Panjang	--	--
Bagian yang Jatuh Tempo dalam Satu Tahun	--	--
Total	--	--

Perusahaan

Utang pembiayaan merupakan utang pembelian KMP Port Link VIII Eks Songlim Golden tue, dengan surat perjanjian No. 11 tanggal 28 Maret 2016 dan addendum 1 No. 9 tanggal 24 Agustus 2016 dengan PT PANN Pembiayaan Maritim (Persero), harga kapal sebesar USD6,750,000 atau sejumlah Rp89.835.750.000.000. Nilai pembiayaan adalah sebesar 79,70% dari harga kapal atau ekuivalen sebesar Rp71.604.000.000, berjangka waktu selama 72 bulan dengan suku bunga 12,50% per tahun, bersifat mengambang yang dapat berubah sesuai ketentuan bunga dari bank sumber dana *lessor* yaitu PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.

Entitas Anak - JN

Utang pembiayaan modal kerja kepada PT Chandra Sakti Utama Leasing yang dinyatakan dalam Akta No. 130 tanggal 26 September 2019 oleh Notaris M. Kholid Artha, S.H., dengan fasilitas *plafond* sebesar Rp18.892.300.000 dan bunga 15% per tahun dengan jangka waktu pinjaman 12 bulan. Fasilitas pinjaman ini dijamin dengan sebidang tanah Hak Guna Bangunan nomor 58/Kertajaya Surabaya, HGB nomor 59/Kertajaya Surabaya, HGB nomor 000076/Kertajaya Surabaya semuanya atas nama Bapak Adjie dan HGB nomor 281/K/Krembangan Selatan Surabaya atas nama PT Prima Eksekutif.

Berdasarkan addendum perjanjian Nomor: 414/CSUL/IX/2020 tanggal 23 September 2020 menyetujui perpanjangan jangka waktu fasilitas pembiayaan paling lama 2 tahun sejak tanggal penarikan *plafond* fasilitas.

Pinjaman JN kepada PT Chandra Sakti Utama Leasing mencakup persyaratan yang membatasi hak JN (*negative covenants*) yang dalam pelaksanaannya membutuhkan persetujuan tertulis dari PT Chandra Sakti Utama Leasing.

Pada tanggal 27 April 2022, pinjaman ini telah dilunasi.

Nilai terutang pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebesar Nihil.

24. Modal Saham

Sesuai dengan Akta No. 9 tanggal 1 September 2021 yang dibuat oleh Notaris Johny Dwikora Aron, S.H., dan telah disahkan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai Surat No. AHU-005.0275.AH.01.02 tanggal 16 September 2021 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perusahaan, Perusahaan meningkatkan modal ditempatkan dan disetor penuh sebesar Rp1.142.385.000.000 yang berasal dari Bantuan Pemerintah Yang Belum Ditetapkan Statusnya dan Penggunaan Saldo Laba (Catatan 25 dan 26).

**PT ASDP INDONESIA FERRY (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
(Disajikan Dalam Rupiah Penuh, Kecuali Dinyatakan Lain)

Susunan pemegang saham Perusahaan adalah sebagai berikut:

31 Desember 2023 dan 2022				
Pemegang Saham	Saham (Lembar)	Nilai Nominal Per Saham Rp	Kepemilikan %	Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh Rp
Negara Republik Indonesia	5.173.195	1.000.000	100	5.173.195.000.000

Mutasi lembar saham Perusahaan adalah sebagai berikut:

	2023 Lembar	2022 Lembar
Jumlah Saham Awal Tahun	5.173.195	5.173.195
Penambahan	--	--
Jumlah Saham Akhir Tahun	5.173.195	5.173.195

25. Tambahan Modal Disetor

	2023 Rp	2022 Rp
a. Pengalihan Aset Perum		
Saldo Awal	7.741.162.065	7.741.162.065
Pemindahan ke Modal Saham	--	--
Sub Total	7.741.162.065	7.741.162.065
b. Pengampunan Pajak		
Aset Tetap - Kendaraan	594.200.000	594.200.000
Aset Tetap - Tanah dan Bangunan	110.000.000	110.000.000
Sub Total	704.200.000	704.200.000
c. Penyertaan Modal		
Aset Tetap - Kapal	388.564.810.000	--
Total	397.010.172.065	8.445.362.065

Berdasarkan Surat Keterangan Pengampunan Pajak (SKPP) yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak No. 09300001103 tertanggal 4 Januari 2017, dengan uang tebusan yang dibayarkan ke kas negara sebesar Rp35.210.000 dan tambahan harta yang dilaporkan untuk Program Pengampunan Pajak adalah sebesar Rp704.200.000.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Nomor 67 Tahun 2023 tentang penambahan modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan tanggal 29 Desember 2023, Perusahaan menerima 12 unit kapal senilai Rp388.564.810.000.

26. Penggunaan Saldo Laba Yang Ditentukan Penggunaannya

Berdasarkan akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) tanggal 26 Juni 2023 dan 13 Juni 2022, pemegang saham menyetujui penetapan penggunaan laba bersih Perseroan tahun buku 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp462.765.073.338 dan Rp325.452.616.764.

PT ASDP INDONESIA FERRY (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan)
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
(Disajikan Dalam Rupiah Penuh, Kecuali Dinyatakan Lain)

Mutasi penggunaan saldo laba laba yang ditentukan penggunaannya adalah sebagai berikut:

	2023 Rp	2022 Rp
Saldo Awal	1.368.261.856.102	1.042.809.239.338
Penambahan		
Ditentukan Penggunaannya	--	325.452.616.764
Reklasifikasi Saldo Laba		
Cadangan Umum	462.765.073.338	--
Saldo akhir	1.831.026.929.440	1.368.261.856.102

27. Pendapatan Usaha

	2023 Rp	2022 Rp
Penyeberangan dan Lintas Perintis	3.298.840.166.861	2.846.094.789.045
Pelabuhan	1.047.161.716.304	951.614.634.475
Aneka Jasa dan Kerjasama	578.832.022.309	524.451.932.098
Total	4.924.833.905.474	4.322.161.355.618

28. Beban Pokok Pendapatan

	2023 Rp	2022 Rp
Penyeberangan dan Lintas Perintis	2.194.501.493.810	1.985.940.554.012
Pelabuhan	390.575.600.080	332.173.260.250
Aneka Jasa dan Kerjasama	654.708.384.439	572.833.053.864
Total	3.239.785.478.329	2.890.946.868.126

Termasuk dalam beban pokok pendapatan, beban penyusutan aset tetap dan aset hak-guna masing-masing sebesar Rp397.136.215.689 dan Rp3.691.475.364 untuk tahun 2023 dan Rp428.462.044.286 dan Rp3.313.970.000 untuk tahun 2022 (Catatan 12 dan 13). Serta kerugian penghapusan aset tetap sebesar Rp1.075.418.414 dan Rp552.120.696 (Catatan 12) di tahun 2023 dan 2022.

29. Beban Administrasi dan Umum

	2023 Rp	2022 Rp
Gaji dan Tunjangan	503.593.947.074	420.424.569.584
Jasa Profesional	91.168.664.930	50.261.684.209
Pajak	76.659.107.334	48.416.300.989
Perjalanan Dinas	69.768.135.940	50.392.710.830
Pemeliharaan	65.508.919.329	58.156.946.182
Penurunan Nilai Piutang (Catatan 5, 7 dan 10)	49.383.561.309	9.848.177.362
Penyusutan (Catatan 12)	46.488.675.114	41.431.820.191
Telekomunikasi dan Perlengkapan Kantor	45.052.546.149	36.906.480.794
Representasi, Jamuan dan Sumbangan	33.377.256.278	27.760.172.859
Penyusutan Aset Hak-Guna (Catatan 13)	28.978.421.819	28.697.890.778
Pendidikan dan Pelatihan	18.321.443.303	13.714.708.882
BBM, Listrik, dan Air	15.703.701.786	13.574.919.987
Program Kemitraan dan Bina Lingkungan	7.759.958.598	7.274.408.737
Amortisasi (Catatan 14)	5.253.932.396	4.926.895.519
Lain-lain (Dibawah Rp4 Milyar)	31.867.485.398	28.900.847.651
Total	1.088.885.756.757	840.688.534.554

**PT ASDP INDONESIA FERRY (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
(Disajikan Dalam Rupiah Penuh, Kecuali Dinyatakan Lain)

30. Pendapatan dan Beban Lainnya

	2023 Rp	2022 Rp
Pendapatan Lainnya		
Surplus Nilai Wajar Properti Investasi (Catatan 11)	98.546.295.901	9.688.469.946
Pendapatan Non Usaha Lainnya	52.403.292.144	42.844.729.698
Denda/Klaim/Pinalti	25.598.488.883	6.401.484.434
Pemulihan Nilai Piutang (Catatan 5 dan 10)	25.217.265.249	11.911.991.658
Selisih <i>Stock Opname</i> - Bersih	12.721.677.704	4.384.470.371
Laba Selisih Kurs	1.340.065.795	3.561.998.113
Laba Penjualan Aset (Catatan 12)	442.101.600	--
Goodwill Negatif - Neto (Catatan 33)	--	103.595.656.393
Total	216.269.187.276	182.388.800.613
Beban Lainnya		
Denda/Klaim/Pinalti	12.855.418.988	11.134.239.957
Beban di Luar Usaha Lainnya	5.894.796.132	11.858.586.211
Denda Pajak	1.426.784.504	3.171.509.677
Jasa Administrasi Bank	652.082.556	6.192.163.638
Total	20.829.082.180	32.356.499.483

31. Pendapatan dan Beban Keuangan

	2023 Rp	2022 Rp
Pendapatan Keuangan		
Pendapatan Bunga Deposito	37.768.696.938	31.918.180.195
Pendapatan Jasa Giro	13.422.285.875	9.471.045.873
Total	51.190.982.813	41.389.226.068
Beban Keuangan		
Beban Bunga Pinjaman Bank	81.487.486.348	77.716.868.334
Beban Bunga Utang Pembiayaan	38.650.694.605	29.438.446.856
Beban Bunga Pinjaman kepada Pemegang Saham	15.347.339.398	19.297.950.178
Bunga Aset Hak-Guna (Catatan 13)	4.054.498.685	5.748.556.933
Total	139.540.019.036	132.201.822.301

32. Kombinasi Bisnis

Pada 22 Februari 2022, Perusahaan mengakuisisi 100% saham PT Jembatan Nusantara (JN) dari pihak ketiga dengan nilai pengambilalihan sebesar Rp1.272.000.000.000 (Catatan 1.d), yang terdiri dari akuisisi saham sebesar Rp892.000.000.000 dan tambahan modal disetor sebesar Rp380.000.000.000 dalam rangka perluasan usaha yang memiliki nilai strategis dan mendukung kegiatan usaha Grup.

Nilai akuisisi saham sebesar Rp892.000.000.000, dibayar langsung dari dana Perusahaan sebesar Rp243.500.000.000 dan melalui pinjaman bank sebesar Rp600.000.000.000, serta sisanya sebesar Rp48.500.000.000 masih terhutang yang dicatat pada beban akrual umum (Catatan 18).

Untuk tambahan modal disetor sebesar Rp380.000.000.000 digunakan untuk membeli 7 kapal sebesar Rp298.000.000.000 dan membayar utang akuisisi 4 kapal sebesar Rp82.000.000.000 yang akan dilakukan oleh JN.

**PT ASDP INDONESIA FERRY (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
(Disajikan Dalam Rupiah Penuh, Kecuali Dinyatakan Lain)

Tabel berikut merangkum jumlah aset teridentifikasi yang diperoleh dan liabilitas yang diambil-alih pada tanggal akuisisi adalah:

	Nilai Buku Rp	Nilai Wajar Rp
Aset Neto yang Diperoleh		
Kas dan Bank	5.628.034.233	5.628.034.233
Piutang Usaha	3.478.552.031	3.478.552.031
Piutang Lain-lain	219.562.296	219.562.296
Pendapatan yang Masih Harus Diterima	163.374.846	163.374.846
Persediaan	22.985.168.981	22.985.168.981
Uang Muka dan Biaya Dibayar di Muka	2.130.689.722	2.130.689.722
Aset Tetap	1.749.893.485.750	2.001.890.800.417
Utang Usaha	(28.313.335.452)	(28.313.335.452)
Utang Pajak	(111.616.252)	(111.616.252)
Beban Akrua	(7.061.469.747)	(7.061.469.747)
Liabilitas Jangka Pendek Lainnya	(1.409.073.525)	(1.409.073.525)
Utang Pembiayaan	(18.892.300.000)	(18.892.300.000)
Utang Bank	(549.423.321.930)	(549.423.321.930)
Liabilitas Pajak Tangguhan	--	(55.439.409.227)
Liabilitas Keuangan Jangka Panjang Lainnya	(250.000.000)	(250.000.000)
Total Aset Neto	1.179.037.750.953	1.375.595.656.393
Porsi Kepemilikan yang Diperoleh		100%
Porsi Kepemilikan atas Nilai Wajar Aset Neto		1.375.595.656.393
Total Nilai Pengalihan		1.272.000.000.000
Goodwill Negatif - Neto (Catatan 30)		(103.595.656.393)

Sehubungan dengan akuisisi tersebut, maka laporan keuangan JN terhitung sejak tanggal akuisisi dikonsolidasi ke dalam laporan keuangan Grup.

Jumlah pendapatan usaha dan rugi/komprehensif sebelum pajak penghasilan JN sejak tanggal akuisisi yang dimasukkan dalam laporan laba rugi komprehensif konsolidasian untuk tahun berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp497.354.376.620 dan Rp68.651.982.850.

Pendapatan usaha dan rugi/komprehensif dari JN untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp534.254.341.448 dan Rp126.218.583.196.

33. Saldo Dan Transaksi dengan Pihak Berelasi

	Jumlah		Persentase Terhadap Jumlah Aset/Liabilitas/Pendapatan dan Beban yang Bersangkutan Percentage to Total Assets/Liabilities/Respective Revenue and Expenses	
	2023 Rp	2022 Rp	2023 %	2022 %
Bank (Catatan 4)				
Rupiah				
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	199.104.608.933	191.257.138.218	1,80	1,91
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	158.955.056.932	100.322.908.489	1,44	1,00
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	111.921.543.384	51.511.316.007	1,01	0,51
PT Bank Syariah Indonesia Tbk	7.216.180.569	14.331.820.699	0,07	0,14
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	8.346.915.894	6.022.333.609	0,08	0,06
Dolar Amerika Serikat				
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	608.484.010	65.907.886	0,01	0,00
Euro				
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	10.446.195	12.191.529	0,00	0,00
Total	486.163.235.917	363.523.616.437	4,40	3,62

**PT ASDP INDONESIA FERRY (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
(Disajikan Dalam Rupiah Penuh, Kecuali Dinyatakan Lain)

	Jumlah		Persentase Terhadap Jumlah Aset/Liabilitas/Pendapatan dan Beban yang Bersangkutan Percentage to Total Assets/Liabilities/Respective Revenue and Expenses	
	2023 Rp	2022 Rp	2023 %	2022 %
Deposito (Catatan 4)				
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	164.622.307.824	248.304.984.999	1,49	2,48
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	125.000.000.000	225.000.000.000	1,13	2,25
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	200.000.000.000	150.000.000.000	1,81	1,50
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	100.000.000.000	150.000.000.000	0,90	1,50
PT Bank Raya Indonesia Tbk	--	50.000.000.000	--	0,50
PT Bank Syariah Indonesia Tbk	210.000.000.000	--	1,90	--
Total	799.622.307.824	823.304.984.999	5,33	8,23
Piutang Usaha (Catatan 5)				
KSO IFPRO - ISS	--	2.577.556.119	--	0,03
PT Jasa Raharja (Persero) Tbk	773.061.200	633.462.654	0,01	0,01
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	340.886.680	143.101.046	0,00	0,00
Lain-lain	538.731.990	255.992.423	0,00	0,00
Sub Total	1.652.679.870	3.610.112.242	0,01	0,04
Cadangan Kerugian Penurunan Nilai	(305.609.308)	(292.432.430)	(0,00)	(0,00)
Total	1.347.070.562	3.317.679.812	0,02	0,03
Pendapatan yang Masih Harus Diterima (Catatan 7)				
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	71.659.769.176	21.477.863.746	0,65	0,21
Kementerian Perhubungan	148.791.678.695	20.976.776.058	1,35	0,21
PT Asuransi Jasa Indonesia (Persero)	2.956.379.893	1.829.580.359	0,03	0,02
PT Jasa Raharja (Persero) Tbk	189.414.412	86.726.324	0,00	0,00
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	203.239.321	170.175.710	0,00	0,00
Perum DAMRI	119.663.700	174.125.000	0,00	0,00
Lain-lain	288.599.489	80.430.488	0,00	0,00
Sub Total	224.208.744.686	44.795.677.685	2,03	0,45
Cadangan Kerugian Penurunan Nilai	(24.082.153.744)	--	(0,22)	--
Total	200.126.590.942	44.795.677.685	4,05	0,88
Uang Muka (Catatan 9)				
PT Industri Kapal Indonesia (Persero)	8.065.454.555	8.065.454.555	0,30	0,32
Total	8.065.454.555	8.065.454.555	0,30	0,32
Utang Usaha (Catatan 15)				
PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk	26.164.693.568	80.056.879.820	0,98	3,15
PT Amarta Karya (Persero)	--	8.781.542.000	--	0,35
PT Dok dan Perkapalan Kodja Bahari (Persero)	3.856.230.785	4.760.457.256	0,14	0,19
PT Pelayaran Nasional Indonesia (Pelni)	82.107.901	2.753.667.744	0,00	0,11
PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero)	1.926.837.620	2.394.001.196	0,07	0,09
PT Industri Kapal Indonesia (Persero)	874.446.968	2.359.733.623	0,03	0,09
PT Asuransi Jiwa Inhealth Indonesia	--	1.993.695.400	--	0,08
PT Jasa Raharja Putera	683.597.591	555.245.020	0,03	0,02
PT Surveyor Indonesia	21.550.000	952.956.291	0,00	0,04
PT Pos Indonesia (Persero)	741.226.896	369.582.269	0,03	0,01
PT Sucofindo (Persero)	431.936.840	273.297.500	0,02	0,01
PT Pertamina (Persero)	--	238.108.964	--	0,01
PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero)	--	573.039.760	--	0,02
PT Asuransi Jasa Indonesia (Persero)	16.162.501.976	--	0,61	--
Lain-lain	4.728.110.118	1.252.404.208	0,18	0,04
Total	55.673.240.263	107.314.611.051	2,09	4,21
Utang Asuransi (Catatan 17)				
PT Jasa Raharja Putera	5.379.514.005	18.935.079.558	0,20	0,74
PT Jasa Raharja (Persero) Tbk	21.222.132.062	4.815.290.044	0,79	0,19
Total	26.601.646.067	23.750.369.602	1,00	0,93
Liabilitas Jangka Pendek Lainnya (Catatan 19)				
PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk	--	109.000.000.000	--	2,52
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	10.000.000.000	15.900.000.000	0,20	0,37
PT Pelabuhan Indonesia (Persero)	576.334.637	251.621.337	0,01	0,01
Lain-lain	137.669.234	659.655.209	0,00	0,02
Total	10.714.003.871	125.811.276.546	0,21	2,92

**PT ASDP INDONESIA FERRY (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
(Disajikan Dalam Rupiah Penuh, Kecuali Dinyatakan Lain)

	Jumlah		Persentase Terhadap Jumlah Aset/Liabilitas/Pendapatan dan Beban yang Bersangkutan <i>Percentage to Total Assets/Liabilities/Respective Revenue and Expenses</i>	
	2023 Rp	2022 Rp	2023 %	2022 %
Pinjaman Sindikasi (Catatan 21)				
Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (Eximbank)	100.000.000.000	--	3,74	0,00
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	--	146.012.894.668	0,00	5,74
PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero)	--	107.740.564.205	0,00	4,24
PT Bank Raya Indonesia Tbk	--	77.591.007.252	0,00	3,05
Total	100.000.000.000	331.344.466.125	3,74	13,03
Liabilitas Jangka Panjang Lainnya				
PT Pelabuhan Indonesia III (Persero)	1.542.940.176	1.542.940.176	0,06	0,06
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	242.160.000	242.160.000	0,01	0,01
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	45.925.000	45.925.000	0,00	0,00
Lain-lain	30.845.000	--	0,00	--
	1.861.870.176	1.831.025.176	0,07	0,07
Gaji dan Tunjangan				
Dewan Komisaris	12.336.277.440	8.941.730.000	1,10	1,02
Dewan Direksi	17.984.824.128	13.761.000.000	1,60	1,57
	30.321.101.568	22.702.730.000	2,70	2,59
Pendapatan Usaha				
Direktorat Jenderal Perhubungan Darat	391.687.206.749	405.954.197.582	7,95	9,39
PT Asuransi Jasa Indonesia (Persero)	20.132.868.185	2.782.610.344	0,41	0,06
	411.820.074.934	408.736.807.926	8,36	9,45
Pembelian				
PT Pertamina (Persero)	985.909.988.603	853.620.000.186	20,02	19,75
PT Dok dan Perkapalan Kodja Bahari (Persero)	6.093.979.520	8.522.780.428	0,12	0,20
PT Industri Kapal Indonesia (Persero)	6.795.426.731	14.440.261.511	0,14	0,33
	998.799.394.854	876.583.042.125	20,28	20,28

Berdasarkan Perjanjian Pinjam Meminjam No. 066-3/INT/DIRIFPRO/VII/2022 tanggal 26 Juli 2022, IFPRO, entitas anak memperoleh pinjaman maksimum sebesar Rp162.407.805.000 dari PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk dengan rincian fasilitas sebagai berikut:

- Fasilitas Pinjaman Tranche A sebesar Rp109.000.000.000.
- Fasilitas Pinjaman Tranche B sebesar Rp53.407.805.000.

Jangka waktu fasilitas pinjaman ini adalah 12 bulan dan dikenakan suku bunga 8,1% per tahun. Saldo pinjaman IFPRO per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp109.000.000.000.

Hubungan dan jenis akun atau transaksi dengan pihak-pihak berelasi adalah sebagai berikut:

No	Pihak-pihak Berelasi	Hubungan	Jenis Akun atau Transaksi
1	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	Entitas Sepengendali	Kas dan Setara Kas, Piutang Usaha, Utang Bank, Pinjaman Sindikasi
2	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	Entitas Sepengendali	Kas dan Setara Kas
3	PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	Entitas Sepengendali	Kas dan Setara Kas
4	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	Entitas Sepengendali	Kas dan Setara Kas, Utang Usaha
5	PT Bank Raya Indonesia Tbk	Entitas Sepengendali	Kas dan Setara Kas
6	PT Bank Syariah Indonesia Tbk	Entitas Sepengendali	Kas dan Setara Kas
7	KSO IFPRO - ISS	Kerjasama Operasi	Piutang Usaha, Pendapatan Yang Masih Harus Diterima, Utang Usaha
8	PT Jasa Raharja (Persero) Tbk	Entitas Sepengendali	Piutang Usaha, Pendapatan Yang Masih Harus Diterima, Utang Asuransi
9	Kementrian Perhubungan	Entitas Sepengendali	Piutang Usaha, Pendapatan Yang Masih Harus Diterima, Liabilitas Jangka Pendek Lainnya
10	PT Asuransi Jasa Indonesia (Persero)	Entitas Sepengendali	Pendapatan Yang Masih Harus Diterima

**PT ASDP INDONESIA FERRY (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
(Disajikan Dalam Rupiah Penuh, Kecuali Dinyatakan Lain)

No	Pihak-pihak Berelasi	Hubungan	Jenis Akun atau Transaksi
11	PT Jasa Raharja Putera	Entitas Sepengendali	Pendapatan Yang Masih Harus Diterima, Utang Asuransi
12	PT Jembatan Nusantara	Entitas Sepengendali	Pendapatan Yang Masih Harus Diterima
13	Perum DAMRI	Entitas Sepengendali	Pendapatan Yang Masih Harus Diterima
14	PT Pos Indonesia (Persero)	Entitas Sepengendali	Pendapatan Yang Masih Harus Diterima, Utang Usaha
15	PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk	Entitas Sepengendali	Uang Muka, Utang Usaha, Liabilitas Jangka Pendek Lainnya
16	PT Industri Kapal Indonesia (Persero)	Entitas Sepengendali	Uang Muka, Utang Usaha, Pembelian
17	PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero)	Entitas Sepengendali	Pinjaman Sindikasi
18	PT PANN Pembiayaan Maritim (Persero)	Entitas Sepengendali	Utang Pembiayaan
19	PT Pelabuhan Indonesia III (Persero)	Entitas Sepengendali	Utang Lain-lain
20	PT Amarta Karya (Persero)	Entitas Sepengendali	Utang Usaha
21	PT Dok dan Perkapalan Kodja Bahari (Persero)	Entitas Sepengendali	Utang Usaha, Pembelian
22	PT Pelayaran Nasional Indonesia (Pelni)	Entitas Sepengendali	Utang Usaha
23	PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero)	Entitas Sepengendali	Utang Usaha
24	PT Asuransi Jiwa Inhealth Indonesia	Entitas Sepengendali	Utang Usaha
25	PT Surveyor Indonesia	Entitas Sepengendali	Utang Usaha
26	PT Sucofindo (Persero)	Entitas Sepengendali	Utang Usaha
27	PT Pertamina (Persero)	Entitas Sepengendali	Utang Usaha, Pembelian
28	PT Yoda Karya (Persero)	Entitas Sepengendali	Utang Usaha
29	PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero)	Entitas Sepengendali	Utang Usaha
30	Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (Eximba)	Entitas Sepengendali	Pinjaman Sindikasi
31	Direktorat Jenderal Perhubungan Darat	Entitas Sepengendali	Utang Usaha
32	Dewan Komisaris dan Dewan Direksi	Personel Manajemen Kunci	Kompensasi dan Remunerasi

34. Aset Dan Liabilitas Moneter Dalam Mata Uang Asing

Aset	31 Desember 2023		
	Dalam Rupiah	USD	EURO
Bank	618.930.205	39.471	609,46
Aset	31 Desember 2022		
	Dalam Rupiah	USD	EURO
Bank	78.550.583	4.218	729,48

35. Liabilitas Kontinjensi

a) Perkara Perdata antara Perusahaan dengan PT Dian Sentosa

Melalui gugatan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 514/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Pst., PT Dian Sentosa mengajukan gugatan kepada Perusahaan terkait dengan penyelesaian pembayaran atas pekerjaan paketisasi peningkatan fasilitas pelabuhan penyeberangan Merak, Ketapang, Lembar, Kayangan, Sape, dan Batam sebesar Rp23.108.020.000. Berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 2 Juni 2020, Perusahaan berkewajiban untuk menyelesaikan pembayaran tersebut. Atas putusan tersebut, Perusahaan telah mengajukan Memori Banding di Pengadilan Tinggi DKI Jakarta No. 2658/SG/JB pada tanggal 18 Agustus 2021 dan telah mencatat cadangan liabilitas sebesar Rp20.652.170.368 (Catatan 18). Setelah keputusan banding keluar, yaitu menguatkan putusan Pengadilan Negeri, Perusahaan kembali mengajukan permohonan kasasi kepada Mahkamah Agung dengan No. 2839/SG/JB tanggal 14 Juli 2022. Berdasarkan Hasil Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 3170 K/PDT/2023 pada tanggal 13 November 2023, permohonan kasasi yang diajukan oleh Perusahaan ditolak.

**PT ASDP INDONESIA FERRY (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
(Disajikan Dalam Rupiah Penuh, Kecuali Dinyatakan Lain)

b) Perkara Perdata antara Perusahaan dengan PT Infiniti Indosakti

Melalui gugatan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 630/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Pst., PT Infiniti Indosakti mengajukan gugatan kepada Perusahaan terkait dengan Kerjasama Operasi pembangunan dan pengoperasian dermaga IV Merak - Bakauheni senilai Rp111.193.200.000. Berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 7 Desember 2021, Perusahaan berkewajiban untuk mengganti rugi sebesar Rp76.500.000.000. Atas putusan tersebut, Perusahaan telah mendaftarkan banding dengan No. 232/SRT.PDT.BDG/2021/PN.Jkt.Pst Jo.630/PDT.G/2020/PN.Jkt.Pst. pada tanggal 20 Desember 2021, dan telah mengajukan memori banding No. 022/T&P/I22 pada tanggal 25 Januari 2022. Atas pengajuan banding tersebut, telah keluar Hasil Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Pusat No. 699/Pdt/2022/PT DKI tanggal 17 November 2022 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri tanggal 7 Desember 2021. Saat ini Perusahaan telah mengajukan kasasi dengan Akta Permohonan No. 04/Srt.Pdt.Kas/2023/PN.JKT.PST tanggal 12 Januari 2023. Atas pengajuan kasasi tersebut, telah keluar Hasil Putusan Akhir Mahkamah Agung Republik Indonesia berdasarkan Relas No. 2530K/Pdt/2023 Jo. No. 630/PDT.G/2020/PN.Jkt.Pst tanggal 13 Desember 2023 bahwa Perusahaan berkewajiban untuk membayar ganti rugi tersebut. Namun saat ini, Perusahaan masih melakukan upaya hukum atas putusan tersebut (Catatan 39).

c) Perkara Perdata antara Perusahaan dengan PT Graha Fatta

Melalui gugatan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 61/Pdt.G/2021/PN.Jkt.Pst., PT Graha Fatta mengajukan gugatan kepada Perusahaan terkait dengan penyelesaian pembayaran atas pekerjaan pengadaan timbangan kendaraan dinamis (timbangan kategori II) cabang Merak, Bakauheni, Ketapang dan Kupang senilai Rp2.993.991.000 beserta dengan bunga keterlambatan senilai Rp199.759.640. Pada tanggal 6 Januari 2022, telah diputuskan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama bahwa gugatan tersebut tidak dapat diterima. Atas putusan tersebut, PT Graha Fatta mendaftarkan banding dengan No. 277/PDT/2023/PT.DKI dan Perusahaan telah mengajukan kontra memori banding No. 2955/SG/JB pada tanggal 2 Maret 2023 terhadap memori banding PT Graha Fatta tanggal 13 Februari 2023. Atas pengajuan banding tersebut, telah keluar hasil Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 301/Pdt.G/2022/PN.Jkt.Pst. bahwa gugatan tersebut tidak dapat diterima.

d) Perkara Perdata antara Perusahaan dengan PT Persada Gading Elok

Melalui gugatan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 672/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Pst., PT Persada Gading Elok mengajukan gugatan kepada Perusahaan terkait dengan pelanggaran kesepakatan terkait dengan berakhirnya masa sewa pada ruangan di Gedung KTC pada tanggal 2 Maret 2023. Perusahaan digugat perihal masih ditinggalkannya peralatan kantor di Gedung KTC dari Bulan Maret 2023 hingga Bulan Oktober 2023 sehingga berkewajiban untuk mengganti kerugian sejumlah biaya sewa 7 bulan yaitu sebesar Rp8.284.182.865. Hingga saat ini, Perusahaan masih menunggu proses hukum yang sedang berlangsung di Pengadilan Negeri Jakarta.

36. Perjanjian Penting

- a) Berdasarkan Perjanjian Kerjasama Implementasi *Ticketing System Environment* di Lingkungan Pelabuhan Perusahaan No. Sperj.374.HK.102/ASDP-2019 tanggal 4 April 2019 antara Perusahaan dengan PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk (Telkom), disepakati bahwa Telkom menyediakan sistem penjualan tiket elektronik (*software*, *hardware*, dan infrastruktur pendukung) dan meliputi aspek investasi, proses bisnis, teknologi, manajemen proyek, *support maintenance*, komersial, laporan, dan *Service Level Agreement*. Tahap Pembangunan 6 Bulan sejak perjanjian ditandatangani dan tahap pengelolaan selama 60 bulan sejak berita acara penyelesaian pekerjaan (tahap pembangunan selesai).
- b) Berdasarkan Perjanjian Kerjasama Layanan *Payment Gateway Online Ticketing* di lingkungan Perusahaan antara b. Perusahaan dengan PT Finnet Indonesia (FI) No. 163/HK.102/ASDP.2019 tanggal 12 Februari 2019 dan adendumnya No. Sperj.204/HK.102/ASDP-2023 tanggal 12 April 2023, disepakati bahwa Perusahaan berhak menerima pelayanan *payment gateway* dari FI dengan SLA dan berkewajiban menyediakan *hardware* dan *software* yang digunakan sebagai *host*. Perjanjian ini berlaku hingga 14 April 2024.

**PT ASDP INDONESIA FERRY (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir

Pada Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

(Disajikan Dalam Rupiah Penuh, Kecuali Dinyatakan Lain)

- c) Pada tanggal 29 Juli 2022 Perusahaan telah menandatangani pembaharuan perjanjian Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik untuk Angkutan Barang di Laut dengan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan Republik Indonesia (Ditlala) melalui perjanjian No. ADD.10/ASDP/VII/PPK/DITLALA--2022. Perjanjian ini menggantikan perjanjian sebelumnya yaitu No. SPERJ.434.HK/102/ASDP-2021 tanggal 30 Desember 2021. Dalam kontrak baru ini, nilai kontrak yang disepakati adalah sebesar Rp1.069.740.850 dan berlaku mulai tanggal 1 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2022. Sampai dengan tanggal pelaporan keuangan, perpanjangan perjanjian masih dalam proses.
- d) Pada tanggal 28 Desember 2022 Perusahaan telah menandatangani pembaharuan perjanjian Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik untuk Kapal Khusus Ternak Trayek RT-6 Tahun Anggaran 2023 SPERJ.714/HK.102/ASDP-2022 antara Perusahaan dengan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan Republik Indonesia (Ditlala), disepakati bahwa Perusahaan menyelenggarakan angkutan khusus ternak pada trayek tertentu yang telah ditetapkan dalam perjanjian dengan menggunakan kapal milik Ditlala. Perjanjian ini menggantikan perjanjian sebelumnya yaitu No. SPERJ.435.HK/102/ASDP-2021 tanggal 8 Januari 2021. Selanjutnya, berdasarkan Amendemen I perjanjian Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik untuk Kapal Khusus Ternak Trayek RT-6 Tahun Anggaran 2023 tanggal 28 Juni 2023 No. ADD.01/SATKERLALA/RT-6/VI/2023, nilai kontrak perjanjian adalah sebesar Rp9.531.384.219 dan berlaku mulai tanggal 1 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2023. Sampai dengan tanggal pelaporan keuangan, perpanjangan perjanjian masih dalam proses.
- e) Berdasarkan Perjanjian Kerjasama Layanan Reservasi dan *Payment Point* Tiket Kapal Penyebrangan Secara *Host to Host* dengan Mekanisme *Settlement*, Perusahaan dengan PT Mudi Utama Indonesia Tbk (MUI) No. SPERJ.519/HK.102/ASDP-2022 tanggal 27 September 2022, disepakati bahwa MUI akan menyediakan layanan reservasi tiket di gerai Alfamidi kepada para pengguna jasa kapal penyebrangan, dan Perusahaan berkewajiban menyediakan perangkat yang diperlukan untuk penyaluran traffic data tiket di *host*. Perjanjian ini berlaku hingga 27 September 2023. Sampai dengan tanggal pelaporan keuangan, perpanjangan perjanjian masih dalam proses.
- f) Berdasarkan Perjanjian Kerjasama Reservasi dan *Sales Payment* Tiket Kapal Penyebrangan Secara *Host to Host* antara Perusahaan dengan PT Global Tiket Network No. Sperj.892/HK.102/ASDP-2023 tanggal 20 November 2023, disepakati bahwa PT Global Tiket Network menyediakan layanan reservasi tiket melalui Aplikasi Tiket.com kepada para pengguna jasa kapal penyebrangan. Perjanjian ini berlaku hingga 20 November 2024.
- g) Berdasarkan Perjanjian Kerjasama Pengembangan Taman Hiburan (*Theme Park*) pada Kawasan Bakauheni Harbour City antara Perusahaan dengan PT Bunga Lampung Sedjati No. Sperj.245/HK.102/ASDP-2022 tanggal 30 Bulan Mei 2022, Perusahaan menyepakati pendayagunaan aset tanah Perusahaan untuk dimanfaatkan dan dikembangkan melalui kegiatan pembangunan dan pengelolaan serta melakukan Kerja Sama Usaha (KSU) pengembangan *Theme Park* pada Kawasan Bakauheni Harbour City dengan PT Bunga Lampung Sedjati. Perjanjian ini berlaku selama 20 tahun kalender terhitung sejak *Theme Park* mulai beroperasi dengan terbitnya Surat Pemberitahuan Siap Operasional atau paling lambat bulan Mei 2023.

37. Manajemen Risiko Keuangan

a. Kebijakan Manajemen Risiko Keuangan

Dalam menjalankan aktivitas operasi, investasi dan pendanaan, Grup menghadapi risiko keuangan yaitu risiko kredit, risiko likuiditas, risiko mata uang dan risiko suku bunga. Grup mendefinisikan risiko-risiko tersebut sebagai berikut:

- Risiko kredit merupakan risiko yang muncul dikarenakan debitur tidak membayar semua atau sebagian piutang atau tidak membayar secara tepat waktu dan akan menyebabkan kerugian Grup.
- Risiko likuiditas merupakan risiko atas ketidakmampuan Grup membayar liabilitasnya pada saat jatuh tempo. Saat ini Grup berharap dapat membayar semua liabilitas pada saat jatuh tempo.

**PT ASDP INDONESIA FERRY (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
(Disajikan Dalam Rupiah Penuh, Kecuali Dinyatakan Lain)

- Risiko mata uang merupakan risiko fluktuasi nilai instrumen keuangan yang disebabkan perubahan nilai tukar mata uang asing.
- Risiko suku bunga: risiko dimana nilai wajar atau arus kas kontraktual masa datang dari suatu instrumen keuangan akan terpengaruh akibat perubahan suku bunga pasar.

Dalam rangka mengelola risiko keuangan secara efektif, Direksi telah menentukan beberapa pedoman kebijakan pengelolaan risiko keuangan, yang sejalan dengan tujuan Grup. Pedoman utama dari kebijakan ini adalah sebagai berikut:

- Meminimalkan dampak dari perubahan mata uang dan risiko pasar atas semua jenis transaksi dengan menyediakan cadangan mata uang yang cukup;
- Memaksimalkan penggunaan lindung nilai alamiah yang menguntungkan sebanyak mungkin off-setting alami antara pendapatan dan biaya dan utang/pinjaman dan piutang dalam mata uang yang sama; dan
- Semua kegiatan manajemen risiko keuangan dilakukan secara bijaksana, konsisten, dan mengikuti praktik pasar terbaik.

Risiko Kredit

Risiko kredit Grup terutama melekat pada kas dan setara kas, piutang usaha, aset keuangan lancar lainnya, dan aset keuangan tidak lancar lainnya. Grup mengendalikan eksposur risiko kredit dengan menempatkan saldo bank pada institusi keuangan yang layak dan dapat dipercaya. Grup juga membentuk akun penurunan nilai piutang atas piutang usaha yang timbul dari kemungkinan ketidakmampuan pelanggan untuk memenuhi liabilitas kontraktual terhadap Grup. Saat ini, tidak terdapat risiko kredit yang terkonsentrasi secara signifikan.

Pada tanggal pelaporan, eksposur maksimum Grup terhadap risiko kredit adalah sebesar nilai tercatat masing-masing kategori aset keuangan yang disajikan pada laporan posisi keuangan konsolidasian.

	2023 Rp	2022 Rp
Kas dan Setara Kas	1.488.344.956.314	1.341.490.853.172
Piutang Usaha	36.674.930.039	31.836.842.167
Pendapatan yang Masih Harus Diterima	204.763.575.034	75.622.851.676
Aset Keuangan Lancar Lainnya	55.306.553.619	54.531.246.075
Aset Keuangan Tidak Lancar Lainnya	275.526.865.611	277.280.114.349
Total	2.060.616.880.617	1.780.761.907.439

Kualitas Kredit Aset Keuangan

Grup mengelola risiko kredit yang terkait dengan simpanan di bank dan piutang dengan memonitor reputasi, peringkat kredit, dan membatasi risiko agregat dari masing-masing pihak dalam kontrak. Untuk bank, hanya pihak-pihak independen dengan predikat baik yang diterima.

Risiko Likuiditas

Pada saat ini Grup berharap dapat membayar semua liabilitas pada saat jatuh tempo. Untuk memenuhi komitmen kas, Grup berharap kegiatan operasinya dapat menghasilkan arus kas masuk yang cukup.

Grup mengelola risiko likuiditas dengan selalu menjaga dan menyediakan jumlah kas dan setara kas sesuai dengan kebutuhan operasional dan secara rutin mengevaluasi proyeksi arus kas dan arus kas aktual, serta jadwal tanggal jatuh tempo aset dan liabilitas keuangan.

**PT ASDP INDONESIA FERRY (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
(Disajikan Dalam Rupiah Penuh, Kecuali Dinyatakan Lain)

Tabel berikut memperlihatkan liabilitas keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi berdasarkan sisa umur jatuh temponya:

	2023		Total Rp
	Kurang dari 1 Tahun Rp	> 1 Tahun Rp	
Liabilitas Keuangan			
Utang Usaha	408.943.912.831	--	408.943.912.831
Utang Asuransi	26.601.646.067	--	26.601.646.067
Beban Akrua dan Provisi	275.787.731.805	--	275.787.731.805
Liabilitas Jangka Pendek Lainnya	137.545.520.124	--	137.545.520.124
Utang Bank	262.779.222.583	570.612.661.142	833.391.883.725
Liabilitas Keuangan Jangka Panjang Lainnya	--	7.792.751.277	7.792.751.277
Pinjaman Sindikasi	28.200.000.000	654.503.916.666	682.703.916.666
Total	1.139.858.033.410	1.232.909.329.085	2.372.767.362.495

	2022		Total Rp
	Kurang dari 1 Tahun Rp	> 1 Tahun Rp	
Liabilitas Keuangan			
Utang Usaha	305.123.868.195	--	305.123.868.195
Utang Asuransi	23.750.369.602	--	23.750.369.602
Beban Akrua dan Provisi	202.315.116.673	--	202.315.116.673
Liabilitas Jangka Pendek Lainnya	194.561.398.068	--	194.561.398.068
Utang Bank	78.097.349.184	931.193.758.548	1.009.291.107.732
Liabilitas Keuangan Jangka Panjang Lainnya	--	4.665.842.727	4.665.842.727
Pinjaman Sindikasi	24.411.158.400	438.180.293.382	462.591.451.782
Total	828.259.260.122	1.374.039.894.657	2.202.299.154.779

Risiko Suku Bunga

Grup terekspos risiko suku bunga terutama menyangkut liabilitas keuangan. Untuk meminimalkan risiko tingkat suku bunga, Grup mengelola beban bunga dengan melakukan pengawasan terhadap dampak pergerakan suku bunga untuk meminimalisasi dampak negatif terhadap Grup.

Tabel berikut menganalisis rincian liabilitas keuangan berdasarkan jenis bunga:

	2023 Rp	2022 Rp
Bunga Mengambang	1.516.095.800.391	1.491.882.559.514
Tanpa Bunga	856.671.562.104	730.416.595.265
Total	2.372.767.362.495	2.222.299.154.779

Tabel berikut ini menunjukkan sensitivitas kemungkinan perubahan tingkat bunga. Dengan asumsi variabel lain konstan, laba sebelum beban pajak konsolidasian dipengaruhi oleh tingkat suku bunga mengambang sebagai berikut:

	2023 Rp	2022 Rp
Dampak Terhadap Laba Sebelum Pajak Penghasilan		
Perubahan Tingkat Suku Bunga (1%)	(1.159.215.278)	(505.231.068)
Perubahan Tingkat Suku Bunga (-1%)	1.159.215.278	505.231.068

Risiko Mata Uang

Risiko mata uang asing adalah risiko di mana nilai wajar atau arus kas kontraktual masa datang dari suatu instrumen keuangan akan terpengaruh akibat perubahan nilai tukar. Eksposur Grup yang terpengaruh risiko nilai tukar, diungkapkan dalam Catatan 35.

PT ASDP INDONESIA FERRY (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan)
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
(Disajikan Dalam Rupiah Penuh, Kecuali Dinyatakan Lain)

Grup memiliki eksposur dalam mata uang asing yang timbul dari saldo kas dan setara kasnya. Eksposur tersebut timbul karena transaksi yang bersangkutan dilakukan dalam mata uang selain mata uang fungsional.

	2023 Rp	2022 Rp
Dampak Terhadap Laba Sebelum Pajak Penghasilan		
Perubahan Tingkat Pertukaran Terhadap Rupiah (1%)	6.189.302	785.506
Perubahan Tingkat Pertukaran Terhadap Rupiah (-1%)	(6.189.302)	(785.506)

b. Nilai Wajar Instrumen Keuangan

Nilai wajar instrumen keuangan ditentukan melalui analisis arus kas yang didiskonto dengan menggunakan tingkat diskonto yang setara dengan tingkat pengembalian yang berlaku bagi instrumen keuangan yang memiliki syarat dan periode jatuh tempo yang sama.

Tabel di bawah ini menggambarkan nilai tercatat dan nilai wajar dari aset dan liabilitas keuangan:

	2023		2022	
	Nilai Tercatat Rp	Nilai Wajar Rp	Nilai Tercatat Rp	Nilai Wajar Rp
Aset Keuangan				
Kas dan Setara Kas	1.488.344.956.314	1.488.344.956.314	1.341.490.853.172	1.341.490.853.172
Piutang Usaha	36.674.930.039	36.674.930.039	31.836.842.167	31.836.842.167
Pendapatan yang Masih Harus Diterima	204.763.575.034	204.763.575.034	75.622.851.676	75.622.851.676
Aset Keuangan Lancar Lainnya	55.306.553.619	55.306.553.619	54.531.246.075	54.531.246.075
Aset Keuangan Tidak Lancar Lainnya	275.526.865.611	275.526.865.611	277.280.114.349	277.280.114.349
	2.060.616.880.617	2.060.616.880.617	1.780.761.907.439	1.780.761.907.439
Liabilitas Keuangan				
Utang Usaha	408.943.912.831	408.943.912.831	305.123.868.195	305.123.868.195
Utang Asuransi	26.601.646.067	26.601.646.067	23.750.369.602	23.750.369.602
Beban Akruai	275.787.731.805	275.787.731.805	202.315.116.673	202.315.116.673
Liabilitas Jangka Pendek Lainnya	137.545.520.124	137.545.520.124	194.561.398.068	194.561.398.068
Utang Pembiayaan	833.391.883.725	833.391.883.725	--	--
Liabilitas Keuangan Jangka Panjang Lainnya	7.792.751.277	7.792.751.277	4.665.842.727	4.665.842.727
Pinjaman Sindikasi	682.703.916.666	682.703.916.666	462.591.451.782	462.591.451.782
	2.372.767.362.495	2.372.767.362.495	2.202.299.154.779	2.202.299.154.779

c. Manajemen Permodalan

Tujuan Grup dalam mengelola permodalan adalah untuk melindungi kemampuan Grup dalam mempertahankan kelangsungan usaha, sehingga entitas dapat tetap memberikan imbal hasil bagi pemegang saham dan manfaat bagi pemangku kepentingan lainnya serta mengelola struktur modal yang optimal untuk meminimalisasi biaya modal yang efektif serta untuk memaksimalkan nilai Grup.

Dalam mendesain struktur permodalan yang dapat meningkatkan nilai Grup, manajemen dapat melakukannya dengan cara menyesuaikan jumlah dividen, menerbitkan saham baru atau mengurangi maupun menambah jumlah utang.

38. Informasi Tambahan Arus Kas

Transaksi Non-Kas

Informasi pendukung laporan arus kas sehubungan dengan aktivitas yang tidak mempengaruhi arus kas adalah sebagai berikut:

	2023 Rp	2022 Rp
Perolehan Aset Tetap melalui Tambahan Modal Disetor	388.564.810.000	--
Penambahan Aset Hak-Guna melalui Liabilitas Sewa	5.390.301.243	14.867.797.039
Perolehan Aset Tetap melalui Utang Usaha	--	45.570.655.588
Penambahan Utang Pembiayaan melalui Akuisisi Entitas Anak	--	18.892.300.000
Penambahan Liabilitas Jangka Pendek Lainnya melalui Akuisisi Entitas Anak	--	82.000.000.000
Penambahan Utang Bank melalui Akuisisi Entitas Anak	--	549.423.321.930
Penambahan Aset Tetap Melalui Realisasi Uang Muka	--	4.032.727.277
Pembayaran Akuisisi Entitas Anak Melalui Utang Umum	--	48.500.000.000

**PT ASDP INDONESIA FERRY (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
(Disajikan Dalam Rupiah Penuh, Kecuali Dinyatakan Lain)

Rekonsiliasi Liabilitas yang Timbul dari Aktivitas Pendanaan

Tabel dibawah ini menunjukkan rekonsiliasi liabilitas yang timbul dari pendanaan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 sebagai berikut:

	2023					
	Saldo Awal Rp	Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan		Perubahan Transaksi Non Kas		
		Pecairan Rp	Pembayaran Rp	Penyesuaian Rp	Penambahan Rp	Bunga Rp
Pinjaman Sindikasi	462.591.451.782	705.000.000.000	(462.591.451.782)	--	--	--
Liabilitas Sewa	75.152.590.145	--	(35.224.729.903)	(1.445.295.528)	5.390.301.243	4.054.498.733
Liabilitas Jangka Pendek Lainnya - Pihak Berelasi	125.811.276.546	25.324.713.300	(140.421.985.975)	--	--	--
Utang Bank	1.029.291.107.732	--	(195.899.224.007)	--	--	--
						833.391.883.725

	2022					
	Saldo Awal Rp	Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan		Perubahan Transaksi non Kas		
		Penambahan Rp	Pembayaran Rp	Akuisisi Entitas Anak Rp	Penambahan Rp	Bunga Rp
Pinjaman Sindikasi	483.332.533.697	--	(20.741.081.915)	--	--	--
Utang Pembiayaan	7.112.876.402	--	(26.005.176.402)	18.892.300.000	--	--
Liabilitas Sewa	108.181.666.025	--	(53.645.429.851)	--	14.867.797.039	5.748.556.932
Liabilitas Jangka Pendek Lainnya -Pihak Berelasi	123.091.024.560	2.720.251.986	--	--	--	--
Utang Bank	--	600.000.000.000	(120.132.214.198)	549.423.321.930	--	--
						1.029.291.107.732

39. Peristiwa Setelah Periode Pelaporan

Pada 31 Januari 2024, Perusahaan telah menunjuk Jasa Konsultan Hukum Tumbuan dan Partners sebagai kuasa hukum Perusahaan dalam melakukan upaya hukum pengajuan Peninjauan Kembali (PK) atas Putusan Mahkamah Agung No. 2530 K/Pdt/2023 tanggal 19 Oktober 2023 (Catatan 35.b).

Selain itu Perusahaan juga melakukan internal *legal opinion* terkait upaya hukum PK perkara antara Perusahaan melawan PT Infiniti Indosakti berdasarkan dokumen divisi hukum tanggal 28 Februari 2024.

Legal opinion berisi selain penunjukan kuasa hukum, juga berisi alasan-alasan permohonan PK yang diajukan oleh Perusahaan sesuai ketentuan Pasal 67 Undang-undang RI Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung, serta permohonan PK yang terdiri atas keberatan berupa kekhilafan hakim dan kekeliruan yang nyata dalam putusan tingkat pertama, banding dan kasasi serta adanya bukti surat yang bersifat menentukan yang pada waktu perkara diperiksa belum ditemukan/diajukan (*novum*).

40. Standar Akuntansi dan Interpretasi Standar yang Telah Disahkan Namun Belum Berlaku Efektif

DSAK-IAI telah menerbitkan beberapa standar baru, amendemen dan penyesuaian atas standar, serta interpretasi atas standar namun belum berlaku efektif untuk periode yang dimulai pada 1 Januari 2023.

Amendemen atas standar yang berlaku efektif untuk periode yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2024, dengan penerapan dini diperkenankan yaitu:

- Amendemen PSAK 1: Penyajian Laporan Keuangan tentang Liabilitas Jangka Panjang Dengan Kovenan;
- Amendemen PSAK 73: Liabilitas Sewa Dalam Jual dan Sewa-Balik;
- Amendemen PSAK 2: Laporan Arus Kas dan PSAK 60: Instrumen Keuangan: Pengungkapan tentang pengaturan pembiayaan pemasok;
- Revisi PSAK 101: Penyajian Laporan Keuangan Syariah; dan
- Revisi PSAK 109: Akuntansi Zakat, Infak, dan Sedekah.

Standar baru dan amendemen atas standar yang berlaku efektif untuk periode yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2025, dengan penerapan dini diperkenankan yaitu:

- PSAK 74: Kontrak Asuransi;
- Amendemen PSAK 74: Kontrak Asuransi tentang Penerapan Awal PSAK 74 dan PSAK 71 – Informasi Komparatif.
- Amendemen PSAK 10: Pengaruh Perubahan Kurs Valuta Asing tentang kekurangan ketertukaran.

**PT ASDP INDONESIA FERRY (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
(Disajikan Dalam Rupiah Penuh, Kecuali Dinyatakan Lain)

Beberapa PSAK juga diamendemen yang merupakan amendemen konsekuensial karena berlakunya PSAK 74: Kontrak Asuransi, yaitu:

- PSAK 1: Penyajian Laporan Keuangan
- PSAK 2: Laporan Arus Kas
- PSAK 13: Properti Investasi
- PSAK 15: Investasi pada Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama
- PSAK 16: Aset Tetap
- PSAK 19: Aset Takberwujud
- PSAK 22: Kombinasi Bisnis
- PSAK 24: Imbalan Kerja
- PSAK 48: Penurunan Nilai Aset
- PSAK 50: Instrumen Keuangan Penyajian
- PSAK 57: Provisi, Liabilitas Kontijensi dan Aset Kontijensi
- PSAK 58: Aset Tidak Lancar yang Dikuasai untuk Dijual dan Operasi yang Dihentikan
- PSAK 60: Instrumen Keuangan: Pengungkapan
- PSAK 71: Instrumen Keuangan
- PSAK 72: Pendapatan dari Kontrak dengan Pelanggan

Hingga tanggal laporan keuangan ini diotorisasi, Grup masih melakukan evaluasi atas dampak potensial dari penerapan standar baru, amendemen standar dan interpretasi standar tersebut.

DSAK-IAI juga mengesahkan perubahan penomoran PSAK dan ISAK yang berlaku efektif 1 Januari 2024, dimana perubahan ini tidak memengaruhi substansi pengaturan dalam masing-masing PSAK dan ISAK tersebut.

41. Informasi Keuangan Tersendiri Perusahaan

Informasi keuangan Perusahaan (entitas induk) terlampir, yang terdiri dari laporan posisi keuangan tanggal 31 Desember 2023, serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan ekuitas, dan laporan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, dan suatu ikhtisar kebijakan akuntansi signifikan dan informasi penjelasan lainnya (secara kolektif disebut sebagai "Informasi Keuangan Entitas Induk") yang disajikan sebagai informasi tambahan terhadap laporan keuangan konsolidasian, disajikan untuk tujuan analisis tambahan dan bukan merupakan bagian dari laporan keuangan konsolidasian yang diharuskan menurut Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Informasi Keuangan Entitas Induk merupakan tanggung jawab manajemen serta dihasilkan dari dan berkaitan secara langsung dengan catatan akuntansi dan catatan lainnya yang mendasarinya yang digunakan untuk menyusun laporan keuangan konsolidasian.

42. Tanggung Jawab Manajemen Atas Laporan Keuangan Konsolidasian

Manajemen Grup bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan konsolidasian yang diotorisasi Dewan Direksi untuk diterbitkan pada tanggal 28 Februari 2024.

PT ASDP INDONESIA FERRY (PERSERO)
ENTITAS INDUK

LAPORAN POSISI KEUANGAN

Pada Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

(Disajikan Dalam Rupiah Penuh, Kecuali Dinyatakan Lain)

	2023 Rp	2022 Rp
ASET		
ASET LANCAR		
Kas dan Setara Kas	1.376.102.084.033	1.273.043.173.559
Piutang Usaha		
Pihak Berelasi	8.396.197.097	6.364.538.012
Pihak Ketiga	21.934.802.554	16.504.336.236
Aset Keuangan Lancar Lainnya	174.418.207.341	284.274.319.718
Pendapatan yang Masih Harus Diterima	246.788.258.776	80.436.576.477
Persediaan	70.917.672.363	59.844.073.801
Uang Muka dan Biaya Dibayar di Muka	26.942.960.657	25.152.757.991
Jumlah Aset Lancar	1.925.500.182.821	1.745.619.775.794
ASET TIDAK LANCAR		
Aset Keuangan Tidak Lancar Lainnya	275.352.740.611	277.089.120.295
Uang Muka dan Biaya Dibayar di Muka Jangka Panjang	455.810.635	488.175.884
Investasi Saham pada Entitas Anak	1.421.133.985.889	1.421.133.985.889
Properti Investasi	158.957.300.000	130.248.600.000
Aset Tetap	5.767.325.877.890	4.930.331.714.185
Aset Hak-Guna	42.345.554.601	72.083.784.163
Aset Takberwujud	19.639.221.917	16.637.401.444
Jumlah Aset Tidak Lancar	7.685.210.491.543	6.848.012.781.860
JUMLAH ASET	9.610.710.674.364	8.593.632.557.654

PT ASDP INDONESIA FERRY (PERSERO)
ENTITAS INDUK
LAPORAN POSISI KEUANGAN (Lanjutan)
 Pada Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
 (Disajikan Dalam Rupiah Penuh, Kecuali Dinyatakan Lain)

	2023 Rp	2022 Rp
LIABILITAS JANGKA PENDEK		
Utang Usaha		
Pihak Berelasi	43.539.804.240	51.715.183.765
Pihak Ketiga	291.501.142.387	160.626.571.607
Utang Pajak	31.110.324.191	30.388.190.015
Utang Asuransi	26.148.907.241	23.518.163.072
Beban Akrua	252.447.941.796	184.038.056.016
Liabilitas Jangka Pendek Lainnya	117.985.050.349	52.710.874.594
Bagian Liabilitas Jangka Panjang yang Jatuh Tempo dalam Satu Tahun:		
Liabilitas Sewa	34.328.277.760	36.873.863.583
Utang Bank	150.000.000.000	—
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek	947.061.447.964	539.870.902.652
LIABILITAS JANGKA PANJANG		
Liabilitas Jangka Panjang - Setelah Dikurangi		
Bagian Yang Jatuh Tempo Dalam Satu Tahun:		
Utang Bank	375.000.000.000	600.000.000.000
Liabilitas Sewa	7.548.666.070	33.923.555.105
Liabilitas Keuangan Jangka Panjang Lainnya	5.295.825.993	1.686.798.199
Liabilitas Imbalan Pascakerja	138.589.250.944	139.426.788.252
Liabilitas Pajak Tangguhan	18.612.471.968	16.943.050.023
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang	545.046.214.975	791.980.191.579
JUMLAH LIABILITAS	1.492.107.662.939	1.331.851.094.231
EKUITAS		
Modal Saham	5.173.195.000.000	5.173.195.000.000
Tambahan Modal Disetor	397.010.172.065	8.445.362.065
Saldo Laba		
Telah Ditentukan Penggunaannya	1.831.026.929.440	1.368.261.856.102
Belum Ditentukan Penggunaannya	717.370.909.920	711.879.245.256
JUMLAH EKUITAS	8.118.603.011.425	7.261.781.463.423
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS	9.610.710.674.364	8.593.632.557.654

PT ASDP INDONESIA FERRY (PERSERO)
ENTITAS INDUK
LAPORAN LABA RUGI DAN
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
 Pada Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
 (Disajikan Dalam Rupiah Penuh, Kecuali Dinyatakan Lain)

	2023	2022
	Rp	Rp
PENDAPATAN USAHA	4.238.410.628.403	3.799.797.903.298
BEBAN POKOK PENDAPATAN	(2.806.118.436.628)	(2.525.888.471.672)
LABA USAHA	1.432.292.191.775	1.273.909.431.626
BEBAN USAHA		
Beban Administrasi dan Umum	(1.025.770.329.541)	(799.944.103.212)
Pendapatan Lain-lain - Neto	201.917.682.503	52.645.036.580
LABA SEBELUM PAJAK	608.439.544.737	526.610.364.994
BEBAN PAJAK		
Pajak Kini	(27.116.987.480)	(25.720.141.700)
Pajak Tangguhan	(3.956.629.353)	(7.730.002.245)
Jumlah Beban Pajak	(31.073.616.833)	(33.450.143.945)
LABA TAHUN BERJALAN	577.365.927.904	493.160.221.049
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN		
Pengukuran Kembali Liabilitas Imbalan Pasti	(10.396.397.310)	(25.648.960.369)
Pajak Penghasilan Terkait	2.287.207.408	2.163.162.071
Jumlah Penghasilan Komprehensif Lain	(8.109.189.902)	(23.485.798.298)
JUMLAH LABA KOMPREHENSIF	569.256.738.002	469.674.422.751

PT ASDP INDONESIA FERRY (PERSERO)
ENTITAS INDUK
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
(Disajikan Dalam Rupiah Penuh, Kecuali Dinyatakan Lain)

	Modal Ditempatkan Dan Disetor Rp	Tambahkan Modal Disetor Rp	Bantuan Pemerintah Yang Belum Ditetapkan Statusnya (BPYBDS) Rp	Saldo Laba		Jumlah Ekuitas Rp
				Telah Ditetapkan Penggunaannya Rp	Belum Ditetapkan Penggunaannya Rp	
PER 31 DESEMBER 2021	5.173.195.000.000	8.445.362.065	-	1.042.809.239.338	567.657.439.269	6.792.107.040.672
Tambahan Modal Disetor	--	--	--	--	--	--
Cadangan Umum	--	--	--	325.452.616.764	(325.452.616.764)	--
Labarugi Tahun Berjalan	--	--	--	493.160.221.049	493.160.221.049	493.160.221.049
Penghasilan Komprehensif Lain	--	--	--	(23.485.798.298)	(23.485.798.298)	(23.485.798.298)
PER 31 DESEMBER 2022	5.173.195.000.000	8.445.362.065	--	1.368.261.856.102	711.879.245.256	7.261.781.463.423
Tambahan Modal Disetor	--	388.564.810.000	--	--	--	388.564.810.000
Cadangan Umum	--	--	--	462.765.073.338	(462.765.073.338)	--
Dividen Tunai	--	--	--	--	(101.000.000.000)	(101.000.000.000)
Labarugi Tahun Berjalan	--	--	--	577.365.927.904	577.365.927.904	577.365.927.904
Penghasilan Komprehensif Lain	--	--	--	(8.109.189.902)	(8.109.189.902)	(8.109.189.902)
PER 31 DESEMBER 2023	5.173.195.000.000	397.010.172.065	--	1.831.026.929.440	717.370.909.920	8.118.603.011.425

PT ASDP INDONESIA FERRY (PERSERO)
ENTITAS INDUK

LAPORAN ARUS KAS

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir

Pada Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

(Disajikan Dalam Rupiah Penuh, Kecuali Dinyatakan Lain)

	2023 Rp	2022 Rp
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI		
Penerimaan dari Pelanggan	4.027.231.069.936	3.807.000.629.775
Pembayaran Kas Kepada Pemasok	(1.042.757.805.964)	(1.808.634.133.910)
Pembayaran Kepada Karyawan	(1.038.781.101.174)	(1.028.967.575.732)
Pembayaran Beban Usaha	(517.835.364.726)	(301.271.172.348)
Penerimaan Lain-lain	88.037.576.526	(37.018.976.091)
Pembayaran Bunga Pinjaman	(38.650.694.605)	(29.438.446.856)
Penerimaan Bunga	75.303.049.787	60.041.863.837
Pembayaran Pajak Penghasilan	(77.600.585.038)	(62.055.045.258)
Kas Bersih Diperoleh dari Aktivitas Operasi	1.474.946.144.742	599.657.143.417
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI		
Penambahan Jaminan Usaha	19.964.753.750	20.003.560.497
Pembayaran Jaminan Usaha	(24.185.383.497)	(41.222.580.474)
Perolehan Aset Tetap	(1.150.293.520.284)	(425.444.940.580)
Perolehan Aset Takberwujud	(7.988.807.838)	(6.208.427.968)
Pembayaran Akuisisi Entitas Anak	--	(1.223.500.000.000)
Kas Bersih Digunakan untuk Aktivitas Investasi	(1.162.502.957.869)	(1.676.372.388.525)
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN		
Pembayaran Utang Pembiayaan	--	(7.112.876.402)
Pembayaran Liabilitas Sewa	(33.384.276.399)	(53.484.829.851)
Penerimaan Pinjaman Bank	--	600.000.000.000
Pembayaran Pinjaman Bank	(75.000.000.000)	--
Pembayaran Dividen	(101.000.000.000)	--
Kas Bersih (Digunakan untuk) Diperoleh dari Aktivitas Pendanaan	(209.384.276.399)	539.402.293.747
PENURUNAN BERSIH KAS DAN SETARA KAS	103.058.910.474	(537.312.951.361)
KAS DAN SETARA KAS AWAL TAHUN	1.273.043.173.559	1.810.356.124.920
KAS DAN SETARA KAS AKHIR TAHUN	1.376.102.084.033	1.273.043.173.559

PT ASDP INDONESIA FERRY (PERSERO)
ENTITAS INDUK

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir

Pada Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

(Disajikan Dalam Rupiah Penuh, Kecuali Dinyatakan Lain)

1. Ikhtisar Kebijakan Akuntansi Penting

Dasar Penyusunan Laporan Keuangan Tersendiri - Entitas Induk

Laporan keuangan tersendiri entitas induk disusun sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan ("PSAK") 4 (Revisi 2013), "Laporan Keuangan Tersendiri".

PSAK 4 (Revisi 2013) mengatur dalam hal entitas menyajikan laporan keuangan tersendiri maka laporan tersebut hanya dapat disajikan sebagai informasi tambahan dalam laporan keuangan konsolidasian. Laporan keuangan tersendiri adalah laporan keuangan yang disajikan oleh entitas induk yang mencatat investasi pada entitas anak, entitas asosiasi, dan ventura bersama berdasarkan biaya perolehan atau sesuai PSAK 71: "Instrumen Keuangan".

Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam penyusunan laporan keuangan tersendiri entitas induk adalah sama dengan kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasian sebagaimana diungkapkan dalam Catatan 2 atas laporan keuangan konsolidasian, kecuali untuk penyertaan pada entitas anak.

2. Daftar Investasi

Entitas Anak	Kegiatan Usaha Utama	Lokasi Domisili	Tahun Beroperasi Komersil	Persentase Kepemilikan Langsung %	Biaya Perolehan Rp
PT Indonesia Ferry Properti	Perdagangan Umum dan Real Estat	Jakarta	2017	51	1.421.133.985.889
PT Jembatan Nusantara	Pelayaran	Surabaya	2022	99.99	1.272.000.000.000

3. Metode Pencatatan Investasi

Investasi pada entitas anak sebagaimana disebutkan dalam laporan keuangan entitas induk dicatat menggunakan metode biaya perolehan.

Halaman ini sengaja dikosongkan.
This page is intentionally left blank.

Halaman ini sengaja dikosongkan.
This page is intentionally left blank.



2023

LAPORAN TAHUNAN ANNUAL REPORT

PT ASDP INDONESIA FERRY (PERSERO)

Gedung ASDP Indonesia Ferry
Jl. Jend. Achmad Yani, Kav. 52 A
Cempaka Putih Timur, Jakarta 10510

Tel : +62(21) 4208911 -13 -15

Fax : +62(21) 4210544

Email : os@indonesiaferry.co.id



2023

LAPORAN TAHUNAN
ANNUAL REPORT

PT ASDP INDONESIA FERRY (PERSERO)

Gedung ASDP Indonesia Ferry
Jl. Dend. Achmad Yani, Kav. 52 A
Gempaka Putih Timur, Jakarta 10510

Telp. : +62 (0) 21 22000111-13 / 15

Fax : +62 21 4710244

Email : keuangan@asdp.co.id